



Kabupaten
Gorontalo Utara



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD 2025-2029



Thariq Modanggu
Bupati Gorontalo Utara



Nurjana H. Yusuf
Wakil Bupati Gorontalo Utara

Gorontalo Utara **BERCAHAYA**
(Berdaya-Sinergis, CERIA, Berbudaya)



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 277);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara dengan berpedoman pada RPJP Nasional;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Gorontalo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun 2045;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta mengacu pada RPJM Daerah Provinsi;
5. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
7. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Gorontalo; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengendalian dan evaluasi Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di kwandang

Pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Suleman Lakoro, the Secretary of the Region.

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan proses berkesinambungan dan terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera sesuai amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang sistematis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara komprehensif berdasarkan jangka waktu yang diperlukan sesuai prioritas dan sasaran pembangunan.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyusun RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2029. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan tujuan nasional secara terpadu, berkesinambungan, representatif dan akuntabel serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah tahunan yang merupakan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 284

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir setelah mendapatkan masukan dari proses Musrenbang, pembahasan bersama DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, serta berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Gorontalo melalui Bappeda Provinsi Gorontalo.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta telah memperhatikan dan selaras dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya: RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2044, RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, sekaligus telah diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Diharapkan dokumen ini bermanfaat untuk dijadikan pedoman bersama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, dan rencana pembangunan sektoral lainnya, sehingga terwujud sinergi pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi-Misi Pembangunan jangka panjang sebagai bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

Demikian dokumen ini disusun. Masukan, kritik, dan saran diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depan, semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara. Semoga Allah SWT melindungi kita semua untuk memberikan yang terbaik melalui kerja ikhlas dan cerdas demi pembangunan yang lebih baik. Amin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo Utara, Desember 2025
Bupati Gorontalo Utara,

TTD

Thariq Modanggu



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR FOTO.....	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	BAB 1-1
1.1 Latar Belakang	BAB 1-1
1.2 Dasar Hukum	BAB 1-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	BAB 1-12
1.4 Maksud dan Tujuan	BAB 1-15
1.5 Sistematika Dokumen	BAB 1-16
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB 2-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	BAB 2-1
2.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara	BAB 2-1
2.1.2 Aspek Geografis dan Demografis	BAB 2-7
2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	BAB 2-7
2.1.2.2 Topografi Daerah	BAB 2-11
2.1.2.3 Klimatologi	BAB 2-13
2.1.2.4 Kondisi Tanah	BAB 2-14
2.1.2.5 Hidrologi.....	BAB 2-15
2.1.2.6 Geologi	BAB 2-17
2.1.2.7 Penggunaan Lahan	BAB 2-18
2.1.2.8 Potensi Pengembangan Wilayah.....	BAB 2-28
2.1.2.9 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.....	BAB 2-70
2.1.2.10 Berketahanan Energi, Air, dan Ketahanan Pangan	BAB 2-83
2.1.2.10.1 Ketahanan Pangan.....	BAB 2-83
2.1.2.10.2 Ketahanan Energi	BAB 2-92
2.1.2.10.3 Ketahanan Air	BAB 2-97
2.1.2.11Lingkungan Hidup Berkualitas	BAB 2-101
2.1.2.11.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	BAB 2-101
2.1.2.11.2 Cakupan Layanan Sampah	BAB 2-103
2.1.2.11.3 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan serta Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BAB 2-106
2.1.2.11.4 Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.....	BAB 2-107



2.1.2.11.5	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	BAB 2-108
2.1.2.11.5.1	Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air	BAB 2-108
2.1.2.11.5.2	Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan...	BAB 2-112
2.1.2.12	Demografi	BAB 2-113
2.1.2.12.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	BAB 2-115
2.1.2.12.2	Struktur Penduduk.....	BAB 2-116
2.1.2.12.3	Distribusi Penduduk	BAB 2-119
2.1.2.12.4	Dinamika Penduduk	BAB 2-121
2.1.2.12.5	Penduduk Menurut Kepercayaan	BAB 2-127
2.1.2.12.6	Penduduk Menurut Pendidikan	BAB 2-128
2.1.2.12.7	Masyarakat Adat.....	BAB 2-129
2.1.2.12.8	Analisis Proyeksi Penduduk	BAB 2-130
2.1.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	BAB 2-135
2.1.3.1	Kesejahteraan Ekonomi	BAB 2-136
2.1.3.1.1	Laju Pertumbuhan PDRB.....	BAB 2-136
2.1.3.1.2	PDRB dan Pengeluaran Per Kapita	BAB 2-144
2.1.3.1.3	Analisis Sektor Unggulan Daerah.....	BAB 2-147
2.1.3.1.4	Kemiskinan Daerah	BAB 2-156
2.1.3.1.5	Rasio Gini.....	BAB 2-165
2.1.3.1.6	Indeks Pembangunan Manusia	BAB 2-168
2.1.3.1.7	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	BAB 2-172
2.1.3.1.8	Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan.....	BAB 2-174
2.1.3.1.9	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	BAB 2-182
2.1.3.2	Kesehatan untuk Semua	BAB 2-183
2.1.3.2.1	Indeks Keluarga Sehat	BAB 2-183
2.1.3.2.2	Umur Harapan Hidup	BAB 2-185
2.1.3.2.3	Status Gizi Balita	BAB 2-186
2.1.3.2.4	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI).....	BAB 2-190
2.1.3.2.5	Desa Siaga Aktif.....	BAB 2-194
2.1.3.2.6	Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.....	BAB 2-195
2.1.3.2.7	Angka Kematian Bayi dan Balita	BAB 2-196
2.1.3.2.8	Angka Kematian Ibu	BAB 2-198
2.1.3.2.9	Angka Morbiditas	BAB 2-199
2.1.3.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	BAB 2-200
2.1.3.3.1	Rata-rata dan Harapan Lama Sekolah	BAB 2-200
2.1.3.3.2	Indeks Pendidikan	BAB 2-201
2.1.3.3.3	Angka Literasi dan Numerasi.....	BAB 2-202
2.1.3.3.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	BAB 2-206
2.1.3.3.5	Indeks Literasi Digital.....	BAB 2-207



2.1.3.3.6	Indeks Tingkat Kegemaran Membaca	BAB 2-210
2.1.3.3.7	Angka Partisipasi Kasar (APK)	BAB 2-211
2.1.3.3.8	Angka Partisipasi Murni (APM)	BAB 2-213
2.1.3.3.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	BAB 2-214
2.1.3.3.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang PAUD	BAB 2-216
2.1.3.3.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	BAB 2-217
2.1.3.3.12	Angka Putus Sekolah	BAB 2-217
2.1.3.3.13	Ketersediaan Sekolah Pendidikan Kesetaraan	BAB 2-220
2.1.3.3.14	Rasio Guru dan Murid	BAB 2-221
2.1.3.3.15	Rasio Ketersediaan Sekolah	BAB 2-223
2.1.3.3.16	Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi “B”	BAB 2-226
2.1.3.3.17	Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi “A”	BAB 2-226
2.1.3.3.18	Status Guru Tersertifikasi	BAB 2-227
2.1.3.3.19	Proporsi Guru PAUD Berkualifikasi S1/D4	BAB 2-228
2.1.3.3.20	Proporsi Guru SD/SMP Berkualifikasi Minimal S1/D4	BAB 2-228
2.1.3.3.21	Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Sekolah Jenjang SD	BAB 2-229
2.1.3.3.22	Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMP	BAB 2-230
2.1.3.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	BAB 2-231
2.1.3.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan	BAB 2-231
2.1.3.4.2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	BAB 2-234
2.1.3.4.3	PMKS Penerima Bantuan	BAB 2-235
2.1.3.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	BAB 2-239
2.1.3.5.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	BAB 2-239
2.1.3.5.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	BAB 2-240
2.1.3.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	BAB 2-243
2.1.3.6.1	Indeks Gender (Pemberdayaan, Pembangunan, dan Ketimpangan Gender)	BAB 2-243
2.1.3.6.2	Indeks Kualitas Keluarga	BAB 2-246
2.1.3.6.3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	BAB 2-248
2.1.3.6.4	Angkatan Kerja dan Partisipasi Kerja Perempuan	BAB 2-249
2.1.3.6.5	Pengeluaran Per Kapita Perempuan	BAB 2-252
2.1.3.6.6	Latar Belakang Pendidikan PNS Perempuan	BAB 2-252
2.1.3.6.7	Kekerasan Perempuan dan Anak dan Pernikahan di Bawah Umur	BAB 2-257
2.1.3.6.8	Perlindungan Anak	BAB 2-257

2.1.3.6.9	Indeks Pembangunan Keluarga	BAB 2-258
2.1.3.6.10	Indeks Pembangunan Pemuda	BAB 2-259
2.1.3.6.11	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	BAB 2-263
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	BAB 2-265
2.1.4.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	BAB 2-265
2.1.4.1.1	Angka Ketergantungan	BAB 2-265
2.1.4.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	BAB 2-266
2.1.4.2.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	BAB 2-267
2.1.4.2.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	BAB 2-267
2.1.4.2.3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	BAB 2-268
2.1.4.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	BAB 2-269
2.1.4.2.5	Indeks Inovasi Daerah	BAB 2-270
2.1.4.2.6	Rasio Kewirausahaan	BAB 2-271
2.1.4.2.7	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	BAB 2-273
2.1.4.2.8	Proporsi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	BAB 2-274
2.1.4.2.9	Proporsi Industri Mikro Kecil Gorontalo Utara terhadap Provinsi	BAB 2-275
2.1.4.2.10	Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap PDRB Provinsi Gorontalo	BAB 2-276
2.1.4.2.11	<i>Return on Assets</i> BUMD	BAB 2-277
2.1.4.2.12	Indeks Pembangunan Statistik	BAB 2-279
2.1.4.2.13	Penggunaan Teknologi Digital oleh Petani	BAB 2-280
2.1.4.2.14	Pengguna Internet oleh Rumah Tangga	BAB 2-281
2.1.4.2.15	Indeks Daya Saing Digital	BAB 2-282
2.1.4.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	BAB 2-284
2.1.4.3.1	Indeks Ekonomi Hijau	BAB 2-284
2.1.4.3.2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	BAB 2-285
2.1.4.3.3	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	BAB 2-286
2.1.4.4	Transformasi Digital	BAB 2-287
2.1.4.4.1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	BAB 2-287
2.1.4.4.2	Indeks Masyarakat Digital	BAB 2-289
2.1.4.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	BAB 2-291
2.1.4.5.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	BAB 2-291
2.1.4.5.2	Ekspor Barang dan Jasa	BAB 2-292
2.1.4.5.3	Nilai Investasi	BAB 2-292
2.1.4.6	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	BAB 2-295



2.1.4.6.1	Persentase Desa Mandiri	BAB 2-295
2.1.4.6.2	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	BAB 2-296
2.1.4.6.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	BAB 2-297
2.1.4.6.4	Kemantapan Jalan	BAB 2-298
2.1.4.6.5	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	BAB 2-299
2.1.4.7	Stabilitas Ekonomi Makro.....	BAB 2-301
2.1.4.7.1	Tingkat Inflasi	BAB 2-301
2.1.4.7.2	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.....	BAB 2-302
2.1.5	Aspek Pelayanan Umum.....	BAB 2-305
2.1.5.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	BAB 2-306
2.1.5.1.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	BAB 2-306
2.1.5.1.2	Indeks Pelayanan Publik	BAB 2-307
2.1.5.1.3	Indeks Reformasi Hukum.....	BAB 2-309
2.1.5.1.4	Indeks Integritas Nasional.....	BAB 2-310
2.1.5.1.5	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui <i>Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK</i>	BAB 2-311
2.1.5.1.6	Indeks Sistem Merit	BAB 2-312
2.1.5.1.7	Indeks Profesionalitas ASN	BAB 2-314
2.1.5.1.8	Indeks Reformasi Birokrasi.....	BAB 2-315
2.1.5.1.9	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BAB 2-320
2.1.5.1.10	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	BAB 2-321
2.1.5.1.11	Maturitas Pengadaan Barang dan Jasa	BAB 2-322
3.1.5.1.11	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	BAB 2-323
2.1.5.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	BAB 2-324
2.1.5.2.1	Indeks Demokrasi Indonesia	BAB 2-324
2.1.5.2.2	Indeks Rasa Aman/Indeks Kriminalitas.....	BAB 2-326
2.1.5.2.3	Kabupaten/Kota Peduli HAM	BAB 2-327
2.1.5.2.4	Persentase Penegakan Perda.....	BAB 2-328
2.1.5.2.5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	BAB 2-328
2.1.5.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	BAB 2-330
2.1.5.3.1	Indeks Daya Saing Daerah.....	BAB 2-330
2.1.5.3.2	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	BAB 2-332
2.1.5.4	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	BAB 2-333
2.1.5.4.1	Urusan Pendidikan	BAB 2-333
2.1.5.4.2	Urusan Kesehatan	BAB 2-335
2.1.5.4.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	BAB 2-337



2.1.5.4.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	BAB 2–341
2.1.5.4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	BAB 2–342
2.1.5.4.6	Urusan Sosial	BAB 2–344
2.1.5.4.7	Urusan Tenaga Kerja	BAB 2–345
2.1.5.4.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	BAB 2–347
2.1.5.4.9	Urusan Pangan	BAB 2–348
2.1.5.4.10	Urusan Pertanahan.....	BAB 2–348
2.1.5.4.11	Urusan Lingkungan Hidup	BAB 2–349
2.1.5.4.12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	BAB 2–350
2.1.5.4.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BAB 2–350
2.1.5.4.14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	BAB 2–351
2.1.5.4.15	Urusan Perhubungan	BAB 2–351
2.1.5.4.16	Urusan Komunikasi dan Informatika	BAB 2–352
2.1.5.4.17	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	BAB 2–353
2.1.5.4.18	Urusan Penanaman Modal.....	BAB 2–354
2.1.5.4.19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	BAB 2–355
2.1.5.4.20	Urusan Statistik	BAB 2–356
2.1.5.4.21	Urusan Persandian	BAB 2–356
2.1.5.4.22	Urusan Kebudayaan	BAB 2–357
2.1.5.4.23	Urusan Perpustakaan	BAB 2–358
2.1.5.4.24	Urusan Kearsipan	BAB 2–358
2.1.5.4.25	Urusan Kelautan Perikanan.....	BAB 2–359
2.1.5.4.26	Urusan Pariwisata	BAB 2–359
2.1.5.4.27	Urusan Pertanian.....	BAB 2–360
2.1.5.4.28	Urusan Energi Sumber Daya Mineral.....	BAB 2–360
2.1.5.4.29	Urusan Perdagangan	BAB 2–361
2.1.5.4.30	Urusan Perindustrian.....	BAB 2–361
2.1.5.4.31	Urusan Transmigrasi.....	BAB 2–362
2.1.5.4.32	Penunjang Urusan	BAB 2–363
2.2	INOVASI DAERAH	BAB 2–364
2.3	STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	BAB 2–371
2.4	KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BAB 2–375
2.5	BADAN USAHA MILIK DAERAH.....	BAB 2–377
2.6	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN	BAB 2–379
2.7	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	BAB 2–385
2.7.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	BAB 2–386



2.7.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	BAB 2-386
2.7.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAB 2-388
2.7.1.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah	BAB 2-391
2.7.1.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	BAB 2-393
2.7.1.1.4 Neraca Daerah	BAB 2-395
2.7.1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	BAB 2-400
2.7.1.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	BAB 2-400
2.7.1.2.2 Analisis Pembiayaan.....	BAB 2-401
2.7.1.3 Kerangka Pendanaan	BAB 2-402
2.7.1.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	BAB 2-402
2.7.1.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030	BAB 2-403
2.8 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	BAB 2-413
2.8.1 Permasalahan.....	BAB 2-414
2.8.1.1 Permasalahan Aspek Geografis dan Demografis	BAB 2-414
2.8.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	BAB 2-415
2.8.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah.....	BAB 2-418
2.8.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum	BAB 2-420
2.8.2 Isu Strategis	BAB 2-421
2.8.2.1 Isu Strategis Global.....	BAB 2-421
2.8.2.1.1 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	BAB 2-421
2.8.2.2 Isu Strategis Nasional pada RPJMN 2025-2029.....	BAB 2-424
2.8.2.3 Isu Strategis Regional.....	BAB 2-432
2.8.2.3.1 Isu Strategis dan Potensi Wilayah Sulawesi	BAB 2-432
2.8.2.3.2 Isu Strategis Provinsi Gorontalo	BAB 2-434
2.8.2.4 Isu Strategis Kabupaten Gorontalo Utara	BAB 2-435
2.8.2.4.1 Telaah Isu Lingkungan KLHS RPJMD 2025-2045	BAB 2-435
2.8.2.4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJPD 2025-2045 ...	BAB 2-436
2.8.2.4.3 Telaahan Isu Pembangunan dalam RTRW Gorontalo Utara.....	BAB 2-436
2.8.2.4.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD 2025-2029	BAB 2-436
BAB III : VISI-MISI & PROGRAM PRIORITAS DAERAH	BAB 3-1
2.1 VISI DAN MISI	BAB 3-1
3.1.1 Visi Misi Presiden-Wakil Presiden RI 2025-2029.....	BAB 3-1
3.1.2 Visi Misi Gubernur-Wakil Gubernur Gorontalo 2025-2029	BAB 3-3
3.1.3 Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara 2025-2029	BAB 3-4
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	BAB 3-10
3.3 PROGRAM UNGGULAN DAERAH	BAB 3-20
3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	BAB 3-46
3.5 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH.....	BAB 3-151

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH	BAB 4-1
4.1. Program Perangkat Daerah	BAB 4-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	BAB 4-3
BAB V : PENTUP	BAB 5-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	BAB 5-1
5.2. Pedoman Transisi	BAB 5-3



DAFTAR TABEL



Tabel 2.1 Kecamatan yang Dirinci Menurut Luas Wilayah dan Jumlah Desa	BAB 2–8
Tabel 2.2 Nama Pulau dan Koordinat	BAB 2–10
Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Koordinat Kecamatan	BAB 2–11
Tabel 2.4 Luasan Kemiringan Lereng.....	BAB 2–12
Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Kelembaban, dan Temperatur Udara Menurut Bulan Tahun 2022.....	BAB 2–14
Tabel 2.6 DAS di Gorontalo Utara Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 dan Luasannya	BAB 2–17
Tabel 2.7 Formasi Batuan.....	BAB 2–18
Tabel 2.8 Luas Penutup/Penggunaan Lahan.....	BAB 2–20
Tabel 2.9 Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya	BAB 2–21
Tabel 2.10 Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung.....	BAB 2–24
Tabel 2.11 Luas Kawasan Hutan (Ha).....	BAB 2–25
Tabel 2.12 Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022	BAB 2–26
Tabel 2.13 Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 (Ha)	BAB 2–26
Tabel 2.14 Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2019-2023 (Hektar)	BAB 2–35
Tabel 2.15 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Gorontalo Tahun 2021	BAB 2–39
Tabel 2.16 Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Ladang, serta Jagung	BAB 2–40
Tabel 2.17 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Tahun 2022-2024	BAB 2–41
Tabel 2.18 Produksi Tanaman Hortikultura	BAB 2–41
Tabel 2.19 Luas Panen dan Produksi Kelapa Dalam.....	BAB 2–42
Tabel 2.20 Luas Panen dan Produksi Kakao	BAB 2–43
Tabel 2.21 Luas Panen dan Produksi Cengkeh	BAB 2–44
Tabel 2.22 Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor) Tahun 2024 ...	BAB 2–46
Tabel 2.23 Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan	BAB 2–47
Tabel 2.24 Produksi Daging/Kilogram.....	BAB 2–49
Tabel 2.25 Produksi Telur (Kg).....	BAB 2–50
Tabel 2.26 Estimasi Potensi, Volume Tangkap yang Diperbolehkan, dan Pemanfaatan WPP 716	BAB 2–52
Tabel 2.27 Data Produksi Perikanan	BAB 2–53
Tabel 2.28 Produksi Perikanan Tangkap per Komoditas	BAB 2–54
Tabel 2.29 Penyebaran Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya	BAB 2–55
Tabel 2.30 Produksi Perikanan Budidaya per Komoditas.....	BAB 2–56
Tabel 2.31 Klasifikasi Jenis Daya Tarik Wisata (DTW)	BAB 2–61

Tabel 2.32 Jenis Bencana Alam dan Intensitasnya	BAB 2-73
Tabel 2.33 Intensitas Bencana Alam Banjir per Kecamatan.....	BAB 2-74
Tabel 2.34 Luasan Ancaman Banjir	BAB 2-74
Tabel 2.35 Desa Tangguh Bencana, Pembentukan, dan Jenis Ancaman	BAB 2-77
Tabel 2.36 Lokasi Pemasangan Rambu Peringatan Bencana Tahun 2022	BAB 2-79
Tabel 2.37 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).....	BAB 2-79
Tabel 2.38 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.....	BAB 2-80
Tabel 2.39 Komponen IRB Gorontalo Utara	BAB 2-81
Tabel 2.40 Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Gorontalo	BAB 2-82
Tabel 2.41 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Gorontalo Utara	BAB 2-85
Tabel 2.42 Ketersediaan Pangan Utama.....	BAB 2-85
Tabel 2.43 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Gorontalo (%)	BAB 2-86
Tabel 2.44 Cadangan Pangan	BAB 2-87
Tabel 2.45 Skor Pola Pangan Harapan.....	BAB 2-87
Tabel 2.46 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Kkal/Hari)	BAB 2-89
Tabel 2.47 Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Gram/Hari)	BAB 2-90
Tabel 2.48 Kategori Daerah Rawan Pangan	BAB 2-91
Tabel 2.49 Jumlah Desa Rawan dan Aman Pangan per Kecamatan	BAB 2-92
Tabel 2.50 Daya Terpasang, Produksi, Distribusi Listrik PLN, dan Konsumsi Per Kapita.....	BAB 2-95
Tabel 2.51 Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan	BAB 2-95
Tabel 2.52 <i>Intake</i> Air Baku di Gorontalo Utara	BAB 2-99
Tabel 2.53 Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	BAB 2-99
Tabel 2.54 Komposisi Sumber Air Minum Layak.....	BAB 2-100
Tabel 2.55 Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum Layak	BAB 2-100
Tabel 2.56 Sebaran Penduduk Berakses Air Minum Layak Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024	BAB 2-100
Tabel 2.57 Air Minum Layak Berdasarkan Tipe Daerah (%)	BAB 2-101
Tabel 2.58 Titik Pemantauan Kualitas Air.....	BAB 2-102
Tabel 2.59 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	BAB 2-103
Tabel 2.60 Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani.....	BAB 2-105
Tabel 2.61 TPS per Satuan Penduduk.....	BAB 2-105
Table 2.62 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan.....	BAB 2-106
Tabel 2.63 Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	BAB 2-107
Tabel 2.64 Kegiatan yang Diawasi dalam Pemantauan Lingkungan	BAB 2-108
Tabel 2.65 Distribusi Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di	

Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020	BAB 2-109
Tabel 2.66 Distribusi Persentase Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020	BAB 2-109
Tabel 2.67 Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020	BAB 2-110
Tabel 2.68 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Provinsi Gorontalo.....	BAB 2-111
Tabel 2.69 Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Air	BAB 2-111
Tabel 2.70 Status Daya Dukung Air Indikatif	BAB 2-112
Tabel 2.71 Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Gorontalo.....	BAB 2-113
Tabel 2.72 Populasi Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	BAB 2-116
Tabel 2.73 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Gorontalo Utara	BAB 2-119
Tabel 2.74 Kepadatan Penduduk	BAB 2-120
Tabel 2.75 Penduduk Menurut Kepercayaan di Gorontalo Utara Tahun 2024	BAB 2-127
Tabel 2.76 Penduduk Menurut Kepercayaan di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	BAB 2-127
Tabel 2.77 Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan.....	BAB 2-128
Tabel 2.78 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk.....	BAB 2-132
Tabel 2.79 Nominal Pendapatan Domestik Regional Bruto	BAB 2-137
Tabel 2.80 PDRB ADHB Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)	BAB 2-138
Tabel 2.81 PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)	BAB 2-138
Tabel 2.82 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)	BAB 2-139
Tabel 2.83 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)	BAB 2-140
Tabel 2.84 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)	BAB 2-141
Tabel 2.85 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)	BAB 2-142
Tabel 2.86 PDRB Per Kapita Gorontalo Utara.....	BAB 2-145
Tabel 2.87 Analisis LQ Gorontalo Utara.....	BAB 2-148
Tabel 2.88 Analisis DLQ Gorontalo Utara	BAB 2-149
Tabel 2.89 Analisis <i>Shift-share</i> Gorontalo Utara	BAB 2-152
Tabel 2.90 Analisis <i>Klassen Typology</i> Gorontalo Utara	BAB 2-154
Tabel 2.91 <i>Overlay</i> Analisis Sektor Unggulan di Gorontalo Utara	BAB 2-155
Tabel 2.92 Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024	BAB 2-161
Tabel 2.93 Persentase Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin- Tidak Miskin	BAB 2-162
Tabel 2.94 Persentase Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga	BAB 2-163
Tabel 2.95 Jumlah dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Gorontalo	BAB 2-164
Tabel 2.96 Indeks Gini Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional	BAB 2-166
Tabel 2.97 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota	



dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo	BAB 2-170
Tabel 2.98 Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.....	BAB 2-170
Tabel 2.99 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	BAB 2-173
Tabel 2.100 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka.....	BAB 2-175
Tabel 2.101 TPAK dan TPT Menurut Gender	BAB 2-176
Tabel 2.102 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Ditamatkan dan Status Pekerjaan Tahun 2024.....	BAB 2-177
Tabel 2.103 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024	BAB 2-178
Tabel 2.104 Angkatan Kerja di Gorontalo Utara	BAB 2-179
Tabel 2.105 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Tahun 2024	BAB 2-180
Tabel 2.106 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2-182
Tabel 2.107 Capaian 12 Indikator Keluarga Sehat.....	BAB 2-184
Tabel 2.108 Capaian Kluster IKS Per Kecamatan Tahun 2024.....	BAB 2-185
Tabel 2.109 Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb/U, Tb/U, dan Bb/Tb Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2024.....	BAB 2-190
Tabel 2.110 Sebaran Bayi dengan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2024	BAB 2-192
Tabel 2.111 Capaian <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	BAB 2-193
Tabel 2.112 Cakupan Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Menurut Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2023/2024	BAB 2-193
Tabel 2.113 Cakupan Desa Siaga Aktif	BAB 2-195
Tabel 2.114 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir.....	BAB 2-200
Tabel 2.115 Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	BAB 2-204
Tabel 2.116 Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	BAB 2-205
Tabel 2.117 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023/2024.....	BAB 2-206
Tabel 2.118 Provinsi 15 Besar ILD Tahun 2021 dan 2022	BAB 2-209
Tabel 2.119 Indeks Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024.....	BAB 2-211
Tabel 2.120 Cakupan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini	BAB 2-216
Tabel 2.121 APS Pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun	BAB 2-217
Tabel 2.122 Angka Putus Sekolah	BAB 2-219
Tabel 2.123 Partisipasi Sekolah Per Kelompok Umur Menurut Jenis	

Gender Tahun 2024	BAB 2-219
Tabel 2.124 Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024	BAB 2-220
Tabel 2.125 Rasio Guru dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2024/2025	BAB 2-222
Tabel 2.126 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025.....	BAB 2-225
Tabel 2.127 Kondisi Ruang Kelas	BAB 2-225
Tabel 2.128 Cakupan Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B	BAB 2-226
Tabel 2.129 Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi “A”	BAB 2-227
Tabel 2.130 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1/D4	BAB 2-228
Tabel 2.131 Guru yang Memenuhi Kualifikasi Jenjang Sarjana	BAB 2-229
Tabel 2.132 Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah Jenjang Sekolah Dasar	BAB 2-230
Tabel 2.133 Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah Jenjang SMP.....	BAB 2-230
Tabel 2.134 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan Tahun 2024	BAB 2-233
Tabel 2.135 Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek.....	BAB 2-234
Tabel 2.136 Cakupan Kepesertaan Program Jamsostek Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.....	BAB 2-234
Tabel 2.137 PMKS Penerima Bantuan Sosial	BAB 2-235
Tabel 2.138 Penerima BPNT, BST, BLPD, dan PKH	BAB 2-236
Tabel 2.139 Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	BAB 2-237
Tabel 2.140 Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal/ Informal	BAB 2-239
Tabel 2.141 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2-244
Tabel 2.142 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2-244
Tabel 2.143 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2-245
Tabel 2.144 Indikator, Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Gorontalo	BAB 2-247
Tabel 2.145 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	BAB 2-250
Tabel 2.146 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	BAB 2-252
Tabel 2.147 ASN Perempuan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	BAB 2-253
Tabel 2.148 Kejadian Kekerasan pada Perempuan dan Anak	BAB 2-255
Tabel 2.149 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan	

Anak dari Kekerasan	BAB 2-256
Tabel 2.150 Peristiwa Nikah di Bawah Umur	BAB 2-257
Tabel 2.151 IPA, IPKA, IPHA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	
Tahun 2023	BAB 2-258
Tabel 2.152 Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo	BAB 2-262
Tabel 2.153 Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo	
(lanjutan)	BAB 2-262
Tabel 2.154 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	BAB 2-263
Tabel 2.155 Skor Dimensi Indeks Pembangunan Berwawasan	
Kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi	
Gorontalo Tahun 2024	BAB 2-264
Tabel 2.156 Nilai Sektor Ekonomi Kreatif (Estimasi) Gorontalo	
Utara dan Proporsinya	BAB 2-268
Tabel 2.157 Dimensi Gender pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Gorontalo Utara	BAB 2-270
Tabel 2.158 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi	
Gorontalo	BAB 2-271
Tabel 2.159 Entitas Industri Mikro Kecil dan Serapan Tenaga Kerja	
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.....	BAB 2-275
Tabel 2.160 <i>Return on Assets</i> (RoA) PUDAM Tirta Gerbang Emas	BAB 2-277
Tabel 2.161 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain	
Gorontalo Utara	BAB 2-279
Tabel 2.162 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas	
Menurut Penggunaan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir di	
Gorontalo Utara	BAB 2-282
Tabel 2.163 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK Gorontalo Utara dan	
Pertumbuhannya.....	BAB 2-291
Tabel 2.164 Realisasi dan Rencana Investasi Kabupaten Gorontalo Utara ...	BAB 2-294
Tabel 2.165 Status Desa dan Persentasenya Berdasarkan IDM dan ID	
Gorontalo Utara	BAB 2-295
Tabel 2.166 Komponen Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan	
Gorontalo Utara	BAB 2-297
Tabel 2.167 Kondisi Kemantapan Jalan Gorontalo Utara.....	BAB 2-299
Tabel 2.168 Indeks SPBE Gorontalo Utara.....	BAB 2-306
Tabel 2.169 Komponen Indeks SPBE Gorontalo Utara	BAB 2-307
Tabel 2.170 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi	
Gorontalo	BAB 2-308
Tabel 2.171 Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi	
Gorontalo	BAB 2-309

Tabel 2.172 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2–309
Tabel 2.173 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCP) Pemda di Provinsi Gorontalo	BAB 2–311
Tabel 2.174 Indeks Sistem Merit Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023	BAB 2–313
Tabel 2.175 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	BAB 2–315
Tabel 2.176 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2–316
Tabel 2.177 Indeks Demokrasi di Provinsi Gorontalo Menurut Aspek	BAB 2–325
Tabel 2.178 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Tahun 2024	BAB 2–326
Tabel 2.179 Penegakan Peraturan Daerah.....	BAB 2–328
Tabel 2.180 Cakupan Petugas Linmas di Gorontalo Utara	BAB 2–329
Tabel 2.181 Cakupan Satpol PP di Gorontalo Utara	BAB 2–329
Tabel 2.182 Cakupan Penyelesaian Bencana Kebakaran di Gorontalo Utara	BAB 2–329
Tabel 2.183 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	BAB 2–331
Tabel 2.184 IKK Urusan Pendidikan di Gorontalo Utara	BAB 2–333
Tabel 2.185 IKK Urusan Kesehatan di Gorontalo Utara.....	BAB 2–335
Tabel 2.186 IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Gorontalo Utara	BAB 2–337
Tabel 2.187 IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Gorontalo Utara.....	BAB 2–341
Tabel 2.188 IKK Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Gorontalo Utara	BAB 2–342
Tabel 2.189 IKK Urusan Sosial di Gorontalo Utara	BAB 2–344
Tabel 2.190 IKK Urusan Tenaga Kerja di Gorontalo Utara	BAB 2–345
Tabel 2.191 IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara	BAB 2–347
Tabel 2.192 IKK Urusan Pangan di Gorontalo Utara	BAB 2–348
Tabel 2.193 IKK Urusan Pertanahan di Gorontalo Utara	BAB 2–348
Tabel 2.194 IKK Urusan Lingkungan Hidup di Gorontalo Utara	BAB 2–349
Tabel 2.195 IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Gorontalo Utara	BAB 2–350

Tabel 2.196 IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Gorontalo Utara	BAB 2-350
Tabel 2.197 IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Gorontalo Utara	BAB 2-351
Tabel 2.198 IKK Urusan Perhubungan di Gorontalo Utara	BAB 2-351
Tabel 2.199 IKK Urusan Komunikasi dan Informatika di Gorontalo Utara	BAB 2-352
Tabel 2.200 IKK Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Gorontalo Utara	BAB 2-353
Tabel 2.201 IKK Urusan Penanaman Modal di Gorontalo Utara	BAB 2-354
Tabel 2.202 IKK Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Gorontalo Utara	BAB 2-355
Tabel 2.203 IKK Urusan Statistik di Gorontalo Utara	BAB 2-356
Tabel 2.204 IKK Urusan Persandian di Gorontalo Utara	BAB 2-356
Tabel 2.205 IKK Urusan Kebudayaan di Gorontalo Utara	BAB 2-357
Tabel 2.206 IKK Urusan Perpustakaan di Gorontalo Utara	BAB 2-358
Tabel 2.207 IKK Urusan Kearsipan di Gorontalo Utara	BAB 2-358
Tabel 2.208 IKK Urusan Kelautan Perikanan di Gorontalo Utara	BAB 2-359
Tabel 2.209 IKK Urusan Pariwisata di Gorontalo Utara	BAB 2-359
Tabel 2.210 IKK Urusan Pertanian di Gorontalo Utara	BAB 2-360
Tabel 2.211 IKK Urusan Energi Sumber Daya Mineral di Gorontalo Utara	BAB 2-360
Tabel 2.212 IKK Urusan Perdagangan di Gorontalo Utara	BAB 2-361
Tabel 2.213 IKK Urusan Perindustrian di Gorontalo Utara	BAB 2-361
Tabel 2.214 IKK Urusan Transmigrasi di Gorontalo Utara	BAB 2-362
Tabel 2.215 IKK Penunjang Urusan di Gorontalo Utara	BAB 2-363
Tabel 2.216 SPM Bidang Pendidikan	BAB 2-373
Tabel 2.217 SPM Bidang Kesehatan	BAB 2-374
Tabel 2.218 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB 2-374
Tabel 2.219 SPM Bidang Perumahan dan Permukiman	BAB 2-374
Tabel 2.220 SPM Bidang Trantibumlinmas	BAB 2-375
Tabel 2.221 SPM Bidang Sosial	BAB 2-375
Tabel 2.222 Kerjasama Daerah <i>On-going</i> dan Baru	BAB 2-376
Tabel 2.223 Indikasi Intervensi Pembangunan dan Sumber Pendanaan	BAB 2-384
Tabel 2.224 Realisasi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	BAB 2-387
Tabel 2.225 Ringkasan Realisasi APBD Pendapatan Daerah	BAB 2-389
Tabel 2.226 Persentase Sumber Pendapatan Daerah	BAB 2-389
Tabel 2.227 Ringkasan Realisasi APBD Belanja Daerah	BAB 2-391
Tabel 2.228 Komposisi Realisasi Alokasi Belanja Daerah	BAB 2-392
Tabel 2.229 Realisasi Pembiayaan Daerah	BAB 2-394
Tabel 2.230 Neraca Keuangan Tahun 2020-2024	BAB 2-396
Tabel 2.231 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Daerah	BAB 2-398
Tabel 2.232 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	BAB 2-400



Tabel 2.233 Surplus/Defisit Riil Anggaran.....	BAB 2-401
Tabel 2.234 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran.....	BAB 2-401
Tabel 2.235 Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	BAB 2-402
Tabel 2.236 Proyeksi Pendapatan Daerah	BAB 2-409
Tabel 2.237 Proyeksi Belanja Daerah	BAB 2-410
Tabel 2.238 Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	BAB 2-411
Tabel 2.239 Proyeksi APBD	BAB 2-413
Tabel 3.1 Sasaran Visi Gorontalo Utara Tahun 2045	BAB 3-8
Tabel 3.2 Target Sasaran Visi RPJPD 2025-2045 Periode	BAB 3-9
Tabel 3.3 Persandingan Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi RPJMD 2025-2029	BAB 3-10
Tabel 3.4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD 2025-2029	BAB 3-11
Tabel 3.5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Daerah 2025-2030	BAB 3-12
Tabel 3.6 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah.....	BAB 3-44
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Misi I	BAB 3-54
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Misi II	BAB 3-55
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Misi III	BAB 3-55
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Misi IV	BAB 3-56
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Misi V	BAB 3-57
Tabel 3.12 Program Prioritas	BAB 3-59
Tabel 3.12 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	BAB 3-145
Tabel 3.13 Tema Pembangunan.....	BAB 3-145
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah	BAB 4-5
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama	BAB 4-74
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah	BAB 4-75



DAFTAR GRAFIK



Grafik 2.1 Nilai Per Prioritas IKD Gorontalo Utara Tahun 2023	BAB 2–82
Grafik 2.2 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari (Kkal/Hari)	BAB 2–89
Grafik 2.3 Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari (Gram/Hari)	BAB 2–90
Grafik 2.4 Massa Sampah di Sumber Sampah Tahun 2024 (Kg)	BAB 2–104
Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020–2024	BAB 2–115
Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Disdukcapil	BAB 2–116
Grafik 2.7 Piramida Penduduk Tahun 2023 dan 2024 dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2024	BAB 2–117
Grafik 2.8 Komposisi Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan	BAB 2–120
Grafik 2.9 Tren TFR Gorontalo Utara	BAB 2–122
Grafik 2.10 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (ASFR)	BAB 2–123
Grafik 2.11 Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi	BAB 2–124
Grafik 2.12 Proporsi Penduduk Berstatus Migran Risen Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi	BAB 2–126
Grafik 2.13 Angka Kematian Bayi	BAB 2–126
Grafik 2.14 Proyeksi Populasi Penduduk 2025–2030 (Ribuan Jiwa)	BAB 2–131
Grafik 2.15 Proyeksi Piramida Penduduk 2020–2035 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)	BAB 2–133
Grafik 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (Persen)	BAB 2–144
Grafik 2.17 Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	BAB 2–146
Grafik 2.18 Garis Kemiskinan Tahun 2010–2024 (Rupiah)	BAB 2–157
Grafik 2.19 Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)	BAB 2–158
Grafik 2.20 Angka Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)	BAB 2–159
Grafik 2.21 Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen)	BAB 2–176
Grafik 2.22 TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	BAB 2–177
Grafik 2.23 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Persen)	BAB 2–179
Grafik 2.24 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Persen)	BAB 2–181
Grafik 2.25 Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal	BAB 2–182
Grafik 2.26 Indeks Keluarga Sehat	BAB 2–183



Grafik 2.27 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2023/2024	BAB 2-184
Grafik 2.28 Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI/SKI dan Hasil Gelar Timbang.....	BAB 2-187
Grafik 2.29 ASI Eksklusif di Gorontalo Utara (Persen)	BAB 2-189
Grafik 2.30 Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2011-2024 (%)	BAB 2-191
Grafik 2.31 Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	BAB 2-195
Grafik 2.32 Jumlah dan Angka Kematian Bayi	BAB 2-197
Grafik 2.33 Jumlah dan Angka Kematian Balita	BAB 2-197
Grafik 2.34 Angka dan Jumlah Kematian Ibu.....	BAB 2-199
Grafik 2.35 Indeks Pendidikan Gorontalo Utara	BAB 2-201
Grafik 2.36 Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dan 2024	BAB 2-202
Grafik 2.37 Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SD.....	BAB 2-204
Grafik 2.38 Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SMP	BAB 2-205
Grafik 2.39 ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021	BAB 2-209
Grafik 2.40 ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022	BAB 2-210
Grafik 2.41 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2024	BAB 2-212
Grafik 2.42 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2024	BAB 2-213
Grafik 2.43 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2024	BAB 2-216
Grafik 2.44 Tren Rasio Guru-Murid	BAB 2-221
Grafik 2.45 Guru Tersertifikasi Tahun 2023.....	BAB 2-227
Grafik 2.46 Peserta Jamkesda (Jiwa)	BAB 2-231
Grafik 2.47 Alokasi Anggaran Jamkesda (Miliaran Rupiah)	BAB 2-233
Grafik 2.48 Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima.....	BAB 2-236
Grafik 2.49 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo	BAB 2-240
Grafik 2.50 Dimensi Pembentuk IKUB Provinsi Gorontalo	BAB 2-240
Grafik 2.51 Capaian IPK Provinsi Gorontalo dan Nasional.....	BAB 2-241
Grafik 2.52 PK Per Dimensi Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2023.....	BAB 2-242
Grafik 2.53 Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen).....	BAB 2-249
Grafik 2.54 Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen).....	BAB 2-251
Grafik 2.55 IPA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2-258
Grafik 2.56 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	BAB 2-259



Grafik 2.57 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo.....	BAB 2-260
Grafik 2.58 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Industri Pengolahan (%) di PDRB Gorontalo Utara	BAB 2-267
Grafik 2.59 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%) di PDRB Gorontalo Utara	BAB 2-267
Grafik 2.60 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Gorontalo Utara (%)	BAB 2-270
Grafik 2.61 Indeks Kemandirian Fiskal Gorontalo Utara (%)	BAB 2-273
Grafik 2.62 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di PDRB Gorontalo Utara (%).....	BAB 2-274
Grafik 2.63 Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo (%).....	BAB 2-277
Grafik 2.64 Penggunaan Teknologi Digital pada Entitas Petani di Gorontalo Utara	BAB 2-281
Grafik 2.65 Persebaran Skor Indeks Daya Saing Digital Provinsi Gorontalo) ..	BAB 2-283
Grafik 2.66 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Gorontalo & Komponen Pembentuknya	BAB 2-284
Grafik 2.67 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Gorontalo dan Nasional, dan Komponen Pembentuknya	BAB 2-288
Grafik 2.68 IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2022	BAB 2-290
Grafik 2.69 IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2023	BAB 2-290
Grafik 2.70 IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2024	BAB 2-290
Grafik 2.71 Nilai Dimensi IPKT Sumalata 2024.....	BAB 2-301
Grafik 2.72 Laju Inflasi (YoY) di Kota Gorontalo dan Nasional Tahun 2014 -2024 (Persen)	BAB 2-303
Grafik 2.73 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Gorontalo Utara (%).....	BAB 2-305
Grafik 2.74 Indeks Integritas Nasional Gorontalo Utara	BAB 2-311
Grafik 2.75 Indeks Sistem Merit Gorontalo Utara	BAB 2-313
Grafik 2.76 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Gorontalo Utara	BAB 2-314
Grafik 2.77 Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.....	BAB 2-323
Grafik 2.78 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023.....	BAB 2-325
Grafik 2.79 Skor Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024	BAB 2-328
Grafik 2.80 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	BAB 2-332
Grafik 2.81 Capaian SPM Gorontalo Utara	BAB 2-372
Grafik 2.82 Capaian SPM Per Bidang.....	BAB 2-372
Grafik 2.83 Capaian SPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	BAB 2-373
Grafik 2.84 Skenario Target Pendapatan Daerah pada APBD 2025-2030 (Miliar Rupiah).....	BAB 2-405
Grafik 2.85 Skenario Proyeksi Belanja Daerah pada APBD 2025-2030	

(Miliar Rupiah).....	BAB 2–405
Grafik 2.86 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (%)	BAB 2–423
Grafik 2.87 <i>Total Factor Productivity Index</i> 2010-2022 (2020=1,0)	BAB 2–425
Grafik 2.88 Perbedaan Kondisi KBI dan KTI Tahun 2019-2024.....	BAB 2–432

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen	BAB 1–13
Gambar 1.2 Sinkronisasi Perencanaan Spasial Pusat dan Daerah	BAB 1–14
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Menurut Inmendagri 2/2025	BAB 1–14
Gambar 2.1 Peta dan Batas Administrasi	BAB 2–9
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Wilayah	BAB 2–12
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng	BAB 2–13
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah	BAB 2–14
Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Gorontalo	BAB 2–15
Gambar 2.6 Peta Ketersediaan Air Tanah	BAB 2–15
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai	BAB 2–16
Gambar 2.8 Peta Geologi	BAB 2–18
Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019	BAB 2–20
Gambar 2.10 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya	BAB 2–22
Gambar 2.11 Peta Kawasan Strategis	BAB 2–23
Gambar 2.12 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung	BAB 2–24
Gambar 2.13 Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara	BAB 2–29
Gambar 2.14 Arah Kemampuan Lahan Pengembangan Wilayah	BAB 2–31
Gambar 2.15 Historis dan Proyeksi Penggunaan Lahan Tahun 2013-2040	BAB 2–36
Gambar 2.16 Peta Kawasan Hutan	BAB 2–39
Gambar 2.17 Wilayah Potensi Perikanan Tangkap WPP 716	BAB 2–51
Gambar 2.18 Rencana Pola Ruang Gorontalo Utara	BAB 2–68
Gambar 2.19 Satuan Kemampuan Lahan Potensi Bencana Alam	BAB 2–72
Gambar 2.20 Peta Rawan Bencana Banjir	BAB 2–75
Gambar 2.21 Peta Rawan Bencana Longsor	BAB 2–76
Gambar 2.22 Peta Rawan Bencana	BAB 2–76
Gambar 2.23 Kuadran Analisis LQ DLQ Gorontalo Utara	BAB 2–150
Gambar 2.24 Kuadran Analisis <i>Klassen Typology</i> Gorontalo Utara	BAB 2–155
Gambar 2.25 Angka Absolut (Dalam Ribuan) dan Persentase Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Tahun 2023	BAB 2–158
Gambar 2.26 Persentase Klasifikasi Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Gorontalo Tahun 2022	BAB 2–164
Gambar 2.27 Ketimpangan Pengeluaran Tahun 2024	BAB 2–167
Gambar 2.28 IPLM Kabupaten/Kota Tahun 2023/2024 di Provinsi Gorontalo	BAB 2–207
Gambar 2.29 <i>Dashboard</i> OSS Gorontalo Utara	BAB 2–272
Gambar 2.30 KSP Terintegrasi Anggrek	BAB 2–381

Gambar 2.31 KSP Pariwisata Minanga	BAB 2–382
Gambar 3.1 Linieritas Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program	BAB 3–10
Gambar 3.2 <i>Logic Model</i>	BAB 3–43

DAFTAR FOTO



Foto 2.1 Spanduk dukungan pemekaran dibentangkan di Senayan, Jakarta.....	BAB 2-6
Foto 2.2 Musyawarah Besar II untuk menghimpun aspirasi rakyat pasca pemekaran.....	BAB 2-6
Foto 2.3 Peresmian pembentukan Gorontalo Utara dan pelantikan Penjabat Bupati oleh Mendagri ad interim.....	BAB 2-7
Foto 2.4 The Big Five Destinations di Gorontalo Utara.....	BAB 2-60



Bab

1

Pendahuluan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi instrumen untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari berbagai regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan RPJMD sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengamanatkan Kepala Daerah terpilih untuk menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misinya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 27 dan Pasal 42 yang mengatur mekanisme penyusunan RPJMD. Sebagai panduan teknis terkini, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dilantik secara definitif pada tanggal 19 Juni 2025 untuk masa jabatan periode 2025-2029. Pelantikan ini menandai dimulainya periode pemerintahan yang akan mengemban tanggung jawab melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah. Masa bakti Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ini menjadi kerangka waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi dan pertimbangan strategis yang mendasari. Pertama, pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah menghasilkan berbagai capaian pembangunan yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti, dimana evaluasi terhadap capaian, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan periode 2025-2029. Kedua, perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah, dimana dinamika ini meliputi perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, transisi demografi, pergeseran ekonomi global, serta berbagai isu strategis lainnya yang menuntut adaptasi dan antisipasi dalam perencanaan pembangunan. Ketiga, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi geografis strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan, namun di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang perlu diselesaikan secara sistematis dan terukur seperti kesenjangan pembangunan antarwilayah, kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing ekonomi daerah. Keempat, aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipasi publik, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah, menjadi masukan penting dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. RPJMD menjadi dokumen acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode 2025-2029, sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Sebagai instrumen koordinasi dan sinergi, RPJMD berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan antarperangkat daerah, antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. RPJMD juga menjadi basis penyusunan dokumen perencanaan turunan yaitu Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan, sehingga terdapat keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Lebih lanjut, RPJMD merupakan dokumen kontrak politik antara Kepala Daerah dengan masyarakat yang menjadi dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian pembangunan daerah. Secara hierarkis, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran pelaksanaan Sasaran Pokok dari RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045, khususnya pada periode pertama dari empat periode RPJMD yang mengusung agenda penguatan modal dasar pembangunan.

Proses penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025 melalui pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan akuntabel. Penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan RPJMD pendekatan teknokratik sebagai bahan masukan bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum pemilihan. Setelah pelantikan Kepala Daerah pada tanggal 19 Juni 2025, dilakukan proses penyempurnaan dan harmonisasi dokumen RPJMD dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui serangkaian forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), *focus group discussion* (FGD), serta koordinasi intensif dengan perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Pendekatan partisipatif ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang aspiratif, realistis, dan dapat

diimplementasikan secara efektif. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan harapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat diselesaikan sebelum akhir masa pembahasan APBD Tahun 2026, sehingga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 sudah terencana dengan baik dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan semangat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dokumen ini menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Gorontalo Utara untuk bekerja secara sinergis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Melalui implementasi RPJMD yang konsisten dan terukur, diharapkan dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan penguatan daya saing daerah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464); telah dicabut sebagian, diubah sebagian, dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
36. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
49. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di

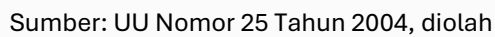
- Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
50. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
 54. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2);
 55. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 183);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten

- Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 209);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 277);
59. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 501);
60. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor: SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/4379A/SJ, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
61. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ/Tahun 2023 tentang Penyelerasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW;
62. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasn Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
63. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

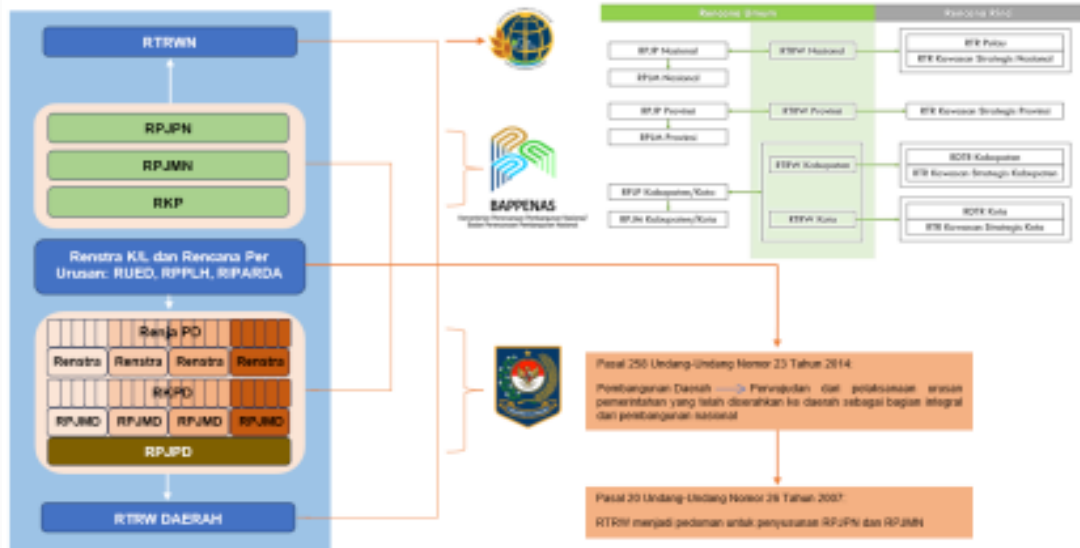
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Keterkaitan antar dokumen perencanaan sebagaimana pada Gambar 1.1 di bawah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), urgensinya agar dapat terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah maupun antar fungsi pemerintahan. Namun dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, terdapat arahan agar penyusunan beberapa dokumen perencanaan dilakukan secara

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen

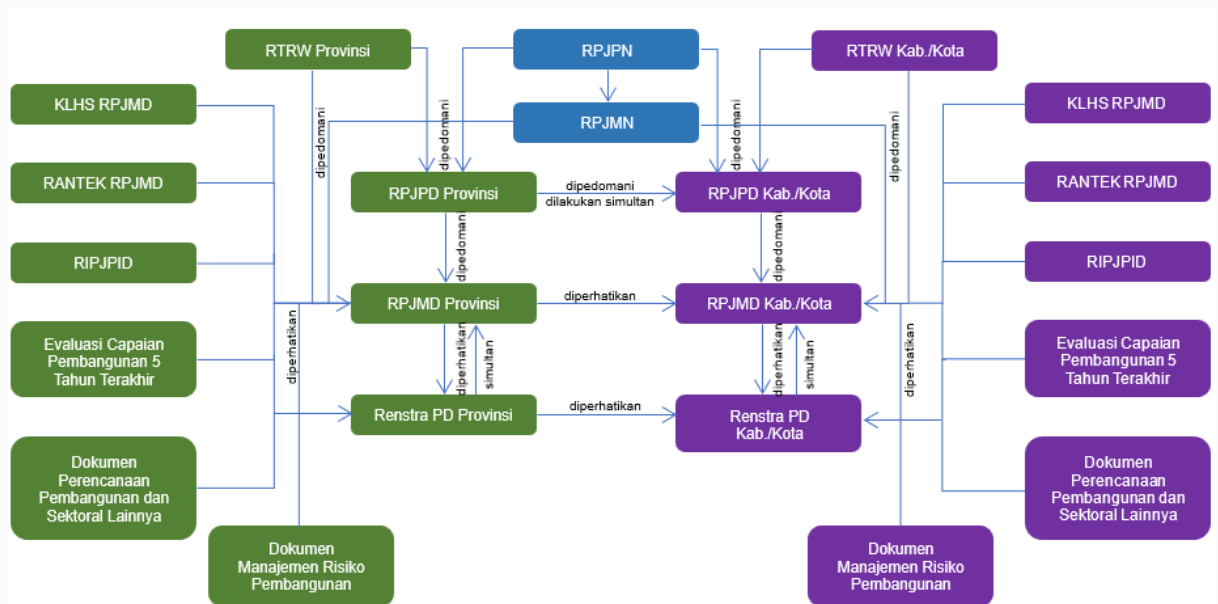


Gambar 1.2
Sinkronisasi Perencanaan Spasial Pusat dan Daerah



Sumber: Bappenas, diolah

Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Menurut Inmendagri 2/2025



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 dan 1.2, RPJMN dan RPJMD merupakan dua dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan sebagaimana dinyatakan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 Ayat 3, yang berisi

penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan pada Gambar 1.3, hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tidak ada yang berubah, namun diperkaya dengan muatan dokumen manajemen risiko pembangunan, serta karena kondisi khusus, penyusunan beberapa dokumen perencanaan dilakukan secara simultan.

Secara umum, Rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan muatan RPJMN 2025-2029, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, dan Rancangan Akhir RPJMD daerah lain yang berbatasan, RTRW (Nasional, Provinsi Gorontalo, daerah lain yang berbatasan, Gorontalo Utara Revisi 2020-2040).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 adalah tahapan berikutnya dari Rancangan Awal RPJMD, sehingga hal-hal yang dituangkan dalam dokumen tahap ini sudah dapat menggambarkan secara keseluruhan dokumen RPJMD yang akan di-Perda-kan, secara umum disusun dengan maksud menyajikan informasi utuh mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain: kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah, juga termasuk strategi dan arah kebijakan pembangunan serta gambaran kondisi daerah yang akan dicapai pada akhir masa RPJMD tahun 2029 melalui Visi Misi kepala daerah serta program kegiatan dan pendanaannya. Adapun tujuannya adalah:

1. Menetapkan dan menjabarkan Visi Misi Bupati Gorontalo Utara periode masa pemerintahan tahun 2025-2029 dalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah;

2. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis yang akan memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;
4. Instrumen bagi DPRD Gorontalo Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah;
5. Instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional;
6. Pedoman bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
7. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan daerah sekitar, Provinsi Gorontalo, dan Nasional.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dari tiga sub bab, yaitu: (1) Dasar-dasar analisis dan gambaran umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum) ditambah penjelasan mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, kerjasama yang dilakukan daerah, rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Gorontalo Utara baik yang bersumber dari APBN/APBD, serta BUMD yang mendukung kinerja pelayanan daerah; (2) Gambaran keuangan daerah yang memuat secara ringkas kondisi keuangan lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan; (3) Permasalahan dan isu strategis.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Terdiri dari 2 bahasan, yakni menguraikan Visi Misi Kepala Daerah (termasuk Tujuan dan Sasaran Daerah yang jelas dan terukur), rumusan indikator kinerja yang mendukung setiap tujuan dan sasaran daerah beserta targetnya, serta perumusan strategi dan arah kebijakan daerah dan program-program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan program-program perangkat daerah rentang tahun 2025-2029 beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya, serta rangkaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya simpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



Bab

2

Gambaran Umum Daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah berstruktur wilayah *unique*, wilayah daratan yang memanjang secara horizontal, serta setiap kecamatannya berada di wilayah pesisir. Luas wilayah 1.777,03 Kilometer², terdiri atas 11 kecamatan dan 123 desa, serta bergaris pantai terpanjang se-Provinsi Gorontalo, dengan sebaran 55 pulau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022. Melihat kondisi alam tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, potensi daerah penting untuk ditingkatkan fungsi pemanfaatannya guna mendorong iklim investasi di daerah. Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan secara logis dasar-dasar analisa yang dimulai dari gambaran umum kondisi daerah yang meliputi sejarah berdirinya daerah, aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Untuk memperkaya, dimuat juga bahasan mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berbagai kerjasama yang telah dilaksanakan baik dengan instansi pemerintah maupun swasta, rencana pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi Gorontalo, serta penjelasan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung kinerja layanan pemerintah. Pada bagian lain akan digambarkan kinerja APBD dalam 5 tahun terakhir beserta proyeksinya di 5 tahun masa kerja Bupati-Wakil Bupati, kemudian dilengkapi berbagai permasalahan dan isu strategis daerah dengan berdasar pada capaian data-data yang disampaikan sebelumnya di bab yang sama.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara

Sejarah berdirinya Kabupaten Gorontalo Utara dimulai sejak tahun 1966 dengan peristiwa yang dikenal dengan “Resolusi 1966”. Periode tersebut ditandai dengan peristiwa dilaksanakannya Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara oleh Badan Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara (BMPDGU) di Kecamatan Kwandang pada tanggal 15-17 Desember 1966. Pertemuan ini dihadiri

oleh para tokoh di wilayah Gorontalo Utara dari unsur partai politik, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan unsur daerah lainnya. Setelah pertemuan ini, dilahirkan resolusi untuk membentuk sebuah kabupaten baru di bagian utara Kabupaten Gorontalo. Beberapa tahun berselang, pada tanggal 11 April 1968, BMPDGU melayangkan Surat Tuntutan Nomor 14/BMPDGU/68 dengan pokok tuntutan eks Kewedanaan Kwandang (Kwandang, Sumalata, Atinggola) menjadi Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, Ketua DPR GR Kabupaten Gorontalo, Gubernur Sulawesi Utara, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua DPR GR Republik Indonesia. Perjuangan awal ini dipimpin oleh SH. Puti dan Abdulkadir Uno, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris BMPDGU.

Lama tidak terdengar karena situasi negara yang belum stabil pasca pemberontakan PKI dan populasi penduduk yang masih kecil, gaung pembentukan Gorontalo Utara kembali bergema di tahun 2001, dengan nama Kabupaten Pantura. Komite Pembentukan Daerah Pantura Gorontalo (KOPDA PG) terbentuk dibawah pimpinan (alm.) Drs. Hamid Dunggio dan Moch. Tajim Boki, yang masing-masing bertindak sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Muhtar Darise sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Thomas Mopili sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan. Isu pembentukan yang beredar kencang di masyarakat dan kalangan pemerintah memicu segelintir pihak yang tidak setuju adanya pembentukan ini untuk menghalang-halangi sehingga isu tersebut kembali redup.

Episode perjuangan dilanjutkan pada Desember 2003, dengan terbentuknya ‘Tim 7’ pasca sosialisasi dana bantuan dari *Islamic Development Bank* (IDB) oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Gorontalo di Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Kwandang. Pada awalnya, bantuan dari IDB tersebut dijadikan sebagai pengalih perhatian masyarakat dan upaya untuk meredam isu gerakan pembentukan Gorontalo Utara. Perdebatan sengit terjadi antara para tokoh masyarakat dengan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang berujung pada bubarnya forum sosialisasi bantuan tersebut. Ketidaksepahaman para tokoh masyarakat kemudian bermuara pada dibentuknya “Tim 7” yang dipimpin oleh

(alm.) Husain Udit dan Sekretaris, Aidin M. Nusa. Tugas utama dari tim ini yakni melakukan sosialisasi pembentukan kabupaten baru dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari lima kecamatan. Tidak lama, saat berlangsung halal-bihalal dan Pemantapan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Pantura Gorontalo pada 27 Desember 2003, dibentuklah Panitia Pemekaran Pantura (Komite Pembentukan Kabupaten – KPK) dengan Thariq Modanggu terpilih sebagai Ketua, dan Jost Pomalinggo sebagai Sekretaris.

Perjuangan masyarakat Gorontalo Utara untuk memisahkan diri dari Kabupaten Gorontalo dilanjutkan pada medio 2004 hingga 2006. Pendekatan yang lebih cerdas, komprehensif, sistematis, taktis-strategis, hingga simpatik dilakukan oleh para tokoh pemekaran daerah. Pada tanggal 2 hingga 4 Januari 2004 dilaksanakan rapat-rapat awal sebagai pengisian kepengurusan KPK bertempat di kediaman Dedi Sumaga, Jl. Trans Sulawesi Desa Moluo, membahas struktur keanggotaan panitia yang sudah disiapkan oleh Ketua Panitia Pemekaran yang menyepakati Komite Pembentukan Kabupaten Pantura. Rapat ini juga membahas langkah awal KPK Pantura untuk menghadap Ahmad Hoesa Pakaya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo dan membahas sosialisasi di lima kecamatan di pesisir utara Kabupaten Gorontalo.

Pada tanggal 6 Januari 2004, KPK bersilaturahmi dengan Bupati Kabupaten Gorontalo yang didampingi pejabat teras Kabupaten Gorontalo untuk melaporkan rencana strategis program komite dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di pantai utara. Pertemuan ini berhasil meyakinkan Bupati Kabupaten Gorontalo bahwa keinginan pembentukan kabupaten baru murni merupakan aspirasi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan yang terpusat di Limboto (Ibukota Kabupaten Gorontalo). KPK juga menegaskan bahwa perjuangan pembentukan kabupaten baru tidak dikerahkan oleh para elit tetapi dimotori oleh kesadaran progresif kelompok pemuda yang menghendaki perubahan di daerahnya. Pada tanggal 15 hingga 19 Januari 2004 digelar sosialisasi pembentukan kabupaten di lima

kecamatan pesisir utara. Sosialisasi ini mendapatkan respon yang positif dan secara perlahan berhasil mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.

Dengan memanfaatkan momentum heroisme 23 Januari 1942, pada tanggal 23 Januari 2004, KPK Pantura berhasil melaksanakan deklarasi rakyat dengan satu tekad bulat untuk menjadi satu kabupaten tersendiri. Momentum bersejarah ini dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat di lima kecamatan yang ada di pesisir pantai utara Provinsi Gorontalo. Peristiwa akbar ini diwarnai penandatanganan 500 Meter spanduk oleh Gubernur Gorontalo diikuti undangan dan para tokoh masyarakat yang berada di lapangan Kwandang Desa Moluo, penandatanganan komunike bersama oleh elemen masyarakat yang menyatakan lahirnya Kabupaten Pantura dan pembacaan pidato *Iftitah* oleh Prof. Dr. Nani Tuloli. Deklarasi Pembentukan Kabupaten Pantura oleh Ketua KPK, Thariq Modanggu, dan penandatanganan persetujuan deklarasi pembentukan Kabupaten Pantura oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Abdullah Talani, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Muchtar Darise, dan Gubernur Gorontalo, Fadel Mohamad.

Tanggal 26 Januari 2004, KPK Pantura beraudiensi dan mengajukan permohonan rekomendasi dukungan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk membentuk Kabupaten Pantura. Tanggal 3 Februari 2004, KPK mempresentasikan proposal kelayakan pembentukan Kabupaten Pantura pada Sidang Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Gorontalo, pada saat itu dikeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rekomendasi Pernyataan Sikap Mendukung Pembentukan Kabupaten Pantura. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 24 Februari 2004, lahirlah Rekomendasi Bupati Kabupaten Gorontalo tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pantura yang ditujukan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dukungan dari partai-partai politik di DPRD Provinsi Gorontalo mengalir dengan diloloskannya Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rekomendasi/Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pantura pada tanggal 25 Februari 2004. Di hari yang sama, Gubernur Provinsi Gorontalo menandatangani rekomendasi usulan tentang pembentukan Kabupaten Pantura di Provinsi

Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan adanya dua rekomendasi dari lembaga legislatif dan eksekutif di Provinsi Gorontalo, dukungan politik terhadap aspirasi rakyat pantai utara Gorontalo untuk memekarkan diri telah sangat kuat, sehingga memudahkan tim KPK Pantura untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat. Akhirnya pada tanggal 26 Februari 2004, Ketua Komite, Koordinator Dewan Kehormatan Komite, Prof. Dr. Nani Tuloli, membawa dan mengajukan proposal kelayakan pembentukan Kabupaten Pantura ke Komisi II DPR RI.

Sepekan setelah proposal kelayakan Pantura diajukan, tanggal 2 Maret 2004, Komisi II DPR RI meninjau calon wilayah pemekaran yang kemudian merespon dan memberi dukungan positif, serta memberikan jaminan bahwa pembentukan Kabupaten Pantura tidak lebih 3 bulan. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari lima kecamatan di wilayah Pantura menyampaikan aspirasinya. Seiring waktu berjalan, KPK tetap berusaha menghimpun dukungan politik dan penguatan dari partai-partai politik yang ada di Provinsi Gorontalo kepada fraksi-fraksi politik di DPR RI.

Pada tanggal 26 Juni 2004, KPK Pantura bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima kunjungan tim kerja dari Komisi II DPR RI untuk melihat langsung kesiapan calon pembentukan kabupaten pemekaran, seiring dengan berbagai upaya dan pendekatan yang dilakukan KPK, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan daerah otonomi baru.

Setelah melalui sidang di DPR RI yang cukup panjang dan maraton pada tanggal 8 Desember 2006, tepat pada pukul 23:45 WITA, akhirnya perjuangan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara selama 40 tahun membuahkan hasil manis dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Saat itu KPK menggelar agenda MSMG “Menuju Senayan Menjemput Gorut” dengan memobilisasi lebih dari 100 orang dari berbagai elemen masyarakat untuk menghadiri momentum sakral pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Dua buah spanduk KPK mencuri perhatian ribuan orang di DPR (termasuk pendukung 16

daerah lain yang disahkan di DPR-RI). Spanduk pertama, “di Nusantara II Gorontalo Utara dilahirkan, di Gorontalo Utara Nusantara Dibesarkan”. Spanduk kedua, “40 Tahun Impian Rakyat Gorontalo Utara Terwujud di Sini”.



Foto 2.1 Spanduk dukungan pemekaran dibentangkan di Senayan, Jakarta

Tidak berpuas diri dan tanpa menunggu lama, tanggal 26 Desember 2006, KPK Gorontalo Utara mengadakan Musyawarah Besar II (Mubes II) yang merupakan lanjutan dari Mubes I tahun 1966 yang berusaha menghimpun aspirasi, gagasan, dan kehendak rakyat tentang arah pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.



Foto 2.2 Musyawarah Besar II untuk menghimpun aspirasi rakyat pasca pemekaran

Pada tanggal 14 Februari 2007, KPK Gorontalo Utara melaksanakan dialog interaktif yang mengusung tema “Menegaskan Kembali Cita-cita Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Sekaligus Penguatan Komitmen untuk Mewujudkannya”, disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, bertempat di kediaman salah satu tokoh pemekaran kabupaten, (alm.) Husain Udit.

Rentang waktu 5 Februari hingga 26 April 2007, KPK melaksanakan tiga agenda yakni mempresentasikan dan menyerahkan “Resolusi Pantura” kepada Bupati Kabupaten Gorontalo, calon Penjabat Bupati Gorontalo Utara, DPRD Provinsi Gorontalo, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Agenda lainnya yakni dialog bertemakan prospek dan strategi pengembangan ekonomi bersama H. Suharso Monoarfa, dan Pemerintah Daerah mempersiapkan peresmian Penjabat Bupati Gorontalo Utara.

Akhirnya pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mempersiapkan peresmian sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Drs. H. Hamdan Datungsolang. Menteri Dalam Negeri ad interim, Widodo AS, kemudian meresmikan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo dan melantik Penjabat Bupati Gorontalo Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007.



Foto 2.3 Peresmian pembentukan Gorontalo Utara dan pelantikan Penjabat Bupati oleh Mendagri *ad interim*

2.1.2 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo, saat ini terdiri atas 11 kecamatan dan 123 desa. Sudah banyak berkembang dibanding saat berdiri di tahun 2007 yang hanya terdapat 5 kecamatan dan 56 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.777,022 Kilometer² atau setara 15,79 persen dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Gorontalo Utara seluas 1.703,628 Kilometer².

Secara geografis Kabupaten Gorontalo Utara terletak pada 00°41'23" – 1°07'55"LU dan 121°58'59" – 123°16'29"BT. Lebih dari 75 persen wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 317,39 Kilometer (menurut Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, garis pantai di bagian utara Provinsi Gorontalo mencapai 331,2 Kilometer). Perairan di daerah ini termasuk dalam perairan Laut Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, serta termasuk dalam Wilayah Pengembangan Perikanan (WPP) 716. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dirinci menurut kecamatan, luas kecamatan, dan jumlah desa di setiap kecamatan.

Tabel 2.1
Kecamatan yang Dirinci Menurut Luas Wilayah dan Jumlah Desa

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa
1	Atinggola	Kota Jin	40	264,55	14,89	14
2	Gentuma Raya	Gentuma	27	100,34	5,65	11
3	Tomilito	Dambalo	15	99,31	5,59	10
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	23	7,84	0,44	4
5	Kwandang	Titidu	11	190,75	10,73	18
6	Anggrek	Ilangata	15	141,51	7,96	15
7	Monano	Mokonowu	33	144,02	8,10	10
8	Sumalata Timur	Buladu	55	197,55	11,12	10
9	Sumalata	Bulontio Barat	71	305,59	17,20	11
10	Biau	Biau	112	111,69	6,29	10
11	Tolinggula	Tolinggula Tengah	122	213,89	12,04	10
Jumlah				1.777,022	100,00	123

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Wilayahnya terdiri dari daratan yang sebagian besarnya adalah wilayah perbukitan rendah, dan dataran tinggi yang mencapai 0 – 2.000 Meter di atas permukaan laut serta didominasi oleh kemiringan 15 persen – 45 persen (komposisinya 50 persen-60 persen).

Kabupaten Gorontalo Utara memanjang horizontal di bagian utara Provinsi Gorontalo, sepanjang jalur Trans-Sulawesi bagian utara, yang menghubungkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah, terletak pada 386.732 mT – 530.446 mT dan 74.367 mU – 115.085 mU (zone UTM 51 North).

Secara geografis, letak Kabupaten Gorontalo Utara memiliki batas-batas administratif dengan beberapa wilayah lainnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Sulawesi
- Sebelah barat : Kabupaten Buol
- Sebelah selatan : Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bonebolango
- Sebelah timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Gambar 2.1
Peta dan Batas Administrasi



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Lebih dari 75 persen wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah pesisir, dengan garis pantai umumnya mencapai 100 Meter dari daratan, yang panjangnya bervariasi berkisar antara 2,5 sampai 25 Kilometer. Daerah-daerah yang memiliki garis pantai jauh masuk ke daratan adalah sekitar Teluk Paleleh ±9 Kilometer, Teluk Bulontio ±8 Kilometer, dan Teluk Kwandang ±25 Kilometer, yang pada umumnya dibentuk oleh batuan karang (coral). Daerah daratan dengan

ketinggian sampai ± 100 Meter mempunyai jarak terjauh berkisar antara 250 Meter hingga 500 Meter.

Sebagai daerah pesisir, terdapat banyak pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak, sejumlah 55 pulau setara 43 persen dari seluruh pulau yang ada di Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.

Tabel 2.2
Nama Pulau dan Koordinat

No.	Nama Pulau	Koordinat	Status
1	Pulau Batumandi	00°54'42.55" U 122°44'16.40" T	Tidak berpenghuni
2	Pulau Batumandi	00°57'57.21" U 122°56'51.68" T	Tidak berpenghuni
3	Pulau Batusungu Oluwo	00°58'32.66" U 122°56'38.36" T	Tidak berpenghuni
4	Pulau Batusungu Otolu	00°58'23.07" U 122°56'52.31" T	Tidak berpenghuni
5	Pulau Bibinanga	00°51'11.24" U 122°53'37.05" T	Tidak berpenghuni
6	Pulau Bogisa	00°56'16.28" U 122°51'27.41" T	Tidak berpenghuni
7	Pulau Bohu	00°54'35.07" U 122°44'21.58" T	Tidak berpenghuni
8	Pulau Bolas	00°55'24.80" U 123°04'49.49" T	Berpenghuni
9	Pulau Botubotuo	00°52'23.90" U 122°48'31.21" T	Tidak berpenghuni
10	Pulau Botubotuwo	00°50'51.03" U 122°48'59.87" T	Tidak berpenghuni
11	Pulau Botubotuwo Kiki	00°50'55.75" U 122°48'57.27" T	Tidak berpenghuni
12	Pulau Botudidingga	00°58'17.76" U 122°33'07.01" T	Tidak berpenghuni
13	Pulau Botuduyunumo	00°59'13.87" U 122°31'51.95" T	Tidak berpenghuni
14	Pulau Botulobuntho Da'A	00°57'41.59" U 122°37'02.35" T	Tidak berpenghuni
15	Pulau Botulobuntho Kiki	00°56'56.31" U 122°36'28.73" T	Tidak berpenghuni
16	Pulau Botungalaa	00°59'31.29" U 122°31'06.60" T	Tidak berpenghuni
17	Pulau Botungalaa Da'A	01°01'12.42" U 122°26'19.27" T	Tidak berpenghuni
18	Pulau Botungobungo	00°55'25.65" U 122°44'14.43" T	Tidak berpenghuni
19	Pulau Botutotolu	00°53'33.82" U 122°42'35.26" T	Tidak berpenghuni
20	Pulau Botuwopato	00°53'12.72" U 122°44'06.96" T	Tidak berpenghuni
21	Pulau Buloilta	01°01'47.09" U 122°17'16.11" T	Tidak berpenghuni
22	Pulau Dokokayu Da'A	00°57'00.46" U 123°02'16.87" T	Tidak berpenghuni
23	Pulau Dokokayu Kiki	00°56'41.91" U 123°02'16.64" T	Tidak berpenghuni
24	Pulau Dudepo	00°52'27.99" U 122°47'56.00" T	Berpenghuni
25	Pulau Dudepo Kiki	00°53'31.99" U 122°47'06.00" T	Berpenghuni
26	Pulau Diyonumo	00°59'17.61" U 122°31'26.02" T	Berpenghuni
27	Pulau Hokimu	00°51'20.30" U 122°53'55.13" T	Tidak berpenghuni
28	Pulau Huha	00°59'06.17" U 122°55'56.00" T	Tidak berpenghuni
29	Pulau Hulawa	01°00'12.77" U 122°30'23.16" T	Berpenghuni
30	Pulau Hulawa	00°57'54.08" U 122°53'26.90" T	Tidak berpenghuni
31	Pulau Hulawa Kiki	00°58'00.15" U 122°53'21.99" T	Tidak berpenghuni
32	Pulau Huliyahu Bunggu	00°57'23.20" U 122°56'16.12" T	Tidak berpenghuni
33	Pulau Huliyahu Da'A	00°57'12.20" U 122°56'20.51" T	Tidak berpenghuni
34	Pulau Hutakalo	01°00'18.59" U 122°26'16.75" T	Tidak berpenghuni
35	Pulau Kaposo	00°53'23.83" U 122°49'04.62" T	Tidak berpenghuni
36	Pulau Kaposo Kiki	00°53'30.57" U 122°48'55.19" T	Tidak berpenghuni
37	Pulau Karangbogisa	00°56'11.36" U 122°51'41.12" T	Tidak berpenghuni
38	Pulau Katialada	00°51'21.31" U 122°54'24.78" T	Tidak berpenghuni
39	Pulau Limuyudu	00°52'55.47" U 122°43'09.81" T	Tidak berpenghuni
40	Pulau Lumboso Da'A	00°51'46.14" U 122°48'26.16" T	Tidak berpenghuni
41	Pulau Lumboso Kiki	00°52'05.00" U 122°47'58.56" T	Tidak berpenghuni
42	Pulau Mohinggito	00°55'25.38" U 122°52'32.63" T	Berpenghuni
43	Pulau Mongaila	00°53'02.00" U 122°44'27.54" T	Tidak berpenghuni
44	Pulau Motuo	00°59'46.75" U 122°39'37.73" T	Tidak berpenghuni
45	Pulau Otilade	00°54'16.24" U 122°50'49.28" T	Berpenghuni
46	Pulau Otiola Da'A	00°51'33.72" U 122°52'51.79" T	Tidak berpenghuni
47	Pulau Otiola Kiki	00°52'14.22" U 122°52'38.28" T	Tidak berpenghuni
48	Pulau Palowa	00°55'25.63" U 122°51'40.78" T	Tidak berpenghuni

No.	Nama Pulau	Koordinat	Status
49	Pulau Ponelo	00°52'13.88" U 122°53'11.45" T	Berpenghuni
50	Pulau Popaya	00°59'45.51" U 122°38'13.24" T	Tidak berpenghuni
51	Pulau Saronde	00°55'33.00" U 122°51'52.79" T	Tidak berpenghuni
52	Pulau Tinggolodu	01°00'54.26" U 122°23'33.41" T	Tidak berpenghuni
53	Pulau Tolinggula	01°03'14.40" U 122°12'17.08" T	Tidak berpenghuni
54	Pulau Hulihu Da'A	00°53'58.99" U 122°55'41.99" T	Tidak berpenghuni
55	Pulau Batusungu Tuwawu	00°58'58.79" U 122°56'23.83" T	Tidak berpenghuni
Jumlah pulau Gorontalo Utara		55	
Jumlah pulau Provinsi Gorontalo		127	

Sumber: Gazeter Nasional Tahun 2021, dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

2.1.2.2 Topografi Daerah

Topografi Kabupaten Gorontalo Utara dianalisis dari aspek ketinggian dan kemiringan lahan. Kontur wilayah didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan, meski tidak terdapat gunung api. Daerah berkontur pegunungan sebagian besar terletak di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, Tolinggula, dan Atinggola, sehingga pengembangan wilayah terbatas. Dari 11 kecamatan yang ada, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas di Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Tolinggula. Dataran rendah yang memiliki sumberdaya air yang cukup kemudian dimanfaatkan petani sebagai areal persawahan.

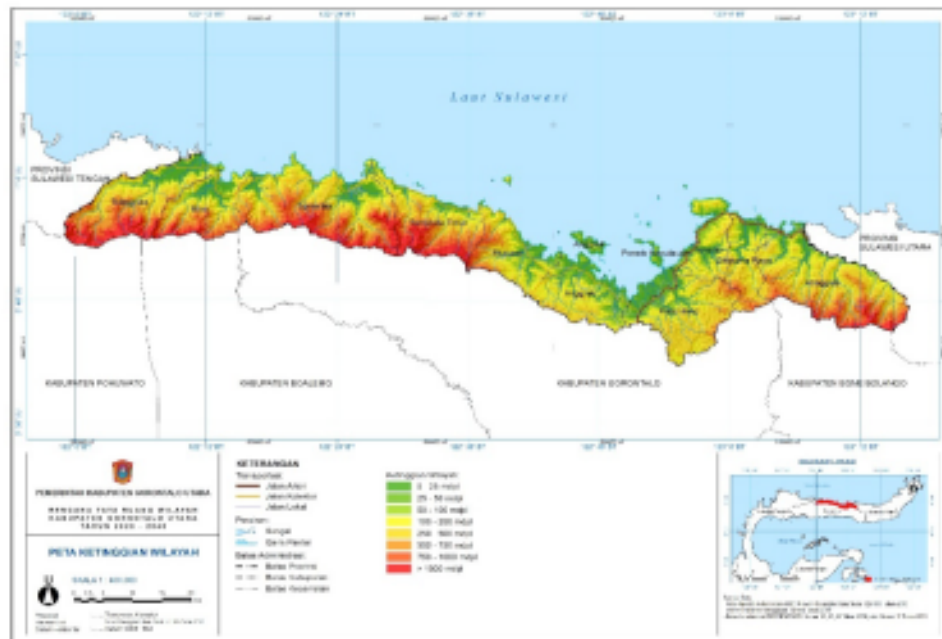
Ketinggian tanah bervariasi dari 0 sampai dengan 2.061 Meter dari permukaan laut. Adapun dataran tertinggi terletak di Kecamatan Sumalata Timur, sedangkan terendah di Kecamatan Ponelo dengan elevasi tertinggi 109 Meter seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Koordinat Kecamatan

Kecamatan	Tinggi DPL (Meter)	Ketinggian Kantor Camat (Meter)	Koordinat	
			LU (°)	BT (°)
Atinggola	0-1.794	9	0°51'43.414"	123°09'8.822"
Gentuma Raya	0-1.001	8	0°51'56.455"	123°01'34.939"
Kwandang	0-910	16	0°47'20.613"	122°54'58.675"
Tomilito	0-698	66	0°54'5.653"	122°57'41.871"
Ponelo Kepulauan	0-109	13	0°53'46.127"	122°52'38.626"
Anggrek	0-613	17	0°49'24.624"	122°46'24.895"
Monano	0-1.299	12	0°53'30.900"	122°39'59.802"
Sumalata	0-1.822	5	0°57'16.935"	122°22'20.898"
Sumalata Timur	0-2.061	8	0°56'11.842"	122°32'29.766"
Tolinggula	0-2.001	6	0°57'39.687"	122°5'54.830"
Biau	0-1.900	8	0°57'4.130"	122°11'31.192"

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), 2022

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Wilayah



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

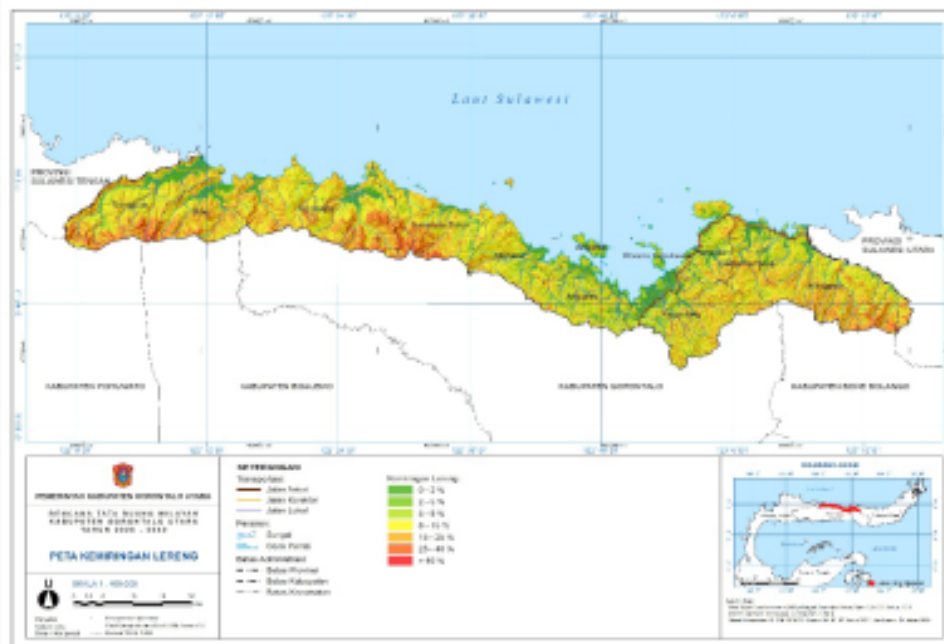
Kemiringan lereng Kabupaten Gorontalo Utara diklasifikasikan dalam 5 kelas yang diperoleh dari hasil analisis Citra DEM STRM. Hasil pemetaan lereng tersebut diolah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis, dengan kondisi kelereng disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luasan Kemiringan Lereng

No.	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	<8%	17.965,62	10,45
2	8-15%	16.033,63	9,33
3	15-30%	35.449,33	20,63
4	30-45%	63.069,30	36,70
5	>45%	39.334,01	22,89
Jumlah		171.851,90	100

Sumber: Analisis Peta Lereng pada KLHS RPJMD Gorontalo Utara 2025-2045

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

2.1.2.3 Klimatologi

Dalam hal musim, seperti daerah lain di Indonesia pada umumnya, musim di Provinsi Gorontalo hanya 2, yakni hujan dan kemarau. Dengan posisi yang spesifik, cuaca kawasan dipengaruhi oleh angin darat dan laut yang bertiup bergantian siang dan malam. Iklim termasuk dalam tipe C dengan jumlah curah hujan rata-rata pada tahun 2022 sebesar 2.267 Mm³/tahun, temperatur udara bervariasi antara 21,0° – 34,4°C dengan rata-rata suhu terendah di bulan Februari, dan rata-rata temperatur tertinggi di bulan Desember, sedangkan rata-rata tahunan mencapai 26,93°C. Kelembaban udara relatif tinggi, tercatat rata-rata sebesar 84,83 persen.

Karakteristik curah hujan sangat mempengaruhi ketersediaan air baku terutama untuk kepentingan pengairan lahan pertanian. Namun perlu diwaspadai juga bahwa pada bulan puncak curah hujan tinggi, kerentanan risiko terhadap bencana longsor, banjir, dan gerakan tanah juga meningkat.

Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan, Kelembaban, dan Temperatur Udara
Menurut Bulan Tahun 2022

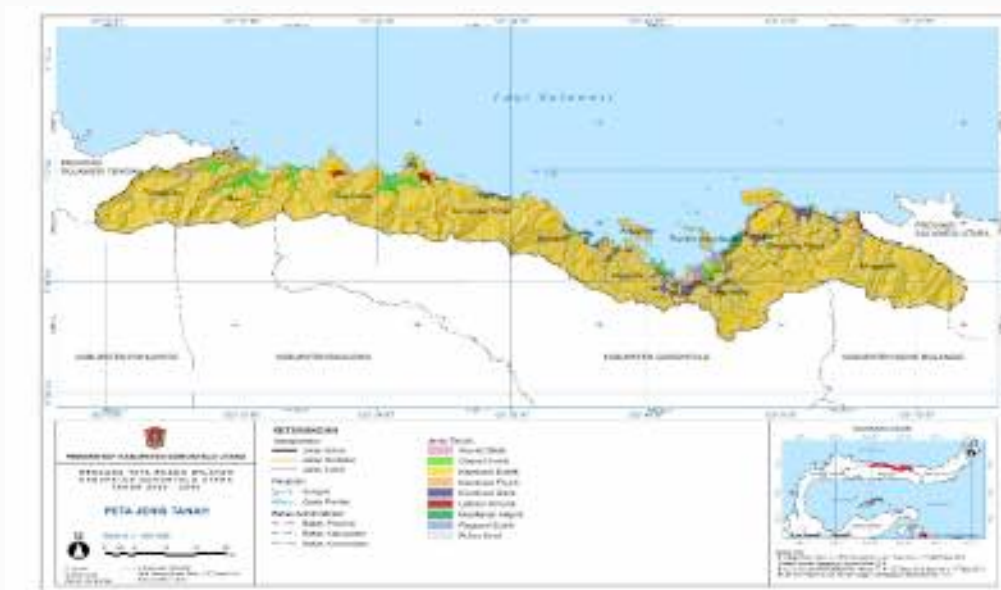
Bulan	Jumlah Curah Hujan (Mm ³)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Rata-Rata Temperatur Udara (°C)
Januari	111	84	26,7
Februari	241	86	26,1
Maret	290	85	26,7
April	101	84	27,2
Mei	174	86	27,0
Juni	151	86	26,4
Juli	238	86	26,3
Agustus	178	86	26,2
September	155	85	26,2
Oktober	215	83	26,9
November	89	85	26,8
Desember	138	82	30,6

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

2.1.2.4 Kondisi Tanah

Berdasarkan peta jenis tanah, terdapat beberapa jenis tanah: aluvial, gleisol, kambisol, latosol, mediteran haplik, dan regosol.

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

2.1.2.5 Hidrologi

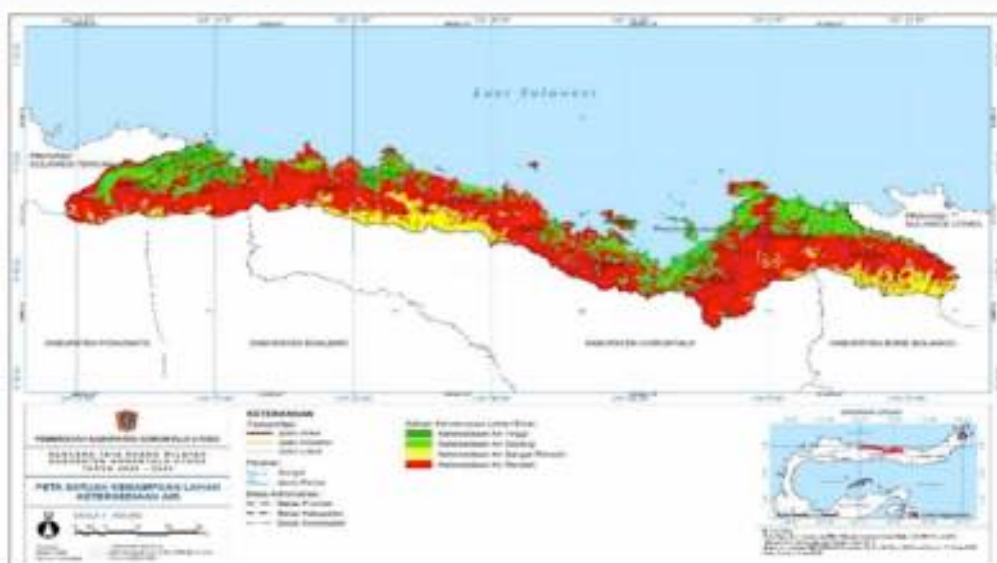
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT), wilayah Gorontalo Utara tidak termasuk dalam CAT manapun di wilayah Provinsi Gorontalo maupun provinsi tetangganya sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. Hal demikian salah satu yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Gorontalo Utara memiliki ketersediaan air yang rendah, sebagaimana Gambar 2.6.

Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Gorontalo



Sumber: Pamsimas, 2022

Gambar 2.6
Peta Ketersediaan Air Tanah

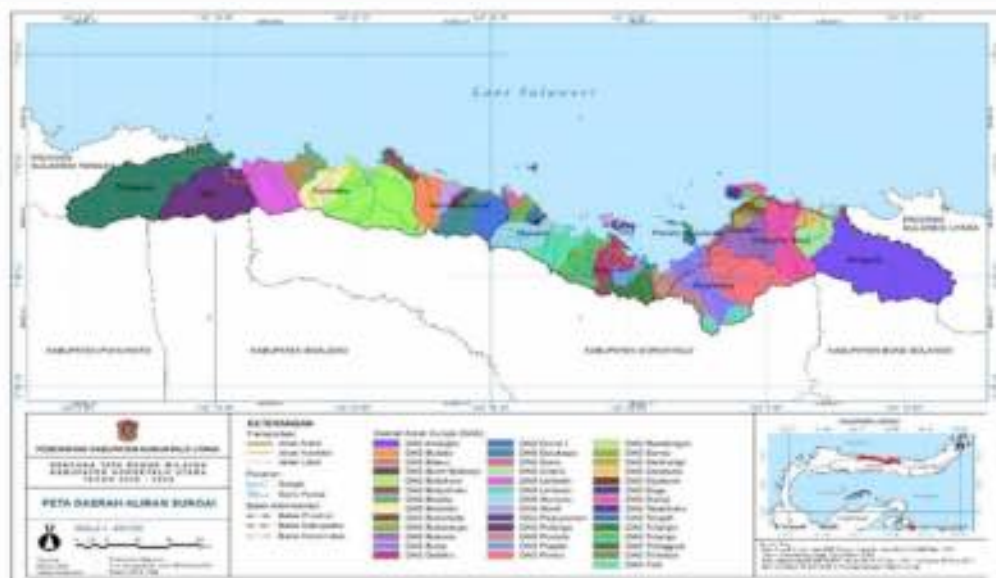


Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Dalam penyediaan kebutuhan air dan pengairan, beberapa sumber air permukaan digunakan penduduk, berasal dari beberapa sungai besar dan kecil yang dimanfaatkan masyarakat sebagai *provider* sumber air dan energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari masih memanfaatkan potensi alami karena belum terjangkau seluruhnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) Gorontalo Utara (Perumda Tirta Gerbang Emas). Adapun jaringan perpipaan hanya terdapat di beberapa tempat yang dekat dengan sumber air sehingga sebagian besar masih menggunakan air tanah dangkal dan sumur.

Sedangkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam Wilayah Sungai Limboto-Bone Bolango, yang secara total terdiri dari 75 Daerah Aliran Sungai/DAS. DAS yang ada di Gorontalo Utara berdasarkan dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031, ditunjukkan pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Sedangkan DAS di wilayah Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
DAS di Gorontalo Utara
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 dan Luasannya

No.	Nama DAS	Luasan (Km ²)
1	DAS Tolinggula	204,2
2	DAS Polanga	121,44
3	DAS Limbato	67,31
4	DAS Biawu	18,81
5	DAS Buloilu	18,22
6	DAS Bulontio	41,64
7	DAS Buliohulu	151,62
8	DAS Boliyohuto	16,67
9	DAS Baladu	40,15
10	DAS Mooti	15,4
11	DAS Sipatana	7,67
12	DAS Dulukapa	39,11
13	DAS Deme I	41,3
14	DAS Dunu	6,71
15	DAS Bubalango	12,88
16	DAS Tengah	6,08
17	DAS Sogu	3,28
18	DAS Monano	47,64
19	DAS Tudi	43,68
20	DAS Tolango	43,16
21	DAS Datahu	41,27
22	DAS Popalo	15,37
23	DAS Tolangio	42,33
24	DAS Pontolo	37,81
25	DAS Buda	62,57
26	DAS Posso	95,74
27	DAS Bubode	59,9
28	DAS Sanbungo	6,09
29	DAS Tolotapo	5,08
30	DAS Butoimola	4,69
31	DAS Samia	10,9
32	DAS Tapa-Ibuhu	5,58
33	DAS Soklat	85,45
34	DAS Sapawea	12,71
35	DAS Imana	37,17
Total Luas Wilayah DAS		1.469,63

Sumber: <https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/data/daerah-aliran-sungai/>

2.1.2.6 Geologi

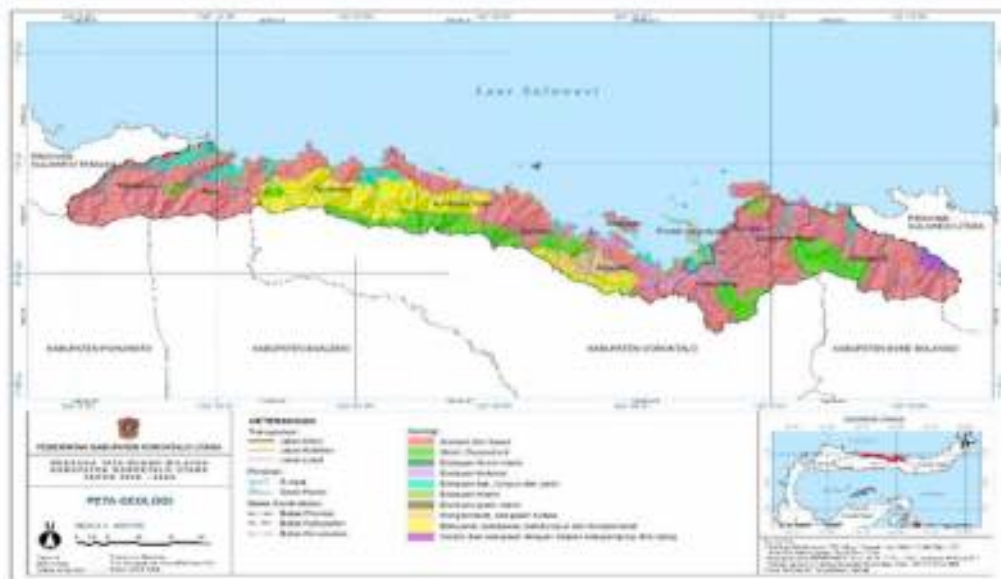
Formasi batuan yang terbentuk terdiri atas beberapa formasi: Qal, TQls, TQpv, Tets, Tmb, Tmbo, Tmbv, Tmd, dan Tpwv, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Formasi Batuan

No.	Formasi	Batuan	Luas (Ha)
1	Qal: Aluvium dan endapan pantai	Qal: Pasir, lempung, lumpur, kerikil, dan kerakal	3.005,90
2	TQls: Formasi Lokodidi	TQls: Konglomerat, batu pasir, batu pasir konglomeratan, batu pasir, tufan, tuf, dan batulempung	5.382,69
3	TQpv: Batu Gunungapi Pinogu	TQpv: Tuf, tuf lapili, breksi, dan lava	5.445,88
4	Tets: Formasi Tinombo Fasies Sedimen	Tets: Serpih dan batu pasir dengan sisipan batu gamping dan rijang, serpih kelabu dan merah, getas	1.703,42
5	Tmb: Diorit Bone	Tmb: Diorit, diorit kuarsa, granodiorit, dan adamelit	10.428,10
6	Tmbo: Diorit Boliohuto	Tmbo: Diorit dan granodiorit	14.724,17
7	Tmbv: Batuan Gunung Api Bilungala	Tmbv: Breksi, tuf, dan lava andesit sampai basal	40.254,76
8	Tmd: Formasi Dolokapa	Tmd: Batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, dan aglomerat	27.075,49
9	Tpww: Breksi Wubudu	Tpww: Breksi gunung api, aglomerat, tuf, tuf lapili, dan lava	63.708,57

Sumber: Analisis Peta Geologi, Bachri, *et al*, (1985) pada KLHS RPJMD Gorontalo Utara 2025-2045

Gambar 2.8
Peta Geologi



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

2.1.2.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang paling luas di wilayah Gorontalo Utara adalah berupa hutan yang mencapai 55,75 persen dari luas keseluruhan penggunaan lahan. Proporsi luas hutan ini dapat dibedakan atas hutan lebat sebesar 49,96 persen, hutan belukar sebesar 4,29 persen, dan hutan sejenis sebesar 1,49 persen.

Hutan paling banyak dijumpai di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, dan Atinggola.

Pertanian lahan kering (perkebunan, kebun campuran, dan ladang) menempati 22,7 persen dari luas keseluruhan penggunaan lahan. Pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Sebagian besar sistem pertanaman dalam bentuk campuran. Di wilayah perencanaan, sebagian areal pertanian lahan kering ditelantarkan sehingga banyak ditumbuhi semak. Tegalan banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Anggrek dan Sumalata. Komoditas lahan kering yang paling banyak dibudidayakan adalah jagung, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo saat ini.

Semak belukar banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Sumalata, Kwandang, dan Anggrek. Semak belukar merupakan areal pertanian lahan kering yang telah lama tidak diolah sehingga ditumbuhi semak belukar, atau sering juga ditemui semak belukar dibiarkan tumbuh bersama tanaman buah-buahan atau tanaman perkebunan seperti kelapa. Sebagian semak/belukar menempati bekas areal penghijauan yang pernah terbakar. Penggunaan lahan semak belukar di wilayah penggunaan lahan menempati lahan sekitar 10,73 persen dari keseluruhan wilayah penggunaan lahan.

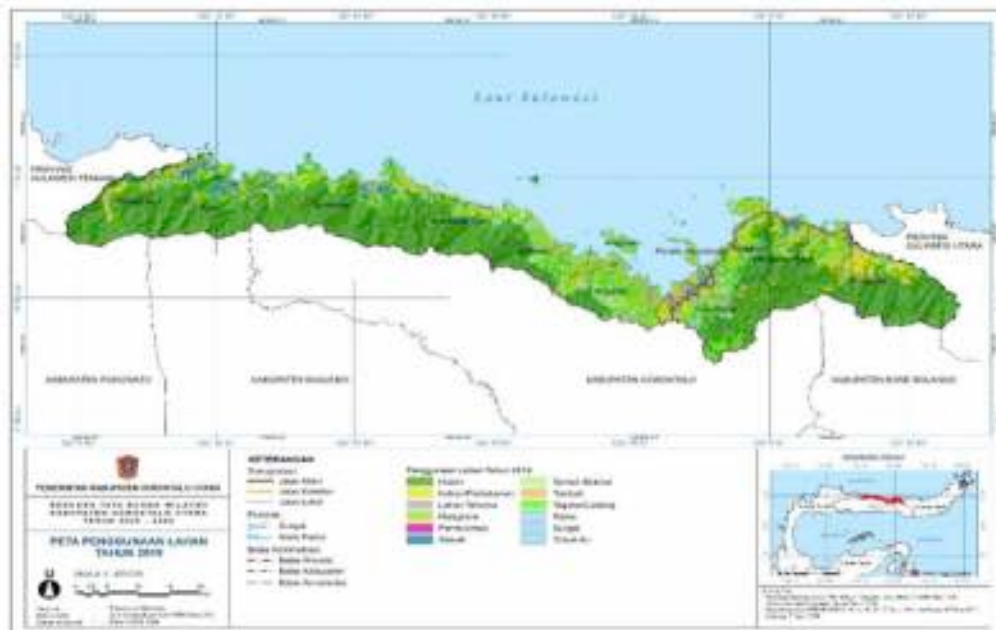
Perkebunan di wilayah perencanaan menempati areal sekitar 1,19 persen dari luas wilayah penggunaan lahan. Perkebunan tersebar hampir di semua wilayah kecamatan, terutama di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Sumalata, dan Atinggola. Hutan mangrove dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Anggrek, Kwandang, Tolinggula, dan Atinggola. Luas penggunaan lahan ini sekitar 1,45 persen dari luas keseluruhan wilayah penggunaan lahan. Sementara permukiman tersebar di sepanjang jalur jalan utama, namun tidak teridentifikasi dengan baik pada citra Landsat ETM+ karena luas lahan terbangun yang relatif sempit. Rincian penggunaan lahan wilayah Gorontalo Utara ditampilkan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Luas Penutup/Penggunaan Lahan

Penutup/Penggunaan Lahan	Luas Total (Ha)	Persentase (%)
Hutan lebat	89.006,44	49,964
Alang-alang	428,14	0,240
Hutan belukar	7.653,98	4,297
Hutan sejenis	2.657,28	1,492
Kebun campuran	5.505,98	3,091
Permukiman	771,56	0,433
Perkebunan	2.122,52	1,191
Sawah 1 x padi/tahun	964,80	0,542
Sawah 2 x padi/tahun	10.271,24	5,766
Semak belukar	19.177,20	10,732
Tanah terbuka sementara	549,19	0,308
Tegalan/ladang	32.765,93	18,393
Mangrove	2.587,5	1,453
Padang lamun	4,54	0,003
Terumbu karang	3.294,72	1,850
Tambak	438,82	0,246
Luas	178.139,84	100,00

Sumber: Hasil *overlay* digitasi SPOT 5 Tahun 2014 dengan RTRW Gorontalo Utara dalam Dokumen Renstra Pesisir Tahun 2015

Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Berdasarkan penggunaannya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan budidaya, strategis, dan lindung. Berikut adalah uraian untuk masing-masing kawasan.

- **Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

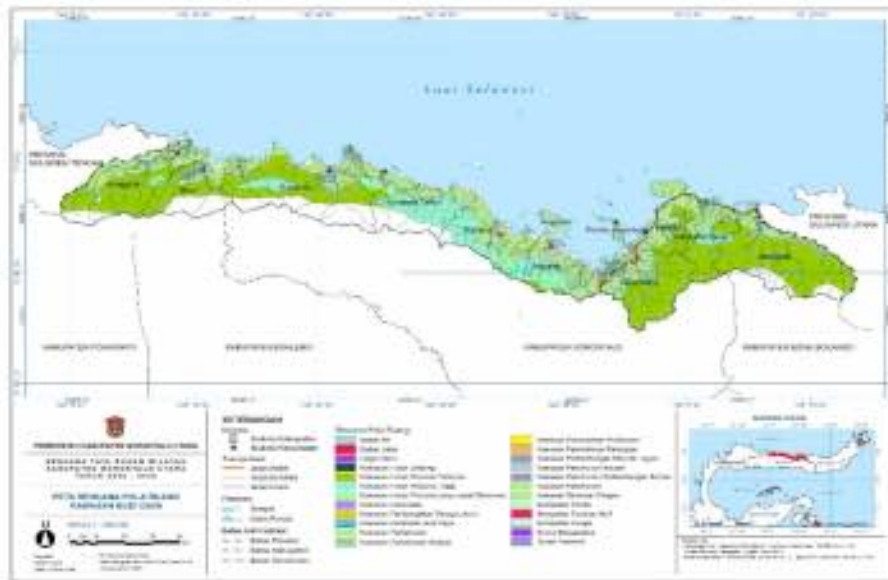
Kawasan budidaya di Kabupaten Gorontalo Utara terbagi atas beberapa kawasan dengan detail luasan diinformasikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

No.	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	Komposisi (%)
1	Kawasan hutan produksi terbatas	66.288,67	47,68
2	Kawasan hutan produksi tetap	15.065,04	10,84
3	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	5.564,08	4,00
4	Kawasan pariwisata	106,09	0,08
5	Kawasan pembangkitan tenaga listrik	57,96	0,04
6	Kawasan perikanan budidaya	359,99	0,26
7	Kawasan perkebunan	43.474,96	31,27
8	Kawasan perkebunan rakyat	2.728,26	1,96
9	Kawasan permukiman perdesaan	2.023,96	1,46
10	Kawasan permukiman perkotaan	869,85	0,63
11	Kawasan pertambangan mineral logam	66,39	0,05
12	Kawasan peruntukan industri	510,11	0,37
13	Kawasan peruntukan pertambangan batuan	634,32	0,46
14	Kawasan peternakan	716,56	0,52
15	Sempadan patahan aktif	26,67	0,02
Luas Wilayah Budidaya		139.032,91	100

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020

Gambar 2.10
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

- **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten (KSK) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, sumber daya alam, teknologi tinggi, dan Hankam. Provinsi Gorontalo menunjuk beberapa kawasan di Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dikembangkan dan memiliki nilai strategis pertumbuhan ekonomi: Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pariwisata Minanga, KSP terintegrasi Pelabuhan Anggrek yang terdiri dari kawasan peti kemas, dan Pergudangan Anggrek. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi seluruh kawasan perbatasan negara di wilayah Gorontalo Utara, sudut kepentingan ekonomi yang secara bersama disokong oleh kawasan Gorontalo-Paguyaman-Kwandang. Serta beberapa lokasi menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Kwandang dan Anggrek), Pusat Kegiatan Wilayah (Kwandang), Pusat Kegiatan Lokal (Atinggola, dan Tolinggula). Untuk KSK Kabupaten, penentuannya lebih bersifat indikatif yang ditunjukkan pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Strategis



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031

- **Kawasan Lindung**

Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, yang ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan upaya pelestariannya. Dengan demikian diharapkan penetapan alokasi peruntukan ruang dalam rangka pengembangan wilayah sesuai dengan kemampuan, daya dukung, dan daya tampung wilayah.

Pada awalnya, penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Gorontalo, wilayahnya meliputi area seluas ± 581.500 Ha, yang terdiri dari 3 unit KPHL dengan luas ± 240.759 Ha dan 4 unit KPHP ± 340.741 Ha. KPHP di Gorontalo Utara adalah KPHP Unit IV, dengan luas ± 105.808 Ha, terdiri dari Hutan

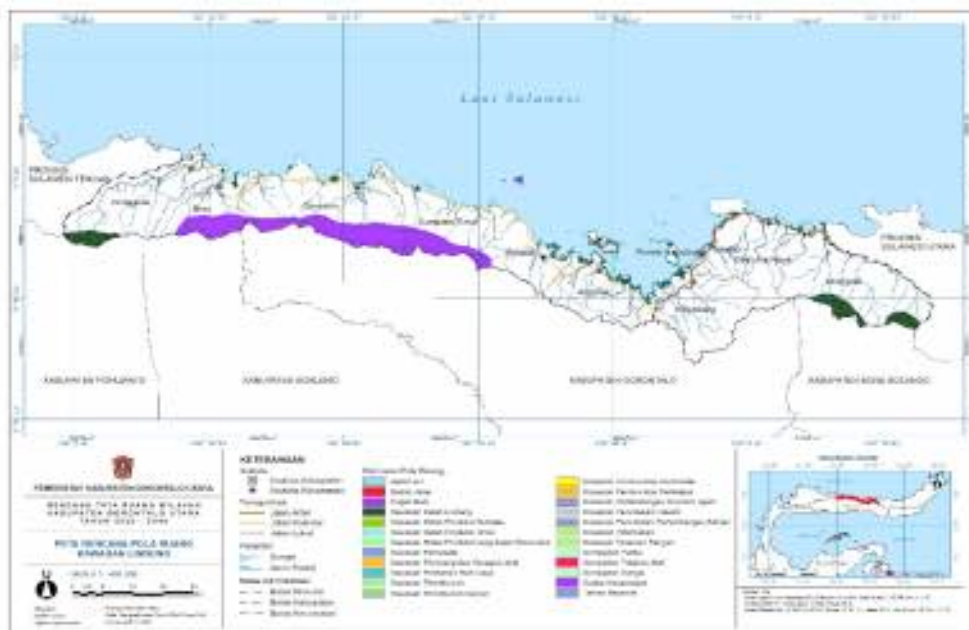
Produksi (HP) ± 15.759 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 71.417 Ha, dan Hutan Lindung (HL) ± 18.632 Ha. Letak geografis KPHP IV Gorontalo Utara tersebut di $121^{\circ}59'12,907''$ - $123^{\circ}16'31,109''$ BT $0^{\circ}47'12,173''$ - $0^{\circ}54'51,68''$ LU. Peruntukan kawasan lindung pada rencana pola ruang Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung

No.	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Komposisi (%)
1	Cagar alam	151	0,51
2	Kawasan hutan lindung	8.717	29,58
3	Sempadan pantai	1.512	5,13
4	Sempadan sungai	3.015	10,23
5	Suaka margasatwa	16.057	54,50
6	Taman nasional	14	0,05
Luas		29.465	100

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020

Gambar 2.12
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Sedangkan luasan kawasan hutan yang masuk kawasan budidaya dan lindung berdasarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV Gorontalo Utara dijabarkan per kecamatan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Luas Kawasan Hutan (Ha)

Kawasan Hutan	Anggrek	Atinggola	Biau	Gentuma Raya	Kwandang	Monano	Ponelo Kep.	Sumalata	Sumalata Timur	Tolinggula	Tomilito	Total
APL	7.880,88	4.478,1	3.014,45	3.654,11	8.084,99	5.873,43	617,38	7.798,55	4.922,59	7.491,15	6.650,16	60.465,79
CA						153,47			0,66			154,13
HL	872,36	3.219,28	195,83	59,2	547,46	403,14	119,07	227,85		1.838,19	412,01	7.894,39
HP	2.422,68	158,28		1.351,26		4.452,55		1.751,92	5.403,37			15.540,06
HPK	2.952,01		56,4			733,38		333,53	1.084,36	394,34		5.554,02
HPT	605,89	17.623,11	5.409,3	6.227,27	9.147,92			11.673,85	684,03	10.496,57	2.458,27	64.326,21
SM			3.767			551,11		8.031,95	3.665,64			16.015,70
TN		38,1										38,10
Total	14.733,82	25.516,87	12.442,98	11.291,84	17.780,37	12.167,08	736,45	29.817,65	15.760,65	20.220,25	9.520,44	169.988,4

Sumber: KPH Unit IV Gorontalo Utara, 2021

*Catatan:

- APL : Areal Penggunaan Lain
- CA : Cagar Alam
- HL : Hutan Lindung
- HP : Hutan Produksi
- HPK : Kesatuan Pengelolaan Hutan
- HPT : Hutan Produksi Terbatas
- SM : Suaka Margasatwa
- TN : Taman Nasional

Pada luasan lahan kritis, data yang bersumber dari BP DAS Gorontalo dan KPH Unit IV menampilkan hasil berbeda. Menurut BP DAS terdapat sekitar 50.000 Ha lahan kritis yang terbagi pada lahan yang termasuk pada kawasan dan juga luar kawasan. Sedangkan data KPH Unit IV merinci per desa dengan didapatkan angka lahan kritis pada hampir seluruh desa. Rincian luasan lahan tersebut bila dirinci per kecamatan disajikan pada Tabel 2.12 dan per desa pada Tabel 2.13.

Tabel 2.12
Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022

No.	Kecamatan	Dalam Kawasan (Ha)			Luar Kawasan (Ha)			Total
		Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	
1	Anggrek	2.283,41	4,84	2.288,25	4.771,66		4.771,66	7.059,91
2	Atinggola	1.279,41	-	1.279,41	2.097,27		2.097,27	3.376,68
3	Biau	1.710,97	-	1.710,97	1.581,25		1.581,25	3.292,22
4	Kwandang	3.346,36	9,06	3.355,41	3.653,11		3.653,11	7.008,53
5	Monano	1.171,82	44,99	1.216,80	4.434,82	75,50	4.510,31	5.727,12
6	Ponelo Kepulauan	34,42	-	34,42	379,78		379,78	414,20
7	Sumalata	4.771,07	6,62	4.777,69	5.224,79		5.224,79	10.002,48
8	Sumalata Timur	1.274,07	10,88	1.284,95	4.024,87		4.024,87	5.309,82
9	Tolinggula	727,40	-	727,40	3.588,33		3.588,33	4.315,72
10	Tomilito	237,81	-	237,81	4.014,16		4.014,16	4.251,97
Luasan		16.836,74	76,39	16.913,13	33.770,03	75,50	33.845,53	50.758,65

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bonebolango Gorontalo, 2023

Tabel 2.13
Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 (Ha)

No.	Nama Desa	Kondisi					Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
1	Alata Karya	20,23	361,49		254,68		636,4
2	Biau	95,76	11,66	1,06	152,72	64,25	325,45
3	Bintana			20,45		20,21	40,66
4	Bohulo	8.264,3	288,43	8,84	751,52	8,13	9.321,22
5	Bohusami	49,63		103,78		21,15	174,56
6	Botungobungo	0,66	47,22		1.041,76		1.089,64
7	Botuwombato	252,46	133,37	6,73	472,93		865,49
8	Bualemo	4.601,34	776,82	1,15	1131,1		6.510,41
9	Bualo	54,49		1,85	85,7	7,67	149,71
10	Buata	14.356,55	33,76	9,98	630,72	1,78	15.032,79
11	Bubalango	1.006,22	55,4		757,43		1.819,05
12	Bubode	101,55	285,54		190,48		577,57
13	Buladu	903,65	0,12	13,96	202,26		1.119,99
14	Bulalo	392,31	4,06	213,6	6,79	185,75	802,51
15	Bulango Raya	168,28	143,35		56,08		367,71
16	Buloila	92,43	210,17	2,96	342,17	0,21	647,94
17	Bulontio Barat	5,5	3,08	50,31	774,46		833,35
18	Bulontio Timur	4.034,94	410,22	17,21	1.360,83	139,33	5.962,53
19	Buluwatu	57,37	4,44	22,65	47,18	0,68	132,32
20	Cempaka Putih	4.149,3	9,11	177,7	106,54	22,28	4.464,93
21	Cisadane	591,19	196,29		37,16		824,64
22	Dambalo	1.479,99	22,01		550,86	122,84	2175,7

No.	Nama Desa	Kondisi					Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
23	Datahu	360,61	373,67	1,04	616,82		1.352,14
24	Deme Dua	3.327,39	244,65	11,62	1.043,81		4.627,47
25	Deme Satu	1.279,77	86,47	0,03	681,09		2.047,36
26	Didingga	76,3	6,48		469,81	1,71	554,3
27	Dudepo	556,5	37,84	16,98	253,39	111,35	976,06
28	Dulukapa	1.646,01	171,34	58,48	342,31	22,09	2.240,23
29	Dumolodo	514,63	5,42	2,12	5,52	13,44	541,13
30	Dunu	195,25	103,88		723,13		1.022,26
31	Durian	1.743,58	361,63		1.328,29		3.433,5
32	Garapia	151,77	10,6	75,02	563,35	45,78	846,52
33	Gentuma	0,3		68,38		13,66	82,34
34	Heluma	483,78	289,96	14,75	643,53		1.432,02
35	Hiyalooile	304,28	1,59		150,25		456,12
36	Huidu Melito	179,03	34,33		269		482,36
37	Hulawa	448,97	4,11		168,21		621,29
38	Hutokalo	245,06	83,36	28,81	1.451,51	104,78	1.913,52
39	Ibarat	130,76	39,81		491,11	53,92	715,6
40	Ilangata	683,26	12,99	4,23	75,07	274,28	1.049,83
41	Ilodulunga	186,75	151,19	1,61	231,81		571,36
42	Iloheluma	434,16	392,02	27,38	914,97	9,6	1.778,13
43	Ilomangga	48,77	6,39		54,75	57,04	166,95
44	Ilomata	1.984,92	424,53		1260,5	1,59	3.671,54
45	Ilotunggulo	149,53	33,97	10,05	31,31	152,88	377,74
46	Imana	666,63	14,31		102,34	181,52	964,8
47	Ipilo	278,22	87,68		412,27		778,17
48	Jembatan Merah	205,35	7,62		411,43	48,48	672,88
49	Kasia	2.550,75	99,74		1.013,47		3.663,96
50	Katialada	524,64			10,29		534,93
51	Ketapang	6,28		1,7		27,49	35,47
52	Kikia	1.266,76	111,53		1.175,62		2.553,91
53	Koluwoka	1.384,35	60,26		756,48		2.201,09
54	Kotajin	14,11				38,98	53,09
55	Kotajin Utara	319,3	3,83		2,58	50,63	376,34
56	Langge	44,6	327,63		498,19		870,42
57	Langke	1.266,25	269,39	25,08	1.049,2	4,56	2.614,48
58	Leboto	627,57		1,96	80,56	242,54	952,63
59	Lelato	1.045,02	107,75	42,1	1.397,51	46	2.638,38
60	Leyao	131,02	181,35		265,23		577,6
61	Limbato	2.713,78	40,44	143,36	469,3	47,46	3.414,34
62	Luhuto	31,52			58,32	24,23	114,07
63	Malambe	254,79	4,37	8,2	34,37	24,57	326,3
64	Masuru	279,12	58,79	0,05	191,94	31,7	561,6
65	Mebongo	2.446,9	107,43		565,21		3.119,54
66	Milango	2,13	33,56		519,45		555,14
67	Mokonowu	90,51	24,88	7,79	152,15	37,78	313,11
68	Molangga	131,37	39,23	1,28	140,2	89,44	401,52
69	Molantadu	946,91	130,57	21,36	174,06	100,56	1.373,46
70	Molinkapoto	734,38		160,02	8,94	93,26	996,6
71	Molinkapoto Selatan	307,61	74,16	6,85	201,28		589,9
72	Molonggota	171,4	23	16,19	358,95	27,14	596,68
73	Moluo	89,84	2,61	25,14	55,2	288,14	460,93
74	Monano	118,8	5	0,32	37,79	68,7	230,61
75	Monas	192,11	28,37	26,9	207,86	20,91	476,15
76	Monggupo	86,12	1,07	4,04	51,62	107,4	250,25
77	Mootilango	912,64	181,23	38,63	622,01		1.754,51
78	Mootinelo	517,78			53,44	191,47	762,69
79	Motiheluma	865,6	93,18	9,6	216,95	39,47	1.224,8
80	Motomingo	172,8	26,17	15,42	177,81	60,89	453,09
81	Mutiara Laut	77,82	47,25		283,83		408,9
82	Nanati Jaya	22,9	3,98	24,96		16,9	68,74
83	Oluhuta	86,19	3,17			8,75	98,11
84	Ombulodata	364,78	186,76		480,76		1.032,3

No.	Nama Desa	Kondisi					Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensi I Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
85	Omuto	37,83	5,39	6,97	78,5	23,68	152,37
86	Otiola	140,26				4,57	144,83
87	Papulangi	3.299,01	53,07	325,93	488,12	53,57	4.219,7
88	Pasalae	3,33			3,27	24,42	31,02
89	Pilohulata	16,99	13,8	69,89	405,95	91	597,63
90	Pinontoyonga	105,77		6,4		56,75	168,92
91	Ponelo	100,27		3,71	13,03	33,2	150,21
92	Pontolo	1.093,22	2	36,82	3,26	66,42	1.201,72
93	Pontolo Atas	295,79	180,59	14,76	52,11		543,25
94	Popalo	249,74			43,74	134,23	427,71
95	Posono	411,82			81,9		493,72
96	Posso	263,81	6,97		202,14	13,66	486,58
97	Potanga	417,32	186,66	0,2	443,06		1.047,24
98	Pulohenti	850,57	58,15		133,18		1041,9
99	Puncak Mandiri	779,33	66,14	2,27	572,72		1.420,46
100	Putiana	503,69	69,78		362,41	79,75	1.015,63
101	Sembiangan	208,61	59,67	6,8	513,61	2,87	791,56
102	Sigaso	2.327,64	225,87	60,07	563	10,22	3.186,8
103	Sogu	858,73	1.030,41	27,67	1.699,5	9,8	3.626,11
104	Tanjung Karang	504,68	124,55	9,09	1.203,33	84,35	1926
105	Tihengo	72,78				13,84	86,62
106	Titidu	730,85	553,68	2,19	786,92		2.073,64
107	Tolango	275,04	0,64	53,3	76,47	92,31	497,76
108	Tolinggula Pantai	418,64	22,78	27,17	371,46	385,96	1.226,01
109	Tolinggula Tengah	462,45	112,43	2,66	231,5	251,28	1.060,32
110	Tolinggula Ulu	1.745,95	119,55	29,31	460,06	62,51	2.417,38
111	Tolite Jaya	1.162,99		7,72			1.170,71
112	Tolitehuyu	1.562,89	419,26	2,37	818,21		2.802,73
113	Tolongio	722,37	6,74		45,97	134,13	909,21
114	Tombulilato	59,77	9,23		175,46		244,46
115	Topi	9,97	6,71	76,48	347,38	73,73	514,27
116	Tudi	50,08	22,18	8,53	857,95	22,5	961,24
117	Tumba	1.167,25	104,06		194,82		1.466,13
118	Tutuwoto	280,61	120,93		73,61		475,15
119	Wapalo	1.434,96	246,91		825,95		2.507,82
120	Windu	50,98	6,14	24,72	90,32	85,8	257,96
121	Wubudu	2.405,77	15,84		798,5		3.220,11
122	Zuriyati	386,76	89,72	4,92	461,96	1,33	944,69
Luasan		103.226,7	12.198,93	2.363,63	46.438,89	5.187,25	169.415,4

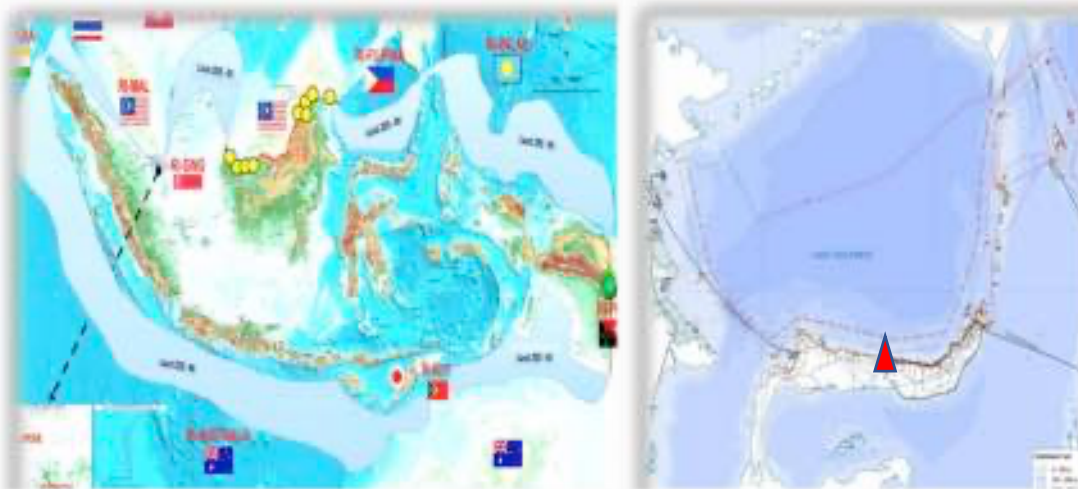
Sumber: KPH Unit IV Gorontalo Utara, 2024

2.1.2.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara tidak lepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integral dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dilaksanakan oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta RTRW Kabupaten Gorontalo Utara dan RTRW Provinsi Gorontalo. Berdasarkan aturan di atas, Gorontalo Utara, khususnya Kecamatan Kwandang menjadi Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengolahan komoditas lokal dengan orientasi pasar ke dalam dan ke luar, yang membutuhkan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia; kawasan fungsi lindung yang lestari, serta kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing, sehingga perlu didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana dasar (pemenuhan standar pelayanan minimum sosial dasar sektor kesehatan dan pendidikan), pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara.

Gambar 2.13
Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara



Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Dengan dibangunnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, lokasinya yang relatif lebih dekat dengan Kabupaten Gorontalo Utara dibandingkan Jakarta, sehingga dapat berperan lebih sebagai penyangga kebutuhan ibukota. Dengan akses melalui perairan yang lebih mudah karena terdapat beberapa pelabuhan, seperti pelabuhan peti kemas bertaraf internasional di Kecamatan Anggrek, pelabuhan penyeberangan di Gentuma, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang, jembatan

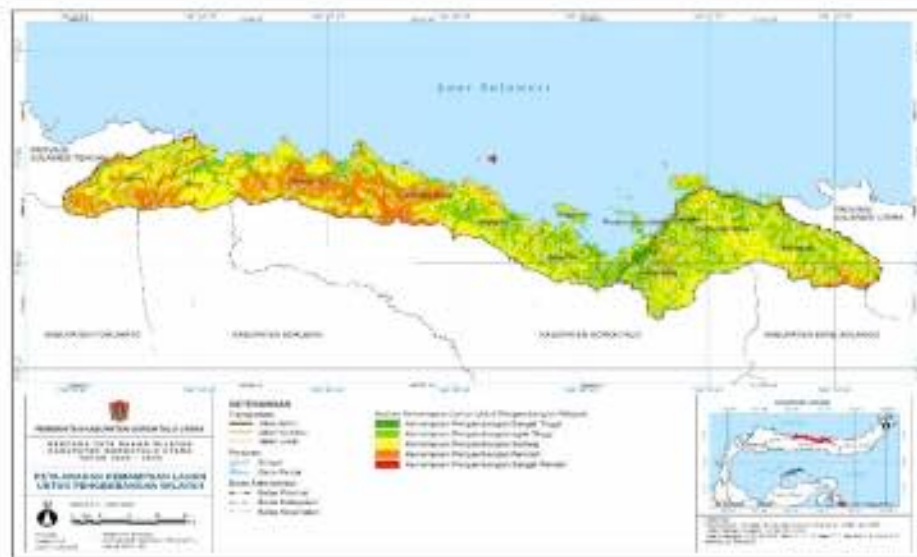
penghubung IKN dengan Kawasan Timur Indonesia dapat diperankan melalui integrasi tol laut. Melaluinya juga dapat berfungsi sebagai penunjang perdagangan karena pada area Pelabuhan Anggrek akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi industri makanan untuk melengkapi kawasan peruntukan industri yang telah ada. Bentangan pantai yang cantik dan memanjang juga dapat dijadikan sebagai alternatif *provider* sektor wisata penduduk IKN. Berbagai *privilege* tersebut akan didorong oleh dan berkoordinasi dengan *stakeholder*, termasuk dengan K/L dan swasta, agar peran tersebut terealisasi dan semakin kuat.

Letak strategis dekat dengan IKN, prospek pengembangan kewilayahan yang masih terbuka, dan potensi peningkatan simpul interkoneksi yang tinggi, menjadi modal dasar di masa mendatang peningkatan peran regional Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah terpenting di bagian utara Sulawesi bahkan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Gorontalo kelak. Selain itu, dengan konektivitas yang lebih baik dengan rencana dibangunnya Jalan Nasional yang menghubungkan kawasan Bulontio (Kecamatan Sumalata) dengan Tilamuta di Kabupaten Boalemo membuka ruang opsi yang lebih baik dalam peningkatan hasil pertanian karena Kabupaten Boalemo sebagai salah satu lumbung pertanian Provinsi Gorontalo.

Untuk mencapai keadaan demikian, selain peningkatan kawasan secara infrastruktur, perlu dilakukan pembenahan kelembagaan. Upaya pertama perlu ada peningkatan kolaborasi bersama pengelolaan kawasan antara daerah-daerah tetangga. Berikutnya perlu peningkatan sinergitas serta koordinasi, serta penguatan komitmen pembangunan antara pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga. Yang ketiga adalah peningkatan kerjasama pentahelix guna pengembangan kawasan ekonomi yang diantaranya melalui keterlibatan perguruan tinggi atau kerjasama lainnya yang potensial dan memiliki kompetensi dalam pembangunan kawasan, pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan energi, serta peningkatan layanan komunikasi serta penggunaan teknologi/digitalisasi.

Kawasan daratan Gorontalo Utara yang terbuka untuk dilakukan pengembangan wilayah secara umum di seluruh kawasan, hanya saja di beberapa kawasan kemampuan lahannya relatif lebih rendah, terutama di wilayah Kecamatan Sumalata dan Sumalata Timur karena salah satunya akibat ketinggian dan kemiringan lahannya.

Gambar 2.14
Arahan Kemampuan Lahan Pengembangan Wilayah



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031

Dalam mengembangkan dan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan, harus berbasis sektor unggulan dengan berdasarkan karakteristik wilayah memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk menghadirkan kawasan yang berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera. Secara umum, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo, salah satunya karena menjadi penyumbang terbesar dalam komposisi PDRB. Sektor ini bersifat padat karya dan memiliki daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan. Potensi pertanian yang bisa dikembangkan antara lain:

a. Kawasan Tanaman Pangan

Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum, dengan mempertimbangkan iklim dan ketinggian tempat, seluruh daerah dataran dapat ditanami komoditas tanaman pangan.

Untuk pengembangan potensi kawasan pertanian, khusus pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat dibuat sebuah program yang saling berintegrasi sehingga dapat menggabungkan beberapa unit usaha yang dikelola secara terpadu dan berorientasi ekologis. Program terpadu ini diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sehingga seluruh masyarakat diharapkan dapat memperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi, produktivitas, dan produksi yang tinggi.

Untuk kawasan persawahan, sejak tahun 2018 mulai disusun dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Gorontalo Utara, yang berdasarkan laporan LP2B Provinsi Gorontalo Tahun 2023 menghasilkan luasan seluas 4.213,76 Ha, dengan lahan cadangan pertanian pangan seluas 1.343,75 Ha, sehingga total luasan kawasan pangan berkelanjutan seluas 5.557,51 Ha. Lahan LP2B diproyeksikan untuk penyediaan pangan mandiri selama 5 tahun berikutnya karena didorong tidak akan beralih fungsi menjadi lahan kering atau lahan selain sawah untuk mencapai tujuan pencapaian swasembada pangan.

Lahan sawah yang terdiri dari sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis, selain itu pemenuhan sumber-sumber air dan perbaikan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan agropolitan dan agrowisata.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kabupaten Gorontalo Utara juga memproduksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas tersebut berupa tanaman sayur, antara lain cabai rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman sayuran yang paling banyak tumbuh dan tersebar merata adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas 455,4 Hektar, dengan produksi mencapai 18.080,4 Kuintal pada tahun 2024. Untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 13.369 Kuintal. Kecamatan Tolinggula merupakan produsen buah durian terbanyak pada tahun 2024.

Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh kecamatan. Pengembangan tanaman hortikultura sayuran dan buah di wilayah perencanaan sebagai berikut: tanaman cabe terutama di Kecamatan Anggrek, Biau, Monano, Kwandang, Sumalata Timur, Tomilito, Gentuma, Atinggola, Tolinggula, dan Kecamatan Sumalata; sedangkan tanaman mangga di seluruh kecamatan. Saat ini sedang didorong pengembangan durian lokal yang ternyata terbukti lebih baik kualitasnya secara umur produktif, kandungan serat, dan lainnya, dengan cara memperbanyak pengadaan bibit, terutama di Kecamatan Atinggola, Tolinggula, Sumalata, dan Biau. Selain varian lokal, jenis montong pun tetap didukung karena permintaan pasar tetap tinggi, kawasan khusus pengembangannya terletak di Kecamatan Atinggola, Tolinggula, Sumalata, Biau, dan Sumalata Timur.

c. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan yang paling mudah ditemukan yakni tanaman kelapa. Tahun 2024, luas tanam pohon kelapa dalam mencapai 12.289 Hektar dengan produksi mencapai 9.134,39 Ton. Kawasan perkebunan dan jenis tanaman perkebunan kelapa dalam dan jenis lainnya terdiri atas:

- Kawasan perkebunan kakao, yang terletak di Kecamatan Tolinggula, Atinggola, Sumalata Timur. Namun tanaman perkebunan jenis ini sudah tidak dilakukan peremajaan sehingga produktivitasnya mulai turun;
- Kawasan perkebunan kelapa dalam yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan perkebunan cengkeh terdapat di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, dan Tolinggula.

2. Penggunaan Lahan oleh Penduduk

Penggunaan lahan terbagi dalam dua bagian besar, yakni untuk kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung nasional yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara yakni Suaka Margasatwa Nantu Boliyohuto yang termasuk pada wilayah Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas 51.639,17 Hektar, Cagar Alam Mas-Popayato-

2,91% dan 2,17%

Komposisi luasan lahan sawah beririgasi, masing-masing tahun 2019 dan 2023



Raja dengan luas 147,94 Hektar, dan Hutan Lindung Hutokalo seluas 16.695 Hektar.

Secara umum, penggunaan lahan oleh penduduk, khususnya terhadap lahan pertanian sawah seiring tahun mengalami degradasi luasan, khususnya yang beririgasi. Sebaliknya lahan yang bukan sawah senantiasa meluas. Sedangkan

untuk permukiman tidak teridentifikasi dengan baik pada citra Landsat ETM+ karena luas lahan terbangun yang relatif sempit. Tabel yang menerangkan hal tersebut disajikan pada Tabel 2.14.

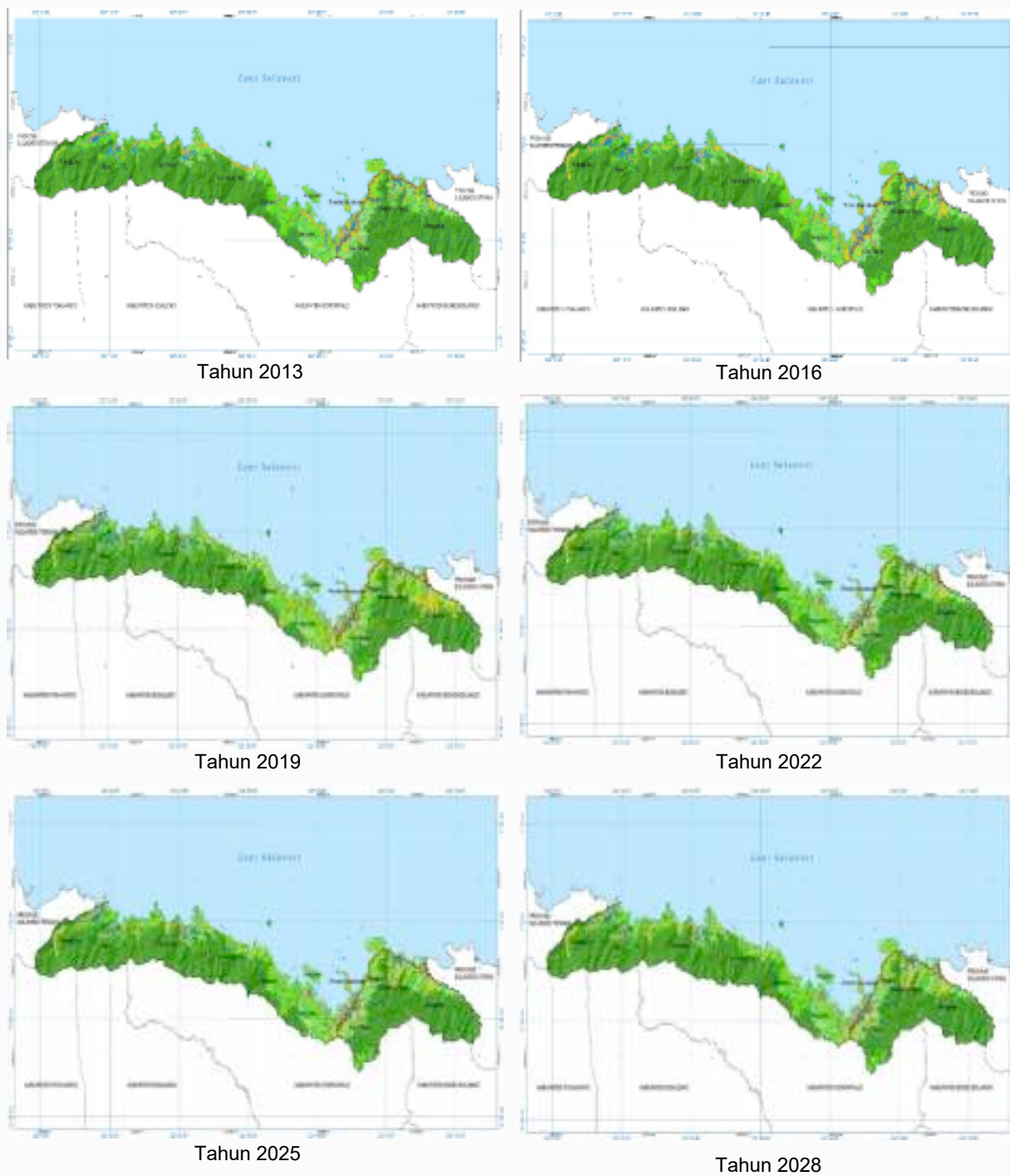
Tabel 2.14
Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2019-2023 (Hektar)

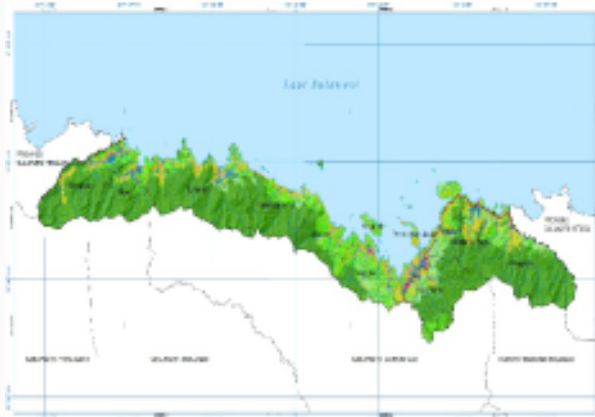
No	Penggunaan Lahan	Realisasi Jumlah Luas Lahan per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	LAHAN PERTANIAN					
1.1	Lahan Sawah					
	a. Irigasi	4.969,00	4.941,00	4.817,00	4.808,00	3.721,00
	b. Tadah hujan	668,00	626,00	569,00	558,00	493,00
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan Sawah	5.637,00	5.567,00	5.386,00	5.366,00	4.214,00
1.2	Lahan Bukan Sawah					
	a. Tegal/kebun	26.782,00	26.778,00	26.359,00	26.370,00	26.777,00
	b. Ladang/huma	8.432,00	8.602,00	8.546,00	8.553,00	9.298,00
	c. Perkebunan	13.617,00	13.617,00	14.859,00	14.859,00	14.859,00
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	14.474,00	14.474,00	14.474,00	14.474,00	14.474,00
	e. Padang penggembalaan/rumput	2.652,00	2.652,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	f. Sementara tidak diusahakan	7.948,00	7.948,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain)	2.800,00	2.800,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00
	Jumlah Lahan Bukan Sawah	76.705,00	76.871,00	77.051,00	77.069,00	78.221,00
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN					
	Jumlah Lahan Bukan Pertanian	88.515,00	88.515,00	88.515,00	88.517,00	88.517,00
	LUAS PENGGUNAAN LAHAN KESELURUHAN	170.857,00	170.953,00	170.952,00	170.952,00	170.952,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (diolah)

Secara spasial, penggunaan lahan juga terlihat perubahan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, lebih-lebih jika dibandingkan dengan proyeksi hingga 2040 mendatang menggunakan dasar perubahan tahunan saat ini. Secara detail informasi tersebut disajikan pada Gambar 2.15 berikut.

Gambar 2.15
Historis dan Proyeksi Penggunaan Lahan Tahun 2013-2040





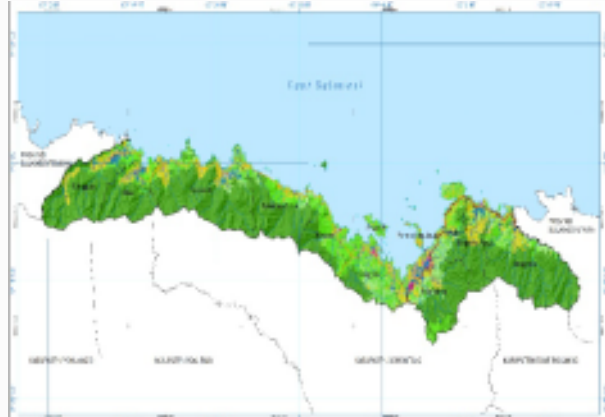
Tahun 2031



Tahun 2034



Tahun 2037



Tahun 2040



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031

Jika dilihat dari tabel-tabel di atas, lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lahan kering adalah lahan perkebunan, tegalan/kebun, dan ladang huma, dengan total 50.943 Hektar pada tahun 2023 atau 29,80 persen dari luasan seluruh penggunaan lahan oleh masyarakat. Lahan kering sendiri biasanya dimanfaatkan untuk pengembangan jagung, padi ladang, kacang-kacangan, dan tanaman hortikultura. Khusus pengembangan tanaman jagung dan padi ladang, setiap tahun terindikasi terus bertambah luasannya, sehingga jumlah lahan untuk pengembangan lahan kering terus bertambah. Budidaya tanaman jagung masih menjadi primadona, dengan wilayah pengembangan terluas di Kecamatan Atinggola, Gentuma, Tomilito, Kwandang, Anggrek, dan Sumalata. Namun meskipun demikian, alih fungsi lahan ke pertanian yang terlalu masif juga memberikan tekanan terhadap lingkungan, sehingga perlu dicari solusi jenis tumbuhan yang bernilai tambah tinggi dan cocok ditanam di lahan Gorontalo Utara namun minimal eksekus negatifnya terhadap lingkungan.

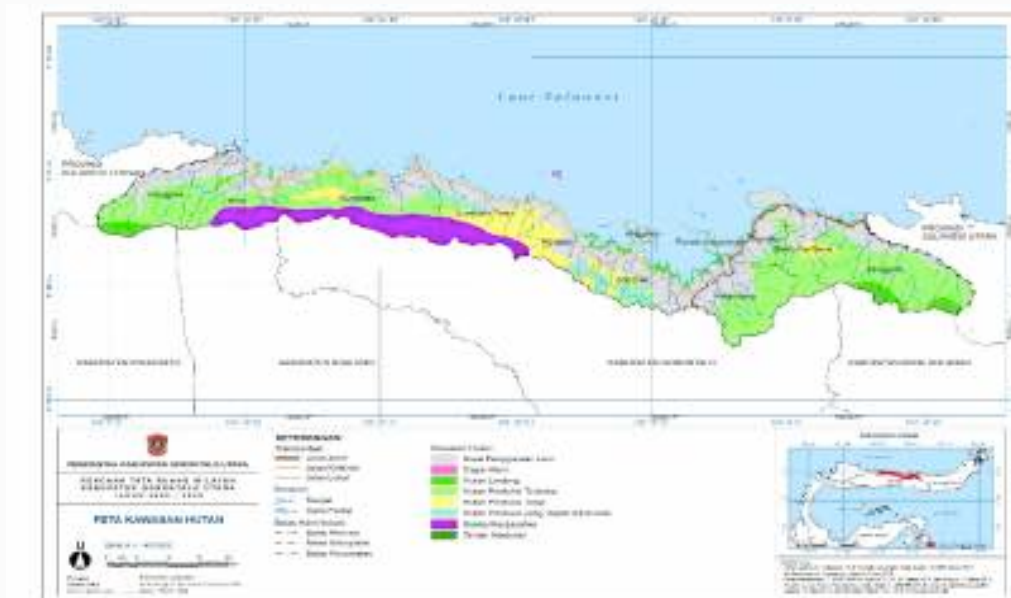
Hutan di Kabupaten Gorontalo Utara sejak dulu sudah dikenal sebagai salah satu penghasil kayu, namun rendah nilai tambahnya karena hampir seluruh hasilnya dikirim ke luar dalam bentuk kayu bulat/gelondongan. Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas keseluruhan hutan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 824.668 Hektar. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit dan daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luasannya berkurang menjadi 764.881,23 Hektar. Pada Tabel 2.15 berikut disajikan luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.15
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bonebolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	252.663,30	90.092,02	23.254,95	764.881,27

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Gambar 2.16
Peta Kawasan Hutan



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031

Sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara terus menunjukkan peran penting dalam menopang ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tahun 2020–2024, produksi padi cenderung menurun dari 43.460 ton pada tahun 2020 menjadi 27.535 ton pada tahun 2024, seiring dengan penurunan luas panen dari 11.446 hektare menjadi 6.568 hektare. Sementara itu, produktivitas padi relatif stabil di kisaran 3,7–4,4 ton per hektare. Di sisi lain, komoditas jagung menunjukkan

perkembangan yang lebih dinamis dengan peningkatan luas panen dari 33.391 hektare pada tahun 2023 menjadi 55.296 hektare pada tahun 2024, yang berkontribusi terhadap lonjakan produksi dari 169.059 ton menjadi 286.157 ton. Peningkatan tersebut menandakan adanya perbaikan dalam sistem budidaya dan semangat petani untuk memperluas lahan tanam. Perkembangan sektor pertanian ini sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu “Agro Mopomulo (Gerakan Menanam)”, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi agraris lokal melalui gerakan menanam yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.

Tabel 2.16
Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Ladang, serta Jagung

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen padi (Ha)	11,446	12,876	8,473	5,725	6,568
2	Produksi padi (Ton)	43,460	56,968	31,814	25,100	27,535
3	Produktivitas padi (Ton/Ha)	3.79	4.42	3.75	4.38	4.19
4	Luas panen jagung (Ha)	42,494	50,946	37,680	33,391	55,296
5	Produksi jagung (Ton)	201,642	259,451	190,135	169,059	286,157
6	Produktivitas jagung (Ton/Ha)	4.75	5.09	5.05	5.06	5.18

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Gorontalo Utara, 2025

Sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan lahan beririgasi dengan luas sekitar 3.700–4.800 hektare, sedangkan lahan non-irigasi berkisar 493–556 hektare. Kecamatan Sumalata, Tolinggula, dan Kwandang menjadi sentra utama sawah beririgasi, berperan penting dalam menjaga produksi padi daerah. Meski terjadi penurunan luas lahan dalam tiga tahun terakhir, potensi peningkatan produktivitas masih besar melalui optimalisasi irigasi dan pemanfaatan lahan non-irigasi.

Tabel 2.17
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan
dan Jenis Pengairan Tahun 2022-2024

No.	Nama Kecamatan	2022			2023			2024		
		Irigasi (Hektar)	Non-Irigasi (Hektar)	Jumlah	Irigasi (Hektar)	Non-Irigasi (Hektar)	Jumlah	Irigasi (Hektar)	Non-Irigasi (Hektar)	Jumlah
1	Atinggola	117	145	262	88	94	182	88	94	182
2	Gentuma Raya	369	40	409	316	30	346	316	30	346
3	Tomilito	158	24	182	127	24	151	127	24	151
4	Ponelo Kepulauan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kwandang	676	167	843	673	164	837	673	164	837
6	Anggrek	285	15	300	258	15	273	258	15	273
7	Monano	5	33	38	5	70	75	5	70	75
8	Sumalata Timur	147	16	163	97	14	111	97	14	111
9	Sumalata	1,192	66	1,258	705	46	751	705	46	751
10	Biau	849	0	849	689	0	689	689	0	689
11	Tolinggula	1,010	50	1,060	763	36	799	763	36	799
Jumlah		4,808	556	5,364	3,721	493	4,214	3,721	493	4,214

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Gorontalo Utara, 2025

Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan perkembangan yang bervariasi selama periode 2020–2024. Komoditas cabe rawit menjadi hasil utama dengan produksi tertinggi mencapai 2.314,9 ton pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 1.808 ton. Produksi cabe besar masih relatif kecil dan fluktuatif, sementara tomat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 69 ton sebelum turun kembali di tahun 2024. Komoditas bawang merah belum menunjukkan perkembangan berarti karena produksinya masih sangat terbatas. Di sisi lain, produksi buah-buahan seperti durian dan mangga mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana durian naik dari 289,1 ton pada tahun 2020 menjadi 1.336,9 ton pada tahun 2024, dan mangga meningkat dari 105,1 ton menjadi 521 ton pada periode yang sama. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya potensi besar sektor hortikultura di Gorontalo Utara, khususnya pada pengembangan komoditas buah tropis yang bernilai ekonomi tinggi.

Tabel 2.18
Produksi Tanaman Hortikultura

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabe rawit (Ton)	1,775.5	2,104.5	2,314.9	2,034.9	1,808
2	Cabe besar (Ton)	0	63.3	28.8	1.8	5.77
3	Tomat (Ton)	7.4	3.3	8.8	69	18.52

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Bawang merah (Ton)	0	1.1	0	0	0
5	Durian (Ton)	289.1	655.3	596.9	1,095.1	1,336.9
6	Mangga (Ton)	105.1	305.7	295	589.9	521

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Gorontalo Utara, 2025

Tanaman perkebunan merupakan salah satu subsektor penting dalam pembangunan pertanian yang berperan besar terhadap perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung ekspor komoditas unggulan. Jenis tanaman perkebunan umumnya memiliki siklus produksi jangka panjang dan bernilai ekonomi tinggi, seperti kelapa, kakao, dan cengkeh. Di Kabupaten Gorontalo Utara, salah satu komoditas utama yang diusahakan masyarakat adalah kelapa dalam, yang menjadi sumber bahan baku berbagai produk turunan seperti kopra, minyak kelapa, dan olahan turunannya. perkembangan luas panen dan produksi kelapa dalam di Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil. Luas panen meningkat dari 5.857 hektar pada tahun 2020 menjadi 6.135,82 hektar pada tahun 2024, sedangkan produksi juga naik dari 8.749 ton menjadi 9.134,38 ton. Meskipun demikian, produktivitas tanaman kelapa dalam cenderung stagnan di kisaran 1,49 ton per hektar, menandakan bahwa peningkatan produksi lebih disebabkan oleh perluasan areal tanam daripada peningkatan efisiensi atau hasil per hektar. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan produktivitas melalui peremajaan tanaman, penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, dan penggunaan bibit unggul agar potensi kelapa dalam di Gorontalo Utara dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.19
Luas Panen dan Produksi Kelapa Dalam

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen (Ha)	5857	6121.82	6121.82	6,135.82	6135.82
2	Produksi (Ton)	8,749	9,122	9,133	9,138.9	9,134.38
3	Produktivitas (Ton/Ha)	1.494	1.49	1.492	1.489	1.489

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Gorontalo Utara, 2025

Produksi kakao di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren menurun selama periode 2020–2024. Luas panen berkurang dari 431,5 hektar menjadi 424,25 hektar, diikuti penurunan produksi dari 111,81 ton menjadi 90,40 ton, serta produktivitas yang menurun dari 0,259 ton/ha menjadi 0,213 ton/ha. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja tanaman kakao yang disebabkan oleh faktor seperti usia tanaman yang sudah tua, serangan hama penyakit, dan keterbatasan penggunaan teknologi budidaya modern. Upaya peningkatan produksi melalui peremajaan tanaman dan pembinaan petani menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan komoditas unggulan ini di Gorontalo Utara.

Tabel 2.20
Luas Panen dan Produksi Kakao

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen (Ha)	431.5	430.25	424.25	424.25	424.25
2	Produksi (Ton)	111.81	112.59	93.26	92.17	90.40
3	Produktivitas (Ton/Ha)	0.259	0.262	0.22	0.217	0.213

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Gorontalo Utara, 2025

Produksi tanaman cengkeh di Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil. Luas panen meningkat dari 676 hektar pada tahun 2020 menjadi 744,2 hektar pada tahun 2024, menunjukkan adanya perluasan lahan atau peningkatan produktivitas lahan eksisting. Produksi cengkeh juga mengalami perubahan dari 203 ton pada tahun 2020, sempat menurun menjadi 184,97 ton pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 233 ton pada tahun 2022 dan bertahan di kisaran 208 ton pada tahun 2023–2024. Produktivitas cengkeh berada pada kisaran 0,26–0,315 ton per hektar, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja produksi di tahun-tahun tertentu meskipun belum signifikan. Secara umum, tren ini mencerminkan bahwa komoditas cengkeh masih memiliki potensi pengembangan yang baik dengan dukungan peningkatan mutu budidaya dan peremajaan tanaman.

Tabel 2.21
Luas Panen dan Produksi Cengkeh

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen (Ha)	676	710.7	739.2	744.2	744.2
2	Produksi (Ton)	203	184.97	233	208.14	208.16
3	Produktivitas (Ton/Ha)	0.30	0.26	0.315	0.28	0.28

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Gorontalo Utara, 2025

3. Potensi Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan

Karakteristik wilayah Gorontalo Utara sangat mendukung dalam terbentuknya wilayah peternakan diantaranya sapi potong, Ternak Kambing dan Ternak Ayam Namun demikian, khusus Kecamatan Anggrek dan Kwandang terdapat wilayah-wilayah tertentu tidak diarahkan pada pengembangan peternakan karena merupakan wilayah peruntukan industri serta perdagangan dan perkotaan. Dukungan kawasan Industri Anggrek terhadap sektor peternakan diarahkan berupa pengembangan industri pengolahan berbahan baku daging, dengan memanfaatkan beberapa sarana dan prasarana diantaranya fasilitas Rumah Potong (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU). Kedepan industri pengolahan di Kabupaten Gorontalo utara didesain berbasis produk-produk pengolahan hasil-hasil peternakan berbasis halal. Khusus untuk Kecamatan Kwandang Di Desa Mootinelo saat ini diarahkan untuk pelayanan kekarantina dengan memanfaatkan fasilitas *holding ground* (HG), seluas 1,5 Hektar, yang berfungsi sebagai terminal sementara untuk pelayanan karantina sebelum ternak sapi diperdagangkan antar pulau, serta potensi perdagangan produk olahan peternakan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri (eksport).

Selain itu Pengembangan populasi ternak tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur pendukung peternakan, dimana Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sentra pengembangan budidaya hewan ternak di masa mendatang diharapkan dapat terwujud dengan rencana didirikannya sebuah *ranch* seluas 700 Hektar di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula yang diselenggarakan dengan program unggulan provinsi Gorontalo yaitu pengembangan ternak sapi potong. Untuk infrastruktur *mini ranch* yang telah

dibangun di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito diperuntukan untuk pengembangan ternak kambing dan peternakan ayam.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan hewan ternak, telah tersedia Puskesmas yang terletak di Tolinggula, Sumalata Timur, Kwandang, dan Atinggola dengan masing-masing telah tersedia dokter hewan. Untuk pos Inseminasi Buatan (IB) hanya terdapat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, namun petugas aktif *mobile* ke seluruh kecamatan. Ketersediaan infrastruktur peningkat produksi hewan ternak juga telah didukung dengan fasilitas pemotongan hewan. Saat ini telah tersedia Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebanyak 12 unit (Kecamatan Kwandang 6 unit, Anggrek 2 unit, Tolinggula 1 unit, Biau 1 unit, Atinggola 1 unit, dan Kecamatan Gentuma 1 unit), Rumah Potong Hewan (RPH) unggas dan RPH Ruminansia sebanyak masing-masing 1 unit yang terletak di Desa Putiana Kecamatan Anggrek, serta Unit Pengelola Pakan Organik (UPO) 3 unit (Kecamatan Atinggola 1 unit, Tomilito 1 unit, dan Kwandang 1 unit).

Mempertimbangkan karakteristik wilayah, peluang dan potensi terbentuknya satu atau lebih kawasan peternakan sapi sangat besar. Program Gertak Birahi yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat berhasil dicapai dengan pengembangan kawasan peternakan sebagai pemicunya. Namun, perlu menjadi perhatian bersama, bahwa pengembangan tersebut membutuhkan integrasi antara sektor peternakan dengan sektor lainnya, seperti lahan yang luas untuk penyediaan lahan bagi pakan ternak. Lahan yang ada sendiri saat ini telah banyak terdistorsi dan digunakan untuk peruntukan lainnya seperti permukiman, pertambangan, industri, dan sebagainya yang menyebabkan ketersediaan lahan untuk pengadaan hijauan dan pakan ternak mendapat tekanan. Pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi limbah pertanian dan agroindustri untuk memperbaiki ketersediaan tanaman pangan dan penyediaan pakan ternak yang berkesinambungan.

Di Gorontalo Utara, data BPS 2025 menunjukkan dominasi sapi potong dengan total 22.936 ekor, terutama di Kecamatan Kwandang (5.750 ekor) dan Anggrek (5.100 ekor), yang mencerminkan fokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi. Kambing juga memiliki populasi signifikan (1.115 ekor), tersebar merata di seluruh kecamatan. Sementara itu, babi tercatat 316 ekor, terkonsentrasi di Gentuma (98 ekor) dan Anggrek (108 ekor). Jenis ternak lain seperti sapi perah, domba, kerbau, dan kuda tidak berkembang (hanya 5 ekor kuda di Atinggola), mengindikasikan keterbatasan sumber daya, budaya, atau permintaan pasar. Minimnya diversifikasi ternak berpotensi menghambat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan pengembangan subsektor lain melalui pelatihan peternak, akses modal, dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Populasi hewan ternak besar di Kabupaten Gorontalo Utara pada 2024 dapat ditinjau dari Tabel 2.22

Tabel 2.22
Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor) Tahun 2024

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kambing	Domba	Babi	Kerbau	Kuda
Atinggola	-	1,707	110	-	-	-	5
Gentuma	-	630	103	-	98	-	-
Kwandang	-	5,750	103	-	35	-	-
Tomilito	-	2,074	118	-	-	-	-
Ponelo Kep.	-	263	83	-	-	-	-
Anggrek	-	5,100	100	-	108	-	-
Monano	-	2,457	105	-	40	-	-
Sumalata	-	1,343	100	-	25	-	-
Sumalata Timur	-	425	97	-	-	-	-
Tolinggula	-	2,409	74	-	-	-	-
Biau	-	778	122	-	10	-	-
Jumlah	-	22,936	1,115	-	316	-	-

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Berdasarkan Tabel 2.19.b Populasi Ternak Unggas di Gorontalo Utara periode 2021–2023, terjadi penurunan signifikan pada jumlah ayam kampung secara keseluruhan, dengan total populasi menurun dari 432.490 ekor 2021 menjadi 290.484 ekor 2023 . Penurunan ini terlihat konsisten di hampir semua kecamatan, seperti Kwandang (92.950 menjadi 63.840 ekor) dan Monano (130.000 menjadi 84.740 ekor). Sementara itu, ayam petelur

mengalami fluktuasi, dengan beberapa kecamatan seperti Anggrek mencatat penurunan drastis dari 9.200 ekor (2021) menjadi 4.000 ekor (2023) , sementara Kwadang stabil pada kisaran 9.000–12.150 ekor. Untuk itik/itik manila, trennya lebih bervariasi: Kwadang meningkat tajam dari 365 ekor (2021) menjadi 775 ekor (2022), tetapi turun lagi menjadi 150 ekor (2023), sementara Tomilito relatif stabil di angka 310 ekor.

Penurunan populasi unggas secara agregat di seluruh kecamatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kejadian penyakit ternak, perubahan pola budidaya, fluktuasi harga pasar, serta peningkatan kebutuhan konsumsi daging unggas. Kecamatan Monano dan Kwadang, yang sebelumnya tercatat memiliki populasi ayam kampung tertinggi, menunjukkan tren penurunan signifikan sehingga memerlukan perhatian khusus dalam investigasi penyebabnya serta strategi yang tepat untuk mempertahankan keberlanjutan sektor peternakan unggas. Selain itu, ketidaklengkapan data populasi ayam petelur pada beberapa tahun terakhir, khususnya periode 2021–2022. Detail informasi tersebut disampaikan pada Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23
Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ayam Kampung			Ayam Petelur			Itik/Itik Manila		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Atinggola	20.200	20.000	15.200	-	-	-	470	445	50
Gentuma	41.250	34.200	25.992	-	-	-	365	430	130
Kwandang	92.950	84.000	63.840	12.150	9.000	9.000	730	775	150
Tomilito	12.410	12.200	9.272	4.983	1.700	1.700	310	310	130
Ponelo Kepulauan	5.490	5.200	4.952	-	-	-	401	460	160
Anggrek	59.800	55.500	42.180	9200	5.800	4.000	1.070	1.040	260
Monano	130.000	111.500	84.740	-	-	-	505	490	130
Sumalata	12.880	12.500	9.500	-	-	-	490	455	40
Sumalata Timur	15.510	15.200	11.552	-	-	-	983	970	600
Tolinggula	26.100	15.600	11.856	-	-	1.400	1.400	290	20
Biau	15.900	15.000	11.400	-	-	-	285	290	45
Jumlah	432.490	380.900	290.484	26.333	16.500	16.100	7.009	5.955	1.715

Sumber: Kabupaten Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Produksi Daging di Gorontalo Utara periode 2020–2024, meningkat dari 281.512,20 kg (2020) menjadi 544.400,40 kg (2024) . Peningkatan ini didorong oleh dominasi kenaikan produksi ayam pedaging , yang melonjak

dari 39.146,30 kg (2020) menjadi 429.930,00 kg (2024) , mencatat pertumbuhan hampir 1.000% . Sebaliknya, produksi sapi potong mengalami fluktuasi besar, dengan puncak produksi di 2023 (518.250 kg) namun turun drastis menjadi 98.347,50 kg (2024). Produksi kambing juga menunjukkan tren penurunan setelah mencapai titik tertinggi pada 2022 (25.292,25 kg), dengan angka 2023 tidak tersedia (NA) dan 2024 (16.122,90 kg). Sementara itu, produksi ayam buras terus menurun dari 13.598,20 kg (2020) menjadi 7.340 kg (2023), dipengaruhi oleh faktor seperti penyakit, harga pakan, serta pergeseran preferensi konsumen.

Secara agregat, ayam pedaging menjadi penggerak utama peningkatan produksi daging di Gorontalo Utara, Sampai saat ini, Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki fasilitas produksi ayam pedaging yang memadai di wilayahnya. Pasokan ayam pedaging masih didatangkan dari daerah sekitar yang memiliki kandang produksi khusus. Kandang di Gorontalo Utara sendiri berperan sebagai tempat pemeliharaan sementara atau transit sebelum ayam dipasarkan di berbagai pasar lokal. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur produksi ayam pedaging agar dapat memenuhi permintaan lokal secara mandiri, karena permintaan pasar yang tinggi. Penurunan produksi sapi dan kambing di Kabupaten Gorontalo Utara menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan dan diversifikasi sektor peternakan. Penurunan populasi ternak tersebut disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pemotongan ternak di Tempat Pemotongan Hewan (TPH), peningkatan pengiriman ternak antar pulau, serta peningkatan permintaan pemotongan kambing untuk aqiqah yang sejalan dengan angka kelahiran bayi di wilayah tersebut. Tabel 2.24 berikut merinci jumlah produksi daging ternak/kilogram di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.24
Produksi Daging/Kilogram

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi potong	206.718,75	212.343,75	197.355	518.250	98.347,50
2	Kambing	22.048,95	26.931,85	25.292,25	NA	16.122,90
3	Ayam buras	13.598,20	10.895,50	7.427,08	7.340	NA
4	Ayam pedaging	39.146,30	25.140,30	230.065	816.000	429.930,00
Total		281.512,20	275.311,40	494.079,08	1.341.590,00	544.400,40

Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2025

Produksi Telur di Gorontalo Utara periode 2020–2024, terjadi fluktuasi signifikan dengan dominasi kenaikan dan penurunan yang berbeda antar jenis unggas. Ayam petelur menjadi penggerak utama peningkatan produksi, mencatat kenaikan drastis dari 134.034,00 kg (2020) menjadi 353.265,00 kg (2024), meskipun sempat turun ke level rendah di 2022 (124.245 kg). Sementara itu, produksi telur Ayam buras mengalami penurunan tajam dari 211.917,65 kg (2020) menjadi 21.790 kg (2023), kemudian naik sedikit ke 28.214,18 kg (2024) , yang dipengaruhi oleh faktor seperti penyakit, perubahan pola budidaya, serta persaingan dengan ayam pedaging. Produksi telur dari Itik manila dan Itik menunjukkan tren penurunan, dengan data untuk kedua jenis unggas tersebut tidak tersedia (NA) sejak 2023. Secara agregat, total produksi telur mengalami peningkatan signifikan dari 389.896,10 kg (2020) menjadi 381.479,18 kg (2024). Ketidakstabilan populasi unggas tradisional seperti ayam buras dan itik mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendukung bagi peternak tradisional. Mendorong Program G2 - 10 guna efektivitas dalam memberikan dukungan teknis, finansial, dan pemasaran kepada peternak. Selain itu, penguatan sistem pelaporan data populasi dan produksi unggas tradisional sangat penting untuk meningkatkan akurasi pemantauan serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Upaya ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor unggas tradisional dalam jangka panjang.

Tabel 2.25
Produksi Telur (Kg)

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam buras	211.917,65	211.920,10	186.827,2	21.790	28.214,18
2	Ayam petelur	134.034,00	191.638,50	124.245	1.861.880	353.265,00
3	Itik manila	12.860,07	13.225,67	23.771,7	NA	NA
4	Itik	31.084,38	27.159,03	10.454,82	NA	NA
Total		389.896,10	443.943,30	345.298,72	1.883.670,00	381.479,18

Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2025

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berencana mewujudkan sentra pembesaran hewan ternak melalui pendirian ranch seluas 700 hektar di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula. Lokasi ini akan dimanfaatkan sebagai pusat usaha peternakan dalam kerangka Program G2-10 untuk mendukung kemandirian pangan. Pengelolaan ranch akan dilakukan melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Badan Usaha Milik Bersama Desa (Bumdesama), serta Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, untuk memenuhi visi peningkatan populasi ternak dan mendukung rencana ekspor ke berbagai daerah potensial, diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas peternakan yang memadai. Penyiapan infrastruktur, teknologi pemeliharaan, serta sistem manajemen yang efisien menjadi faktor krusial dalam mendukung produksi ternak yang optimal. Dengan demikian, ranch ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi lokal, tetapi juga berperan strategis sebagai penyokong utama ketersediaan pangan bagi Ibukota Negara (IKN) di masa depan.

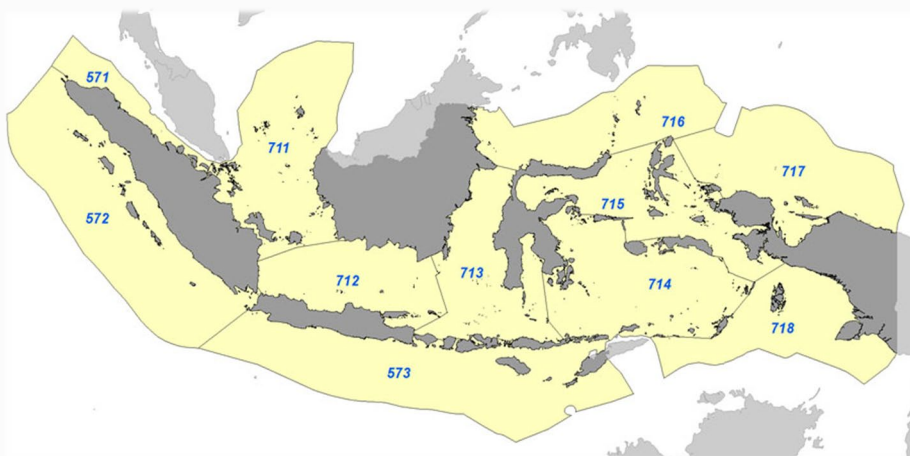
Mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, peluang dan potensi terbentuk satu atau lebih kawasan peternakan sapi sangat besar. Program Gertak Birahi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat berhasil dicapai dengan pengembangan kawasan peternakan sebagai pemicunya. Perlu menjadi perhatian bersama, bahwa pengembangan tersebut membutuhkan integrasi antara sektor peternakan dengan sektor lainnya, seperti lahan yang luas untuk penyediaan lahan bagi pakan ternak, atau perubahan *mindset* masyarakat dalam cara beternak dari lepas liar menjadi dikandangkan. Lahan yang ada sendiri saat ini telah banyak terdistorsi dan digunakan untuk

peruntukan lainnya seperti permukiman, pertambangan, industri, dan sebagainya. Pemerintah Daerah dapat melakukan optimasi limbah pertanian dan agroindustri untuk memperbaiki ketersediaan tanaman pangan dan penyediaan pakan ternak yang berkesinambungan.

4. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

Kabupaten Gorontalo Utara, dengan garis pantai ±317,39 Kilometer (331,2 Kilometer berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2044) dan wilayah Laut ZEE seluas 40.000 Kilometer², memiliki 55 pulau besar/kecil yang delapan diantaranya telah berpenghuni, mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017, wilayah perikanan tangkap Kabupaten Gorontalo Utara masuk pada Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan (WPP) 716 dengan kawasan mencakup Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian utara Pulau Halmahera dan Papua. Potensi WPP 716 ini mencapai 626.045 Ton/tahun. Pada Gambar 2.17 digambarkan garis imajiner WPP 716 yang menunjukkan potensi dari perikanan tangkap.

Gambar 2.17
Wilayah Potensi Perikanan Tangkap WPP 716



Sumber: Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi pada WPP 716 terdapat 9 jenis hasil perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan, dengan jenis tuna yang memiliki potensi nilai ekonomis

tertinggi. Secara detail jenis perikanan tangkap sekaligus potensi dan pemanfaatannya disajikan pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26
Estimasi Potensi, Volume Tangkap yang Diperbolehkan,
dan Pemanfaatan WPP 716

No.	Jenis Perikanan Tangkap	Potensi (Ton)	JTB (Ton)	Pemanfaatan (%)
1	Ikan pelagis kecil	197.012,00	137.908,00	0,70
2	Ikan pelagis besar	176.382,00	123.468,00	0,50
3	Ikan demersal	215.900,00	194.310,00	0,40
4	Ikan karang	24.909,00	12.455,00	1,60
5	Udang penaeid	6.705,00	4.694,00	0,50
6	Lobster	1.494,00	1.046,00	0,90
7	Kepiting	1.470,00	1.029,00	0,80
8	Rajungan	265,00	186,00	0,50
9	Cumi-cumi	1.908,00	1.336,00	0,90
Total		626.045,00	476.432,00	0,76

JTB: Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

Kawasan perikanan meliputi seluruh kecamatan yang ada, termasuk Kecamatan Ponelo sebagai satu-satunya kecamatan yang berbentuk kepulauan. Kawasan yang saat ini berfungsi sebagai sentra/kawasan perikanan budidaya diantaranya berada di Kecamatan Anggrek dan Kwandang bagi jenis budidaya tambak semi intensif dan sederhana, rumput laut di Kecamatan Anggrek dan Ponelo Kepulauan, sedangkan kolam air tenang/deras di Kecamatan Tolinggula dan Sumalata Timur.

Mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber air yang berkesinambungan, serta tingkat kemandirian masyarakatnya, pengembangan perikanan budidaya tawar yang meliputi ikan jenis nila dan mas, akan dikembangkan di Kecamatan Atinggola, khususnya di Desa Tombilelato. Sedangkan pengembangan rumput laut sebagai tulang punggung dalam produksi perikanan budidaya tetap didorong di wilayah perairan Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Tomilito.

Data produksi perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2019–2023. Total produksi ikan tercatat sebesar 38.727 ton pada tahun 2019, sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 35.516 ton, namun kembali meningkat hingga mencapai

43.679 ton pada tahun 2022 sebelum sedikit menurun menjadi 42.119 ton di tahun 2023. Produksi perikanan tangkap masih menjadi kontributor utama dengan rata-rata di atas 23 ribu ton per tahun, sementara produksi perikanan budidaya terus menunjukkan tren peningkatan dari 13.314 ton pada tahun 2019 menjadi 19.115 ton pada tahun 2023. Kondisi ini sejalan dengan program unggulan Bupati Gorontalo Utara di sektor “Perikanan (Tangkap dan Budidaya)”, yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, pengembangan sarana prasarana perikanan, serta optimalisasi potensi sumber daya laut dan perairan darat yang dimiliki daerah.

Tabel 2.27
Data Produksi Perikanan

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Total produksi ikan	38.727	35.516	40.422	43.679	42.119
2	Perikanan tangkap (Ton)	25.413	21.337	25.831	26.250	23.004
3	Perikanan budidaya (Ton)	13.314	14.179	14.591	17.429	19.115

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, 2024

Data produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan jenis komoditas menunjukkan variasi hasil tangkapan selama periode 2020–2024. Komoditas utama yang mendominasi produksi adalah Cakalang, Tongkol, Layang, dan Teri, dengan kontribusi signifikan terhadap total produksi perikanan tangkap yang mencapai 25.118 ton pada tahun 2024. Produksi Cakalang misalnya, berfluktuasi dari 3.119 ton pada tahun 2020 menjadi 3.070 ton pada tahun 2024, sementara komoditas Tongkol dan Layang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ikan Teri juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi, meningkat dari 675 ton pada tahun 2020 menjadi 2.998 ton pada tahun 2024. Variasi produksi ini mencerminkan dinamika potensi sumber daya laut daerah yang sangat kaya dan beragam, yang menjadi salah satu pilar utama program unggulan Bupati Gorontalo Utara di sektor Perikanan Tangkap dan Budidaya. Melalui program ini, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kapasitas nelayan, memperbaiki rantai pasok hasil laut, serta mendorong peningkatan nilai

tambah produk perikanan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan ekonomi daerah.

Tabel 2.28
Produksi Perikanan Tangkap per Komoditas

No.	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakalang	3.119	4.915	4.990	2.676	3.070
2	Tongkol	2.617	2.976	3.441	2.058	2.460
3	Tuna	84	97	181	631	731
4	Kembung	241	383	815	827	696
5	Selar	729	800	2.052	1.287	1.098
6	Layang	1.146	3.074	2.384	3.371	2.928
7	Lemuru	229	31	-	205	363
8	Tembang	263	711	226	-	446
9	Teri	675	769	1.194	1.470	2.998
10	Kuwe	723	1.477	1.241	834	948
11	Kerapu	387	582	376	206	452
12	Udang	-	-	54	-	274
13	Ikan lainnya	9.950	10.016	9.346	9.439	8.339
Total		21.337	25.831	26.250	23.004	25.118

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, 2025

Potensi dan pemanfaatan perikanan budidaya di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan peluang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2020–2022, total potensi lahan perikanan budidaya mencapai sekitar 8.855 hektare, namun yang telah dimanfaatkan baru sekitar 4.800 hingga 5.100 hektare, atau sekitar 55–58 persen dari total potensi yang ada. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi tambak sederhana dan tambak semi intensif, dengan luas pemanfaatan tertinggi mencapai 2.565 hektare pada tahun 2020 dan 2.340 hektare pada tahun 2022. Selain itu, budidaya rumput laut juga memiliki potensi sangat besar (3.890 ha), meskipun tingkat pemanfaatannya masih terbatas sekitar 10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya masih memiliki ruang pengembangan yang luas, baik dari segi peningkatan kapasitas produksi maupun diversifikasi komoditas. Hal ini selaras dengan program unggulan Bupati Gorontalo Utara dalam bidang “Perikanan Tangkap dan Budidaya”, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi biru, peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan, serta

optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perairan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.29
Penyebaran Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya

No.	Indikator	2020		2021		2022	
		Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)
1	Jaring apung laut	5,8	3,2	5,8	4,03	5,8	3,90
2	Jaring apung tawar	11,9	0,8	11,9	1,06	11,9	0,9
3	Kolam air tenang	17,4	14	17,4	12,9	17,4	14,8
4	Rumput laut	3.890	339	3.890	446	3.890	375
5	Tambak sederhana	2.350	1.896	2.350	2.221	2.350	2.060
6	Tambak semi intensif	2.580	2.565	2.580	2.477	2.580	2.340
Jumlah		8.855,1	4.818	8.855,1	5.161,99	8.855,1	4.794,6

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, 2023

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 14.179 ton pada tahun 2020 menjadi 21.674 ton pada tahun 2024. Komoditas yang mendominasi produksi adalah rumput laut, dengan peningkatan produksi yang sangat tajam dari 8.667 ton pada tahun 2020 menjadi 19.944 ton pada tahun 2024, menjadikannya komoditas unggulan utama sektor budidaya daerah. Selain itu, udang vanamae dan bandeng juga menjadi komoditas penting meskipun produksinya cenderung berfluktuasi, sementara jenis ikan air tawar seperti nila, lele, dan patin menunjukkan perkembangan positif sebagai hasil pengembangan budidaya di perairan darat. Kecenderungan peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya di Gorontalo Utara memiliki prospek besar dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir dan pedesaan. Peningkatan produksi ini juga mencerminkan hasil nyata dari pelaksanaan program unggulan Bupati Gorontalo Utara di bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, yang diarahkan untuk memperluas areal pemanfaatan lahan budidaya, memperkuat kapasitas pembudidaya, serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan guna mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Tabel 2.30
Produksi Perikanan Budidaya per Komoditas

No.	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Udang windu	223	221	232	180	70,65
2	Udang vanamae	2.683	2.687	2.663	1.783	607,62
3	Rumput laut	8.667	9.257	12.145	15.300	19.944,41
4	Kerapu	23	23,3	22	21	25,72
5	Bandeng	2.076	1.880	1.831	1.229	734,79
6	Kakap	-	-	-	-	-
7	Nila	227	235	235	248	236,37
8	Patin	16	17	25	13	13,21
9	Mas	138	144	144	144	6,23
10	Gurame	-	-	-	-	-
11	Lele	10	9	12	14	17,62
12	Ikan hias	-	-	-	-	-
13	Kuwe	20,5	20,3	17	18	17,14
14	Lobster	-	-	-	-	-
15	Ikan lainnya	95	97	103	94	-
Total		14.179	14.591	17.429	19.115	21.674

Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2025

5. Potensi Pertambangan dan Energi

Saat dokumen ini disusun, belum ada kawasan pertambangan mineral dan logam bernilai tinggi yang dikelola secara profesional dan mendatangkan pendapatan bagi daerah. Namun daerah ini tetap memiliki potensi sumberdaya pertambangan logam di beberapa titik, meliputi emas, perak, tembaga, dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam seperti granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt juga ada di beberapa kecamatan. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengalir wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

6. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Secara umum, seluruh kawasan merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai obyek wisata, yang meliputi:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yang meliputi upaya pelestarian dan pengembangan atas kawasan:
 - a. Kawasan pariwisata Situs Budaya Tanjung Kramat di Desa Hutokalo Kecamatan Sumalata;

- b. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Benteng Kota Maas di Kecamatan Kwandang;
 - c. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Benteng Leiden atau Oranye di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito;
 - d. Kawasan Pariwisata Kotajin sebagai situs yang diajukan sebagai kawasan *geopark* yang ada di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola;
 - e. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya *Pillbox* di Desa Katialada Kecamatan Kwandang;
 - f. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Makam Herman Christiaan Knappert di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur;
 - g. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Bulongo Da'a di Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur;
 - h. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Makam Pecinan di Desa Hulawa dan Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur;
 - i. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Pertambangan *Maatscappy* Sumalata di Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur;
 - j. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Rumah Instalasi Menara Suar Pulau Lampu di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam, yang meliputi upaya pengembangan atas kawasan:
- a. Kawasan wisata pantai:
 - Wisata Pantai Monano di Kecamatan Monano;
 - Wisata Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola;
 - Wisata Pantai Botudidingga di Kecamatan Tomilito;
 - Wisata Pantai Hutokalo di Kecamatan Sumalata;
 - Wisata Pantai Tolitehuyu di Kecamatan Monano;
 - Wisata Pantai Dunu di Kecamatan Monano;
 - Wisata pantai berpasir putih Pantai Panjang di Kecamatan Tolinggula; dan

- Wisata Pantai Malagoso di Kecamatan Gentuma Raya.
- b. Kawasan wisata air terjun:
- Wisata Air Terjun Didingga di Desa Didingga di Kecamatan Biau;
 - Wisata Air Terjun Limbato di Kecamatan Tolinggula;
 - Wisata Air Terjun Papualangi di Kecamatan Tolinggula;
 - Wisata Air Terjun Masuru di Desa Masuru di Kecamatan Kwandang;
dan
 - Wisata Air Terjun Butato di Kecamatan Sumalata.
- c. Kawasan wisata bawah laut:
- Wisata bawah laut di Desa Buladu Kecamatan Sumalata;
 - Wisata bawah laut di Pulau Bohu Desa Garapia Kecamatan Anggrek;
 - Wisata bawah laut Pulau Tolinggula di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula;
 - Wisata bawah laut Pulau Raja dan Pulau Popaya di Kecamatan Sumalata Timur; dan
 - Wisata bawah laut Pulau Lampu di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
- d. Kawasan wisata pulau:
- Wisata Pulau Saronde di Kecamatan Ponelo Kepulauan;
 - Wisata Pulau Diyonumo di Kecamatan Sumalata Timur;
 - Wisata Pulau Dokokayu di Kecamatan Gentuma Raya;
 - Wisata Pulau Bohu di Kecamatan Anggrek;
 - Wisata Pulau Tolinggula di Kecamatan Tolinggula; dan
 - Wisata Pulau Mohinggito di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
- e. Kawasan wisata terbatas cagar alam dan suaka margasatwa:
- Kawasan Cagar Alam Mas - Popaya - Raja;
 - Kawasan Wisata Alam Papualangi *Hills*;
 - Kawasan Suaka Margasatwa Nantu;
 - Kawasan Mebongo *Hills*;
 - Tombulalilato (*village attraction*);

- Lelato *Hills*.

f. Kawasan *rest area*:

- Taman Pontolo Indah;
- Taman Ota lo Jin.

g. Kawasan wisata *Resort*:

- *Oyile Beach Resort* di Kecamatan Tomilito;
- *Diyonumo Sea Resort* di Kecamatan Sumalata Timur;
- *Minanga Beach Resort* di Kecamatan Atinggola.

h. Kawasan wisata olahraga:

- Olahraga arung jeram dan *flying fox* di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula;
- Olahraga paralayang di Bukit Dunu Kecamatan Sumalata Timur;
- Olahraga *snorkling* di Pulau Mohinggoto dan Saronde di Kecamatan Ponelo kepulauan.

Skala prioritas pembangunan kepariwisataan didasarkan pada skor dari kriteria-kriteria minimal Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor PM.37/UM.001/MKP/07, yang digolongkan dalam beberapa klasifikasi. Dalam konteks Gorontalo Utara, diterjemahkan dalam penentuan objek wisata yang termasuk dalam '*the big five destinations*' (5 objek wisata yang menjadi unggulan daerah):

- a. Ota lo Jin atau Kota Jin (dikatakan berupa istana atau benteng para jin), merupakan bongkahan batu gamping raksasa yang terdiri dari *stalagtit* dan *stalagmit* dengan pintu masuk gua yang sempit dan di atasnya ditumbuhi pohon beringin. Ada juga Pantai Minanga yang tidak jauh dari lokasi Ota lo Jin, pantai yang sangat indah dengan sajian pasir putih dan pantai panjangnya;
- b. Pulau Saronde, merupakan destinasi wisata premium yang saat ini telah dikelola oleh pihak asing. Kemasan pulau eksotis ini berpasir putih, air laut yang bersih dan bening, sekaligus telah dilengkapi fasilitas penginapan (bungalow) dan restoran;

- c. Pulau Mohinggito, merupakan pulau yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas lengkap, seperti *cottage*, gazebo, restoran, panggung, MCK, dan lain-lain, selain itu terdapat pula atraksi wisata berupa *banana boat*, dan lain sebagainya;
- d. Pulau Diyonumo, merupakan pulau yang termasuk dalam rencana kawasan Sumalata *Waterpark* bersama dengan *resort* lautnya. Pulau yang indah dengan sungguhan pemandangan atas bukit yang ditumbuhi oleh rumput ilalang;
- e. Pantai Monano, merupakan kawasan pantai berpasir putih gading yang banyak diminati oleh wisatawan untuk melaksanakan aktivitas berenang bersama keluarga.



Foto 2.4 *The Big Five Destinations* di Gorontalo Utara

Tabel 2.31
Klasifikasi Jenis Daya Tarik Wisata (DTW)

No.	Jenis Obyek Wisata	15 DTW Unggulan	15 DTW Berkembang	25 DTW Rintisan
1	Wisata Alam <i>the big five destinations:</i> - Pulau Saronde - Pulau Mohinggito - Kawasan Sumalata Waterpark Beach Resort (Diyonumo, Bunto Koluwoka, dan lain-lain.) - Pantai Monano - Pantai Minanga	- Pulau Saronde - Pantai Botudidingga - Pantai Minanga - Pantai Monano - Pulau Mohinggito - Taman Laut Pulau Raja - Pulau Diyonumo - Pulau Dokokayu - Oyile Resort - Diyonumo Sea Resort - Minanga Resort	- Pulau Bohu - Pulau Tolinggula - Papualangi Hills - Pantai Hutokalo/Milango - Pantai Kikia - Pantai Malagoso - Pantai panjang Tolinggula	- Wisata agro Leboto - Air panas Posso - Pantai Dunu - Wisata agro pisang - Wisata agro cengkeh - Wisata agro kelapa - Wisata agro kebun sawit PT Umika Makmur Mootilango - Budidaya Buffalo Park - Budidaya penyus - Napo Kima (diving site) - Kawasan Rabua (beach attraction) - Tumbulilato (village attraction)
2	Wisata Budaya <i>the big five destinations:</i> - Ota lo Jin	- Benteng Orange - Benteng Maas - Geopark Ota Jin - Kubur Aulia di Moluo - Makam C. Knappert di Sumalata Timur	- Desa Wisata Logpon - Batu Tiga Molingkopoto Selatan - Benteng Maas - Pasar Sore Tradisi Kwandang - Tanjung Kramat - Kampung Wisata Nelayan Sumalata - Belanga Besar Hulawa	- Embung Pemancingan dan Kuliner Pontolo - Ritual selamat laut - Tombilotohe - Walima - Mandi Safar - Moloopu dan Pulangga - Makam Raja Panipi - Tulude
3	Minat khusus (buatan manusia)	- Rest Area Pontolo Tourism Information Center (TIC)	- Ragam atraksi di Sungai Koluwoka - Pantai Syariah Dambalo Indah - Bumi Perkemahan Pantai Monano - Wisata ziarah kuburan Belanda	- Outbond (Flying Fox, ATV, horse riding) - Wisata olahraga paralayang - Bumi Perkemahan Puncak Bukit Panorama - Tracking crosser di hutan - Aneka ecosport marine tourism (jet ski) - Paket mancing mania - Kebun binatang - Waterboom - Bukit Paralayang (aerosport) Monano - Paralayang di Bukit Dunu Ceria

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selain mendorong objek wisata yang telah lama dikembangkan, juga melakukan pemetaan dan inisiasi dalam mengembangkan objek-objek baru (rintisan), diantaranya:

a. Kawasan Pantai Rabua di Desa Dunu Kecamatan Monano

Keunggulannya memiliki bentangan pantai pasir putih gading sepanjang 1,76 Kilometer dan luas 156.999 Meter², berada di wilayah teluk sehingga perairannya relatif tenang, dikelilingi oleh perbukitan sehingga menambah eksotisme pemandangan pantai, serta sangat dekat dengan jalan raya. Di kawasan ini dekat dengan pulau konservasi tukik dan lobster serta terdapat *diving site*.

b. Kawasan Lembah Lelato di Desa Lelato Kecamatan Sumalata

Keunggulan objek wisata ini memiliki karakteristik bentangan alam perkampungan dan persawahan bersandingan dengan lautan sekaligus dekat dengan jalan raya, sehingga sangat tepat untuk didirikan pusat jajanan ringan dan *rest area* sepanjang kurang lebih 2 Kilometer. Selain itu, karena karakternya perbukitan yang memantulkan angin, cocok dikembangkan untuk olahraga paralayang.

c. Kawasan Lembah Mebongo di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata

Serupa dengan Lembah Lelato, kawasan ini memiliki *view* yang mirip, dengan perbukitan yang memantulkan angin, bersanding dengan pandangan lautan sehingga tepat dikembangkan olahraga paralayang. Dengan bentangan area potensial sejauh kurang lebih 1,5 Kilometer, tepat dijadikan sebagai *rest area* dan area penjualan jajanan ringan.

d. Napo Kima (*diving site*)

Terletak di Desa Hutokalo Kecamatan Sumalata sejauh 17,53 Mil dari Pantai Hutokalo yang sangat cocok sebagai area menikmati keindahan alam bawah laut karena memiliki tingkat visibilitas dalam air yang baik serta terdapat bentangan batuan/terumbu karang sebagai rumah berbagai spesies ikan. Pemanfaatan objek ini sudah dalam bentuk lokasi *scuba diving*, *free diving*, *underwater photography*, dan tempat memancing ikan karang.

- e. Pantai Panjang Tolinggula Desa Tolinggula Pante Kecamatan Tolinggula
Pantai ini memiliki karakter pemandangan pantai tropis pasir berwarna hitam/kelabu dengan area potensial sepanjang 1,5 Kilometer yang cocok dijadikan lokasi berbagai atraksi seperti jalur berkuda, *rest area*, *surfing*, *sand-play*, *moto TV*, *camping*, dan lain sebagainya.
- f. Kawasan *Kwandang Waterfront City* (KWC) berupa rencana perluasan lahan/reklamasi yang akan dikembangkan untuk pengembangan *property*, kewilayahan, dan industri kreatif layaknya Kawasan Boulevard Manado, Pantai Losari Makassar, atau Mandalika.
- g. Kawasan Bukit Dunu Ceria di Kecamatan Sumalata Timur, yang menawarkan *all in one package*, pengunjung dapat menikmati alam dengan berkemah di atas bukit, serta melakukan wisata olahraga paralayang.
- h. Kawasan *Sumalata Waterpark* yang terletak di Kawasan Sumalata Timur yang merupakan kawasan terintegrasi wisata alam dan pulau, wisata sejarah dan *heritage*, hingga desa wisata.

Selain yang sudah ada saat ini, ke depan pengembangan pariwisata tidak hanya mengejar angka kunjungan wisatawan, juga mendorong pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*), melalui konsep pengelolaan yang berkelanjutan (bisnis pariwisata), ekonomi yang berkelanjutan (sosio ekonomi) jangka panjang, keberlanjutan budaya (*sustainable culture*) yang harus selalu dikembangkan dan dijaga, serta aspek keberlanjutan lingkungan (*environment sustainability*). Guna mencapai kondisi pengembangan tersebut, di Gorontalo Utara perlu disiapkan:

1. Partisipasi

Masyarakat Gorontalo Utara harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan para pelaku/*stakeholder involvement*

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan lokal (*local belonging*)

Pembangunan pariwisata di Gorontalo Utara harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti penginapan/hotel, restoran/rumah makan, dan seterusnya harus dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat, serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, lokasi wisata, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata, serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal Gorontalo Utara yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational* dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik- topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *landscape*, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

7. Potensi Pengembangan Industri

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi salah satunya dilakukan proses industrialisasi, mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya, meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik *forward linkage* maupun *backward linkage*. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, Gorontalo Utara sangat potensial untuk mendorong sektor industri yang ada kaitannya dengan sektor maritim/agraris meskipun saat ini masih dalam tahap awal dan memerlukan dukungan untuk berkembang karena menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya inovasi. Untuk mendorong pertumbuhan industri,

perlu adanya fokus pada pengembangan industri pengolahan, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan mendorong inovasi.

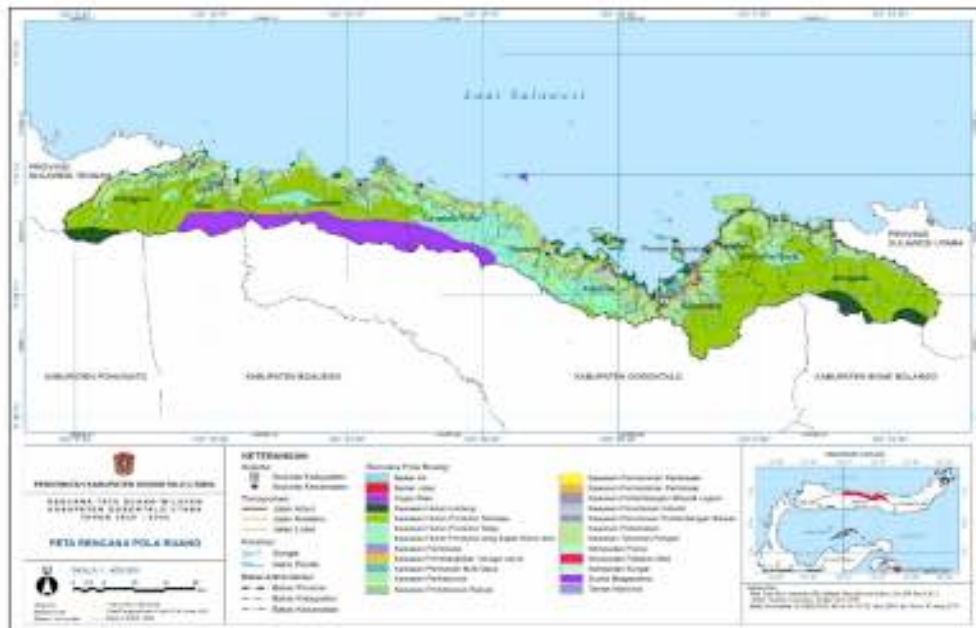
Beberapa potensi sektor industri Kabupaten Gorontalo Utara yang berbasis keunggulan daerah, yaitu:

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan terdapat di seluruh kecamatan karena seluruhnya berada di wilayah pesisir. Industri pengolahan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi mencapai 1.394.526 Kg/tahun dan industri pengasapan ikan sebesar 337.680 Kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut yang berada di pesisir Pulau Ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis aren dan ijuk aren. Potensi bahan baku pohon aren memiliki luasan areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon dengan asumsi 1 Ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dan sebagainya. Daerah yang terkenal sebagai penghasil komoditas ini yaitu di Kecamatan Atinggola;
- Industri berbasis tanaman bambu burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture;
- Industri berbasis kerajinan sulaman karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate khas Gorontalo Utara.

8. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman

Rencana pola ruang kawasan permukiman Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2044 menggambarkan pola pemanfaatan ruang kawasan-kawasan permukiman; kaitan struktural antara berbagai jenis kawasan berdasarkan rencana pengembangannya; serta hierarki dari pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pelayanannya.

Gambar 2.18
Rencana Pola Ruang Gorontalo Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031

Melihat dinamika dan perkembangan saat ini, tidak semua penduduk bermukim di tempat yang layak dan baik. Sebagian penduduk bermukim di kawasan rawan bencana, kawasan yang tidak memiliki keteraturan, atau bercampur dengan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan permukiman, contohnya seperti kawasan permukiman Katialada. Ketidakteraturan permukiman akan berdampak pada masalah kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi masyarakat yang berujung pada munculnya *slum area*. Kawasan permukiman yang baik dan sehat selayaknya memiliki keteraturan dan kelayakan bangunan serta fasilitas penunjang seperti ketersediaan jalan akses, air bersih, pembuangan air limbah, dan tempat pembuangan sampah.

Keadaan permukiman di Kabupaten Gorontalo utara secara umum belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor SK. 47.III Tahun 2022, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah peruntukan perkotaan yaitu Kecamatan Kwandang dan Anggrek dengan luasan total 123.67 Hektar. Untuk itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam hal

pengembangan kawasan permukiman baru, peremajaan dan peningkatan kualitas permukiman, serta penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

Strategi pengembangan wilayah permukiman disesuaikan berdasarkan potensi, karakteristik, dan homogenitas wilayah. Secara geografis, kawasan permukiman terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok *continent* (daratan induk) dan kelompok *archipelago* (kepulauan). Kelompok *continent* adalah yang terletak di daratan Pulau Sulawesi, dan kelompok *archipelago* adalah yang terdiri dari tatanan kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil di bagian utara. Kawasan permukiman di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas:

1. Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya non-agraris dan lebih menonjolkan pada kegiatan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan dan terletak di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.

2. Kawasan permukiman perdesaan

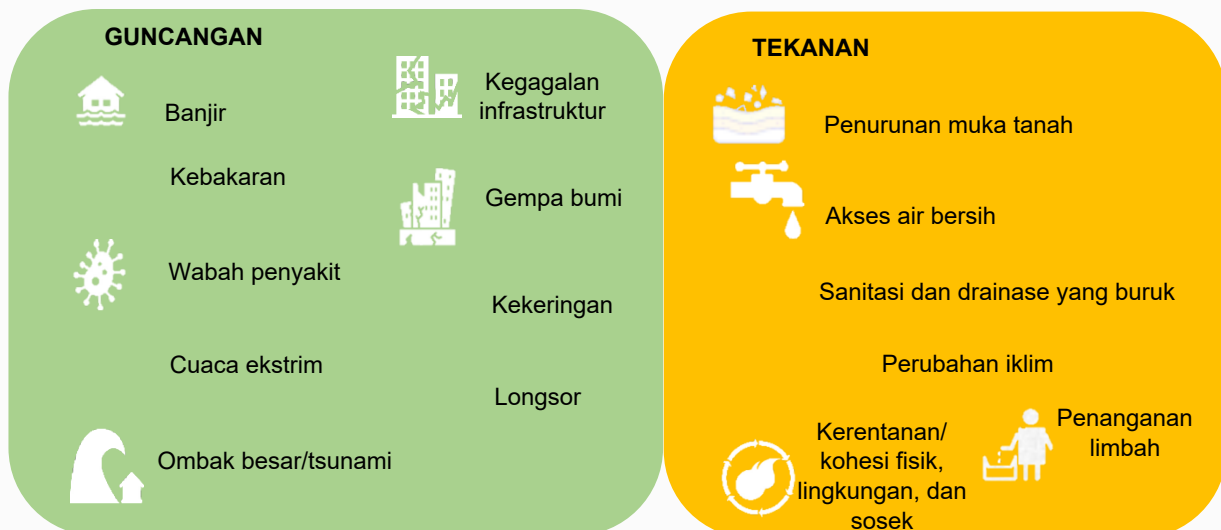
Kawasan perdesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utamanya berorientasi pada kegiatan pertanian/agraris, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Kawasan perdesaan dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan (Kecamatan Sumalata, Biau, Tolinggula) dan/atau minapolitan (Kecamatan Kwandang, Anggrek, Monano, Ponelo Kepulauan, Sumalata Timur, dan Kecamatan Sumalata) dan pengembangan permukiman transmigrasi (Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, dan Kecamatan Tolinggula) menjadi suatu kota terpadu mandiri.

Berdasarkan data penggunaan lahan yang tertuang dalam RTRW, kawasan permukiman Kabupaten Gorontalo Utara memiliki luas sebesar 20.228

Hektar atau sekitar 4 persen dari luas keseluruhan wilayah. Selain itu, pengembangan kawasan pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, harus memperhatikan kawasan rawan bencana yang akan dibahas pada bahasan berikutnya.

2.1.2.9 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Sebagai wilayah yang *disaster-prone*, Kabupaten Gorontalo Utara tidak luput dari kerentanannya terhadap bencana, baik bencana alam/lingkungan, seperti banjir, *land subsidence*, gempa, dan bencana lainnya, serta bencana non-alam seperti kebakaran. Para pemangku kepentingan menyepakati jenis guncangan dan ancaman bencana yang berpotensi dialami di Gorontalo Utara sebagai berikut.



Berdasarkan hasil analisis spasial, hampir 60 persen wilayah Gorontalo Utara berada pada wilayah dengan lereng curam dan sangat curam, sehingga menghadapi tantangan yang unik dan kompleks, seperti:

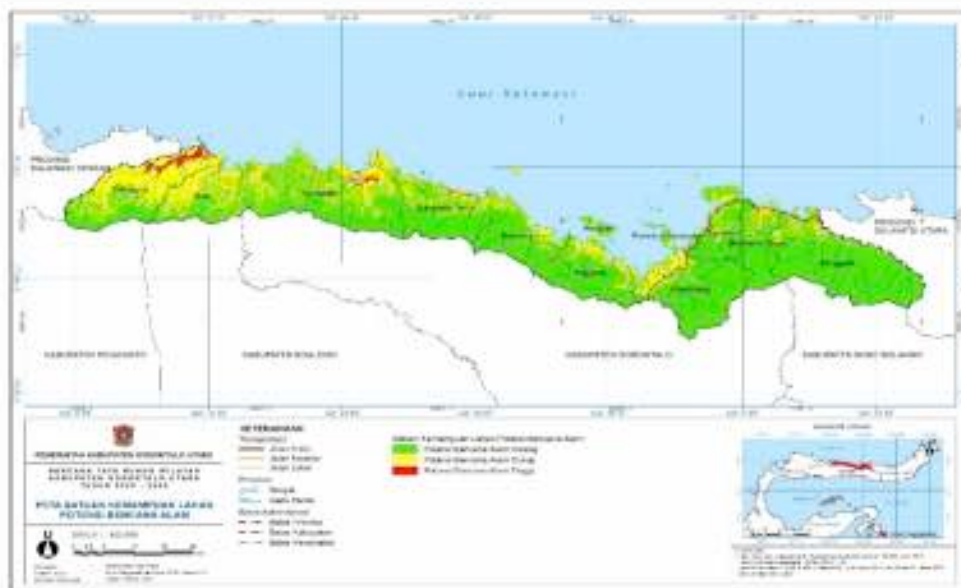
1. Erosi: Lereng curam rentan terhadap erosi tanah, terutama jika hutan atau vegetasi alami dihilangkan. Hujan deras atau aktivitas manusia seperti pertanian yang tidak berkelanjutan dapat memicu erosi yang dapat merusak lapisan tanah, menyebabkan longsor, dan mengancam keberlanjutan lingkungan.

2. Longsor: Wilayah berlereng curam dapat mengalami longsor tanah yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk curah hujan tinggi, gempa bumi, atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkendali. Longsor dapat mengakibatkan kerusakan properti, infrastruktur, dan bahkan membahayakan nyawa.
3. Aksesibilitas dan infrastruktur: Membangun infrastruktur di wilayah berlereng curam lebih sulit dan mahal dibandingkan dengan wilayah datar. Jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya dapat menghadapi kendala topografi dan memerlukan teknik konstruksi khusus untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan.
4. Ketersediaan lahan untuk pertanian: Lereng curam mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan lahan untuk pertanian. Penanaman tanaman secara efektif di lereng curam memerlukan metode pertanian terkontrol yang dapat mencegah erosi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah.
5. Ancaman bencana alam: Wilayah dengan lereng curam seringkali lebih rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau gempa bumi, yang memerlukan perencanaan kebencanaan yang baik dan infrastruktur yang tahan gempa untuk melindungi penduduk dan properti.
6. Konservasi lingkungan: Lereng curam sering menjadi habitat alami flora dan fauna. Mempertahankan keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem asli dapat menjadi tantangan di tengah tekanan pembangunan dan eksploitasi manusia. Solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk manajemen tanah yang berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bijaksana, perencanaan perkotaan yang cerdas, dan peringatan dini serta mitigasi bencana. Keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam mengelola wilayah dengan lereng curam.

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam, dalam konteks Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas:

1. Kawasan rawan gempa bumi, yang mencakup seluruh wilayah kabupaten;
2. Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, dan Tolinggula;
3. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, dan Tolinggula;
4. Kawasan rawan tsunami, terdapat di Kecamatan Kwandang, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula; dan
5. Kawasan rawan abrasi; terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Sumalata Timur, Sumalata, dan Tolinggula.

Gambar 2.19
Satuan Kemampuan Lahan Potensi Bencana Alam



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2040

Karena rentan terhadap bencana, dalam arahan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara telah dipetakan wilayah-wilayah rawan bencana, beserta jalur-jalur evakuasi bencana alam diantaranya sebagai berikut:

1. Ruang Mitigasi Bencana

Ruang mitigasi bencana diarahkan berada pada daerah pesisir/daerah pinggiran pantai di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan; Desa Moluo

dan Dambalo Kecamatan Kwandang; Desa Kikia, Kasia, Bulontio Timur, Hutokalo, Bulontio Barat di Kecamatan Sumalata; Desa Wubudu, Deme I, Deme II Kecamatan Sumalata Timur; Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya; serta Desa Dunu dan Monano Kecamatan Monano.

2. Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana diarahkan mengikuti jaringan jalan menuju daerah dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan terdekat. Mitigasi bencana ini akan mengikuti pola penetapan terbaru dari kawasan yang terkena dengan rawan bencana tersebut. Untuk itu ditetapkan kawasan rawan bencana yang terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana tinggi (letusan gunung api, gerakan tanah/longsor, dan sempadan sesar aktif) menjadi kawasan lindung. Pemanfaatan ruangnya diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ).
- b. Kawasan rawan bencana tinggi (banjir dan tsunami), yang diusulkan menjadi kawasan budidaya, harus memenuhi persyaratan teknis yang adaptif terhadap bencana, yang diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ).

Gambaran bencana alam yang pernah terjadi disajikan pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Jenis Bencana Alam dan Intensitasnya

No.	Jenis Bencana	Jumlah							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gempa	0	39	17	26	43	19	0	0
3	Kekeringan	0	0	3	0	0	0	18	0
4	Tanah longsor	2	2	3	3	0	0	1	0
5	Gelombang ekstrim dan abrasi	2	0	0	3	1	0	1	0
7	Banjir	27	9	3	11	17	4	20	7
8	Banjir dan tanah longsor	0	0	0	0	0	0	0	20

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Gempa bumi merupakan jenis bencana alam dengan intensitas tertinggi meskipun sebagian besar berpusat di daerah sekitar, namun karena dampaknya tidak sampai merusak, secara umum tidak berpengaruh terhadap

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Wilayah perairan utara Gorontalo merupakan daerah gempa teraktif kedua di Provinsi Gorontalo. Wilayahnya membentang di perairan laut Sulawesi dari utara Sumalata ke utara Kwandang, serta patahan aktif jalur pantai utara menuju pantai selatan, yang terdapat di 2 kecamatan yang terdiri 11 desa.

Selain gempa, bencana banjir adalah bencana yang paling sering terjadi sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Rincian lokasi banjir per kecamatan disajikan pada Tabel 2.33 dan luasan ancamannya pada Tabel 2.34.

Tabel 2.33
Intensitas Bencana Alam Banjir per Kecamatan

No.	Kecamatan	Intensitas Bencana Banjir							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tolinggula	4	1	-	-	-	-	1	3
2	Biau	5	-	1	1	2	-	2	1
3	Ponelo Kepulauan	1	-	-	-	1	-	-	-
4	Monano	5	3	-	3	1	1	1	1
5	Kwandang	3	1	-	1	2	-	3	-
6	Sumalata	4	2	1	1	2	-	3	1
7	Tomilito	2	1	-	1	4	-	4	-
8	Atinggola	3	1	1	1	2	1	1	1
9	Sumalata Timur	-	-	-	2	-	-	3	-
10	Anggrek	-	-	-	1	2	1	2	1
11	Gentuma Raya	-	-	-	-	1	1	1	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Tabel 2.34
Luasan Ancaman Banjir

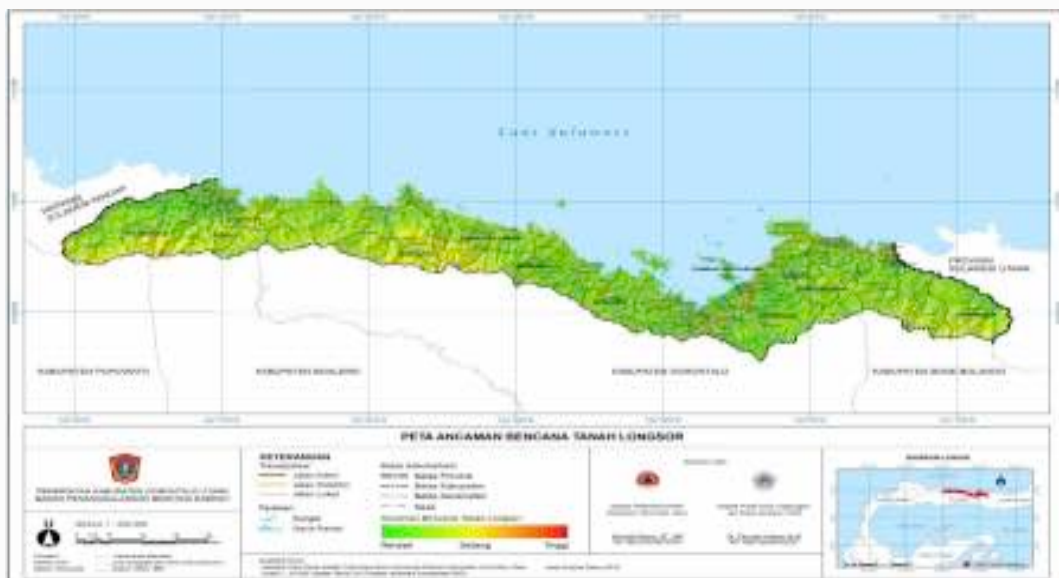
No.	Kecamatan	Ancaman Banjir (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Anggrek	6.553	7.486	4.210	18.249
2	Atinggola	10.395	5.571	2.811	18.777
3	Biau	2.720	2.120	1.233	6.073
4	Gentuma Raya	4.101	3.151	1.734	8.986
5	Kwandang	9.472	7.359	4.603	21.434
6	Monano	4.501	4.750	2.618	11.869
7	Ponelo Kepulauan	629	985	345	1.959
8	Sumalata	7.110	6.129	3.220	16.459
9	Sumalata Timur	4.682	3.196	1.816	9.694
10	Tolinggula	5.648	4.129	2.641	12.418
11	Tomilito	5.734	7.650	4.330	17.714
Jumlah		61.545	52.526	29.561	143.632

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa 16,63 persen berada dalam wilayah yang terancam banjir skala tinggi, dengan komposisi kewilayahan terbesar berada di Kecamatan Kwandang dengan luasan 4.603 Hektar.

Disamping secara geografis berada di wilayah berisiko tinggi, pembangunan yang masif tanpa memperhitungkan tata guna lahan ditenggarai menjadi penyebab utama meningkatnya resiko terjadinya bencana banjir. Secara spasial, wilayah terancam banjir seperti yang terlihat pada Gambar 2.20 berikut.

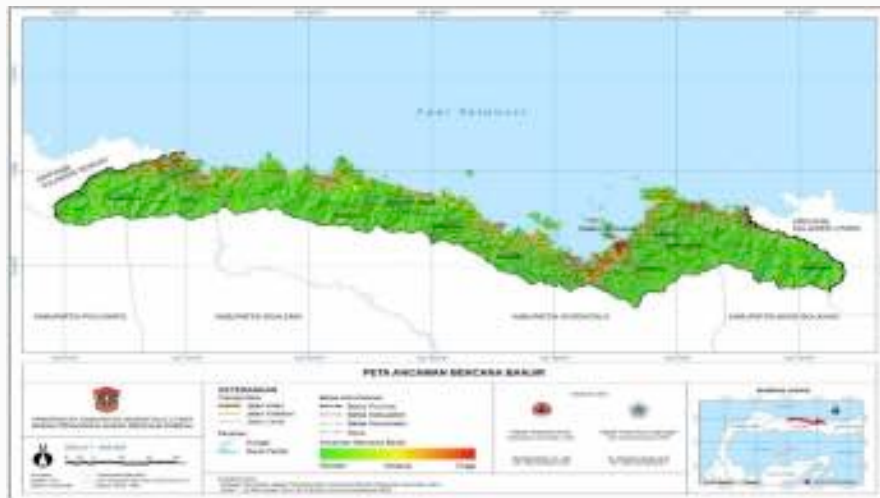
Gambar 2.20
Peta Rawan Bencana Banjir



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Selain banjir, bencana alam yang sering terjadi adalah longsor. Kecamatan yang sering terkena longsor yakni Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, dan Atinggola. Secara spasial, wilayah rawan longsor digambarkan pada Gambar 2.21 berikut.

Gambar 2.21
Peta Rawan Bencana Longsor

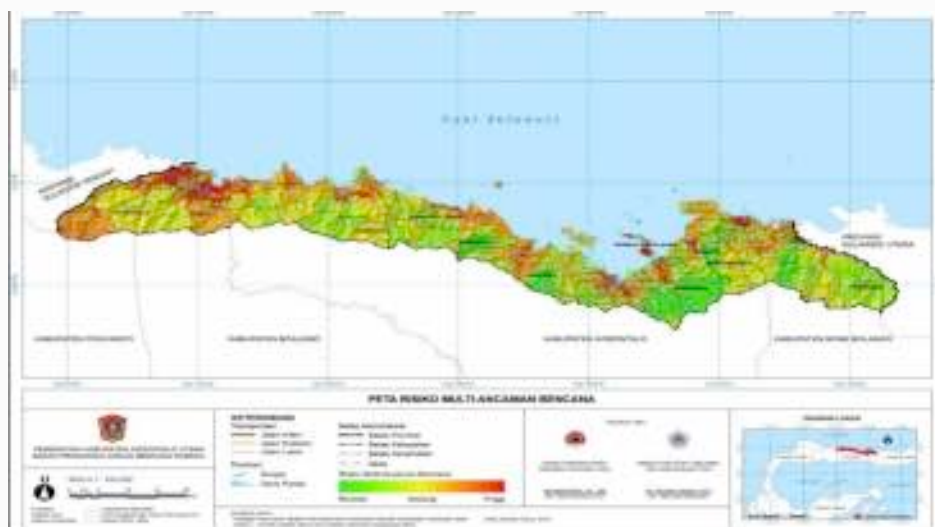


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo 2023-2027, Desa Kasia, Bulontio Timur, Bulontio Barat, dan Hutokalo di Kecamatan Sumalata; di Monano Selatan dan Kecamatan Tolinggula. Desa Milango, Jembatan Merah, Bubode di Kecamatan Tomilito. Desa Mootinelo dan Titidu di Kecamatan Kwandang, serta di Desa Imana Kecamatan Gentuma Raya yang merupakan daerah rawan terjadi bencana longsor.

Secara garis besar, wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam digambarkan pada Gambar 2.22 berikut.

Gambar 2.22
Peta Rawan Bencana



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Melihat Gambar 2.22, terlihat bencana alam secara merata berpotensi terjadi di seluruh wilayah sehingga membutuhkan berbagai upaya kesiapsiagaan dan tanggap bencana dari masyarakat dan pemerintah daerah.



42 Destana terbentuk
dari 123 desa (2024)

Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemandirian untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana,

serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana. Peran serta relawan/masyarakat di tingkat desa sebagai *first responder* yang melakukan upaya penanganan awal/dini kejadian bencana di wilayahnya. Rincian Destana dan sumber pembiayaan kegiatannya disajikan pada Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2. 35
Desa Tangguh Bencana, Pembentukan, dan Jenis Ancaman

No.	Lokasi Pembentukan		Tahun Pembentukan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
	Desa	Kecamatan			
1	Kota Jin	Atinggola	2012	banjir, gempa	APBD Prov
2	Ipilo	Gentuma Raya	2013	banjir, tanah longsor	APBD Prov
3	Langge	Anggrek	2013	banjir, tanah longsor	APBD Kabupaten
4	Titidu	Kwandang	2015	banjir, tanah longsor	APBD Prov
5	Wubudu	Sumalata Timur	2015	banjir, abrasi, gempa, tsunami	APBD Kabupaten
6	Mokonowu	Monano	2016	banjir, tanah longsor	APBN
7	Hutokalo	Sumalata	2016	banjir	APBN
8	Didingga	Biau	2018	banjir	APBD Provinsi
9	Deme II	Sumalata Timur	2018	banjir, abrasi, gempa, tsunami	APBD Kabupaten
10	Tolango	Anggrek	2018	banjir	APBD Kabupaten
11	Tudi	Monano	2019	banjir	APBD Kabupaten
12	Monas	Monano	2019	banjir	APBD Kabupaten
13	Molingkapoto Selatan	Kwandang	2019	banjir, tanah longsor	APBD Kabupaten
14	Ponelo	Ponelo Kepulauan	2019	abrasi, gempa, tsunami	APBD Kabupaten
15	Iloheluma	Atinggola	2019	banjir	APBD Kabupaten
16	Zuriyati	Monano	2020	banjir, tanah longsor	APBD Kabupaten
17	Monano	Monano	2020	banjir	APBD Kabupaten
18	Bulontio Barat	Sumalata	2020	banjir	APBD Kabupaten
19	Mebongo	Sumalata	2020	banjir	APBD Kabupaten
20	Topi	Biau	2020	gempa, tsunami, cuaca ekstrim	APBD Kabupaten
21	Tolinggula	Tolinggula	2022	gempa, tsunami	Sumber Lainnya

No.	Lokasi Pembentukan		Tahun Pembentukan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
	Desa	Kecamatan			
	Pantai				
22	Tolite Jaya	Tolinggula	2022	gempa, banjir	Sumber Lainnya
23	Monggupo	Atinggola	2022	banjir	Sumber Lainnya
24	Pinontoyonga	Atinggola	2022	banjir	Sumber Lainnya
25	Bintana	Atinggola	2022	banjir	Sumber Lainnya
26	Oluhuta	Atinggola	2022	gempa, tsunami	Sumber Lainnya
27	Windu	Biau	2022	gempa, tsunami, cuaca ekstrim	Sumber Lainnya
28	Luhuto	Biau	2022	banjir	Sumber Lainnya
29	Bualo	Biau	2022	banjir	Sumber Lainnya
30	Biau	Biau	2022	banjir	Sumber Lainnya
31	Omuto	Biau	2022	banjir	Sumber Lainnya
32	Gentuma	Gentuma Raya	2022	gempa, tsunami	Sumber Lainnya
33	Pasale	Gentuma Raya	2022	gempa, tsunami	Sumber Lainnya
34	Bohusami	Gentuma Raya	2022		Sumber Lainnya
35	Ketapang	Gentuma Raya	2022	gempa, tsunami	Sumber Lainnya
36	Bulontio Timur	Sumalata	2022	gempa, tsunami	Sumber Lainnya
37	Pulohenti	Sumalata	2022		Sumber Lainnya
38	Molingkapoto	Kwandang	2022		APBD Provinsi
39	Pilohulata	Monano	2023	banjir, tanah longsor	APBD Kabupaten
40	Dunu	Monano	2023	banjir, tanah longsor	APBD Kabupaten
41	Wubudu	Sumalata Timur	2023	banjir, abrasi, gempa, tsunami	APBD Kabupaten
42	Hulawa	Sumalata Timur	2023	banjir, abrasi, gempa, tsunami	APBD Kabupaten

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Selain pembentukan Destana, pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan melalui mitigasi non-struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan *Early Warning System* (EWS—sistem peringatan dini), khususnya terhadap bencana tsunami, berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara adalah 2 daerah yang memiliki EWS tsunami di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Moluo Kecamatan Kwandang yang didirikan oleh BMKG pada tahun 2007. Untuk itu, menimbang Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo termasuk daerah rentan, pihak BMKG dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembangunan EWS baru di titik-titik yang dianggap sesuai.

Selain itu, pada tahun 2019 telah dipasang rambu peringatan bencana sebanyak 54 titik di 47 desa dan 20 titik pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2022 dipasang pada 19 titik, sehingga total rambu telah terpasang sejumlah 93 titik.

Tabel 2.36
Lokasi Pemasangan Rambu Peringatan Bencana Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa/Dusun	Titik Koordinat (Kode Google Maps)	Daerah Rawan
1	Kwandang	Bualemo	6QG4RW29+VR	Longsor
2	Tomilito	Dambalo (Dusun Gudang Arang)	6QG4VW59+M9	Tsunami
3	Tomilito	Tanjung Karang	6QG4WXR+WG	Karhutla
4	Gentuma Raya	Gentuma Raya	6QG5W2JP+VV	Tsunami
5	Atinggola	Imana	6QG5W36H+FJ	Longsor dan Karhutla
6	Atinggola	Imana	6QG5W37G+C7	Longsor
7	Atinggola	Kotajin Utara	6QG5W447+9M	Longsor
8	Atinggola	Kotajin (Pantai Minanga)	6QG5W4G5+G8	Tsunami
9	Anggrek	Tolango Cs	6QG4VQ23+587	Banjir
10	Monano	Tudi Cs	6QG4VM8X+MV	Banjir
11	Monano	Monano (Pantai Monano)	6QG4VMQX+P8	Tsunami
12	Monano	Dunu	6QG4WJVV+QH	Karhutla
13	Sumalata	Kasia	6QG4X9QG+RC	Longsor
14	Sumalata	Lelato Cs (Buloila)	6QG4X7V9+88	Longsor
15	Biau	Sembihingan	6QG4X6CW+X5	Longsor
16	Biau	Luhuto Cs	6QG4X6Q9+6M	Banjir
17	Biau	Topi Cs	6QG4X6VJ+2M	Tsunami
18	Biau	Hubulo/Potanga Cs	6QG4X5HX+H3	Banjir
19	Tolinggula	Limbato	6QG4X4X7+V6	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Selain level desa, juga ditetapkan Sekolah-sekolah/Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dimulai dari level dasar hingga menengah pertama sesuai wewenang kabupaten yang sudah terbentuk sebanyak 21 lembaga. Rincian lembaga pendidikan/sekolah aman bencana tersebut disajikan pada Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37
Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

No.	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
1	2017	SDN 3 Ponele Kepulauan	Penguatan kelembagaan	gempa, tsunami, cuaca ekstrim	APBN
2	2017	SMPN 1 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
3	2017	SMPN 2 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
4	2018	SDN 22 Kwandang	Sosialisasi dan simulasi SAB	tanah longsor	APBD
5	2019	SMPN 1 Tomilito	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa	APBD
6	2019	SDN 5 Gentuma Raya	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa	APBD
7	2019	SMPN 1 Gentuma Raya	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa	APBD
8	2019	SMPN 5 Tolinggula	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa, tsunami, cuaca ekstrim	APBD
9	2019	SMPN 1 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	tanah longsor	APBD

No.	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
10	2019	SDN 2 Monano	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
11	2019	SMPN 4 Monano	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
12	2019	SDN 6 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa, tsunami, cuaca ekstrim	APBD
13	2019	SMPN 2 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
14	2019	SDN 1 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
15	2019	SMPN 2 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	tanah longsor	APBD
16	2020	SMPN 1 Atinggola	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa	APBD
17	2020	SMPN 2 Atinggola	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
18	2020	SMPN 1 Ponelo Kepulauan	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa, tsunami, cuaca ekstrim	APBD
19	2020	SDN 1 Ponelo Kepulauan	Sosialisasi dan simulasi SAB	gempa, tsunami, cuaca ekstrim	APBD
20	2020	SDN 4 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD
21	2020	SMPN 5 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	banjir	APBD

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Sedangkan untuk mengukur kapasitas suatu daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di suatu daerah kondisinya tetap yang meliputi penilaian indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana, digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini merupakan perubahan paradigma *treatment* terhadap bencana yang sebelumnya penanganan dampak bencana, menjadi penilaian potensi kehilangan terhadap bencana. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Gorontalo Utara dan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
1	Boalemo	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	116,77	110,01	113,32	Sedang
2	Gorontalo	146,40	133,01	114,92	103,21	103,21	94,04	94,04	86,55	96,09	Sedang
3	Pohuwato	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	155,87	Tinggi
4	Bonebolango	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	135,07	123,98	115,21	Sedang
5	Gorontalo Utara	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60	134,37	131,85	126,57	126,82	Sedang
6	Kota Gorontalo	123,20	115,02	98,90	87,82	87,82	78,75	84,34	91,52	88,80	Sedang

Sumber: BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia, diolah

Meski masih masuk dalam risiko “Sedang”, secara absolut tingkat risiko Kabupaten Gorontalo Utara trennya sudah berkurang berkat berbagai upaya mitigasi baik fisik maupun administratif yang telah dilaksanakan daerah. Dalam indeks risiko tersebut, tingkat kebencanaan setiap daerah dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Tidak hanya ditinjau dari sisi absolut atau kompositnya, sisi komponen penyusunnya pun seiring tahun semakin membaik.

Tabel 2.39
Komponen IRB Gorontalo Utara

No.	Tahun	Risiko Tsunami	Risiko Gempa Bumi	Risiko Kekeringan	Risiko Tanah Longsor	Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Risiko Cuaca Ekstrem	Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan
1	2020	14,4	21,6	16	24	24	13,6	24
2	2021	13,42	19,91	14,75	22,12	24	12,53	22,12
3	2022	13,19	19,78	14,65	21,98	21,98	12,45	21,98
4	2023	11,96	17,93	13,29	19,93	19,93	11,29	11,93
5	2024	13,33	20,00	14,81	22,22	22,22	12,59	22,22

Sumber: BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia, diolah

Dalam upaya mengukur kapasitas penanggulangan bencana, digunakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Secara garis besar, perangkat penilaian terdiri atas 7 parameter yang diturunkan menjadi 7 prioritas. Dalam 7 prioritas tersebut terdapat 71 indikator total dan 284 pertanyaan.

Dari penilaian yang telah dilaksanakan tahun 2024, Kabupaten Gorontalo Utara bersama Kabupaten Pohuwato tergolong daerah dengan tingkat resiliensi “Rendah” di Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut.

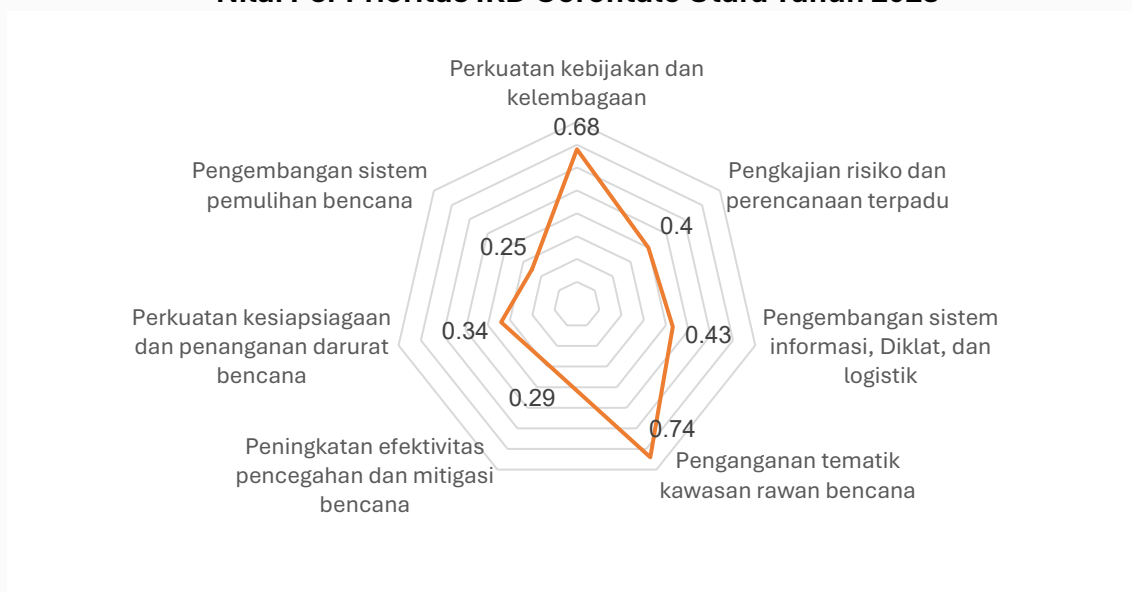
Tabel 2.40
Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	Kategori 2024
1	Boalemo	0,31	0,38	0,42	0,40	Sedang
2	Gorontalo	0,65	-	0,68	0,60	Sedang
3	Pohuwato	0,28	-	0,28	0,37	Rendah
4	Bonebolango	0,20	0,44	0,48	0,50	Sedang
5	Gorontalo Utara	0,35	-	0,39	0,35	Rendah
6	Kota Gorontalo	0,69	0,66	0,66	0,52	Sedang
Provinsi Gorontalo		0,41	0,47	0,49	0,46	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Dalam penilaian IKD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023, prioritas tertinggi yakni pada “Penanganan tematik kawasan rawan bencana”, sedangkan terendah pada “Pengembangan sistem pemulihan bencana”. Rincian penilaian tersebut pada Grafik 2.1 berikut.

Grafik 2.1
Nilai Per Prioritas IKD Gorontalo Utara Tahun 2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Dalam komitmen mengurangi perubahan iklim, Pemerintah Daerah didorong menggunakan instrumen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). GRK adalah gas-gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer, terdiri dari Karbon Dioksida (CO_2), Metana (CH_4), Dinitrogen Mono Oksida (N_2O), Hidro Fluorocarbon (HFCs), Sulfur Hexafluorida (SF_6), Perfluoro Karbon (PFCs), serta gas-gas turunan lainnya. Penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK

Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Sesuai peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Gorontalo Utara hingga tahun 2025 belum menghitung besaran emisi GRK, namun secara agregat, emisi GRK di Provinsi Gorontalo pada periode tahun 2017-2022 menghasilkan angka yang cenderung naik. Pada tahun 2017, emisi agregat “baru” mencapai 387,52 Gg CO₂e, dan 6 tahun kemudian (2022) sudah mencapai 1.407,27 Gg CO₂e. Sektor tertinggi penyumbang emisi GRK pada tahun 2022 adalah sektor pertanian, energi, kemudian sektor limbah. Sedangkan sektor kehutanan menghasilkan penyerapan emisi GRK.

2.1.2.10 Berketahanan Energi, Air, dan Ketahanan Pangan

2.1.2.10.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kejadian mengenai rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial-politik. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, terutama di Kabupaten Gorontalo Utara yang daerahnya masih kental nuansa agraris dan maritim.

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional bahkan daerah, terlebih tantangan ketahanan pangan semakin besar dengan adanya isu-isu pangan global dan perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang diantaranya adalah tanpa kemiskinan dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan beserta faktor-faktor pendukungnya, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Gorontalo Utara periode 2020-2024, terlihat fluktuasi yang menunjukkan dinamika ketahanan pangan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, IKP tercatat sebesar 79,41 dan mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya, mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan nilai 80,33. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di kabupaten tersebut. Namun, tren positif ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana IKP mulai mengalami penurunan menjadi 79,06 pada tahun 2023 dan terus menurun hingga mencapai titik terendah yaitu 78,87 pada tahun 2024.

Penurunan IKP dalam dua tahun terakhir ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Meskipun nilai IKP masih berada dalam kategori yang relatif baik, namun tren penurunan yang konsisten sejak 2022 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan ketahanan pangan masyarakat. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, produktivitas pertanian, daya beli masyarakat, dan distribusi pangan perlu dievaluasi secara komprehensif. Diperlukan intervensi strategis dan kebijakan yang tepat sasaran untuk membalikkan tren penurunan ini, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo Utara dapat kembali meningkat dan masyarakat terlindungi dari risiko kerawanan pangan di masa mendatang. Data IKP Kabupaten Gorontalo Utara (2020-2024) disajikan pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Gorontalo Utara

No	Tahun	IKP
1	2020	79.41
2	2021	79.75
3	2022	80.33
4	2023	79.06
5	2024	78.87

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 (Badan Pangan Nasional RI), 2025

Pada indikator ketersediaan pangan utama, kinerja Gorontalo Utara menunjukkan hasil yang fluktuatif. Saat terjadi penurunan ketersediaan pangan pokok menggambarkan berkurangnya dominasi pangan pokok sumber karbohidrat yang berasal dari beras, jagung, ubi jalar, atau ubi kayu. Penurunan tersebut terjadi sering karena kondisi alam dan cuaca karena pendekatan produksi pangan di Gorontalo Utara masih menggunakan basis lahan, sedangkan penggunaan teknologi tinggi belum banyak dipakai.

Tabel 2.42

Ketersediaan Pangan Utama

No.	Uraian	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215	
2	*Jumlah penduduk	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563	130.722	131.991	
3	Ketersediaan pangan utama (Kg/Kapita/tahun)	449,61	695,31	612,26	775, 7	619,09	606,89	765,89	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

(*) Jumlah penduduk menggunakan data tahunan BPS

Indikator lainnya yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU), merupakan salah satu indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian tujuan SDGs ke-2 yaitu “Tanpa Kelaparan”, didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat (FAO, 2021). PoU kemudian dihitung sebagai persentase populasi yang konsumsinya di bawah *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER). MDER populasi digunakan sebagai proksi ambang batas (*threshold*) dan dihitung berdasarkan rata-rata

tertimbang dari persyaratan energi minimum untuk setiap kelompok usia dan jenis kelamin dalam populasi (Wanner et al., 2014).

Jumlah orang yang mengalami kelaparan meningkat pada tahun 2020 di masa pandemi (FAO et al., 2021). Selain itu, Covid-19 menciptakan tekanan pada ketahanan pangan melalui penurunan pendapatan masyarakat dan berkurangnya akses, peningkatan biaya transaksi, dan ketidakpastian dalam sistem pangan negara. Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan bagian dari masalah ketahanan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2021), terdapat tiga aspek yang menjadi pilar ketahanan pangan di antaranya aspek keterjangkauan pangan, aspek ketersediaan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

Tabel 2.43

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Gorontalo (%)

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Boalemo	12,99	17,47	19,09	13,99	15,72
2	Gorontalo	10,74	14,97	19,01	14,97	18,12
3	Pohuwato	11,48	15,32	20,02	18,72	18,22
4	Bonebolango	7,98	13,25	17,59	16,03	15,54
5	Gorontalo Utara	14,06	15,77	22,84	18,90	20,52
6	Kota Gorontalo	6,29	12,96	15,17	10,84	9,16
Provinsi Gorontalo		10,33	14,84	18,63	15,10	15,99

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjl2OSMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen--per-kabupaten-kota--persen-.html>

Capaian kinerja Gorontalo Utara pada indikator tersebut masih termasuk yang terburuk di Provinsi Gorontalo, karena pada tahun 2024 mendapat skor tertinggi, yang memiliki korelasi dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.

Untuk itu, guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan di daerah, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pengawasan terhadap distribusi dan rantai pasok produk pangan. Selain itu, dalam jangka pendek, jika fiskal memungkinkan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pemberian subsidi pada komoditas-komoditas pangan strategis maupun pada produk perawatan pangan dan energi yang menunjang produksi pangan serta sedang mengalami lonjakan harga yang tinggi. Sementara dalam jangka panjang, Pemerintah Daerah dapat mendorong optimalisasi program intensifikasi pertanian dan program diversifikasi pangan.

Sedangkan dalam hal cadangan pangan, yang dilihat dari proyeksi indikator produksi dan konsumsi, secara tren persentasenya masih stagnan di kisaran 92-93 persen, sebagaimana Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44
Cadangan Pangan

No.	Indikator	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi	Ton	170,922	240,034	229,522	294,430	223,723	196.505	303.273
2	Kebutuhan konsumsi	Ton	17,620	17,513	17,185	17,753	17,546	17.734	18.324
3	Cadangan pangan	Ton	153,302	222,521	212,337	276,677	206,177	178.771	284.949
4	Persentase cadangan pangan	Persen	89,69	92,70	92,51	93,97	92,16	90,98	93,96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Selain itu, kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dicerminkan dari besaran Skor PPH (Pola Pangan Harapan). Skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal, yang merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, juga digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa.

Secara umum, masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengkonsumsi pangan belum beragam dan berimbang, hal ini terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun 2016 hingga 2024. Semakin tinggi Skor PPH Konsumsi, akan semakin beragam dan berimbang konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.45
Skor Pola Pangan Harapan

No.	Kelompok Pangan	Tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,0	0,6	1,0	0,7	1,3	0,6	0,7	0,9	1,1
3	Pangan hewani	13,1	11,4	10,6	13,9	13,5	11,7	16,9	16,7	16,9
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/biji	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,8	0,7

	berminyak									
6	Kacang-kacangan	3,0	2,8	2,8	3,6	4,7	1,8	1,7	2,8	3,9
7	Gula	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8	2,1	1,6
8	Sayur dan buah	18,9	14,6	23,5	21,4	30,0	20,5	18,00	23,7	23,7
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	69,5	63,0	71,4	73,1	83,0	67,4	70,08	77,0	77,8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, diolah

Pada tahun 2016 hingga 2019 hanya kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula yang Skor PPH Konsumsinya telah memenuhi standar ideal. Sedangkan pada tahun 2020, pola konsumsi pangan mengalami peningkatan, dengan capaian pemenuhan kelompok pangan periode sebelumnya, ditambah sayur dan buah. Tahun 2021 mengalami penurunan 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Padi-padian tetap tinggi, namun pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah turun drastis, yang sebagian disinyalir karena pola konsumsi yang bergeser akibat berkurangnya pendapatan saat pandemi Covid-19. Di tahun 2022 hingga 2024, dengan mulai pulihnya ekonomi, pola konsumsi masyarakat juga meningkat, ditandai konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah yang meningkat. Untuk menuju pola pangan yang ideal dan bergizi seimbang, diperlukan penguatan program diversifikasi pangan, edukasi gizi, dan peningkatan akses terhadap sumber pangan lokal bergizi.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2024 berkurang 11,67 persen dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata negatif 0,29 persen pada 5 tahun terakhir. Secara umum, tingkat konsumsi kalori penduduk Gorontalo Utara fluktuatif, pada beberapa tahun telah mencapai batas kecukupan yang dianjurkan Kementerian Kesehatan dan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018 di tahun 2023, dari angka kecukupan energi (AKE) yang direkomendasikan sebesar 2.100 Kkal/hari, dan pada beberapa tahun juga belum memenuhi batas minimal kecukupan yang dianjurkan.

Grafik 2.2
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari (Kkal/Hari)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

Tingkat rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari jika diuraikan menurut kelompok makanan disajikan pada Tabel 2.46 sebagai berikut.

Tabel 2.46
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Kkal/Hari)

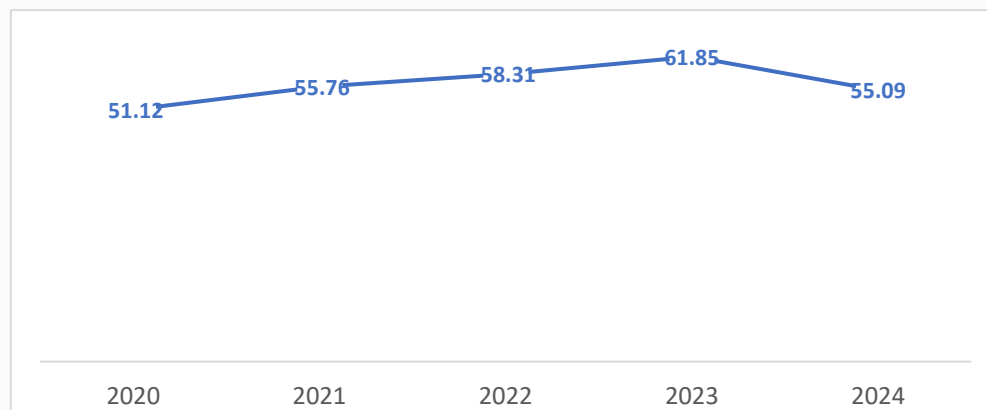
No.	Kelompok Komoditas Makanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	958,46	1.023,19	920,91	1.025,11	927,32
2	Umbi-umbian	24,34	48,47	32,18	41,22	16,53
3	Ikan/udang/cumi/kerang	64,16	79,48	77,39	65,91	65,88
4	Daging	15,54	22,83	25,20	27,12	20,97
5	Telur dan susu	29,00	26,04	28,24	24,89	27,23
6	Sayur-sayuran	31,32	32,73	37,49	35,20	33,13
7	Kacang-kacangan	18,93	20,97	19,00	23,98	17,98
8	Buah-buahan	53,37	42,58	47,13	41,51	40,11
9	Minyak dan kelapa	297,76	341,12	312,07	309,11	274,74
10	Bahan minuman	93,41	115,42	102,07	86,53	79,32
11	Bumbu-bumbuan	16,55	20,34	18,34	17,67	8,96
12	Konsumsi lainnya	25,69	32,28	34,88	32,17	29,17
13	Makanan dan minuman jadi	321,01	293,38	341,53	420,43	358,60
14	Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata konsumsi		1.949,54	2.098,82	1.996,43	2.150,85	1.899,93

Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

Sementara itu, konsumsi protein per kapita sempat terus naik di tahun 2020-2023, namun kembali turun 10,93 persen di tahun pantauan terakhir, dengan rata-rata meningkat 2,20 persen. Nilai di tahun 2023 sempat melebihi standar angka kecukupan protein ideal bagi perempuan sebesar 56-59 Gram/hari, namun belum memenuhi minimal 62-66 Gram/hari bagi laki-laki. Sedangkan tahun 2024 tidak terpenuhi keduanya. Karena daerah pesisir, konsumsi ikan

penduduk Gorontalo Utara sangat tinggi, tercatat sebanyak 12,93 Gram/hari, di lain pihak konsumsi daging hanya 1,31 Gram/hari.

Grafik 2.3
Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari (Gram/Hari)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

Tabel 2.47
Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Gram/Hari)

No.	Kelompok Komoditas Makanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	22,54	24,09	21,65	24,11	21,81
2	Umbi-umbian	0,18	0,34	0,20	0,29	0,10
3	Ikan/udang/cumi/kerang	10,59	12,99	14,59	12,41	12,93
4	Daging	0,97	1,34	1,59	1,71	1,31
5	Telur dan susu	1,74	1,46	1,74	1,46	1,64
6	Sayur-sayuran	1,86	1,93	2,28	2,21	2,11
7	Kacang-kacangan	2,05	1,95	2,00	2,46	2,08
8	Buah-buahan	0,65	0,40	0,47	0,44	0,53
9	Minyak dan kelapa	0,23	0,27	0,22	0,17	0,12
10	Bahan minuman	0,51	0,67	0,61	0,69	0,46
11	Bumbu-bumbuan	0,54	0,66	0,59	0,61	0,31
12	Konsumsi lainnya	0,55	0,66	0,71	0,68	0,64
13	Makanan dan minuman jadi	8,71	8,98	11,67	14,62	11,05
14	Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata konsumsi		51,12	55,76	58,31	61,85	55,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Indikator penyebab kerawanan pangan di suatu daerah adalah:

1. Ketersediaan pangan
 - a. Tidak adanya produksi padi

- b. Kekurangan produksi pangan setara beras
- 2. Distribusi pangan
 - a. Akses fisik pangan (jalan, topografi)
 - b. Akses ekonomi (kemiskinan, kios akses pangan)
 - c. Akses sosial (penduduk buta huruf)
- 3. Pemanfaatan pangan
 - a. Konsumsi pangan (kualitas konsumsi pangan/AKG);
 - b. Akses terhadap fasilitas kesehatan (rasio jumlah Puskesmas);
 - c. Akses terhadap air bersih;
 - d. Perempuan buta huruf;
 - e. Status gizi (bayi gizi buruk dan BBLR);
 - f. Dampak status gizi (kematian bayi dan Balita).

Daerah rawan pangan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sebagai berikut.

Tabel 2.48
Kategori Daerah Rawan Pangan

No.	Kecamatan	Desa	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anggrek	Dudepo	1	1	1	3		
2	Biau	Potanga	1	1	1	3		
3	Kwandang	Masuru	2	2	2	3		
4	Sumalata	Pulohenti	2	2	2			
5	Tolinggula	Cempaka Putih	2	2	3			
6	Tomilito	Mutiara laut	2	2	2			
7	Biau	Windu	2	2	2	2		
8	Biau	Buholo	2	2	2	3		
9	Biau	Sembihingan	2	2	3			
10	Sumalata Timur	Deme I	2	2	4	2		
11	Sumalata	Puncak mandiri	3	3	2			
12	Tolinggula	Papualangi	3	3	2			
13	Gentuma Raya	Langke	3	3	2	2		
14	Tomilito	Dambalo	3	3	4	3		
15	Monano	Tudi	3	3	4	3		
16	Tomilito	Bulango raya			3	2		
17	Anggrek	Langge			3	2		
18	Ponelo kepulauan	Otiola			3	2	3	3
19	Anggrek	Helumo			3	3		
20	Ponelo Kepulauan	Tihengo			3	2		3
21	Gentuma raya	Durian			3	3		
22	Tutuwoto	Tutuwoto			3	3		
23	Kwandang	Pontolo atas			3	3		
24	Sumalata Timur	Koluwoka			3	2		
25	Tomilito	Tanjung karang			3	3		
26	Sumalata	Kasia			3	3		
27	Tomilito	Huidu melito			3	3		3

No.	Kecamatan	Desa	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
28	Gentuma Raya	Ipilo			3	3		
29	Tolinggula	Ilomangga				2		
30	Gentuma Raya	Bohusami				2	3	
31	Monano	Tolite huyu				2		
32	Monano	Hiyalo oyile				3		
33	Anggrek	Iloheluma				3		
34	Anggrek	Ilodulunga				3		
35	Anggrek	Putiana				3		3
36	Tomilito	Molantadu				3		
37	Tomilito	Milango				3		
38	Tomilito	Bubode				3		
39	Tomilito	Leyao				3		
40	Monano	Dunu				3		
41	Monano	Sogu				3		
42	Monano	Zuriyati				3		
43	Biau	Didingga				3		
44	Sumalata Timur	Motihelumo				3		
45	Gentuma Raya	Dumolodo					3	
46	Kwandang	Leboto						3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Rekapitulasi per kecamatan atas Tabel 2.49 disajikan pada Tabel 2.48 yang menunjukkan hampir seluruh desa termasuk aman pangan.

Tabel 2.49
Jumlah Desa Rawan dan Aman Pangan per Kecamatan

No	Kecamatan	2021						2022						2023						2024					
		Aman pangan			Rawan pangan			Aman pangan			Rawan pangan			Aman pangan			Rawan pangan			Aman pangan			Rawan pangan		
		4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3
1	Tolinggula		4	4		1	1	4	4	1		1			1	9					1	9			
2	Biau	2	3	1	1	2	1	2	3	1		1	3			10						10			
3	Sumalata	1	5	2		2	1	6	4				1			11			0			11			
4	Sumalata Timur	5	3				2	6	1			2	1		1	9					2	8			
5	Monano	5	5					3	2			1	4	5	5						1	9			
6	Anggrek	8	2	1	1		3	7				1	7	8	5	2					4	4	6		1
7	Kwandang	4	8	4		1	1	9	7				2	2	12	4					5	7	5		1
8	Ponelo kepulauan	2					2	2				2		2	1				1		2				2
9	Tomilito	6				1	3	2				1	7	1	5	4					1	3	5		1
10	Gentuma raya	4	2	2		1	2	6	1			2	2	6	1	2			2		1	5	5		
11	Atinggola	2	9	3				4	8	2					3	11					3	11			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

2.1.2.10.2 Ketahanan Energi

Energi adalah penggerak utama kehidupan. Akses terhadap energi akan memberikan keuntungan yang bukan hanya bermanfaat, juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan memberikan *multiplier effect* yang luar biasa. Hingga saat ini, beberapa daerah masih menghadapi tantangan yang kompleks terkait akses

energi, terutama energi listrik. Pemenuhan kebutuhan energi listrik berkaitan erat dengan prioritas nasional dalam era industri 4.0 atau *Making Indonesia 4.0*. Tidak hanya mendukung daya saing industri dan menarik minat investasi, penyediaan energi listrik juga mendorong tumbuhnya industri komponen ketenagalistrikan di dalam negeri, hingga membuka lebih banyak lapangan kerja.

Kabupaten Gorontalo Utara relatif tidak memiliki kendala pada suplai energi listrik, namun masih berupa energi yang sumbernya *mainstream* dan belum bersih/terbarukan, seperti dari pembangkit listrik bertenaga uap yang digerakkan pembakaran batubara, bersumber dari PLTU yang berlokasi di Kecamatan Tomilito (PLTU Tanjung Karang) dan PLTU Anggrek di Kecamatan Anggrek, dengan kapasitas masing-masing 2x50 dan 2x25 MW. Selain itu, kebutuhan masyarakat untuk mobilitas antar lokasi masih dipenuhi dari sumber energi fosil, sehingga secara umum kondisinya masih rentan energi.

Pola konsumsi masyarakat serta bisnis energi yang cenderung mengarah ke energi fosil di level nasional dianggap menekan pengembangan *clean and renewable energy*. Ketergantungan tinggi tersebut salah satunya akibat dari kebijakan subsidi yang membuat energi berbasis fosil lebih terjangkau. Selain akibat *policy*, yang menyebabkan keterbatasan pilihan energi bersih di Gorontalo Utara juga karena potensi kapasitas produksinya. Contohnya rencana pengembangan pembangkit listrik bertenaga air (PLTMH) di beberapa lokasi di Gorontalo Utara (Tolinggula, Sumalata, Gentuma Raya, dan Atinggola) masih menemui tantangan dengan kontinuitas debit air dan ketinggian jatuh air.

Meskipun belum dilakukan perhitungan ketahanan energi berupa indeks ketahanan energi spesifik di Gorontalo Utara, namun secara umum, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi: Pertama, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan pasokan energi karena kebutuhannya akan terus meningkat. Untuk meningkatkan pasokan, tidak bisa hanya bergantung pada sumber energi fosil yang jumlahnya terbatas, perlu solusi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, transisi menuju energi

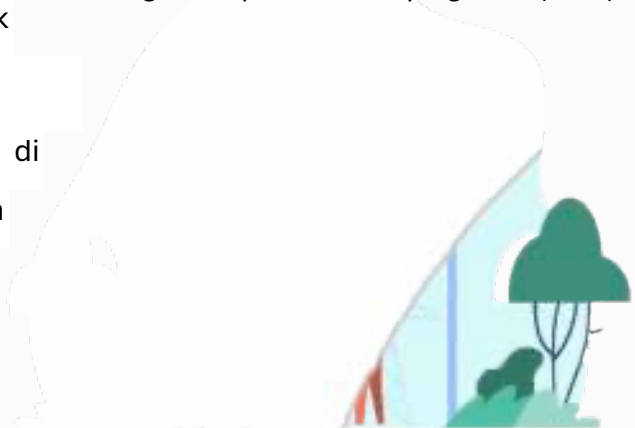
terbarukan harus segera dilakukan. Untuk mendukung transisi ini, pemerintah, masyarakat, dan industri energi harus bekerja sama untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, teknologi, modal, dan pasar. Sesuai RTRW Gorontalo Utara 2024-2044, beberapa lokasi yang didorong untuk menjadi pusat suplai energi listrik ramah lingkungan seperti pembangkit listrik bertenaga air dengan lokasi yang sudah disebutkan sebelumnya, serta pembangkit listrik bertenaga surya yang diproyeksikan berada di seluruh kecamatan.

Kedua, pemerintah harus mendorong pemerataan akses sumber energi bagi masyarakat. Saat ini, Desa Dudepo menjadi satu-satunya desa di Gorontalo Utara yang saat dokumen ini disusun belum memiliki akses listrik karena kendala geografis, meskipun saat ini sudah mulai berprogres penyediaan jaringannya melalui kabel bawah laut. Keterbatasan ini seharusnya jadi momentum bagus untuk menyediakan suplai energi terbarukan yang lebih mudah dijangkau penduduk di kawasan 3T daripada energi fosil.

Ketiga, efisiensi energi. Masyarakat perlu bijak dalam menggunakan energi agar ketahanan energi tetap terjaga, karena pasokan energi fosil sudah terbatas dan transisi energi tidak instan.

Ketersediaan energi listrik di Gorontalo Utara, dan wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara pada umumnya, telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga

±1.2 juta kWh
Energi listrik produksi PLN yang susut (2024)



akhir tahun 2022, rasio elektrifikasi di Gorontalo Utara yang digambarkan oleh jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik (rasio elektrifikasi) telah mencapai 99,38 persen. Namun tingkat konsumsinya masih dibawah yang ditargetkan sehingga masih menghasilkan energi yang susut hampir 1.200.000 kWh pada tahun 2024. Rincian data tersebut pada Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50
Daya Terpasang, Produksi, Distribusi Listrik PLN, dan Konsumsi Per Kapita

Tahun	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (kWh)	Listrik Terjual (kWh)	Dipakai Sendiri (kWh)	Susut/Hilang (kWh)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)
2022	34.873.700	57.359.259	53.987.645,00	551.548,00	3.398.237,00	128.563	424,22
2023	39.947.650	63.499.689	57.735.530,00	570.124,00	5.764.159,00	130.400	447,13
2024	52.096.400	67.786.769,59	65.997.281,44	597.536,86	1.191.951,29	131.991	504,54

Sumber: PT PLN Cabang Gorontalo Utara, 2025

*Asumsi listrik terjual dan dipakai sendiri adalah total konsumsi listrik

Dari Tabel 2.40 di atas, listrik yang susut/hilang berimbas pada pembebanan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik. Dampaknya, jika hal tersebut terus terjadi maka PLN akan terus *bleeding*. *Cashflow* yang terganggu akan menyebabkan pemerintah turun tangan dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang lebih besar atau risiko kontingensi terhadap APBN. Untuk itu Pemerintah Daerah dan Pusat harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar terjadi penyerapan terhadap *supply* listrik.

Sedangkan pada konsumsi listrik per kapita meningkat dari 424,22 kWh/kapita (2022) menjadi 504,54 kWh/kapita (2024), yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam elektrifikasi dan peningkatan kesejahteraan energi masyarakat. Kinerja ini didukung oleh kenaikan kapasitas daya, efisiensi distribusi, serta produksi listrik yang meningkat. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan pertumbuhan konsumsi ini tetap efisien, adil, dan selaras dengan transisi energi berkelanjutan.

Untuk mendorong penyerapan produksi listrik, harus terus didorong salah satunya rumah tangga pengguna listrik. Data pada Tabel 2.51 memuat informasi rumah tangga yang dialiri listrik PLN per kecamatan di Gorontalo Utara.

Tabel 2.51
Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Atinggola	3.135	3.316	3.356	3.446	3.633
2	Gentuma Raya	2.416	2.532	2.594	2.666	2.734
3	Kwandang	7.903	8.148	8.572	8.684	8.950
4	Tomilito	2.280	2.331	2.665	2.700	2.752
5	Ponelo Kepulauan	1.004	1.057	1.080	1.107	1.129
6	Anggrek	3.633	3.580	3.609	3.765	4.213
7	Monano	1.630	1.790	1.816	1.887	2.124
8	Sumalata	2.424	2.877	3.013	3.019	3.186

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Sumalata Timur	1.733	1.841	1.845	1.945	2.068
10	Tolinggula	2.595	2.630	2.933	2.943	3.152
11	Biau	1.533	1.434	1.490	1.740	1.970
Jumlah		30.286	31.536	32.973	33.902	35.911

Sumber: PT PLN Cabang Gorontalo Utara, 2025

Data di atas menunjukkan jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik PLN yang terus meningkat. Adapun faktor kenaikan tersebut yakni naiknya pelanggan yang masuk kategori tarif rumah tangga. Namun dari jumlah rumah tangga di atas, tidak seluruhnya terkoneksi dengan jaringan PLN. Pada tahun 2024, masih ada sekitar 0,62 persen rumah tangga yang belum memiliki koneksi listrik dan 2,20 persen pemenuhan listriknya bukan bersumber dari PLN. Pemenuhan listrik di Gorontalo Utara harus mampu menjangkau seluruh masyarakat, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, juga sebagai *enabler* industri dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Selain bersumber dari PLTU, penting juga upaya untuk penyediaan listrik melalui sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mendukung kebijakan *Carbon Neutral* 2060. Potensi bauran sumber energi dari panas matahari (*solar cell*) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam upaya mengurangi konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan RTRW Gorontalo Utara 2024-2044, direncanakan dibangun PLTS di seluruh kecamatan karena di seluruh wilayah ini penyinaran terjadi sepanjang tahun sehingga pasokan energinya melimpah.

Selain berasal dari tenaga matahari, sumber EBT lainnya dapat juga mengandalkan dari energi kinetik yang dihasilkan oleh air. Di Gorontalo Utara terdapat beberapa air permukaan (*surface water*) yang dapat dijadikan sumber energi listrik, diantaranya berdasarkan RTRW akan dioperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Sumalata, dan Tolinggula. Berdasarkan studi awal yang dilakukan Pengkajian

Energi Universitas Indonesia dalam *Energy Outlook and Statistic 2006*, potensi tenaga air skala kecil terdapat di Sumalata dengan potensi total 8MW.

Upaya peningkatan bauran energi terbarukan juga dilakukan melalui *co-firing* pada PLTU batubara dengan menggunakan biomassa di PLTU Anggrek. Terlepas hal tersebut, upaya penghematan energi juga perlu dioptimalkan, khususnya konsumsi energi oleh institusi pemerintah, selain dalam rangka mengurangi emisi GRK.

2.1.2.10.3 Ketahanan Air

Ketahanan air perlu dijamin untuk mendukung ketahanan nasional, yang mencakup tiga pilar dalam pengelolaan sumber daya air: konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, serta dilengkapi dengan dua pilar pendukung yaitu pengembangan sistem informasi SDA dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA. Untuk instrumen pemantauan kelima komponen tersebut, diperlukan penyusunan Indeks Ketahanan Air (IKA), yang saat ini masih disusun oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

Ketersediaan akses air bersih bersama sanitasi merupakan syarat untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 karena berpengaruh terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Aspek ini merupakan indikator *sustainable development goals* (SDGs) sekaligus prioritas dalam penyediaan infrastruktur layanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045.

Namun penyediaan air bersih di Gorontalo Utara seringkali menghadapi tekanan dan mempengaruhi ketersediaan dan distribusinya:

- Perubahan iklim. Akibat pola hujan yang tidak stabil dapat menyebabkan kekeringan, dan perubahan suhu dapat memengaruhi sumber daya air alami. Gorontalo Utara memiliki iklim tropis yang mayoritas bulan yang dilalui dalam setahun bercuaca panas sehingga berpengaruh kepada curah hujan yang rendah.

- Pertambahan penduduk. Penduduk Gorontalo Utara terus tumbuh sekitar 1,5 persen per tahun yang mengakibatkan permintaan air bersih terus meningkat.
- Kerusakan lingkungan. Beberapa sumber mata air yang mengalir ke Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) berada di kawasan yang mulai mengalami tekanan degradasi lahan, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan perlindungan kawasan tangkapan air.
- Polusi. Beberapa sumber air permukaan di Gorontalo Utara seperti sungai statusnya sudah cemar ringan bahkan ada yang sedang, sehingga beberapa sudah tidak bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Kondisi hidrologi. Potensi air tanah yang rendah karena Gorontalo Utara bukan daerah cekungan air, sehingga membutuhkan rekayasa dan alternatif-alternatif teknologi dalam meningkatkan ketersediaan air tanah.
- Infrastruktur. Beberapa kecamatan belum terakses air bersih yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM), seperti Kecamatan Ponelo Kepulauan, Tomilito, dan Sumalata Timur, meskipun penduduknya telah mampu secara swadaya mengusahakan ketersediaan air bersih lewat sumber air permukaan lainnya. Selain itu, pompa dan pipa diperlukan untuk mengalirkan air ke rumah penduduk pada beberapa kecamatan yang bahkan telah dimasuki jaringan PUDAM, sehingga beberapa daerah yang tidak memiliki infrastruktur tersebut sering terjadi krisis air. Pada beberapa lokasi terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, dan rendahnya pemeliharaan infrastruktur jaringan air baku serta air bersih.
- Kemiskinan. Ketiadaan biaya menyebabkan beberapa penduduk tidak bisa membangun akses air bersih, dan memilih langsung memanfaatkan air sungai untuk keperluannya, sehingga berisiko terpapar bakteri dan bahan cemar lain yang berbahaya terhadap kesehatan.

Dalam konteks Gorontalo Utara, yang belum memiliki sumber mata air sehingga sebagian besar masih mengandalkan sumber air baku dari air permukaan pada sungai-sungai yang sudah ada, sehingga pemeliharaan dan

perawatan kawasan DAS menjadi hal yang krusial. Ada beberapa lokasi yang berfungsi sebagai *intake* air baku, dengan rincian lokasi sebagai berikut.

Tabel 2.52
Intake Air Baku di Gorontalo Utara

No.	Instalasi	Kapasitas Produksi (Liter/Detik)	Sumber Air Baku	Daerah Layanan	Lokasi Intake
1	IKK Atinggola	20	Sungai Sigaso	Interkoneksi Atinggola dan Gentuma Raya	Desa Sigaso
2	IKK Gentuma Raya	10	Sungai Durian	Motomingo, Molonggota, Gentuma, Bohusami, Pasalae, Katapang, Nanati	Desa Motomingo dan Durian
3	IKK Titidu	10	Sungai Posso	Pelabuhan Kwandang, Katialada, Jemer, Cisdane, Moluo, Titidu	Desa Bualemo
4	IKK Posso	5	Sungai Posso	Posso, Bulalo, Alata, Leboto, Mootinelo, Molingkapoto, Molingkapoto Selatan, Botungobungo	Desa Bualemo
5	IKK Anggrek	10	Embung Ilangata	Ibarat, Ilangata, Tolongio, Ilodulungo	Desa Ilangata
6	IKK Monano	5	Sungai Juriati	Monano, Zuriati, Monano Atas, Tudi, Mokonowu, Pilohulata	Desa Jurati
7	IKK Sumalata	10	Sungai Mebongo	Mebongo, Bulontio Barat, Bulontio Timur	Desa Mebongo
8	IKK Buloilu	20	Sungai Tumba	Tumba, Lelato, Buloilu	Desa Tumba
9	IKK Biau	20	Sungai Didingga	Didingga, Bualo, Omuto, Biau, Windu, Topi	Desa Didingga
10	IKK Tolinggula	10	Sungai Bogo-bogo	Ilotunggula, Tolinggula Ulu, Tolitejaya, Tolinggula Tengah, Molangga, Ilomangga, Tolinggula Pantai	Desa Bogo

Sumber: PUDAM Gorontalo Utara, 2023

Akses air minum layak menurut kaidah BPS yakni jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Tabel 2.53
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga bersumber air minum layak	-	-	-	86,23	89,47	90,14	90,71

Sumber: Susenas (BPS) Gorontalo Utara, diolah

Catatan: Untuk data tahun 2018-2020 tidak tersedia tabulasi air minum layak. Yang tersedia hanya tabulasi sumber air minum utama yang digunakan

Tabel 2.54
Komposisi Sumber Air Minum Layak

No.	Sumber Air	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Air kemasan bermerk, air isi ulang	41,33	46,45	46,37	0,00	59,68	N/A	N/A
2	Leding	9,76	12,85	11,73	27,04	6,30	25,74	27,86
3	Sumur bor/pompa	9,67	5,15	6,41	15,67	7,53	23,17	21,08
4	Sumur terlindung	24,39	20,05	22,48	41,40	16,36	35,79	33,12
5	Sumur tak terlindung	6,04	5,02	4,71		3,78		4,48
6	Mata air terlindung, mata air tak terlindung	8,81	10,03	6,31	9,42	6,35	12,33	8,65
7	Air permukaan lainnya	0,00	0,46	1,99	6,35	0,00	1,99	4,81

Sumber: Susenas (BPS) Gorontalo Utara, diolah

Di Gorontalo Utara, gambaran akses terhadap air minum layak senantiasa mengalami perbaikan, hasil dari kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, yang digambarkan pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55
Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum Layak

No.	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	*Jumlah penduduk	114.036	115.072	116.139	112.303	120.341	120.805	121.978
2	Jumlah penduduk berakses air minum layak	83.493	94.295	98.108	101.807	109.076	112.109	95.703
3	Persentase penduduk berakses air minum layak	73,22	81,94	84,47	90,65	90,64	92,80	78,46

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan Tabel 2.45 di atas, diidentifikasi bahwa masih terdapat 21,54 persen penduduk di Gorontalo Utara yang belum memiliki akses terhadap air minum layak di tahun 2024. Kinerja di tahun 2024 turun drastis karena Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) kurang optimal dilaksanakan. Kecamatan yang menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam peningkatan akses air bersih yakni Kecamatan Biau, Tomilito, dan Kecamatan Tolinggula. Sebaran akses air minum layak tahun 2024 diuraikan pada Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56
Sebaran Penduduk Berakses Air Minum Layak Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	*Jumlah Penduduk	Penduduk Berakses Air Minum Layak	
			Jumlah	Persentase
1	Atinggola	12.676	7.606	60,00
2	Gentuma Raya	10.238	8.334	81,40
3	Tomilito	9.437	3.875	41,06
4	Ponelo Kepulauan	4.201	4.065	96,76

No.	Kecamatan	*Jumlah Penduduk	Penduduk Berakses Air Minum Layak	
			Jumlah	Persentase
5	Kwandang	27.925	27.911	99,95
6	Anggrek	16.116	12.970	80,48
7	Monano	6.238	5.999	96,17
8	Sumalata Timur	7.714	7.714	100,00
9	Sumalata	11.680	11.314	96,87
10	Biau	5.919	1.292	21,83
11	Tolinggula	9.834	4.623	47,01
Gorontalo Utara		121.978	95.703	78,46

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, 2025

*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara, kinerja air minum layak jika dilihat lebih detail terjadi pasang surut kinerja di daerah perkotaan, hal ini mungkin disebabkan banyaknya pendatang/pembangunan rumah baru di wilayah yang belum sempat memiliki akses air minum. Rincian hal tersebut digambarkan pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57
Air Minum Layak Berdasarkan Tipe Daerah (%)

Tahun	Kategori	Tipe Daerah		
		Perkotaan	Perdesaan	Total
2019	Layak	94,00	83,28	84,73
	Tidak Layak	6,00	16,72	15,27
2020	Layak	100,00	85,59	87,55
	Tidak Layak	0,00	14,41	12,45
2021	Layak	93,85	84,97	86,23
	Tidak Layak	6,15	15,03	13,77
2022	Layak	86,14	90,05	89,47
	Tidak Layak	13,86	9,95	10,53
2023	Layak			90,14
	Tidak Layak			9,86

Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara, diolah

2.1.2.11 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.2.11.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Gorontalo Utara secara umum kualitasnya relatif terjaga, terutama di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Nantu. Namun, seiring kebutuhan pengembangan area perkebunan dan perumahan, lahan kritis dan pencemaran terus meningkat. Beberapa pencemaran lingkungan yang terjadi berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan seperti tambak, permukiman, industri, transportasi laut, dan lainnya.

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah dilakukan, namun masih terdapat berbagai aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Mulai munculnya kantong-kantong industri rumahan juga berdampak pada pencemaran lingkungan. Selain itu terdapat indikasi pencemaran tinggi pada beberapa sungai akibat aktivitas industri dan permukiman.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan berkelanjutan di Indonesia, dan dapat dijadikan rujukan bagi para penentu kebijakan dalam merumuskan program yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk pemantauan IKLH, salah satu yang dipantau adalah kualitas air. Pada tahun 2023, jumlah titik pemantauan kualitas air meningkat signifikan menjadi 12 lokasi dibandingkan tahun sebelumnya, tersebar di empat sungai strategis: Sungai Mebongo, Hulawa, Ilangata, dan Biau. Peningkatan ini mencerminkan upaya sistematis untuk memperluas cakupan pengawasan terhadap sumber air yang vital bagi ekosistem dan masyarakat setempat. Tahun 2024, fokus pemantauan dialihkan ke dua sungai prioritas: Sungai Ilangata dan Poso dengan masing-masing 3 titik lokasi. Langkah ini tidak hanya memastikan kualitas air tetap terjaga dari potensi pencemaran, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah melalui pendeteksian dini risiko lingkungan. Konsistensi peningkatan titik pemantauan sejak 2022 (3 titik) hingga 2024 (6 titik) menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan kesehatan lingkungan sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan. Rincian jumlah titik uji air disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Titik Pemantauan Kualitas Air

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai	4	6	5	3	12	6
2	Jumlah titik pemantauan kualitas air tanah	4	-	4	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



73,07

IKLH Nasional (2024)
naik dari 72,54 (2023)

Tren IKLH Gorontalo Utara menunjukkan hasil positif selama periode 2020–2024. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, nilai IKLH secara keseluruhan meningkat dari 70,12 pada tahun 2020 menjadi 77,09 pada tahun 2024, dengan kategori "Baik". Peningkatan ini didorong oleh perbaikan signifikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) yang tetap stabil di kategori "Sangat Baik", serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTP) yang naik dari 61,71 (2020) menjadi 76,91 (2024). Meski

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami fluktuasi, peningkatan pada tahun 2024 (60,48) menunjukkan komitmen daerah dalam memperbaiki kualitas air melalui pemantauan intensif di titik-titik strategis seperti Sungai Ilangata dan Poso. Data ini mencerminkan keberhasilan Gorontalo Utara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan upaya memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi dampak polusi. IKLH Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Uraian	IKLH 2020	IKLH 2021	IKLH 2022	IKLH 2023	IKLH 2024	Status IKLH 2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,63	58,67	55,00	56,67	60,48	Sedang
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,81	89,34	95,51	93,40	92,60	Sangat Baik
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTP)	61,71	75,61	75,61	76,88	76,91	Baik
Nilai IKLH		70,12	74,47	75,92	75,97	77,09	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

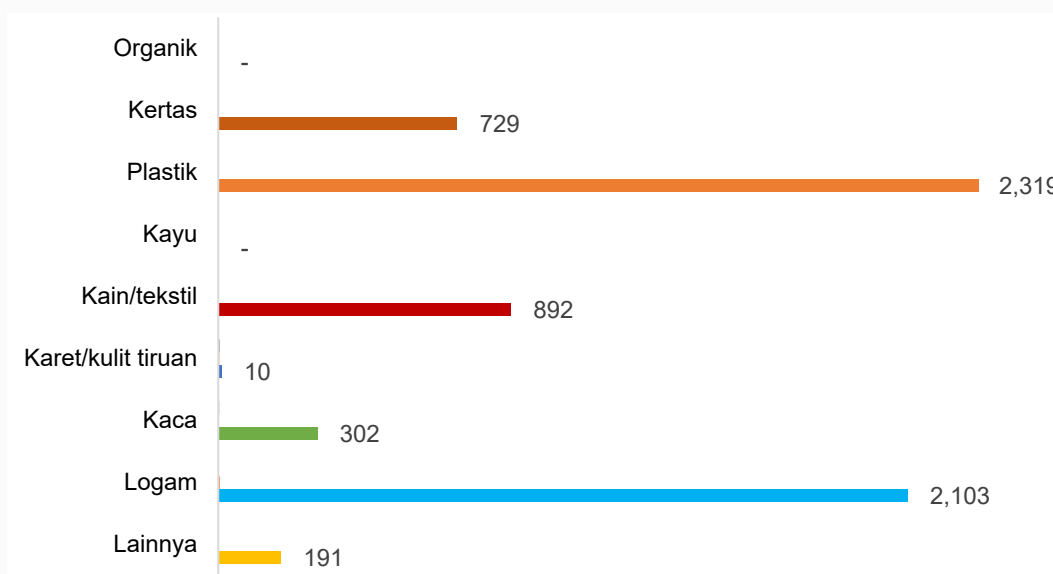
2.1.2.11.2 Cakupan Layanan Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi ini mengamanatkan pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), penegakan sistem pengumpulan, pengangkutan, serta pemrosesan akhir di tempat pembuangan terpadu (TPST/TPA). Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah,

mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan sampah tidak mencemari lingkungan.

Data komposisi sampah di Kabupaten Gorontalo Utara didominasi oleh sampah plastik dan logam, mencerminkan tingginya penggunaan kemasan sekali pakai dan material industri/rumah tangga. Sampah tekstil/kain dan kertas juga signifikan, menunjukkan potensi daur ulang yang belum optimal. Sampah kaca dan karet/kulit tiruan relatif rendah, sementara sampah organik tidak tercatat mengindikasikan belum adanya pemilahan yang sistematis. Dominasi sampah non-organik ini menuntut strategi pengelolaan seperti pembatasan plastik, peningkatan bank sampah, dan edukasi pemilahan untuk mengurangi beban lingkungan. Secara rinci, gambaran mengenai massa sampah di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.4 berikut.

Grafik 2.4
Massa Sampah di Sumber Sampah Tahun 2024 (Kg)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Seiring pertambahan jumlah penduduk, secara umum timbunan sampah menunjukkan peningkatan produksi, namun yang tertangani sangat rendah, mencerminkan keterbatasan infrastruktur pengolahan, kurangnya program 3R, serta minimnya kesadaran masyarakat. Peningkatan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), edukasi pemilahan sampah, dan kolaborasi dengan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Berikut kondisi penanganan persampahan di Kabupaten Gorontalo Utara selang waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2.60
Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani

No	Uraian Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi sampah (M ³ /tahun) (Ton/tahun)	18.243,72	18.472,07	347.932,75	118.900	119.846
2	Sampah tertangani (M ³ /tahun) (Ton/tahun)	2.176,07	3.672,20	11.887	4.972	8.797
3	Persentase sampah yang tertangani	11,93	19,88	3,41	4,18	7,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Rasio Tempat Penampungan Sementara (TPS) per satuan penduduk mengalami penurunan signifikan, mengindikasikan semakin minimnya ketersediaan TPS seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Penurunan jumlah TPS dari 20 unit (2020) ke 2 unit (2024) terutama disebabkan oleh kerusakan infrastruktur yang tidak didukung anggaran pemeliharaan, sehingga banyak TPS tidak layak digunakan. Disparitas antara pertumbuhan penduduk dan pengurangan TPS berpotensi memperburuk penumpukan sampah, mengurangi efektivitas pengelolaan limbah, dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Diperlukan alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi TPS rusak, pembangunan unit baru, serta program edukasi masyarakat guna mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tabel 2.61 menunjukkan jumlah dan kapasitas TPS yang ada.

Tabel 2.61
TPS per Satuan Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TPS	20	15	6	6	2
2	Jumlah penduduk (ribuan jiwa)	124,96	126,58	128,65	130,72	132,78
3	Rasio TPS per satuan penduduk	1:6.248	1:8.372	1:21.441	1:21.786	1:66.390

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Adapun penempatan dan pembangunan fasilitas sarana pengelolaan persampahan sebagian besar masih difokuskan di wilayah Kecamatan Kwandang dengan pertimbangan aktifitas tinggi kegiatan masyarakat dan pemerintahan, sehingga diperkirakan menghasilkan volume produksi sampah cukup besar. Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk menambah lokus pembangunan TPS sehingga dapat menurunkan rasio TPS per satuan penduduk, terutama di wilayah yang belum memiliki TPS dan berpotensi untuk menghasilkan sampah harian yang besar.

2.1.2.11.3 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan serta Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan izin lingkungan di Gorontalo Utara mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024, terutama AMDAL dan UKL-UPL. Meski SPPL meningkat dari 0 (2023) menjadi 5 (2024), jumlah ini masih jauh di bawah capaian tahun 2020. Minimnya personel pengawas mengakibatkan tidak optimalnya pemantauan proyek berskala besar (AMDAL) dan menengah (UKL-UPL), serta ketidakmampuan menjangkau pelaku usaha kecil (SPPL). Penurunan ini karena peningkatan jumlah izin lingkungan yang tidak diimbangi penambahan tenaga ahli atau pelatihan kapasitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan rekrutmen SDM berkualitas, pemanfaatan teknologi pemantauan digital, dan sinergi dengan lembaga terkait guna memastikan kepatuhan lingkungan berkelanjutan.

Tabel 2.62
Cakupan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan

No.	Jenis Izin Lingkungan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AMDAL	1	1	1	1	0
2	UKL-UPL	14	7	7	3	8
3	SPPL	23	6	2	0	5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Data penanganan pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tercatat 14 kasus pengaduan yang masuk dan seluruhnya berhasil ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jumlah pengaduan kemudian

mengalami penurunan drastis menjadi 9 kasus pada tahun 2021 dan 2022, yang seluruhnya juga dapat diselesaikan. Tahun 2023 mencatat pencapaian terbaik dengan hanya 8 kasus pengaduan yang masuk dan ditangani. Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 13 kasus, di mana semua pengaduan tersebut juga berhasil diselesaikan. Meskipun terjadi fluktuasi jumlah pengaduan, tingkat penyelesaian pengaduan menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan persentase 100% pada setiap tahunnya, mengindikasikan responsivitas dan efektivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat. Penanganan pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terlihat pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63
Penanganan Pengaduan Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengaduan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Masuk	14	9	9	8	13
Ditangani	14	9	9	8	13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.2.11.4 Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Kegiatan pemantauan lingkungan di Kabupaten Gorontalo Utara mencakup pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, dan perlindungan sumber daya alam. Data menunjukkan fluktuasi jumlah kegiatan yang diawasi selama 2020-2024, dengan capaian tertinggi 22 kegiatan pada tahun 2022 dan terendah 9 kegiatan pada tahun 2021, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas lapangan dan alokasi sumber daya. Meski mengalami peningkatan pada tahun 2024, inkonsistensi ini menunjukkan perlu ada upaya lebih sistematis dalam memastikan keberlanjutan pemantauan lingkungan, agar pembangunan daerah tetap seimbang dengan perlindungan ekosistem. sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut.

Tabel 2.64
Kegiatan yang Diawasi dalam Pemantauan Lingkungan

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kegiatan yang diawasi dalam rangka implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan	15	9	22	14	24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.2.11.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Oleh karenanya, keberadaan lingkungan alam menjadi sebuah keharusan untuk terus dijaga dalam eksistensinya terhadap daya dukung alam agar memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 dikolaborasikan dengan KLHS RPJMD Gorontalo Utara 2025-2045, hasil kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) air dan pangan Gorontalo Utara yang memuat jasa ekosistem penyediaan air dan penyediaan pangan.

2.1.2.11.5.1 Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti sungai dan danau, air tanah, bahkan air hujan.

- Jasa ekosistem penyedia air

Perhitungan jasa ekosistem penyediaan air menggunakan tiga sumber data, yaitu bentang lahan, vegetasi alami, dan penutup lahan, dengan pembobotan masing-masing: bentang lahan 0,28, vegetasi alami 0,12, dan penutup lahan 0,6, sehingga faktor yang paling berpengaruh pada nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air adalah penutup lahan.

Dari hasil perhitungan, peta jasa ekosistem penyedia air di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara berkontribusi sekitar 11 persen dari total persentase luas wilayah fungsional dalam

penyediaan air di Provinsi Gorontalo, dengan sebagian besar termasuk air kelas “Rendah” dan “Sedang”.

Tabel 2.65
Distribusi Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air
di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Wilayah	Jasa Ekosistem Penyedia Air Tahun 2020 (%)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	N/A	Jumlah
A	Provinsi Gorontalo	55,08	26,39	0,70	0,0127	82,19
1	Boalemo	9,43	2,96	0,09	0,0005	12,49
2	Bonebolango	6,57	6,18	0,14	0,0028	12,88
3	Gorontalo	9,92	4,50	0,31		14,74
4	Gorontalo Utara	9,20	2,53	0,02	0,0009	11,76
5	Pohuwato	19,71	10,00	0,12	0,0085	29,84
6	Kota Gorontalo	0,25	0,22	0,01		0,48
B	Sulawesi Tengah	6,43	6,13	0,07	0,0017	12,63
1	Buol	5,50	5,91	0,07	0,0016	11,47
2	Parigi Moutong	0,93	0,22	0,00	0,0001	1,16
C	Sulawesi Utara	1,82	3,34	0,02	0,0019	5,18
1	Bolaang Mongondow Selatan	0,68	2,98	0,00	0,0009	3,66
2	Bolaang Mongondow Utara	1,14	0,36	0,02	0,0011	1,52
Jumlah Wilayah Fungsional		63,33	35,86	0,79	0,02	100

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2045, 2024

- Jasa ekosistem pengaturan tata air

Secara umum, kondisi pengaturan tata air di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi pengaturan tata air kelas “Tinggi” dengan total persentase luas sebesar 63,32 persen dari total persentase luasan wilayah fungsional Provinsi Gorontalo, dengan 6 persen diantaranya kontribusi Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.66
Distribusi Persentase Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air
di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Wilayah	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Tahun 2020 (%)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	N/A	Jumlah
A	Provinsi Gorontalo	2,66	29,92	52,26	0,0127	82,19
1	Boalemo	1,27	5,12	7,36	0,0005	12,49
2	Bonebolango	0,13	3,58	9,30	0,0028	12,88
3	Gorontalo	0,98	9,45	5,28		14,74
4	Gorontalo Utara	0,18	5,69	6,07	0,0009	11,76
5	Pohuwato	0,08	5,64	24,19	0,0085	29,84
6	Kota Gorontalo	0,03	0,43	0,05		0,48
B	Sulawesi Tengah	0,52	5,32	7,29	0,0017	12,63
1	Buol	0,28	4,30	7,17	0,0016	11,47
2	Parigi Moutong	0,24	1,03	0,12	0,0001	1,16
C	Sulawesi Utara	0,07	1,41	3,77	0,0019	5,18
1	Bolaang Mongondow Selatan	0,00	0,57	3,09	0,0009	3,66
2	Bolaang Mongondow Utara	0,07	0,84	0,68	0,0011	1,52
Jumlah Wilayah Fungsional		3,25	36,66	63,32	0,02	100

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2045, 2024

- Status daya dukung dan daya tampung air

Perhitungan status daya dukung lingkungan hidup untuk penyediaan air Provinsi Gorontalo menggunakan pendekatan perhitungan selisih antara ketersediaan jasa ekosistem terhadap indikator penyediaan air dengan kebutuhan dasar perkapita penduduk secara keseluruhan untuk air, yang dilaksanakan dengan menghitung potensi ketersediaan air per wilayah sungai di Provinsi Gorontalo, yang meliputi tiga wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Paguyaman, Wilayah Sungai Randangan, dan Wilayah Sungai Limboto-Bone-Bolango. Berdasarkan Tabel 2.67, kebutuhan air di Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh kebutuhan untuk lahan.

Perhitungan ambang batas ketersediaan air dilakukan untuk mengetahui populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah oleh karakteristik wilayah di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo, jumlah populasi penduduk maksimal (ambang batas) yang dapat didukung oleh ketersediaan air secara alamiah di Gorontalo Utara sebanyak 18.657.962 jiwa. Populasi penduduk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 kurang lebih mencapai 132,78 ribu jiwa, maka status daya dukung penyediaan air bagi penduduk di Gorontalo Utara masuk pada kategori “Belum Melampaui”.

Tabel 2.67
Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Wilayah	DDTLH Indikatif Penyediaan Air Provinsi Gorontalo								
		Model (Populasi Pergrid)	Ketersediaan (Supply)	Kebutuhan Lahan (Demand)	Kebutuhan Domestik (Demand)	Demand Total	Ambang Batas	Selisih	Wilayah Masih Mendukung	Wilayah Tidak Mendukung
		Jiwa	M³/Tahun)	M³/Tahun)	M³/Tahun)	M³/Tahun)	Jiwa	Jiwa	%	%
1	Boalemo	158.351	1.113.975.694	592.864.421	13.681.526	606.545.947	12.062.802	11.904.451	13,27	2,02
2	Bonebolango	157.152	1.223.737.157	260.341.341	13.577.933	273.919.274	22.300.758	22.143.606	15,02	0,67
3	Gorontalo	374.813	1.343.057.524	951.605.946	32.383.843	983.989.789	9.061.340	8.686.527	14,69	3,82
4	Gorontalo Utara	112.836	1.185.912.044	379.888.649	9.749.030	389.637.679	18.657.962	18.545.126	13,95	0,66
5	Pohuwato	153.937	2.607.144.422	504.196.258	13.300.157	517.496.414	48.679.378	48.525.441	32,76	2,51
6	Kota Gorontalo	210.785	42.734.226	30.876.092	18.211.824	49.087.916	274.492	63.707	0,38	0,25
Total		1.167.874	7.516.561.068	2.719.772.705	100.904.314	2.820.677.019	111.036.732	109.868.858	90,07	9,93

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2045, 2024

Wilayah yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 0,66 persen dari total 9,93 persen wilayah kabupaten/kota yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air di Provinsi Gorontalo. Sedangkan yang belum melampaui ambang batas ketersediaan air di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 13,95 persen dari

total 90,07 persen wilayah kabupaten/kota yang belum melampaui ambang batas ketersediaan air di Provinsi Gorontalo, setara kurang lebih luasan 173.878,42 Ha.

Pada dasarnya, ketersediaan air di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor pemanfaatan lahan. Jika laju pertumbuhan penduduk terus meningkat, sedangkan luasan wilayah relatif tetap, maka tekanan penduduk memicu terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan. Dapat dibayangkan jika pemanfaatan lahan mencapai 100 persen untuk kegiatan perekonomian dan permukiman, sehingga tidak terdapat ruang lagi untuk resapan air (*catchment area*), akibatnya akan mempengaruhi siklus hidrologi yang semakin mengurangi kuantitas ketersediaan air. Selengkapanya gambaran daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Provinsi Gorontalo

No.	Wilayah	Status Daya Dukung Daya Tampung Air (%)			
		Belum Terlampaui	Terlampaui	N/A	Jumlah
1	Boalemo	8,34	6,86	0,00	15,19
2	Bonebolango	12,09	3,58	0,00	15,68
3	Gorontalo	7,23	10,69	0,00	17,93
4	Gorontalo Utara	9,41	4,89	0,00	14,31
5	Pohuwato	28,76	7,51	0,03	36,30
6	Kota Gorontalo	0,16	0,43	0,00	0,59
Total		66,00	33,96	0,04	100,00

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 yang diolah kembali tim ahli penyusun KLHS RPJMD, dimuat pada KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2045, 2024

Senada dengan KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045, distribusi serta luas jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Air

No.	Tutupan Lahan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Total	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Belukar rawa	-	0	146,25	0,09	56,43	0,03	-	0	-	0	202,68	0,12
2	Hutan lahan kering primer	-	0	-	0	25.799,96	15,01	-	0	-	0	25.799,96	15,01
3	Hutan lahan kering sekunder	-	0	26.551,77	15,45	25.173,31	14,65	-	0	-	0	51.725,08	30,10
4	Hutan mangrove primer	-	0	13,85	0,01	-	0	-	0	-	0	13,85	0,01
5	Hutan mangrove sekunder	336,68	0,20	2.367,03	1,38	-	0	-	0	-	0	2.703,71	1,57
6	Hutan tanaman	-	0	4.165,24	2,42	-	0	-	0	-	0	4.165,24	2,42
7	Pelabuhan udara/laut	-	0	3,28	0,01	-	0	-	0	-	0	3,28	0,01

No.	Tutupan Lahan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Total	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
8	Perkebunan	102,23	0,06	181,41	0,11	-	0	-	0	-	0	283,64	0,17
9	Permukiman	228,07	0,13	1.006,25	0,59	-	0	-	0	-	0	1.234,32	0,72
10	Pertanian lahan kering	-	0	7.302,24	4,25	4.353,70	2,53	-	0	-	0	11.655,94	6,78
11	Pertanian lahan kering campur semak	-	0	-	0	49.183,99	28,62	399,99	0,23	-	0	49.583,97	28,85
12	Sawah	-	0	1.915,08	1,11	896,73	0,52	-	0	-	0	2.811,82	1,64
13	Semak/belukar	-	0	10.062,53	5,86	10.369,99	6,03	-	0	-	0	20.432,52	11,89
14	Tambak	23,74	0,01	550,44	0,32	-	0	-	0	-	0	574,18	0,33
15	Tanah terbuka	6,10	0,01	384,39	0,22	-	0	-	0	-	0	390,49	0,23
16	Tubuh air	-	0	-	0	-	0	67,51	0,04	203,73	0,12	271,23	0,16
Total		696,81	0,41	54.649,77	31,80	115.834,10	67,40	467,49	0,27	203,73	0,12	171.851,90	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, 2024

Tabel 2.69 menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan air didominasi oleh jasa ekosistem dengan kelas “Sedang” yaitu sebesar 67,40 persen dari total wilayah dengan fokus di jenis tutupan lahan pertanian lahan kering campur semak. Di lain sisi, lahan yang berpotensi “Tinggi” dan “Sangat Tinggi” dalam menyediakan air memiliki luasan yang sangat kecil yaitu masing-masing sebesar 0,27 persen dan 0,12 persen.

Hasil analisis status daya dukung air indikatif disajikan pada Tabel 2.70, yang dapat dilihat bahwa semua wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki status daya dukung air yang belum terlampaui, yang menunjukkan kebutuhan air belum melampaui ketersediaan airnya.

Tabel 2.70
Status Daya Dukung Air Indikatif

No.	Kecamatan	Ketersediaan Air (M ³ /Tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (M ³ /Tahun)	Kebutuhan Air untuk Domestik (M ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Total (M ³ /Tahun)	Selisih (M ³ /Tahun)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Selisih Ambang Batas (Jiwa)	Keterangan
1	Anggrek	49.893.393	48.284.630	1.513.382	49.798.013	95.380	18.615	1.099	Belum terlampaui
2	Atinggola	82.133.482	36.354.517	1.048.810	37.403.327	44.730.156	529.876	517.737	Belum terlampaui
3	Biau	46.751.288	26.731.546	496.195	27.227.741	19.523.546	231.676	225.933	Belum terlampaui
4	Gentuma Raya	35.811.145	25.330.152	867.024	26.197.176	9.613.969	121.288	111.253	Belum terlampaui
5	Kwandang	65.016.527	52.429.706	2.516.486	54.946.192	10.070.335	145.645	116.519	Belum terlampaui
6	Monano	43.322.276	33.382.424	612.490	33.994.913	9.327.363	115.041	107.952	Belum terlampaui
7	Ponelo Kepulauan	5.327.906	2.195.856	362.362	2.558.218	2.769.688	36.255	32.061	Belum terlampaui
8	Sumalata	107.188.565	59.065.878	995.501	60.061.379	47.127.186	556.974	545.452	Belum terlampaui
9	Sumalata Timur	54.773.586	23.031.173	667.267	23.698.440	31.075.146	367.487	359.764	Belum terlampaui
10	Tolinggula	71.347.066	36.507.001	922.320	37.429.321	33.917.745	403.237	392.562	Belum terlampaui
11	Tomilito	35.726.606	34.666.199	845.165	35.511.364	215.242	12.206	2.424	Belum terlampaui
TOTAL		597.291.840	377.979.082	10.847.002	388.826.084	208.465.756	2.538.300	2.412.756	Belum terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, 2024

2.1.2.11.5.2 Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Perhitungan status daya dukung penyediaan pangan meliputi perhitungan ketersediaan pangan, perhitungan kebutuhan pangan, perhitungan ambang batas, dan perhitungan selisih antara ambang batas dan populasi.

Kajian status daya dukung penyediaan pangan menunjukkan bahwa ambang batas penduduk terkait ketersediaan pangan di Gorontalo Utara sebanyak 627.827 jiwa. Jika dibandingkan dengan populasi saat ini (tahun 2024) yang baru mencapai 130 ribuan jiwa, maka daya dukung penyediaan pangan bagi penduduk Kabupaten Gorontalo Utara belum melampaui. Dari analisis yang sama menunjukkan bahwa sekitar 14 persen wilayah Gorontalo Utara belum melampaui bahkan tidak ada wilayahnya yang dianggap sudah melampaui ambang batas ketersediaan pangan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Gorontalo

DDTLH Indikatif Penyediaan Pangan Provinsi Gorontalo								
No.	Wilayah	Model (Populasi Pergrid)	Ketersediaan (Supply)	Kebutuhan (Demand)	Ambang Batas	Selisih	Wilayah Masih Mendukung	Wilayah Tidak Mendukung
		Jiwa	Kkal	Kkal	Jiwa	Jiwa	%	%
1	Boalemo	158.351	489.784.197.841	124.265.947.250	623.773	465.422	15,12	0,17
2	Bonebolango	157.152	499.813.185.055	123.325.032.000	636.436	479.284	13,94	1,75
3	Gorontalo	374.813	554.756.973.095	294.134.501.750	706.508	331.695	13,69	4,83
4	Gorontalo Utara	112.836	492.853.605.556	88.548.051.000	627.827	514.991	14,61	0,00
5	Pohuwato	153.937	1.164.590.991.104	120.802.060.750	1.483.097	1.329.160	35,06	0,20
6	Kota Gorontalo	210.785	17.693.167.490	165.413.528.750	22.543	-188.242	0,10	0,53
Total		1.167.874	3.219.492.120.142	916.489.121.500	4.100.184	2.932.310	92,52	7,48

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2045, 2024

Dengan gambaran yang sudah diberikan dari daya dukung dan daya tampung penyediaan air dan pangan, Pemerintah Daerah dan para pihak lainnya perlu berkolaborasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mendorong praktek pembangunan secara berkelanjutan yang menyediakan layanan ekosistem dalam penyediaan dan pengaturan air. Kebijakan-kebijakan dirancang untuk memastikan pengaturan, ketersediaan dan kualitas sumber daya air, yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia, pembangunan ekonomi, dan berfungsinya ekosistem secara alami.

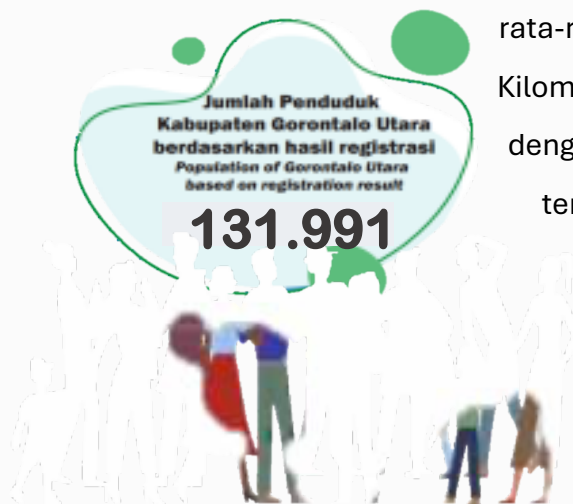
2.1.2.12 Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur, dan persebaran penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Aspek demografi memberikan wawasan penting dalam memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebijakan suatu wilayah. Melalui analisis demografi, pemerintah dapat merencanakan

kebutuhan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan yang sesuai dengan karakteristik penduduk.

Penduduk (SDM) merupakan modal penting dalam pembangunan suatu wilayah, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Diperlukan komponen penduduk yang tidak hanya besar, namun juga memiliki daya saing untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hanya dengan penduduk yang berkualitas, sumber daya dan kekayaan alam dapat dimanfaatkan secara pantas, tepat, efisien, dan berkesinambungan. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral merupakan jaminan masa depan yang cerah bagi daerah. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki nilai strategis dalam pengambilan kebijakan.

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki populasi sekitar 131,991 ribu jiwa, dengan



rata-rata kepadatan penduduk 74 jiwa per Kilometer persegi, terdiri dari 11 kecamatan dengan distribusi penduduk yang lebih terkonsentrasi di Kecamatan Kwandang

dan Anggrek, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk Gorontalo Utara didominasi oleh kelompok usia produktif, yang mencerminkan potensi tenaga kerja

yang besar untuk sektor pertanian, perikanan, dan jasa. Tingkat pertumbuhan penduduk yang moderat menunjukkan stabilitas demografis, meskipun tantangan seperti migrasi keluar ke wilayah perkotaan tetap menjadi perhatian. Dengan beragam etnis dan budaya, dinamika sosial di Gorontalo Utara menunjukkan kehidupan yang harmonis, namun tetap membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang inklusif untuk mencapai kesejahteraan bersama.

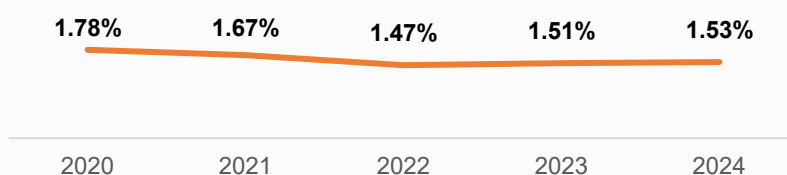
2.1.2.12.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selain karena sebab alami (fertilitas), pertumbuhan penduduk juga dapat diakibatkan oleh adanya migrasi dari daerah lainnya, sepanjang penduduk yang masuk lebih besar dibandingkan keluar. Setiap tahun, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara selalu meningkat. Geliat ekonomi yang semakin bergairah dan kebutuhan ketersediaan lahan garapan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu daya tarik bagi masuknya penduduk dari luar daerah. Dinamika ini perlu didukung sekaligus diantisipasi oleh pemerintah daerah agar pertambahan penduduk dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi wilayah, dan memacu dalam peningkatan pelayanan dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 104.617 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 53.128 jiwa dan penduduk perempuan 51.489 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024, berdasarkan catatan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang mendasarkan datanya berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencatat pada tahun 2024 populasi telah mencapai 131.991 jiwa, meningkat 1,22 persen dibanding 130.400 jiwa di tahun 2023.

Rata-rata pertumbuhan penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2023 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara moderat sebesar 1,67 persen/tahun (1,59 persen tahun 2020-2024), dengan penurunan sesaat pada tahun 2021 hingga 2022 yang mungkin diakibatkan beberapa faktor seperti proyeksi berkurangnya angka kelahiran dan migrasi keluar yang lebih tinggi dibandingkan migrasi masuk. Meskipun demikian, adanya pemulihan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan stabilitas proyeksi tingkat kelahiran dan migrasi.

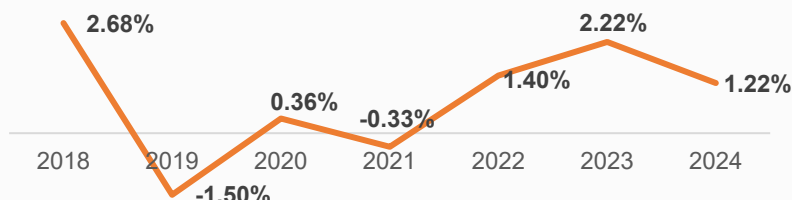
Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024



Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2025

Sedangkan pertumbuhan penduduk berdasarkan kepemilikan NIK di data Disdukcapil terlihat fluktuatif yang ditunjukkan oleh Grafik 2.6, dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan sesuai Tabel 2.72.

Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Disdukcapil



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024) dalam Gorontalo Utara Dalam Angka 2025

Tabel 2.72
Populasi Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)

No.	Kecamatan	*2010			**2024
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
1	Atinggola				12.659
2	Gentuma Raya				10.534
3	Tomilito				10.421
4	Ponelo Kepulauan				4.276
5	Kwandang				30.166
6	Anggrek				17.903
7	Monano				7.906
8	Sumalata Timur				8.310
9	Sumalata				12.271
10	Biau				6.119
11	Tolinggula				11.426
Jumlah		53.128	51.489	104.617	131.991

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

*Data proyeksi Badan Pusat Statistik

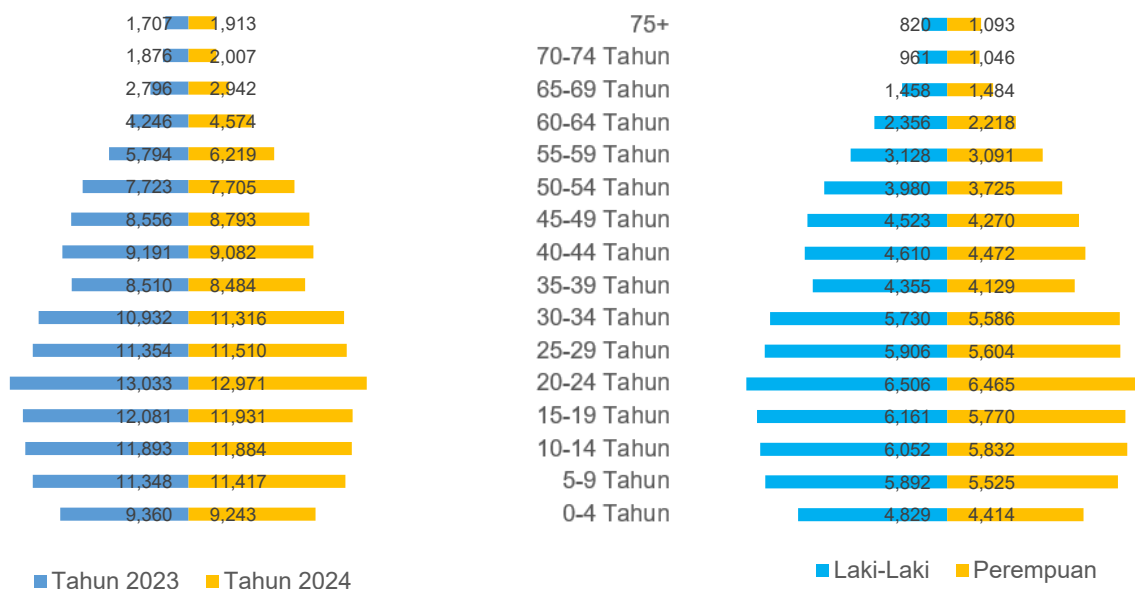
**Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimuat dalam DDA (BPS), 2025

2.1.2.12.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebagaimana terlihat pada Grafik 2.7. Secara umum, penduduk usia produktif meningkat. Pada tahun 2023, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 91.420 jiwa, atau sebesar 70,10 persen dari total penduduk. Penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 32.601 jiwa atau 25,00 persen, sedangkan yang sudah tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) atau melewati masa pensiun sebanyak 6.379 jiwa setara 4,89 persen. Setali tiga uang pada tahun 2024. Penduduk usia produktif

sebanyak 92.585 jiwa, atau sebesar 70,14 persen dari total penduduk. Penduduk yang belum produktif sebanyak 32.544 jiwa atau 24,65 persen, sedangkan yang sudah tidak produktif lagi sebanyak 6.862 jiwa setara 5,19 persen. Dari sisi gender, usia produktif terbanyak tahun 2024 pada gender laki-laki, dan usia tidak produktif lagi pada gender perempuan. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Gorontalo Utara tahun 2023 sebesar 42,64, dan tahun 2024 sebesar 42,56, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif di Gorontalo Utara menanggung secara ekonomi masing-masing sebanyak sekitar 42 penduduk usia non produktif di 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa Gorontalo Utara masih berada pada tahap bonus demografi, yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan.

Grafik 2.7
Piramida Penduduk Tahun 2023 dan 2024
dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2024



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

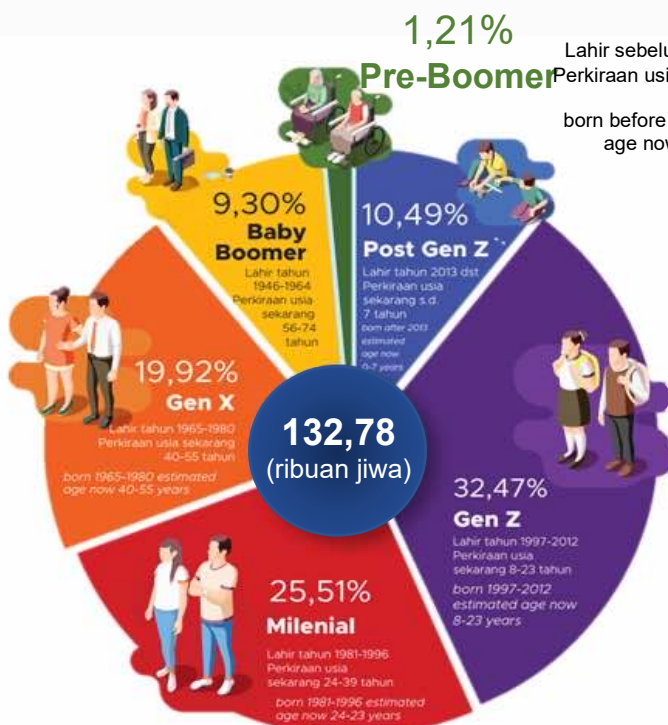
Data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Dukcapil Gorontalo Utara

Generasi Gen-Z (yang lahir antara tahun 1997-2012) dan Millennial (yang lahir antara tahun 1981 dan 1996) merupakan komposisi terbesar dalam struktur

penduduk. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, justru akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Sedangkan jika dilihat dari keseimbangan komposisi penduduk berdasarkan gender, ternyata didapatkan angka 104, yang berarti terdapat 104 orang laki-laki bagi keberadaan 100 orang perempuan. Secara umum, komposisi tersebut berimbang yang menunjukkan bahwa sudah seharusnya perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan



berwawasan gender dan berimbang serta adil antara pembangunan bagi

laki-laki maupun perempuan, termasuk memastikan pada keterwakilan yang adil bagi perempuan dalam parlemen. Informasi rasio jenis kelamin yang di-breakdown per kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.73, yang menunjukkan setelah lewat 1,5 dekade pun, rasio gender tetap

Sumber: BPS, 2025. Pengklasifikasian oleh William H. Frey. *Analysis of Census Bureau Population Estimates*. identik meskipun terjadi

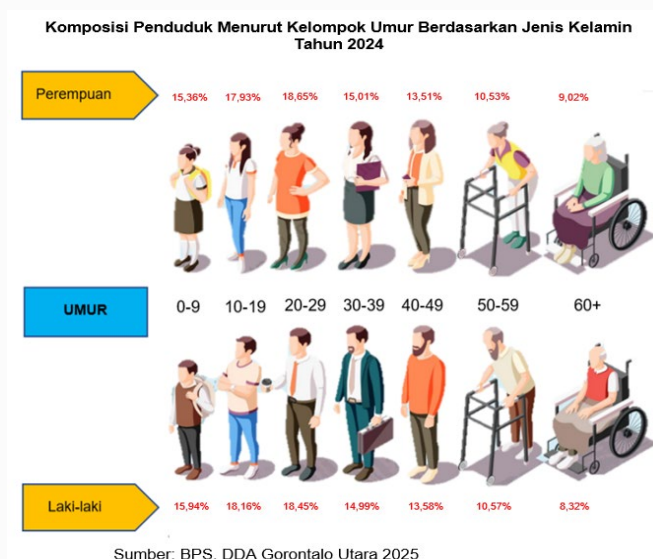
pergeseran angka di beberapa

kecamatan.

Tabel 2.73
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Gorontalo Utara

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin				
		2010	2020	2022	2023	2024
1	Atinggola	102	105	105	104	104
2	Gentuma Raya	102	104	104	105	105
3	Kwandang	101	102	102	102	102
4	Tomilito		105	105	104	105
5	Ponelo Kepulauan		101	101	104	104
6	Anggrek	104	110	111	105	106
7	Monano		101	101	101	102
8	Sumalata	108	106	105	106	106
9	Sumalata Timur		103	102	105	105
10	Tolinggula	106	105	104	103	103
11	Biau		103	102	104	104
Gorontalo Utara		104	104	104	104	104

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah



relatif berimbang.

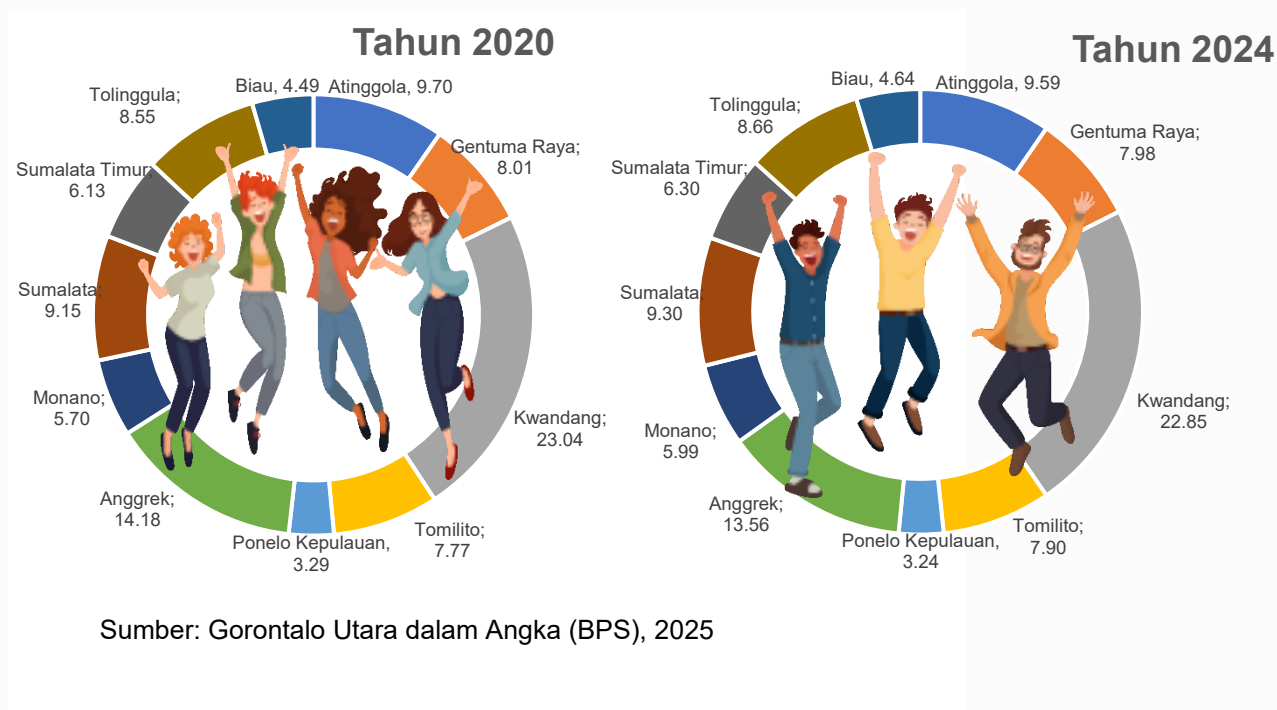
Pada rentang usia 20 hingga 59 tahun, usia yang dianggap usia kerja, komposisi penduduk produktif berdasarkan gender pun relatif berimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan persentase masing-masing 57,59 berbanding 57,69 persen, yang menunjukkan hal yang searah dengan rasio jenis kelamin yang

2.1.2.12.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk ditunjukkan dari persebaran jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Analisis distribusi penduduk menentukan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada. Kecamatan Kwandang dan Anggrek berpopulasi terbesar, namun Kecamatan Ponelo Kepulauan kecamatan terpadat, serta Kecamatan Biau, Sumalata, dan Sumalata Timur tumbuh penduduk tercepat setahun terakhir. Dengan adanya variasi ini, perencanaan pembangunan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan harus memperhatikan

kesenjangan populasi ini, memastikan bahwa sumber daya dan program pembangunan dapat menjangkau semua kecamatan secara merata.

Grafik 2.8
Komposisi Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan



Tabel 2.74
Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		
		2010	2020	2024
1	Atinggola	39	22	48
2	Gentuma Raya	79	49	105
3	Kwandang	119	75	158
4	Tomilito		48	105
5	Ponelo Kepulauan		261	546
6	Anggrek	72	60	127
7	Monano		25	55
8	Sumalata	32	18	40
9	Sumalata Timur		19	42
10	Tolinggula	42	24	53
11	Biau		25	55
Gorontalo Utara		59	70	74

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Kecamatan Ponelo sebagai daerah kepulauan memiliki keterbatasan lahan, sehingga memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, sementara Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, dan Atinggola menunjukkan masih terbuka ruang untuk pengembangan penduduk. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk mengalami sedikit peningkatan, dari 70 jiwa/Km² pada tahun 2020 menjadi 74

jiwa/Km² pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan populasi yang berlanjut, meskipun tidak drastis. Setiap kecamatan juga menunjukkan kecenderungan peningkatan kepadatan penduduk, meskipun ada perbedaan kepadatan yang signifikan antara kecamatan-kecamatan tersebut.

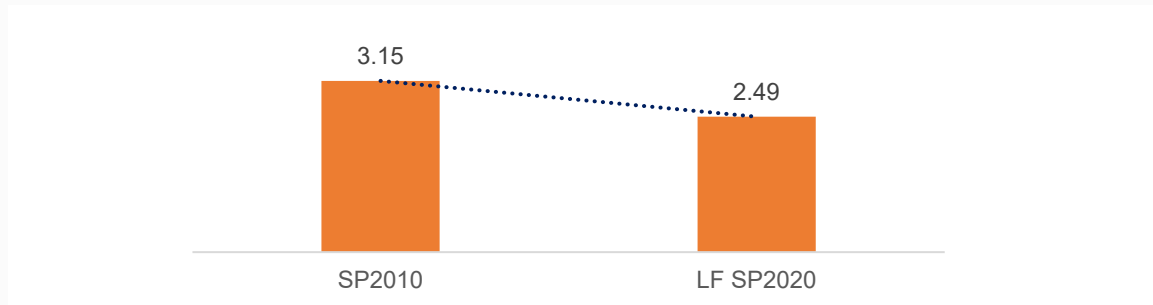
Meskipun kepadatannya masih relatif rendah, perlu diperhatikan bahwa seiring bertambahnya tahun, kepadatan diindikasikan semakin meningkat, hal lumrah jika dikorelasikan dengan perkembangan ekonomi Gorontalo Utara sehingga menarik migrasi ke dalam serta perbaikan layanan dasar kesehatan. Namun demikian, dalam beberapa dekade mendatang kepadatan penduduk mungkin telah mencapai dua kali lipat kepadatan saat ini, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai eksek negatif atau permasalahan dalam pembangunan, yang biasanya mencakup sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi dan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, serta ketenagakerjaan. Sedangkan di kawasan peruntukan perkotaan, akan memunculkan *slum area*. Analisis perbedaan kepadatan ini penting untuk diperhatikan dalam merencanakan distribusi sumber daya, infrastruktur, dan pelayanan publik agar lebih merata dan sesuai dengan karakteristik demografi masing-masing kecamatan.

2.1.2.12.4 Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari natalitas, mortalitas, serta migrasi/mobilitas. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur natalitas adalah angka kelahiran kasar, merupakan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk, yang saat ini mencapai 21,44 kelahiran hidup diantara 1.000 penduduk Gorontalo Utara pada pertengahan tahun, dan angka kelahiran total (TFR), mencerminkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia subur (15-49 tahun) yang menunjukkan terjadinya penurunan dalam 1 dekade terakhir berdasarkan hasil *Long Form* SP2020 (LF SP2020). Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun, yang mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan

bonus demografi. Penurunan ini mencerminkan perubahan pola reproduksi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran tentang perencanaan keluarga, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan peningkatan pendidikan bagi perempuan. Perbandingan tren TFR pada dua sensus disajikan pada Grafik 2.9.

Grafik 2.9
Tren TFR Gorontalo Utara



Sumber: BPS, *Long Form* SP2020

TFR hasil sensus penduduk tahun 2020 masih sedikit di atas angka pengganti (*replacement level*) sebesar 2,1 anak per wanita, yang diperlukan untuk mempertahankan jumlah penduduk tanpa migrasi, menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan kelahiran, Gorontalo Utara masih memiliki tingkat kelahiran yang cukup untuk mendukung regenerasi populasi.

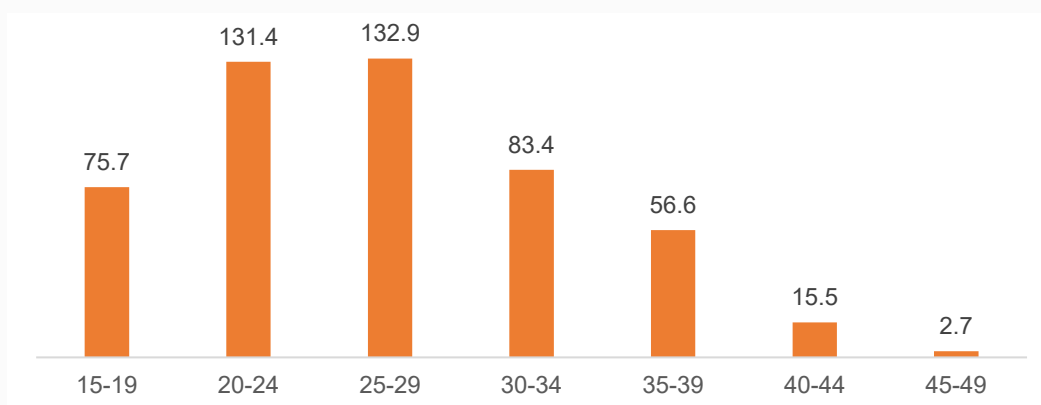
Tren ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana, namun juga memunculkan tantangan baru, seperti kebutuhan untuk mendukung kelompok usia produktif yang semakin besar dengan pendidikan, lapangan kerja, dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa tingkat TFR tidak menurun terlalu drastis, yang dapat berdampak pada struktur populasi jangka panjang.

Pada angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu (ASFR), puncaknya terjadi pada perempuan usia 25-29 tahun, menunjukkan bahwa wanita dalam kelompok usia tersebut cenderung berada dalam puncak masa subur dan memiliki kontribusi terbesar terhadap total kelahiran. Kelompok usia 20-24 tahun juga memiliki angka kelahiran yang tinggi, yang menempatkannya sebagai kelompok dengan angka kelahiran kedua tertinggi. Sementara itu, angka kelahiran mulai menurun pada kelompok usia 30-34 tahun dan terus menurun

secara signifikan pada kelompok usia yang lebih tua. Pada kelompok usia 45-49 tahun, angka kelahiran sangat rendah, hanya sebesar 2,7 kelahiran per 1.000 wanita, menunjukkan akhir masa reproduksi.

Analisis ASFR di atas mencerminkan pola reproduksi yang umum, di mana mayoritas kelahiran terjadi pada wanita usia produktif muda. Pola ini relevan untuk perencanaan program kesehatan reproduksi, seperti penyediaan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan, khususnya bagi kelompok usia muda yang berkontribusi besar terhadap tingkat kelahiran. Lebih lanjut, pemanfaatan data ASFR ini untuk memastikan akses layanan kesehatan yang optimal guna mendukung kesejahteraan ibu dan anak serta mengelola pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan. Detail informasi tersebut pada Grafik 2.10.

Grafik 2.10
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (ASFR)



Sumber: BPS, *Long Form* SP2020

Migrasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk, pelaku migrasi disebut migran. BPS membagi migran ke dalam dua kelompok, yaitu migran seumur hidup dan migran risen. Migran seumur hidup merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi maupun kabupaten/kota) dengan tempat lahirnya. Sementara itu, migran risen merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu.

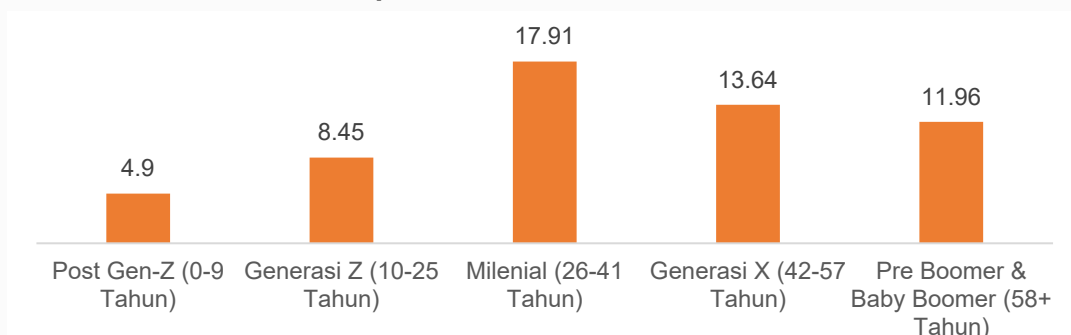
Berdasarkan hasil LF SP2020 juga, sebanyak 11,62 (11 hingga 12 orang) dari 100 penduduk lahir di luar Gorontalo Utara, dengan lebih dari setengah migran seumur hidup tersebut berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, penduduk berstatus migran seumur hidup pada generasi milenial lebih tinggi daripada generasi yang lebih muda maupun lebih tua. Sebanyak 17-18 orang dari 100 penduduk Milenial lahir di luar Kabupaten Gorontalo Utara mencerminkan tingginya mobilitas kelompok usia produktif ini, yang umumnya terkait dengan



kebutuhan kerja, pendidikan dan peluang ekonomi. Generasi Z memiliki proporsi migrasi yang lebih rendah, dijelaskan oleh keterbatasan usia muda dalam membuat keputusan independen untuk pindah tempat tinggal. Sebaliknya, migrasi kelompok usia *Pre-Boomer* dan *Baby*

Boomer mencerminkan mobilitas mereka di masa lalu atau dalam konteks pindah ke lokasi tertentu, seperti mendekati keluarga atau kebutuhan lainnya. Generasi *Post Gen-Z* memiliki proporsi terendah, karena kelompok ini sebagian besar belum mencapai usia yang memungkinkan untuk mobilitas independen. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa mobilitas penduduk di Gorontalo Utara didominasi oleh generasi usia produktif, yang menunjukkan peran penting mobilitas sebagai bagian dari dinamika ekonomi dan sosial sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.11 berikut.

Grafik 2.11
Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup
Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi



Sumber: BPS, Long Form SP2020

Pada migran risen, didapat angka 4,49, yang berarti sebanyak 4-5 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Gorontalo Utara bertempat tinggal di luar Gorontalo Utara pada 5 tahun sebelumnya (tahun 2017). Migran risen sebagian besar dilakukan oleh jenis kelamin perempuan.

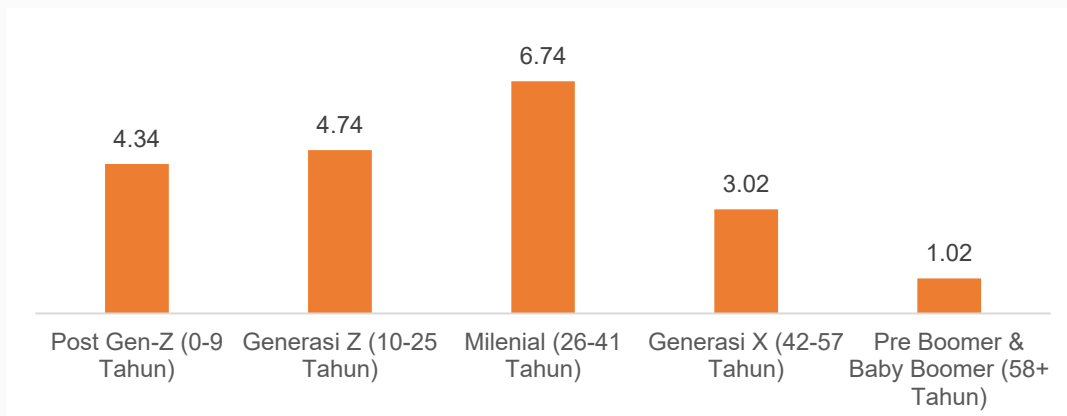
Generasi Milenial memiliki proporsi migrasi risen tertinggi, yang dapat



Migrasi pada Generasi X memiliki proporsi migrasi lebih rendah, yang mencerminkan mobilitas yang mulai berkurang seiring dengan meningkatnya usia. Sementara itu, kelompok *Post Gen-Z*, *Pre-Boomer* dan *Baby Boomer* memiliki proporsi migrasi yang paling rendah. Hal ini wajar karena kelompok usia sangat muda biasanya mengikuti orang tua, sedangkan kelompok usia lanjut cenderung menetap di lokasi tertentu.

Secara keseluruhan, mobilitas penduduk didominasi oleh generasi usia produktif, terutama Milenial, yang menjadi pendorong utama dinamika migrasi. Hasil analisis dari informasi ini penting untuk merancang kebijakan yang mendukung kebutuhan kelompok migran produktif, seperti peningkatan akses terhadap pekerjaan, layanan transportasi, dan infrastruktur di wilayah tujuan migrasi. Data detail mengenai migran risen sebagaimana Grafik 2.12 berikut.

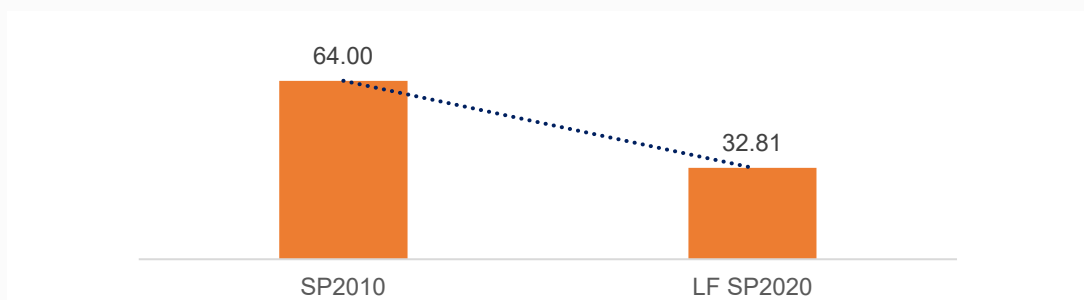
Grafik 2.12
Proporsi Penduduk Berstatus Migran Risen
Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi



Sumber: BPS, Long Form SP2020

Selain mobilitas dan fertilitas, indikator lainnya yaitu mortalitas. Dalam rentang tahun 12 tahun (periode 2010-2022), penurunan angka kematian bayi mencapai 50 persen. Hal tersebut disinyalir sebagai buah dari peningkatan bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata lama pemberian ASI (sumber: Susenas Tahun 2019-2022) membuat bayi semakin mampu bertahan hidup, sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.13.

Grafik 2.13
Angka Kematian Bayi



Sumber: BPS, Long Form SP2020

Angka kematian anak 1-4 tahun (*child mortality rate*) sebesar 7,56 yang berarti terdapat sekitar 7-8 kematian anak umur 1-4 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian Balita (*under 5 mortality rate*) mencapai 40,37 yang berarti pada setiap 1.000 kelahiran hidup, 40-41 diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

2.1.2.12.5 Penduduk Menurut Kepercayaan

Distribusi penduduk menurut penganut agama di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 menunjukkan keberagaman. Secara keseluruhan, mayoritas penduduk memeluk agama Islam, dengan jumlah total 105.799 jiwa atau hampir 99 persen dari seluruh populasi, dan agama lainnya tetap ada meskipun dengan jumlah yang sedikit. Besaran jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75
Penduduk Menurut Kepercayaan di Gorontalo Utara Tahun 2024

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Atinggola	12.240	18	-	-	-	-
2	Gentuma Raya	8.055	1.146	-	-	-	-
3	Kwandang	25.248	226	16	-	-	-
4	Tomilito	789	128	-	-	-	-
5	Ponelo Kepulauan	4.202	-	-	-	-	-
6	Anggrek	14.849	118	56	-	-	-
7	Monano	6.374	266	-	-	-	-
8	Sumalata	10.839	385	4	-	-	-
9	Sumalata Timur	7.043	26	4	4	-	-
10	Tolinggula	10.728	167	-	1	-	-
11	Biau	5.432	419	-	1	-	-
Gorontalo Utara		105.799	2.949	80	6	-	-

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Pun setali tiga uang di Provinsi Gorontalo, 98,13 persen penduduknya beragama Islam, mencerminkan bahwa Provinsi Gorontalo cenderung memiliki homogenitas agama yang tinggi, sehingga julukan Gorontalo sebagai “Serambi Madinah” bukan isapan jempol belaka. Hal yang menjadi perhatian bagaimana konsep, nilai-nilai, dan norma agama yang dianut dapat tetap mewarnai aktivitas penduduk di tengah kemajuan dan modernisasi.

Tabel 2.76
Penduduk Menurut Kepercayaan di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Boalemo	147.115	1.866	171	2.448	7	-
2	Gorontalo	379.299	1.357	199	53	75	-
3	Pohuwato	137.636	5.171	261	1.336	8	-
4	Bonebolango	164.534	163	51	19	6	-
5	Gorontalo Utara	105.799	2.949	85	6	-	-
6	Kota Gorontalo	198.481	3.767	588	140	833	3
Provinsi Gorontalo		1.132.864	15.273	1.355	4.002	929	3

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025)

2.1.2.12.6 Penduduk Menurut Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah dapat tercermin dari kualitas pendidikan penduduknya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi dan kualitas penduduknya dari segi pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan data tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat disimak pada Tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77
Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan

No	Pendidikan Terakhir	Penduduk Tahun 2021		Penduduk Tahun 2022		Penduduk Tahun 2023		Penduduk Tahun 2024	
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	24.078	19,14	25.126	19,69	26.110	20,02	26.857	20,35
2	Belum Tamat SD/Sederajat	19.327	15,36	19.214	15,06	19.751	15,15	19.991	15,15
3	Tamat SD/Sederajat	44.703	35,53	44.278	34,71	44.399	34,05	44.378	33,62
4	SLTP/Sederajat	13.234	10,52	13.426	10,52	13.787	10,57	13.912	10,54
5	SLTA/Sederajat	18.704	14,87	19.450	15,25	19.914	15,27	20.153	15,27
6	Diploma I/II	315	0,25	287	0,22	278	0,21	271	0,21
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	772	0,61	768	0,60	800	0,61	803	0,61
8	Diploma IV/Strata I	4.505	3,58	4.840	3,79	5.152	3,95	5.414	4,10
9	Strata II	174	0,14	187	0,15	204	0,16	208	0,16
10	Strata III	4	0,00	4	0,00	5	0,00	4	0,00
JUMLAH		125.816	100	127.580	100	130.400	100	131.991	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

Komposisi penduduk yang mengenyam pendidikan hingga hanya level dasar (SD dan SMP/ sederajat) masih sangat tinggi, bahkan di atas 50 persen akumulasi penduduk. Namun persentase yang ditamatkan pada jenjang dasar tahun 2022 hingga 2024 terus berkurang dibandingkan tahun 2021, yang menunjukkan *eagerness* dan *awareness* masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seiring waktu berjalan semakin baik, seiring dengan tamatan perguruan tinggi yang terus meningkat. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif serta dukungan anggaran untuk pemenuhan SPM yang konsisten di atas 20 persen. Namun terlepas dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam oleh pemerintah daerah perihal penyebab dari angka kriteria hanya tamat pendidikan dasar yang tinggi hingga kasus per kasus dan per area,

sehingga bisa diambil kebijakan yang tepat sasaran/efektif dengan upaya yang efisien.

2.1.2.12.7 Masyarakat Adat

Wilayah Gorontalo diakui oleh Van Vollenhoven merupakan satu diantara sembilan belas daerah adat/budaya di Indonesia karena melihat adanya keberagaman adat budaya dan kesenian daerah.

Suku bangsa di wilayah Gorontalo Utara sebagian besar berasal dari Suku Gorontalo yang memiliki bahasa sendiri yang termasuk dalam rumpun bahasa Gorontaloik dari kelompok Bahasa Austronesia. Lebih detail, suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Gorontalo Utara sebagai berikut.

- Suku Gorontalo (Hulontalo)
 - Dominan dan mayoritas, termasuk suku Gorontalo utama dan sub etnis terkait, seperti Suwawa, Bolango, Limboto, dan Atinggola.
 - Populasi diperkirakan sejumlah 115.000-120.000 jiwa.
- Suku Atinggola
 - Sering dianggap sebagai bagian dari Suku Gorontalo, tetapi memiliki karakteristik linguistik dan budaya sendiri.
 - Tinggal terutama di Kecamatan Atinggola, jika diasumsikan sebagai sub-etnis yang dihuni oleh 5-7 persen penduduk Gorontalo Utara jumlahnya berkisar 6.000-9.000 jiwa.
- Suku Bajo
 - Komunitas pesisir, hidup sebagai masyarakat tradisional maritim di wilayah seperti Ponelo Kepulauan.
 - Diduga jumlahnya relatif kecil, sekitar 2-4 persen dari populasi Gorontalo Utara, setara 2.500-5.000 jiwa.
- Suku Bolaang Mongondow
 - Berasal dari Sulawesi Utara, banyak ditemukan di perbatasan seperti Kecamatan Atinggola.
 - Jumlahnya kemungkinan sangat kecil (minoritas), sekitar 1-2 persen dari total populasi setara 1.300-2.600 jiwa.

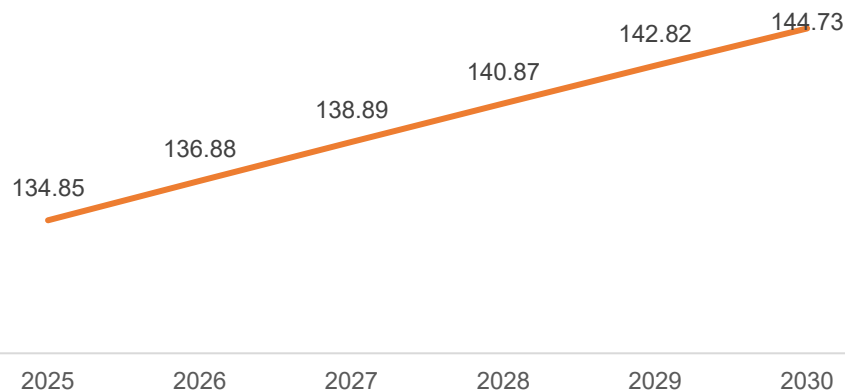
- Suku Minahasa, Sangir, dan Tionghoa
 - Dikenal sebagai suku migran atau transmigran.
 - Populasinya diperkirakan <2 persen, setara 2.500-3.000 jiwa.
- Suku Polahi (suku terasing)
 - Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Suku Polahi adalah keturunan dari orang-orang yang melarikan diri ke hutan pada masa penjajahan Belanda sekitar abad ke-17 Masehi.
 - Mendiami wilayah Suaka Margasatwa Nantu.
 - Populasi diperkirakan <1.000 jiwa.

2.1.2.12.8 Analisis Proyeksi Penduduk

Di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten termuda, dengan estimasi jumlah penduduk pada tahun 2024 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 sejumlah 132,78 ribu jiwa, sekaligus menjadikan Gorontalo Utara sebagai daerah “tersepi” di Provinsi Gorontalo karena hanya terdapat sekitar 70 hingga 75 orang dalam setiap Kilometer persegiunya.

Baik berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Badan Pusat Statistik, populasi setiap tahun di Gorontalo Utara selalu meningkat secara rata-rata sekitar 1,5 persen/tahun, yang menunjukkan ada peran yang positif secara kolektif dari upaya penekanan tingkat mortalitas, mendorong kesehatan masyarakat sehingga natalitas meningkat, atau daya tarik ekonomi daerah semakin baik yang mendorong migrasi masuk ke Gorontalo Utara. Proyeksi 5 tahun jumlah penduduk di Gorontalo Utara disajikan pada Grafik 2.14 di bawah.

Grafik 2.14
Proyeksi Populasi Penduduk 2025-2030 (Ribuan Jiwa)



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2020-2035 (BPS), 2023

Pertambahan populasi dan kepadatan penduduk menjadi modal dasar pembangunan, pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, hingga menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perencanaan matang dalam pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar.

Jika populasi dilihat dari jenis kelamin, gender laki-laki secara umum lebih banyak dibandingkan perempuan, namun dengan berjalannya tahun rasio jenis kelamin semakin mengecil. Dengan kesetaraan populasi jenis kelamin di masa depan berimplikasi pada angkatan kerja (dan mungkin angka pengangguran), sektor lapangan usaha, sarana prasarana, serta kepentingan lansia yang perlu lebih mempertimbangkan kepentingan perempuan.

9,88 ribu jiwa
selisih jumlah penduduk tahun 2030
dibandingkan 2025



Sedangkan dari segi kelompok umur, terlihat bahwa komposisi penduduk senior usia di atas 60 tahun semakin meningkat yang menunjukkan Kabupaten Gorontalo Utara menghadapi fase struktur umur penduduk menua (*ageing population*), yang ditandai dengan porsi penduduk usia di atas 60 tahun semakin mendekati 10 persen, sehingga untuk mewujudkan Lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat sesuai Peraturan Presiden

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan perlu integrasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, LSM, mitra kerja, perguruan tinggi, sektor privat, serta partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup Lansia. Dalam upaya tersebut, tidak cukup hanya memanfaatkan Program Bina Keluarga Lansia saja, perlu juga “vitamin” tambahan berupa infrastruktur ramah Lansia modern (pesantren Lansia, komunitas Lansia, rumah Lansia, dan sebagainya), pemberian pelatihan pengasahan bakat atau mendirikan sekolah khusus Lansia agar pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan para Lansia bertambah karena indikasi Lansia di Gorontalo Utara relatif masih berpendidikan rendah, berada di lingkaran kemiskinan, bahkan banyak diantaranya yang menjadi orang tua tunggal yang menjadi kepala keluarga. Dengan berbagai upaya demikian, diharapkan kondisi penduduk menua yang tangguh justru dapat memberikan efek bonus demografi kedua.

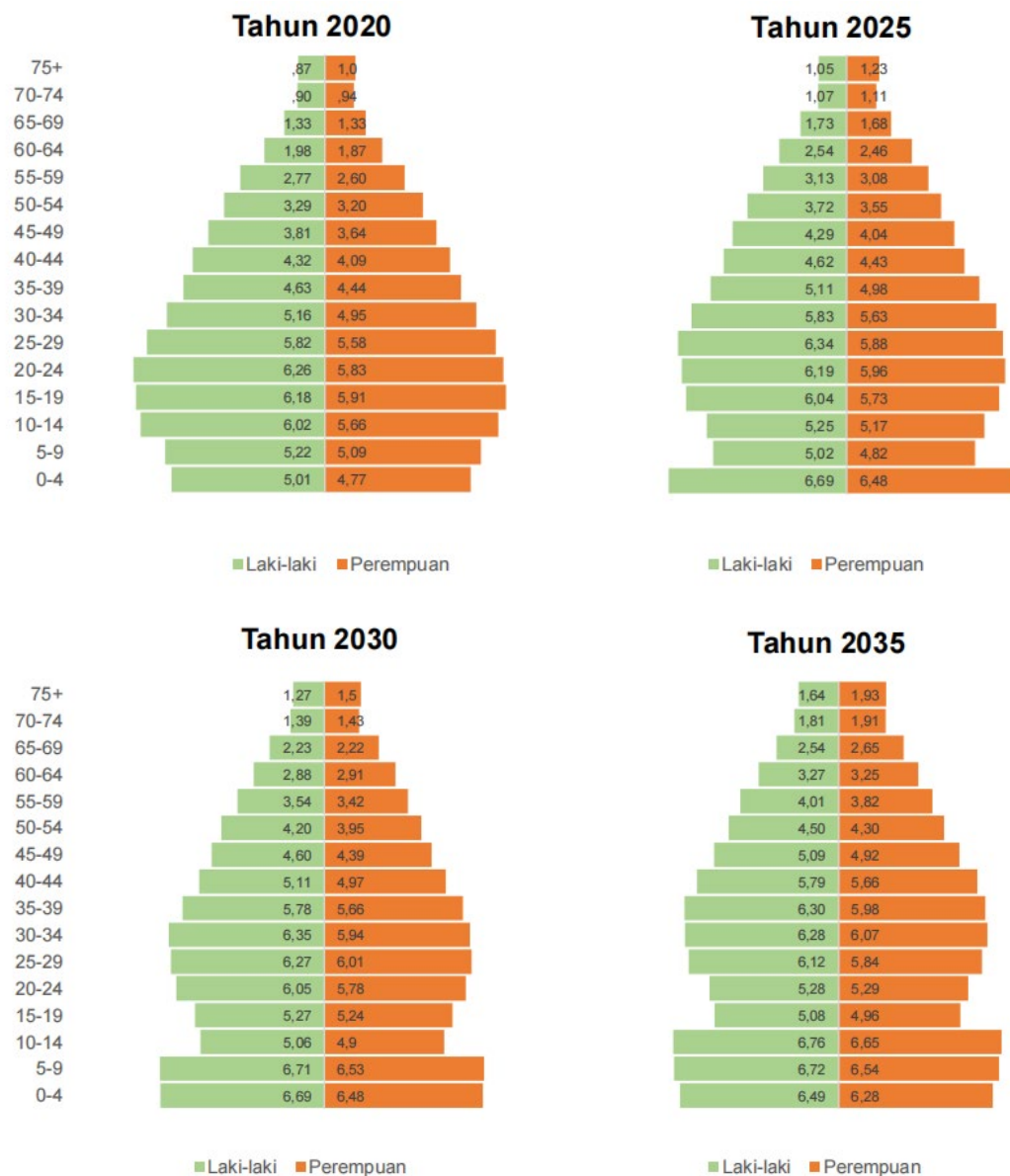
Tabel 2.78
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk

No.	Parameter	Tahun		
		2020	2025	2030
1	Penduduk			
	Laki-laki (000)	63,56	68,63	73,39
	Perempuan (000)	60,88	66,23	71,34
	Total (000)	124,44	134,85	144,73
	Sex ratio (%)	104,39	103,62	102,88
	Komposisi umur (%)			
	0-4 tahun	25,53	24,79	25,12
	15-64 tahun	69,36	69,38	67,94
	65+ tahun	5,11	5,83	6,94
	Dependency ratio (%)	44,18	44,13	47,19
2	Fertilitas			
	Total Fertility Rate (TFR)	2,49	2,39	2,30
3	Mortalitas			
	Infant Mortality Rate (IMR)	32,81	29,17	26,31

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2020-2035 (BPS), 2023

Rincian data komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dari Tabel 2.68 di atas disajikan pada Grafik 2.15 berikut.

Grafik 2.15
Proyeksi Piramida Penduduk 2020-2035
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2020-2035 (BPS), 2023

Dari segi tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) hingga tahun 2035 terlihat persentasenya terus naik, yang menandakan beban usia produktif harus menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi semakin bertambah. Dengan *shifting* tersebut, beberapa dampak akan dihadapi di masa depan, seperti mengurangi pertumbuhan produktivitas/pertumbuhan ekonomi, juga jika bebannya semakin tinggi dan tidak terkendali akan menyebabkan daerah sulit untuk maju karena turunnya komposisi usia produktif, dan

sekaligus dapat meningkatkan tekanan terhadap pengentasan kemiskinan karena pendapatan keluarga yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari alih-alih dibelanjakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. Dengan kombinasi meningkatnya angka ketergantungan dan turunnya rasio jenis kelamin, di masa depan pemerintah sangat perlu untuk mendorong produktivitas perempuan usia produktif meningkat, misalnya sedari dini memberikan insentif khusus pendidikan bagi siswa perempuan atau meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan bagi pemuda usia *Gen Z* atau *Post Gen Z*.

Pada angka kelahiran total (TFR) yang merupakan indikator penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana (KB), menunjukkan arah yang semakin mendekati 2. Angka standar pencapaian ideal angka kelahiran total adalah 2,1; berarti dua orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya (*replacement level*). Capaian tersebut juga mengasumsikan atau menunjukkan *baby boom* yang diprediksi akan terjadi saat pandemi Covid19 tidak terbukti, yang justru terjadi penundaan kelahiran karena kekhawatiran terjadi resesi ekonomi pasca Covid-19. Yang menjadi kekhawatiran justru pada jangka sangat panjang terjadi resesi seks yang secara norma sosial dan agama mengarah ke negatif, belum lagi jika dibandingkan dengan efek negatif terhadap ekonomi.

Anak usia sekolah SD yang seharusnya secara rata-rata digambarkan oleh kelompok usia 7-12 tahun, karena tidak terdapat dalam kelompok proyeksi, digunakan kelompok usia 5-9 tahun. Data yang ditunjukkan pada tahun 2020 menunjukkan 5,22 ribu pada jenis kelamin laki-laki dan 5,09 ribu jiwa pada jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2035 cakupan pada kelompok usia yang sama menjadi 6,72 pada jenis kelamin laki-laki dan 6,54 di jenis kelamin perempuan. Sedangkan pada usia SMP yang seharusnya digambarkan berusia rentang 13-15 tahun, digunakan rentang usia 10-14 tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rasio setiap jenis kelaminnya 6,02 ribuan jiwa : 5,66 ribuan jiwa, dan

pada tahun 2035 rasionya menjadi 6,76 ribuan jiwa : 6,65 ribuan jiwa. Dua kelompok usia tersebut menunjukkan perkembangan jumlah populasi di tahun 2035 dibandingkan tahun 2020, sehingga di masa depan perlu diperhitungkan kembali ketersediaan tenaga pengajar serta rombongan belajar, atau bahkan ketersediaan sekolah.

Pada tahun 2023, tingkat kematian bayi (IFR) memang semakin berkurang yang menunjukkan perbaikan derajat kesehatan, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan awal, peningkatan tingkat imunisasi lengkap, atau peningkatan rata-rata lama pemberian ASI atau cakupan bayi bawah enam bulan yang mendapat ASI eksklusif yang membuat bayi semakin mampu bertahan hidup, namun masih tergolong tinggi. Upaya untuk mendorong penurunan IFR tidak jauh dari peningkatan tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitas, khususnya di wilayah terpencil serta melengkapi fasilitas kesehatan baik pada tahap dasar maupun rujukan, perbaikan sistem layanan kesehatan, dan lain sebagainya.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, seni budaya dan agama, keluarga, kesetaraan gender, dan inklusivitas masyarakat menjadi tujuan utama yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir golongan. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai dengan tercapainya pemerataan atau inklusivitas hasil-hasil pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara mencerminkan tantangan multidimensi yang perlu diatasi melalui pendekatan terintegrasi. Data demografi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berpendidikan rendah. Kondisi

ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah prioritas untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak langsung pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan stabil, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus mencakup aspek sosial dan ekonomi, seperti penguatan sistem perlindungan sosial dan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Melalui penerapan teknologi digital, layanan publik dapat dioptimalkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah juga perlu diintegrasikan, guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing.

2.1.3.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.3.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB

Peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor unggulan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah sektor yang berkontribusi besar secara konsisten dan kontinyu terhadap *output* yang dihasilkan masyarakat yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar

(*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

PDRB pendekatan produksi pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri atas dua jenis, yakni PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK merupakan perhitungan suatu nilai barang dan jasa yang menggunakan tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Selama tujuh tahun terakhir, produksi daerah selalu meningkat (kecuali pada ADHK tahun 2020 saat terjadi pandemi) baik jika dilihat menggunakan konsep harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK) yang mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. PDRB ADHB yang naik mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa yang berkontribusi pada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Peningkatan ini penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Tabel 2.79
Nominal Pendapatan Domestik Regional Bruto

No.	Tahun Pengamatan	PDRB ADHK (dalam Miliar Rupiah)	PDRB ADHB (dalam Miliar Rupiah)
1	2017	2.036,91	2.806,61
2	2018	2.177,97	3.079,62

No.	Tahun Pengamatan	PDRB ADHK (dalam Miliar Rupiah)	PDRB ADHB (dalam Miliar Rupiah)
3	2019	2.325,47	3.369,05
4	2020	2.325,06	3.429,39
5	2021	2.376,38	3.592,42
6	2022	2.455,76	3.856,32
7	2023	2.561,60	4.146,95
8	2024	2.668,43	4.414,26

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Tabel 2.80
PDRB ADHB Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.594,36	1.757,9	1.801,03	1.897,17	2.002,54	2.142,57	2.273,35
Pertambangan & Penggalian	58,77	63,1	65,94	67,88	72,68	77,73	88,34
Industri Pengolahan	54,72	61,2	61,66	65,95	71,97	75,31	79,22
Pengadaan Listrik & Gas	0,97	1,1	1,26	1,32	1,45	1,53	1,55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,37	0,4	0,42	0,44	0,45	0,47	0,50
Konstruksi	302,24	314,1	314,40	330,37	374,51	405,60	434,55
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	289,77	331,6	332,23	349,87	398,06	445,91	482,42
Transportasi & Pergudangan	108,87	121,2	121,11	125,65	142,36	157,64	170,41
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	58,41	63,1	63,08	66,04	70,13	74,92	78,27
Informasi & Komunikasi	51,86	55,9	57,71	60,16	62,43	66,48	71,29
Jasa Keuangan & Asuransi	22,24	23,5	25,49	27,37	29,04	28,24	29,05
Real Estate	47,49	51,9	52,07	51,36	53,62	53,13	55,74
Jasa Perusahaan	1,68	1,8	1,71	1,76	1,95	1,94	1,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	226,49	238,42	238,42	240,31	253,45	268,49	280,95
Jasa Pendidikan	97,26	112,83	112,83	116,81	123,68	133,04	136,08
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	108,47	123,20	123,20	131,35	138,01	151,54	164,17
Jasa lainnya	55,65	58,82	56,82	58,61	60,00	62,41	66,38
Total	3.079,62	3.369,05	3.429,39	3.592,42	3.856,32	4.146,95	4.414,26

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Tabel 2.81
PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.089,43	1.165,78	1.163,89	1.190,11	1.213,94	1.260,59	1.308,83
Pertambangan & Penggalian	42,58	44,69	44,47	45,24	47,09	49,27	54,53
Industri Pengolahan	36,97	40,76	40,76	42,60	44,75	45,22	46,46
Pengadaan Listrik & Gas	1,13	1,22	1,46	1,54	1,64	1,72	1,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,3	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35
Konstruksi	215,64	220,16	220,20	223,50	236,93	247,51	259,63
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	195,32	218,76	216,28	223,33	241,26	261,16	278,09
Transportasi & Pergudangan	81,22	88,81	87,02	88,93	95,61	100,49	104,89
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	39,50	41,97	41,67	43,27	45,05	47,58	49,05
Informasi & Komunikasi	43,01	46,03	49,42	51,46	52,67	54,77	56,34
Jasa Keuangan & Asuransi	15,74	16,37	17,49	18,14	17,87	16,89	16,88
Real Estate	29,92	32,36	32,43	31,80	32,84	32,28	33,62
Jasa Perusahaan	1,16	1,23	1,15	1,16	1,26	1,22	1,22

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	194,24	199,37	199,41	199,46	204,47	211,49	219,49
Jasa Pendidikan	71,13	77,65	79,68	81,43	84,29	89,01	88,64
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	81,65	89,20	90,28	94,16	95,59	100,60	106,02
Jasa lainnya	39,07	40,81	39,13	39,93	40,17	41,48	42,70
Total	2.177,97	2.325,47	2.325,06	2.376,38	2.455,76	2.561,60	2.668,43

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Berdasarkan Tabel 2.70 dan Tabel 2.71, sektor yang secara konsisten memiliki nilai *output* tinggi dalam PDRB yaitu sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; sektor Kontruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan



dan Jaminan Sosial Wajib. Berkembangnya sektor perdagangan secara konsisten merupakan salah satu indikator positif bagi tumbuhnya ekonomi Gorontalo Utara karena peran *privat sector* sebagai penggerak ekonomi telah meningkat.

Secara komposisi, sektor primer seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan kontribusi terbesar dalam nilai PDRB, sekaligus menunjukkan perekonomian lokal Gorontalo Utara masih bergantung pada sektor tersebut meskipun dalam 3 tahun terakhir terus turun yang mencerminkan terjadinya diversifikasi dan modernisasi ekonomi seiring naiknya kontribusi sektor jasa dan perdagangan. Sementara kontribusi sektor lainnya yang non-primer seperti sektor industri belum banyak memberikan dampak yang signifikan seperti terlihat pada Tabel 2.82 di bawah ini.

Tabel 2.82
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,72	51,77	52,17	52,52	52,81	51,93	51,67	51,50
Pertambangan & Penggalian	1,99	1,91	1,87	1,92	1,89	1,88	1,87	2,00
Industri Pengolahan	1,79	1,78	1,82	1,80	1,84	1,87	1,82	1,79
Pengadaan Listrik & Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Konstruksi	10,34	9,81	9,31	9,17	9,20	9,71	9,78	9,84

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	9,04	9,41	9,84	9,69	9,74	10,32	10,75	10,93
Transportasi & Pergudangan	3,67	3,54	3,60	3,53	3,50	3,69	3,80	3,86
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,87	1,90	1,87	1,84	1,84	1,82	1,81	1,77
Informasi & Komunikasi	1,69	1,68	1,65	1,68	1,67	1,62	1,60	1,61
Jasa Keuangan & Asuransi	0,74	0,72	0,70	0,74	0,76	0,75	0,68	0,66
Real Estate	1,58	1,54	1,54	1,52	1,43	1,39	1,28	1,26
Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	7,90	7,35	7,01	6,95	6,69	6,57	6,47	6,36
Jasa Pendidikan	3,10	3,16	3,22	3,29	3,25	3,21	3,21	3,08
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,53	3,52	3,56	3,59	3,66	3,58	3,65	3,72
Jasa lainnya	1,91	1,81	1,75	1,66	1,63	1,56	1,50	1,50
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Di masa mendatang, perekonomian daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus tetap mengedepankan kemajuan sektor kelautan dan pertanian karena sektor ini merupakan soko guru/identitas asli masyarakat Gorontalo Utara yang berada di wilayah pesisir, bersifat *infinite resources*, dengan upaya modernisasi dan peningkatan alat produksi/modal. Selain itu, juga dengan mendorong kemajuan sektor lainnya terutama turunan dari sektor primer seperti sektor jasa dan industri pengolahan, sehingga *level of dependency* kepada sektor primer semakin berkurang. Transformasi dari sektor primer ke sektor lainnya harus bertahap dan *by design*, karena sektor primer sesuai sifatnya bersifat rentan terhadap perubahan alam. Sektor jasa/ekonomi kreatif harus terus didorong dan menyatu dengan identitas asli masyarakat Gorontalo Utara sebagai pengelola agraris/maritim, sehingga diharapkan menjadi *second driver* terhadap sinergitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif identitas lokal dari sektor kelautan/maritim yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Tabel 2.83
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.037,39	2.077,11	2.178,77	2.331,62	2.500,92	2.652,23
2	Konsumsi Lembaga Swasta	53,09	52,91	54,91	59,58	64,83	71,49

No.	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nirlaba						
3	Konsumsi Pemerintah	710,43	675,98	701,20	722,09	745,79	773,58
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.009,77	1.020,39	1.068,68	1.144,03	1.221,81	1.259,92
5	Perubahan Inventori	62,39	49,28	45,89	47,99	50,69	47,74
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-	-
	Total PDRB	3.369,05	3.429,39	3.592,42	3.856,32	4.146,95	4.414,26

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Kinerja perekonomian PDRB juga dilihat dari sisi pengeluaran. PDRB ADHB sisi pengeluaran menunjukkan porsi penyumbangan pengeluaran perekonomian antara tahun 2019-2024. Berdasarkan data pada Tabel 2.73, komponen pengeluaran PDRB ADHB mengalami kenaikan signifikan yang dipengaruhi perubahan harga dan juga perubahan volume. Sektor Konsumsi Rumah Tangga menyumbang lebih dari 50 persen agregat pengeluaran, yang juga berhubungan dengan tingkat inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa, yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang memberikan gambaran investasi, memberikan kontribusi sebesar 29,47 persen kepada perekonomian, yang berhubungan dengan kondisi iklim investasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.84
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.383,24	1.386,92	1.425,05	1.476,26	1.536,57	1.588,89
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	38,22	37,78	38,35	40,15	42,08	45,04
3	Konsumsi Pemerintah	471,55	442,30	445,28	446,71	448,66	452,31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	746,98	744,47	759,71	777,96	804,87	821,63
5	Perubahan Inventori	32,38	25,25	22,88	23,16	23,51	22,63
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-	-
	Total PDRB	2.325,47	2.325,06	2.376,38	2.455,76	2.561,60	2.668,43

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Berbeda halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan tahun 2019, tetapi mengalami perlambatan di tahun 2020 kecuali untuk komponen konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2021 s.d. 2024, seluruh

komponen kembali menunjukkan peningkatan kecuali komponen perubahan inventori yang nilainya tidak dapat melebihi nilai pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 2.75, selama periode tahun 2019 s.d. 2024, produk yang dikonsumsi sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Selain itu, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi diatas 29 persen, meski turun di tahun terakhir pemantauan. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 17 hingga 22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Sedangkan net ekspor tidak menggambarkan.

Tabel 2.85
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	60,46	60,47	60,57	60,65	60,49	60,31	60,08
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,54	1,58	1,54	1,53	1,54	1,56	1,62
3	Konsumsi Pemerintah	21,94	21,09	19,71	19,52	18,72	17,98	17,52
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,08	29,97	29,75	29,75	29,67	29,46	28,54
5	Perubahan Inventori	1,94	1,85	1,44	1,28	1,24	1,22	1,08
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Total PDRB		100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *output* agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan, melainkan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

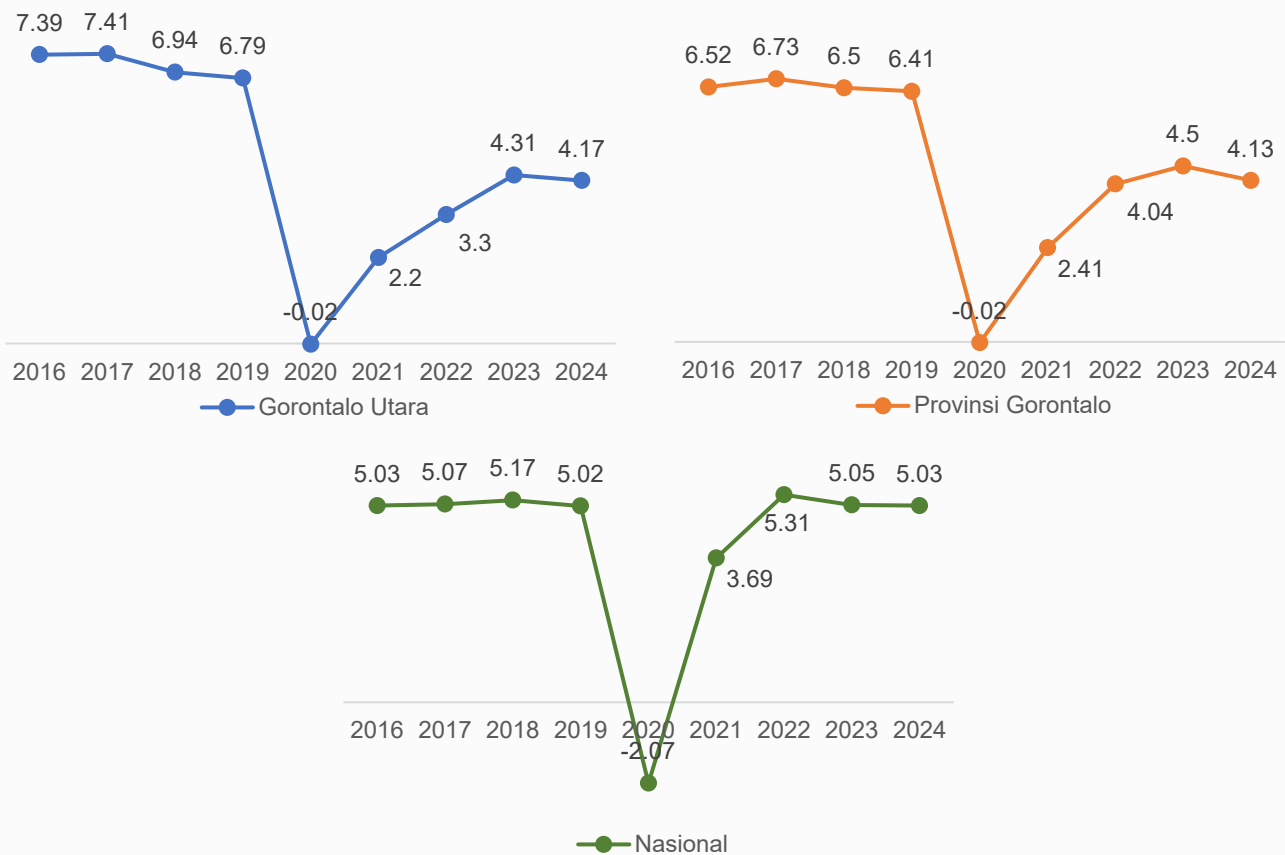
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara selama tujuh tahun terakhir (tahun 2016–2024) fluktuatif. Jika pada tahun 2016 bisa mencapai 7,39 persen, dilanjutkan *slope* yang *downward* hingga pada tahun 2019 menjadi hanya 6,79 persen. Pada tahun 2020, terjadi anomali akibat

pandemi/wabah yang mematahkan seluruh prediksi pertumbuhan ekonomi lokal bahkan global dari yang diperkirakan akan positif, justru mengarah kepada resesi. Tak terkecuali di Gorontalo Utara yang ekonominya mengalami pukulan telak, sehingga mengakibatkan *output* yang dihasilkan oleh masyarakat turun drastis, bahkan pertumbuhannya menyentuh angka negatif meskipun tidak separah angka nasional.

Kontraksi LPE akibat wabah saat itu berusaha dikurangi dengan berbagai kebijakan strategis daerah yang bersifat mengurangi dampak sekaligus mendorong ekonomi untuk *rebound*, seperti mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), stimulus bagi menggeliatnya sektor UMKM, hingga percepatan penyerapan anggaran untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didengungkan pemerintah pusat. Berbagai upaya yang ditempuh tersebut bertujuan untuk memelihara daya beli masyarakat selama pandemi. Tiga tahun terakhir terlihat upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan tren kurva pertumbuhan ekonomi berbentuk “V” (*V-shaped*) yang artinya trajektori akan segera pulih seperti sedia kala seperti sebelum pandemi.

Jika dilihat dari Grafik 2.16, tren pergerakan LPE Gorontalo Utara searah dengan LPE Provinsi Gorontalo selama delapan tahun terakhir. Bahkan di tahun 2020, LPE yang dicapai sama persis di angka -0,02 persen, sekaligus menunjukkan bahwa fundamental dan teknikal ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki kemiripan.

Grafik 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara



dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (Persen)

Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Gorontalo, dan BPS Gorontalo Utara, 2025

2.1.3.1.2 PDRB dan Pengeluaran Per Kapita

Selain LPE, indikator lain yang bisa dianalisis dari output ekonomi tahunan yaitu nilai PDRB perkapita, yang menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk, dimana PDRB perkapita masyarakat tahun 2016-2019 baik berdasarkan harga konstan tahun 2010 maupun harga berlaku menunjukkan tren peningkatan seiring dengan lebih tingginya LPE bila dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut merupakan hasil yang positif karena menunjukkan akselerasi ekonomi masyarakat dan wilayah secara keseluruhan karena proses pembangunan yang bersama-sama dilakukan seluruh komponen daerah telah berjalan baik. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LPE negatif di 2020 mengakibatkan *outlier* pada tren

PDRB perkapita. Dengan besaran LPE yang berada dibawah laju pertumbuhan penduduk, otomatis mengakibatkan kurva PDRB terkoreksi membentuk jurang. Kondisi yang jauh lebih baik tergambar mulai tahun 2021, dimana PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 menunjukkan kenaikan yang signifikan, bahkan berada di atas capaian tahun 2019 meskipun terjadi fluktuasi tingkat harga.

Tabel 2.86
PDRB Per Kapita Gorontalo Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB (miliaran rupiah)	3.079,62	3.369,05	3.429,39	3.592,42	3.856,32	4.146,95	4.414,26
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	2.177,97	2.325,47	2.325,06	2.376,38	2.455,76	2.561,60	2.668,43
3	Jumlah Penduduk	114.036	115.070	124.957	125.816	127.580	130.400	131.991
4	PDRB Perkapita ADHB (ribuan rupiah)	27.005,68	29.278,27	27.444,56	28.552,97	30.226,68	31.801,76	33.443,64
5	PDRB Perkapita ADHK (ribuan rupiah)	19.098,97	20.209,18	18.606,88	18.887,74	19.248,79	19.644,17	20.216,76

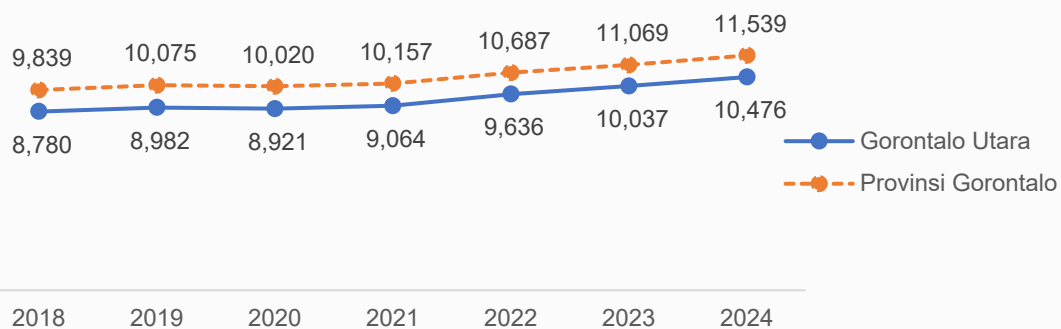
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Terlepas dari keberhasilan secara statistik, pemerintah daerah tidak bisa hanya melihat hasil perhitungan PDRB perkapita untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduknya secara utuh, karena berbagai kelemahan metode ini, seperti ketidakmampuannya dalam menggambarkan pemerataan pendapatan dan pola pengeluaran penduduk yang beragam. Pendapatan perkapita hanya memperlihatkan tingkat pendapatan suatu masyarakat secara rata-rata, yang bisa saja pada kenyataannya ada beberapa orang yang memiliki pendapatan sangat besar dan beberapa lainnya sangat rendah. Selain itu, seringkali kenaikan pendapatan perkapita tidak dibarengi dengan naiknya kualitas hidup masyarakatnya. Kelemahan lainnya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan tumbuhnya balas jasa faktor produksi yang tidak mengenal lokasi. Misalnya tingginya balas jasa kepemilikan hotel dan restoran di Kota Gorontalo belum tentu mengalir ke penduduk Kota Gorontalo. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan indeks gini untuk melihat sejauh mana jurang pendapatan penduduknya.

Selain pendapatan per kapita, digunakan juga indikator pengeluaran rata-rata per kapita yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam

suatu wilayah atau kelompok penduduk untuk konsumsi atau kegiatan ekonomi lainnya. Indikator tersebut ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini digunakan juga sebagai komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Di Gorontalo Utara, secara tren, pencapaian indikator tersebut terus meningkat yang secara umum mencerminkan kesejahteraan/daya beli masyarakat meningkat sebagaimana Grafik 2.17, meskipun sempat mengalami gangguan/*shock* pada tahun 2020 akibat pandemi.

Grafik 2.17
Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025
Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Terlepas dari hal itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Selain faktor ekonomi, faktor-faktor non-ekonomi seperti perbedaan kondisi alam dapat menentukan pola pengeluaran masyarakat. Karena berdasarkan pola masyarakat di seluruh dunia, masyarakat yang tinggal di dataran rendah relatif lebih sejahtera dibanding masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Masyarakat di dataran rendah pada umumnya menghadapi tantangan alam yang lebih “ringan” dibanding masyarakat penghuni dataran tinggi. Di dataran rendah, usaha untuk bercocok tanam/bertani lebih mudah dilakukan, dan energi yang dikeluarkannya pun relatif lebih sedikit, seperti pada usaha perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.

2.1.3.1.3 Analisis Sektor Unggulan Daerah

Selain berguna untuk melakukan analisis pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan kontribusi sektoral, data PDRB juga dapat digunakan untuk melakukan analisis sektor unggulan daerah di Gorontalo Utara. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis seandainya dieksploitasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Identifikasi sektor unggulan merupakan dasar untuk memahami kondisi daerah dengan mengenali potensi, sumber daya, dan keunggulan daerah agar perencanaan pembangunan daerah lebih terarah (efektif dan efisien) dan dapat berjalan dengan baik. Dengan hasil ini, Pemerintah dapat merumuskan strategi peningkatan dan pengembangan potensi unggulan. Potensi-potensi ini berperan sebagai modal dan panduan bagi instansi terkait untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Gorontalo Utara yaitu *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, *shift-share analysis*, dan *Klassen Typology*. Ketiga metode tersebut digunakan untuk mengetahui dengan cepat sektor yang dianggap unggul, berdasarkan hasil perhitungan data-data PDRB di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo.

1. Analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Analisis LQ dan DLQ adalah dua metode yang saling melengkapi, digunakan untuk menganalisis spesialisasi industri atau sektor ekonomi di suatu wilayah. Analisis LQ adalah analisis yang paling sederhana dan merupakan perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar, sementara DLQ merupakan analisis LQ yang mempertimbangkan laju pertumbuhan sektor dari waktu ke waktu. Interpretasi hasil LQ dapat diartikan sebagai berikut:

- $LQ > 1$: mengindikasikan sektor unggulan (peranan sektor lebih besar di Gorontalo Utara daripada di Provinsi Gorontalo).

- $LQ < 1$: mengindikasikan sektor non unggulan (peranan sektor lebih kecil di Gorontalo Utara daripada di Provinsi Gorontalo).

Sedangkan interpretasi DLQ dapat diartikan sebagai berikut:

- $DLQ > 1$: menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (memiliki potensi unggulan di masa depan).
- $DLQ < 1$: mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (tidak memiliki potensi unggulan di masa depan).

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHK Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo 3 tahun terakhir, didapat 5 sektor yang berperan sebagai basis/unggulan, sebagaimana Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87
Analisis LQ Gorontalo Utara

Lapangan Usaha	LQ			Rata-Rata LQ	Interpretasi LQ
	2022	2023	2024		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,37	1,37	1,38	1,37	Basis
Pertambangan & Penggalian	1,64	1,62	1,69	1,65	Basis
Industri Pengolahan	0,41	0,42	0,42	0,42	Non Basis
Pengadaan Listrik & Gas	0,74	0,73	0,73	0,74	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,21	0,21	0,22	0,21	Non Basis
Konstruksi	0,89	0,88	0,87	0,88	Non Basis
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	0,79	0,78	0,77	0,78	Non Basis
Transportasi & Pergudangan	0,70	0,69	0,69	0,69	Non Basis
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,77	0,77	0,75	0,76	Non Basis
Informasi & Komunikasi	0,59	0,59	0,58	0,59	Non Basis
Jasa Keuangan & Asuransi	0,17	0,17	0,17	0,17	Non Basis
Real Estate	0,71	0,72	0,72	0,72	Non Basis
Jasa Perusahaan	0,56	0,57	0,56	0,56	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1,16	1,16	1,17	1,17	Basis
Jasa Pendidikan	0,73	0,75	0,75	0,74	Non Basis
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,00	1,00	1,01	1,00	Basis
Jasa lainnya	1,10	1,08	1,08	1,09	Basis

Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda, 2025

Dari tabel 2.77, didapat informasi bahwa nilai LQ terbesar secara rata-rata pada sektor Pertambangan dan Penggalian kemudian disusul sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, namun sektor pertama tersebut selama 3 tahun pemantauan nilai LQ-nya mengalami fluktuasi, yang

kemungkinan disebabkan laju pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Gorontalo Utara sedang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan sektoral Provinsi Gorontalo. Sedangkan sektor kedua, meskipun secara rata-rata bukan LQ terbesar, namun secara volatilitas paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis. Dengan kontribusi yang cukup tinggi dan juga nilai LQ yang juga cukup tinggi dan stabil menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan basis yang sangat baik untuk terus didorong.

Terlepas dari hasil analisis di atas, teknik LQ belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis karena kelemahannya yang tidak memperhitungkan laju pertumbuhan sektor. Perlu analisis tambahan agar hasil sektor unggulan benar-benar menggambarkan potensi Gorontalo Utara sesungguhnya. Namun sebagai tahap awal, analisis dianggap cukup memberi gambaran terhadap kemampuan Gorontalo Utara dalam sektor yang teridentifikasi.

Analisis LQ yang lebih dinamis untuk mempertimbangkan pergerakan data dari waktu ke waktu dan kelebihanannya dalam memberikan informasi tentang potensi sektor untuk menjadi unggulan di masa depan menggunakan teknik DLQ. Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHK Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo 5 tahun terakhir, ternyata didapat hasil yang menunjukkan bahwa seluruh 17 sektor PDRB prospektif untuk berkembang di masa depan dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memperoleh skor DLQ terbesar, sebagaimana Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88
Analisis DLQ Gorontalo Utara

Lapangan Usaha	LQ Dinamis				Rata-Rata DLQ	Interpretasi DLQ
	2021	2022	2023	2024		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01381	0,98338	0,98120	1,02233	1,000	Prospektif
Pertambangan & Penggalian	0,96231	0,97026	0,92396	1,15254	1,002	Prospektif
Industri Pengolahan	1,00306	0,93092	1,05888	1,01498	1,002	Prospektif
Pengadaan Listrik & Gas	1,10315	1,00318	0,93796	0,96334	1,002	Prospektif
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	1,02355	0,91739	0,97588	1,08871	1,001	Prospektif
Konstruksi	1,03266	1,03410	0,97143	0,96503	1,001	Prospektif
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,03201	0,99281	0,97766	0,99991	1,001	Prospektif
Transportasi & Pergudangan	1,02903	1,01625	0,96973	0,98667	1,000	Prospektif

Lapangan Usaha	LQ Dinamis				Rata- Rata DLQ	Interpretasi DLQ
	2021	2022	2023	2024		
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,03854	1,00785	1,03933	0,91920	1,001	Prospektif
Informasi & Komunikasi	1,08577	0,89848	1,04691	0,97967	1,003	Prospektif
Jasa Keuangan & Asuransi	0,82124	1,18853	1,08585	0,96647	1,016	Prospektif
Real Estate	1,05574	0,95113	0,98422	1,01443	1,001	Prospektif
Jasa Perusahaan	1,00398	0,96963	1,05986	0,97414	1,002	Prospektif
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1,01662	0,94789	1,00520	1,03284	1,001	Prospektif
Jasa Pendidikan	0,97575	0,96656	1,03903	1,02061	1,000	Prospektif
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,97534	1,01625	0,99630	1,01308	1,000	Prospektif
Jasa lainnya	1,01532	1,03746	0,92622	1,02724	1,002	Prospektif

Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappedda, 2025

Dengan menggabungkan hasil (*overlay*) perhitungan LQ dan DLQ, akan didapat hasil analisis komprehensif yang menunjukkan struktur ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan saat ini dan di masa depan. Jika dibuat dalam sebuah kuadran, hasil kombinasi dari kedua teknik tersebut digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.23
Kuadran Analisis LQ DLQ Gorontalo Utara

DLQ>1 (Prospektif)		DLQ<1 (Tidak Prospektif)	
LQ>1 (Basis)	Type I Sektor Basis, Prospektif • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan & Penggalian • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya	Type III Sektor Basis, Tidak Prospektif	
	Type II Sektor Non Basis, Prospektif • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik & Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Jasa Pendidikan • Jasa Perusahaan	Type IV Sektor Non Basis, Tidak Prospektif	

Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappedda, 2025

Lima sektor yang berada pada kuadran I (type I), memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan yang pesat, sedangkan sektor-sektor yang berada pada kuadran II (type II) akan mengalami reposisi dari saat ini yang bukan sektor unggulan, menjadi unggulan di masa depan.

2. Analisis *Shift-share*

Selain menggunakan LQ dan DLQ, untuk menemukenali potensi serta sektor unggulan Gorontalo Utara juga dapat menggunakan *shift-share analysis*. Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian daerah administratif di atasnya. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Dengan analisis ini, dapat memahami bagaimana struktur ekonomi suatu wilayah berubah, bagaimana sektor unggulan bergeser, serta bagaimana kinerja ekonomi wilayah tersebut jika dibandingkan wilayah lainnya.

Analisis *shift share* memiliki tiga komponen yaitu :

1. *National/regional share*, untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional/provinsi terhadap daerah (kabupaten/kota). Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
2. *Proportional shift*, untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.
3. *Differential shift*, untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHK Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo masing-masing pada tahun pantauan 2012 dan 2024 didapat hasil perhitungan sebagaimana Tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89
Analisis Shift-share Gorontalo Utara

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Proporsional (PP, %)	Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW, %)	Pergeseran Bersih (PB, %)	Interpretasi PP	Interpretasi PPW	Interpretasi PB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-9,92	17,78	7,87	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Pertambangan & Penggalian	-33,12	14,38	-18,74	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Industri Pengolahan	4,25	-25,21	-20,96	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Pengadaan Listrik & Gas	48,58	58,24	106,81	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	39,52	-3,96	35,56	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Konstruksi	-10,65	2,82	-7,83	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	62,46	-19,46	43,00	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Transportasi & Pergudangan	1,36	-2,34	-0,98	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	28,20	-20,90	7,30	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Informasi & Komunikasi	57,70	-15,53	42,17	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Jasa Keuangan & Asuransi	-3,23	16,33	13,09	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Real Estate	-32,95	16,53	-16,42	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Jasa Perusahaan	-32,03	11,51	-20,52	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	-45,56	3,48	-42,08	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Jasa Pendidikan	26,96	-4,24	22,72	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	29,95	6,46	36,41	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Jasa lainnya	-36,91	-1,82	-38,73	Tidak Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban

Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda, 2025

Interpretasi pertumbuhan proporsional “Bertumbuh Cepat”/positif mengandung makna pertumbuhan sektoral Provinsi Gorontalo lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total Provinsi Gorontalo, yang menyebabkan pertumbuhan sektoral di Gorontalo Utara bertumbuh cepat, karena mendapatkan efek pertumbuhan yang juga cepat dari pertumbuhan Provinsi Gorontalo. Sebaliknya, jika pertumbuhan proporsional “Tidak Bertumbuh Cepat”/negatif mengandung makna pertumbuhan sektoral Provinsi Gorontalo lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total Provinsi Gorontalo, yang menyebabkan pertumbuhan sektoral di Gorontalo Utara tidak tumbuh cepat/tergolong lamban, karena mendapatkan efek pertumbuhan yang juga tidak cepat dari pertumbuhan Provinsi Gorontalo.

Pertumbuhan pangsa wilayah yang “Berdaya Saing”/positif mengandung makna daya saing sektoral di Gorontalo Utara lebih tinggi dibanding Provinsi Gorontalo. Sebaliknya “Tidak Berdaya Saing”/negatif mengandung makna

daya saing sektoral di Gorontalo Utara lebih rendah/tidak punya daya saing dibandingkan Provinsi Gorontalo. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi serta Real Estate Gorontalo Utara adalah dua sektor yang paling memiliki daya saing relatif dibandingkan sektoral Provinsi Gorontalo.

Sedangkan jika pergeseran bersih berkriteria “Progresif”/positif artinya pertumbuhan sektoral di Gorontalo Utara tersebut maju/progresif, dan jika negatif/”Tumbuh Lamban” diartikan sebaliknya. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki pergeseran bersih terbesar sehingga diartikan bahwa sektor tersebut paling progresif dari seluruh sektor yang ada.

Dari hasil analisis, secara umum ada beberapa sektor yang memenuhi ketiga kategori bertumbuh cepat, berdaya saing, dan progresif, yakni sektor Pengadaan Listrik dan Gas; serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

3. Analisis *Klassen Typology*

Analisis tipologi *Klassen* digunakan untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan membagi sektor-sektor ekonomi dalam empat kuadran berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB: sektoral maju dan cepat tumbuh, sektoral maju tapi tertekan, sektoral potensial berkembang cepat, dan sektoral relatif tertinggal. Elaborasi dari 4 kuadran tersebut yaitu:

- **Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (kuadran I):**
Laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral PDRB Gorontalo Utara lebih tinggi dari rata-rata sektoral Provinsi Gorontalo. Ini menunjukkan bahwa sektoral tersebut memiliki potensi ekonomi yang kuat dan pertumbuhan pesat.
- **Potensial Berkembang (kuadran II):**
Laju pertumbuhan sektoral Gorontalo Utara lebih tinggi, tetapi kontribusi sektoral PDRBnya masih di bawah Provinsi Gorontalo. Ini bisa menunjukkan bahwa sektoral tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang besar, tetapi perlu meningkatkan produktivitas/output sektornya.
- **Maju Tapi Tertekan (kuadran III):**

Kontribusi sektoral PDRB Gorontalo Utara lebih tinggi, tetapi laju pertumbuhan sektoralnya lebih rendah dibandingkan Provinsi Gorontalo. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stagnasi sektor ekonomi atau adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja.

▪ Relatif Tertinggal (kuadran IV):

Sektor ini memiliki laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi sektoral yang lebih rendah dibanding Provinsi Gorontalo. Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitasnya.

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHB Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo selama lima tahun terakhir didapat hasil perhitungan *Klassen Typology* sebagaimana Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90
Analisis *Klassen Typology* Gorontalo Utara

Lapangan Usaha	Provinsi Gorontalo		Gorontalo Utara		Keterangan	Kuadran
	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Komposisi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Komposisi (%)		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,88	38,15	6,00	52,08	Sektor pertumbuhan cepat	1
Pertambangan & Penggalian	6,80	1,10	7,65	1,91	Sektor pertumbuhan cepat	1
Industri Pengolahan	7,46	4,42	6,48	1,82	Sektor relatif tertinggal	4
Pengadaan Listrik & Gas	5,05	0,05	5,36	0,04	Sektor potensial berkembang	2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	4,32	0,06	4,47	0,01	Sektor potensial berkembang	2
Konstruksi	8,94	10,88	8,47	9,54	Sektor relatif tertinggal	4
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	11,12	13,11	9,82	10,29	Sektor relatif tertinggal	4
Transportasi & Pergudangan	10,16	5,65	8,97	3,68	Sektor relatif tertinggal	4
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,71	2,28	5,55	1,82	Sektor relatif tertinggal	4
Informasi & Komunikasi	6,34	2,70	5,44	1,64	Sektor relatif tertinggal	4
Jasa Keuangan & Asuransi	3,47	4,38	3,40	0,72	Sektor relatif tertinggal	4
Real Estate	2,68	1,70	1,76	1,38	Sektor relatif tertinggal	4
Jasa Perusahaan	4,33	0,08	3,95	0,05	Sektor relatif tertinggal	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	4,57	5,96	4,21	6,61	Sektor maju tapi tertekan	3
Jasa Pendidikan	4,00	4,46	4,82	3,21	Sektor potensial berkembang	2
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	7,63	3,69	7,46	3,64	Sektor relatif tertinggal	4
Jasa lainnya	4,75	1,33	3,97	1,57	Sektor maju tapi tertekan	3

Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappedda, 2025

Gambar 2.24
Kuadran Analisis *Klassen Typology* Gorontalo Utara

PERTUMBUHAN SEKTORAL	
$gi >= g$	$gi < g$
Kuadran I Sektor Pertumbuhan Cepat - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pertambangan & Penggalian	Kuadran III Sektor Maju Tapi Tertekan - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib - Jasa Lainnya
Kuadran II Sektor Potensial Berkembang - Pengadaan Listrik & Gas - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - Jasa Pendidikan	Kuadran IV Sektor Relatif Tertinggal - Industri Pengolahan - Konstruksi - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Transportasi dan Pergudangan - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Informasi dan Komunikasi - Jasa Keuangan dan Asuransi - Real Estate - Jasa Perusahaan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappedda, 2025

gi : Pertumbuhan sektoral PDRB Gorontalo Utara

g : Pertumbuhan sektoral PDRB Provinsi Gorontalo

si : Kontribusi sektoral PDRB Gorontalo Utara

s : Kontribusi sektoral PDRB Provinsi Gorontalo

Jika dilakukan *overlay* terhadap 17 sektoral PDRB dengan menggunakan seluruh metode yang digunakan di atas, tidak ada satu sektor pun yang memenuhi keenam kriteria hijau, namun ada tiga sektor yang meraih lima kriteria hijau (sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta sektor Pengadaan Listrik dan Gas) yang sekaligus dapat dianggap sebagai sektor unggulan berdasarkan metode yang digunakan di atas. Lebih detail penggolongan sektoral berdasarkan 6 kriteria tersebut ditampilkan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Overlay Analisis Sektor Unggulan di Gorontalo Utara

Lapangan Usaha	Analisis LQ	Analisis DLQ	Analisis <i>Shift-share</i>			Analisis <i>Klassen</i>
			Pertumbuhan Proporsional	Pertumbuhan Pangsa Wilayah	Pergeseran Bersih	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor pertumbuhan cepat
Pertambangan & Penggalian	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor pertumbuhan cepat
Industri Pengolahan	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor relatif tertinggal
Pengadaan Listrik & Gas	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor potensial berkembang
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor potensial berkembang

Lapangan Usaha	Analisis LQ	Analisis DLQ	Analisis Shift-share			Analisis Klassen	
			Pertumbuhan Proporsional	Pertumbuhan Pangsa Wilayah	Pergeseran Bersih		
Konstruksi	Non Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor tertinggal	relatif
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor tertinggal	relatif
Transportasi & Pergudangan	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor tertinggal	relatif
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor tertinggal	relatif
Informasi & Komunikasi	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor tertinggal	relatif
Jasa Keuangan & Asuransi	Non Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor tertinggal	relatif
Real Estate	Non Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor tertinggal	relatif
Jasa Perusahaan	Non Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor tertinggal	relatif
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor maju tapi tertekan	
Jasa Pendidikan	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor berkembang	potensial
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor tertinggal	relatif
Jasa lainnya	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor maju tapi tertekan	

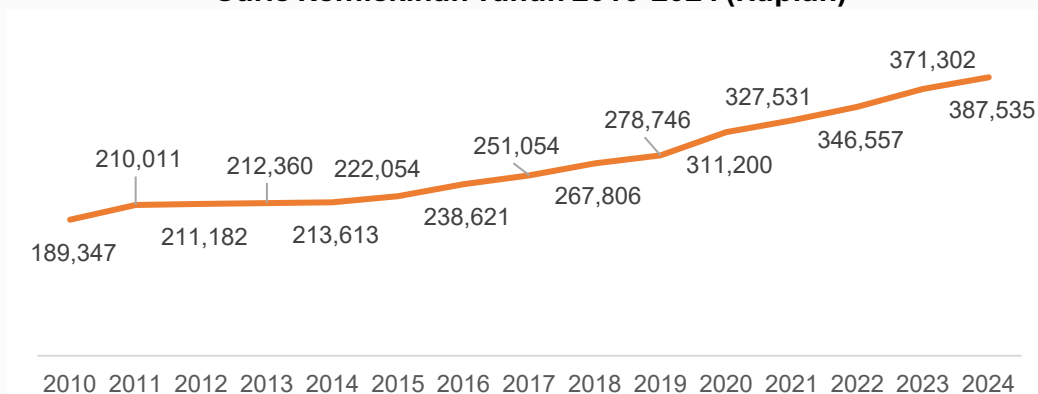
Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappedda, 2025

2.1.3.1.4 Kemiskinan Daerah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan meningkatkan pendapatan secara agregat. Terdapat dua strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin/rentan melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta melakukan pelatihan kepada kelompok masyarakat miskin supaya memiliki kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat karena masih ada sebagian yang masih belum dapat mengakses faktor produksi, sumberdaya, atau hasil pembangunan tersebut.

Menurut BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* dari *The World Bank*. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang tidak hanya dihitung dari sisi makanan (GKM) melainkan juga non makanan (GKNM) untuk menghindari kondisi kemiskinan ekstrem.

Grafik 2.18
Garis Kemiskinan Tahun 2010-2024 (Rupiah)

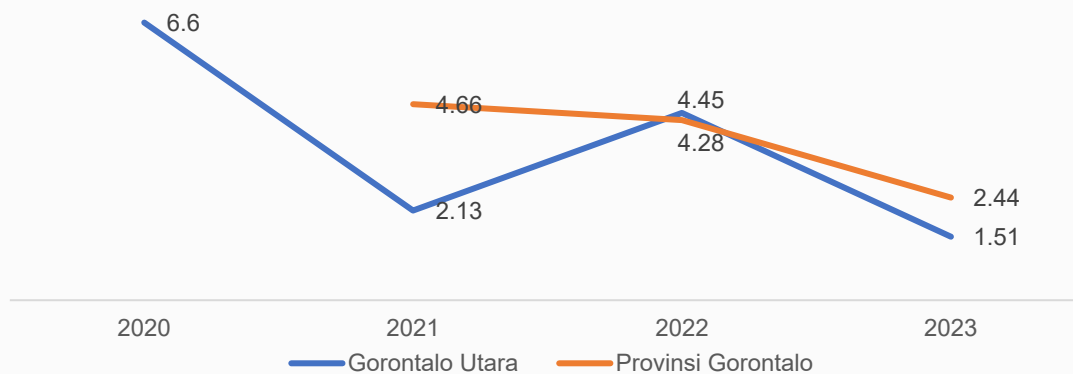


Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2025

Berdasarkan Grafik 2.18, rata-rata laju kenaikan garis kemiskinan saat pandemi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 mencapai 7,57 persen, jauh lebih terjal dibandingkan rata-rata laju kenaikan 5 tahun pre pandemi yang hanya mencapai 5,8 persen. Padahal efek pandemi menimbulkan penduduk dalam kategori rentan miskin masuk dalam kategori miskin karena berkurang atau hilangnya pendapatan. Peningkatan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa biaya hidup semakin meningkat. Meskipun garis kemiskinan meningkat, ini juga bisa menunjukkan adanya inflasi dan perubahan dalam harga barang dan jasa dasar, yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan ini juga dapat mencerminkan peningkatan dalam taraf hidup dan perekonomian yang lebih baik, namun juga menimbulkan tantangan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seiring dengan kenaikan biaya hidup.

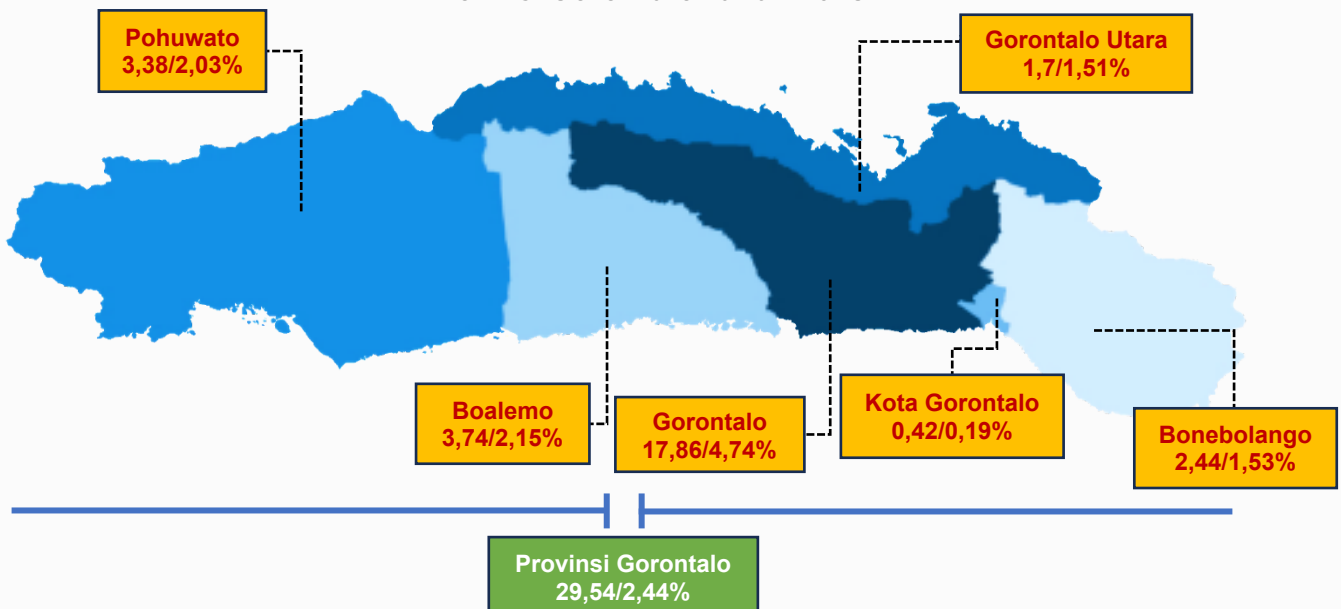
Berbeda dengan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia adalah kondisi dimana pengeluaran penduduk per hari di bawah US\$1,90 yang dilihat dari *purchasing power parity*-nya. Laporan *Poverty and Equity Brief East Asia and Pacific* (2019) pada tahun 2023 (asumsi USD pada APBN 2023) nilai US\$1,90 setara dengan Rp28.120,00/kapita/hari. Kondisi tersebut di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.19 berikut.

Grafik 2.19
Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Susenas BPS, 2024

Gambar 2.25
Angka Absolut (Dalam Ribuan) dan Persentase Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo Tahun 2023

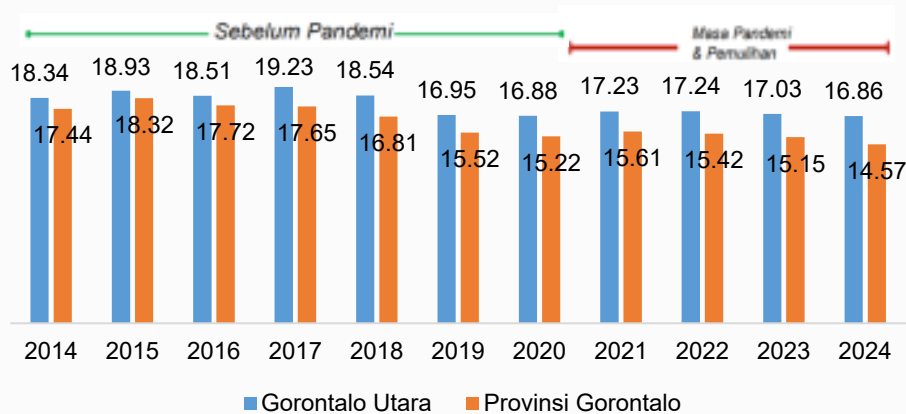


Sumber: Susenas BPS, 2024

Walaupun tren pendapatan perkapita, sebagaimana pembahasan sebelumnya terus meningkat, angka kemiskinan cenderung stagnan. Pemerintah Kabupaten

Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang sangat besar dalam usaha pengentasan kemiskinan melalui kebijakan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Deviasi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo selama periode 2014-2024 cenderung masih berada di sekitar angka 1-2 persen.

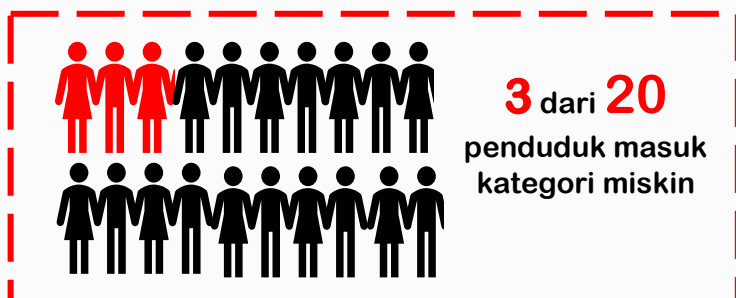
Grafik 2.20
Angka Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Angka kemiskinan tahun 2021 meningkat, saat Indonesia dan Gorontalo Utara sedang giat-giatnya melawan penyebaran dan efek destruktif wabah terhadap ekonomi, sehingga angka kemiskinan tersebut kembali melejit disebabkan secara umum masyarakat tertekan pendapatannya dan laju kenaikan drastis Garis Kemiskinan. Perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk terganggu/shock, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Walaupun demikian, angka kemiskinan (*poverty rate*) bukanlah indikator yang menunjukkan persentase nilai absolut dari penduduk miskin. Indikator tersebut lebih cenderung menggambarkan pergerakan/volatilitas sejauh mana



efektivitas berbagai kebijakan yang diambil dapat mengurangi penduduk miskin, dan fundamental ekonomi yang sedang

berkembang. Untuk pendekatan intervensi dan rujukan program bantuan sosial, pemberdayaan, serta mengetahui jumlah penduduk miskin, lebih tepat jika menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (d.h. Basis Data Terpadu) atau data yang bersumber dari Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang secara gradual dilakukan pembaruan yang menggambarkan kondisi sebenarnya individu yang berada di bawah jaring kemiskinan. Namun, P3KE memiliki tujuan lebih spesifik dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Keduanya mengelompokkan keluarga atau rumah tangga dalam urutan desil. Desil 1 menunjukkan kondisi kelompok kesejahteraan terendah. Karena pendekatannya individu, pemerintah dapat fokus pada kondisi masyarakat berdasarkan kelompok desilnya. Karena anggaran yang terbatas, tidak seluruh desil dapat fokus diintervensi oleh anggaran daerah.

Sejak tahun 2022, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan upaya membangun data kependudukan tunggal (Satu Data) melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Pendataan tersebut bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan, termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang termasuk data penduduk miskin di dalamnya, sehingga hal ini diharapkan menjadi *next upgrade* dari DTKS yang sebelumnya sudah digunakan.

Peran tenaga pendamping bagi masyarakat Gorontalo Utara sangat krusial dalam penanganan kemiskinan, karena berangkat dari *spirit* bagaimana agar secara simultan keluarga dapat memajukan desa dan sekaligus desa dapat mensejahterakan keluarga, serta sebagai *policy and strategic bridging* dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Selain itu, dalam jangka panjang perlu dipahami dan diarahkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat seharusnya tidak sekedar “memberi bantuan”, namun juga melalui

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat hingga masyarakat tersebut graduasi dari bawah garis kemiskinan. Dengan peran pendampingan tersebut, dapat menjawab berbagai tantangan yang selama ini dirasakan pemerintah, seperti ketiadaan pendampingan lanjutan (*program sustainability*) bagi masyarakat pasca program, intervensi pemerintah terkadang tidak *well-planned*, atau masyarakat penerima manfaat bantuan cenderung konsumtif alih-alih dipergunakan pada sektor produktif atau modal usaha.

Gorontalo Utara bersama kabupaten lainnya masih menjadi beban bagi angka kemiskinan Provinsi Gorontalo karena secara umum disinyalir masih terlalu menggantungkan pada sektor primer (non jasa), hanya Kota Gorontalo yang berhasil menekan angkanya di *single digit* berdasarkan Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota Indikator	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bonebolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	31,53	61,91	28,93	23,67	18,99	12,97	177,99
2	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	551.189	605.743	391.236	531.286	387.535	723.861	473.006
3	% penduduk miskin	17,83	16,43	17,11	14,80	16,86	5,74	14,57
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,75	3,41	2,89	2,86	3,41	0,67	2,30
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,12	0,89	0,70	0,72	1,02	0,12	0,58

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya mengenai berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index - P2*). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Nilai P1 pada tahun terakhir statistik berada di atas nilai provinsi, artinya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan yang ada di Gorontalo Utara lebih buruk dibandingkan pencapaian provinsi sehingga relatif akan lebih lemah resiliensinya terhadap guncangan yang mengganggu pendapatannya (*economic shock*), mengindikasikan bahwa mereka yang berada dalam kategori miskin di Kabupaten Gorontalo Utara hidup dalam kondisi yang lebih parah secara ekonomi dibandingkan dengan daerah lain di provinsi tersebut. Sedangkan pencapaian P2 Gorontalo Utara menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara lebih tinggi ketimpangan pengeluarannya dibandingkan rata-rata provinsi, menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih besar dalam kondisi kemiskinan, di mana sebagian besar penduduk miskin mengalami kesulitan yang lebih berat.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang. Secara umum, semakin tinggi pendidikan, semakin baik kondisi ekonominya. Berdasarkan Susenas 2024, terlihat jelas bahwa secara relatif kepala rumah tangga miskin memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih rendah dibandingkan yang tidak miskin. Begitu pula rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin jauh lebih rendah dibandingkan tidak miskin: 5,04 berbanding 7,97 tahun.

Tabel 2.93
Persentase Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin-Tidak Miskin

No.	Tingkat Pendidikan	RT Miskin (%)	RT Tidak Miskin (%)
1	Tidak tamat SD	47,54	27,55
2	SD	32,36	26,73
3	SMP	11	14,46
4	SMA	8,46	20,11
5	Perguruan Tinggi	0,63	11,14

Sumber: Susenas 2024 (BPS), 2025

Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan. Berdasarkan Susenas 2024, persentase kepala rumah tangga wanita pada rumah tangga miskin mencapai 6,46 persen, dan pada rumah tangga tidak miskin mencapai 10,43 persen. Rata-rata usia kepala rumah tangga mencapai 47,78 tahun pada RT miskin, berbanding 49,03 tahun pada RT tidak miskin yang menunjukkan semakin tinggi taraf ekonomi

semakin tinggi usia harapan hidup. Beban pengeluaran pada keluarga miskin juga relatif lebih tinggi, dimana jumlah rata-rata anggota keluarga mencapai sekitar 5 orang per keluarga, lebih banyak 1 orang dibandingkan jumlah anggota keluarga tidak miskin. Sedangkan sebaran penduduk miskin paling banyak bekerja di sektor pertanian sebagaimana Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Persentase Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga

No.	Sumber Penghasilan	RT Miskin (%)	RT Tidak Miskin (%)
1	Tidak Bekerja	7,06	7,33
2	Pertanian	65,67	37,17
3	Industri	3,39	5,59
4	Lainnya	23,88	49,91

Sumber: Susenas 2024 (BPS), 2025

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, sektor pertanian mendominasi sebaran penduduk yang bekerja sebesar 43,44 persen. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, jika dilihat menurut sektor bekerja, penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tercatat sebesar 39,14 persen sedangkan penduduk miskin yang bekerja di sektor non pertanian tercatat sebesar 12,90 persen. Pada hasil Susenas tahun 2023, dari keseluruhan penduduk miskin yang bekerja, sekitar 69,86 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya di sektor lainnya seperti manufaktur dan jasa-jasa.

Selain itu, data sosial juga menunjukkan bahwa sekitar 15,24 persen penduduk miskin tahun 2023 adalah penyandang disabilitas yang menunjukkan pentingnya kebijakan afirmatif terhadap PMKS. Kecenderungan sebagai perokok pada penduduk miskin juga cukup tinggi dengan angka mencapai 20,74 persen. Usia kawin pertama penduduk miskin pada usia 21 tahun, dan empat dari 10 penduduk miskin berstatus cerai, baik cerai hidup maupun mati.

Selain dilihat dari dua indeks di atas, indikator kemiskinan lainnya dapat dilihat dari persentase keluarga pra sejahtera yang ada di suatu wilayah. Secara jumlah absolut, jumlah keluarga pra sejahtera Gorontalo Utara paling sedikit dibanding kabupaten/kota lainnya, namun perlu dipahami bahwa mungkin saja karena dipengaruhi jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding lainnya.

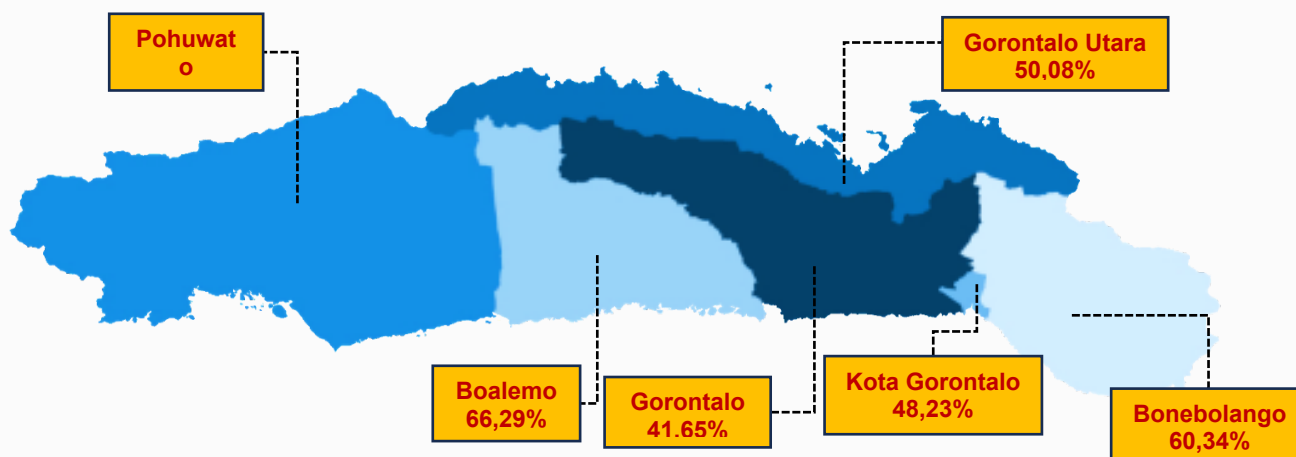
Namun secara persentase, sepanjang tahun 2022, persentase keluarga pra sejahtera di Gorontalo Utara lebih baik dari Provinsi dan mayoritas kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.95
Jumlah dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Keluarga											
	Pra Sejahtera				Keluarga Sejahtera				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Boalemo	17.652	4.443	17.710	17.710	26.379	35.193	24.537	9.004	44.031	39.636	42.247	26.714
Gorontalo	30.769	9.857	22.882	22.882	70.279	86.582	94.857	32.060	101.048	96.439	117.739	54.942
Pohuwato	17.330	6.637	17.724	17.724	28.086	22.962	22.839	8.682	45.416	29.599	40.563	26.406
Bonebolango	16.531	4.039	16.230	16.230	27.504	37.848	30.149	10.667	44.035	41.887	46.379	26.897
Gorontalo Utara	9.973	2.972	9.958	9.958	19.345	26.962	21.826	9.927	29.318	29.934	31.784	19.885
Kota Gorontalo	16.299	2.213	13.009	13.009	28.974	46.573	37.818	13.963	45.273	48.786	50.827	26.972
Provinsi Gorontalo	108.554	30.161	97.513	97.513	200.567	256.120	232.026	84.303	309.121	286.281	329.539	181.816

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah

Gambar 2.26
Persentase Klasifikasi Keluarga Pra Sejahtera
Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, 2023

Dari berbagai indikator di atas, bisa dipetik bahwa kemiskinan erat kaitannya salah satu yang utama dengan tingkat pendidikan. Pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Dari program-program yang pernah dilaksanakan di daerah baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya melalui pendidikan, juga dilakukan melalui pemenuhan bahan pangan dan kesehatan. Upaya penyaluran bantuan dari program-program tersebut diharapkan tepat sasaran kepada penduduk

miskin sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara.

2.1.3.1.5 Rasio Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Indeks Gini/*Gini Ratio* adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (*income disparity*) secara menyeluruh di suatu daerah. Karena menurut metode ini, kita dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*). Indeks ini didasarkan pada Kurva Lorentz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam/*uniform* yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan dalam Indeks Gini berada pada kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai nol menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin mendekati satu, semakin besar ketimpangan pengeluaran antar kelompok yang terjadi pada penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Semakin besar atau melebarnya indeks tersebut, maka kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya dan kelompok kaya semakin cepat untuk bertambah kaya. Nilai rasio gini yang dianggap tinggi jika berkisar pada angka 0,50 sampai 0,70, sedangkan nilai 0,20 sampai 0,35 tergolong yang distribusi pendapatannya relatif merata.

Ketimpangan pendapatan dalam Indeks Gini dapat ditentukan oleh adanya perbedaan tingkat pembangunan di masyarakat, heterogenitas etnis, adanya kediktatoran dan kegagalan pemerintah dalam menghargai *property rights*. Ketimpangan pendapatan ini akan menghambat pertumbuhan, yang implikasi negatifnya adalah terjadinya inefisiensi ekonomi, lemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketidakadilan. Faktor penyebabnya bisa dikarenakan

kondisi demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial, dan letak geografis.

Perbandingan tingkat ketimpangan masyarakat antar golongan pendapatan antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dan nasional dapat dilihat di Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96
Indeks Gini Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Boalemo	0,383	0,379	0,369	0,405	0,391	0,394	
2	Kabupaten Gorontalo	0,412	0,381	0,416	0,389	0,413	0,418	
3	Kabupaten Pohuwato	0,358	0,406	0,385	0,413	0,390	0,400	0,410
4	Kabupaten Bonebolango	0,348	0,382	0,362	0,364	0,400	0,409	0,413
5	Kabupaten Gorontalo Utara	0,411	0,390	0,409	0,404	0,434	0,424	0,435
6	Kota Gorontalo	0,380	0,377	0,373	0,406	0,396	0,391	
Provinsi Gorontalo		0,403	0,407	0,408	0,408	0,418	0,417	0,431
Nasional		0,389	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388	0,381

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

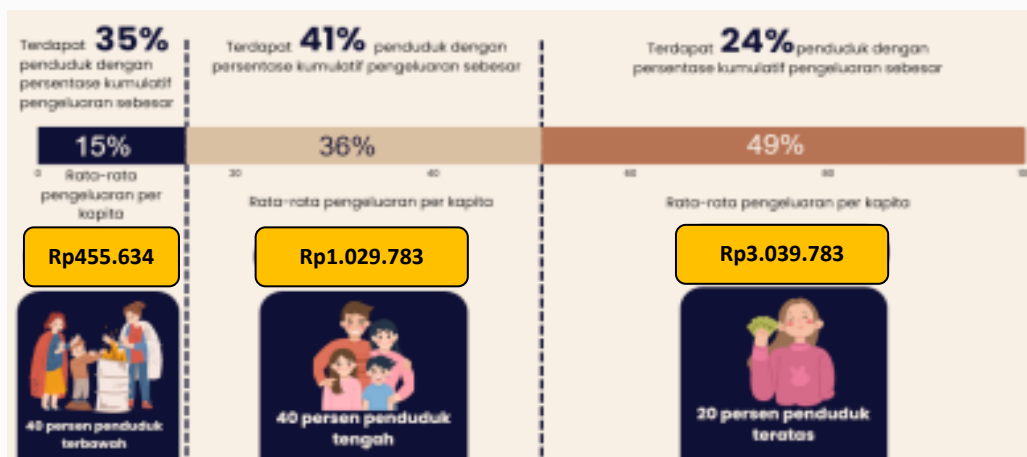


Melihat Tabel 2.86, perubahan nilai Indeks Gini pada tiga tahun terakhir yang masih stagnan cenderung naik, meskipun selisih dengan Provinsi Gorontalo merapat dan melebar dengan Nasional, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi relatif kurang baik, meskipun tidak terlalu tajam, yang mencerminkan adanya

ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, meski di sisi lain PDRB lokal dan regional terus naik, yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Diantaranya perlu dilakukan perluasan akses Perbankan terhadap *unbanked people* agar masyarakat dapat meningkatkan peluang terhadap ketersediaan sumberdaya dan faktor produksi. Bagaimana caranya agar masyarakat di Gorontalo Utara menjadi *bank-minded*, paham terhadap produk-produk dan jasa perbankan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai

nasabah, serta sadar perlunya aspek kehati-hatian (*prudentality*) dalam melakukan berbagai transaksi keuangan (*risk awareness*) serta mengenali ketersediaan sarana pengaduan perbankan dan penyelesaian sengketa dengan bank. Akses perbankan melalui teknologi digital juga bisa ditingkatkan sehingga literasi dan pemahaman masyarakat akan meningkat dengan biaya yang murah dan efisien.

Gambar 2.27
Ketimpangan Pengeluaran Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Upaya menekan Indeks Gini dapat diwujudkan dengan beberapa cara, diantaranya: Pertama, menekan jumlah penduduk yang masih berada di bawah jaring kemiskinan (bukan angka kemiskinan), adanya redistribusi kepemilikan aset melalui *land reform*, misal melalui pembagian tanah pemerintah yang tidak digunakan kepada warga agar dapat dikelola. Kedua, pajak kekayaan atau pendapatan yang progresif dengan harapan adanya transfer pendapatan dari golongan kaya ke miskin. Ketiga, keringanan atau pembebasan pajak bagi golongan masyarakat prasejahtera. Dan terakhir, optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Kebijakan program-program bantuan serta pengendalian inflasi yang dilaksanakan juga dapat turut memberikan sumbangsih bagi bergerakaknya indeks tersebut ke arah 0 (nol) dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan tetap berusaha memastikan penerima program tersebut benar-benar merupakan target prioritas untuk mendapatkan intervensi sosial

sehingga dampak dari setiap rupiah APBD yang dibelanjakan dapat mengerek indeks dan ekonomi wilayah ke arah yang lebih baik.

Namun demikian, penggunaan indikator ketimpangan melalui Indeks Gini, bukanlah suatu hal yang sempurna. Tidak diperhitungkannya golongan berpendapatan menengah menjadi keterbatasan terbesarnya. Pembagian kelompok/golongan pendapatan dengan kategori yang berbeda yang lebih dari 3 ($N > 3$), akan memungkinkan hasil perhitungan yang diperoleh menjadi lebih besar dari satu ($G > 1$) atau dengan kriteria tidak terdefinisikan. Keterbatasan ini akan menyebabkan metode perhitungan Gini Ratio akan menghasilkan ukuran yang kurang akurat. Metode perhitungan Koefisien Gini dengan $N=3$ tidak memperhitungkan peran golongan menengah (X_2) akan berimbas pada solusi kebijakan yang bias dan tidak tepat sasaran karena ketika kebijakan pemerintah tidak memperhitungkan peran golongan menengah, akan berpotensi untuk menggeser sebagian golongan menengah menjadi golongan miskin baru.

2.1.3.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non-fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kualitas hidup yang layak (*decent standart of living*).

Dengan pengukuran IPM setidaknya ada tiga manfaat yang diperoleh: Pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; Kedua, IPM dapat menentukan peringkat/level pembangunan setiap daerah; Ketiga, IPM dapat digunakan sebagai salah satu faktor penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2010, BPS telah menyesuaikan metode perhitungan IPM dengan indikator yang lebih mencerminkan data yang lebih valid di lapangan. Indikator angka melek huruf diganti oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Sementara itu dari sisi pendapatan, PNB perkapita menggantikan PDB perkapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat di wilayah

tertentu. Selain itu, dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lainnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk membangun manusia seutuhnya, keseluruhan dimensi tersebut harus diperhatikan dan memiliki prioritas yang seimbang.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Umur Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan menggunakan gabungan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Indeks Ekonomi yang dihitung berdasarkan kemampuan/paritas daya beli. Klasifikasi IPM berdasarkan nilainya yaitu: Sangat Tinggi (≥ 80); Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$); Rendah (< 60).

IPM semakin meningkat tahun demi tahun seperti yang terlihat pada Tabel 2.97 dan Tabel 2.88, hal ini tidak lepas dari peran unsur pemerintah, swasta, akademisi, termasuk masyarakat. Pun jika dilihat dari akselerasi kenaikan di 2021 dan 2022, meskipun di saat yang bersamaan terjadi badai pandemi, Kabupaten Gorontalo Utara “sukses” tumbuh masing-masing sebesar 2,74 dan 1,16 persen, berada di atas beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, bahkan di atas pencapaian Provinsi Gorontalo sendiri.

Jika diamati lebih dekat dari tiga komponen pembentuk IPM, kenaikan angka IPM Gorontalo Utara disokong oleh positifnya seluruh komponen dimensi. Pada komponen dimensi hidup layak yang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 diakibatkan terpaan badai pandemi, di empat tahun

kemudian berturut-turut terlihat kembali meningkat seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang masih lebih rendah dibanding 2019, selain itu relatif rendahnya uang beredar (yang bukan diakibatkan oleh faktor *saving* dan *investment*) di masyarakat (tergambar

pada angka pengeluaran per kapita masyarakat Gorontalo Utara terendah



nomor 2 di Provinsi Gorontalo) menggambarkan daya beli masyarakat yang rendah yang sebagian diakibatkan oleh pandemi.

Tabel 2.97
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	IPM Tahun					Akselerasi Perubahan (%)			
		2020	*2021	*2022	*2023	*2024	2021	2022	2023	2024
1	Boalemo	65,91	67,02	67,86	68,78	69,34	1,68	1,25	1,36	0,81
2	Gorontalo	66,92	68,53	69,51	70,37	70,96	2,41	1,43	1,24	0,84
3	Pohuwato	65,37	67,93	68,67	69,30	70,19	3,92	1,09	0,92	1,28
4	Bone Bolango	69,98	70,76	71,39	71,97	72,82	1,11	0,89	0,81	1,18
5	Gorontalo Utara	64,86	66,64	67,41	68,00	68,83	2,74	1,16	0,88	1,22
6	Kota Gorontalo	77,13	77,41	78,22	78,64	79,18	0,36	1,05	0,54	0,69
	Provinsi	68,68	69,82	70,62	71,25	72,01	1,66	1,15	0,89	1,07

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

*IPM menggunakan UHH hasil LF SP2020

Tabel 2.98
Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/ Kota	Komponen											
		*UHH			HLS			RLS			Pengeluaran (Ribu Rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Boalemo	70,94	71,24	71,43	12,46	12,48	12,49	7,03	7,30	7,31	9.543	9.941	10.401
2	Gorontalo	70,54	70,81	70,99	13,19	13,21	13,22	7,61	7,79	7,95	9.850	10.336	10.645
3	Pohuwato	69,07	69,40	69,63	12,39	12,46	12,48	7,35	7,59	7,78	10.913	11.018	11.618
4	Bonebolango	69,90	70,19	70,40	13,66	13,67	13,69	8,33	8,35	8,52	10.676	11.114	11.717
5	Gorontalo Utara	69,33	69,65	69,88	12,47	12,49	12,50	7,16	7,17	7,40	9.636	10.037	10.476
6	Kota Gorontalo	72,88	73,25	73,55	14,57	14,58	14,59	10,39	10,40	10,41	13.077	13.351	13.860
	Provinsi	70,22	70,50	70,73	13,12	13,16	13,17	8,02	8,10	8,29	10.687	11.069	11.539

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Umur Harapan Hidup (UHH): Hasil LF SP2020

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Semakin meningkatnya indeks dimensi pendidikan, yang diterjemahkan oleh rata-rata dari capaian angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, salah satu penyebabnya karena semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah dan pusat, salah satunya program unggulan sekolah gratis, dengan disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah selama 12,50 tahun, sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,40 tahun. Pencapaian ini sudah positif karena meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya, namun jika melihat angka statistik yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan skor dimensi pendidikan tersebut.

Peningkatan serupa juga terjadi di indeks dimensi kesehatan yang diterjemahkan oleh angka harapan hidup. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara secara umum terus terjadi perbaikan, bahkan stabil meningkat di satu dekade terakhir, yang disebabkan makin baiknya kualitas layanan kesehatan.

Meskipun terlihat positif, jika dilihat dari angka mutlak, sebenarnya capaian IPM Gorontalo masih tertinggal sangat jauh dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, masuk pada kategori “Sedang” bersama Kabupaten Boalemo. Perlu penguatan dan fokus untuk akselerasi peningkatan capaian IPM melalui kebijakan jangka panjang dan menengah, fokus pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, menciptakan investasi, pembangunan pariwisata, peningkatan nilai tambah dengan modernisasi sektor primer dan pelengkapan fasilitas infrastruktur bagi industri. Dari sisi mikro berupa peningkatan kinerja sektor UMKM, mendorong pelaksanaan kegiatan padat karya, pemerataan pembangunan, peningkatan akses perbankan bagi petani dan nelayan, serta alokasi anggaran pada kantong-kantong/wilayah-wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah. Dari sektor kesehatan, perlu didorong untuk melakukan berbagai perbaikan, seperti peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan gizi dan pola hidup sehat, peningkatan sanitasi dan akses air bersih, perawatan kesehatan lanjut usia, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Sedangkan dari sektor pendidikan, perlu didorong untuk peningkatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, program akses pendidikan untuk semua, kampanye kesadaran masyarakat, serta yang terakhir dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala.

Jika dilihat dari *trend*-nya, perkembangan kenaikan IPM Gorontalo Utara juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationships*) antara modal manusia (*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (*human development*). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Di sisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Stabilitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu daerah tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi.

Dengan menempatkan peningkatan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, diharapkan dapat menciptakan peluang yang secara langsung menyumbang terhadap cita-cita pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

2.1.3.1.7 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian daerah. Penurunan sesaat sempat terjadi pada saat pandemi karena pembatasan sosial yang berpengaruh pada tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat.

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa. Kurun waktu 2018-2024, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat perekonomian daerah. Rata-rata konsumsi per rumah tangga secara

umum terus meningkat, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010, kecuali terjadi penurunan sesaat di tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2018-2024 pun rata-rata di atas 60 persen, yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat sangat tinggi.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangga baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi non-makanan. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kenaikan konsumsi per rumah tangga ini bisa disebabkan oleh peningkatan jumlah anggota rumah tangga, atau peningkatan kualitas komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut yang sangat berkorelasi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada selang waktu tahun 2018 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (milliar rupiah) ADHK 2010	1.293,77	1.383,24	1.386,92	1.425,25	1.476,26	1.536,57	1.588,89
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (milliar rupiah) ADHB	1.862,07	2.037,39	2.077,11	2.178,77	2.331,62	2.500,92	2.652,23
3	Jumlah penduduk (BPS)	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563	130.722	131.991
4	Konsumsi keluarga per kapita (juta rupiah) ADHK 2010	11,345	12,021	11,099	11,265	11,483	11,754	12,038
5	Konsumsi keluarga per kapita (juta rupiah) ADHB	16,329	17,705	16,623	17,221	18,136	19,132	20,094

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang secara tren searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya,

pertumbuhan ini terjadi baik ADHB maupun ADHK 2010, yang memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

2.1.3.1.8 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Gorontalo Utara. Mampu tidaknya suatu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dapat dilihat dari karakteristik ketenagakerjaan. Secara logis, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, peluangnya berada di atas garis kemiskinan semakin besar. Namun juga tidak menutup kemungkinan, justru sebaliknya, bergantung pada tingkat pengeluaran dan jumlah tanggungannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah pekerjaan yang tersedia, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan peluang kerja, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan permintaan pasar, atau kondisi ekonomi yang lemah. Sebaliknya, TPT rendah menunjukkan tingkat penciptaan lapangan kerja yang relatif baik dan adanya kecocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

Penduduk usia kerja merupakan orang yang berumur 15 tahun ke atas yang memiliki potensi untuk masuk ke dalam pasar kerja. Penduduk usia kerja trennya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk usia kerja di Gorontalo Utara merupakan angkatan kerja. Dari data tersebut, menunjukkan adanya dominasi usia produktif yang merupakan potensi besar untuk pembangunan ekonomi daerah. Selain itu angka tersebut sekaligus menciptakan tantangan, yakni bagaimana menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pasar. Yang terakhir menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan, dengan

dominasi usia produktif, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional agar angkatan kerja siap menghadapi tuntutan industri.

Secara umum, Angkatan Kerja fluktuatif, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 sebesar 69,99 persen, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 70 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja selama tahun 2024, tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya, namun dengan perbedaan nilai antara perempuan dan laki-laki yang terpaut cukup jauh, menunjukkan kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki masih sangat besar. Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga.

TPT di tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan didominasi kontribusi negatif angka pengangguran dari gender laki-laki yang bertambah 28,85 persen saat gender perempuan justru berkontribusi positif sebesar 24,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pun secara tren 1 dekade terakhir, TPT menunjukkan penurunan dan selalu berada di bawah capaian nasional. Hal tersebut lumrah karena antara lain disebabkan sektor primer yang menjadi kontributor utama dalam PDRB bersifat padat karya. Detail informasi ketenagakerjaan ditampilkan pada Tabel 2.100 dan 2.101.

Tabel 2.100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	57.342	56.146	57.155	56.839	58.301	69.961	69.628
1.1	Bekerja	54.634	53.349	54.180	55.529	57.123	68.024	67.682
1.2	Menganggur	2.708	2.797	2.975	1.310	1.178	1.937	1.946
2	Bukan Angkatan Kerja	23.142	25.001	24.946	26.050	25.046	28.395	29.851
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	80.484	81.147	86.667	82.889	83.347	98.356	99.479
4	TPAK (%)	71,25	69,19	69,62	68,57	69,95	71,13	69,99
5	TPT (%)	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02	2,77	2,79

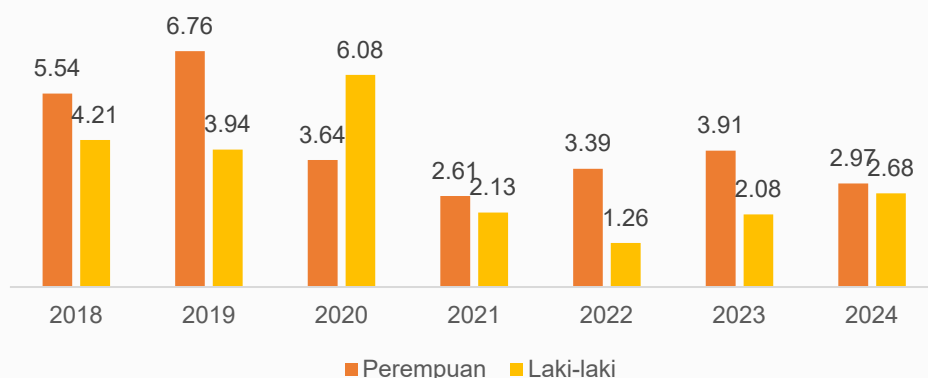
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Tabel 2.101
TPAK dan TPT Menurut Gender

No.	Indikator	2023		2024		% Perubahan	
		Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
1	TPAK (%)	54,74	86,88	56,14	83,16	2,56	-4,28
2	Pengangguran (%)	3,91	2,08	2,97	2,68	-24,04	28,85

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Grafik 2.21
Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

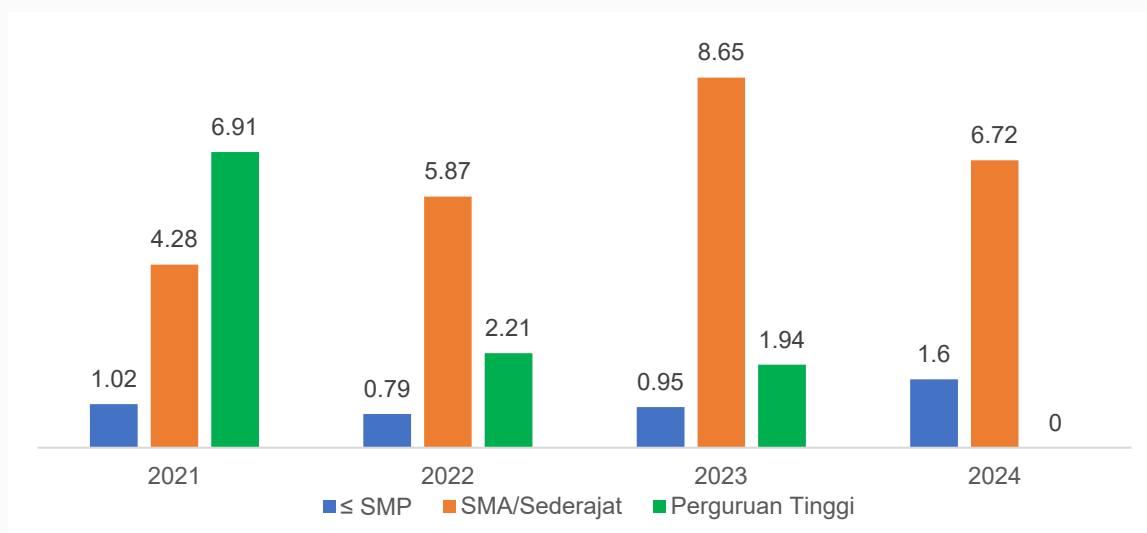
Jika melihat persentase perubahan tahun 2024 pada Tabel 2.101, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja perempuan yang lebih besar, dibarengi dengan tingkat penyerapannya dalam lapangan pekerjaan yang relatif lebih baik dibandingkan laki-laki karena kenaikan angka penganggurannya lebih rendah. Namun, secara statistik pengangguran gender perempuan masih berada di atas laki-laki sebagaimana Grafik 2.21, sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan keahlian (*reskilling dan upskilling*) para srikandi, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan (regulasi, program padat karya, *job matching*), pendidikan dan literasi digital, penyediaan fasilitas pendukung (misal: transportasi murah di perdesaan khusus perempuan agar terdapat akses ke tempat pelatihan), atau pencetakan wirausahawan perempuan baru, agar bertambahnya jumlah *supply* tenaga kerja seimbang dengan tingkat penyerapan dalam lapangan kerja.



Grafik 2.22 menunjukkan pola TPT berdasarkan tingkat pendidikan masih sejalan dengan pola pada tahun 2022 dan 2023, dimana TPT pendidikan SMA/ sederajat jauh lebih tinggi dibandingkan TPT pendidikan SMP ke bawah. Pola TPT yang demikian menunjukkan mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung mengambil terhadap lapangan pekerjaan yang

tersedia dan mau menerima pekerjaan apa saja, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang lebih sesuai dengan harapannya.

Grafik 2.22
TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Tabel 2.102
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Ditamatkan dan Status Pekerjaan Tahun 2024

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	% Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
1	≤ Sekolah Dasar	36.877	559	37.436	98,51	13.436	50.872	73,59
2	SMP/ Sederajat	6.329	142	6.471	97,81	9.191	15.662	41,32
3	SMA/ Sederajat	17.284	1.245	18.529	93,28	6.954	25.483	72,71
4	Perguruan Tinggi	7.192	-	7.192	100,00	270	7.462	96,38
Total		67.682	1.946	69.628	97,21	29.851	99.479	69,99

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Pada penduduk yang sudah bekerja, justru penduduk yang hanya mengenyam bangku sekolah dasar mendominasi tenaga kerja yang bekerja pada pasar tenaga kerja dibandingkan tingkat pendidikan di atasnya, pun jika dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi. Tabel 2.102 menunjukkan tingkat penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja berpendidikan SD lebih tinggi dibanding lulusan jenjang yang lebih tinggi. Penyerapan tersebut disinyalir karena tingkat upah tenaga kerja lulusan SD jauh lebih rendah, juga menggambarkan lapangan kerja yang membutuhkan penduduk lulusan pendidikan tinggi di Gorontalo Utara masih terbatas, ataupun tingkat upah yang ditawarkan oleh lapangan kerja tidak sesuai dengan harapan para lulusan, sehingga mereka memilih untuk menganggur sementara.

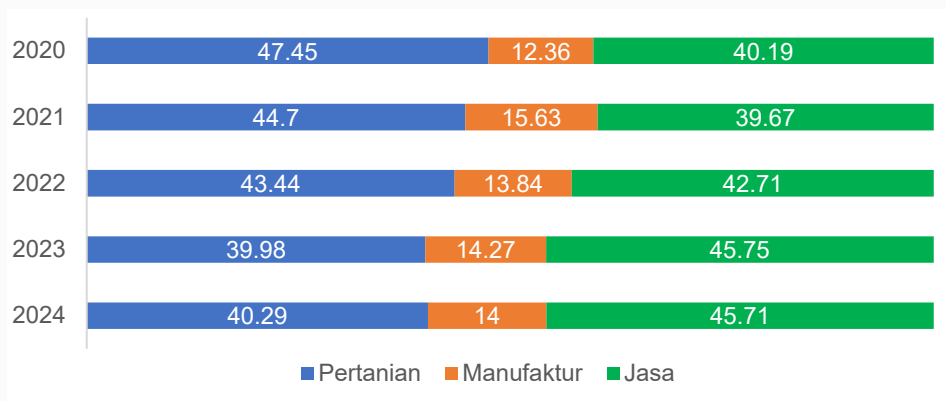
Struktur lapangan pekerjaan utama tahun 2024 di Gorontalo Utara didominasi oleh penduduk yang bekerja di kategori Lainnya, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sisanya di sektor Industri Pengolahan. Pada periode sebelumnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memegang tampuk komposisi terbesar sesuai Grafik 2.23.

Tabel 2.103
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	20.266	7.006	27.272
2	Industri Pengolahan	6.977	2.496	9.473
3	Lainnya/Jasa	14.025	16.912	30.937
Total		41.268	26.414	67.682

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Grafik 2.23
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Persen)



Sumber: Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara Agustus 2024, BPS

Dari pergerakan pekerja pada lapangan kerja utama, 4 tahun terakhir komposisi penduduk yang bergerak pada sektor jasa trennya semakin meningkat saat komposisi yang bergerak di sektor agraris bertren turun, yang menunjukkan peran sektor primer dalam penyerapan tenaga kerja semakin berkurang. Penurunan sektor primer dimungkinkan karena minat generasi muda untuk masuk sektor agraris berkurang.

Komposisi penduduk berdasarkan kondisi pekerjaan ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja usia 15-64 tahun yang senantiasa meningkat dengan tren penurunan pengangguran terbuka dan peningkatan persentase yang bekerja dibandingkan angkatan kerja, yang dapat dilihat pada Tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104
Angkatan Kerja di Gorontalo Utara

No.	Tahun Pengamatan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
1	2017	49.768	2.666	52.434	94,91
2	2018	54.634	2.708	57.342	95,28
3	2019	53.349	2.797	56.146	95,02
4	2020	54.180	2.975	57.155	94,79
5	2021	55.529	1.310	56.839	97,70
6	2022	57.123	1.178	58.301	98,43
7	2023	68.024	1.937	69.961	97,23
8	2024	67.682	1.946	69.628	97,21

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Bila angkatan kerja dilihat dari kelompok umur, mulai terlihat kelompok usia 25-29 dan 35-39 tahun memegang komposisi terbanyak dibandingkan kelompok

umur di atas usia 15 tahun lainnya, dan pada rentang usia 25-49 tahun secara kolektif mencapai lebih dari 50 persen angkatan kerja yang menunjukkan bonus demografi masih berlangsung. Rincian informasi hal tersebut disajikan pada Tabel 2.105 berikut.

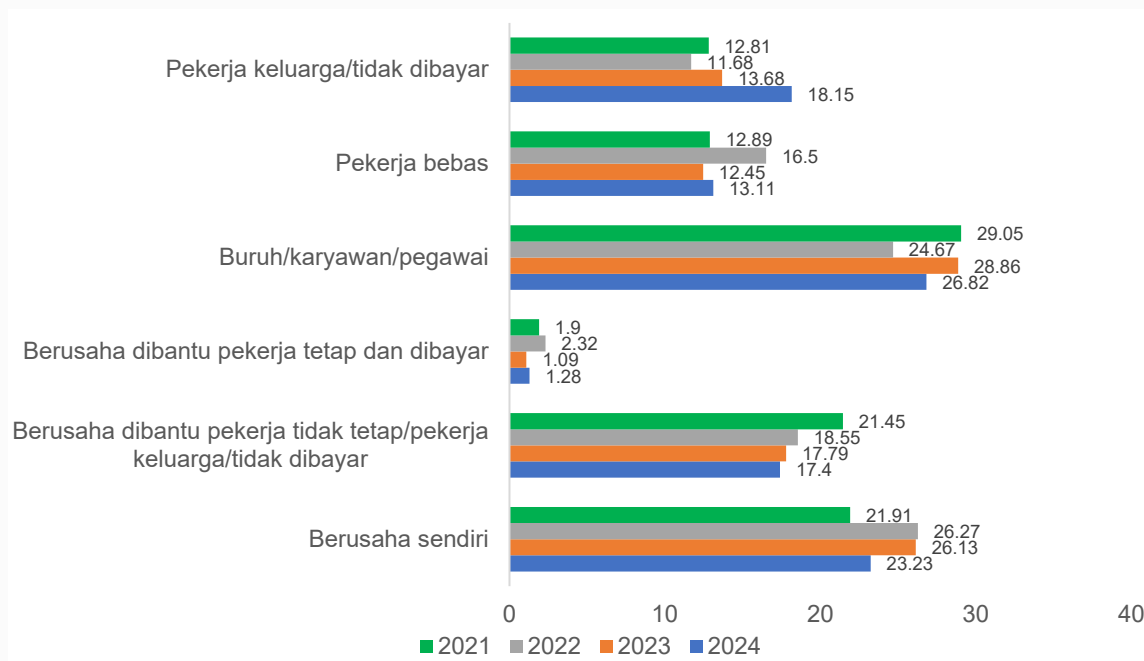
Tabel 2.105
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang
Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Tahun 2024

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin			Persentase Kelompok Umur terhadap Angkatan Kerja (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	15-19	1.660	577	2.237	3,31
2	20-24	3.454	4.099	7.553	11,16
3	25-29	6.116	2.704	8.820	13,03
4	30-34	4.739	3.173	7.912	11,69
5	35-39	5.700	3.122	8.822	13,03
6	40-44	4.638	2.593	7.231	10,68
7	45-49	4.151	2.410	6.561	9,69
8	50-54	3.282	2.788	6.070	8,97
9	55-59	2.819	2.218	5.037	7,44
10	60+	4.709	2.730	7.439	10,99
Angkatan Kerja		41.268	26.414	67.682	100,00

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2024, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai, diikuti status berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja keluarga/tidak dibayar. Keempatnya mencapai total 85,6 persen dari penduduk bekerja. Sisanya menyebar sebagai pekerja bebas, dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

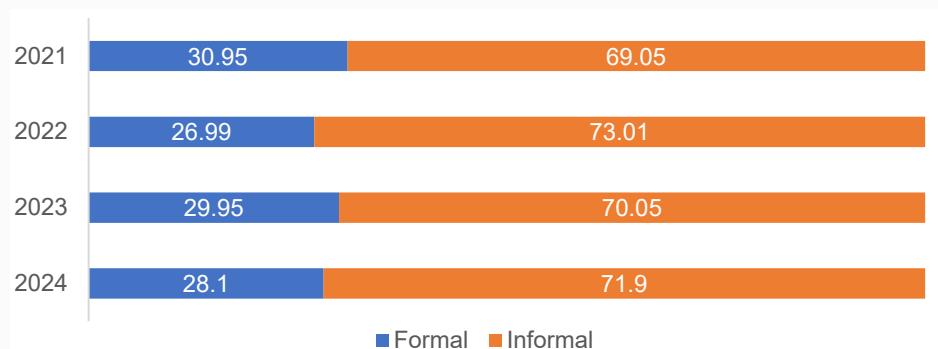
Grafik 2.24
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Persen)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Sedangkan pada penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2024, didominasi bekerja pada sektor informal (status berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar; pekerja bebas; dan pekerja keluarga/tidak dibayar), sisanya pada sektor formal (status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai). Secara tren, sektor informal relatif meningkat, dan sektor formal justru sebaliknya. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor informal, dimana sebagian besar penduduk bekerja di sektor yang tidak terstruktur atau tidak terdaftar secara formal. Penurunan sektor formal, meskipun moderat, menunjukkan bahwa ada pergeseran menuju sektor informal, yang berkaitan dengan kurangnya kesempatan kerja formal dan kebijakan yang mendorong sektor informal.

Grafik 2.25
Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

2.1.3.1.9 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

Secara umum, capaian tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo Utara tertinggal dibandingkan daerah lainnya, menunjukkan kesenjangan wilayah dalam aspek inklusivitas pembangunan di Provinsi Gorontalo. Secara *time series*, setelah pandemi IPEI Gorontalo Utara menunjukkan perbaikan, namun belum cukup kuat untuk mengejar ketertinggalan.

Tantangan utama peningkatan IPEI Gorontalo Utara berkisar pada akses layanan dasar, produktivitas ekonomi, dan ketimpangan. Diperlukan strategi pembangunan yang inklusif, berbasis wilayah, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas lokal, investasi, serta pengentasan kemiskinan agar dapat menyusul daerah lainnya dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 2.106
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2019	2020	2021	2023
1	Boalemo	4,79	4,16	4,76	4,98
2	Gorontalo	5,43	4,81	5,45	5,53
3	Pohuwato	5,25	4,65	5,38	5,49

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2019	2020	2021	2023
4	Bone Bolango	4,93	4,37	4,88	4,90
5	Gorontalo Utara	4,63	4,06	4,72	4,81
6	Kota Gorontalo	6,04	5,60	6,10	6,00
7	Provinsi Gorontalo	5,57			5,75

Sumber: Bappenas, diolah
(<https://inklusif.bappenas.go.id/data>)

2.1.3.2 Kesehatan untuk Semua

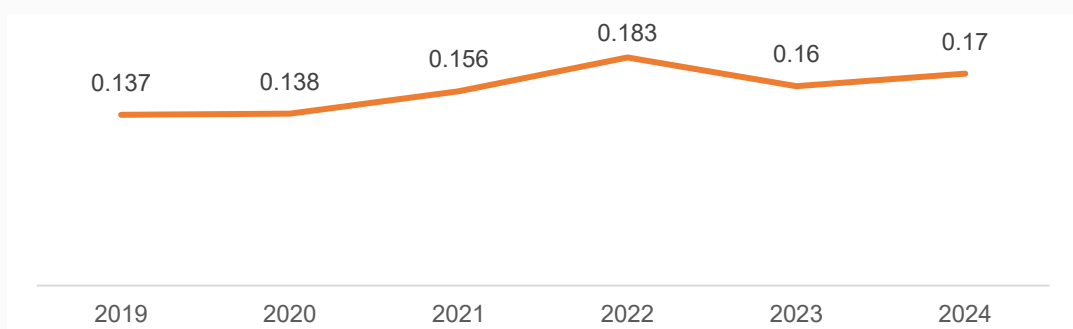
2.1.3.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan dari 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga, yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Indeks ini mengukur kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek seperti kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Keluarga yang tergolong dalam keluarga “Sehat” adalah keluarga dengan IKS > 0,8, “Pra Sehat” dengan IKS 0,500-0,800, dan “Tidak Sehat” dengan IKS < 0,500 (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren peningkatan meski masih sangat membutuhkan perhatian, sebagaimana informasi yang disajikan pada Grafik 2.26.

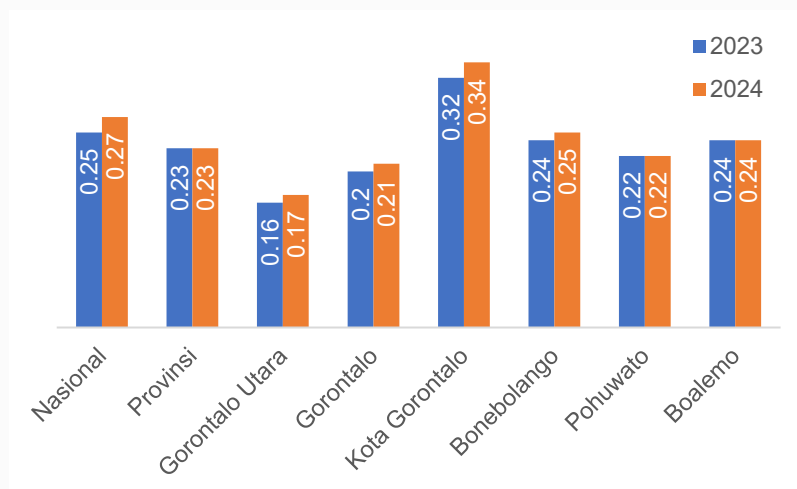
Grafik 2.26
Indeks Keluarga Sehat



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Jika dikomparasikan dengan kabupaten/kota lain dan nasional, pada tahun 2023 dan 2024 capaian Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo meskipun seluruhnya masih masuk pada kategori “Tidak Sehat” yang mencerminkan adanya tantangan struktural dan geografis dalam pemenuhan standar keluarga sehat, sebagaimana Grafik 2.27 berikut.

Grafik 2.27
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2023/2024



Sumber: Data Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo, diolah

Capaian IKS Gorontalo Utara 2023 dan 2024 disusun secara komposit oleh 12 indikator keluarga sehat, sebagaimana dalam Tabel 2.107 berikut.

Tabel 2.107
Capaian 12 Indikator Keluarga Sehat

No.	Indikator	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
1	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban keluarga	86,81	87,17
2	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	90,09	90,68
3	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional	55,49	57,11
4	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	42,08	41,75
5	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan & tidak ditelantarkan	37,54	38,36
6	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	24,25	24,50
7	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	41,90	41,86
8	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	89,28	89,18
9	Bayi mendapat ASI eksklusif	43,02	43,73
10	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	92,77	92,29
11	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	95,91	96,21
12	Keluarga mengikuti program keluarga berencana	52,75	53,43

Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat Kemenkes RI, diolah
(<https://dinkes-gorontaloprov.com/yankes/pispk/>)

Berdasarkan Tabel 2.97, beberapa indikator capaiannya masih rendah yang menunjukkan adanya tantangan dalam aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran terhadap pentingnya pencegahan penyakit. Pun jika diperhatikan dari capaian IKS per kecamatan, terdapat ketidakmerataan capaian nilai. Beberapa kecamatan yang IKS-nya rendah perlu diberikan edukasi, fasilitas kesehatan, dan program perbaikan lingkungan. Dan pada

Kecamatan Kwandang dan Tolinggula yang menunjukkan kinerja baik, namun tetap ada KK tidak sehat, artinya masih perlu peningkatan kualitas. Secara terperinci digambarkan pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108
Capaian Kluster IKS Per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Kriteria IKS			Nilai IKS
			Sehat	Pra Sehat	Tidak Sehat	
1	Atinggola	3.687	504	2.751	432	0,14
2	Kwandang	7.770	1.950	5.310	510	0,25
3	Anggrek	5.192	683	3.469	1.040	0,13
4	Sumalata	2.764	346	1.841	577	0,13
5	Tolinggula	2.649	585	1.805	259	0,22
6	Gentuma Raya	2.811	482	1.988	341	0,17
7	Tomilito	2.226	285	1.467	474	0,13
8	Ponelo Kepulauan	1.015	86	629	300	0,08
9	Monano	446	47	309	90	0,11
10	Biau	1.582	190	1.133	259	0,12
11	Sumalata Timur	2.121	187	1.502	432	0,09

Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat Kemenkes RI, diolah
(<https://dinkes-gorontaloprov.com/yankes/pispk/>)

Dari Tabel 2.98 juga perlu kita telaah/investigasi lebih lanjut, mengapa di beberapa kecamatan seperti Anggrek dan Sumalata jumlah KK tidak sehat tinggi meskipun KK sehat ada, serta perlu analisis penyebab spesifik mengenai kondisi lingkungan, ekonomi, fasilitas, atau perilaku masyarakat. Secara umum, diperlukan intervensi terintegrasi, percepatan layanan dasar kesehatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk memastikan keluarga di Gorontalo Utara tidak tertinggal dalam pencapaian kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

2.1.3.2.2 Umur Harapan Hidup

Sebagaimana dalam pembahasan mengenai IPM pada bab ini, Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan komponen dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan rata-rata usia harapan hidup seseorang sejak lahir, jika ia mengalami kondisi kesehatan dan sosial ekonomi seperti saat ini sepanjang hidupnya, sekaligus sangat penting karena UHH mencerminkan kualitas layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta keamanan lingkungan.

Berdasarkan Tabel 2.88, capaian UHH menunjukkan tren kenaikan yang cukup stabil selama periode 3 tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, serta peningkatan kesadaran gaya hidup sehat di Gorontalo Utara. Walaupun peningkatannya hanya sekitar 0,3–0,4 tahun per tahun, tetap merupakan sinyal positif dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat karena UHH terkait erat dengan akses layanan kesehatan, lingkungan bersih, serta tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Dengan kenaikan rata-rata per tahun yang hanya sebesar 0,275 tahun/tahun, mengakibatkan UHH masih di bawah rata-rata provinsi (70,73 tahun) dan jauh tertinggal dari Kota Gorontalo (73,55 tahun). Meski laju ini masih sejalan dengan tren daerah lainnya, masih perlu percepatan agar bisa mendekati rata-rata Provinsi Gorontalo.

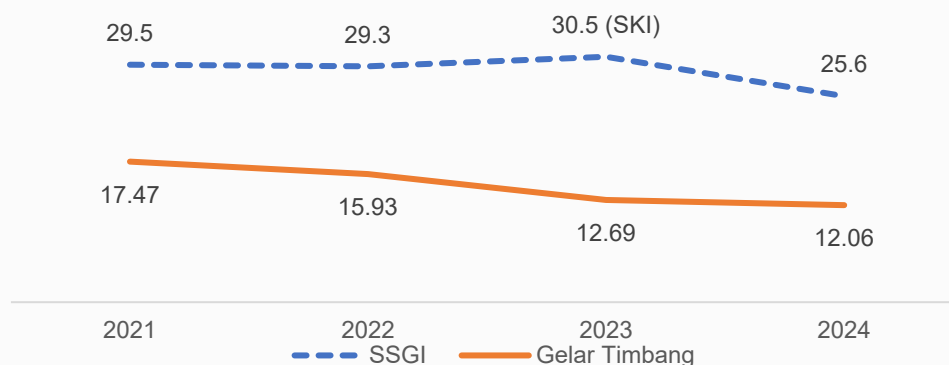
2.1.3.2.3 Status Gizi Balita

Kurang gizi merupakan salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah. Hal ini dapat menjadi masalah karena adanya beban jumlah anak kurang gizi yang cukup besar. Persoalan malnutrisi di Indonesia masih menjadi tantangan dalam upaya membangun generasi Indonesia yang berkualitas di masa mendatang. Walaupun demikian, berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan sebagai tindakan antisipatif khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil maupun Balita, memberikan hasil yang cukup menggembirakan karena selama 3 tahun terakhir permasalahan stunting di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan.

Status gizi Balita mencakup kondisi kesehatan anak di bawah lima tahun yang dinilai melalui indikator seperti tinggi badan, berat badan, dan usia, dengan stunting (pendek akibat malnutrisi kronis) sebagai salah satu masalah utama. Berkaca data Dinas Kesehatan Gorontalo Utara (2025), prevalensi stunting menurut metode *Gelar Timbang* menunjukkan penurunan signifikan dari 17,47 persen (2021) menjadi 12,06 persen (2024). Namun, data SSGI/SKI justru mencatat fluktuasi. Disparitas ini merefleksikan perbedaan metodologi

pengukuran, di mana *Gelar Timbang* (pemantauan lokal) lebih akurat menangkap dampak intervensi dibandingkan survei nasional (SSGI/SKI). Capaian tahun 2024 melalui gelar timbang telah melampaui target nasional (14 persen), menunjukkan keberhasilan program seperti: konvergensi penanganan stunting (intervensi gizi spesifik dan sensitif), pendampingan keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), optimalisasi Posyandu dan suplementasi gizi. Meski demikian, angka SSGI 2024 yang masih di atas rata-rata Nasional (19,8 persen) mengisyaratkan perlunya intensifikasi pendataan dan perluasan cakupan intervensi di wilayah terpencil. Prevalensi stunting Gorontalo Utara berdasarkan SSGI/SKI dan Hasil Gelar Timbang 2021-2024 disajikan pada Grafik 2.28 berikut.

Grafik 2.28
Prevalensi Stunting
Berdasarkan SSGI/SKI dan Hasil Gelar Timbang



Sumber: SSGI dan Dinas Kesehatan, 2025

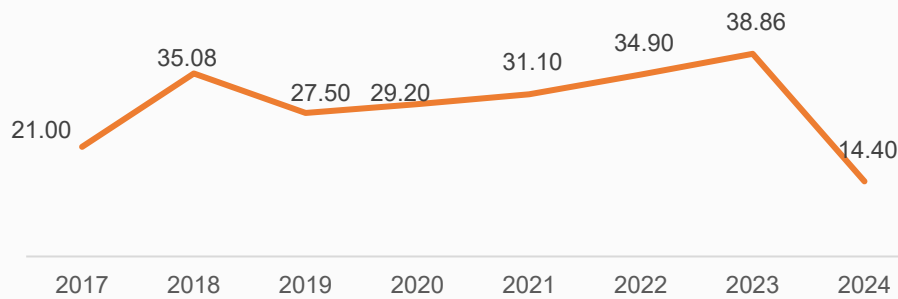
Formulasi program percepatan dalam penurunan stunting mengarah pada intervensi berbasis keluarga berisiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi, sehingga kasus malnutrisi bukan hanya menjadi tumpuan dalam satu bidang saja. Edukasi gizi, sistem reproduksi, sanitasi, pola asuh hingga faktor ekonomi turut andil dalam upaya mengentaskan kasus malnutrisi. Bahkan jika ditelaah lebih dalam kasus malnutrisi merupakan sebuah lingkaran siklus, dimana anak yang lahir dengan gizi kurang akan

tumbuh menjadi remaja dengan status kurang gizi dan berpotensi kembali melahirkan anak berkondisi sama. Pada posisi ini, anak menjadi fase yang rentan terhadap kasus malnutrisi dan berpotensi berulang ke generasi berikutnya.

Sejalan hal itu, ibu yang sedang mengandung/menyusui harus memperhatikan asupan yang dimakan, dan juga harus melakukan imunisasi. Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi pada bayi yang direkomendasikan WHO untuk mendukung imunitas dan tumbuh kembang optimal. Komposisi yang terkandung di dalam ASI menunjang tumbuh kembang bayi karena mengandung antibodi alami yang dapat membantu dalam mencegah infeksi dan gangguan kesehatan pada bayi. Di samping pemberian ASI, pemberian imunisasi juga penting untuk menjaga kesehatan bayi dan Balita.

Berdasarkan Profil Kesehatan Gorontalo Utara 2025, capaian ASI eksklusif sempat naik stabil sebelum turun drastis di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh: (1) kurangnya dukungan keluarga dan pengawasan di tingkat rumah tangga, (2) pemberian susu formula (sufor) pada bayi usia 0-6 bulan dengan alasan ASI kurang, meski edukasi tenaga kesehatan telah diberikan, dan (3) kebiasaan sebagian ibu memberikan sufor sejak lahir meski telah mendapat edukasi ASI. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelatihan konselor menyusui pada triwulan IV 2024, guna meningkatkan kapasitas pendampingan dan edukasi kepada ibu serta keluarga. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kesadaran dan praktik pemberian ASI eksklusif, meski tantangan sosial-budaya dan pemahaman masyarakat masih perlu diatasi secara holistik. Capaian ASI eksklusif periode 2017-2024 disajikan pada Grafik 2.29 berikut.

Grafik 2.29
ASI Eksklusif di Gorontalo Utara (Persen)



Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara, 2017-2024

Berdasarkan Tabel 2.109, status gizi Balita tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 7.800 Balita yang ditimbang, 13,7 persen (1.072 Balita) mengalami berat badan kurang (BB/U), 13,1 persen (1.019 Balita) stunting (TB/U), dan 5,4 persen (425 Balita) gizi kurang (BB/TB). Variasi antar kecamatan cukup signifikan: Kwandang

1.072 kasus BB kurang,
1.019 kasus stunting,
425 kasus gizi kurang,
dari 7.800 Balita ditimbang (2024)



mencatat persentase tertinggi untuk berat badan kurang (19,9 persen) dan stunting (18,2 persen), sementara Anggrek memiliki persentase terendah untuk berat badan kurang (3,8 persen) dan gizi kurang (0,5 persen). Ponelo Kepulauan juga menonjol dengan 19 persen Balita berat badan kurang dan 14,2 persen stunting. Meski beberapa wilayah seperti Anggrek dan Limbato menunjukkan capaian baik (0 persen gizi kurang di Limbato), tantangan utama masih terletak pada penanganan stunting dan malnutrisi kronis di kecamatan dengan angka tinggi. Data ini mengindikasikan perlunya intervensi terfokus, seperti program gizi spesifik dan sensitif, serta peningkatan edukasi gizi di wilayah-wilayah prioritas untuk mencapai perbaikan status gizi yang merata.

Tabel 2.109
Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb/U, Tb/U, dan Bb/Tb
Menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2024

No.	Kecamatan	Puskesmas	Balita yang Ditimbang/Diukur Tinggi/Diukur Gizi	Balita Berat Badan Kurang (Bb/U)		Balita Pendek (Tb/U)		Balita Gizi Kurang (Bb/Tb)	
				Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Atinggola	Atinggola	823	53	6,4	50	6,1	27	3,3
2	Gentuma Raya	Gentuma	569	75	13,2	53	9,3	36	6,3
3	Tomilito	Dambalo	522	87	16,7	23	4,4	44	8,4
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	226	43	19,0	32	14,2	18	8,0
5	Kwandang	Kwandang	828	165	19,9	151	18,2	44	5,3
		Molingkapoto	749	170	22,7	196	26,2	66	8,8
6	Anggrek	Anggrek	627	24	3,8	57	9,1	3	0,5
		Ilangata	562	111	19,8	111	19,8	30	5,3
7	Monano	Monano	502	52	10,4	27	5,4	21	4,2
8	Sumalata Timur	Dulukapa	484	49	10,1	21	4,3	39	8,1
9	Sumalata	Sumalata	405	72	17,8	57	14,1	35	8,6
		Buloila	353	35	9,9	65	18,4	12	3,4
10	Biau	Biau	441	37	8,4	37	8,4	11	2,5
11	Tolinggula	Tolinggula	567	93	16,4	135	23,8	39	6,9
		Limbato	142	6	4,2	4	2,8	0	0
Gorontalo Utara			7.800	1.072	13,7	1.019	13,1	425	5,4

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Dalam upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengembangkan inovasi digital melalui Sistem Informasi Cegah Stunting Kabupaten Gorontalo Utara (SI-CANTIK GORUT). Aplikasi ini merupakan platform terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat sistem pemantauan, pendataan, dan intervensi stunting secara *real-time* di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. SI-CANTIK GORUT menghubungkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tenaga kesehatan di Posyandu, Puskesmas, hingga tingkat kabupaten, serta keluarga berisiko stunting, dalam satu ekosistem digital yang memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui aplikasi ini, petugas kesehatan dapat melakukan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran Balita secara langsung, memantau perkembangan status gizi anak.

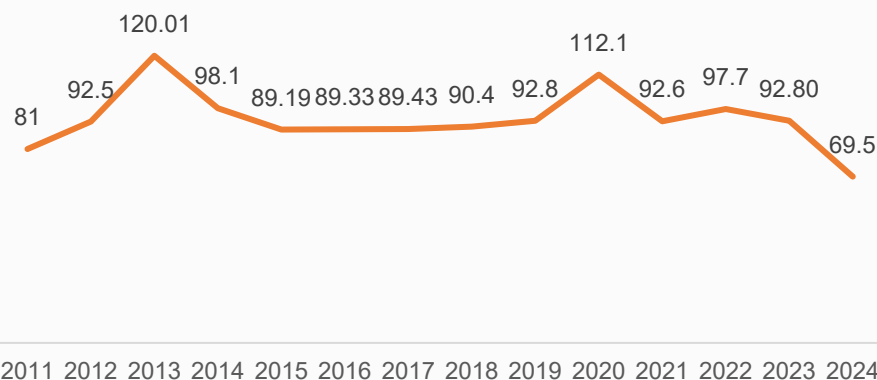
Kehadiran SI-CANTIK GORUT juga mempermudah identifikasi dini keluarga berisiko stunting dan mempercepat respons intervensi yang diperlukan. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pemetaan geografis (*mapping*) yang menampilkan sebaran kasus stunting di setiap kecamatan dan desa, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya dan program intervensi

secara lebih tepat sasaran. Selain itu, SI-CANTIK GORUT juga berfungsi sebagai media edukasi bagi keluarga melalui konten informasi gizi, pola asuh, dan kesehatan reproduksi yang dapat diakses secara mudah. Integrasi data dari SI-CANTIK GORUT dengan sistem pelaporan nasional seperti e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) diharapkan dapat meningkatkan akurasi data stunting dan memperkuat konvergensi program antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dalam mewujudkan Gorontalo Utara bebas stunting.

2.1.3.2.4 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan *Universal Child Immunization* (UCI)

Pemenuhan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bagi anak merupakan salah satu tolok ukur peningkatan kualitas kesehatan keluarga, berupa pemberian vaksin kepada bayi umur 0-11 bulan 29 hari secara lengkap (seperti seperti HB-0, BCG, Polio, DPT-HB-HIB, IPV, MR) dan sesuai dengan periode waktu vaksinnya. Capaian imunisasi ini di Gorontalo Utara kurun waktu satu dekade lebih terakhir disajikan dalam Grafik 2.30 berikut.

Grafik 2.30
Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2011-2024 (%)



Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara 2025

Capaian IDL yang turun pada tahun 2024 dipengaruhi beberapa faktor khusus: pertama, sasaran Balita dari Pusdatin Pusat Kemenkes meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, menuntut adaptasi cepat dalam distribusi layanan. Kedua, adanya penambahan antigen baru dan penyuntikan ganda (di paha kiri-kanan) yang memerlukan sosialisasi intensif kepada orang

tua untuk mengurangi kekhawatiran terhadap efek samping sementara seperti demam atau rewel (KIPI). Ketiga, faktor eksternal seperti trauma imunisasi Covid-19 sebelumnya, ketidakhadiran anak saat Posyandu karena sakit, serta kekosongan stok vaksin di beberapa lokasi turut memengaruhi cakupan.

Tabel 2.110
Sebaran Bayi dengan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2024

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi			Imunisasi Dasar Lengkap					
			L	P	L+P	L		P		L+P	
						Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Atinggola	Atinggola	143	134	277	85	59,4	77	57,5	162	58,5
2	Gentuma Raya	Gentuma	111	106	217	64	57,7	62	58,5	126	58,1
3	Tomilito	Dambalo	109	104	213	71	65,1	52	50,0	123	57,7
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	46	45	91	26	56,5	34	75,6	60	65,9
5	Kwandang	Kwandang	166	158	324	87	52,4	118	74,7	205	63,3
6		Molingkapoto	189	180	369	115	60,8	122	67,8	237	64,2
7	Anggrek	Anggrek	99	91	190	71	71,7	66	72,5	137	72,1
8		Ilangata	104	99	203	105	101,0	87	87,9	192	94,6
9	Monano	Monano	76	74	150	57	75,0	70	94,6	127	84,7
10	Sumalata Timur	Dulukapa	82	80	162	60	73,2	64	80,0	124	76,5
11	Sumalata	Sumalata	74	70	144	54	73,0	72	102,9	126	87,5
12		Buloita	51	48	99	35	68,6	36	75,0	71	71,7
13	Biau	Biau	58	58	116	64	110,3	37	63,8	101	87,1
14	Tolinggula	Tolinggula	98	93	191	56	57,1	54	58,1	110	57,6
15		Limbato	22	22	44	15	68,2	23	104,5	38	86,4
JUMLAH			1.428	1.362	2.790	965	67,6	974	71,5	1.939	69,5

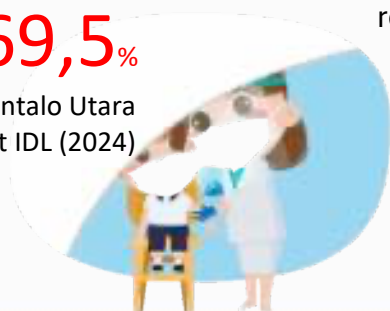
Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara 2025

Secara umum, cakupan imunisasi harus ditingkatkan hingga 100 persen. Faktor penyebab terjadinya *drop out* (tidak lengkap) imunisasi dasar, yaitu:

- Adanya perbedaan jumlah sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran riil yang mencolok;
- Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan pemanfaatan yang kurang optimal;
- Pemberdayaan Posyandu kurang karena tidak semua Posyandu dapat melayani imunisasi;
- Pelaksanaan *sweeping* imunisasi pada daerah yang cakupan imunisasi

rendah belum optimal.

Hanya **69,5%**
bayi Gorontalo Utara
mendapat IDL (2024)



Program *Universal Child Immunization* (UCI) merupakan program dimana seluruh anak usia bayi mendapat imunisasi lengkap.

Diupayakan minimal 80 persen anak-anak yang ada di desa tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Tabel 2.111
Capaian *Universal Child Immunization* (UCI)

No.	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa UCI	118	114	114	112	104	110	102	75
2	Jumlah seluruh desa	123	123	123	123	123	123	123	123
3	Cakupan desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95,9	92,7	92,7	91,1	87,8	89,4	82,92	60,98

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Penurunan cakupan UCI pada tahun 2024 disebabkan oleh kombinasi faktor teknis dan sosial: kenaikan sasaran Balita hampir dua kali lipat, penambahan antigen baru dan penyuntikan ganda yang memicu kekhawatiran orang tua terhadap efek samping sementara (seperti demam/rewel), trauma imunisasi Covid-19, berita negatif tak berdasar di media sosial, serta kendala operasional seperti kekosongan vaksin, ketidakhadiran anak di Posyandu, dan ketidaksesuaian data domisili. Pemerintah daerah merespons dengan memperkuat distribusi logistik, edukasi melalui kader Posyandu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk melawan misinformasi, dan peningkatan akurasi data. Upaya ini diharapkan memulihkan kepercayaan masyarakat serta mengembalikan cakupan imunisasi demi perlindungan kesehatan anak yang lebih merata.

Jika dilihat lebih detail, capaian UCI desa per wilayah kerja Puskesmas tergambar bahwa beberapa Puskesmas kinerjanya menurun di tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.112 berikut.

Tabel 2.112
Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)
Menurut Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2023/2024

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa	Jumlah Desa UCI		% Desa UCI	
				2023	2024	2023	2024
1	Atinggola	Atinggola	14	14	5	100,00	35,71
2	Gentuma Raya	Gentuma	11	4	2	36,36	18,18
3	Tomilito	Dambalo	10	7	4	70,00	40,00
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	4	3	3	75,00	75,00
5	Kwandang	Kwandang	7	3	3	42,85	42,86
6		Molingkapoto	11	10	6	90,90	54,55
7	Anggrek	Anggrek	9	9	6	100,00	66,67

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa	Jumlah Desa UCI		% Desa UCI	
				2023	2024	2023	2024
8		Ilangata	6	5	6	83,33	100,00
9	Monano	Monano	10	10	10	100,00	100,00
10	Sumalata Timur	Dulukapa	10	9	8	90,00	80,0
11	Sumalata	Sumalata	5	5	5	100,00	100,00
12		Buloila	6	5	4	83,33	66,67
13	Biau	Biau	10	10	10	100,00	100,00
14	Tolinggula	Tolinggula	7	5	1	71,42	14,29
15		Limbato	3	5	2	100,00	66,67
Jumlah			123	102	75	82,92	60,98

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Jika dilihat dari wilayah kerja Puskesmas, menunjukkan disparitas cakupan UCI antar wilayah kerja. Sumalata, Ilangata, dan Monano mencatat capaian sempurna dengan seluruh desa memenuhi kriteria UCI, sementara Dulukapa dan Ponelo juga menunjukkan kinerja baik. Di sisi lain, wilayah seperti Gentuma dan Tolinggula memiliki capaian sangat rendah. Perbedaan ini mencerminkan perlunya intervensi terfokus pada daerah tertinggal, seperti peningkatan mobilisasi tenaga kesehatan, edukasi masyarakat, serta penguatan logistik, sambil mempertahankan keberhasilan di wilayah yang sudah optimal.

2.1.3.2.5 Desa Siaga Aktif

Desa Siaga merupakan salah satu bentuk re-orientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top-down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom-up*, desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Di Kabupaten Gorontalo Utara, program ini menunjukkan keberhasilan signifikan: sejak 2021, seluruh 123 desa telah mencapai status “Desa Siaga Aktif”. Jumlah Puskesmas tetap stabil, namun konsistensi cakupan 100 persen hingga 2024 mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat peran masyarakat dan kelembagaan kesehatan desa. Capaian ini menegaskan efektivitas kolaborasi antara Puskesmas, kader kesehatan, dan warga dalam menciptakan sistem kesehatan berbasis komunitas yang responsif dan berkelanjutan. Seluruh desa yang ada telah membentuk Desa Siaga seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113
Cakupan Desa Siaga Aktif

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Siaga aktif	62	98	121	123	123	123	123
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	62	98	121	123	123	123	123
3	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15	15	15	15
4	Jumlah desa keseluruhan	123	123	123	123	123	123	123
5	Cakupan Desa Siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa Siaga	50,40%	79,67%	91,38%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.1.3.2.6 Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Capaian upaya kesehatan masyarakat melalui indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) keluarga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Capaian PHBS Gorontalo Utara rendah, dengan tren kembali beranjak naik empat tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.31 berikut.

Grafik 2.31
Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Peningkatan pada Grafik 2.31 mencerminkan keberhasilan program edukasi, pembangunan infrastruktur sanitasi, serta kolaborasi antara Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan dan masyarakat. Meski masih perlu optimalisasi, tren ini menegaskan komitmen bersama dalam mendorong perilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan.

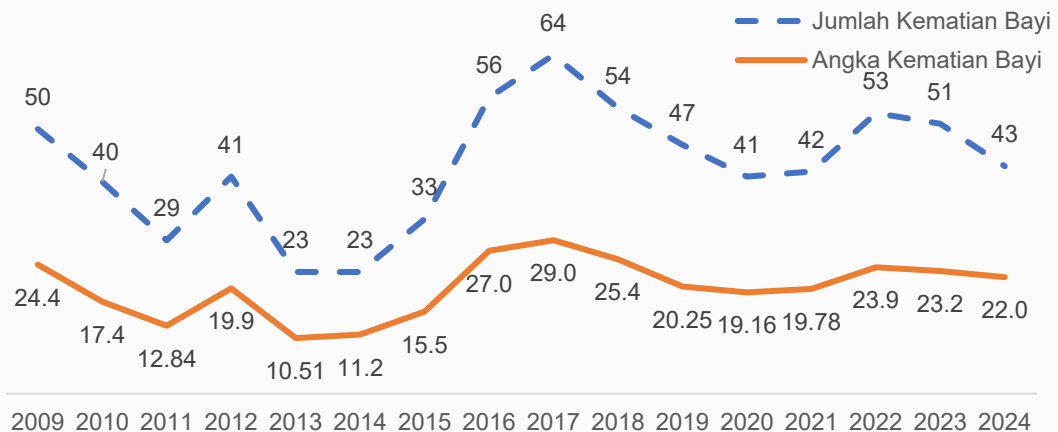
2.1.3.2.7 Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian (*mortality rate*) dalam suatu kelompok populasi dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakatnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya dapat diukur melalui tingkat kematian yang terjadi, antara lain melalui angka kematian bayi dan Balita serta angka kematian ibu maternal. Diharapkan pada tahun 2030 dapat mengakhiri kematian bayi baru lahir dan Balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai bayi belum berumur tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak, khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan, serta tingkat perkembangan sosial masyarakat. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil, dan proses penanganan saat persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Kasus AKB Gorontalo Utara tahun 2024 mayoritas terjadi pada masa neonatal dini (0-6 hari). Penyebab utama adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) akibat kurangnya gizi ibu hamil atau persalinan prematur, serta *asfiksia neonatorum* (kekurangan oksigen saat lahir). Sebagian besar kasus terjadi di rumah sakit, yang juga mengindikasikan keterbatasan fasilitas resusitasi neonatal. Faktor lain seperti minimnya akses layanan kesehatan di daerah terpencil turut berkontribusi. Intervensi seperti peningkatan layanan antenatal, pelatihan tenaga kesehatan, dan penyediaan NICU menjadi kunci untuk menekan AKB di masa mendatang.

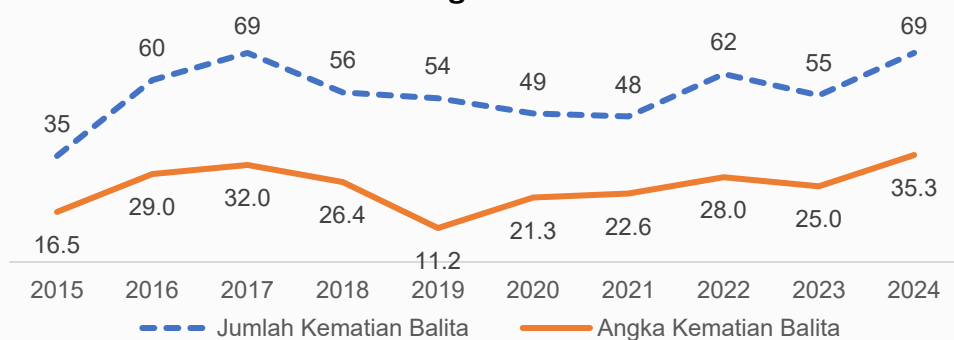
Grafik 2.32
Jumlah dan Angka Kematian Bayi



Sumber: RPJMD 2013-2018 dan 2018-2023; Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026; Renja Dinas Kesehatan (diolah)

Angka Kematian Balita/Akaba (0-4 tahun) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun per 1.000 anak umur yang sama pada tahun itu (termasuk kematian bayi), yang menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, atau kecelakaan. Indikator ini seperti AKB, menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dalam arti besar dan tingkat kemiskinan penduduk. Gambaran Akaba disajikan pada Grafik 2.33 berikut.

Grafik 2.33
Jumlah dan Angka Kematian Balita



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Capaian Akaba tahun 2024 yang lebih tinggi daripada AKB, menunjukkan kerentanan kesehatan anak pascaneonatal. Penyebab utama kematian Balita meliputi infeksi saluran pernapasan (misal: *pneumonia*), diare akibat sanitasi

buruk, dan gizi kurang/kurang energi protein (KEP), yang sering dipicu oleh kurangnya akses air bersih, imunisasi tidak lengkap, dan pola asuh tidak optimal. Berbeda dengan AKB yang didominasi komplikasi perinatal, Akaba lebih terkait faktor lingkungan, penyakit menular, dan ketahanan pangan. Peningkatan Akaba juga mengindikasikan perlunya intervensi holistik, seperti program penurunan angka stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, dan edukasi keluarga tentang pencegahan penyakit serta pola gizi seimbang untuk memutus mata rantai risiko kematian Balita.

Gambaran AKB dan Akaba yang belum optimal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa masih ada masalah krusial yang terjadi di lapangan, yakni:

- a. Kualitas layanan manajemen terpadu bayi muda yang dilakukan oleh petugas kesehatan belum maksimal;
- b. Sistem penanganan neonatal emergensi atau rujukan darurat belum sesuai standar, karena pelayanan yang seharusnya dilakukan sedini mungkin, terkendala dengan sarana dan prasarana di RS rujukan kabupaten;
- c. Sarana dan prasarana di fasilitas tingkat pertama ikut mempengaruhi kematian karena pelayanan *screening* deteksi awal kehamilan dan deteksi risiko tinggi belum optimal.

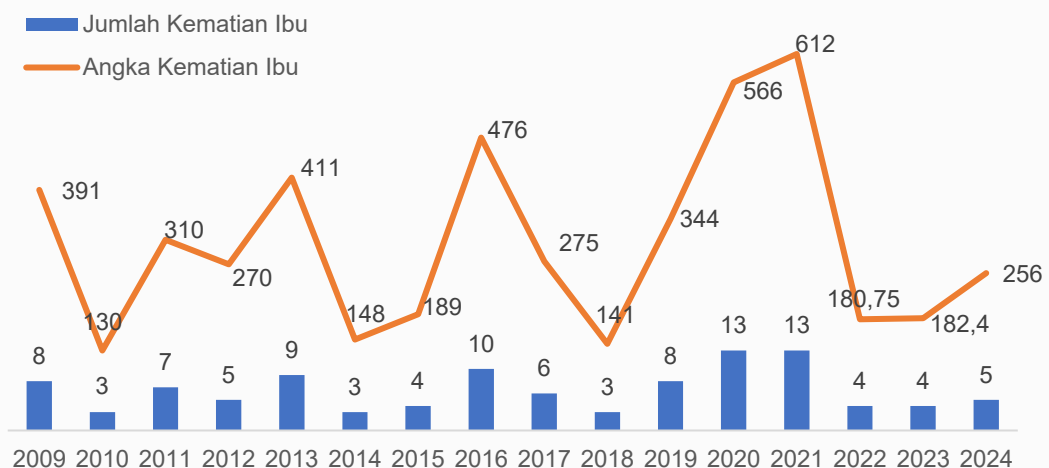
2.1.3.2.8 Angka Kematian Ibu

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan Balita merupakan salah satu target dalam SDGs di sektor kesehatan, diharapkan pada tahun 2030, dapat mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup, yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan maternal.

Capaian AKI Gorontalo Utara menunjukkan tantangan serius dengan kasus kematian ibu pada 2024 didominasi oleh penyebab langsung seperti perdarahan pascapersalinan, infeksi berat (*sepsis+edema paru*), dan

komplikasi penyakit penyerta seperti TBC serta kanker payudara (*Ca mammae*). Selain itu, kasus *adhesive small bowels* (komplikasi pascaoperasi usus) turut berkontribusi, mengindikasikan keterbatasan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan bedah di fasilitas kesehatan. Data tren 2020-2024 menegaskan perlunya peningkatan kapasitas rumah sakit dalam manajemen persalinan risiko tinggi, deteksi dini penyakit kronis, dan pelatihan tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko kematian ibu. Selain itu, intervensi seperti pemeriksaan antenatal berkualitas, akses transfusi darah, dan edukasi masyarakat tentang tanda bahaya kehamilan menjadi kunci penurunan.

Grafik 2.34
Angka dan Jumlah Kematian Ibu



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.1.3.2.9 Angka Morbiditas

Angka morbiditas adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesakitan atau penyakit dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu. Secara sederhana, angka morbiditas menunjukkan seberapa banyak orang dalam suatu kelompok yang mengalami masalah kesehatan, yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai proxy angka morbiditas, menggunakan indikator persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenat), selama periode 2020–2024, persentase penduduk Gorontalo Utara yang mengalami keluhan kesehatan

dalam sebulan terakhir menunjukkan fluktuasi signifikan. Penurunan drastis pada tahun 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan aktivitas selama pandemi. Namun, lonjakan tajam pada tahun 2023 dan 2024 hingga 36,58 persen menandakan adanya tantangan serius dalam kesehatan masyarakat, baik dari sisi penyakit menular, perilaku hidup sehat, maupun layanan kesehatan. Fenomena ini perlu ditindaklanjuti melalui penguatan sistem kesehatan dasar, edukasi kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat desa.

Tabel 2.114
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
dalam Sebulan Terakhir

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Boalemo	30,77	40,71	43,51	38,12	37,67
2	Gorontalo	34,55	29,94	41,68	38,23	28,18
3	Pohuwato	34,71	36,20	45,72	35,20	38,42
4	Bone Bolango	31,58	36,20	29,98	24,49	30,66
5	Gorontalo Utara	27,35	26,05	12,45	35,47	36,58
6	Kota Gorontalo	30,39	30,55	28,81	36,15	37,52
Provinsi Gorontalo		32,19	31,06	35,85	35,35	33,80

Sumber: Susenas dalam Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

2.1.3.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.3.3.1 Rata-rata dan Harapan Lama Sekolah

Sebagaimana dalam pembahasan mengenai IPM pada bab ini halaman 152, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan kondisi pendidikan dari dua sudut pandang yang berbeda dan penting bagi perencanaan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. HLS menunjukkan harapan pendidikan generasi muda yang mencerminkan ketersediaan dan akses pendidikan saat ini (prospektif), sedangkan RLS menunjukkan pencapaian pendidikan generasi dewasa yang mencerminkan sejarah dan keberhasilan sistem pendidikan di masa lalu (retrospektif).

Nilai HLS tahun 2024 sebesar 12,50 tahun artinya anak di Gorontalo Utara berpeluang menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMA (setara 12 tahun), bahkan berpotensi melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Semakin tinggi HLS bermakna sistem pendidikan makin terjangkau dan tersedia. Sedangkan nilai

RLS sebesar 7,40 tahun mengindikasikan penduduk dewasa di Gorontalo Utara rata-rata hanya menamatkan pendidikan sampai kelas 1 SMP.

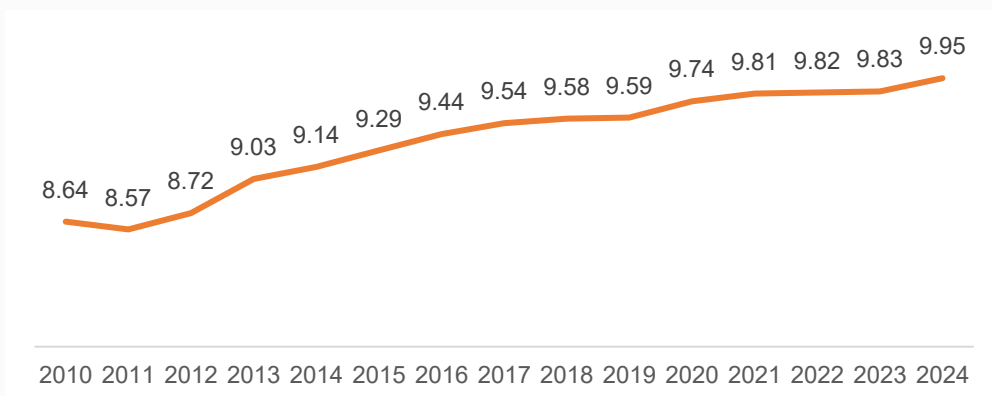
Disparitas kondisi di atas menunjukkan adanya kesenjangan antar generasi, serta tantangan akses atau penyelesaian sekolah formal di masa lalu. Namun di lain sisi, terdapat potensi besar dalam generasi muda (HLS tinggi), namun realisasi pendidikan generasi sebelumnya masih rendah (RLS rendah). *Gap* besar antara keduanya juga berarti berarti akses pendidikan membaik, tapi masih ada warisan masa lalu berupa rendahnya pendidikan orang tua, yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan pola asuh anak.

2.1.3.3.2 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan (IP) adalah merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan kemajuan suatu wilayah dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan Grafik 2.35, IP Gorontalo Utara terus mengalami tren positif. Pada tahun 2010 masih berada di level 8,64. Seiring waktu, terus mengalami perbaikan hingga 1,31 poin selama 14 tahun terakhir menjadi 9,95.

Grafik 2.35
Indeks Pendidikan Gorontalo Utara

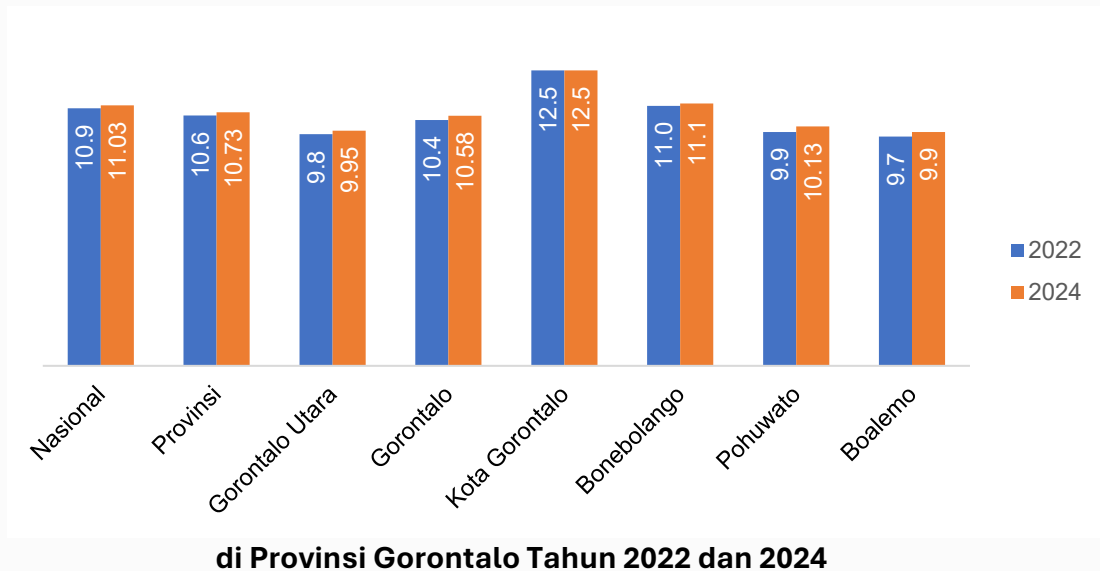


Sumber: Bappeda Gorontalo Utara, diolah

IP Gorontalo Utara masih rendah jika dikomparasikan dengan capaian Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya, namun mengindikasikan kemajuan bertahap yang perlu intervensi kebijakan lebih kuat untuk

meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat usia sekolah dan pendidikan orang dewasa, sebagaimana Grafik 2.36 berikut.

Grafik 2.36
Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), diolah

2.1.3.3.3 Angka Literasi dan Numerasi

Indeks kemampuan literasi dan numerasi merupakan dua indikator komposit penyusun Standar Pelayanan Minimum Pendidikan. Indeks tersebut menggambarkan mutu pembelajaran di sekolah, bukan hanya dari sisi peserta didik, tetapi juga efektivitas guru dan lingkungan belajar. Sasaran kedua indeks ini adalah siswa jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai kewenangan kabupaten yang diukur melalui hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Indeks kemampuan literasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sementara indeks kemampuan numerasi ialah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Jika suatu daerah memiliki nilai indeks literasi dan numerasi yang rendah, maka:

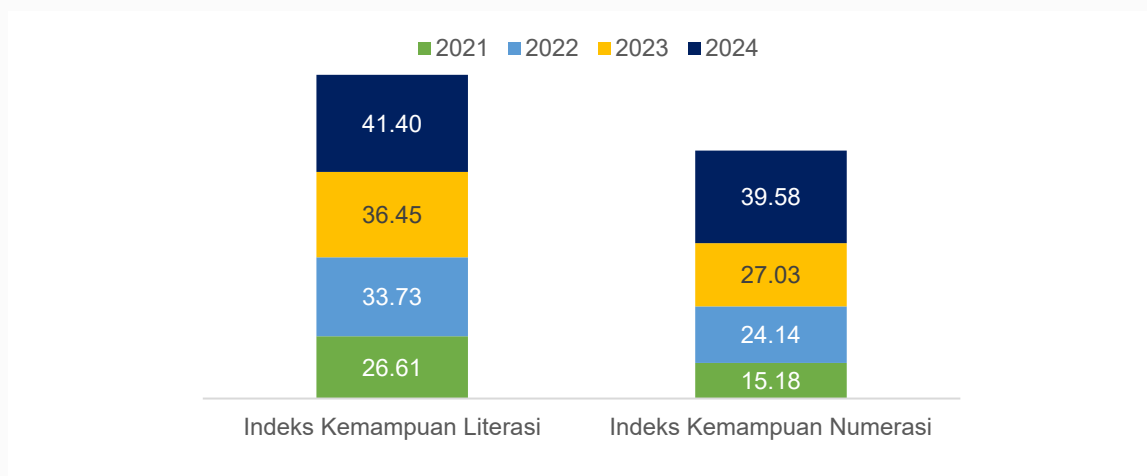
- Diperlukan evaluasi terhadap kurikulum dan metode pembelajaran;
- Kemungkinan terdapat ketimpangan fasilitas dan pelatihan guru;
- Masyarakat dan siswa memiliki akses informasi dan peluang belajar yang terbatas;
- Akan berdampak jangka panjang terhadap produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

- **Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar**

Indeks kemampuan literasi mengalami peningkatan cukup signifikan selama rentang 2021-2024 sebesar 14,79 poin yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran membaca dan pemahaman teks yang konsisten setiap tahun, mengindikasikan intervensi kebijakan, pelatihan guru, dan peningkatan fasilitas pembelajaran mulai menunjukkan hasil yang positif.

Di sisi lain, capaian indeks numerasi menunjukkan perkembangan yang lebih lambat dibanding literasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan numerasi membutuhkan waktu lebih lama dan pendekatan yang lebih spesifik, seperti pelatihan pedagogi numerasi guru, penggunaan alat peraga kontekstual, dan pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah (*problem-based learning*).

Grafik 2.37
Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SD



Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, 2025 dan <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranData2025SPM>

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo, capaian dua indikator tersebut merupakan yang terendah, sebagaimana Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115
Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kabupaten/kota	Indeks Kemampuan Literasi	Indeks Kemampuan Numerasi
Gorontalo Utara	41,40 (Sedang)	39,58 (Kurang)
Gorontalo	54,20 (Sedang)	47,83 (Sedang)
Kota Gorontalo	58,06 (Sedang)	48,39 (Sedang)
Bonebolango	52,24 (Sedang)	46,35 (Sedang)
Pohuwato	52,33 (Sedang)	46,71 (Sedang)
Boalemo	52,01 (Sedang)	45,19 (Sedang)

Sumber: <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranData2025SPM>

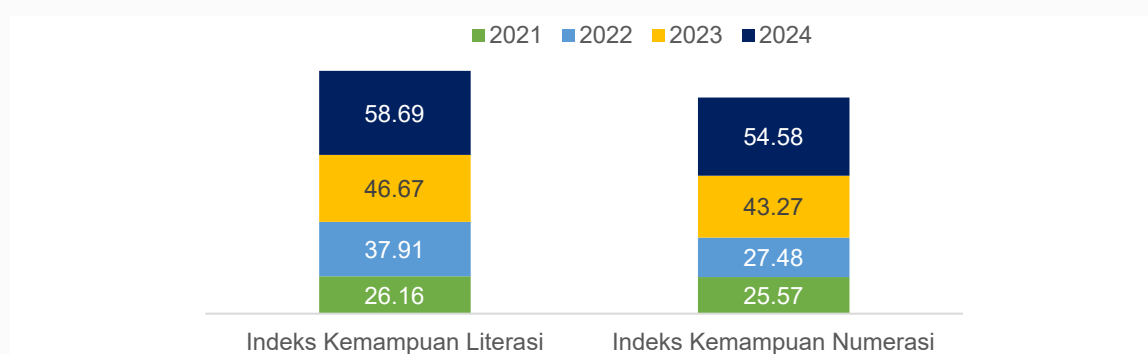
- **Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama**

Capaian kemampuan literasi dan numerasi jenjang SMP tidak jauh berbeda dengan jenjang sebelumnya. Kedua indikator tersebut di tahun 2024 sudah dalam kategori “Sedang” dan secara absolut angkanya lebih tinggi dari capaian tingkat sekolah dasar. Indeks kemampuan literasi menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dan signifikan, menggambarkan dampak positif dari berbagai kebijakan peningkatan mutu pembelajaran literasi di

tingkat SMP, seperti penguatan pembelajaran berbasis teks, pelatihan guru literasi, serta pengadaan bahan bacaan yang relevan di lingkungan sekolah.

Perkembangan indeks numerasi juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun tidak secepat indeks literasi, menjadi indikasi intervensi pembelajaran numerasi seperti penggunaan pendekatan kontekstual, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pendampingan guru matematika mulai menunjukkan dampaknya.

Grafik 2.38
Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SMP



Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, 2025 dan <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranData2025SPM>

Capaian indikator literasi dan numerasi jenjang SMP di tahun 2024 secara umum masih terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, sebagaimana Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116
Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Kemampuan Literasi	Indeks Kemampuan Numerasi
1	Gorontalo Utara	58,69 (Sedang)	54,58 (Sedang)
2	Gorontalo	65,00 (Sedang)	60,31 (Sedang)
3	Kota Gorontalo	70,58 (Baik)	62,95 (Sedang)
4	Bonebolango	58,65 (Sedang)	54,39 (Sedang)
5	Pohuwato	64,11 (Sedang)	58,97 (Sedang)
6	Boalemo	66,37 (Sedang)	59,74 (Sedang)

Sumber: <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranData2025SPM>

Capaian indikator kemampuan literasi dan numerasi di atas menunjukkan tren positif dan signifikan, mengindikasikan keberhasilan program peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat SMP, dengan literasi sedikit lebih tinggi daripada numerasi di tahun 2024, tetapi keduanya berada dalam rentang kemajuan yang memadai. Selain itu, dengan refleksi terhadap

capaian indikator-indikator pada dua jenjang berbeda di atas, perlu menjadikan hasil rapor pendidikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan ke depan. Setiap proses pembenahan dalam rangka meningkatkan capaian indikator ini sepatutnya mempedomani hasil evaluasi yang direkomendasikan, baik dari segmentasi akar masalah maupun jenis pembenahan sehingga status keberhasilan intervensi program dapat terukur secara kuantitatif.

2.1.3.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

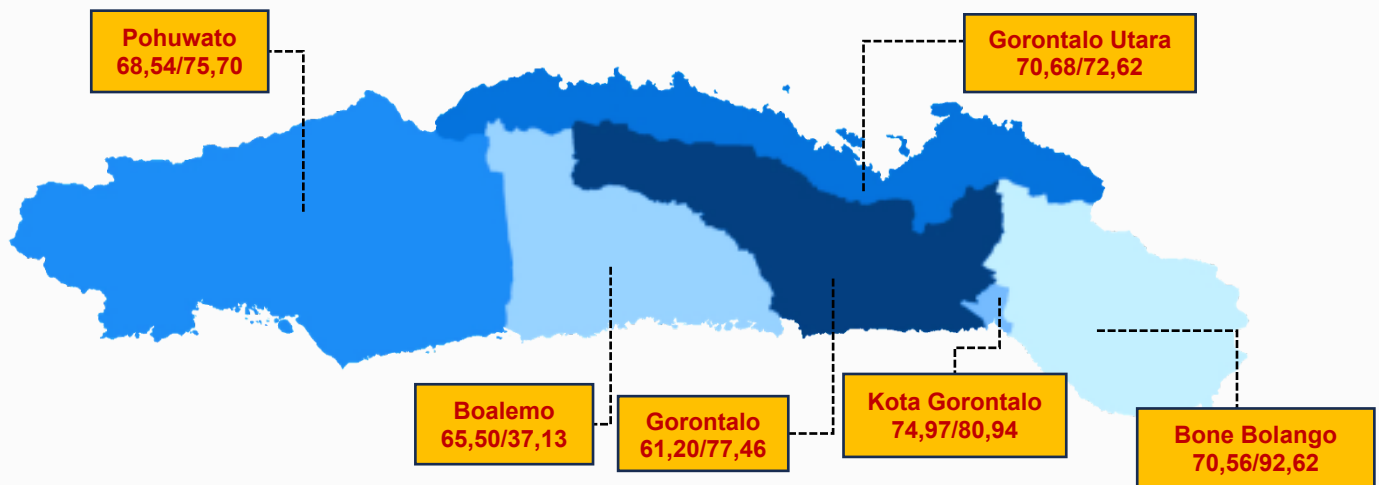
Pembangunan literasi masyarakat merupakan upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penguatan infrastruktur, layanan, serta partisipasi publik dalam kegiatan literasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Gorontalo Utara tahun 2024 lebih rendah dibandingkan Provinsi Gorontalo, dengan keunggulan pada komponen “Pemerataan layanan perpustakaan” dan “Pemerataan koleksi perpustakaan” dibanding Provinsi Gorontalo. Tantangan utama terletak pada meningkatkan minat kunjungan dan optimalisasi layanan untuk mendorong literasi yang lebih inklusif. Capaian kinerja IPLM Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023/2024

No.	Komponen	Nilai Gorontalo Utara 2023	Nilai Provinsi Gorontalo 2023	Nilai Gorontalo Utara 2024	Nilai Provinsi Gorontalo 2024
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,463	0,432	0,5116	0,4969
2	Pemerataan koleksi perpustakaan	0,447	0,430	0,4295	0,3654
3	Pemerataan tenaga perpustakaan	0,991	1,000	1	1
4	Tingkat kunjungan pemustaka	0,045	0,064	0,1423	0,5600
5	Perpustakaan ber-SNP	1	1	1	1
6	Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan	1	1	1	1
7	Jumlah pemustaka	1	1	1	1
Nilai IPLM		70,6889	70,3927	72,62	77,46

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, diolah

Gambar 2.28
IPLM Kabupaten/Kota Tahun 2023/2024 di Provinsi Gorontalo



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), diolah

IPLM Gorontalo Utara di peringkat keempat dari enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo salah satunya diakibatkan tingkat kunjungan perpustakaan yang menjadi faktor penghambat. Upaya peningkatan aksesibilitas layanan literasi dan sosialisasi program edukasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan minat baca dan memperkuat posisi literasi di wilayah tersebut.

2.1.3.3.5 Indeks Literasi Digital

Pada tahun 2025, Indonesia memiliki jumlah pengguna internet setidaknya 79,5 persen dari jumlah penduduk, setara 221,56 juta jiwa (goodstats.id, 2025), artinya lebih dari 2 dari 3 orang Indonesia kini *online*, bahkan angkanya akan terus mengalami kenaikan, seiring penetrasi gawai semakin dalam terutama dari perangkat telepon genggam. Kemampuan masyarakat dan kesempatan akses media digital membawa pengaruh pada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi digital, dengan adanya peningkatan jumlah pengguna loka pasar di Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia, dan akan terus naik hingga 245 juta pengguna di tahun 2027 (context.id, 2025).

Literasi digital dianggap memegang peran penting dalam pembangunan. Menurut UNESCO (2018), kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan, melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan

informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

Namun, kehadiran media digital tidak selalu berdampak positif. Beberapa tantangan media digital menjadi masalah serius, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau aktivitas digital yang merugikan lainnya. Salah satu penyebabnya yakni kurangnya kesadaran keamanan siber karena rendahnya kemampuan literasi digital (UNESCO, 2018b).

Guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti yang valid untuk peningkatan tingkat literasi digital penduduk Indonesia, diperlukan satu studi agar dapat mengukur kemampuan literasi digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis Indeks Literasi Digital (ILD) sebagai gambaran umum tentang pola penggunaan teknologi dan media digital masyarakat Indonesia dengan terdiri dari empat pilar: *digital skill*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*. Indeks ini memang masih belum menunjukkan tingkat



pemanfaatan teknologi digital di Gorontalo Utara, namun diharapkan dapat dilihat gambaran secara umum dari capaian Provinsi Gorontalo karena struktur sosial ekonomi dan pendidikan relatif serupa.

ILD nasional secara tren meningkat. Pada tahun 2021, ILD Gorontalo sempat memperoleh peringkat nomor 5 tertinggi nasional meski masih di kriteria “Sedang”. Namun di tahun 2022, termasuk mengalami penurunan tertinggi diantara provinsi lainnya dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, sebesar 0,26 (selain Kepulauan Bangka Belitung (0,36) dan Sulawesi Barat (0,24)). Gambaran capaian ILD 15 besar nasional sebagaimana Tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118
Provinsi 15 Besar ILD Tahun 2021 dan 2022

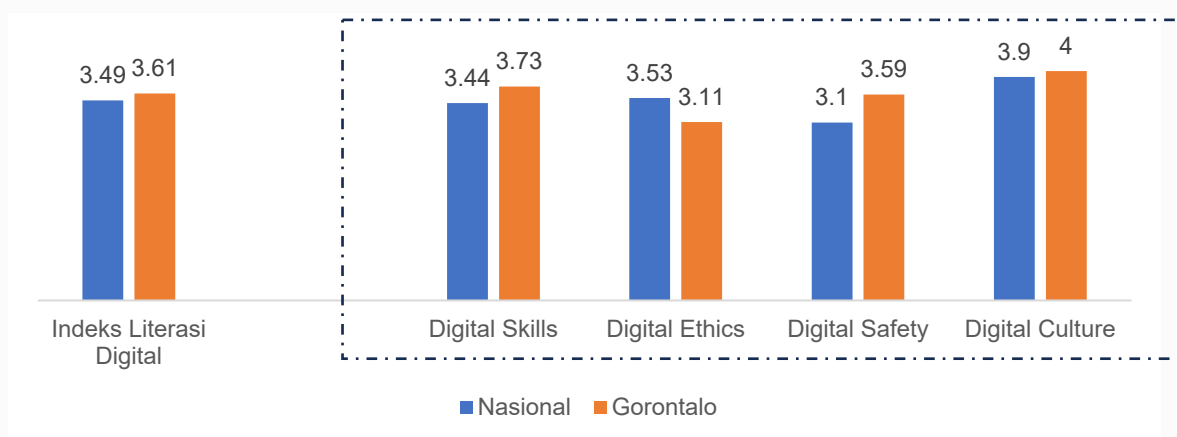
Peringkat	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,71	DI Yogyakarta	3,64
2	Kepulauan Riau	3,68	Kalimantan Barat	3,64
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Sumatra Barat	3,61	Papua Barat	3,62
5	Gorontalo	3,61	Jawa Tengah	3,61
6	Papua Barat	3,61	Kalimantan Tengah	3,60
7	Nusa Tenggara Timur	3,60	Jawa Barat	3,60
8	Kalimantan Barat	3,58	DKI Jakarta	3,59
9	DI Aceh	3,57	Kepulauan Riau	3,59
10	Kalimantan Utara	3,57	Jawa Timur	3,58
11	Sulawesi Barat	3,57	Sulawesi Tenggara	3,57
12	Kepulauan Bangka Belitung	3,57	Papua	3,55
13	Jawa Timur	3,55	Bengkulu	3,55
14	Sulawesi Utara	3,53	Maluku	3,54
15	Lampung	3,52	Jambi	3,54
Skor ILD 2021		3,49	Skor ILD 2022	3,54

Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia 2022 (Kemenkominfo), 2022

ILD Provinsi Gorontalo di tahun 2021 masih tinggi ditunjang oleh tingginya skor budaya digital, kemampuan digital, dan keamanan digital yang jauh di atas capaian nasional meskipun keduanya sama-sama masih berada di kriteria “Sedang”. Sedangkan pada tahun berikutnya, hanya pilar keamanan digital yang capaiannya di atas nasional sehingga secara agregat nilainya di bawah nasional. Gambaran per pilar ILD di Gorontalo dan Nasional pada tahun 2021 disajikan pada Grafik 2.39, dan tahun 2022 pada Grafik 2.40.

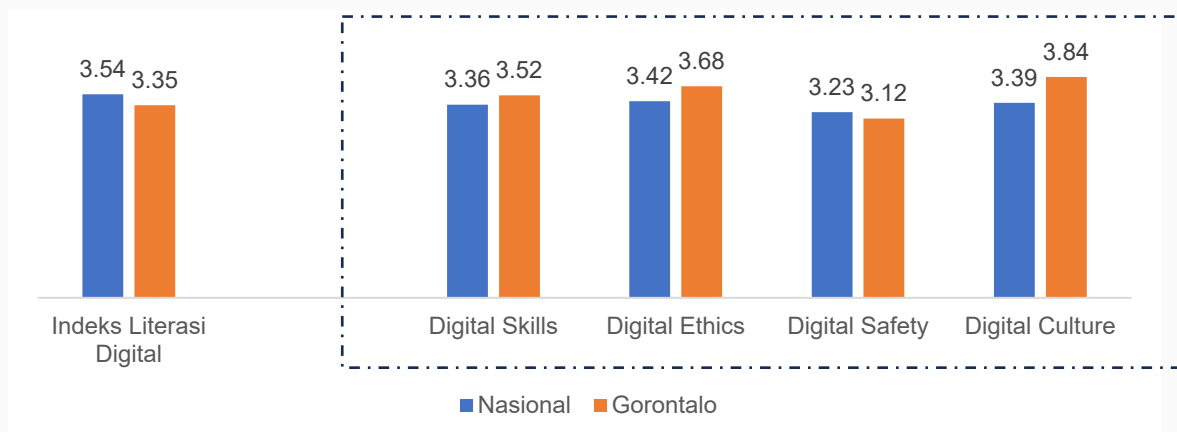
Grafik 2.39

ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021



Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia 2022 (Kemenkominfo), 2022

Grafik 2.40
ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022



Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia 2023 (Kemenkominfo), 2023

2.1.3.3.6 Indeks Tingkat Kegemaran Membaca

Indeks Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar minat dan kebiasaan membaca yang dimiliki oleh masyarakat yang disusun oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dengan tujuan untuk mengukur budaya literasi masyarakat secara kuantitatif.

Indeks TGM sangat penting karena tingginya minat baca akan berkorelasi dengan peningkatan mutu pendidikan, tumbuhnya masyarakat yang kritis, kreatif, dan adaptif, serta mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Di level global, negara-negara dengan indeks membaca tinggi cenderung memiliki tingkat inovasi dan produktivitas yang lebih baik, sehingga masyarakat yang gemar membaca adalah pondasi bagi suatu daerah yang cerdas, berdaya saing, dan berkembang. Sebaliknya, rendahnya TGM menjadi tantangan besar, terutama di wilayah terpencil atau dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) rendah.

Berdasarkan survei tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Gorontalo berada pada kategori “Sedang”, dengan rata-rata TGM berada di rentang 55–67 poin. Meskipun seluruh wilayah menunjukkan frekuensi dan durasi membaca yang seragam, terdapat perbedaan skor indeks yang cukup signifikan antar daerah.

TGM Kabupaten Gorontalo Utara berada pada peringkat kedua tertinggi di Provinsi Gorontalo setelah Kabupaten Pohuwato. Skor ini menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki antusiasme yang tinggi dalam kegiatan membaca, melebihi rata-rata provinsi.

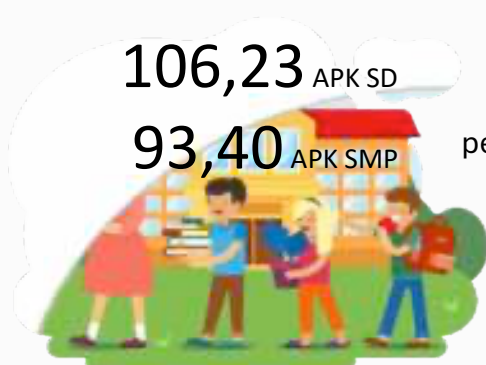
Tabel 2.119
Indeks Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Frekuensi Membaca (/minggu)	Durasi Membaca (/hari)	Jumlah Buku Dibaca (/bulan)	Frekuensi Akses Internet (/minggu)	Durasi Akses Internet (/hari)	Indeks TGM
1	Boalemo	3-4	01.00-01.59	3-4	3-4	01.00-01.59	55,99
2	Gorontalo	3-4	01.00-01.59	3-4	3-4	01.00-01.59	60,39
3	Pohuwato	3-4	01.00-01.59	3-4	5-6	01.00-01.59	66,87
4	Bone Bolango	3-4	01.00-01.59	3-4	3-4	01.00-01.59	61,27
5	Gorontalo Utara	3-4	01.00-01.59	3-4	3-4	01.00-01.59	65,64
6	Kota Gorontalo	3-4	01.00-01.59	3-4	3-4	01.00-01.59	61,14
Nilai Provinsi Gorontalo		3-4	01.00-01.59	3-4	3-4	01.00-01.59	62,43

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, diolah

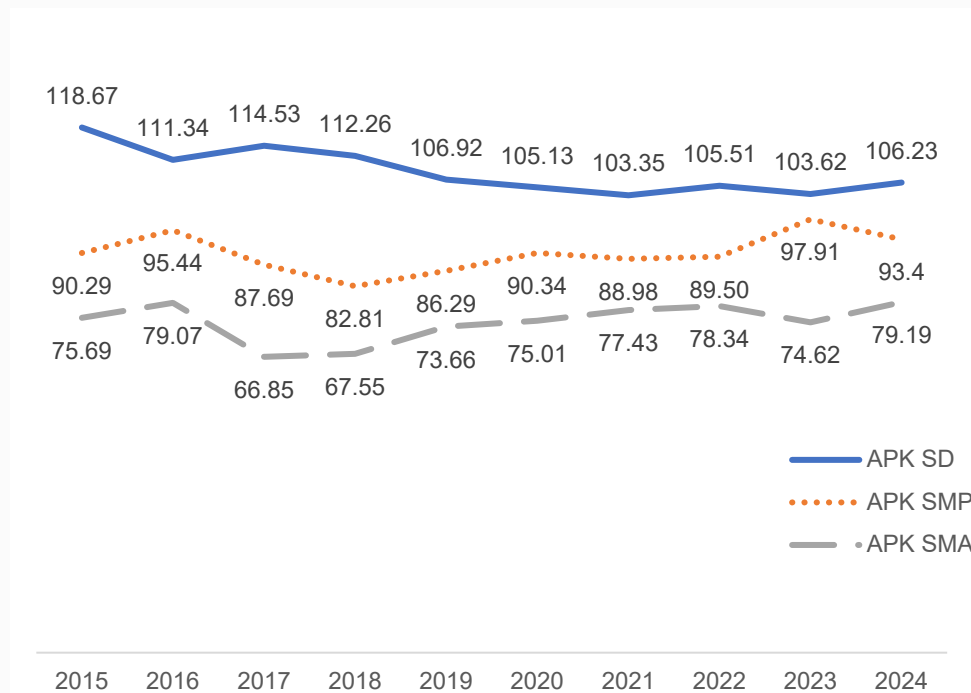
Dari tabel di atas, secara umum dapat diinterpretasikan bahwa ada konsistensi frekuensi membaca dan durasi waktu yang menunjukkan kebiasaan literasi yang baik dan stabil. Selain itu jumlah buku yang dibaca per bulan mengindikasikan minat baca yang cukup tinggi, dan bila didukung dengan akses terhadap buku digital berpotensi semakin meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa ekosistem literasi di Gorontalo Utara berkembang dengan baik, serta memiliki potensi yang besar untuk terus ditingkatkan melalui penguatan layanan perpustakaan, literasi digital, dan program pelibatan komunitas/masyarakat.

2.1.3.3.7 Angka Partisipasi Kasar (APK)



APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Capaian APK Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2015-2024 dapat ditunjukkan oleh Grafik 2.41 berikut.

Grafik 2.41
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2024



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2016-2025

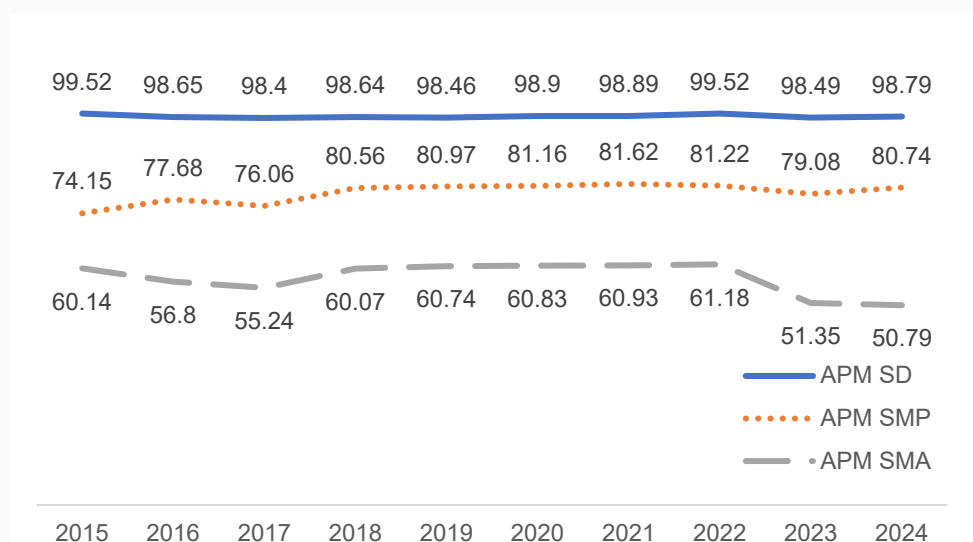
Berkaca pada Grafik 2.41, Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan perjalanan fluktuatif dengan kecenderungan perbaikan dalam lima tahun terakhir. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), APK selalu berada di atas 100 persen, yang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar sangat luas, termasuk bagi anak-anak usia non-standar SD. Untuk jenjang SMP, angkanya meningkat signifikan pada tahun 2023, meskipun sedikit turun pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan menengah pertama mengalami kemajuan signifikan. Sementara itu, APK SMA masih menjadi tantangan, dengan angka partisipasi yang sempat menyentuh titik terendah di tahun 2017 dan perlahan trennya meningkat, yang menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan menengah atas, meskipun intervensi kebijakan dan fasilitas perlu diperkuat agar lebih banyak siswa dapat melanjutkan ke jenjang SMA.

Secara keseluruhan, Gorontalo Utara telah menunjukkan tren positif dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya pada jenjang SMP dan SMA, sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.3.8 Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat capaian pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. APM di Indonesia semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kecenderungan penduduk bersekolah tidak tepat waktu/tidak pada umurnya.

Grafik 2.42
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2024



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2016-2025

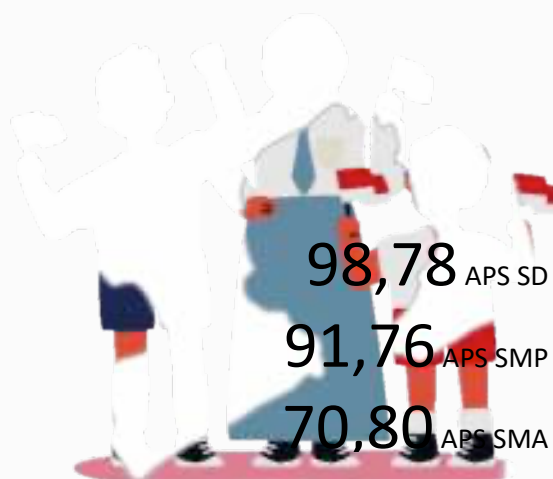
Merujuk Grafik 2.42, data Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2015–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik di jenjang pendidikan dasar, namun masih menghadapi tantangan besar pada jenjang pendidikan menengah atas.

APM pada jenjang SD secara konsisten berada di atas 98 persen, artinya hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah mengakses pendidikan dasar secara tepat waktu, yang merupakan indikator kuat dari keberhasilan akses dan pemerataan pendidikan dasar di wilayah ini. Sementara itu, pada jenjang SMP, menunjukkan tren stabil dan positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan angka tertinggi pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, angkanya tetap mencerminkan ketersediaan akses pendidikan yang cukup baik bagi anak usia SMP. Tantangan paling nyata terlihat pada jenjang SMA, dengan APM yang cenderung rendah dan fluktuatif. Setelah sempat mencapai 61,18 persen pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan ke 50,79 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan masih banyak remaja usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan menengah atas secara tepat waktu, yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, atau pilihan bekerja/migrasi.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah berhasil dalam penyediaan pendidikan dasar, namun perlu memperkuat kebijakan dan program afirmatif untuk meningkatkan partisipasi murni di jenjang SMP dan SMA, termasuk penyediaan beasiswa, layanan transportasi pendidikan, dan perluasan akses sekolah menengah di wilayah terpencil.

2.1.3.3.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator lain yang dapat digunakan sebagai ukuran perkembangan pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini dapat dijadikan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin



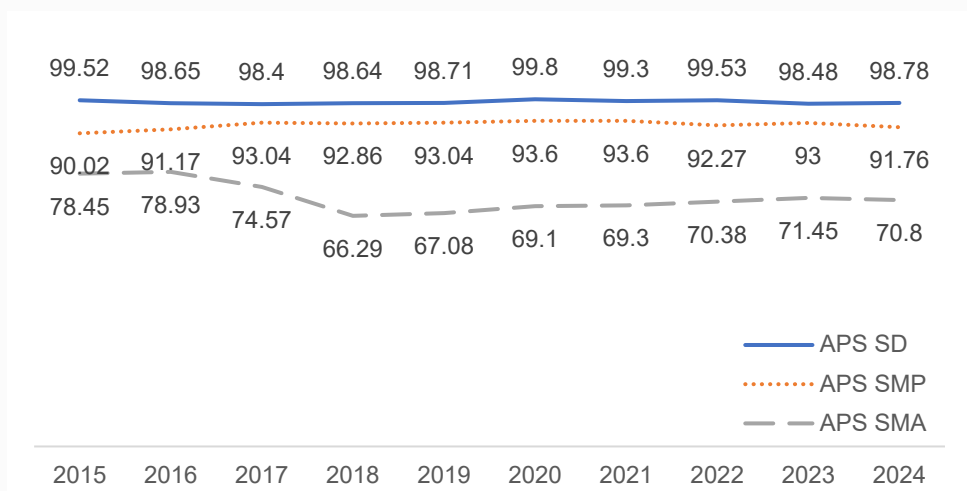
tinggi APS, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Hal ini

dipengaruhi pula oleh budaya dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Mencermati tren APS penduduk Gorontalo Utara di tiga jenjang sebagaimana Grafik 2.66, terlihat memiliki pola tertentu pada setiap kelompok umurnya. Capaian APS Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar telah mencapai hampir universal, dengan persentase di atas 98 persen secara konsisten, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin akses sekolah bagi seluruh anak usia sekolah dasar. Sedangkan pada jenjang SMP, meskipun angka APS tetap cukup tinggi (rata-rata di atas 92 persen), masih terdapat celah partisipasi yang perlu diperhatikan, terutama pada tren menurun dalam tiga tahun terakhir. Ini menjadi indikasi bahwa perhatian terhadap transisi dari SD ke SMP dan penanganan anak putus sekolah harus lebih diperkuat. Sementara itu, APS SMA masih menjadi tantangan terbesar, dengan angka yang belum pernah menembus 75 persen. Di tahun 2024 pun, APS SMA hanya 70,8 persen, yang artinya hampir sepertiga remaja usia sekolah tidak terlibat dalam pendidikan formal. Hal ini memerlukan pendekatan khusus seperti program beasiswa untuk siswa kurang mampu, penyediaan sekolah menengah di daerah terpencil, atau penguatan pendidikan vokasi atau jalur alternatif belajar.

Dengan demikian, jika melihat capaian kinerja APS dari tiga jenjang pendidikan tersebut, secara keseluruhan akses pendidikan dasar dan menengah pertama sudah baik, namun perlu strategi khusus dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi di jenjang menengah atas.

Grafik 2.43
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2024



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2016-2025

2.1.3.3.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang PAUD

Di Gorontalo Utara, PAUD yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dasar yang berkualitas bagi anak-anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), *Raudhatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (Kober) atau bentuk lain yang sederajat. Informasi mengenai entitas jenjang ini disampaikan pada Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120
Cakupan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	APS jenjang PAUD/ sederajat	60,04	80,00	80,05	84,81
2	Kategori		Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Dari Tabel 2.110 dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun cakupannya di dua tahun terakhir sudah tinggi, namun faktanya masih ada sekitar 20 persen anak usia PAUD yang tidak mengenyam pendidikan bagi usia dini. Namun membandingkan kinerja tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

menandakan adanya intervensi kebijakan atau program yang efektif dari pemerintah daerah maupun dukungan dari masyarakat meskipun tren peningkatannya mulai melambat.

2.1.3.3.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan

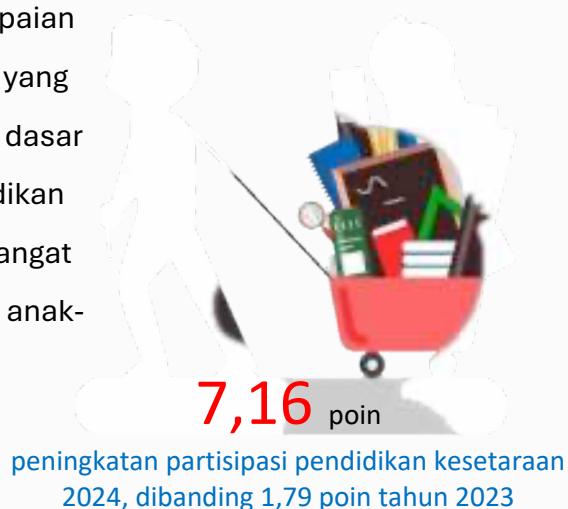
APS kesetaraan khusus usia 7-18 tahun di Gorontalo Utara masih berada di kategori rendah, meskipun terus naik, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan akses terhadap pendidikan alternatif, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang tidak tertampung di jalur formal. Secara rinci digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.121
APS Pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	APS pendidikan kesetaraan	11,93	12,65	14,44	21,06
2	Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa capaian keikutsertaan penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah melalui pendidikan kesetaraan/Paket A, B, dan C masih sangat rendah, yang menunjukkan mayoritas anak-anak usia sekolah yang seharusnya dapat mengakses jalur pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya



terjangkau. Urgensi data ini perlu menjadi prioritas, dan diprediksi dapat berdampak negatif terhadap peningkatan indeks pendidikan Gorontalo Utara, khususnya pada rata-rata lama sekolah. Oleh sebab itu, isu ini menjadi cukup strategis untuk ditangani di waktu mendatang guna peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Gorontalo Utara.

2.1.3.3.12 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, atau SMA),

dihitung dari rasio jumlah siswa putus sekolah dalam satu tahun ajaran terhadap total siswa pada jenjang tersebut. Indikator ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam mempertahankan partisipasi siswa, yang disebabkan oleh faktor ekonomi (kemiskinan, kebutuhan bekerja), sosial (pernikahan dini, kurangnya dukungan keluarga), geografis (jarak sekolah jauh), atau kualitas pembelajaran (kurang menariknya metode pengajaran). Tingginya angka putus sekolah, terutama di jenjang SMA (seperti di Gorontalo Utara dengan APM SMA sekitar 50 persen), berisiko memperluas ketimpangan sosial, mengurangi daya saing SDM, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Penanganannya memerlukan intervensi multidimensi, seperti program beasiswa, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, serta kolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal.

Berkaca dari Tabel 2.108 menunjukkan penurunan angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2024. Meski persentase turun, jumlah absolutnya meningkat, mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi usia sekolah. Di jenjang SMP/MTs, terjadi penurunan signifikan angka putus sekolah dari data tahun 2020 dibandingkan tahun 2024. Namun, pada tahun 2024, terjadi kenaikan persentase yang menandakan perlunya evaluasi kebijakan pencegahan putus sekolah. Peningkatan jumlah siswa putus SD/MI secara absolut, meski persentase turun, menuntut pemetaan wilayah rawan putus sekolah dan penguatan program bantuan operasional sekolah (BOS) serta pendampingan keluarga miskin. Penurunan angka putus SMP/MTs mencerminkan efektivitas intervensi seperti program, tetapi kenaikan 2024 menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan distribusi bantuan dan penanganan faktor penghambat seperti aksesibilitas sekolah di daerah terpencil. Gambaran secara *time series* angka putus sekolah yang digambarkan dari partisipasi sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara dicantumkan pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122
Angka Putus Sekolah

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka putus sekolah SD/MI	0,20	0,23	0,10	0,10	0,09
2	Jumlah anak putus sekolah SD/MI	26	28	47	44	43
3	Angka putus sekolah SMP/MTs	1,89	1,86	0,09	0,08	0,18
4	Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs	117	110	33	30	29

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2025

Berdasarkan data Partisipasi Sekolah Per Kelompok Umur Menurut Jenis Gender Tahun 2024 di Gorontalo Utara, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pendidikan pada kelompok usia muda (7-12 dan 13-15 tahun) sangat tinggi, ditunjukkan dengan persentase "Masih Sekolah" yang mencapai lebih dari 87,98% untuk semua kategori, dengan partisipasi terbaik pada kelompok perempuan usia 13-15 tahun (97,16%). Namun, terjadi penurunan partisipasi yang signifikan seiring meningkatnya usia, khususnya pada kelompok 16-18 tahun dan 19-24 tahun, di mana persentase "Tidak Sekolah Lagi" mendominasi, tertinggi pada laki-laki usia 19-24 tahun (79,15%). Secara keseluruhan (Gabungan), mayoritas penduduk (70,70%) masih bersekolah, namun masih terdapat 27,97% yang tidak lagi bersekolah, yang mengindikasikan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah atas dan perguruan tinggi.

Tabel 2.123
Partisipasi Sekolah Per Kelompok Umur Menurut Jenis Gender Tahun 2024

No		Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2024		
			Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
1	Laki-laki	7-12 tahun	1,21	98,79	0,00
		13-15 tahun	3,21	87,98	8,82
		16-18 tahun	0,85	68,04	31,11
		19-24 tahun	0,45	20,40	79,15
		Sub Total	1,39	68,75	29,86
2	Perempuan	7-12 tahun	0,36	98,79	0,85
		13-15 tahun	0,81	97,16	2,03
		16-18 tahun	3,98	73,22	22,81
		19-24 tahun	0,93	22,24	76,83
		Sub Total	1,26	72,73	26,01

No	Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2024		
		Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
3	Gabungan	7-12 tahun	0,76	98,79
		13-15 tahun	2,22	91,77
		16-18 tahun	2,52	70,80
		19-24 tahun	0,68	21,28
		Sub Total	1,33	70,70
				27,97

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

2.1.3.3.13 Ketersediaan Sekolah Pendidikan Kesetaraan

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki 8 lembaga pendidikan kesetaraan yang tersebar di 7 kecamatan, meliputi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Hampir seluruh kecamatan memiliki minimal satu lembaga yang menunjukkan upaya pemerataan akses pendidikan nonformal untuk masyarakat yang tidak terjangkau sistem sekolah formal. Namun, jumlah ini masih kurang jika dibandingkan banyaknya kecamatan, luas wilayah, dan kebutuhan populasi, terutama di daerah terpencil. Keberadaan lembaga ini menjadi krusial untuk menjangkau kelompok putus sekolah, pekerja, atau masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, tetapi perlu penguatan kapasitas lembaga, penambahan sarana, dan sosialisasi program agar lebih efektif mengurangi kesenjangan pendidikan. yang rinciannya pada Tabel 2.124 berikut.

Tabel 2.124
Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024

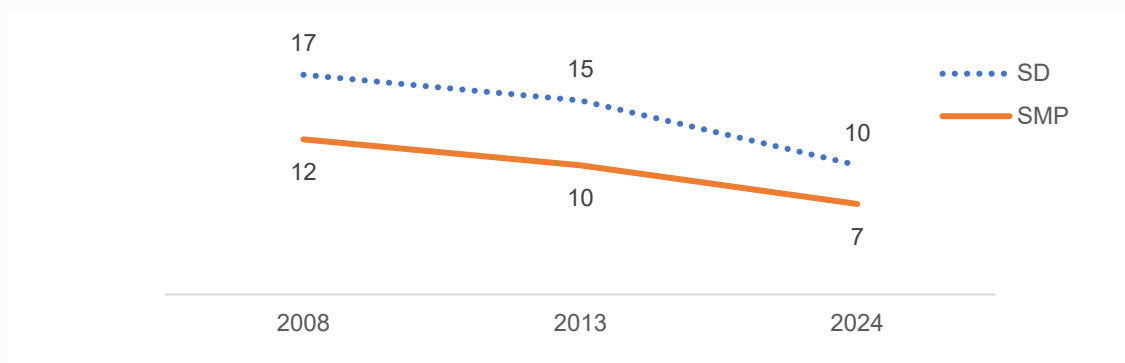
No.	Kecamatan	Lembaga Pendidikan Kesetaraan
1	Atinggola	SKB Atinggola
2	Kwandang	PKBM Budi Mulia
3		SKB Kwandang
4	Sumalata	PKBM Tunas Harapan
5	Sumalata Timur	PKBM Insan Cipta
6	Tolinggula	PKBM Mutiara
7		PKBM Mutiara Ilmu
8	Gentuma Raya	PKBM Panorama
9	Tomilito	PKBM Helumo

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

2.1.3.3.14 Rasio Guru dan Murid

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi siswa khususnya kemampuan literasi dan numerasi. Rasio guru-murid adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa di suatu jenjang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, rasio ideal guru-murid jenjang SD sebanyak 1:20–1:28 dan SMP 1:20–1:32. Aturan ini bertujuan memastikan kualitas pembelajaran melalui pendampingan yang memadai. Dalam kurun sedekade lebih terakhir, rasio guru-murid masih berada pada kategori ideal, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Grafik 2.44
Tren Rasio Guru-Murid



Sumber: Kabupaten Gorontalo dalam Angka (BPS), 2009-2025

Berdasarkan data tahun ajaran 2024/2025, rasio guru-murid SD/MI di Kabupaten Gorontalo Utara secara agregat adalah 1:10 (1 guru melayani 10 siswa), yang masuk dalam batas standar nasional (maksimal 1:28). Namun, terdapat ketimpangan antar kecamatan: Atinggola (1:8) dan Ponelo Kepulauan (1:8) memiliki rasio sangat rendah, menunjukkan kelebihan guru, sementara Biau (1:14) dan Tomilito (1:13) mendekati batas ideal. Kelebihan

1:10
rasio guru-siswa jenjang SD/MI
1:7
rasio guru-siswa jenjang SMP/MTs



guru di wilayah seperti Atinggola berpotensi menciptakan inefisiensi anggaran, sedangkan rasio di Biau memerlukan redistribusi guru untuk menghindari beban kerja berlebih. Solusi prioritas meliputi penggabungan kelas di sekolah dengan siswa minim dan realokasi guru ke daerah defisit.

Sedangkan Rasio SMP/MTs secara agregat adalah 1:7 (1 guru melayani 7 siswa), jauh di bawah batas maksimal standar nasional (1:32). Kecamatan seperti Monano (1:6) dan Tolinggula (1:6) memiliki rasio sangat rendah, mengindikasikan kelebihan guru yang tidak proporsional. Di sisi lain, Anggrek (1:7) dan Biau (1:9) meski rasio lebih tinggi, tetap memerlukan optimalisasi karena ketiadaan guru MTs. Kelebihan guru di wilayah seperti Monano berisiko membebani anggaran, sementara minimnya guru MTs di Anggrek menghambat kualitas pembelajaran. Solusi strategis mencakup peningkatan jam mengajar, alih fungsi guru ke tugas non-akademik, dan rekrutmen guru MTs di wilayah tanpa layanan madrasah.

Tabel 2.125
Rasio Guru dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama
Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2024/2025

No.	Wilayah	Jenjang SD/MI						Jenjang SMP/MTs						Rasio
		Siswa SD	Siswa MI	Jumlah Siswa SD/MI	Guru SD	Guru MI	Jumlah Guru SD/MI	Siswa SMP	Siswa MTs	Jumlah Siswa SMP/MTs	Guru SMP	Guru MTs	Jumlah Guru SMP/MTs	
1	Kwandang	2.734	299	3.033	235	28	263	1.124	277	1.401	130	32	162	9
2	Anggrek	1.522	208	1.730	171	12	183	9	574	0	574	78	0	78
3	Sumalata	1.236	63	1.299	117	6	123	493	57	550	61	8	69	8
4	Atinggola	1.142	87	1.229	151	11	162	471	152	623	76	29	105	6
5	Tomilito	790	262	1.052	64	17	81	251	55	306	37	6	43	7
6	Gentuma Raya	1.090	54	1.144	95	7	102	316	158	474	48	20	68	7
7	Monano	649	134	783	75	7	82	218	101	319	47	11	58	6
8	Ponelo Kepulauan	421	0	421	53	0	53	186	0	186	25	0	25	7
9	Tolinggula	1.131	107	1.238	115	15	130	463	96	559	80	10	90	6
10	Sumalata Timur	725	206	931	83	11	94	327	0	327	41	0	41	8
11	Biau	651	0	651	48	0	48	253	0	253	28	0	28	9
Total		12.091	1.420	13.511	1.207	114	1.321	4.676	896	5.572	651	116	767	7

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Dengan berbagai informasi di atas, secara umum, rasio guru-murid SD/MI dan SMP/MTs di Gorontalo Utara memenuhi standar nasional, tetapi ketimpangan antarwilayah dan kelebihan guru di beberapa kecamatan menuntut intervensi kebijakan. Untuk SD/MI, redistribusi guru dari daerah berlebih (Atinggola dan Ponelo Kepulauan) ke daerah defisit (Biau) menjadi kunci efisiensi. Sementara di SMP/MTs, optimalisasi peran guru dan rekrutmen strategis diperlukan untuk mengatasi ketiadaan guru MTs. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, LPTK) juga penting untuk menciptakan sistem pendidikan

yang merata, efisien, dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, Gorontalo Utara dapat memanfaatkan sumber daya guru secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

2.1.3.3.15 Rasio Ketersediaan Sekolah

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan dapat memberantas buta huruf.

Rasio ketersediaan sekolah dan murid diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, yang menetapkan bahwa setiap sekolah harus melayani jumlah siswa sesuai kapasitas infrastruktur dan wilayah layanan. Standar ini mencakup rasio ideal sekolah per jumlah penduduk usia sekolah, misalnya:

- SD/MI: 1 sekolah melayani minimal 420 penduduk usia 7–12 tahun di perkotaan atau 210 penduduk di perdesaan.
- SMP/MTs: 1 sekolah melayani minimal 1.200 penduduk usia 13–15 tahun di perkotaan atau 600 penduduk di perdesaan.

Tujuan rasio ini adalah memastikan efisiensi layanan pendidikan, menghindari sekolah dengan jumlah siswa terlalu sedikit (berpotensi menutup sekolah) atau terlalu padat (berdampak pada kualitas pembelajaran). Jika rasio tidak terpenuhi, pemerintah wajib melakukan penyesuaian zonasi sekolah, pembangunan unit sekolah baru, atau merger sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya. Data di lapangan harus diselaraskan dengan kebijakan ini agar pemerataan akses pendidikan tercapai. Berdasarkan data tahun ajaran 2024/2025, rasio sekolah dan murid SD/MI menunjukkan kecukupan

infrastruktur pendidikan dasar, tetapi dengan ketimpangan antar kecamatan. Misalnya, di Kwandang, rasio sekolah-murid adalah 1:112 (1 sekolah melayani 112 siswa), jauh di bawah standar nasional (1:210 untuk pedesaan), mengindikasikan sekolah di wilayah ini mampu menampung siswa dengan baik. Namun, di Ponelo Kepulauan, rasio hanya 1:70 (1 sekolah:70 siswa), menunjukkan kelebihan sekolah yang berpotensi pemborosan anggaran. Sementara itu, Anggrek dengan rasio 1:91 (1 sekolah:91 siswa) masih dalam batas ideal. Ketimpangan ini menuntut kebijakan seperti merger sekolah di kecamatan dengan rasio terlalu rendah (misal Ponelo Kepulauan) dan penambahan ruang kelas di wilayah padat siswa (misal Kwandang) untuk efisiensi sumber daya. Pada jenjang SMP/MTs, rasio sekolah-murid di Gorontalo Utara juga lebih baik dari standar nasional (1:600 untuk pedesaan). Contohnya, Kwandang memiliki rasio 1:156 (1.401 siswa:9 sekolah), sementara Anggrek mencapai 1:115 (574 siswa:5 sekolah). Namun, ketiadaan MTs di beberapa kecamatan seperti Anggrek dan Sumalata Timur menyebabkan layanan pendidikan tidak merata, terutama untuk siswa yang memilih madrasah. Di sisi lain, Monano dengan rasio 1:64 (319 siswa:5 sekolah) menunjukkan kelebihan fasilitas yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan penyesuaian zonasi sekolah, pengalihan fungsi sekolah kurang diminati menjadi pusat keterampilan, atau penambahan guru MTs di daerah tanpa layanan madrasah. Secara umum, rasio sekolah-murid SD/MI dan SMP/MTs di Gorontalo Utara memenuhi standar nasional, tetapi terdapat ketimpangan signifikan antar kecamatan. Untuk SD/MI, prioritasnya adalah redistribusi sumber daya melalui merger sekolah di wilayah berlebih (Ponelo Kepulauan) dan penambahan kelas di daerah padat (Kwandang). Di SMP/MTs, fokus pada pemerataan layanan MTs dan optimalisasi penggunaan sekolah yang *underutilized*. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk menyusun peta zonasi sekolah yang adaptif, memastikan akses pendidikan merata tanpa mengorbankan efisiensi anggaran. Dengan langkah ini, Gorontalo Utara dapat mencapai

pemerataan pendidikan yang berkelanjutan. Secara lebih detail informasi rasio sekolah, dapat dilihat pada Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Murid
Level Dasar dan Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025

No.	Wilayah	Jenjang SD/MI						Jenjang SMP/MTs							
		Siswa SD	Siswa MI	Jumlah Siswa SD/MI	Sekolah SD	Sekolah MI	Jumlah Sekolah SD/MI	Rasio	Siswa SMP	Siswa MTs	Jumlah Siswa SMP/MTs	Sekolah SMP	Sekolah MTs	Jumlah Sekolah SMP/MTs	Rasio
1	Kwandang	2.734	299	3.033	25	2	27	112	1.124	277	1.401	7	2	9	156
2	Anggrek	1.522	208	1.730	18	1	19	91	574	0	574	5	0	5	115
3	Sumalata	1.236	63	1.299	14	1	15	87	493	57	550	4	1	5	110
4	Atinggola	1.142	87	1.229	17	1	18	68	471	152	623	6	1	7	89
5	Tomilito	790	262	1.052	7	3	10	105	251	55	306	3	1	4	77
6	Gentuma Raya	1.090	54	1.144	10	1	11	104	316	158	474	4	1	5	95
7	Monano	649	134	783	9	1	10	78	218	101	319	4	1	5	64
8	Ponelo Kepulauan	421	0	421	6	0	6	70	186	0	186	2	0	2	93
9	Tolinggula	1.131	107	1.238	15	2	17	73	463	96	559	6	1	7	80
10	Sumalata Timur	725	206	931	10	1	11	85	327	0	327	3	0	3	109
11	Biau	651	0	651	7	0	7	93	253	0	253	2	0	2	127
Total		12.091	1.420	13.511	138	13	151	89,48	4.676	896	5.572	46	8	54	103,2

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam tiga kondisi, yaitu baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Tabel 2.127 berikut adalah gambaran kondisi ruang kelas di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.127
Kondisi Ruang Kelas

No.	Uraian Kondisi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
1	Rusak Berat				
	PAUD	33	30	5	0
	SD	73	66	5	0
	SMP	15	10	3	0
2	Rusak Sedang				
	PAUD	10	10	74	0
	SD	43	43	583	0
	SMP	8	8	162	0
3	Baik + Rusak Ringan				
	PAUD	231	228	145	366
	SD	693	649	310	964
	SMP	223	217	116	366

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, 2024

Berdasarkan Tabel 2.116 di atas, ruang kelas tahun 2023 ternyata pada semua jenjang pendidikan memiliki ruang kelas yang rusak ringan, namun jika dilihat perbandingannya dibanding tahun 2021, telah banyak perbaikan yang dilakukan sehingga angka kerusakan ringan dapat ditekan. Untuk itu, penganggaran di tahun-tahun mendatang diupayakan untuk fokus melakukan pemeliharaan gedung sekolah yang berstatus rusak ringan ini.

2.1.3.3.16 Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi “B”

Berdasarkan tingkat akreditasinya, sebagian besar PAUD yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI telah dilakukan sertifikasi, meskipun dengan status akreditasi “B”, masih berkategori rendah sesuai Rapor Pendidikan di tahun 2025. Akreditasi B menunjukkan bahwa lembaga PAUD telah memenuhi standar kualitas dalam aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan manajemen. Rincian dengan rincian sebagaimana Tabel 2.128 berikut.

Tabel 2.128
Cakupan Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase lembaga yang sudah terakreditasi minimal B	58,12	59,07	67,34	65,65

Sumber: Rapor Pendidikan, 2025

Akreditasi menjadi penting karena kualitas satuan pendidikan PAUD dalam memenuhi delapan standar nasional pendidikan ditunjukkan melalui nilai akreditasi PAUD tersebut. Data diatas menggambarkan bahwa masih terdapat sekitar 35 persen PAUD belum terakreditasi “B” yang menunjukkan kualitas pemenuhan delapan standar nasional pendidikan belum optimal. Data dan fakta di atas menjadi penting untuk menjadi pertimbangan perbaikan kualitas pembangunan pendidikan Gorontalo Utara di masa mendatang.

2.1.3.3.17 Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi “A”

Akreditasi "A" menunjukkan sekolah telah memenuhi standar nasional pendidikan tertinggi dalam aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, manajemen, dan hasil belajar. Persentase sekolah yang terakreditasi “A” menggambarkan berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di Gorontalo Utara yang memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan.

Pada 3 tahun terakhir, persentase sekolah terakreditasi “A” jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Gorontalo Utara masih sangat rendah bahkan bertren turun, menegaskan urgensi revitalisasi sekolah dasar dan menengah pertama melalui pelatihan guru, peningkatan sarana-prasarana, dan

pendampingan akreditasi untuk memulihkan kualitas pendidikan sesuai standar nasional. Secara lebih rinci, berikut data persentase sekolah yang memperoleh akreditasi “A”.

Tabel 2.129
Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi “A”

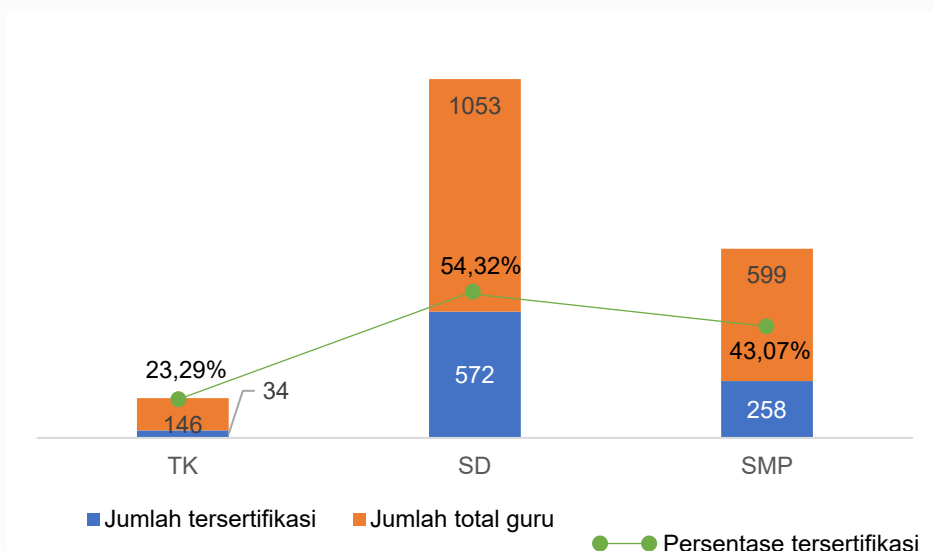
No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sekolah jenjang SD/MI terakreditasi “A”	26	23	13	7
2	Persentase sekolah jenjang SD/MI terakreditasi “A”	18,84	16,67	9,42	5,07
3	Jumlah sekolah jenjang SMP/MTs terakreditasi “A”	6	6	6	5
4	Persentase sekolah jenjang SMP/MTs terakreditasi “A”	17,49	15,85	10,33	6,52

Sumber: Dinas Pendidikan, dikutip dari Badan Akreditasi Nasional, 2025

2.1.3.3.18 Status Guru Tersertifikasi

Jika dilihat dari status sertifikasinya, guru yang kompeten adalah guru yang memiliki sertifikat kompetensi, dan untuk mengukur komposisinya dengan cara membandingkan jumlah guru yang memiliki sertifikasi dibagi dengan jumlah keseluruhan guru. Pada tahun 2023, tingkat sertifikasi guru menunjukkan variasi yang cukup besar antar jenjang pendidikan. Jenjang SD memiliki tingkat sertifikasi tertinggi, sementara jenjang TK memiliki tingkat terendah. Guru bersertifikasi yang berada dalam naungan Kemendikdasmen RI diinformasikan pada Grafik 2.45 berikut.

Grafik 2.45
Guru Tersertifikasi Tahun 2023



Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan, 2023

Masih banyak guru di setiap jenjang yang belum tersertifikasi, terutama di TK dan SMP menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kompetensi dan percepatan program sertifikasi guru untuk menjamin mutu pendidikan yang lebih baik di seluruh jenjang.

2.1.3.3.19 Proporsi Guru PAUD Berkualifikasi S1/D4

Kompetensi guru PAUD menjadi salah satu faktor utama peningkatan mutu pendidikan di jenjang PAUD. Oleh sebab itu, cakupan guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 menjadi salah satu indikator prioritas dari tiga indikator prioritas SPM Pendidikan. Standar ini mencakup kemampuan merancang kurikulum, metode pembelajaran kreatif, serta evaluasi perkembangan anak sesuai tahap tumbuh kembang. Adapun gambaran capaian proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 di Gorontalo Utara saat ini sebagai berikut.

Tabel 2.130
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1/D4

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	72,05	80,65	76,57	76,58

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2024

Tren turun dari tahun 2022 ke 2024 ini berisiko menurunkan kualitas pembelajaran PAUD, terutama dalam pengembangan kurikulum. Untuk pemulihan, diperlukan rekrutmen guru berkualifikasi, beasiswa pendidikan S1/D4, dan pelatihan kompetensi bagi guru non-S1/D4 guna memenuhi standar nasional dan menjamin layanan PAUD yang optimal.

2.1.3.3.20 Proporsi Guru SD/SMP Berkualifikasi Minimal S1/D4

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya perbaikan kualitas guru untuk memperoleh standar kompetensi dalam menunjang aktifitas pendidikan. Salah satu cara untuk memperbaiki nilai tersebut yakni dengan cara meningkatkan standar kualifikasi pendidikan minimal level sarjana/ sederajat. Dengan kualifikasi demikian, diharapkan kualitas ajar terhadap siswa akan meningkat. Berikut gambaran persentase guru yang berkualifikasi sarjana/ sederajat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Tabel 2.131
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Jenjang Sarjana

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs berijazah kualifikasi S1/D-IV	1.261	1.333	1.551
2	Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs	1.534	1.446	1.534
3	Persentase guru SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82,20	92,19	92,25

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2023

Pada tahun terakhir, capaian tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi tingkat sarjana telah jauh meningkat, yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam mendorong peningkatan pengajaran yang berasal dari tenaga ajar yang *qualified*. Hal ini juga didorong oleh program beasiswa bagi guru SD dan SMP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Program ini perlu untuk dilanjutkan di tahun mendatang karena terbukti berhasil, hingga pemenuhan kebutuhan guru dengan kualifikasi S1/D4 dapat terpenuhi holistik.

2.1.3.3.21 Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Sekolah Jenjang SD

Beberapa Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak kalah penting yang mencakup tiga aspek kritis dalam lingkungan sekolah dasar. Pertama, *Iklim Keamanan Sekolah* mengukur tingkat keamanan fisik dan psikologis, termasuk pencegahan kekerasan, penanganan konflik, dan kenyamanan proses belajar. Kedua, *Iklim Kebhinekaan* menilai upaya sekolah dalam mempromosikan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan latar belakang siswa serta mencegah diskriminasi. Ketiga, *Iklim Inklusivitas* mengevaluasi kesiapan sekolah dalam menyediakan lingkungan yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus atau dari kelompok marginal, termasuk aksesibilitas layanan pendidikan. Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur kualitas lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran holistik. Capaian ketiga iklim sekolah tersebut di tingkat sekolah dasar dijabarkan dalam Tabel 2.132 di bawah ini.

Tabel 2.132
Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah
Jenjang Sekolah Dasar

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Iklim keamanan sekolah jenjang SD	59,17	62,79	63,71	65,81
2	Iklim kebhinekaan sekolah jenjang SD	60,01	65,64	69,04	66,65
3	Iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	49,55	53,26	48,60	52,11

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2025

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata iklim sekolah di jenjang SD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 dalam kondisi baik meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Dalam mendorong peningkatan iklim keamanan sekolah, sekolah perlu memperkuat program pencegahan dan penanganan kekerasan termasuk kegiatan antiperundungan, antihukuman fisik, antikekerasan seksual, antinarkoba, antimerokok, dan antiminuman keras. Sedangkan upaya untuk meningkatkan iklim kebhinekaan di sekolah, sekolah perlu memberikan lebih banyak kesempatan untuk murid saling berinteraksi secara positif dengan masyarakat dari beragam latar belakang sosial dan budaya. Sedangkan pada inklusivitas sekolah perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat, orang tua, serta dunia kerja dan industri terkait kebutuhan dan kemampuan murid disabilitas serta Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (CIBI).

2.1.3.3.22 Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMP

Situasi yang hampir sama juga terjadi di jenjang SMP terkait penciptaan iklim keamanan, inklusivitas, serta kebhinekaan di lingkungan sekolah. Hal ini terlihat dari progres capaian dalam setahun terakhir yang mengalami eskalasi nilai hampir di seluruh jenis iklim yang dievaluasi. Adapun detailnya dijabarkan berikut ini.

Tabel 2.122
Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah
Jenjang SMP

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Iklim keamanan sekolah jenjang SMP	63,07	64,14	64,81	67,00
2	Iklim kebhinekaan sekolah jenjang SMP	59,00	65,19	71,31	68,65
3	Iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	51,82	55,21	52,75	52,86

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2025

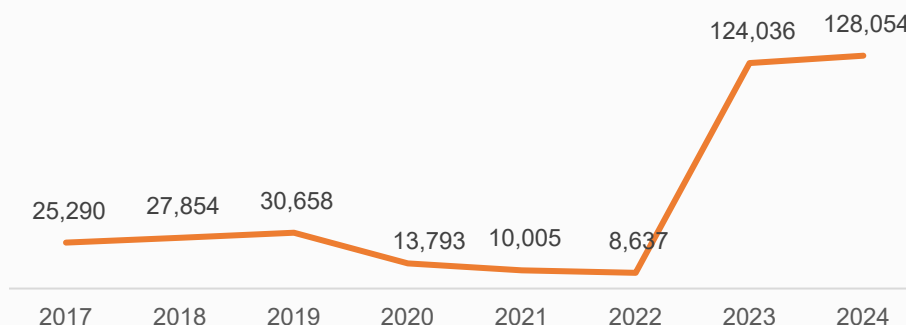
2.1.3.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.3.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan

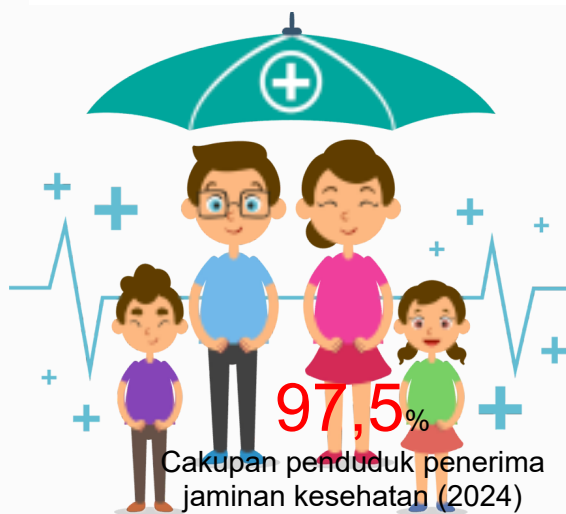
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah sistem jaminan kesehatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, dengan menanggung biaya pengobatan, obat, dan tindakan medis dasar, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Di Kabupaten Gorontalo Utara, peserta Jamkesda menunjukkan transformasi signifikan. Pada tahun 2020-2022 jumlah peserta masih rendah, namun terjadi lonjakan luar biasa pada periode 2023 dan 2024, mencerminkan keberhasilan upaya ekspansi cakupan melalui integrasi data, peningkatan alokasi anggaran, dan sinergi dengan program nasional seperti JKN-KIS. Peningkatan ini menegaskan komitmen Gorontalo Utara dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan dan perlindungan finansial bagi masyarakat. Ke depan, penting untuk mempertahankan momentum ini dengan memperkuat kualitas layanan, edukasi manfaat Jamkesda, serta menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Grafik 2.46 berikut menggambarkan jumlah penerima Jamkesda di Kabupaten Gorontalo Utara.

Grafik 2.46
Peserta Jamkesda (Jiwa)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025



program jaminan kesehatan, dengan dominasi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebesar 77,79 persen, terdiri dari PBI APBN (47,76 persen) dan PBI APBD (30,24 persen), yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada subsidi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sementara itu, peserta Non-PBI hanya 20 persen,

didominasi oleh pekerja penerima upah (15,62 persen), sedangkan pekerja mandiri (0,48 persen) dan bukan pekerja (3,40 persen) masih minim partisipasinya. Meski capaian hampir universal, terdapat 3.284 jiwa (2,50 persen) yang belum terdaftar, akibat kendala administratif, mobilitas penduduk, atau kurangnya kesadaran pentingnya jaminan kesehatan. Untuk menutup celah ini, diperlukan pendekatan khusus bagi kelompok rentan seperti pekerja informal dan penduduk berpindah, serta peningkatan kolaborasi pusat-daerah dalam memperluas cakupan mandiri. Rincian pembagian porsi beban penyelenggaraan jaminan kesehatan antara APBN dan APBD pada tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 2.134 berikut.

Tabel 2.134

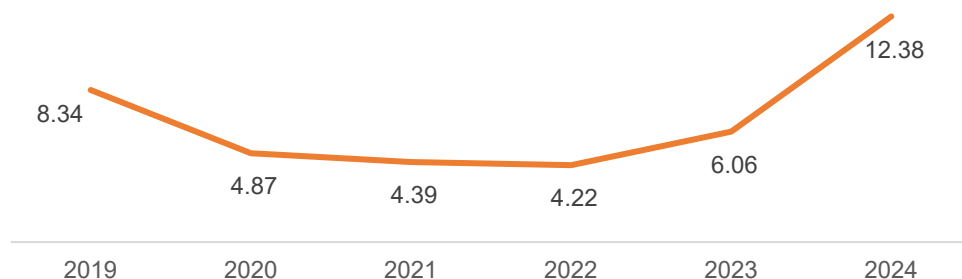
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan Tahun 2024

No.	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah Jiwa	Persentase Penduduk
Penerima Bantuan Iuran (PBI)			
1	PBI APBN	62.732	47,76
2	PBI APBD	39.711	30,24
Sub Jumlah PBI		102.443	77,99
Non PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	20.518	15,62
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	4.468	3,40
3	Bukan Pekerja (BP)	625	0,48
Sub Jumlah Non PBI		25.611	20,00
Jumlah Penduduk Memiliki Jaminan		128.054	97,50
Jumlah Penduduk		131.338	
Selisih (Belum Ter-cover Asuransi)		3.284	2,50

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Alokasi anggaran Jamkesda mengalami tren peningkatan signifikan pada tahun 2024. Anggaran sempat turun dari Rp4,87 miliar (2020) ke Rp4,22 miliar (2022), akibat efisiensi/realokasi anggaran selama masa pemulihan pascapandemi. Namun, terjadi kenaikan bertahap pada tahun 2023 (Rp6,06 miliar) dan melonjak drastis ke Rp12,38 miliar di tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan komitmen Gorontalo Utara dalam memperkuat layanan kesehatan, seperti perluasan cakupan peserta, peningkatan kualitas fasilitas, dan antisipasi kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Peningkatan anggaran diharapkan berdampak positif pada aksesibilitas dan kualitas layanan Jamkesda bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan.

Grafik 2.47
Alokasi Anggaran Jamkesda (Miliaran Rupiah)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.1.3.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek dari keseluruhan pekerja. Program Jamsostek bertujuan melindungi pekerja melalui asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan kematian.

Partisipasi pekerja dalam program Jamsostek fluktuatif meski total pekerja lima tahun terakhir relatif stabil kecuali ada beberapa *outlier* tahun 2019. Lonjakan partisipasi tahun 2024 dipengaruhi sosialisasi intensif dan penegakan regulasi. Meski demikian, pada periode tahun 2020-2023, rata-rata partisipasi hanya 49,57 persen, menunjukkan masih ada tantangan seperti rendahnya kesadaran pekerja/pengusaha atau keterbatasan pengawasan. Peningkatan signifikan di tahun 2024 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan sosial pekerja secara berkelanjutan. Jangan sampai kepesertaan kembali turun karena dikhawatirkan ada pergeseran dari peserta jalur formal, ke informal, bahkan menganggur.

Tabel 2.135
Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek

No.	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek (jiwa)	2.521	2.501	2.531	2.773	1.088	1.291	1.043	1.879
2	Jumlah seluruh pekerja	3.384	3.548	4.404	2.583	2.283	2.743	2.214	2.280
3	Persentase tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek	74,50	70,50	71,34	62,97	42,12	47,07	47,11	82,41

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Sedikit berbeda dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo melihat capaian yang lebih rendah dibandingkan potensinya.

Tabel 2.136
Cakupan Kepesertaan Program Jamsostek Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Kepesertaan Aktif per Desember 2024				
		Potensi	Pencapaian	Persentase	Sisa	Persentase
1	Boalemo	53.249	20.275	38,08	32.974	61,92
2	Gorontalo	125.569	98.358	78,33	27.211	21,67
3	Pohuwato	64.811	34.414	53,10	30.397	46,90
4	Bone Bolango	102.316	67.782	66,25	34.534	33,75

No.	Kabupaten/Kota	Kepesertaan Aktif per Desember 2024				
		Potensi	Pencapaian	Persentase	Sisa	Persentase
5	Gorontalo Utara	38.088	18.594	48,82	19.494	51,18
6	Kota Gorontalo	82.335	59.211	71,91	23.124	28,09
	Provinsi Gorontalo	466.368	298.634	64,03	167.734	35,97

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, 2024

2.1.3.4.3 PMKS Penerima Bantuan

Bantuan dan intervensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Gorontalo Utara dilakukan secara selektif disebabkan jumlah PMKS yang cukup banyak. Persentase PMKS yang menerima bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar relatif stabil di atas 85 persen dari tahun 2020 hingga 2023, dengan puncaknya pada tahun 2023. Namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi hanya 77,00 persen. Sebaliknya, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial menunjukkan tren peningkatan di lima tahun terakhir. Data ini mencerminkan pergeseran prioritas atau efektivitas penyaluran bantuan, di mana terdapat peningkatan perhatian terhadap kelompok rentan non-produktif, meskipun cakupan bantuan umum untuk kebutuhan dasar mengalami penurunan di tahun terakhir, dijabarkan melalui Tabel 2.137 berikut.

Tabel 2.137
PMKS Penerima Bantuan Sosial

Indikator	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	20,0	22,84	20,3	57,4	60,1	85,5	85,7	85,0	88,30	77,0
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	19,23	21,7	19,9	23,8	40,4	44,6	56,8	57,2	58,43	77,32

Sumber: Dinas Sosial, 2025

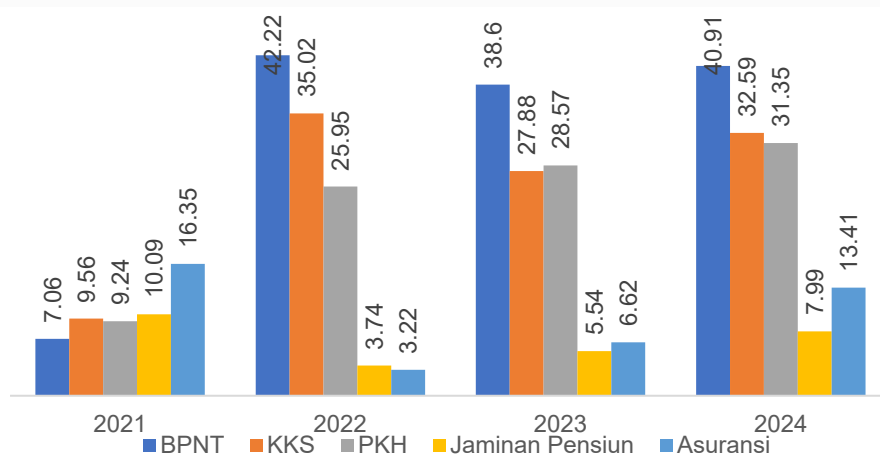
Data penerima bantuan sosial menunjukkan dinamika kebijakan dan prioritas program, tergambar dari fluktuatifnya penerima manfaat pada masing-masing jenis bantuan. Tren ini menegaskan dinamika alokasi bantuan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan prioritas lokal, dengan penekanan pada program berkelanjutan seperti PKH meski terjadi penurunan penerima.

Tabel 2.138
Penerima BPNT, BST, BLPD, dan PKH

No.	Uraian	Jumlah Penerima (KPM)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	-	-	9.683	11.681	34.890	15.589	12.971	12.814
2	BST (Bantuan Sosial Tunai)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BLPD (Bantuan Langsung Pangan Daerah)	-	-	-	-	1.793	-	-	-
4	PKH (Program Keluarga Harapan)	4.081	6.696	6.452	6.885	8.496	8.643	7.433	7.107
5	BLT BBM	-	-	-	-	-	350	-	-

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Grafik 2.48
Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima



Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Gorontalo Utara (BPS), diolah

*Jaminan Pensiun: termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua

**Asuransi: termasuk asuransi kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan pesangon PHK

Jika dilihat dari cakupan di Grafik 2.48, pada tahun 2021 jangkauan semua program masih rendah. Kemungkinan karena keterbatasan data dan belum

pulihnya sistem pasca pandemi. Namun di tahun 2024, terjadi konsolidasi dan perluasan kembali. Semua program mencatatkan peningkatan, menandakan pemulihan sistemik dan penguatan perlindungan sosial yang lebih merata. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya menguatkan jaring pengaman sosial, meningkatkan daya tahan ekonomi rumah tangga,



serta memperluas akses terhadap jaminan sosial berbasis bantuan maupun kontribusi. Untuk menjaga tren ini, dibutuhkan konsistensi dalam alokasi anggaran, pembaruan data penerima manfaat, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Namun dalam hal peningkatan kesejahteraan, diharapkan cakupan penerima PKH dan BPNT berkurang di masa depan.

Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, data menunjukkan peningkatan jumlah panti sosial di Gorontalo Utara yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Kesos), dari 4 panti (2020) menjadi 7 (2024). Selama periode ini, seluruh panti konsisten memenuhi standar penyediaan fasilitas, meski terjadi penambahan jumlah lembaga. Kenaikan jumlah panti dari 5 (2023) ke 7 (2024) mencerminkan upaya ekspansi layanan sosial untuk menjangkau lebih banyak kelompok rentan. Konsistensi capaian 100 persen tiap tahun mengindikasikan komitmen kuat dalam memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti ruang layanan, alat rehabilitasi, atau program pelatihan, sesuai kebutuhan penerima manfaat. Hal ini selaras dengan peningkatan alokasi sumber daya atau kebijakan yang mendukung keberlanjutan kualitas pelayanan.

Tabel 2.139
Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No.	Indikator	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah panti sosial kabupaten yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	3	3	4	4	4	4	4	4	5	7
2	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos	3	3	4	4	4	4	4	4	5	7
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Selain itu, konteks kesejahteraan sosial juga menyiratkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat hidup layak dan berpartisipasi dalam masyarakat dilindungi dan harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat

terakomodasi oleh lingkungannya, akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas yang akan berimplikasi pada angka kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan hak pelayanan sosial guna mengeliminasi hambatan agar penyandang disabilitas dapat memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada, serta dapat berpartisipasi di masyarakat dengan cara turut aktif dalam kegiatan ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal.

Data pada Tabel 2.140 menggambarkan dominasi sektor informal (72,85 persen) bagi penyandang disabilitas di Gorontalo Utara, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Gorontalo (69,39 persen), dan menempatkan sebagai daerah dengan proporsi pekerja disabilitas di sektor informal tertinggi setelah Bone Bolango. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Gorontalo Utara lebih mengandalkan usaha mandiri atau pekerjaan tidak tetap yang berisiko rendah pendapatan dan tanpa jaminan sosial. Di lain pihak, terdapat keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, baik karena faktor keterampilan, pendidikan, maupun belum optimalnya regulasi inklusif di sektor kerja formal, yang menjadi indikasi bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya terserap di sektor formal seperti PNS, karyawan swasta, BUMN, dan sebagainya.

Secara keseluruhan, Gorontalo Utara di masa depan harus proaktif mendorong inklusi ekonomi bagi penyandang disabilitas di sektor formal, karena karakteristik sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, misalnya melalui mendorong kebijakan perluasan kerja formal bagi kalangan *disable* (pelatihan kerja berbasis vokasi yang adaptif, insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas, atau kuota afirmatif di pemerintahan), penguatan ekosistem ekonomi informal (fasilitasi modal usaha mikro/kecil, pelatihan wirausaha dan digitalisasi UMKM disabilitas, atau akses jaminan sosial dan perlindungan kerja informal), serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik secara aktif tentang hak-hak tenaga kerja disabilitas.

Tabel 2.140
Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal/Informal

No.	Kabupaten/Kota	Disabilitas Bekerja	*Sektor Formal	Persentase	**Informal	Persentase
1	Boalemo	1.240	368	29,7	872	70,32
2	Gorontalo	2.822	903	32,0	1.919	68,00
3	Pohuwato	1.032	307	29,7	725	70,25
4	Bone Bolango	929	245	26,4	684	73,63
5	Gorontalo Utara	862	234	27,1	628	72,85
6	Kota Gorontalo	680	259	38,1	421	61,91
	Provinsi Gorontalo	7.565	2.316	30,6	5.249	69,39

Sumber: Regsosek (Analisis Sepakat, 2022) sebagaimana dimuat pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029

*Sektor Formal: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Buruh/karyawan/pegawai swasta, PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota legislatif.

**Sektor Informal: Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, Pekerja bebas pertanian, Pekerja bebas non-pertanian, Pekerja keluarga/tidak dibayar

2.1.3.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

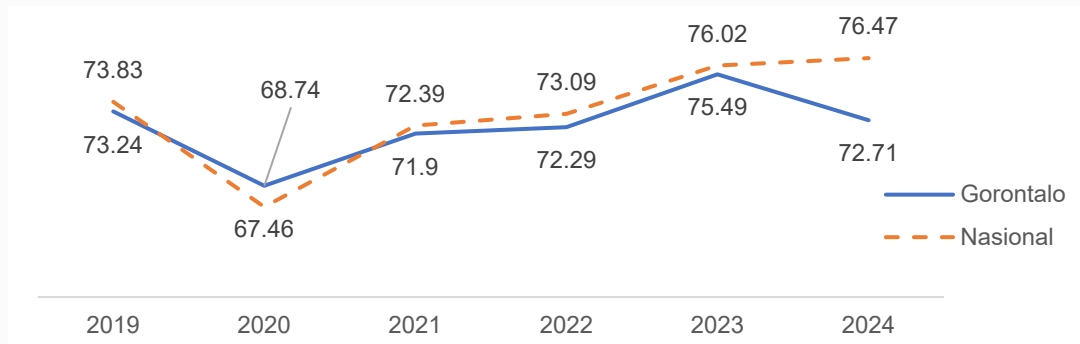
2.1.3.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Salah satu sasaran pembangunan yakni menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. Interaksi antar umat beragama juga dapat menjadi salah satu penilaian terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dapat diketahui kondisi kerukunan umat beragama di suatu wilayah, yang disusun oleh 3 dimensi: dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama, dengan kategorisasi 0-20,00 (Sangat Rendah); 20,01-40,00 (Rendah); 40,01-60,00 (Sedang); 60,01-80,00 (Tinggi); dan 80,01-100 (Sangat Tinggi).

Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, capaian IKUB baru dilihat pada level provinsi, sehingga untuk merefleksikan kondisi kerukunan umat beragama di Gorontalo Utara menggunakan IKUB Provinsi Gorontalo, yang dirasa cukup mewakili karena kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo tidak terlalu beragam dan seluruh kabupaten/kota yang ada mengusung filosofis agama dan

budaya “adat bersendikan syara’, dan syara’ bersendikan kitabullah”, yang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif meski nilainya masih dibawah nasional.

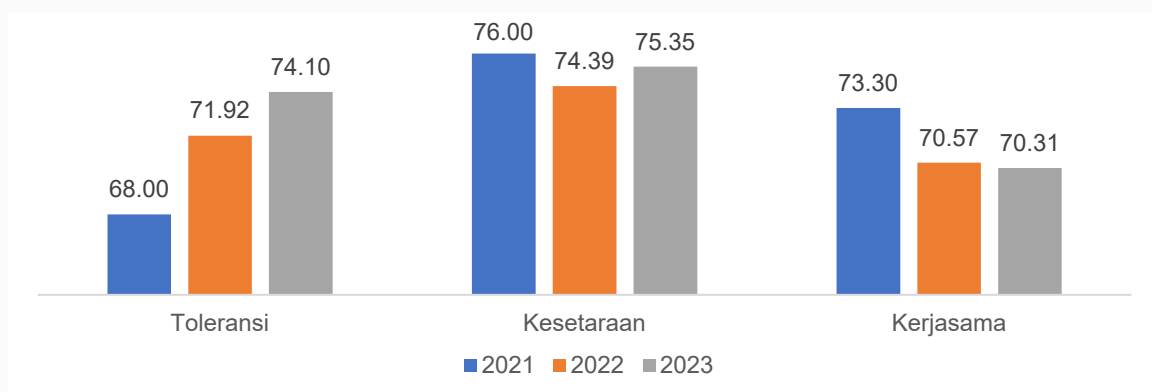
Grafik 2.49
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo



Sumber: Balitbang Kementerian Agama RI, diolah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor keagamaan yang dapat mempengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan justru lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik). Komponen dimensi pembentuk IKUB Provinsi Gorontalo 2021-2023 digambarkan sebagai berikut.

Grafik 2.50
Dimensi Pembentuk IKUB Provinsi Gorontalo



Sumber: Balitbang Kementerian Agama RI, diolah

2.1.3.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

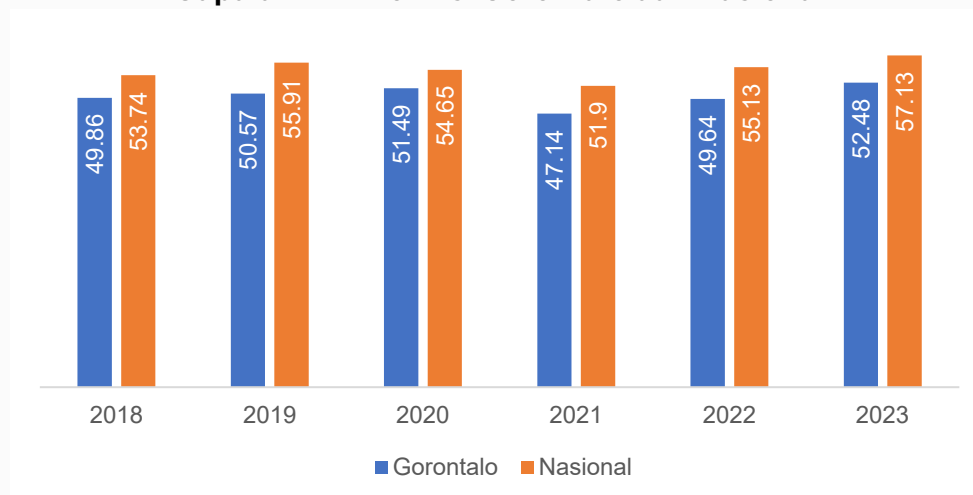
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi. Definisi tersebut membatasi cakupan hasil IPK hanya berskala nasional dan provinsi sehingga berakibat data capaian IPK tingkat kabupaten/kota belum

tersedia. Oleh sebab itu, guna menerawang kinerja IPK Kabupaten Gorontalo Utara menggunakan *proxy* hasil IPK Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir.

IPK terdiri dari beberapa dimensi utama yang mencakup ekonomi budaya, pendidikan kebudayaan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Setiap dimensi ini memberikan penilaian terhadap aspek-aspek penting dalam pembangunan kebudayaan yang mencakup partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, pemeliharaan warisan budaya, pemberdayaan perempuan dalam kebudayaan, hingga kontribusi sektor budaya terhadap ekonomi. Dengan menggunakan IPK, dapat diukur sejauh mana kebudayaan Indonesia berkembang dan memberi kontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan identitas bangsa.

Adapun capaian IPK Provinsi Gorontalo sejak pertama kali indeks ini dirilis hingga tahun 2023 beserta perbandingannya dengan angka capaian tingkat nasional disajikan dalam Grafik 2.51 berikut.

Grafik 2.51
Capaian IPK Provinsi Gorontalo dan Nasional

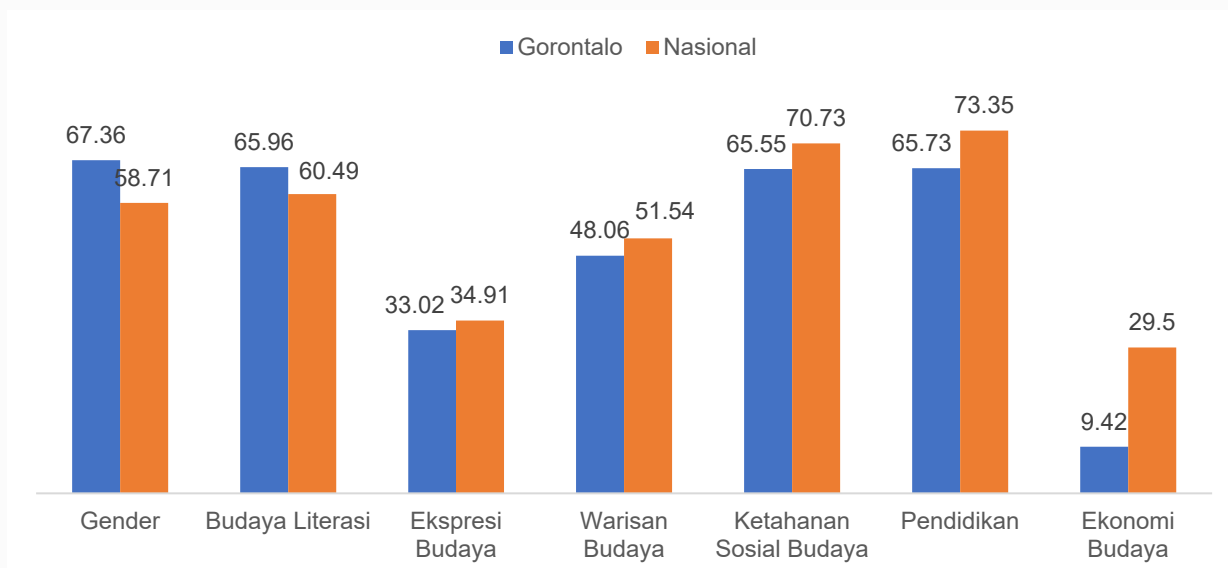


Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kemendikbud), 2024

Secara umum, perkembangan IPK Provinsi Gorontalo mengalami tren positif meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun dalam 3 tahun terakhir IPK Provinsi Gorontalo tetap menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan kebudayaan yang semakin

diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan yang konsisten tersebut pada hakekatnya ditunjang dari beberapa dimensi yang merupakan komposit dari IPK. Capaian 7 dimensi IPK tahun 2023 Provinsi Gorontalo dan Nasional digambarkan pada Grafik 2.52 berikut.

Grafik 2.52
IPK Per Dimensi Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2023



Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kemendikbud), 2024

Berdasarkan Grafik 2.75 di atas, capaian dimensi ekonomi budaya merupakan dimensi dengan kategori capaian masih sangat rendah atau merah bahkan merupakan yang terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Adapun indikator tunggal yang digunakan untuk mengukur capaian dimensi ini adalah persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas). Indikator ini jika diaplikasikan dalam skala kabupaten dapat diartikan sebagai jumlah penduduk di Gorontalo Utara yang terlibat dalam pertunjukan seni yang keterlibatannya merupakan sumber penghasilan penduduk. Singkatnya, indeks ini mendeskripsikan sejauh mana penduduk Gorontalo Utara yang sumber penghasilannya berasal dari hasil pertunjukan seni/budaya.

Capaian dimensi ekonomi budaya yang sangat rendah juga ikut menyiratkan capaian di level kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Pencapaian dimensi ini

dapat diartikan bahwa cakupan penduduk di Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, yang sumber penghasilannya berasal dari pertunjukkan seni/aktivitas kebudayaan masih minim. Alhasil, dimensi ekonomi budaya merupakan salah satu dimensi yang perlu menjadi bahan orientasi utama dalam dinamika pembangunan kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara di masa mendatang.

2.1.3.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.3.6.1 Indeks Gender (Pemberdayaan, Pembangunan, dan Ketimpangan Gender)

Perempuan merupakan salah satu unsur yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga kondisi dan kualitas perempuan menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Untuk melihat kualitas kesetaraan dan pembangunan gender ditunjukkan menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Jika nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di bawah laki-laki. Sementara jika di atas 100 mengindikasikan capaian pembangunan perempuan di atas laki-laki.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, IPG Gorontalo Utara secara tren terus mengalami peningkatan meskipun nilainya tidak signifikan, sekaligus menunjukkan sejalan dengan peningkatan nilai IPM, meskipun jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya termasuk terendah. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan dan program pembangunan yang mendukung kesetaraan gender, namun tetap memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan agar dapat terus memperbaiki angka IPG di masa mendatang.

Namun demikian, peningkatan IPG Gorontalo Utara menggambarkan semakin setaranya pencapaian indikator-indikator pembentuk IPM antara laki-laki dengan perempuan. Rangkaian informasi dan komparasinya antara kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.141.

Tabel 2.141
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Boalemo	80,82	81,14	81,15	81,52	82,72	83,17	83,61
2	Gorontalo	81,18	81,33	81,67	82,72	83,27	83,60	84,00
3	Pohuwato	91,11	91,46	91,36	91,40	92,05	92,27	92,39
4	Bonebolango	86,96	87,71	87,54	88,23	88,72	88,84	89,26
5	Gorontalo Utara	81,16	81,25	81,16	81,17	81,94	82,37	82,80
6	Kota Gorontalo	86,06	86,25	86,23	86,76	87,28	87,74	88,47
Provinsi		86,63	86,83	86,73	87,50	88,12	88,25	88,64

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG semakin ideal apabila mendekati nilai 100 yang dibentuk oleh 3 dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Lantas, kondisi IDG di Gorontalo Utara dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.142 berikut.

Tabel 2.142
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	*2024
1	Boalemo	68,53	69,15	70,38	67,80	69,46	74,76
2	Gorontalo	62,91	62,84	62,48	62,68	63,22	57,53
3	Pohuwato	68,74	73,16	69,41	73,66	70,45	72,47
4	Bonebolango	51,91	51,73	52,13	52,33	53,38	62,66
5	Gorontalo Utara	76,61	70,49	70,51	70,02	69,21	76,92
6	Kota Gorontalo	75,33	75,23	71,19	73,08	72,15	66,49
Provinsi		70,67	70,74	70,40	71,20	71,11	70,45

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), diolah

*Menggunakan UHH hasil SP2020 LF

IDG Gorontalo Utara secara umum, meskipun tidak terlalu tinggi sudah memadai, dan mendekati angka 100 yang dikonotasikan sebagai standar untuk menginterpretasikan angka IDG, meskipun masih perlu didorong untuk semakin menipiskan jaraknya. Namun demikian, menunjukkan dinamika yang menarik.

Meski sempat terpuruk dengan penurunan 2 tahun berturut-turut, Pada tahun 2024 justru terjadi lonjakan signifikan ke 76,92, skor IPG tertinggi di Provinsi Gorontalo, bahkan melampaui rata-rata provinsi. Peningkatan drastis ini mencerminkan keberhasilan program afirmatif dan kebijakan inklusif yang diterapkan pada tahun 2023-2024, seperti peningkatan partisipasi perempuan di sektor politik, ekonomi, dan pendidikan. Meski demikian, fluktuasi di periode sebelumnya menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan konsistensi capaian dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan.

Tabel 2.143
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Boalemo	0,472	0,509	0,456	0,480	0,384	0,430	0,319
2	Gorontalo	0,480	0,420	0,508	0,449	0,437	0,350	0,242
3	Pohuwato	0,548	0,530	0,521	0,545	0,452	0,502	0,481
4	Bonebolango	0,586	0,553	0,527	0,446	0,523	0,516	0,417
5	Gorontalo Utara	0,463	0,432	0,433	0,481	0,226	0,327	0,178
6	Kota Gorontalo	0,428	0,425	0,292	0,370	0,407	0,363	0,359
	Provinsi	0,472	0,457	0,456	0,443	0,411	0,391	0,365

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), memberikan gambaran kegagalan atau kerugian (*loss*) dari pencapaian pembangunan akibat ketidaksetaraan gender, yang terdiri dari tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, serta pasar kerja. Kondisi ideal yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam pembangunan,



memegang kendali atas sumber daya pembangunan, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Kabupaten Gorontalo Utara mencatat penurunan IKG terbesar di provinsi Gorontalo, dari 0,433 (2020) menjadi

0,178 (2024), menjadikannya wilayah dengan ketimpangan gender terendah, dengan perbaikan dimensi kesehatan reproduksi sebagai kunci pencapaian. Penurunan ini didorong oleh kemajuan dua indikator utama: proporsi perempuan melahirkan hidup tanpa fasilitas kesehatan (MTF) yang semakin rendah, menunjukkan peningkatan akses layanan maternal, serta penurunan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun (MHPK20), mencerminkan keberhasilan program pencegahan perkawinan dini dan edukasi kesehatan reproduksi. Kombinasi kedua capaian ini tidak hanya memperkuat kualitas hidup perempuan di Gorontalo Utara, tetapi juga mendorong pemerataan kesempatan dan pengurangan ketimpangan gender, menjadi pondasi penting bagi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, memang Indeks Pembangunan, Pemberdayaan, serta Ketimpangan Gender terus membaik, namun *gender gap* masih cukup besar, terutama pada tingkat kepemimpinan perempuan, baik di sektor swasta sektor publik, dan di sektor keuangan.

2.1.3.6.2 Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai alat ukur melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. Dengan indeks tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat akan terbantu dalam menyusun langkah-langkah strategis, rencana aksi, serta melakukan intervensi nyata yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Indikator penyusun IKK metadata baru terdiri dari 24 Indikator yang dibagi menjadi 5 (lima) dimensi: (1) Kualitas Legalitas-Struktur (KLS, 3 indikator); (2) Kualitas Ketahanan Fisik (KKF, 6 indikator); (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE, 6 indikator); (4) Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP, 4 indikator); dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB, 6 indikator).

Angka statistik tersebut untuk Kabupaten Gorontalo Utara belum tersedia, untuk mendapatkan gambaran secara umum, dapat melihat capaian Provinsi Gorontalo. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, nilai IKK baik menggunakan

metadata lama maupun metadata baru di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, sebesar 1,05 poin untuk metadata lama (dari 77,03 persen di tahun 2022 menjadi 78,08 persen di tahun 2023), dan 0,72 poin untuk metadata baru (dari 77,52 persen di tahun 2022 menjadi 78,24 persen di tahun 2023). Pada tahun 2023, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru diperoleh nilai IKK Provinsi Gorontalo lebih tinggi jika dibandingkan nilai IKK nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga pada kategori 'Responsif Gender dan Hak Anak'.

Tabel 2.144
Indikator, Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Gorontalo

No.	IKK/Dimensi/Indikator	Metadata Lama			Metadata Baru		
		2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
A	Dimensi KLS	88,27	91,00	2,73	89,59	91,67	2,08
1	Kepemilikan buku nikah	-	-	-	92,29	93,05	0,76
2	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	92,34	93,69	1,35	92,34	93,69	1,35
3	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	92,10	94,15	2,05	92,10	94,15	2,05
B	Dimensi KKF	73,80	72,39	-1,41	72,41	70,61	-1,80
1	Persentase rumah tangga yang tidak ada saat di anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya	90,24	91,13	0,89	90,24	91,13	0,89
2	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan	56,23	64,61	8,38	56,23	64,61	8,38
3	PoU semua umur	18,63	15,10	-3,53	18,63	15,10	-3,53
4	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	99,36	99,43	0,07	99,36	99,43	0,07
5	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	1,39	1,78	0,39	2,39	3,06	0,67
6	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)	35,51	36,06	0,55	35,51	36,06	0,55
C	Dimensi KKE	74,67	78,47	3,80	71,69	75,41	3,72
1	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	85,99	86,97	0,98	85,99	86,97	0,98
2	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi	87,72	87,21	-0,51	87,72	87,21	-0,51
3	Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	61,48	69,39	7,91	69,93	77,72	7,79
4	Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	89,47	93,68	4,21	64,13	68,88	4,75
5	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	0,55	0,46	-0,09	0,55	0,46	-0,09
6	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja	44,24	52,28	8,04	50,70	58,97	8,27
D	Dimensi KKSP	76,71	75,79	-0,92	83,18	81,94	-1,24
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir	40,99	40,96	-0,03	-	-	-
2	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	2,21	2,24	0,03	2,21	2,24	0,03
3	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	58,82	55,91	-2,91	58,82	55,91	-2,91

No.	IKK/Dimensi/Indikator	Metadata Lama			Metadata Baru		
		2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
4	Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua	96,58	96,45	-0,13	96,58	96,45	-0,13
E	Dimensi KKSB	67,64	69,89	2,25	67,64	69,89	2,25
1	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	14,52	11,68	-2,84	14,52	11,68	-2,84
2	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap (kode 1 dan 2)	94,37	87,03	-7,34	94,37	87,03	-7,34
3	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	96,97	98,27	1,30	96,97	98,27	1,30
4	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	28,92	32,88	3,96	28,92	32,88	3,96
5	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	74,78	78,39	3,61	74,78	78,39	3,61
6	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet	14,44	16,59	2,14	14,44	16,59	2,15
	IKK	77,03	78,08	1,05	77,52	78,24	0,72

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2022-2023 (KemenPPA), 2024

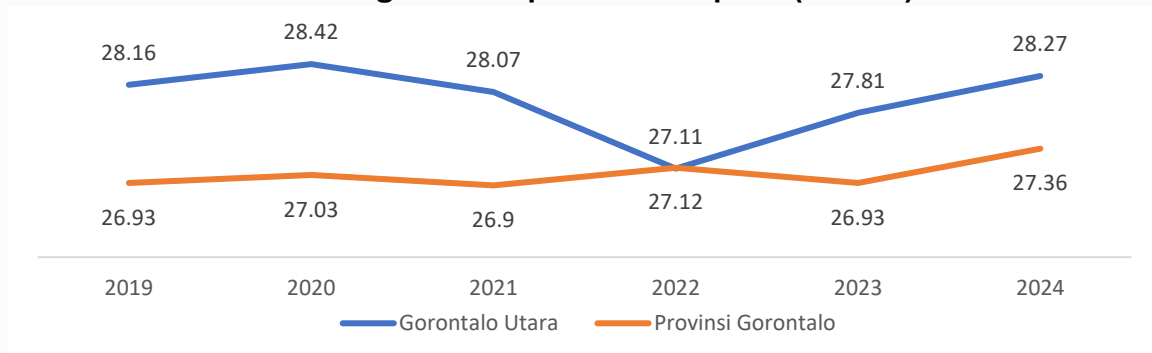
Pada tahun 2023, dari lima dimensi penyusun IKK, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru, tiga dimensi mengalami peningkatan dan dua dimensi lainnya mengalami penurunan nilai jika dibandingkan tahun 2022. Tiga dimensi yang mengalami peningkatan nilai diantaranya dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) dan dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Sedangkan nilai dimensi yang mengalami penurunan adalah dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) dan dimensi Kualitas Ketahanan Sosialis-Psikologi (KKSP). Nilai dimensi metadata lama maupun metadata baru yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) sebesar 3,80 poin (dari 74,67 persen di tahun 2022 menjadi 78,47 persen di tahun 2023) untuk metadata lama, sedangkan pada metadata baru mengalami peningkatan sebesar 3,72 poin (dari 71,69 persen di tahun 2022 menjadi 75,41 persen di tahun 2023).

2.1.3.6.3 Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator sumbangan pendapatan pada gender perempuan menggambarkan tingkat peran perempuan pada keluarga, yang secara umum menunjukkan ketimpangan yang nyata, merupakan fenomena umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan kaum perempuan yang memberikan tekanan terhadap capaian indikator Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG). Gambaran indikator ini di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.53.

Grafik 2.53
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Grafik 2.53 menunjukkan peran ekonomi perempuan dalam keluarga di Gorontalo Utara yang terus tumbuh dan relatif lebih berperan dan progresif dibandingkan capaian Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat mencerminkan peningkatan akses perempuan terhadap lapangan kerja dan peluang ekonomi di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan capaiannya, implementasi pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan menjadi strategi yang tepat untuk mempersempit kesenjangan pada khususnya sektor ekonomi.

2.1.3.6.4 Angkatan Kerja dan Partisipasi Kerja Perempuan

Kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat dari peran perempuan di Gorontalo Utara dalam pembangunan, yang dapat dilihat dari partisipasi angkatan kerjanya. Partisipasi angkatan kerja perempuan mengukur persentase perempuan usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Statistik ini berguna untuk menganalisis pasar tenaga kerja, terutama ketika dipasangkan dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi berkembang, tingkat partisipasi meningkat karena prospek pekerjaan dan upah meningkat.

Adapun gambaran jumlah angkatan kerja dan partisipasi perempuan disajikan dalam Tabel 2.145 di bawah ini.

Tabel 2.145
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (jiwa)	6.460	6.370	5.500	6.031	7.006
2	Industri Pengolahan (jiwa)	1.720	2.434	1.970	1.738	2.496
3	Lainnya (jiwa)	11.757	11.223	12.720	17.585	16.912
Total perempuan bekerja (jiwa)		19.937	20.027	20.190	25.354	26.414
Total angkatan kerja perempuan (jiwa)		20.692	20.563	20.898	26.386	27.222
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)		57.155	56.839	58.301	69.961	69.628
TPAK Perempuan (%)		51,40	50,31	50,76	54,74	56,14

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, diolah

Di Gorontalo Utara, total perempuan bekerja meningkat dari 19.937 jiwa (2020) menjadi 26.414 jiwa (2024), didorong peningkatan di sektor pertanian (7.006 jiwa, 2024) dan sektor "lainnya" (16.912 jiwa, 2024) seperti jasa atau perdagangan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik dari 51,40 persen (2020) ke 56,14 persen (2024), mencerminkan perbaikan akses kesempatan kerja. Meski demikian, sektor industri pengolahan masih fluktuatif (2.496 jiwa, 2024), dan partisipasi perempuan tetap lebih rendah dibanding laki-laki (total angkatan kerja 69.628 jiwa, 2024). Data ini menunjukkan progres, namun perlu penguatan pelatihan multisektor dan penghapusan hambatan kultural untuk meningkatkan kesetaraan gender di pasar kerja

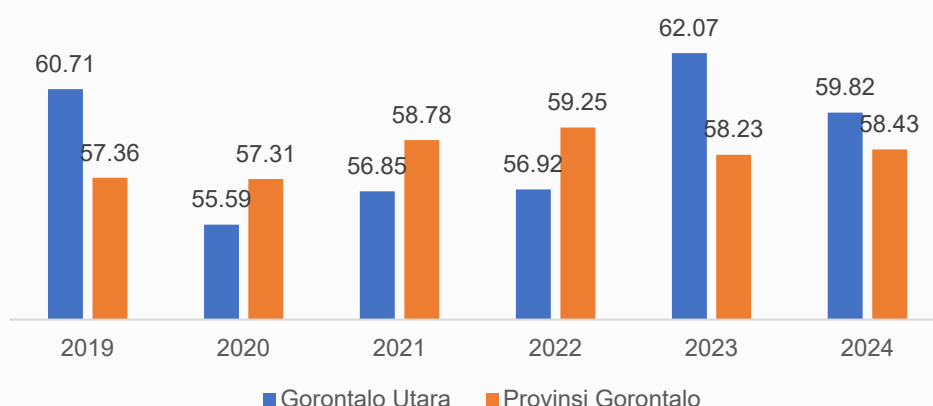
Upaya lainnya untuk memperkuat ketenagakerjaan perempuan di era digital, harus dibarengi dengan perkembangan penguasaan teknologi informasi. Ibu-ibu rumah tangga yang semula bukan sebagai kelompok Bukan Angkatan Kerja, memanfaatkan media sosial untuk memperoleh penghasilan dari rumah melalui berbagai aplikasi *digital*, karena melalui platform kolaborasi di era *digital* akan memunculkan ide-ide inovatif.

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam bidang politik. Dengan adanya peran aktif perempuan di bidang politik diharapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih responsif gender dan fokus pada perlindungan anak. Dari 25 orang anggota DPRD periode 2024-2029, 9 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan, yang artinya telah

mencapai 36 persen, jauh meningkat dibandingkan 24 persen periode sebelumnya. Dengan peningkatan keterlibatan ini diharapkan program dan peran daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan meningkat.

Sedangkan pada perempuan sebagai tenaga profesional, sebagai salah satu dimensi partisipasi ekonomi yang menggambarkan keterlibatan perempuan pada dunia kerja formal sebagai menejer, profesional, administrasi, dan teknisi menunjukkan tren yang fluktuatif sebagaimana Grafik 2.54.

Grafik 2.54
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

Grafik 2.77 menunjukkan bahwa lebih dari setengah tenaga kerja perempuan yang berada di Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo berada pada jalur formal. Bahkan angka keterlibatan perempuan dalam dunia profesional dua tahun terakhir di Gorontalo Utara lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Gorontalo, meski sempat turun di tahun 2024 yang mungkin dipengaruhi faktor seperti migrasi tenaga profesional dan keterbatasan peluang karir lokal. Secara umum, tren peningkatan ini mencerminkan upaya peningkatan akses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan bagi perempuan, meski perlu penguatan infrastruktur ekonomi dan insentif untuk mempertahankan talenta lokal. Semakin tinggi persentasenya akan mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan dan perannya dalam ekonomi keluarga.

2.1.3.6.5 Pengeluaran Per Kapita Perempuan

Dengan meningkatnya pendapatan, diharapkan tingkat pengeluaran juga meningkat, khususnya pada gender perempuan. Semakin tinggi pengeluaran, selain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi akhir (barang dan jasa), juga menggambarkan semakin besarnya peran perempuan dalam ekonomi. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan per gender di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo digambarkan pada Tabel 2.146.

Tabel 2.146
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)

Wilayah	Laki-laki					Perempuan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	13.362	13.583	14.470	14.963	15.645	3.687	3.759	4.022	4.180	4.384
Gorontalo	14.080	14.205	14.836	15.427	15.878	3.895	4.031	4.228	4.442	4.585
Pohuwato	13.033	13.239	13.871	14.045	14.801	6.810	6.902	7.225	7.306	7.675
Bonebolango	14.136	14.281	14.890	15.438	16.264	5.222	5.389	5.652	5.895	6.227
Gorontalo Utara	13.569	13.767	14.506	14.907	15.549	3.719	3.803	4.053	4.232	4.428
Kota Gorontalo	17.874	17.966	18.849	19.129	19.844	6.325	6.457	6.828	6.984	7.264
Provinsi Gorontalo	14.079	14.211	14.822	15.221	15.856	5.252	5.394	5.656	5.849	6.109

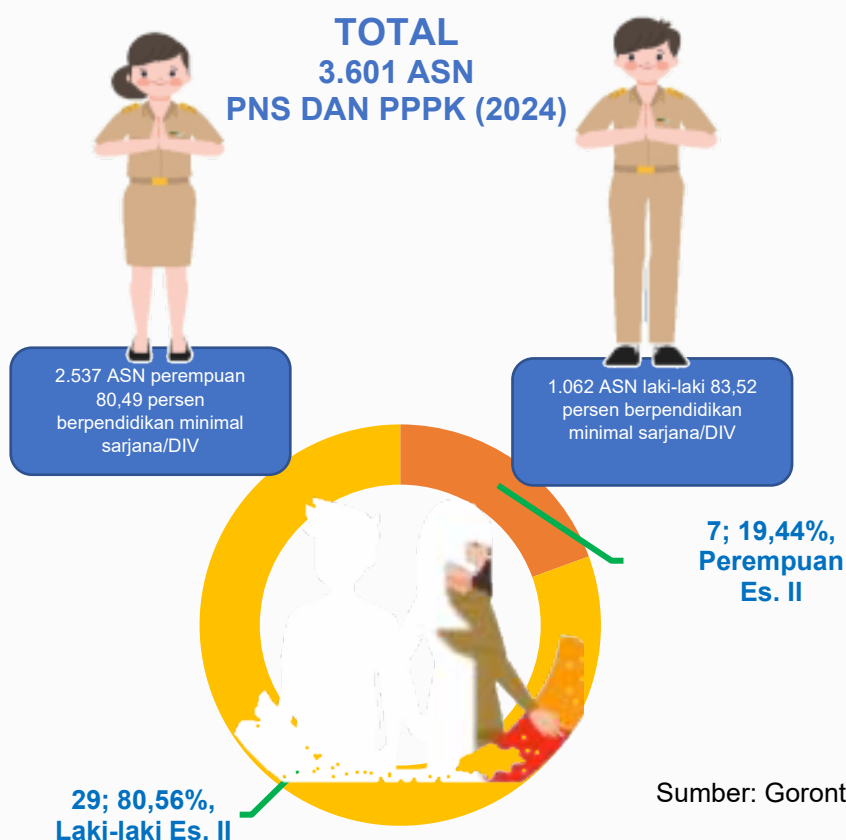
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Secara umum di Provinsi Gorontalo, meskipun nominal pengeluaran perempuan masih jauh di bawah laki-laki, laju pertumbuhan perempuan justru lebih tinggi secara persentase, 12,6 persen berbanding 16,3 persen (tahun 2020 ke 2024), mengindikasikan potensi peningkatan akses ekonomi atau peran perempuan dalam konsumsi rumah tangga. Namun demikian, kesenjangan gender dalam pengeluaran masih cukup signifikan, tetapi tren saat ini memberi sinyal positif terhadap inklusi ekonomi perempuan yang makin membaik, terutama dengan dukungan kebijakan sosial dan ekonomi daerah yang inklusif.

2.1.3.6.6 Latar Belakang Pendidikan PNS Perempuan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN/PNS. Pengetahuan yang diperoleh secara formal berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Termasuk bagi perempuan, pendidikan dapat mendorong peningkatan partisipasi ASN perempuan terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan pembangunan nasional, yang dapat membawa beragam dampak positif, misalnya ketika keberagaman perwakilan

terjadi sehingga muncul perspektif yang lebih luas, ide yang beragam, serta meningkatnya inovasi dalam pencapaian tujuan pemerintah.



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Berdasarkan ilustrasi di atas, secara entitas ASN perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun persentase yang mengenyam pendidikan minimal sarjana/ sederajat lebih kecil, meskipun tidak terlalu berbeda jauh. Setali tiga uang, hanya sekitar 19 persen perempuan yang menduduki jabatan eselon II, sudah meningkat dari 12 persen periode sebelumnya.

Tabel 2.147
ASN Perempuan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	ASN Perempuan		
		PNS	PPPK	Total
1	Sekolah dasar	1	0	1
2	Sekolah menengah pertama	3	0	3
3	Sekolah menengah atas	27	2	29
4	Diploma I	7	0	7
5	Diploma II	11	0	11
6	Diploma III	227	218	445
7	Diploma IV	23	38	61
8	Sarjana	997	806	1.803

No.	Tingkat Pendidikan	ASN Perempuan		
		PNS	PPPK	Total
9	Magister	133	44	177
10	Doktoral	1	0	1

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Struktur pendidikan ASN perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara memperlihatkan profil yang sangat berpendidikan, dengan didominasi pemegang gelar Sarjana (S1) dan Diploma III (D3). Sebanyak 71 persen dari total ASN perempuan merupakan lulusan S1, sementara hanya 1,2 persen yang tercatat memiliki pendidikan SMA atau lebih rendah.

Terkait jenis kepegawaian, komposisi antara PNS dan PPPK cukup merata, masing-masing menyumbang 56,3 dan 43,7 persen dari total ASN perempuan. Keseimbangan ini mencerminkan kebijakan rekrutmen ASN yang inklusif, sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperluas lapangan kerja ASN non-PNS melalui skema PPPK.

Kualifikasi Magister juga cukup menonjol dengan 177 orang (7 persen), menunjukkan bahwa tidak sedikit ASN perempuan yang melanjutkan studi lanjutan demi pengembangan kompetensi. Meskipun ASN perempuan dengan gelar Doktor baru satu orang, ini tetap menjadi sinyal positif terhadap peningkatan kualitas SDM di level birokrasi daerah.

Secara umum dapat diambil kesimpulan, bahwa ASN perempuan di Gorontalo Utara didominasi oleh individu yang berpendidikan tinggi, adaptif terhadap sistem rekrutmen baru (PPPK), serta memiliki potensi besar dalam mendukung reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan profesionalisme.

2.1.3.6.7 Kekerasan Perempuan dan Anak dan Pernikahan di Bawah Umur

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam sejumlah regulasi di Indonesia. Secara umum, kekerasan mencakup fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Regulasi utama yang melindungi kelompok rentan ini meliputi:

1. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang mengatur perlindungan korban kekerasan domestik;

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
3. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual.

Selain itu, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan untuk memantau dan mengadvokasi korban.

Tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahun berfluktuasi. Lonjakan kasus kekerasan anak pada 2024 (52 kasus) perlu diwaspadai, terutama terkait faktor ekonomi, pendidikan, serta kesadaran masyarakat dalam melapor. Penurunan kasus kekerasan perempuan mencerminkan efektivitas program edukasi atau penanganan korban. Perlu intervensi holistik, seperti penguatan layanan pengaduan, edukasi masyarakat, dan sinergi antarlembaga, untuk menekan angka kekerasan, khususnya pada anak. Secara umum, kasus kekerasan pada perempuan dan anak disebabkan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang sebagian besar disebabkan oleh pencabulan, persetubuhan, dan pemukulan terhadap anak seperti yang tertera pada Tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148
Kejadian Kekerasan pada Perempuan dan Anak

No.	Uraian	Tahun										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kekerasan pada perempuan	9	14	2	0	17	31	23	2	11	8	
2	Kekerasan pada anak	5	40	15	6	10	21	17	22	25	52	
3	Jumlah kasus yang dilaporkan ke Kepolisian	14	54	17	6	27	52	40	24	36	58	
4	*Kekerasan pada perempuan dewasa (>18 tahun)	-	3	1	1	11	2	22	1	8	8	
5	*Kekerasan pada anak	-	25	9	6	15	11	35	27	19	60	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

*Sumber data *dashboard* Simfoni KemenPPA RI berdasarkan kriteria "Waktu Input"

Sebelum tahun 2024, capaian penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung rendah, disebabkan belum optimalnya kolaborasi antara Unit Layanan P2PT2A (Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan Reskrim Unit PPA Polres Gorontalo Utara. Kendala koordinasi, alur pelaporan, dan penanganan terpadu menghambat penyelesaian kasus. Pada tahun 2024, persentase penyelesaian melonjak ke 100 persen, menandakan perbaikan sinergi kedua lembaga, seperti peningkatan pelatihan SDM, integrasi sistem pelaporan, dan respons cepat terhadap pengaduan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan alokasi sumber daya yang memadai. Penjelasan secara numerik disajikan dalam Tabel 2.149 di bawah ini.

Tabel 2.149
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Kekerasan

No.	Indikator	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	13	17	27	39	20	9	8	44
2	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	13	17	27	44	32	24	37	44
3	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	88,64	62,5	37,5	21,6	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Pernikahan usia muda/di bawah umur juga beberapa kasus terjadi di Gorontalo Utara. Beberapa faktor yang menjadi penyebab diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, keluarga, adat istiadat, serta yang paling berbahaya adalah faktor media massa sebagai representasi dari meningkatnya akses terhadap konten pornografi pada usia dini. Faktor ekonomi erat kaitannya dengan kemiskinan, dimana berdasarkan Susenas (2023) sekitar 51,87 persen penduduk miskin adalah perempuan, serta sekitar 40,41 persen penduduk miskin berada pada usia dibawah 17 tahun, meski rata-rata usia kawin pertama pada penduduk miskin adalah 21 tahun.

Pada tahun 2019 hingga 2023, telah terjadi lebih dari 350 pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah umur, dengan Kecamatan Kwandang sebagai penyumbang tertinggi, dan 76 persen diantaranya melibatkan perempuan.

Tabel 2.150
Peristiwa Nikah di Bawah Umur

No.	Kantor Urusan Agama	Tahun										Jumlah
		2019		2020		2021		2022		2023		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	KUA Kwandang	4	4	5	17	4	24	9	23	15	40	145
2	KUA Atinggola	0	2	0	4	0	8	3	7	1	7	32
3	KUA Anggrek	1	2	5	7	2	12	7	9	6	24	75
4	KUA Sumalata	5	2	1	7	1	6	6	19	0	7	54
5	KUA Tolinggula	2	2	0	3	1	6	0	2	0	4	20
6	KUA Gentuma Raya	1	2	1	3	1	6	3	8	0	6	31
	Jumlah	13	14	12	41	9	62	28	68	22	88	357

Sumber: Kantor Kementerian Agama Gorontalo Utara, 2024

2.1.3.6.8 Perlindungan Anak

Menyadari peran penting negara dalam menjamin hak dan perlindungan khusus anak, sejak tahun 2019 disusun Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk mengukur capaian upaya perlindungan anak yang telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. IPA, IPHA, dan IPKA menggambarkan capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA), meliputi hak sipil dan kebebasan (klaster I), hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (klaster II), hak kesehatan dasar dan kesejahteraan (klaster III), hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang (klaster IV), serta perlindungan khusus anak (klaster V).

Dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo sehingga perlu perhatian serius terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Pada klaster III, menjadi satu-satunya aspek di mana Gorontalo Utara mencatat kinerja di atas rata-rata, mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar anak sehingga menjadi pondasi untuk pembangunan di bidang layanan dasar anak. Namun pada klaster perlindungan khusus anak (V) dan hak sipil (I), skor Gorontalo Utara masih tertinggal, mengindikasikan adanya risiko terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

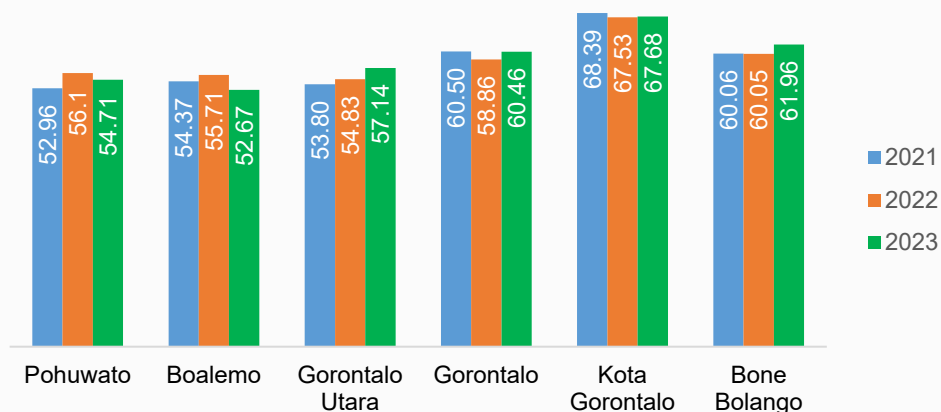
Tabel 2.151
IPA, IPKA, IPHA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Klaster I	Klaster II	Klaster III	Klaster IV	Klaster V	IPA	IPHA	IPKA
1	Boalemo	51,96	65,68	75,72	23,25	45,44	52,67	54,69	49,74
2	Gorontalo	53,74	75,85	76,96	27,09	66,16	60,72	59,14	65,17
3	Pohuwato	50,19	68,06	76,08	21,28	55,35	54,71	54,50	54,96
4	Bonebolango	51,68	82,62	70,19	24,31	74,70	61,96	58,31	70,44
5	Gorontalo Utara	50,48	70,79	77,60	24,57	59,47	57,14	56,45	58,10
6	Kota Gorontalo	53,75	89,88	76,97	31,61	80,04	67,68	64,11	80,94
	Provinsi Gorontalo	52,40	77,21	76,04	25,89	66,58	60,46	58,69	65,79

Sumber: KemenPPA dan BPS, 2023

Secara *time series*, kinerja Gorontalo Utara telah positif, meski masih berada di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo, sehingga perlu percepatan agar tidak terus tertinggal dari daerah lain seperti Kota Gorontalo dan Bone Bolango yang secara khusus telah menunjukkan keberhasilan implementasi program perlindungan anak secara berkelanjutan.

Grafik 2.55
IPA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

2.1.3.6.9 Indeks Pembangunan Keluarga

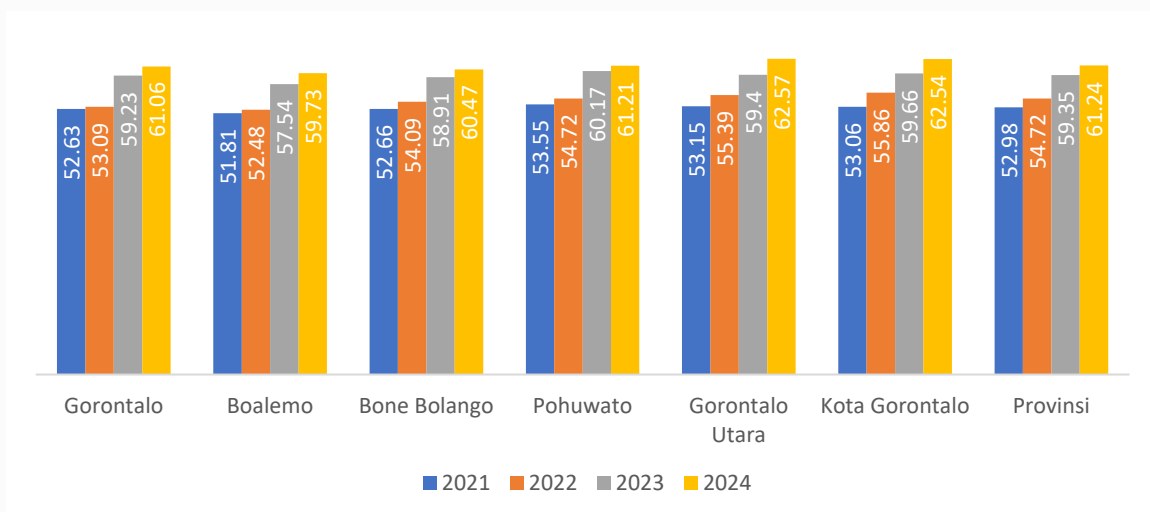
Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, sehingga diperlukan sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, yang kemudian dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku

kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan.

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. I-Bangga sangat krusial dalam perannya untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas keluarga.

Selama periode 2021-2024, kinerja Gorontalo Utara stabil dan konsisten naik meski masih berada dalam kategori “Berkembang”. Dalam 4 tahun, nilai iBangga naik sebesar 9,42 poin, lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Bahkan pada tahun 2024 Gorontalo Utara memuncaki daftar dengan nilai tertinggi, mengungguli bahkan Kota Gorontalo yang biasanya mendominasi pembangunan sosial. Dari gambaran kinerja di Grafik 2.56, mencerminkan keberhasilan strategi kebijakan lokal dalam mengoptimalkan peran keluarga sebagai pondasi pembangunan masyarakat.

Grafik 2.56
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo



Sumber: BKKBN, diolah

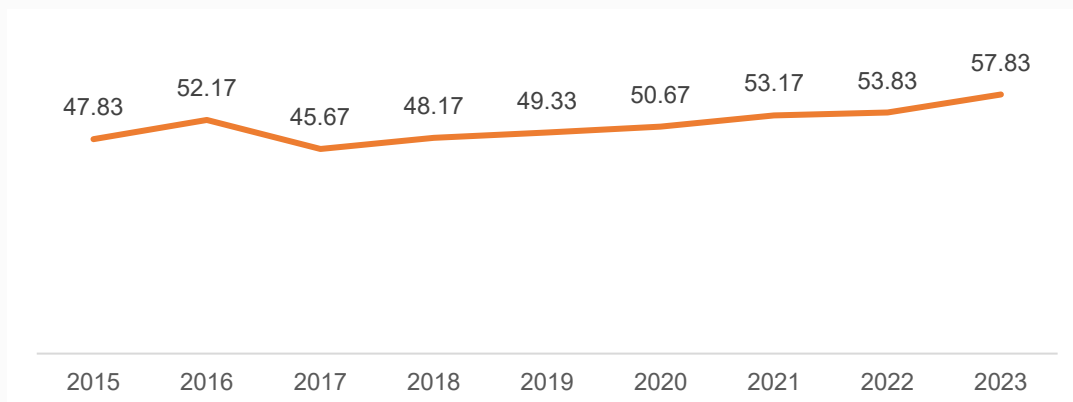
2.1.3.6.10 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup pemuda. Menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, IPP adalah indeks yang

digunakan untuk menilai tingkat pembangunan pemuda berdasarkan beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi sosial, dan keamanan, yang dihitung berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan cakupan hanya sampai tingkat provinsi. Namun, data tersebut masih dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara implisit terkait kondisi kepemudaan di Gorontalo Utara. IPP dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis kesejahteraan pemuda, perencanaan pembangunan, dan penentuan kebijakan sosial.

IPP Provinsi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 49,33 (2019) menjadi 57,83 (2023), mencerminkan perbaikan kualitas hidup pemuda dalam aspek pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan sosial politik. Kenaikan yang konsisten ini dipengaruhi oleh pemulihan pasca pandemi, program pelatihan vokasi, dan perluasan akses layanan dasar. Peningkatan skor mengindikasikan progres positif, tetapi perlu diperkuat dengan kebijakan berkelanjutan dan pengukuran yang lebih granular untuk memastikan pemerataan pembangunan pemuda di seluruh wilayah Gorontalo.

Grafik 2.57
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo



Sumber: IPP Provinsi, Kemenpora RI, 2024



Pada tahun 2023, komposisi pemuda yang tercatat sebesar 24,20 persen (Statistik Pemuda, 2023). Populasi pemuda di Provinsi Gorontalo sebanyak 300.470 jiwa (2022), merupakan populasi terendah di Pulau

Sulawesi. Nilai IPP Gorontalo tahun 2023 meningkat karena terdapat peningkatan pada empat domain yaitu domain gender dan diskriminasi, partisipasi dan kepemimpinan, lapangan dan kesempatan kerja, serta domain kesehatan dan kesejahteraan. Di sisi lain domain pendidikan mengalami stagnasi.

Bila dibandingkan dengan Nasional, terdapat 3 indeks domain yang bernilai lebih tinggi: domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta domain partisipasi dan kepemimpinan. Sedangkan dua domain lainnya bernilai lebih rendah, yaitu domain pendidikan serta gender dan diskriminasi.

Tabel 2.152
Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo

Tahun	Pendidikan				Kesehatan dan Kesejahteraan					Lapangan dan Kesempatan Kerja		
	Rata-rata Lama Sekolah	APK Sekolah Menengah	APK Perguruan Tinggi	Capaian	Angka Kesakitan Pemuda	Persentase Korban Kejahatan	Persentase Pemuda yang Merokok	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	Capaian	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian
2015	8,85	84,09	30,35	63,33	14,49	0,93	29,86	8,75	52,5	0,32	11,43	40
2016	9,43	86,01	32,23	66,67	12,66	1,17	27,13	14,06	52,5	0,46	6,75	55
2017	9,34	81,31	37,88	66,67	13,54	1,56	30,17	24,96	40	0,10	11,74	35
2018	9,28	82,04	35,23	66,67	11,96	1,08	30,17	24,96	47,5	0,04	11,17	40
2019	9,89	83,38	36,71	66,67	12,42	1,73	28,34	19,59	45	0,23	10,70	45
2020	9,90	83,82	37,74	66,67	9,07	0,89	25,95	16,33	60	0,16	9,90	40
2021	10,14	83,68	37,32	66,67	11,53	0,49	25	15,66	62,5	0,16	8,69	40
2022	10,23	83,71	36,94	66,67	12,63	0,25	24,93	8,09	67,5	0,19	7,85	45
2023	10,38	84,44	36,23	66,67	9,55	0,25	24,42	6,47	72,5	0,24	7,99	50

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda 2023, 2024

<https://ipp.sarikata.com/document>

Tabel 2.153
Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo (lanjutan)

Tahun	Partisipasi dan Kepemimpinan				Gender dan Diskriminasi			
	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	Capaian	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA Keatas	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal	Capaian
2015	88,76	2,92	5,50	43,33	15,90	41,20	17,67	40
2016	88,76	2,92	5,50	43,33	14,74	41,45	22,36	43,33
2017	88,76	2,92	5,50	43,33	14,51	42,15	19,41	43,33
2018	78,09	5,76	6,46	43,33	15,29	42,18	21,70	43,33
2019	78,09	5,76	6,46	43,33	13,16	43,50	23,66	46,67
2020	78,09	5,76	6,46	43,33	14,73	44,35	20,16	43,33
2021	83,44	3,86	8,05	46,67	11,64	49,63	20,90	50
2022	83,44	3,86	8,05	46,67	13,65	46,98	19,64	50
2023	85,46	3,39	10,30	50,00	10,91	48,60	23,81	50

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda 2023, 2024

<https://ipp.sarikata.com/document>

2.1.3.6.11 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

IPBK adalah Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, sebuah indikator komposit (skala 0-100) yang dikembangkan oleh BKKBN sebagai alat ukur penting untuk mengetahui sejauh mana pembangunan telah mengedepankan penduduk "*people centered development*", bukan hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek utama pembangunan, juga mencerminkan integrasi isu-isu kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Indeks ini mencakup lima dimensi kunci:

- Partisipasi: misalnya cakupan layanan kontrasepsi, akses kesehatan, partisipasi pendidikan dan kerja.
- Keberlanjutan: akses sanitasi, air bersih, dan hunian layak.
- Inklusivitas: mencakup kelompok rentan, kemiskinan, *unmet need* KB, dan disabilitas.
- Holistik-integratif: stunting, usia perkawinan dini, akses informasi, dan transportasi.
- Kesenjangan: kesetaraan gender, kekerasan, jabatan, dan distribusi pendapatan.

Berdasarkan data tahun 2024, Gorontalo Utara meraih skor IPBK sebesar 63,6, dengan status PBK pada level kategori 3, yang mencerminkan capaian “Sedang” dengan ruang perbaikan signifikan, khususnya pada dimensi inklusivitas, yang berada pada posisi terendah kedua di Provinsi Gorontalo. Ini menunjukkan masih rendahnya cakupan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Tabel 2.154
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kabupaten /Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
		Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik-Integratif	Kesenjangan		
1	Boalemo	76,6	66,3	49,1	56,7	63,3	61,7	3
2	Gorontalo	77,0	80,7	48,7	49,8	75,0	64,6	3
3	Pohuwato	74,5	85,6	49,9	54,8	60,1	63,7	3
4	Bone Bolango	74,2	80,8	42,6	58,8	73,4	64,3	3
5	Gorontalo Utara	70,8	82,8	45,6	51,5	75,8	63,6	3

No	Kabupaten /Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
		Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik-Integratif	Kesetaraan		
6	Kota Gorontalo	70,6	91,8	48,6	71,9	46,2	63,7	3
	Provinsi Gorontalo	74,3	81,7	41,0	55,5	63,4	61,4	3

Sumber: BKKBN, 2025

Tabel 2.155
Skor Dimensi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Data Dimensi	Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo
A Partisipasi			
1	Jamkes	77,67	85,09
2	CPR	50,33	54,96
3	APS SLTA	79,28	76,33
4	TPAK 20-64 tahun	77,61	78,93
B Keberlanjutan			
1	Rumah layak	88,85	87,47
2	Sumber air minum bersih	88,88	90,21
3	Sanitasi layak	80,80	78,84
C Inklusivitas			
1	Tingkat kemiskinan	17,03	15,15
2	Unmet need	17,76	14,19
3	Pendidikan anak rumah tangga miskin	78,49	81,52
4	Penyandang disabilitas yang bekerja	27,15	25,12
5	Lansia mandiri	33,39	28,67
D Holistik Integratif			
1	Stunting	30,50	26,90
2	Akses informasi	61,03	65,30
3	Perkawinan usia dini	55,68	47,32
4	Akses transportasi umum	97,58	92,10
5	Akta lahir Balita	78,62	87,64
E Kesetaraan			
1	Kesetaraan jabatan	91,41	63,38
2	Prevalensi kekerasan	1,38	5,12
3	Kesenjangan pendapatan	18,40	18,14

Sumber: BKKBN, 2025

Bila dilihat secara keseluruhan, Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan kinerja pembangunan kependudukan yang cukup solid, terutama pada aspek “Keberlanjutan” dan “Kesetaraan”, namun menghadapi tantangan besar dalam inklusivitas dan akses layanan berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan



bahwa meskipun pelayanan dasar telah relatif merata, keterlibatan kelompok rentan dan akses ke pelayanan digital perlu ditingkatkan agar pembangunan benar-benar inklusif dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan sumber daya manusia, inovasi, ekonomi, fasilitas wilayah dan infrastruktur, serta iklim investasi.

2.1.4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.4.1.1 Angka Ketergantungan

Sebagaimana telah dijelaskan pada analisis mengenai demografi di bab ini halaman 101, struktur penduduk Gorontalo Utara tahun 2024 didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak 92.585 jiwa, atau sebesar 70,14 persen dari total penduduk. Penduduk yang belum produktif sebanyak 32.544 jiwa atau 24,65 persen, sedangkan yang sudah tidak produktif lagi sebanyak 6.862 jiwa setara 5,19 persen. Jika menggunakan persamaan untuk mencari angka ketergantungan (*dependency ratio*) menurut kaidah Badan Pusat Statistik, maka didapat perkiraan angka ketergantungan mencapai antara 42-43 persen, yang artinya setiap 100 orang usia produktif (15–64 tahun) harus mendukung sekitar 43 orang non-produktif (anak-anak dan lanjut usia). Capaian ini termasuk dalam kisaran moderat. Rasio ketergantungan <50 persen mencerminkan bahwa beban tidak terlalu memberatkan angkatan kerja.

Namun perlu diperhatikan bahwa beban tetap signifikan karena proporsi anak-anak sebesar 24,65 persen, menandakan kebutuhan besar terhadap layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan nutrisi. Sebaliknya usia lanjut 5,19 persen memperlihatkan kebutuhan layanan sosial seperti jaminan kesehatan dan kesejahteraan Lansia.

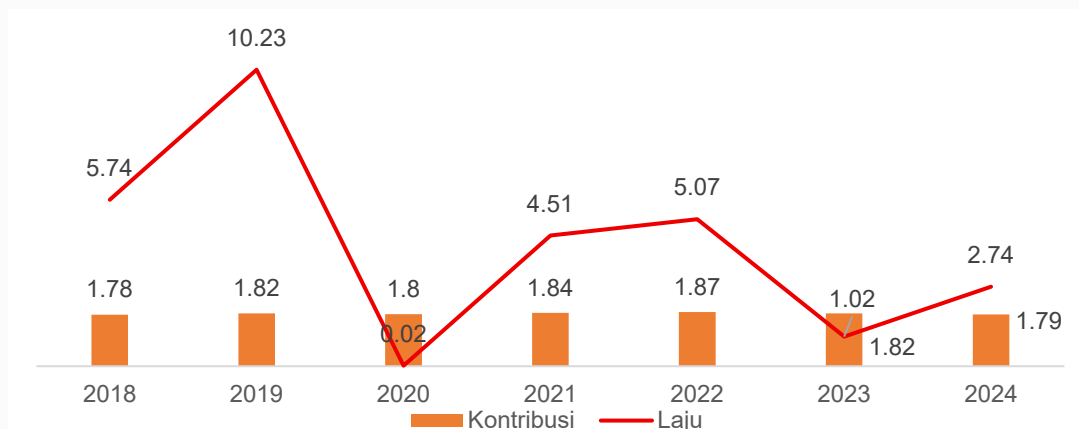
Secara umum, angka ini menunjukkan angka ketergantungan yang relatif sehat dan potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi, asalkan pemerintah daerah mampu menyelaraskan kebijakan pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan Lansia. Langkah strategis yang disarankan adalah peningkatan mutu SDM anak, pemberdayaan angkatan kerja, serta kelembagaan sosial bagi Lansia.

2.1.4.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.1.4.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Selama tahun 2018-2024, industri pengolahan di Gorontalo Utara belum berperan signifikan terhadap struktur ekonomi daerah, dengan kontribusi stagnan dan pertumbuhan yang volatil. Sektor ini terlihat sensitif terhadap guncangan eksternal dan kurang resilien secara struktural (menghadapi gangguan rantai pasok serta lemahnya basis teknologi dan manajemen produksi lokal). Namun demikian, visi untuk meningkatkan penetrasi sektor ini sangat kuat, karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Selain itu, tren pemulihan pasca pandemi membuka peluang untuk rekonstruksi industri lokal berbasis potensi unggulan daerah. Penguatan kapasitas, hilirisasi, dan intervensi kebijakan yang konsisten akan menjadi kunci untuk menjadikan sektor ini sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Untuk itu Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK), mengandalkan keunggulan Pelabuhan Anggrek, sebagai *enabler* kebijakan industrialisasi dengan mendorong potensi lokal.

Grafik 2.58
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Industri Pengolahan (%)
di PDRB Gorontalo Utara

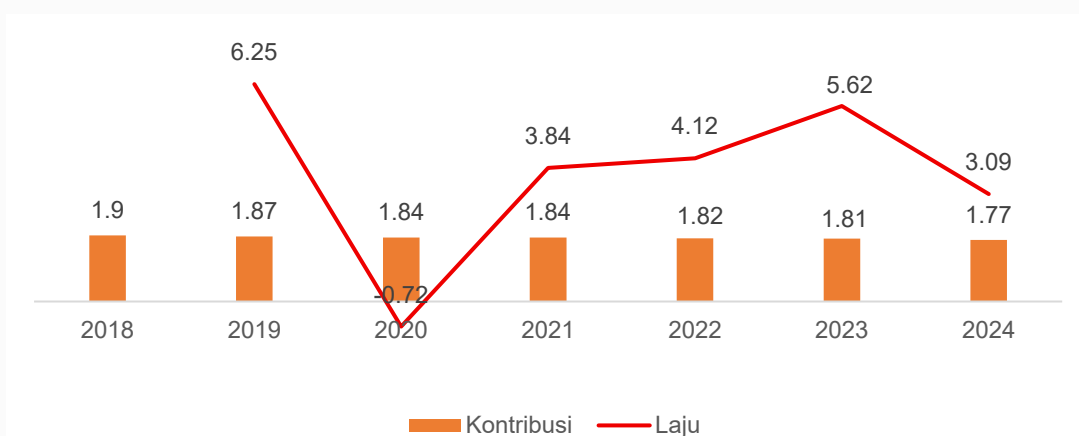


Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

2.1.4.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Mirip dengan industri pengolahan, kontribusi terhadap struktur ekonomi daerah dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (AMM) masih tergolong kecil. Namun selama periode 2018-2024, menunjukkan kinerja yang stabil dan positif, bahkan mengalami tren pemulihan yang kuat pasca pandemi, yang mengindikasikan resiliensi sektor AMM terhadap tekanan eksternal serta meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat.

Grafik 2.59
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi
& Makan Minum (%) di PDRB Gorontalo Utara



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis jasa dan pariwisata, namun perlambatan pertumbuhan pada

tahun 2024 menunjukkan perlunya strategi akseleratif melalui penguatan daya saing destinasi wisata (revitalisasi destinasi wisata lokal), peningkatan kapasitas/insentif bagi UMKM kuliner, promosi even dan budaya yang mampu menarik wisatawan dan memperluas pasar, serta keterhubungan transportasi dan digitalisasi melalui integrasi transportasi lokal dan pemanfaatan *platform* digital untuk reservasi dan review layanan.

2.1.4.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Dalam PDRB sektoral tidak terdapat sektor ekonomi kreatif (Ekraf), namun jika berkaca pada klasifikasi umum Ekraf yang diadopsi oleh Kemenparekraf dan Bappenas, subsektor ekonomi kreatif dalam sektoral PDRB ini dapat diasosiasikan dengan:

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (AMM) (kuliner, *hospitality*);
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Ekraf distribusi dan *retail*);
- Informasi dan Komunikasi (media, animasi, *digital content*);
- Jasa Pendidikan (terkait Ekraf berbasis pengetahuan);
- Jasa Perusahaan (desain, konsultan kreatif, dan lain sebagainya).

Dengan menjumlahkan nilai sektoral yang memiliki irisan langsung dengan sub sektor kreatif, didapatkan data sektoral ekonomi kreatif sebagaimana Tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156
Nilai Sektor Ekonomi Kreatif (Estimasi) Gorontalo Utara dan Proporsinya

No.	Tahun	Total Ekraf (Miliar Rupiah)	PDRB Total (Miliar Rupiah)	Proporsi Ekraf (%)
1	2018	349,04	2.177,97	16,02
2	2019	375,23	2.325,47	16,13
3	2020	379,77	2.325,06	16,33
4	2021	395,34	2.376,38	16,63
5	2022	422,52	2.455,76	17,20
6	2023	448,52	2.561,60	17,51
7	2024	466,31	2.668,43	17,48

Sumber: Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda, diolah

Sektor-sektor ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan tahunan yang positif, juga terlihat kontribusi terhadap total PDRB terus meningkat, yang

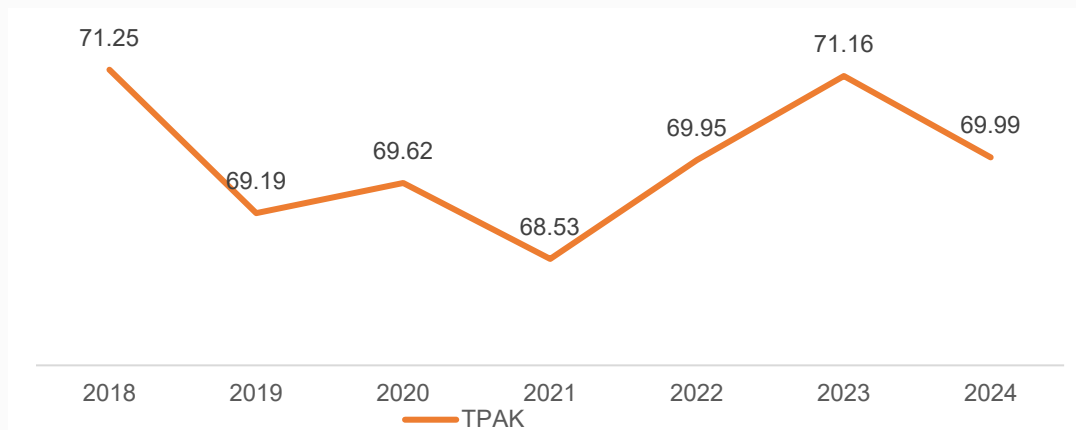
menunjukkan bahwa sektor Ekraf semakin strategis dalam perekonomian Gorontalo Utara.

Berdasarkan data sektoral PDRB, sektor Perdagangan dan Reparasi menyumbang >60 persen porsi ekonomi kreatif yang menandakan peran penting UMKM kreatif dan retail dalam ekosistem lokal. Selanjutnya, sektor Informasi dan Komunikasi bertumbuh cukup signifikan yang tentu saja karena ditopang oleh fenomena disrupsi digitalisasi ekonomi dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Selain itu, Jasa Pendidikan mulai mengambil peran yang lebih besar yang sekaligus menandakan adanya peluang transformasi ekonomi lokal dari berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis ide, inovasi, dan kreativitas. Tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong skala dan nilai tambah dari pelaku ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem digital, serta meningkatkan kolaborasi antar pelaku industri kreatif lokal.

2.1.4.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Gorontalo Utara relatif stabil dalam kisaran 68–71 persen selama tujuh tahun terakhir. Pemulihan pasca pandemi cukup terlihat pada tahun 2022-2023, namun sedikit terkoreksi di tahun 2024. Secara gender, perempuan menunjukkan peningkatan partisipasi, mencerminkan adanya kemajuan inklusi gender dalam dunia kerja. Sebaliknya, penurunan partisipasi laki-laki menjadi catatan penting yang dapat mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam sektor ekonomi dominan seperti pertanian dan perikanan ataupun dampak dari migrasi kerja keluar daerah.

Grafik 2.60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Gorontalo Utara (%)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Tabel 2.157
Dimensi Gender pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Gorontalo Utara

Gender	TPAK 2023 (%)	TPAK 2024 (%)	Δ Perubahan (%)
Perempuan	54,74	56,14	+2,55
Laki-laki	86,88	83,16	-4,28

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

2.1.4.2.5 Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah dalam beberapa regulasi menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovatif yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Untuk mendorong tingkat daya saing, tingkat kemandirian daerah, dan optimalisasi otonomi daerah, inovasi di suatu daerah diukur melalui indeks inovasi daerah.

Inovasi daerah yang diukur yang termasuk pada kategori inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta inovasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan daerah. Selain itu, terdapat aspek inovasi yang bersifat tematik: digitalisasi layanan pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, serta prioritas aktual Presiden (stunting, inflasi, Covid-

19, pendapatan asli daerah, *green economy*, tingkat kandungan dalam negeri, tata kota, serta stabilitas keamanan dan kehidupan sosial).

Dalam beberapa episode penyelenggaraan *Government Innovative Award*, Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Setelah berada dalam kondisi stagnan dan tidak aktif selama periode tahun 2020-2021, Gorontalo Utara mampu melonjak ke kategori “Inovatif” pada 2022. Meski mengalami penurunan di 2023, pada 2024 Gorontalo Utara kembali menunjukkan perbaikan signifikan. Hal demikian menjadi sinyal positif bahwa dengan penguatan komitmen, dukungan birokrasi, dan sistem pelaporan yang baik, Gorontalo Utara memiliki peluang besar untuk terus tumbuh sebagai daerah yang inovatif di masa depan.

Tabel 2.158
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten /Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	53	Kurang Inovatif	27,32	Kurang Inovatif	53,82	Inovatif	50,68	Inovatif	49,18	Inovatif
2	Boalemo	0	<i>Disclaimer</i>	58,07	Inovatif	47,22	Inovatif	44,96	Inovatif	51,84	Inovatif
3	Pohuwato	34	Kurang Inovatif	38,76	Inovatif	34,48	Kurang Inovatif	48,59	Inovatif	44,71	Inovatif
4	Bone Bolango	59	Kurang Inovatif	50,72	Inovatif	44,85	Inovatif	29,72	Kurang Inovatif	1,2	Kurang Inovatif
5	Gorontalo Utara	3	Kurang Inovatif	0	<i>Disclaimer</i>	41,46	Inovatif	32,65	Kurang Inovatif	46,67	Inovatif
6	Kota Gorontalo	763	Inovatif	44,36	Inovatif	51,47	Inovatif	49,30	Inovatif	46,28	Inovatif
Provinsi Gorontalo		59	Kurang Inovatif	50,42	Inovatif	48,19	Inovatif	44,63	Inovatif	34,68	Kurang Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

Untuk peningkatan capaian dan keberlanjutan kategori “Inovatif” di masa depan perlu perbaikan secara fundamental, seperti penguatan SDM inovasi daerah, peningkatan monitoring dan evaluasi, berfokus pada inovasi lintas sektor, serta kolaborasi antar daerah seperti berkaca ke Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo yang lebih stabil pencapaiannya.

2.1.4.2.6 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah pelaku usaha (wirausaha) terhadap total jumlah penduduk usia kerja atau total penduduk dalam suatu wilayah. Indonesia secara nasional menargetkan rasio kewirausahaan sebesar 3,95 persen pada tahun 2024 (sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI).

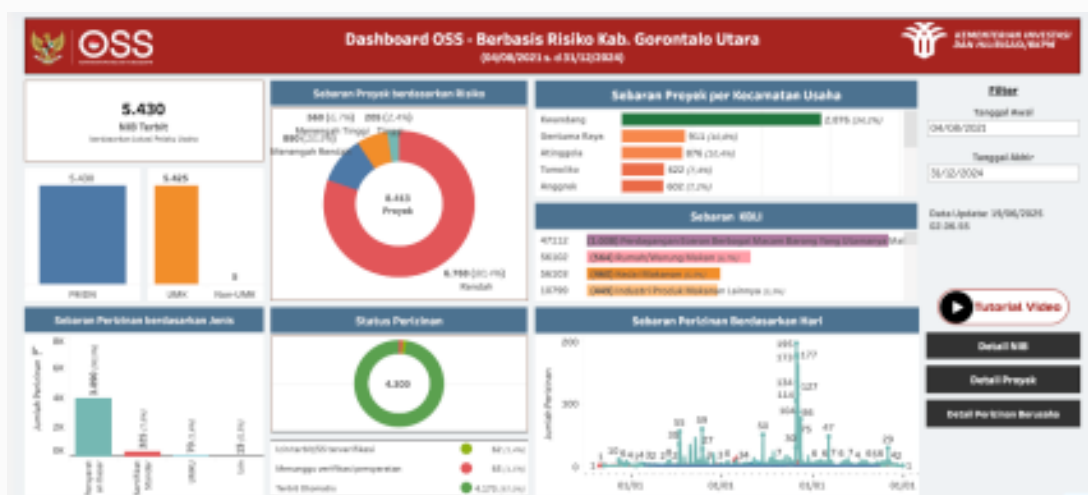
Secara umum, formulasi yang dipakai dalam menghitung indikator ini yaitu:

$$\text{Rasio kewirausahaan} = \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Wirausaha}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \right) \times 100\%$$

Saat ini angka rasio kewirausahaan Kabupaten Gorontalo Utara tidak tersedia baik di Badan Pusat Statistik, maupun di Kementerian UMKM melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, sehingga untuk menghitungnya, perlu diketahui estimasi jumlah pelaku wirausaha dengan menggunakan *proxy* jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB Ini merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk pelaku usaha, baik usaha baru maupun yang sudah berdiri, yang berfungsi sebagai pengganti beberapa izin usaha sebelumnya seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan.

Total NIB yang terdaftar di OSS dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2024 sejumlah 5.430 entitas, sedangkan untuk jumlah penduduk usia produktif tahun 2024 berdasarkan data struktur penduduk yang tercantum pada bab ini halaman 101, sebanyak 92.585 jiwa, sehingga berdasarkan formulasi, estimasi angka rasio kewirausahaan mencapai angka 5,86 persen.

Gambar 2.29
Dashboard OSS Gorontalo Utara



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025

Jika dibandingkan dengan angka rasio kewirausahaan Provinsi Gorontalo tahun 2021 berdasarkan publikasi Kementerian UMKM RI yang mencapai 2,93 persen, meskipun terdapat perbedaan rentang tiga tahun, mengindikasikan kinerja

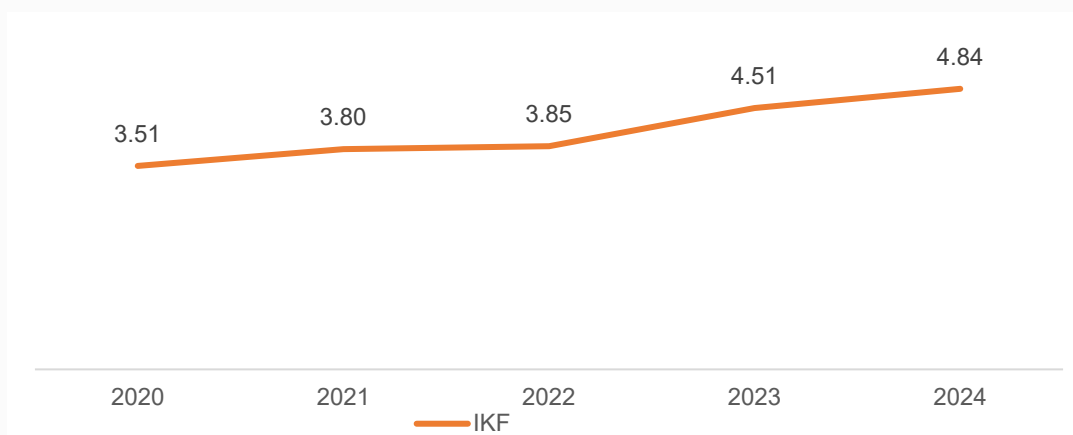
iklim wirausaha Gorontalo Utara relatif lebih baik, pun jika dibandingkan Nasional, sekaligus kemajuan dalam ekosistem wirausaha lokal, masuk kategori daerah dengan iklim kewirausahaan berkembang. Berikutnya tantangan di depan utamanya adalah menjaga keberlangsungan usaha, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kualitas dan inovasi pelaku usaha lokal.

2.1.4.2.7 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pengeluarannya sendiri tanpa tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Indeks ini mencerminkan kemampuan keuangan daerah, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibandingkan dengan total pendapatan atau total belanja daerah.

Dari data yang diperoleh dari realisasi APBD Gorontalo Utara yang telah diaudit Badan Pengawas Keuangan, rentang tahun 2020 hingga tahun 2024, IKF Gorontalo Utara meskipun ada perbaikan namun masih jauh dibawah 15 persen, sehingga termasuk “Tidak Mandiri”, artinya hampir seluruh pendapatannya berasal dari Pemerintah Pusat.

Grafik 2.61
Indeks Kemandirian Fiskal Gorontalo Utara (%)



Sumber: Badan Keuangan, diolah

Dengan IKF yang masih rendah, diperlukan strategi intensif untuk meningkatkan perolehan PAD terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi, mendorong investasi dan pengembangan ekonomi lokal, serta meningkatkan efektivitas

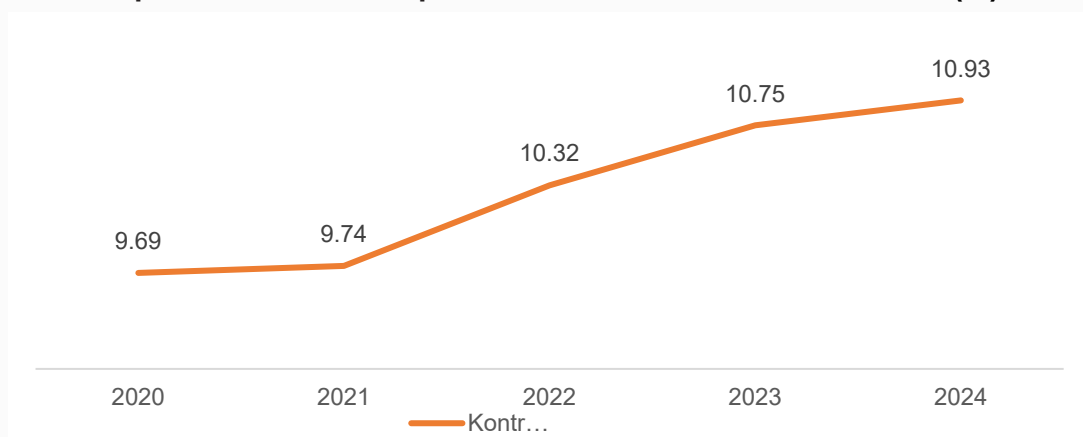
pengelolaan aset daerah, sehingga peningkatan kemandirian fiskal akan memperkuat daya tahan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2.1.4.2.8 Proporsi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada pembahasan mengenai Produk Domestik Regional Bruto, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, halaman 121 pada bab yang sama, disampaikan bahwa nilai sektoral Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda secara konsisten meningkat dengan total kenaikan selama periode tahun 2018 ke 2024 sebesar 66,5 persen, meski pada metode berdasarkan harga konstan sempat turun pada tahun pandemi dan menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal.

Jika dilihat dari sisi kontribusi, pun menunjukkan arah yang sejalan dimana kenaikan secara nilai juga terlihat dari peningkatan kontribusi yang rata-rata tumbuh 8,9 persen/tahun, secara relatif mencerminkan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal, ketersediaan infrastruktur perdagangan yang semakin membaik, serta dinamika permintaan barang konsumsi dan jasa reparasi kendaraan yang terus meningkat seiring peningkatan pendapatan masyarakat.

Grafik 2.62
**Kontribusi Sektoral Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di PDRB Gorontalo Utara (%)**



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Melihat Grafik 2.62 yang progresif, perlu untuk dicermati beberapa hal ke depan, yaitu tantangan digitalisasi dan penetrasi pasar daring dapat menggeser pola konsumsi, serta ketersediaan distribusi logistik yang efisien akan menjadi faktor kunci pertumbuhan sektor ini ke depan. Untuk itu beberapa strategi ke depan untuk meningkatkan kontribusi sektor ini perlu difokuskan diantaranya dalam hal digitalisasi UMKM dan pedagang lokal, penguatan rantai pasok dan infrastruktur distribusi, serta yang paling penting peningkatan daya beli masyarakat.

2.1.4.2.9 Proporsi Industri Mikro Kecil Gorontalo Utara terhadap Provinsi

Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam pengembangan Industri Mikro Kecil (IMK). Setelah terdampak pandemi di tahun 2021 dengan penurunan unit usaha hingga 17,3 persen, dan serapan tenaga kerja 25 persen, sektor ini berhasil bangkit dengan kuat di tahun 2023.

Dengan 4.693 unit IMK dan 8.563 tenaga kerja terserap, Gorontalo Utara menjadi salah satu penopang penting ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo. Kontribusi ~12 persen terhadap IMK provinsi menunjukkan potensi besar yang masih bisa ditingkatkan, terutama jika difasilitasi dengan pelatihan kewirausahaan, dukungan akses modal (fasilitasi pembiayaan mikro), digitalisasi usaha melalui *e-commerce*, pembangunan sentra IKM terpadu dan inkubasi usaha mikro, serta perluasan akses pasar lokal dan regional melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

Tabel 2.159
Entitas Industri Mikro Kecil dan Serapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten /Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2023	
		IKM	Tenaga Kerja	IKM	Tenaga Kerja	IKM	Tenaga Kerja
1	Boalemo	4.152	7.880	3.956	8.485	4.279	8.671
2	Gorontalo	7.751	12.310	6.377	9.952	13.246	24.667
3	Pohuwato	6.687	14.545	3.828	9.081	5.586	9.263
4	Bone Bolango	2.441	4.822	3.382	5.078	5.684	8.587
5	Gorontalo Utara	4.165	7.295	3.444	5.440	4.693	8.563
6	Kota Gorontalo	3.519	7.257	4.774	7.680	5.437	11.264
Provinsi Gorontalo		28.715	54.109	25.761	45.716	38.925	71.015

Sumber: Survey Industri Mikro dan Kecil Tahunan (BPS), diolah

Data pada Tabel 2.147 secara umum menunjukkan resiliensi IMK di Provinsi Gorontalo, dengan menunjukkan penurunan pada tahun 2021 yang kemungkinan besar diakibatkan pandemi Covid 19 terhadap sektor informal, namun kembali meningkat di tahun berikutnya, sebagai cermin efektivitas program pemulihan ekonomi daerah dan ketahanan sektor UMKM, bahkan jauh di atas sebelum pandemi.

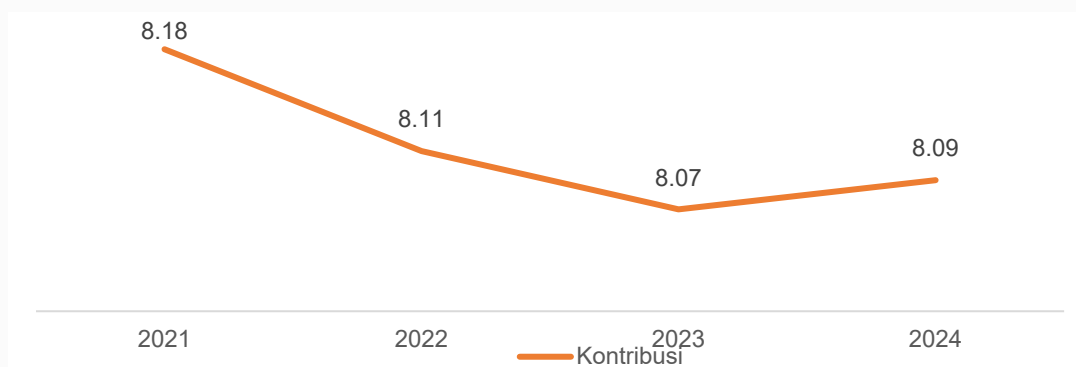
2.1.4.2.10 Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap PDRB Provinsi Gorontalo

Secara umum, kontribusi Kabupaten Gorontalo Utara terhadap total PDRB Provinsi Gorontalo menunjukkan tren menurun sejak 2021, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara secara relatif tidak secepat kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo dalam rentang periode tersebut. Hal tersebut relatif dapat disebabkan beberapa faktor:

- Dominasi sektor ekonomi tradisional seperti pertanian yang pertumbuhannya melambat;
- Ketertinggalan dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi modern (misalnya industri pengolahan, jasa keuangan, dan teknologi);
- Ketergantungan tinggi pada belanja pemerintah dan rendahnya investasi swasta produktif.

Meski demikian, kenaikan tipis pada 2024 menjadi sinyal optimisme, yang perlu dikawal dengan kebijakan afirmatif untuk memperkuat produktivitas ekonomi lokal, seperti misalnya diversifikasi ekonomi di luar sektor primer untuk meningkatkan daya saing, penguatan UMKM dan sektor perdagangan sebagai sektor potensial penyumbang PDRB, peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk mendorong aktivitas logistik dan investasi, serta optimalisasi potensi wisata dan sumber daya lokal untuk menarik ekonomi kreatif dan sektor jasa.

Grafik 2.63
Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo (%)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

2.1.4.2.11 Return on Assets BUMD

RoA adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), RoA digunakan untuk menilai efisiensi BUMD dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

Rumus RoA adalah:

$$RoA = \left(\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \right) * 100\%$$

Secara umum, RoA yang dianggap baik adalah di atas 5 persen atau lebih, bahkan di atas 20 persen sudah dianggap sangat baik menurut *ESG Intelligence* (www.esgi.ai). Namun, interpretasi tersebut bisa bervariasi tergantung pada jenis industri dan kondisi pasar. Untuk BUMD, nilai RoA yang baik perlu dilihat dalam konteks tujuan pendirian BUMD tersebut dan dibandingkan dengan kinerja BUMD lain di sektor yang sama. Satu-satunya BUMD yang ada saat ini adalah Perumda Tirta Gerbang Emas.

Tabel 2.160
Return on Assets (RoA) PUDAM Tirta Gerbang Emas

No.	Keterangan	Laporan Keuangan Tahun-		
		2022	2023	2024
1	Laba Bersih	(824.781.419,00)	(180.281.421,00)	(1.077.640.142,00)
2	Total Asset	14.161.347.419,00	14.168.577.506,00	13.580.937.364,00
3	RoA	-5,82%	-1,27%	-7,93%

Sumber: Laporan Keuangan Perumda Tirta Gerbang Emas Tahun 2024

Dari Tabel 2.148, dapat ditarik beberapa informasi dan interpretasi, yaitu:

- Tahun 2022

RoA tercatat sebesar -5,82 persen, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian signifikan dibandingkan total aset yang dimilikinya, mencerminkan rendahnya efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan.

- Tahun 2023

Kondisi sempat membaik dengan penurunan kerugian dan RoA meningkat ke -1,27 persen, mengindikasikan bahwa PUDAM sempat berada di jalur pemulihan dari sisi efisiensi pemanfaatan aset, walaupun masih mencatatkan kerugian.

- Tahun 2024

Sayangnya, kinerja keuangan kembali memburuk. RoA turun menjadi -7,93 persen, didorong oleh kerugian bersih terbesar dalam tiga tahun terakhir. Penurunan juga terjadi pada total aset, menandakan kemungkinan pengurangan investasi atau depresiasi nilai aset.

Secara umum, kondisi BUMD PUDAM Tirta Gerbang Emas tidak sehat secara finansial, dan menunjukkan urgensi penanganan manajerial dan operasional. Capaian nilai negatif dan memburuk dari tahun ke tahun ini perlu dianalisis lebih dalam, namun secara umum menandakan:

- Operasional belum efisien;
- Biaya operasional atau distribusi tinggi;
- Ada kemungkinan tarif yang belum mencukupi untuk menutup biaya operasional;
- Potensi piutang atau kebocoran dalam sistem manajemen keuangan.

Terlepas dari alasan sebenarnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ke depan, misalnya:

- Evaluasi struktur biaya dan lakukan efisiensi operasional;
- Review tarif layanan agar sesuai dengan biaya produksi dan distribusi.
- Perkuat sistem penagihan dan pengelolaan piutang.

- Optimalkan aset agar menghasilkan pendapatan atau efisiensi lebih tinggi.
- Audit independen untuk mengidentifikasi titik kelemahan struktural keuangan (melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

2.1.4.2.12 Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) membangun sistem statistik daerah yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan.

IPS disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan mencerminkan kemampuan daerah dalam:

1. Ketersediaan data statistik sektoral;
2. Kualitas metadata dan metodologi;
3. Pengelolaan dan koordinasi statistik lintas sektor;
4. Pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Komponen IPS umumnya meliputi:

- Kelembagaan statistik: terkait peran walidata, regulasi, dan SDM statistik;
- Ketersediaan data: terkait ketersediaan data sektoral sesuai kebutuhan;
- Kualitas metadata: terkait ketersediaan metadata dan sesuai standar BPS;
- Interoperabilitas: terkait integrasi antar OPD dan pemanfaatan *platform*;
- Pemanfaatan statistik: penggunaan data dalam perencanaan/pelaporan.

Tabel 2.161

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Gorontalo Utara

No.	Domain	Tahun 2023		Tahun 2024	
		IPS Nasional	Gorontalo Utara	IPS Nasional	Gorontalo Utara
1	Prinsip SDI	1,81	1,75	2,43	2,00
2	Kualitas Data	1,70	1,26	2,27	1,67
3	Proses Bisnis Statistik	1,82	1,47	2,47	1,69
4	Kelembagaan	1,85	1,74	2,32	2,20
5	Statistik Nasional	1,74	1,79	2,20	2,11
Indeks Pembangunan Statistik		1,78	1,58	2,35	1,91

Sumber: Keputusan Kepala BPS Nomor B-386.mm/01000/ES/11/2023 dan B-773/01000/ES/2024

Secara umum, nilai IPS Gorontalo Utara meskipun masih berada di bawah rata-rata IPS Nasional, memiliki tren positif yang menunjukkan kemajuan dalam penguatan sistem statistik daerah. Peningkatan paling signifikan terjadi pada

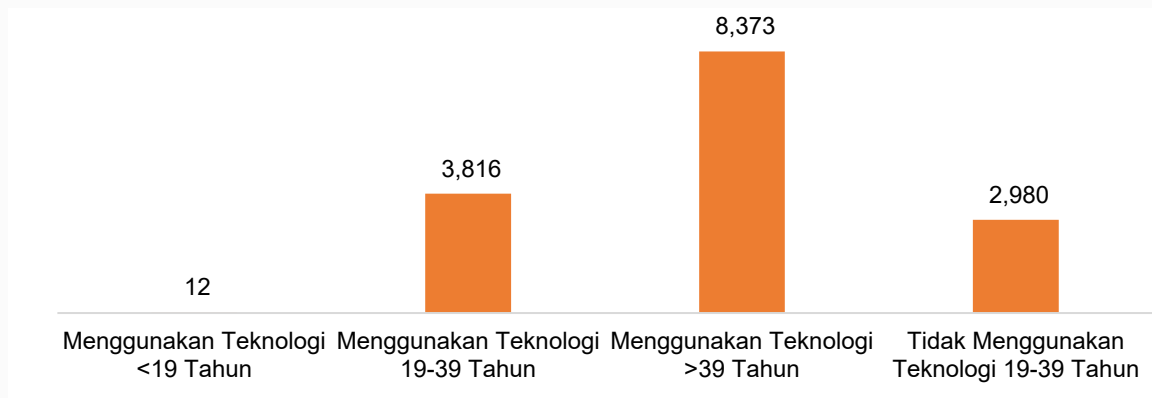
domain “Kelembagaan” dan “Kualitas data”, mengindikasikan perbaikan koordinasi dan tata kelola statistik sektoral di daerah. Ke depan, perlu langkah strategis lanjutan untuk memperkuat integrasi data antar sektor dan penguatan SDM statistik daerah, seperti misalnya penguatan kapasitas SDM statistik OPD melalui pelatihan teknis dan pendampingan dari BPS, pemutakhiran metadata dan standar kualitas data sesuai prinsip SDI dan peraturan BPS, peningkatan interoperabilitas dan sistem informasi statistik daerah agar mampu menyuplai kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan secara efisien, serta evaluasi berkala atas kinerja walidata dan forum Satu Data di tingkat kabupaten.

2.1.4.2.13 Penggunaan Teknologi Digital oleh Petani

Disrupsi penggunaan teknologi digital (salah satunya pemanfaatan internet) oleh petani relatif perlu ditingkatkan, terutama pada rentang usia produktif di atas 19 hingga 39 tahun yang secara rata-rata masuk pada kategori milenial. Data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) modern, penggunaan internet/telepon pintar/teknologi informasi, penggunaan *drone*, dan/atau penggunaan kecerdasan buatan.

Petani milenial berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2023, tercatat sebanyak 15.181 orang dengan 8.373 petani usia >39 tahun menggunakan teknologi, lebih banyak dibanding kelompok usia milenial. Juga didapat informasi bahwa meskipun kelompok usia milenial (19–39 tahun) lebih potensial untuk adopsi teknologi, masih terdapat 2.980 petani dalam kelompok ini yang belum menggunakan teknologi, menandakan adanya kesenjangan digital bahkan di kalangan petani muda, dan perlunya pendekatan edukatif dan fasilitatif untuk memperluas adopsi teknologi di kalangan petani muda.

Grafik 2.64
Penggunaan Teknologi Digital pada Entitas Petani di Gorontalo Utara



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

2.1.4.2.14 Pengguna Internet oleh Rumah Tangga

Penggunaan internet untuk memudahkan kehidupan dan keperluan komunikasi semakin penting di era digital ini. Internet memudahkan berbagai aktivitas pekerjaan, mulai dari komunikasi, kolaborasi, riset, hingga pemasaran. Mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah pekerja, baik buruh, karyawan, maupun wiraswasta, yang memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan pekerjaan. Di Gorontalo Utara, indikator penggunaan internet untuk melihat sejauh mana SDM Gorontalo Utara memanfaatkan internet untuk mendukung pengembangan inovasi dan produktivitas.

Selama periode tahun 2022-2024, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan internet oleh anggota rumah tangga di Gorontalo Utara. Tahun 2024 mencatat lonjakan tertinggi, terutama di kalangan laki-laki dan kelompok ekonomi bawah. Namun demikian, tantangan masih nyata dalam pemerataan akses digital, terutama bagi:

- Perempuan, yang menunjukkan pertumbuhan stagnan dalam penggunaan internet.
- Kelompok masyarakat berpendapatan rendah, meskipun menunjukkan perbaikan, tetap tertinggal dari kuintil atas.

Tabel 2.162

Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir di Gorontalo Utara

No.	Keterangan	Tahun		
		2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Penggunaan internet	56,39	56,74	64,15
2	Pengguna internet gender laki-laki	56,57	56,88	64,69
3	Pengguna internet gender perempuan	53,97	54,61	54,78
4	Penggunaan internet berdasarkan kuintil pengeluaran:			
4.1	Kelompok 40 persen terendah	46,61	48,17	56,65
4.2	Kelompok 40 persen menengah	57,19	58,90	63,93
4.3	Kelompok 20 persen teratas	73,21	68,91	79,43

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Gorontalo Utara (BPS) diolah

Dengan informasi yang disampaikan pada Tabel 2.150, untuk meningkatkan cakupan penggunaan internet dalam kehidupan perlu dilakukan berbagai kebijakan strategis diantaranya seperti perluasan infrastruktur internet terjangkau untuk kelompok pendapatan rendah, program literasi digital berbasis gender yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, dan intervensi berbasis komunitas untuk memperkecil kesenjangan digital antarwilayah dan sosial ekonomi.

2.1.4.2.15 Indeks Daya Saing Digital

Untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi di masyarakat, dihitung Indeks Daya Saing Digital guna melihat sejauh mana penciptaan teknologi digital yang berupa pilar-pilar digital menunjang sektor ekonomi dan menciptakan pemerataan. Pemerintah daerah dapat melihat capaian dari masing-masing pilar digital tersebut dan digunakan sebagai dasar dalam penciptaan kebijakan pendorong daya saing daerah.

Perhitungan indeks daya saing digital saat dokumen ini disusun masih difokuskan di tingkat provinsi dan beberapa kota besar, sehingga Gorontalo Utara secara spesifik belum memiliki nilai. Sebagai gambaran, digunakan nilai daya saing digital Provinsi Gorontalo untuk melihat sejauh mana pilar-pilar

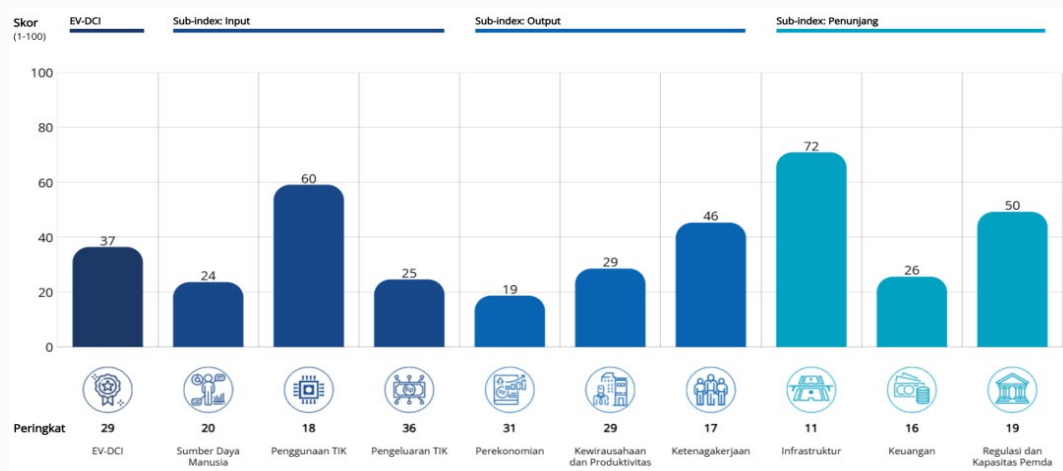
Peringkat provinsi					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
20	16	21	30	20	29
Skor: 27,5	32,3	33,5	35,1	38,1	37,0

digital di Gorontalo mampu menggerakkan ekonomi.

Peringkat Provinsi
Gorontalo mengalami

fluktuasi peringkat dari posisi 16 di tahun 2021 menjadi posisi 21 di tahun 2022, dan kembali turun di tahun 2023 menjadi peringkat 30. Pada tahun 2024 jauh lebih baik menjadi peringkat 20, dan justru kembali turun di peringkat 29 setahun berselang dengan skor 37,0.

Grafik 2.65



Persebaran Skor Indeks Daya Saing Digital Provinsi Gorontalo

Sumber: <https://east.vc/id/reports/east-ventures-digital-competitiveness-index-2025/>

Meski mengalami tren kenaikan skor, Gorontalo belum mampu mengejar peningkatan provinsi lainnya. Pada tahun 2025, pilar “Infrastruktur” menjadi skor tertinggi menunjukkan pondasi digital yang cukup solid. “Regulasi dan Kapasitas Pemerintah” masih cukup baik dalam aspek *governance*, pun dalam “Keterjangkauan” menggambarkan aksesibilitas digital yang relatif memadai. Beberapa pilar yang membutuhkan perhatian seperti “Perekonomian” yang merupakan skor terendah menggambarkan transformasi ekonomi digital masih sangat tertinggal, “Sumber Daya Manusia” menunjukkan kapasitas SDM digital perlu ditingkatkan. Dalam hal “Keuangan” juga perlu jadi perhatian karena sistem keuangan digital belum optimal, senada dengan “Penggunaan TIK oleh Pemerintah” yang menunjukkan penggunaan *e-government* masih lemah.

Beberapa kebijakan, terutama dalam jangka pendek, bisa dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo (dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara) dalam upaya meningkatkan daya saing digital masyarakatnya, seperti melakukan upaya yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dan *startup*

lokal, selain itu melakukan program pelatihan digital untuk meningkatkan kualitas SDM, serta percepatan adopsi teknologi dalam layanan pemerintahan.

2.1.4.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

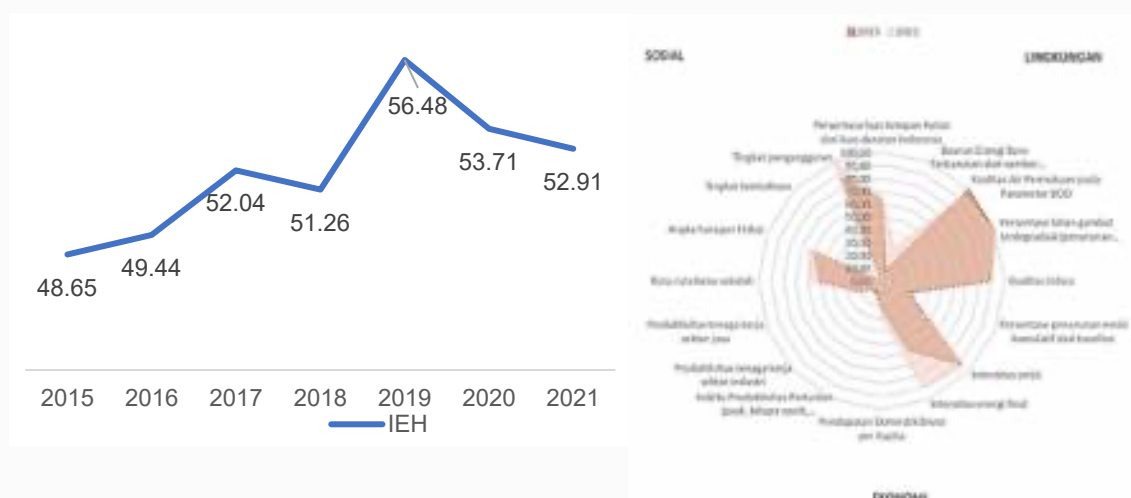
2.1.4.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Secara analitis dan kontekstual, Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index* (GEI) menjadi alat ukur *tangible*, representatif, dan akurat untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau, juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang serta mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, sebagai tulang punggung dalam proses transisi menuju Ekonomi Hijau.

Indeks ini terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pilar ekonomi terdiri atas enam indikator: intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Sementara itu, pilar sosial mencakup empat indikator, yakni tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Pilar lingkungan meliputi lima indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

Grafik 2.66

Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Gorontalo & Komponen Pembentuknya



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Gorontalo menunjukkan progres positif secara umum sejak 2015, dengan puncak pada tahun 2019. Namun, pasca-pandemi, terjadi stagnasi akibat tekanan terhadap sektor lingkungan dan tantangan dalam produktivitas ekonomi. Peningkatan kualitas air dan penurunan emisi energi menjadi sinyal kemajuan, tetapi degradasi tutupan hutan dan stagnasi produktivitas sektor jasa menunjukkan masih adanya risiko struktural. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu ada investasi yang lebih besar dalam sektor-sektor hijau, transformasi tenaga kerja, serta perlindungan sumber daya alam secara terukur.

Meski belum tersedia nilai eksplisit Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Gorontalo Utara, struktur PDRB yang masih didominasi sektor pertanian dan perikanan memberikan ruang besar untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan. Namun, laju pertumbuhan sektor konstruksi dan perdagangan yang pesat perlu dikawal dengan kebijakan pro-lingkungan agar tidak menurunkan daya dukung lingkungan. Perlu adanya integrasi lintas sektor dalam kebijakan ekonomi hijau berupa perluasan kebijakan konservasi hutan dan lahan secara proaktif, mendorong inovasi teknologi hijau di sektor pertanian, air, dan energi, berfokus pada penciptaan *green jobs* di sektor jasa, energi, dan pariwisata, dan peningkatan data lingkungan sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan.

2.1.4.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

IBEI merupakan sebuah alat ukur untuk menilai kemajuan ekonomi biru-yakni ekonomi yang berbasis sumber daya laut dan pesisir dan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu provinsi berhasil memanfaatkan ekosistem laut secara berkelanjutan, yang terdiri dari tiga pilar utama:

- Pilar Ekonomi: meliputi perikanan tangkap dan budidaya, industri kelautan, logistik dan pariwisata maritim, serta inovasi teknologi kelautan;
- Pilar Lingkungan: mencakup kualitas ekosistem laut, konservasi sumber daya laut, dan energi terbarukan;

- Pilar Sosial: meliputi aspek kesejahteraan masyarakat pesisir, literasi kelautan, dan kesehatan terkait konsumsi produk laut.

Nilai IBEI distandardisasi skala 0–100, dan digunakan secara berkala untuk memantau kinerja ekonomi biru di tingkat provinsi. Wilayah laut terluas di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga IBEI Provinsi Gorontalo digunakan sebagai *proxy* IBEI Gorontalo Utara. Pada tahun 2023, Provinsi Gorontalo mencatatkan skor 37,03, dan setahun berselang menjadi 38,02 yang menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo berada di jalur tengah perkembangan ekonomi biru, memiliki potensi dan kekuatan (terutama sektor perikanan tangkap, ekowisata, dan pemanfaatan teknologi kelautan), tapi perlu percepatan implementasi konservasi, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir agar dapat naik kelas, karena masih terdapat ruang besar untuk peningkatan pada aspek konservasi ekosistem pesisir, diversifikasi industri kelautan, serta kesejahteraan dan edukasi masyarakat pesisir.

2.1.4.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Bauran energi primer merujuk pada komposisi berbagai sumber energi yang digunakan dalam sistem energi suatu wilayah sebelum diubah menjadi bentuk energi lain (seperti listrik atau bahan bakar olahan). Energi primer mencakup sumber daya seperti minyak bumi dan turunannya, batubara, gas alam, serta Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti air (hidro), angin, surya, bioenergi, maupun panas bumi.

Proporsi EBT dalam bauran energi primer di Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan dari 1 persen di tahun 2015 menuju proyeksi 16,7 persen pada tahun 2025, dan akan terus meningkat menuju 35 persen pada tahun 2050. Berdasarkan data tahun 2023, porsi EBT masih berada di angka 12,35 persen berada sedikit diatas target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tahun 2023 sebesar 11,76 persen. Namun, realisasi listrik masih didominasi oleh bahan bakar fosil (diesel dan batubara), dengan kontribusi skala PLTA yang terbatas.

Untuk Kabupaten Gorontalo Utara, bauran EBT primer di level kabupaten (selain data PLN listrik) belum tersedia secara publik. Oleh karena itu, digunakan pendekatan *indirect* dan inferensi. Ketenagalistrikan lokal sebagian besar menggunakan sumber diesel dan batubara, dengan hanya sebagian kecil EBT (*hydro*, biosolar), sehingga proporsi EBT primer pada tahun 2024 mungkin masih <10 persen, yang mengindikasikan bahwa potensi energi hijau, terutama solar dan mikro-hidro, belum tergarap optimal. Percepatan transisi energi di Gorontalo Utara memerlukan perencanaan strategis, investasi EBT bertingkat, dan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar target keberlanjutan dan ketahanan energi bisa tercapai.

2.1.4.4 Transformasi Digital

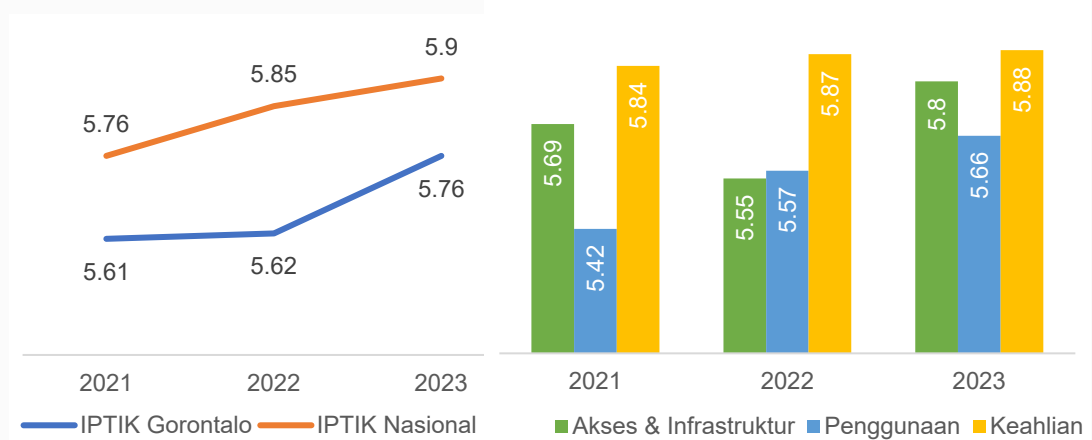
2.1.4.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Peranan TIK bermanfaat untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Manfaat konektivitas terhadap TIK dan internet sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan ukuran komposit yang menggabungkan tiga dimensi utama pembangunan TIK: Akses dan Infrastruktur, Penggunaan, dan Keahlian (literasi TIK). Indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesiapan daerah menghadapi era transformasi digital di tingkat provinsi.

Berdasarkan metode baru penghitungan Indeks Pembangunan TIK tahun 2023, dari skala 0-100, nilai Indonesia untuk Indeks Pembangunan TIK 2021 sebesar 80,1 (peringkat 80 dari 169 negara), tahun 2022 sebesar 82,8 (peringkat 82 dari 170 negara). Di antara negara-negara ASEAN, posisi Indonesia cukup moderat. Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki Indeks Pembangunan TIK yang lebih unggul.

Grafik 2.67
Indeks Pembangunan TIK Provinsi Gorontalo dan Nasional,
dan Komponen Pembentuknya



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Indeks Pembangunan TIK Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2023, dengan peningkatan bertahap sebesar 0,01 poin setiap tahunnya. Meskipun peningkatannya relatif kecil, tren yang stabil ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur dan layanan TIK di Provinsi Gorontalo. Ketika dibandingkan dengan Nasional, Gorontalo masih berada di bawah rata-rata nasional dengan kesenjangan sekitar 0,14 poin yang perlu diatasi secara bertahap dengan cara memperkuat ekosistem digitalnya, meskipun masih terdapat tantangan struktural dan kesenjangan antar dimensi yang mengindikasikan bahwa infrastruktur tumbuh lebih cepat dibanding peningkatan kapasitas SDM dan adopsi teknologi produktif. Fokus utama sebaiknya diarahkan pada peningkatan penggunaan TIK masyarakat, mengingat komponen ini memiliki nilai terendah. Peningkatan yang baik pada infrastruktur di tahun 2023 perlu dipertahankan dan diperluas untuk mendukung adopsi TIK yang lebih luas di masyarakat.

Secara umum, Provinsi Gorontalo memiliki pondasi yang kuat dan berada di jalur yang tepat menuju masa depan digital. Namun, untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan penguatan ekosistem inovasi berbasis TIK.

Indeks Pembangunan TIK kabupaten untuk saat ini belum tersedia di Kabupaten Gorontalo Utara, namun dalam menilai pembangunan teknologi dan kapasitas informasi daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dapat diukur melalui indeks SPBE Kabupaten Gorontalo Utara yakni mengukur tingkat digitalisasi pemerintahan lewat layanan elektronik, tata kelola data dan penggunaan TIK di pemerintah daerah.

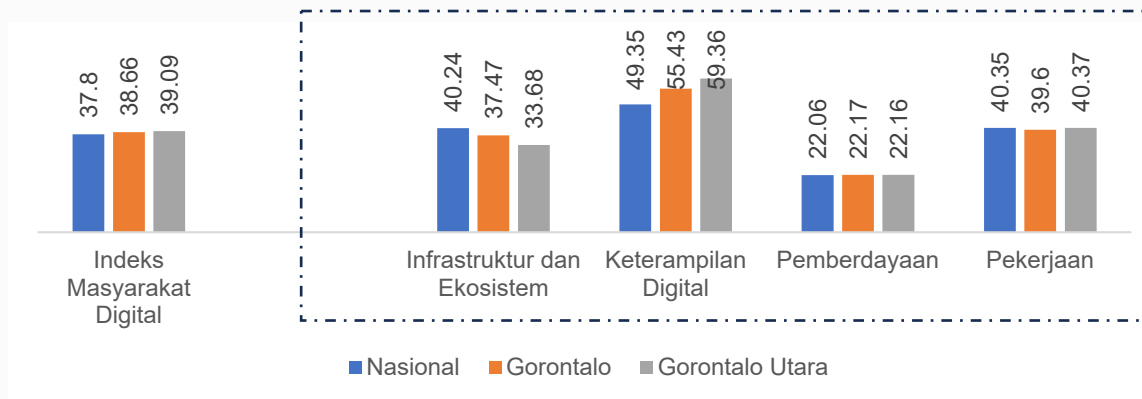
2.1.4.4.2 Indeks Masyarakat Digital



Indeks Masyarakat Digital (IMD) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya, yang terdiri dari empat pilar penyusun dan 10 sub pilar (tahun 2022 hanya 9 pilar).

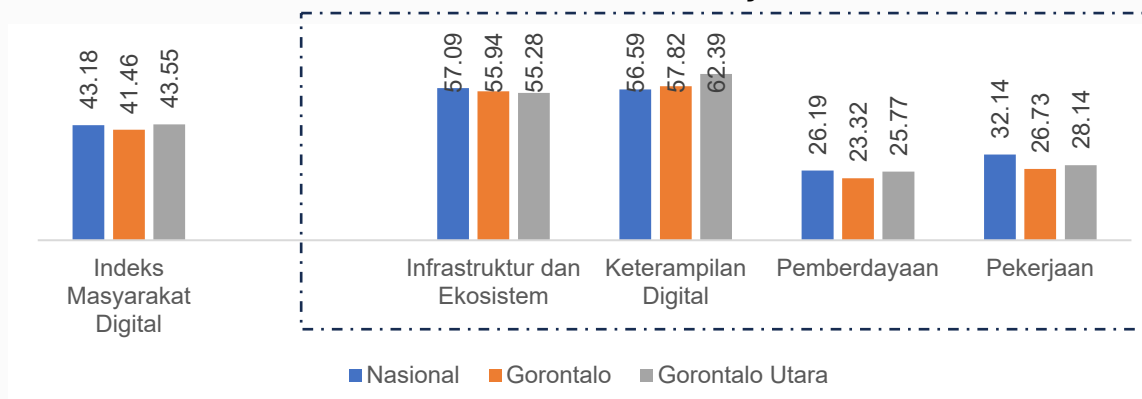
Dari data pada Grafik 2.68 hingga 2.70, skor IMD Kabupaten Gorontalo Utara konsisten di atas rata-rata Nasional dan Provinsi Gorontalo. Namun, meskipun menunjukkan kinerja progresif dalam pembangunan masyarakat digital, perlu disadari bahwa penguatan kapasitas manusia dan pemanfaatan teknologi dalam ekonomi dan layanan publik masih tertinggal. Untuk mengoptimalkan transformasi digital, pembangunan tidak boleh berhenti pada infrastruktur yang meningkat pesat di tahun 2023 (perluasan jaringan internet, BTS, dan akses perangkat), harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar pemanfaatan infrastruktur menjadi produktif, pemberdayaan karena digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari seperti layanan publik digital, transaksi *online*, maupun aktivitas kewargaan digital, serta integrasi teknologi ke dalam keseharian masyarakat sehingga perlu kebijakan khusus untuk mendorong kewirausahaan digital, *gig economy*, dan UMKM berbasis digital di Gorontalo Utara.

Grafik 2.68
IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2022



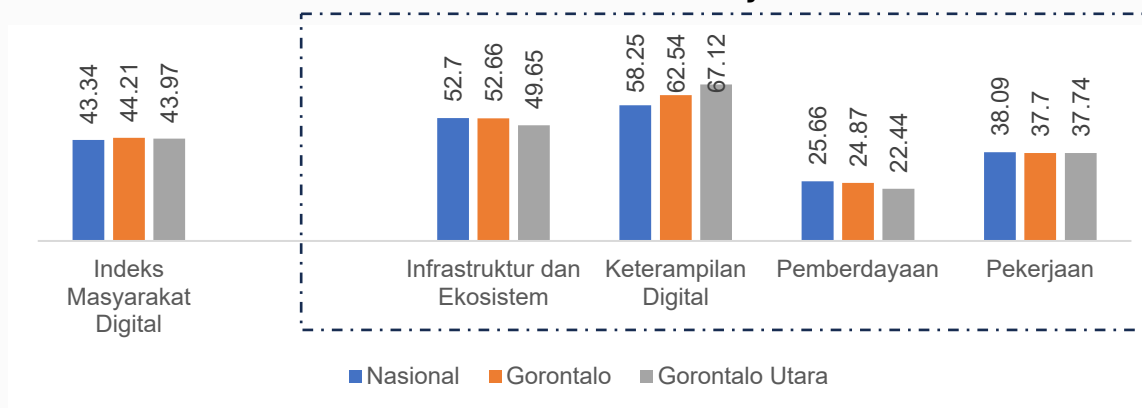
Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2022 (BPSDM Kemenkominfo), 2023

Grafik 2.69
IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2023



Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2023 (BPSDM Kemenkominfo), 2024

Grafik 2.70
IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2024



Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 (BPSDM Kemenkominfo), 2025

2.1.4.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.4.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan investasi dalam aset tetap seperti gedung, jalan, mesin, peralatan, dan infrastruktur lainnya, dan merupakan indikator vital dalam mengukur daya dorong pembangunan jangka panjang dan kapasitas produktif suatu daerah.

Tabel 2.163
Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK Gorontalo Utara dan Pertumbuhannya

Tahun	Nilai PMTB (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2019	746,98	-
2020	744,47	-0,34
2021	759,71	2,05
2022	777,96	2,40
2023	804,87	3,46
2024	821,63	2,08

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Sebagaimana sudah dijelaskan di bab ini halaman 125 hingga 126, PMTB stagnan (bahkan kontraksi) pada tahun 2020 akibat dampak pandemi global yang menekan aktivitas investasi publik dan swasta, namun kembali menunjukkan tren positif (meski hanya tumbuh moderat) sejak tahun 2021 yang menandakan kepercayaan terhadap iklim investasi secara bertahap pulih, baik dari sisi belanja modal pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, pertumbuhan PMTB mencerminkan akumulasi aset produktif yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi pada mesin, lahan industri, dan pembangunan fasilitas umum menciptakan *multiplier effect* bagi lapangan kerja dan produktivitas. Namun, laju pertumbuhannya masih belum optimal. Dalam konteks bonus demografi dan era ekonomi digital, dibutuhkan akselerasi PMTB lebih tinggi, idealnya di atas 5 persen/tahun, untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan struktural. Ke depan, perlu langkah-langkah strategis yang mendorong peran swasta, memperluas sektor investasi produktif, dan mengintegrasikan infrastruktur digital guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Berkaca pada laporan PDRB ADHK maupun ADHB menurut pengeluaran, berbeda dengan sektor Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai $\pm 59,5$ persen dari total PDRB tahun 2024, sektor Net Ekspor tidak terdefinisikan, yang dapat ditafsirkan akibat rendahnya aktivitas ekspor bersih, baik ke pasar luar negeri maupun antarwilayah. Artinya, produk-produk lokal Gorontalo Utara lebih banyak dikonsumsi secara domestik (struktur ekonomi cenderung terfokus pada pasar internal, alih-alih orientasi eksternal).

Namun hal ini bukan berarti Gorontalo Utara tidak memiliki potensi ekspor. Justru kondisi ini mencerminkan adanya ruang besar untuk transformasi ekonomi ke arah ekonomi berbasis perdagangan eksternal dan nilai tambah ekspor. Potensi ekspor yang belum dimanfaatkan seperti pertanian dan perikanan (nilai terbesar dalam sektor produksi), *output* industri pengolahan (yang relatif kecil namun strategis), serta pariwisata dan jasa lainnya.

Dampak negatif dari tidak adanya ekspor yaitu defisit neraca perdagangan daerah, kehilangan devisa regional, atau terhambatnya pengembangan skala ekonomi. Untuk itu, strategi penguatan komoditas unggulan, industrialisasi ringan, dan digitalisasi perdagangan krusial untuk membuka akses pasar luar dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.1.4.5.3 Nilai Investasi

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyadari bahwa investasi merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai strategi dan langkah konkret telah dilakukan untuk menarik minat investor, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Berikut beberapa upaya strategis dan sistematis yang telah dilaksanakan meskipun belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan dan percepatan:

1. Penyederhanaan perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gorontalo Utara secara aktif menerapkan sistem pelayanan berbasis digital, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.
 - Penerapan OSS (*Online Single Submission*) menjadi bagian dari strategi untuk memangkas birokrasi yang rumit.
2. Promosi investasi;

Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Daerah mengikuti forum investasi tingkat provinsi dan nasional, serta melakukan promosi potensi unggulan daerah, seperti:

 - Sektor pertanian, perikanan, dan kelautan.
 - Potensi pariwisata pesisir.
 - Kawasan industri kecil-menengah (IKM).
3. Penyediaan infrastruktur penunjang;
 - Pengembangan kawasan industri, peningkatan kualitas jalan, akses pelabuhan, serta penyediaan listrik dan air bersih di kawasan investasi telah menjadi prioritas.
 - Dukungan terhadap Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan.
4. Kolaborasi dan kemitraan;
 - Dorongan bagi pelaku usaha lokal untuk bermitra dengan investor, menciptakan iklim investasi yang inklusif, dan memberdayakan UMKM.
 - Pemda aktif melakukan dialog dan temu bisnis dengan calon investor untuk menciptakan iklim kepercayaan.
5. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
 - Menjamin kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi dengan menyediakan regulasi daerah yang pro-investasi dan mempercepat penerbitan izin lingkungan, tata ruang, dan teknis.
 - Meningkatkan integritas dan transparansi layanan publik melalui evaluasi dan pengawasan internal secara berkala.

Setelah berbagai upaya utama tersebut dilaksanakan, dampak positif mulai terlihat:

- Meningkatnya minat investor terhadap sektor kelautan dan pertanian.
- Pertumbuhan sektor-sektor produktif dalam struktur PDRB.
- Meningkatnya jumlah IKM dan serapan tenaga kerja sebagai efek turunan dari aktivitas investasi.

Untuk mendorong capaian lebih tinggi, diperlukan keberlanjutan upaya-upaya tersebut dan sinergi lintas sektor.

Tabel 2.164
Realisasi dan Rencana Investasi Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rencana investasi dari PMA	-	-	-	17.000. 000.000	11.000. 000.000	-
2	Rencana investasi dari PMDN	56.002. 000.000	27.579. 000.000	14.278. 613.002	310.119. 934.838	216.256. 477.001	262.844. 698.819
3	Realisasi investasi	1.173.185. 539.854	959.219. 486.867	671.359. 461.367	235.233. 102.234	509.658. 157.615	853.380. 889.543

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025

Capaian kinerja penanaman modal di Tabel 2.152 menggambarkan angka perencanaan dari investasi yang masih sangat volatil menunjukkan belum berkelanjutannya iklim investasi di Gorontalo Utara, sehingga memunculkan tantangan struktural. Kondisi tersebut menggambarkan adanya *gap* antara perencanaan dan realisasi sehingga kapasitas implementasi, koordinasi antar lembaga, dan kesiapan infrastruktur dan regulasi masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, Gorontalo Utara menunjukkan potensi besar namun memerlukan stabilitas perencanaan dan konsistensi implementasi untuk mengoptimalkan kinerja investasi daerah. Sehingga ke depan perlu penguatan ekosistem investasi untuk mendukung konsistensi pencapaian, untuk mengurangi risiko volatilitas diperlukan diversifikasi sektor investasi, dan berikutnya peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen investasi di daerah.

2.1.4.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.6.1 Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi warga desa dengan memanfaatkan potensi dan aset desa yang ada. Sedangkan persentase desa mandiri merujuk pada proporsi desa yang telah mencapai status "mandiri" berdasarkan Indeks Desa (ID) (dahulu Indeks Desa Membangun) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Tabel 2.165
Status Desa dan Persentasenya Berdasarkan IDM dan ID Gorontalo Utara

Status Desa	Tahun									
	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	*2025	%
Mandiri	2	1,63	12	9,76	24	19,51	35	28,46	47	38,21
Maju	18	14,63	47	38,21	56	45,53	61	49,59	57	46,34
Berkembang	89	72,36	61	49,59	43	34,96	27	21,95	19	15,45
Tertinggal	14	11,38	3	2,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sangat Tertinggal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah Desa	123	100,00	123	100,00	123	100,00	123	100,00	123	100,00

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

*Mulai tahun 2025, status desa menggunakan penilaian berdasarkan Indeks Desa

Berkaca pada Tabel 2.153, Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan progres luar biasa dalam pembangunan desa, ditandai dengan pengurangan total desa "Tertinggal" dan kenaikan tajam pada status desa di atasnya. Status desa "Mandiri" pun jauh meningkat baik secara jumlah maupun persentase. Transisi ke status ini membutuhkan penguatan kelembagaan desa, pengelolaan keuangan, dan transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Transformasi ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program Dana Desa, sinergi antar sektor, dan meningkatnya kapasitas pemerintahan desa. Untuk memperkuat capaian ini di masa depan, perencanaan dan intervensi setiap desa (termasuk dalam Musrenbang) perlu diversifikasi dan berbasis nilai komponen Indeks desa, sehingga perbaikan fokus pada kekurangan masing-masing desa. Selain itu, secara umum perlu fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi desa dan kualitas SDM lokal agar status mandiri tidak hanya formalitas administratif, tapi juga mencerminkan kemandirian riil.

2.1.4.6.2 Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Untuk mengetahui secara objektif tingkat layanan infrastruktur dan *outcome* atas penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dari mulai pusat hingga daerah, perlu diukur melalui suatu perhitungan atau indeks yang konsisten dan berlaku nasional sebagai alat komparasi dengan daerah lainnya. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)/Indeks Infrastruktur merupakan alat untuk mengevaluasi kualitas pembangunan infrastruktur tersebut, yang meliputi ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), efektifitas pemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*), serta kontribusi pada perekonomian. Dengan adanya indeks ini, dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan layanan infrastruktur, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Namun, perhitungan indeks ini belum dilakukan di Gorontalo Utara, disamping belum ada konsensus bersama penggunaan metode agar berlaku *universal* sebagai bahan komparasi.

Terlepas dari urgensi dan manfaat indikator tersebut, sebelumnya Pemerintah Daerah Gorontalo Utara telah menggunakan indikator substitusi dalam melihat tingkat pembangunan infrastruktur, yaitu “Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan” dengan komponen pembentuk yang hampir identik dengan Indeks Infrastruktur yang banyak digunakan beberapa daerah lainnya. Pemenuhan layanan dasar wilayah merupakan pengukuran terhadap capaian 7 sub indikator layanan dasar wilayah, yaitu: rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; persentase rumah tangga, tipe daerah, memiliki akses terhadap sumber air minum layak; persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak; persentase jalan dalam kondisi baik; persentase konektivitas antar wilayah; persentase kesesuaian tata ruang; persentase kinerja irigasi. Angka agregat diperoleh dengan cara merata-ratakan realisasi ketujuh sub-indikator tersebut, yang bersumber dari beberapa sumber, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan. Ke depan, pemenuhan infrastruktur seharusnya tidak hanya mencapai tahap “Layak”,

melainkan hingga mencapai “Aman” sehingga memberikan layanan dan jaminan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Capaian setiap sub indikator dan agregat rata-ratanya secara *time series* disajikan pada Tabel 2.166.

Tabel 2.166
Komponen Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan Gorontalo Utara

No.	Sub Indikator Layanan Dasar	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak (Susenas BPS)	-	51,35	56,73	58,90	63,03	67,21	85,16
2	Persentase rumah tangga, tipe daerah, memiliki akses terhadap sumber air minum layak (Susenas BPS)	-	84,73	87,55	86,23	89,47	90,14	90,71
3	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak (Susenas BPS)	-	69,83	71,80	79,03	81,80	81,37	84,07
4	Persentase jalan dalam kondisi mantap (Dinas PU)	41,74	41,82	38,86	43,74	52,99	54,49	43,52
5	Persentase konektivitas antar wilayah (Dinas Perhubungan)	67,00	67,00	67,00	67,00	76,00	76,00	57,00
6	Persentase kesesuaian tata ruang (Dinas PU)	32,00	68,95	69,22	69,22	74,10	74,10	74,17
7	Persentase kinerja irigasi (Dinas PU)	67,12	68,71	67,66	67,53	65,84	67,71	67,21
Persentase Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan			64,63	65,55	67,38	71,89	73,00	71,69

Sumber: Susenas (BPS), diolah; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan

Secara umum yang dapat dianalisis dari Tabel 2.154, pemenuhan layanan infrastruktur tidak merata, dimana akses terhadap hunian layak menunjukkan tren peningkatan positif dan konsisten, meski capaian kinerja tahun 2024 belum tersedia. Meski demikian, tantangan di bidang konektivitas dan infrastruktur jalan perlu segera ditangani untuk mendorong pemerataan layanan dasar secara lebih menyeluruh.

2.1.4.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Hunian yang layak merupakan komponen fundamental dalam kualitas hidup dan menjadi indikator prioritas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada Tujuan 11: *Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan*. Akses terhadap hunian layak mencakup:

- Konstruksi bangunan yang aman dan sehat;
- Ketersediaan ruang yang cukup;
- Akses air bersih dan sanitasi yang memadai;
- Keamanan kepemilikan/tenurial.

Pada Tabel 2.154 poin nomor 1 sudah terlihat bahwa indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak menunjukkan

tren yang progresif dalam lima tahun terakhir. Namun, tantangan rumah tidak layak huni yang masih tinggi menuntut intervensi kebijakan yang lebih agresif dan inklusif untuk mendorong capaian 80-90 persen rumah layak dalam jangka menengah.

2.1.4.6.4 Kemantapan Jalan

Indikator jaringan jalan kondisi mantap merujuk pada kualitas dan daya tahan jalan yang memenuhi standar teknis dan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan infrastruktur transportasi, jalan yang disebut "mantap" adalah jalan yang memiliki kualitas permukaan yang baik, tidak rusak, serta mampu mendukung kelancaran dan keamanan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pemeliharaan Jalan, kondisi jalan diklasifikasikan menjadi:

- Baik (Mantap): permukaan rata, tidak rusak, dan memenuhi standar teknis;
- Sedang: ada kerusakan ringan (<10 persen area) yang tidak mengganggu kenyamanan;
- Rusak Ringan: kerusakan 10-25 persen (lubang kecil, retak halus);
- Rusak Berat: kerusakan >25 persen (lubang dalam, retak melebar) yang membahayakan pengguna.

Perkembangan jalan di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan fluktuasi kondisi. Proporsi jalan yang berada dalam kondisi mantap mengalami penurunan dari 45,40 persen pada tahun 2020 menjadi 43,52 persen pada 2024, meski sempat naik pada periode tahun 2023 karena peningkatan jalan yang bersumber dari anggaran PEN. Hal ini menunjukkan ketersediaan anggaran peningkatan jalan belum berkelanjutan (baik dari DAU murni maupun DAK) yang berimbas pada turunnya kualitas kemantapan jalan.

Tabel 2.167
Kondisi Kemantapan Jalan Gorontalo Utara

No.	Kondisi Jalan	Tahun (Km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	226,108	122,664	130,684	143,89	155,81
2	Sedang	10,506	200,427	192,407	140,10	70,99
3	Rusak ringan	9,035	134,135	142,155	154,44	15,54
4	Rusak berat	275,471	63,894	55,874	82,69	276,83
5	Jalan kabupaten keseluruhan	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12
Proporsi Jalan Kondisi “Mantap” (%)		45,40	62,00	62,00	54,49	43,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

Tantangan utama dalam mempertahankan kemantapan kondisi jalan, terletak pada ketergantungan anggaran pada dana temporer (PEN) dan ketidakcukupan DAK untuk pemeliharaan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan optimalisasi alokasi DAK, peningkatan koordinasi pusat-daerah, serta skema pendanaan mandiri guna memastikan kualitas jalan tetap mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan.

2.1.4.6.5 Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi

Dalam pengelolaan kawasan transmigrasi, perlu ada sinergi program dan kegiatan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKT) yang dinilai melalui komponen dimensi ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, jejaring sarana dan prasarana, serta kelembagaan di kawasan transmigrasi dapat meningkat.

Dimensi “ekonomi” meliputi: pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan; pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil menengah dalam pengembangan komoditas unggulan (kelembagaan ekonomi); peran badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama mengembangkan komoditas unggulan; pengembangan jejaring kawasan perdesaan; promosi komoditas unggulan kawasan perdesaan; sertifikasi/standardisasi produk yang dihasilkan; tingkat melek keuangan masyarakat; dan kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Dimensi “sosial-budaya” meliputi: kreativitas masyarakat; pelibatan pelaku seni dan budaya; pemanfaatan produk budaya masyarakat; migrasi penduduk keluar kawasan; governansi budaya; budaya dan pendidikan; budaya informasi

dan pengetahuan; budaya dan perencanaan; budaya kesetaraan dan inklusi sosial; dan kerekatan sosial.

Sedangkan pada dimensi “lingkungan” melingkupi: pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada tata ruang kawasan perdesaan; ruang terbuka hijau; pemanfaatan *amenity resources* untuk kegiatan ekonomi dan sosial; regulasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan; adaptasi terhadap perubahan iklim; kapasitas mitigasi bencana; pengelolaan dan pemanfaatan sampah; dan pengelolaan dan pemanfaatan limbah.

Pada dimensi “jejaring prasarana dan sarana”, hal yang dipertimbangkan yakni konektivitas antar desa dalam kawasan perdesaan; sekolah menengah kejuruan; pelayanan pendidikan vokasi dan keterampilan; aksesibilitas ke dan dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan; angkutan umum; elektrifikasi kawasan perdesaan; pemanfaatan alat komunikasi dan internet; sumber air minum dan mandi/cuci masyarakat di kawasan perdesaan; ketersediaan bahan bakar; kios sarana produksi pertanian; pasar kawasan perdesaan; dan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank untuk pengembangan komoditas unggulan.

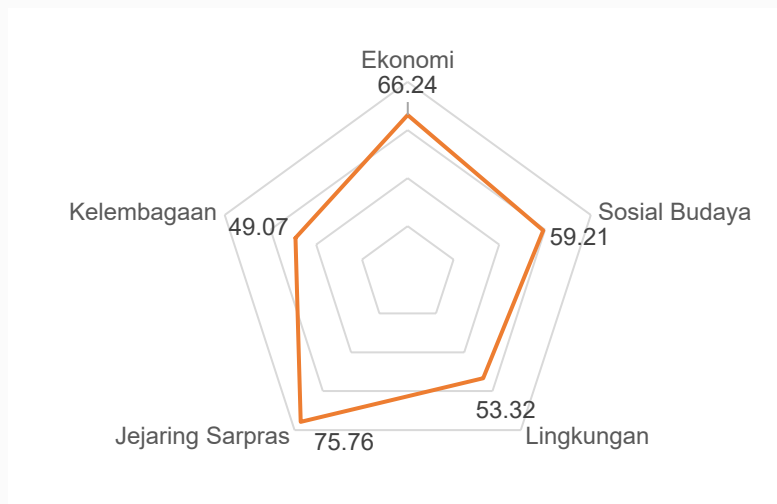
Sedangkan hal yang melingkupi dimensi “kelembagaan” yaitu: kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan; kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal; pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan; insentif/kebijakan daerah tentang investasi di kawasan; forum pengembangan ekonomi daerah/kawasan perdesaan kabupaten/kota; kebijakan daerah dalam pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan; komitmen daerah untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan; kebijakan daerah tentang *corporate social responsibility* untuk kawasan perdesaan yang telah ditetapkan; pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dunia usaha, dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi

pengembangan komoditas unggulan; dan kebijakan daerah tentang promosi kawasan perdesaan.

Dua tahun terakhir, IPKT Kawasan Sumalata menorehkan hasil yang progresif. Pada tahun 2022 skor yang ditoreh dari kelima dimensi mencapai 61,65 berstatus “Mandiri” saat rata-rata IPKT prioritas nasional mencapai 53,66. Setahun berselang, menjadi 64,71 juga dengan status “Mandiri” dengan rata-rata prioritas nasional mencapai 55,35. Pada tahun 2024, meningkat sedikit menjadi 65,00 berstatus “Mandiri”, dengan capaian Nasional 58,63.

Pada tahun yang sama (2024), kinerja kawasan transmigrasi lain di Provinsi Gorontalo seperti Kawasan Pulubala mencapai 53,87; Kawasan Pawonsari 65,13; serta Kawasan Paguyaman Pantai 54,81. Rincian skor per dimensi pada IPKT Trans Sumalata tahun 2024 digambarkan pada Grafik 2.71.

Grafik 2.71
Nilai Dimensi IPKT Sumalata 2024



Sumber: Evaluasi Kawasan Transmigrasi Kementerian Kemendes PDT dan Trans, 2024

2.1.4.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.4.7.1 Tingkat Inflasi

Laju inflasi adalah salah satu indikator penting dalam bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi melalui proses *supply* dan *demand*. Laju inflasi suatu daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo, tidak terlepas dari fenomena nasional dan global, seperti pengaruh harga bahan bakar minyak

global atau perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Secara umum, inflasi dapat dikarenakan dua faktor, yakni inflasi akibat adanya permintaan yang kuat terhadap suatu barang sedangkan barang tersebut masih sama tingkat penawarannya (*demand-pull inflation*) atau dikarenakan adanya kenaikan biaya produksi (*cost-push inflation*), termasuk disini kelangkaan produksi atau juga kelangkaan distribusi walau permintaan secara umum tidak terjadi adanya kenaikan. Penyebab terakhir karena adanya peningkatan jumlah uang beredar secara tiba-tiba misalnya pada saat pembagian Tunjangan Hari Raya hari besar keagamaan. Kenaikan atau penurunan harga barang/jasa mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah nilai uang sekaligus semakin rendah daya belinya.

Indikator yang sering digunakan untuk perhitungan inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan/inflasi atau tingkat penurunan/deflasi dari barang dan jasa. Namun, perhitungan IHK tidak secara spesifik dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara, alih-alih dilakukan di Kota Gorontalo sebagai lokus

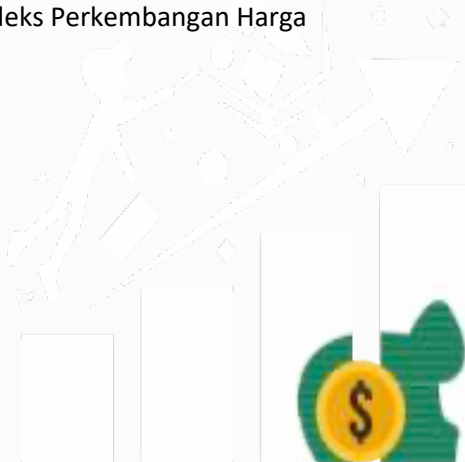
perhitungan IHK di Provinsi Gorontalo (dan Kabupaten Gorontalo, sebagai *proxy* dari inflasi perdesaan mulai Januari tahun 2024).

Untuk mengawasi pergerakan harga, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melihat Indeks Perkembangan Harga (IPH).

IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harian harga-harga dua puluh komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat

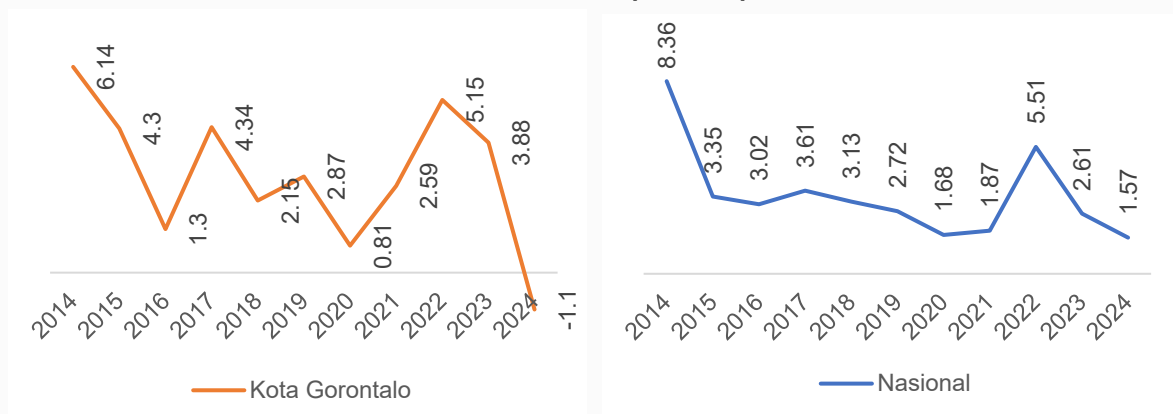
Pasar Moluo

satu-satunya lokasi pemantauan
Indeks Perkembangan Harga



dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Keunggulannya, seperti dapat dikendalikan dalam jangka pendek, dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi, dan mudah dihitung dan dipahami. Dengan IPH, diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan secara cepat. IPH juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada inflasi.

Grafik 2.72
Laju Inflasi (YoY) di Kota Gorontalo dan Nasional
Tahun 2014–2024 (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo Dalam Angka (BPS), 2025

Pada tahun 2014, 2016, 2018, 2020, dan 2022 laju inflasi tahunan nasional lebih tinggi daripada laju inflasi tahunan Kota Gorontalo, dan pada tahun 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2023 laju inflasi tahunan Kota Gorontalo lebih tinggi daripada laju inflasi tahunan nasional. Selama tahun 2022, inflasi di Kota Gorontalo cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2021. Utamanya dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM dan gas (*administered price*). Secara umum bisa dilihat bahwa tren inflasi dari tahun 2014 hingga 2020 cenderung menurun, sebelum mengalami kenaikan di 2 periode berikutnya.

Pada tahun 2024, Kota Gorontalo mengalami deflasi *year on year* menjadikannya satu-satunya daerah di Indonesia dengan deflasi pada periode tersebut, disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan

utama, terutama cabai rawit, tomat, ikan cakalang, ikan layang, dan tahu mentah.

Pada tahun 2022, seiring dengan pulihnya permintaan pasca pandemi, mengakibatkan ketidakseimbangan *supply-demand* yang memicu kenaikan harga komoditas. Adanya perang dan ketegangan geopolitik di sejumlah wilayah juga mendisrupsi rantai pasokan barang dan jasa sehingga memicu kenaikan harga pangan dan energi. *Money tight policy* di berbagai negara akibat tingginya inflasi menyebabkan sejumlah negara menaikkan tingkat suku bunga sehingga memicu *capital outflow* terutama pada negara berkembang.

Untuk mengendalikan inflasi, berbagai program kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, dukungan perhubungan laut dan darat untuk membuka akses lalu lintas barang, serta kebijakan sektoral lainnya diantaranya program pasar murah, program Pola Pangan Lestari, Germas Batari (Gerakan Masyarakat Tanam Rica/Cabe), serta kegiatan inovatif lainnya. Meskipun demikian, fluktuasi inflasi justru lebih sering terjadi akibat faktor-faktor eksternal. Perlu upaya-upaya inovatif dan konsisten agar penanggulangan inflasi dapat menghasilkan *outcome* yang baik.

2.1.4.7.2 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Berdasarkan analisis Kementerian Keuangan (DJPb), Kabupaten Gorontalo Utara memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (terutama pajak daerah) terhadap PDRB yang relatif rendah bila dibandingkan daerah lain di Provinsi Gorontalo, yang mencerminkan:

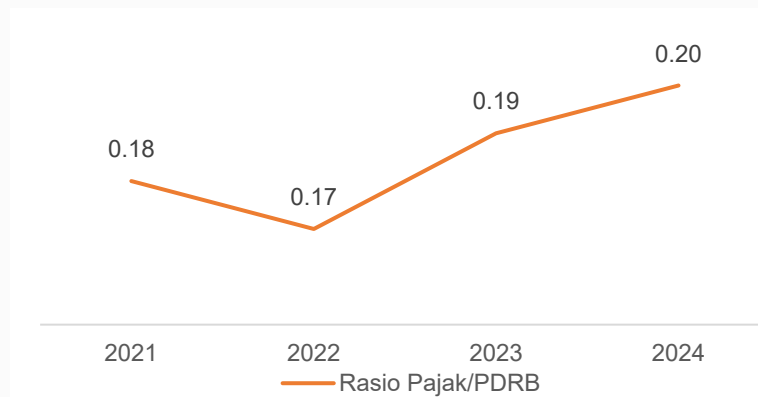
- Kontribusi pajak daerah terhadap keseluruhan ekonomi regional masih terbatas; dan
- Kemampuan fiskal daerah dalam memanfaatkan potensi pajak lokal belum optimal.

Penyebab utama hal tersebut yakni:

- Potensi pajak belum dimaksimalkan. Infrastruktur fiskal dan kebijakan retribusi daerah masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum maksimal menggali potensi sektor lokal seperti usaha kecil, pariwisata, dan pertambangan kecil.
- Keterbatasan kapasitas administratif. Dengan geografi yang menantang, pemungutan pajak yang efektif dan monitoring wajib pajak menjadi sulit.
- Ketergantungan pada Dana Transfer. Daerah masih sangat bergantung pada Transfer Umum (DAU/DSTS) karena rendahnya basis pajak, yang menyebabkan ketergantungan fiskal.

Untuk menuju kemandirian fiskal dan memperkuat belanja publik, perlu dilakukan reformasi pajak daerah melalui digitalisasi, penguatan kebijakan fiskal, dan peningkatan kapasitas pemungutan. Hal ini krusial guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran masyarakat daerah secara jangka panjang.

Grafik 2.73
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Gorontalo Utara (%)



Sumber: Bappeda dan Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejak tahun 2007 hingga 2025, telah menunjukkan dampak yang krusial pada kualitas pelayanan publik di Gorontalo Utara. Selain itu, pelayanan umum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, aspek pelayanan umum harus didukung oleh inovasi, integrasi sistem informasi, reformasi kelembagaan, serta perbaikan infrastruktur dasar dan SDM secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan semakin meningkatkan peran institusi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menguatkan *employer branding* “Bangga Melayani Bangsa” dengan kompetensi yang baik, dan kolaborasi yang efektif.

2.1.5.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.5.1.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pendekatan modern dalam mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Indeks Maturitas SPBE mengukur tingkat kematangan implementasi sistem ini, mulai dari infrastruktur hingga integrasi layanan digital.

Selama periode tahun 2020 hingga 2022, kinerja indeks SPBE menunjukkan stagnasi, yang menandakan bahwa tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan belum optimal, baik dari sisi kebijakan, arsitektur sistem, layanan publik digital, maupun infrastruktur pendukungnya. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mentransformasi tata kelola pemerintahan menuju digitalisasi. Namun, akselerasi lebih lanjut masih diperlukan agar SPBE tidak hanya sekadar *platform* administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen utama peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang inklusif.

Tabel 2.168
Indeks SPBE Gorontalo Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	1,55	1,55	1,55	2,66	2,89
2	Predikat	Rendah	Rendah	Rendah	Baik	Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Capaian tahun 2023 dan 2024 yang naik drastis dibandingkan tahun 2022 dan sebelumnya, ditopang oleh tingginya capaian pada komponen-komponen indeks yang sebelumnya bernilai sangat rendah, seperti tata kelola dan layanan SPBE, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam transformasi digital pemerintahan. Rincian perbandingan nilai per komponen indeks SPBE diuraikan pada Tabel 2.169.

Tabel 2.169
Komponen Indeks SPBE Gorontalo Utara

No.	Komponen Indeks SPBE	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Domain Kebijakan	3,00	3,00	3,10
2	Domain Tata Kelola	1,30	2,50	2,60
3	Domain Manajemen	1,00	1,36	1,55
4	Domain Layanan	1,46	3,13	3,48

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.1.5.1.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) adalah alat ukur untuk menilai kualitas layanan publik berdasarkan aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap standar operasional. IPP Kemenpan RB berfokus pada evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, seperti efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan akses. Indeks ini mengukur parameter seperti kepuasan masyarakat, ketersediaan infrastruktur layanan, serta penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Tujuannya adalah mendorong perbaikan sistemik melalui identifikasi kelemahan dan rekomendasi perbaikan kebijakan, sehingga layanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepatuhan Pelayanan Publik yang diukur oleh Ombudsman RI berorientasi pada pengawasan dan penilaian terhadap praktik mal-administrasi, seperti penundaan layanan, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang. Ombudsman menggunakan pendekatan berbasis keluhan (*complaint-based*) serta pengawasan langsung untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan instansi terhadap asas pelayanan yang baik (*fairness*, transparansi, dan akuntabilitas).

Perhitungan ini menekankan pada kemampuan lembaga dalam menangani keluhan masyarakat, pencegahan korupsi, dan pemenuhan hak-hak dasar warga. Hasil penilaian Ombudsman seringkali digunakan sebagai alat advokasi untuk mendorong perubahan struktural dan koreksi terhadap pelanggaran dalam tata kelola layanan publik. Perbedaan utama antara kedua penilaian ini terletak pada fokusnya: Kemenpan RB menitikberatkan pada peningkatan sistem internal, sedangkan Ombudsman lebih menekankan pengawasan eksternal dan perlindungan hak masyarakat. Berdasarkan data Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Gorontalo Utara menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian nilai pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun demikian, kualitas kinerja pelayanan publik dapat membaik dan kembali mencapai predikat B atas respons cepat dan adaptasi dari pemerintah daerah atas evaluasi sebelumnya.

Tabel 2.170
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten /Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	3,70	B	3,96	B	4,25	A-	2,64	C	3,45	B
2	Boalemo	-	-	3,29	B-	3,99	B	4,09	A-	4,17	A-
3	Pohuwato	-	-	2,96	C	3,67	B	3,67	B	4,10	A-
4	Bone Bolango	4,12	A-	4,27	A-	4,57	A	3,66	B	4,21	A-
5	Gorontalo Utara	3,86	B	3,70	B	3,83	B	2,33	C	3,65	B
6	Kota Gorontalo	4,11	A-	4,19	A-	3,97	B	2,06	C	3,45	B-
Provinsi Gorontalo		3,60	B	4,00	A-	4,34	A-	4,24	A-	4,04	A-

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Sedangkan Kepatuhan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman, terdapat fluktuasi di Gorontalo Utara yang mencerminkan perkembangan dan tantangan dalam kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, Gorontalo Utara menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Data IPP ditunjukan oleh Tabel 2.171 berikut.

Tabel 2.171

Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten /Kota	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	72,27	C	62,90	C	78,05	B	76,83	C
2	Boalemo	74,74	C	76,31	C	86,40	B	81,99	B
3	Pohuwato	52,16	D	73,96	C	80,66	B	84,43	B
4	Bone Bolango	71,75	C	62,96	C	69,97	C	85,43	B
5	Gorontalo Utara	83,94	B	70,51	C	80,86	B	87,44	B
6	Kota Gorontalo	78,80	C	67,50	C	78,24	B	79,76	B
Provinsi Gorontalo		67,58	C	72,65	C	83,36	B	90,41	A

Sumber: Ombudsman RI, 2025

2.1.5.1.3 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sekarang Kementerian Hukum) untuk menilai sejauh mana pemerintah pusat dan daerah melakukan reformasi hukum secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. IRH menjadi bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan regulasi yang efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih, dan dibangun berdasarkan empat dimensi utama:

1. Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Daerah, meliputi kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan yang lebih tinggi;
2. Harmonisasi Regulasi, yaitu sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat dalam pembentukan peraturan;
3. Ketersediaan Perancang Peraturan (*legal drafter*), termasuk kompetensi dan jumlah SDM di bidang legislasi;
4. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebagai pusat data dan transparansi hukum daerah.

Tabel 2.172

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2024	
		Nilai	Kategori
1	Gorontalo	65,60	B (Cukup Baik)
2	Boalemo	58,50	CC (Cukup)
3	Pohuwato	76,60	BB (Baik)
4	Bone Bolango	71,50	BB (Baik)
5	Gorontalo Utara	63,70	B (Cukup baik)
6	Kota Gorontalo	73,20	BB (Baik)
Provinsi Gorontalo		74,10	BB (Baik)

Sumber: Kemenkumham Kanwil Provinsi Gorontalo, 2024

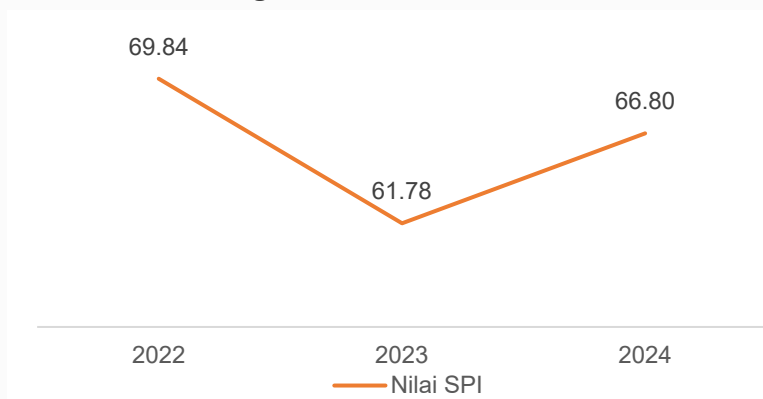
Kinerja IRH Gorontalo Utara tahun 2024 dalam kategori B (Cukup Baik), artinya posisinya masih cukup stabil dan menunjukkan adanya komitmen terhadap upaya reformasi hukum di tingkat lokal meskipun belum menyamai beberapa daerah lainnya. Komitmen tersebut berupa membangun kerangka reformasi hukum yang cukup baik, meskipun belum optimal dari segi efisiensi, harmonisasi regulasi, dan penyediaan SDM legislasi. Sehingga perlu penguatan dalam hal: (1) Evaluasi regulasi daerah, yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum nasional; (2) SDM hukum (*legal drafter*), yang masih perlu penguatan baik secara kuantitas maupun kualitas; (3) Optimalisasi JDIH, berupa transparansi dan akses publik terhadap produk hukum daerah perlu ditingkatkan.

2.1.5.1.4 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melibatkan analisis terhadap internal (ASN dan non-ASN), eksternal (pengguna layanan, pengusaha, vendor), serta pemangku kepentingan (BPK, Ombudsman, media), yang menilai beberapa indikator, seperti transparansi, pengadaan barang/jasa, gratifikasi atau suap, *conflict of interest*, pengelolaan anggaran, dan lain sebagainya.

Grafik 2.74 menunjukkan fluktuasi integritas yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2024, posisi saat ini belum cukup kuat/rentan untuk menyatakan birokrasi telah bebas dari risiko korupsi. Untuk mencapai nilai SPI >80, diperlukan upaya menyeluruh yang tidak hanya formal (dokumen dan regulasi), namun juga perubahan budaya kerja dan terutama kepemimpinan yang berintegritas (dorongan dari pucuk pimpinan), sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mengurangi risiko korupsi secara menyeluruh.

Grafik 2.74
Indeks Integritas Nasional Gorontalo Utara



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah

2.1.5.1.5 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK

MCP KPK dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, dan berfungsi sebagai *platform* pemantauan yang memungkinkan KPK, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pencegahan korupsi.

Dengan dilaksanakan monitoring tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapabilitas tata kelola pemerintahan daerah, meminimalkan celah korupsi di sektor strategis pelayanan publik, serta memberikan pembinaan dan evaluasi kinerja anti-korupsi secara terukur.

Tabel 2.161
Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCP) Pemda di Provinsi Gorontalo

Peringkat Pemda	Pemda	Nilai MCP		Δ	Plan	Budget	PBJ	PP	Peng. APIP	Man. ASN	Peng. BMD	Optim. Pajak
		2023	2024									
266	Kota Gorontalo	74,39	83,27	8,88	100,00	76,05	57,06	100	78,46	90,27	80,94	83,40
288	Provinsi Gorontalo	81,50	81,70	0,20	85,44	85,38	81,77	100	73,40	88,78	78,94	57,74
346	Gorontalo	81,05	75,49	-5,56	97,40	60,13	70,98	83,82	60,92	89,54	60,31	80,00
386	Boalemo	79,06	69,90	-9,16	74,00	57,99	79,46	54,83	50,92	88,62	66,94	87,54
391	Gorontalo Utara	81,27	69,58	-11,69	100,00	56,88	79,12	85,50	60,74	83,60	50,88	36,38
451	Bone Bolango	59,47	56,77	-2,70	74,00	62,49	55,52	52,15	48,34	84,26	37,50	38,45
465	Pohuwato	64,95	52,83	-12,12	68,80	35,23	71,48	64,31	44,03	63,04	15,81	57,54

Sumber: Surat KPK RI Nomor B/2261/KSP.00/70-75/04/2025

Keterangan:

Plan : Perencanaan
Budget : Penganggaran APBD
PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa

PP	: Pelayanan Publik
Peng. APIP	: Pengawasan APIP
Man. ASN	: Manajemen ASN
Peng. BMD	: Manajemen Aset Daerah
Optim. Pajak	: Optimalisasi Pajak Daerah

Capaian nilai MCP dalam dua edisi penilaian menunjukkan penurunan nilai IPKD Gorontalo Utara yang cukup signifikan, bersama Boalemo, dibandingkan periode sebelumnya. Dari 8 area intervensi, hanya area Perencanaan yang memperoleh pencapaian maksimal. Selain itu, Manajemen ASN dan Pengadaan Barang dan Jasa yang memperoleh skor tinggi menunjukkan tata kelola kepegawaian yang relatif baik dan sistem *procurement* yang relatif transparan. Namun pada beberapa area kritis membutuhkan perbaikan, seperti pada optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan penganggaran APBD.

Penurunan nilai IPKD Gorontalo Utara sebesar 11,69 poin dalam setahun menunjukkan degradasi tata kelola yang perlu diperbaiki segera untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mungkin bisa berdampak pada risiko investasi yang meningkat karena persepsi korupsi yang naik, serta akses pendanaan yang bisa terimbas. Beberapa hal prioritas dalam upaya perbaikan dapat dilakukan seperti reformasi sistem pajak daerah (digitalisasi pemungutan, pelatihan petugas pemungut, atau kampanye sadar pajak), penguatan manajemen aset (audit komprehensif, implementasi sistem informasi manajemen aset, optimalisasi pemanfaatan aset *idle*), dan transparansi anggaran (portal transparansi anggaran *online*, mekanisme partisipasi publik dalam Musrenbang, pelaporan keuangan yang akuntabel). Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan berkelanjutan untuk ASN, dan berkolaborasi dengan KPK untuk pencegahan korupsi dapat menjadi opsi dilakukan dalam jangka menengah agar reformasi tata kelola dapat secara komprehensif dilaksanakan.

2.1.5.1.6 Indeks Sistem Merit

Dalam upaya meningkatkan kinerja manajemen ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, diberlakukan sistem merit sebagai implementasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Hingga evaluasi tahun

2023, indeks sistem merit Gorontalo Utara memperoleh tren nilai yang terus meningkat dan telah masuk pada kategori “Baik”.

Grafik 2.75
Indeks Sistem Merit Gorontalo Utara



Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, diolah

Perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174
Indeks Sistem Merit Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Pemda	Nilai Verifikasi	Kategori Penilaian
1	Kota Gorontalo	300	Baik
2	Gorontalo	326	Sangat Baik
3	Bonebolango	258	Baik
4	Boalemo	264	Baik
5	Gorontalo Utara	268,5	Baik
6	Pohuwato	278,5	Baik
7	Prov. Gorontalo	327	Sangat Baik

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, diolah

Capaian indeks sistem merit hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara sebenarnya tidak tertinggal jauh dari kabupaten/kota lain dalam satu regional dan terdapat pondasi yang cukup solid untuk pengembangan, namun kinerjanya termasuk di bawah rata-rata dan berpotensi tertinggal dalam kompetisi rekrutmen dan pengembangan ASN, sehingga perlu didorong untuk melakukan identifikasi *best practice* sistem merit di daerah lain serta adopsi inovasi yang terbukti efektif.

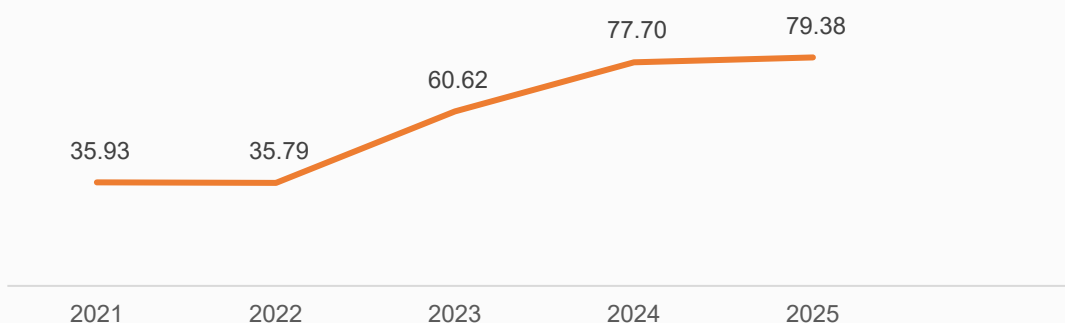
Dalam jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu melakukan *targeted improvement program*, yakni fokus perbaikan pada area yang memperoleh skor rendah dan implementasi sistem digital untuk efisiensi, serta melakukan *capacity building* berupa pelatihan intensif bagi pengelola

kepegawaian dan melakukan pemetaan kompetensi bagi seluruh ASN melalui *Computer Assisted Test (CAT)*, *Asesment* dan *Profiling (Pro ASN)*.

2.1.5.1.7 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan pengukuran komprehensif yang menilai kualitas sumber daya manusia birokrasi melalui empat komponen utama: kualifikasi (tingkat pendidikan dan sertifikasi), kompetensi (kemampuan teknis dan manajerial), kinerja (hasil kerja berdasarkan target), dan disiplin (kepatuhan terhadap regulasi). Nilai total indeks mencerminkan efektivitas ASN dalam memberikan pelayanan publik serta kapasitas institusi dalam mendukung pembangunan. Komponen ini saling terkait, kualifikasi dan kompetensi yang tinggi harus diimbangi dengan kinerja dan disiplin untuk menciptakan birokrasi yang responsif dan akuntabel.

Grafik 2.76
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado, diolah

Data Badan Kepegawaian Negara (2022-2025) menunjukkan peningkatan signifikan IP ASN Gorontalo Utara. Pada tahun 2025, komponen tertinggi adalah kompetensi (27,67) dan kinerja (25,3), didukung kualifikasi yang stabil (21,41) serta disiplin sempurna (5,00). Meski capaian ini menempatkan Gorontalo Utara di peringkat ketiga se-Provinsi Gorontalo, lonjakan tersebut mengindikasikan keberhasilan program penguatan kompetensi ASN, peningkatan sistem penilaian kinerja, dan penegakan disiplin. Tantangan tersisa adalah mempertahankan konsistensi peningkatan kompetensi dan menutup *gap* dengan wilayah lain, terutama dalam kualifikasi dan inovasi pelayanan.

sebagaimana perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya pada Tabel 2.175.

Tabel 2.175
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2025

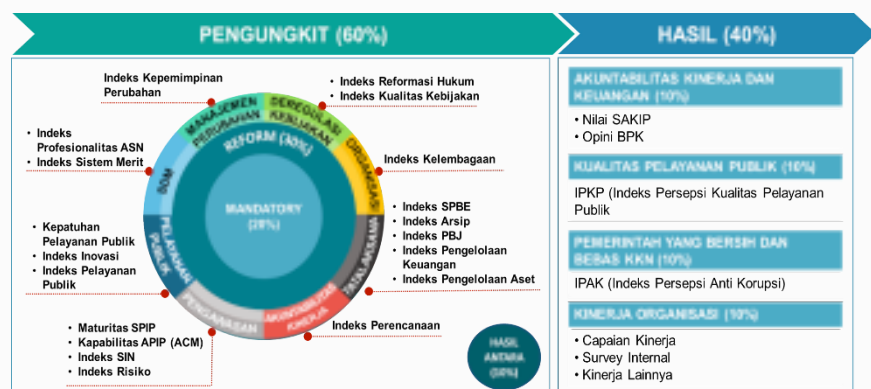
No.	Pemda	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai
1	Gorontalo	4.251	20,92	33,38	27,18	5	86,48
2	Bone Bolango	3.246	21,27	29,85	26,39	5	82,51
3	Gorontalo Utara	2.155	21,41	27,67	25,3	5	79,38
4	Kota Gorontalo	3.420	21,44	27,44	24,97	5	78,83
5	Boalemo	2.897	20,96	26,22	24,2	5	76,38
6	Pohuwato	3.071	21,1	24,06	21,36	5	71,52
7	Prov. Gorontalo	4.925	22,05	29,14	25,96	5	82,15

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado, (Agustus 2025)

2.1.5.1.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Proses tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjadi pemerintahan yang berkelas dunia. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara dari yang sebelumnya *rule-based bureaucracy*

menuju
dynamic governance, berupa birokrasi yang semakin



efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri *agile* dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia dengan katalis teknologi informasi dan komunikasi.

Sejak dari awal masa perhitungan, secara umum capaian nilai indeks reformasi birokrasi di Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo meningkat, meskipun dalam konteks Gorontalo Utara berjalan kurang progresif.

Tabel 2.176
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten /Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	61,60	B	62,12	B	63,21	B	63,81	B	67,62	B
2	Boalemo	53,79	CC	54,86	CC	56,22	CC	59,12	CC	65,37	B
3	Pohuwato	60,14	B	60,67	B	62,03	B	63,10	B	73,10	BB
4	Bone Bolango	56,63	CC	58,04	CC	60,29	B	69,98	B	75,86	BB
5	Gorontalo Utara	19,87	D	50,93	CC	50,71	CC	63,73	B	67,91	B
6	Kota Gorontalo	62,95	B	63,03	B	63,39	B	74,61	BB	75,12	BB
Provinsi Gorontalo		63,36	B	66,33	B	69,61	B	77,75	BB	70,83	BB

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

- **Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)**

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal 208 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Dimana Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan Kecamatan. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, efisiensi, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berbagai daerah termasuk Kabupaten Gorontalo Utara telah menyesuaikan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, beban kerja, dan cakupan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Di dalam Perda No. 3 Tahun 2016, susunan perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 23 Dinas, 5 Badan, dan 11 Kecamatan. Sehingga total perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara ada 42 Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2020 Penyederhanaan Birokrasi menjadi salah satu prioritas di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi dimana Penyederhanaan birokrasi wajib dilakukan oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Penyederhanaan birokrasi adalah upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan profesional yang melalui tiga tahapan utama yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Tujuannya adalah mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi hambatan prosedural, mendorong inovasi, dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dengan fokus pada hasil dan kolaborasi. Pada tanggal 21 September 2021, Kabupaten Gorontalo Utara telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur terkait Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, menegaskan bahwa berdasarkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi. Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 223 Jabatan yang disederhanakan.

Pada tanggal 19 Desember 2021 Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan persetujuan terkait penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional oleh Kementerian Dalam Negeri. Dimana ada 172 Pejabat struktural yang menduduki jabatan administrasi di setarakan ke jabatan fungsional, dan pada tanggal 30 Mei 2022 mendapat persetujuan kedua dimana ada 23 pejabat struktural yang menduduki jabatan administrasi di setarakan, sehingga total seluruhnya ada 195 pejabat administrasi yang disetarakan. Dan setelah dilaksanakannya penyetaraan jabatan maka pada tanggal 15 Juli 2022 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Gorontalo Utara.

Setelah dilaksanakannya Penyederhanaan Birokrasi maka dilakukan penataan organisasi pada Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa pada pasal 1 ayat 5 ‘Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tatalaksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien, dan berkualitas’. Dan pasal 2 ayat 2 ‘Pembinaan Penataan Perangkat daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat’. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Penataan organisasi perangkat adalah tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di daerah. Melalui penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu tujuan dilakukan penataan organisasi yaitu untuk mendukung salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara adalah *“Memajukan kualitas tata kelola reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan budaya produktif dan inovatif.*

Dari hasil Penataan Perangkat Daerah pada Kabupaten Gorontalo Utara, maka dilakukan Perampingan OPD (penggabungan atau pemisahan urusan pemerintahan sesuai perumpunan dan hasil skoring) sebagaimana tertuang dalam pasal 40 ayat 3 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ‘Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu dinas daerah kabupaten/kota

didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan, dan keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dimana ada 13 Dinas yang dilakukan perampingan/penggabungan opd menjadi 7 Dinas. Sehingga jumlah OPD pada Kabupaten Gorontalo Utara yang sebelumnya ada 42 OPD, setelah dilakukan perampingan/penggabungan menjadi 36 OPD. Hal ini dimaksudkan Perampingan OPD bukan sekedar pengurangan jumlah lembaga atau jabatan, melainkan upaya strategis untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang adaptif, profesional, dan fokus pada hasil. Adapun beberapa tujuan spesifik dilakukan perampingan opd yaitu :

1. Efisiensi Anggaran

Dengan dilakukannya perampingan organisasi perangkat daerah pada Kabupaten Gorontalo Utara, dapat mengurangi anggaran belanja pegawai dan belanja operasional. Mengingat saat ini persentase belanja pegawai Kabupaten Gorontalo Utara sudah berada di atas 30%. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara tegas mengamanatkan bahwa porsi belanja pegawai daerah tidak boleh melebihi 30% dari total belanja APBD. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga struktur keuangan daerah yang sehat, berimbang, dan berkelanjutan, agar ruang fiskal pemerintah daerah tetap tersedia untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, langkah perampingan OPD menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran yang selaras dengan semangat UU HKPD, yaitu mendorong daerah agar lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, menekan beban belanja pegawai, dan meningkatkan proporsi belanja yang bersifat produktif. Dengan berkurangnya beban belanja pegawai, maka alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Peningkatan Efektivitas dan Kinerja

Perampingan OPD dapat meningkatkan efektivitas dalam kinerja dengan meminimalisir tumpang tindih tugas dan fungsi antar OPD. Dimana OPD dengan urusan pemerintahan serumpun dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan kolaboratif. Hal ini pula memudahkan koordinasi antar unit, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi birokrasi berlapis. Sebagai contoh pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara. Ketiga dinas ini memiliki fungsi yang saling terkait dan harus bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah maupun nasional. Sehingga ketika ketiga dinas ini digabung menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka tugas dan fungsi yang sebelumnya berada dibawah tiga dinas, kini pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa dilaksanakan dalam satu dinas.

3. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada Masyarakat. Dengan dilakukannya Perampingan OPD, perangkat daerah lebih optimal meningkatkan kualitas layanan publik serta pelayanan publik bisa dilakukan lebih cepat dan tidak berbelit-belit dikarenakan rantai birokrasi yang lebih pendek. Salah satu contohnya yaitu Dinas PPPA dan Dinas PPKB. Kedua dinas tersebut sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, melindungi kelompok rentan (perempuan, anak, lansia), mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Ketika kedua dinas ini di gabung, maka pelayanan kepada Masyarakat menjadi satu pintu serta Koordinasi program lebih terintegrasi.

2.1.5.1.9 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja pemerintah daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami stagnansi. Pada tahun 2015, nilai SAKIP Pemerintah Daerah Gorontalo Utara masih “CC”, mulai tahun 2016 sampai dengan 2025 masih di posisi “B”. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja pemerintah daerah Gorontalo Utara sudah baik, akuntabel, dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran, namun perlu ditingkatkan agar lebih baik hingga mencapai predikat “A”.

2.1.5.1.10 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sistem yang dirancang untuk memastikan tujuan instansi pemerintah tercapai, termasuk efisiensi, efektivitas, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam mengukurnya, APIP berperan besar dalam menyukseskan usaha pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Pada tahun 2021, capaian nilai maturitas SPIP Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan dari 2,7 menjadi 2,9, namun setahun berselang kembali turun di 2,841; yang kemudian malah tembus 3,026 di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan setiap OPD secara umum telah memahami sistem pengendalian dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan organisasi perangkat

daerah, khususnya di desa–desa.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 yang telah mencapai skor 3 “Terdefinisi”, artinya sistem pengendalian intern di Gorontalo Utara telah dibentuk dan didokumentasikan, namun masih perlu penguatan pada penerapan konsisten dan evaluasi berkelanjutan, serta yang kemudian akan direkomendasikan untuk meningkatkan integrasi pengendalian ke dalam proses manajemen risiko dan sistem pelaporan berbasis teknologi.

2.1.5.1.11 Maturitas Pengadaan Barang dan Jasa

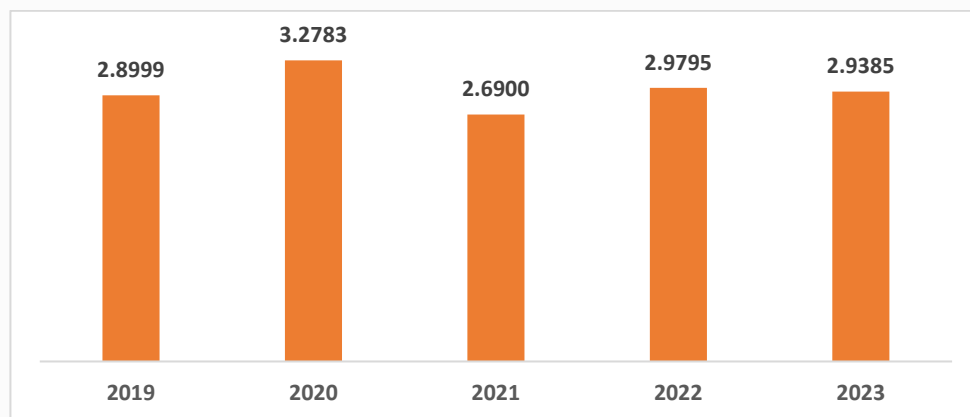
Tingkat maturitas pengadaan barang dan jasa mengukur sejauh mana proses pengadaan suatu organisasi atau daerah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi. Konsep ini mencakup aspek seperti perencanaan yang matang, penggunaan teknologi (misalnya *e-procurement*), pengelolaan risiko, partisipasi publik, serta kemampuan meminimalkan praktik korupsi. Semakin tinggi tingkat maturitas, semakin baik kualitas pengadaan dalam mendukung tujuan pembangunan, mengoptimalkan anggaran, dan membangun kepercayaan masyarakat. Realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap level kematangan/maturitas PBJ tahun 2021 masih berada pada tingkat kematangan level 1 “Inisiasi”, dan menjadi 2 “Esensi” setahun berikutnya hingga tahun 2024. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas kinerja dari pemerintah daerah Gorontalo Utara, terutama yang berasal dari domain sistem informasi agar minimal bisa menginjak level 3 “Proaktif”.

Kabupaten Gorontalo Utara mencatat peningkatan signifikan Indeks Tata Kelola Pengadaan dari 20 (2021) menjadi 67,66 (2024). Meski sempat stagnan pada 2022 (35,7) dan 2023 (35,21), lonjakan di 2024 menunjukkan keberhasilan implementasi reformasi seperti digitalisasi proses (*e-procurement*), peningkatan kapasitas SDM, penegakan regulasi pengadaan yang ketat. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pengadaan, yang berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi risiko penyimpangan, serta menarik investasi melalui transparansi dan akuntabilitas.

2.1.5.1.12 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses sistematis untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan serta mencapai tujuan pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun oleh Pemerintah daerah, menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) untuk mengukur capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun hasil penilaian dari LPPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebagai berikut:

Grafik 2.77
Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber; Sekretariat Daerah, 2025.

Grafik ini menunjukkan tren yang fluktuatif dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2019-2023. Penilaian menunjukkan kinerja yang cukup baik di tahun 2019 dengan skor 2.8999, kemudian mencapai hasil yang signifikan di tahun 2020 dengan skor tertinggi yaitu 3.2783. Pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis hingga mencapai titik terendah selama periode tersebut, yaitu 2.6900 dipengaruhi oleh pandemi COVID.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan upaya pemulihan pada dua tahun berikutnya. Penilaian kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 2.9795, mendekati capaian 2019, dan sedikit menurun menjadi 2.9385 di tahun 2023. Nilai

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk tahun 2024 belum dirilis karena proses evaluasi dan verifikasi oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), masih berlangsung.

2.1.5.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.5.2.1 Indeks Demokrasi Indonesia

Kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Semakin tinggi kesadaran politik, mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Demokrasi di suatu wilayah, yaitu angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur oleh BPS berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia, seperti Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Berdasarkan narasi di paragraf sebelumnya, saat ini angka IDI baru dihasilkan pada level provinsi, sehingga untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Kabupaten Gorontalo Utara untuk sementara menggunakan *proxy* IDI Provinsi Gorontalo, karena metodologi dan enumerator yang digunakan saat ini lebih banyak terdapat di level provinsi, terutama pada proses koding koran serta portal berita *online*. Kategori nilai indeksnya termasuk “Tinggi” jika skor berada di atas 80, “Sedang” jika di rentang 60-80, selain itu kategori “Rendah”.

Pada periode pembangunan tahun 2018-2021, IDI Provinsi Gorontalo cenderung dinamis yang tentu dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di beberapa periode tahun yang berbeda. Setelah menggunakan metode baru, dalam hal mengukur indeks provinsi (agregasi dari nilai 34 provinsi), pusat (data dari K/L di tingkat pusat), dan Nasional yang merupakan agregasi indeks provinsi dan pusat serta indeks menurut provinsi. IDI Provinsi

Gorontalo tahun 2022 berada di bawah IDI provinsi (agregasi dari 34 provinsi), IDI Nasional, serta IDI Pusat, sehingga masih berada pada kategori “Sedang”. Jika dilihat dari ketiga aspek penyusunnya, nilai aspek kesetaraan IDI Provinsi Gorontalo paling tinggi dibandingkan dengan dua aspek penyusun lainnya. Nilai aspek kesetaraan IDI di Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori “Tinggi”. Namun, pada aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi, masih berada pada kategori “Sedang”. Rangkaian informasi capaian tersebut disajikan pada Tabel 2.177 dan Grafik 2.78.

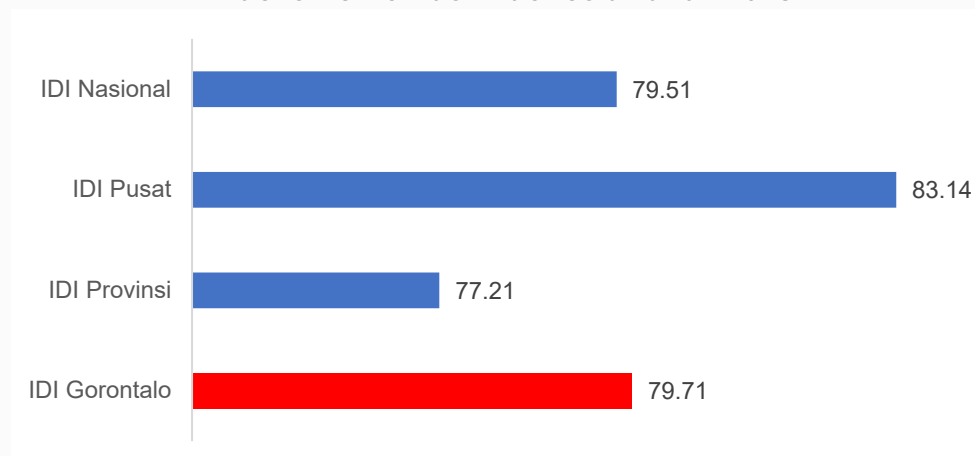
Tabel 2.177
Indeks Demokrasi di Provinsi Gorontalo Menurut Aspek

No.	Aspek	Tahun					
		2018	2019	2020	*2021	*2022	*2023
1	Kebebasan sipil	79,33	75,17	86,42	81,57	65,31	81,68
2	Hak-hak politik	64,95	76,93	75,89	81,46	82,21	83,32
3	Lembaga demokrasi	76,26	76,70	90,81	67,18	71,92	73,43
	Indeks Demokrasi				77,01	73,74	79,71

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

*Metode baru

Grafik 2.78
Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023



Sumber: Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo 2023

Sesuai hasil di atas, aspek kapasitas lembaga demokrasi perlu mendapatkan perhatian khusus, karena semakin rendah nilai IDI, artinya demokrasi di suatu daerah semakin terhambat. Terdapat tiga indikator pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang memiliki nilai rendah, yaitu indikator 15, “Kinerja lembaga legislatif”, indikator 18, “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah”, dan indikator 22, “Pendidikan politik pada kader partai politik”.

2.1.5.2.2 Indeks Rasa Aman/Indeks Kriminalitas

Tercipta dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Selain itu, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Indeks rasa aman adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat di suatu wilayah atau komunitas. Indeks ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap lingkungan mereka, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Gorontalo Utara, belum ada data spesifik yang menggambarkan capaian indeks rasa aman. Sebagai *proxy*, indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) dan jumlah orang yang beresiko mengalami tindak kejahatan (*crime rate*) yang berasal dari data setiap Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo. Kinerja setiap indikator tersebut dijabarkan pada Tabel 2.178 berikut.

Tabel 2.178
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Tahun 2024

No.	Polres	Tahun			
		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Kejahatan	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan
1	Boalemo	341	222	73,00	25.41'21"
2	Gorontalo	503	123	79,00	17.24'56"
3	Pohuwato	403	262	47,00	21.44'13"
4	Bone Bolango	309	181	56,00	28.20'58"
5	Gorontalo Utara	211	159	94,00	41.31'00"
6	Kota Gorontalo	620	298	91,00	14.07'45"

No.	Polres	Tahun			
		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Kejahatan	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan
	Polda Gorontalo	437		76,00	20.02'45"

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2025

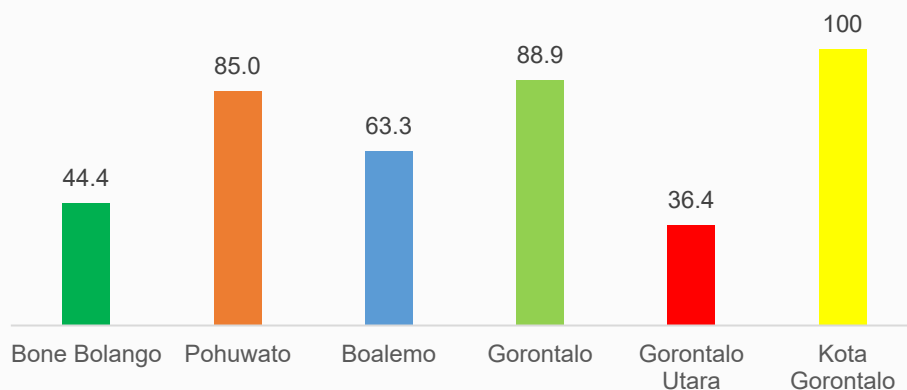
Gorontalo Utara memiliki pondasi keamanan yang solid dan lingkungan sosial yang relatif stabil dengan sistem penegakan hukum yang sangat efektif terlihat dari meski indikator risiko penduduk yang terkena kejahatan/100.000 penduduk termasuk menengah namun memiliki tingkat penyelesaian kejahatan yang tertinggi di regional dan selang waktu kejadian kejahatan pun sangat kecil, namun perlu fokus pada aspek pencegahan untuk menurunkan tingkat kejahatan secara progresif di angka <140/100.000 penduduk tahun 2025.

2.1.5.2.3 Kabupaten/Kota Peduli HAM

Skor Kabupaten/Kota Peduli HAM (KPPHAM) adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengukur komitmen dan implementasi pemerintah daerah dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Daerah yang dianggap peduli HAM jika memiliki skor di atas 75, skor 65 hingga 75 dianggap cukup peduli, 50 hingga 65 dianggap mulai peduli, dan dibawahnya dianggap kurang peduli HAM. Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Gorontalo Utara masih masuk pada tataran “Kurang Peduli HAM” dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, dimana untuk indikator seluruh indikator aksi pada B12 Kabupaten Gorontalo Utara tidak melaporkan kegiatannya ke KemenHAM (d.h. Kemenkumham). Komparasi kabupaten/kota tersebut ditampilkan pada Grafik 2.79.

Grafik 2.79
Skor Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024



Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, 2024

2.1.5.2.4 Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor. Rincian pelaksanaan penegakan Perda di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.179 berikut.



Tabel 2.179
Penegakan Peraturan Daerah

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jenis Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	4	2	3	3	3	3
2	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	9	11	8	9	9	9	10
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	11,11	36,36	25,00	33,33	33,33	33,33	30,00

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2025

2.1.5.2.5 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IPKKO) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan suatu daerah, dimana stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi

terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketenteraman masyarakat. IPKKO digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. IPKKO belum dilakukan pengukurannya di Gorontalo Utara, sebagai *proxy*, menggunakan cakupan petugas Linmas (rasio petugas Linmas per 10.000 penduduk), cakupan Satpol PP (rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk) dan cakupan penyelesaian bencana kebakaran dimana semakin tinggi skor ketiga indikator tersebut berkorelasi positif dengan tingkat keamanan dan ketertiban.

Tabel 2.180
Cakupan Petugas Linmas di Gorontalo Utara

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah satuan Linmas	816	816	816	816	816	816	824
2	Jumlah penduduk	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563	130.400	131.340
3	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	72:10.000	71:10.000	65:10.000	64:10.000	63:10.000	62:10.000	63:10.000

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2025

Tabel 2.181
Cakupan Satpol PP di Gorontalo Utara

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	116	125	102	102	112	117	46
2	Jumlah penduduk	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563	130.400	131.340
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	10:10.000	11:10.000	8:10.000	8:10.000	9:10.000	9:10.000	4:10.000

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2025

Tabel 2.182
Cakupan Penyelesaian Bencana Kebakaran di Gorontalo Utara

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejadian kebakaran	-	-	-	8	6	29	13
2	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	-	-	-	5	6	29	8
3	Tingkat penyelesaian kejadian kebakaran (persen)	-	-	-	63	100	100	61,54

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2025

Secara umum, kinerja tiga indikator di atas masih belum optimal. Rasio Linmas mengalami penurunan dibanding 2018 sehingga rasio perlindungan masyarakat menurun secara bertahap, menghasilkan potensi beban kerja yang naik bagi jajaran Linmas, dan potensi penurunan efektivitas pengawasan keamanan lingkungan. Rasio Satpol PP turun drastis pada tahun 2024 dibanding tahun 2019, hal ini sangat krusial karena berpotensi berdampak langsung terhadap ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada penyelesaian bencana kebakaran, tahun 2024 menunjukkan penurunan kemampuan penanganan yang dapat diakibatkan kendala teknis, operasional, atau kekurangan sumber daya pemadam kebakaran.

Di masa depan, beberapa kebijakan strategis dapat dilakukan sebagai upaya pembenahan: penambahan rekrutmen Linmas dan Satpol PP untuk menyesuaikan beban kerja dan pertumbuhan penduduk, evaluasi anggaran dan dukungan operasional Satpol PP dan pemadam kebakaran khususnya pada sektor peralatan dan pelatihan, penguatan sinergi antar instansi untuk respons cepat dalam penanganan bencana kebakaran, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kebencanaan dan kesadaran pencegahan kebakaran.

2.1.5.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.5.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing

suatu daerah, tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Untuk mengetahui posisi relatif tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah tersebut, menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD mengadopsi kerangka



pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia, dengan menggunakan 4 aspek utama: lingkungan pendukung, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi, dan diukur berdasarkan 12 pilar: kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, efisiensi pemasaran produk, pasar tenaga kerja, pasar finansial, tingkat kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Berdasarkan hasil IDSD yang disusun oleh BRIN, daerah dengan nilai IDSD tinggi umumnya memiliki potensi ekonomi yang lebih besar, tingkat investasi yang lebih tinggi, serta keberhasilan dalam mengoptimalkan teknologi dan inovasi untuk mendorong kemajuan. Dengan demikian, IDSD menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kebijakan yang mendukung sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan daya saing, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2024, Kabupaten Gorontalo Utara mencatat skor IDSD 3,34, di bawah capaian Provinsi Gorontalo dan rata-rata capaian kabupaten/kota, bahkan berselisih jauh di bawah Kota Gorontalo, dengan kelemahan utama pada ekosistem inovasi yang mencerminkan lemahnya dukungan terhadap lembaga riset, kemitraan, maupun pemanfaatan teknologi oleh sektor usaha.

Tabel 2.183
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

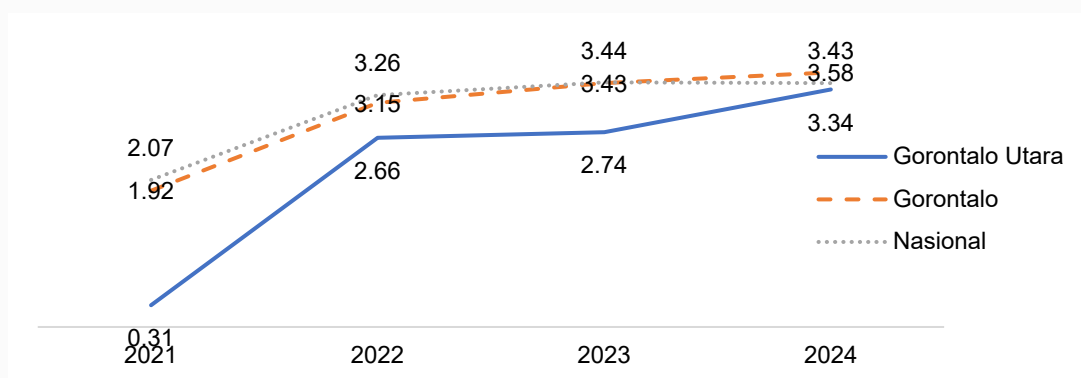
Daerah	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Gorontalo	4,46	2,42	3,32	3,85	3,66	4,16	4,27	3,79	2,59	3,79	3,12	3,55	3,58
Rata-rata Kab/Kota	4,46	3,02	3,91	3,76	3,65	3,93	3,28	4,20	2,42	3,78	4,35	2,29	3,59
Boalemo	4,50	2,83	3,73	3,60	3,75	3,79	2,88	3,89	1,68	3,68	4,25	1,12	3,31
Gorontalo	4,34	2,98	4,12	3,71	3,60	3,89	3,18	4,14	2,78	4,10	4,13	3,05	3,67
Pohuwato	4,52	2,66	3,40	3,70	3,33	3,88	2,37	4,27	2,36	3,80	4,69	1,93	3,41
Bone Bolango	4,35	3,28	3,43	3,52	3,69	4,06	3,52	4,24	1,90	3,64	4,24	1,88	3,48
Gorontalo Utara	4,35	2,88	3,94	3,99	3,48	3,71	2,73	3,87	1,45	3,50	4,68	1,46	3,34
Kota Gorontalo	4,74	3,50	4,81	4,01	4,03	4,24	5,00	4,76	4,37	3,94	4,08	4,27	4,31

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2024 (BRIN), 2025

Secara *time series*, terlihat capaian di tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, dengan adanya perbaikan elementer pada beberapa komponen kinerja serta pemenuhan ketersediaan data yang digunakan dalam metode perhitungan, bahkan berhasil menipiskan *gap* dengan capaian Provinsi Gorontalo dan Nasional.

Meskipun demikian, beberapa perbaikan elementer perlu didorong di kesempatan berikutnya, seperti berfokus pada perbaikan SDM (melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja), mendorong ekspor dan produk unggulan lokal (melalui promosi komoditas daerah ke pasar luar dan penguatan UMKM dan koperasi ekspor), membangun ekosistem inovasi (melalui penguatan kemitraan pemerintah-universitas-industri dan digitalisasi pelayanan dan teknologi pertanian), serta meningkatkan infrastruktur dasar.

Grafik 2.80
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.5.3.2 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai kinerja dan efektivitas kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia, yang mencakup berbagai dimensi yang relevan dengan kepemimpinan, seperti kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan sosial, dan tata kelola pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020. Penilaian IKKD bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja kepala daerah serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

IKKD akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025, dengan pengukuran dan evaluasi kinerja yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Selama periode ini, BSKDN Kemendagri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan data dan informasi yang diperlukan tersedia dan akurat, sehingga saat ini belum dapat disampaikan capaian kinerja ini dalam RPJMD tahun 2025-2029.

2.1.5.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam menjelaskan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah, digunakan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) *outcome* dan *output* selama periode lima tahun terakhir yang seperti yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2020-2024. Pada pelaporan LPPD tahun 2024, yang tercantum hanya IKK *outcome*.

2.1.5.4.1 Urusan Pendidikan

Tabel 2.184
IKK Urusan Pendidikan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	99,36	99,54	99,59	99,93	100,00
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	93,90	94,58	98,71	98,73	98,74
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	82,44	87,17	87,97	89,73	89,78
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	89,01	84,41	84,69	92,90	92,99
5	Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi (negeri dan swasta)	Unit	172	187	187	188	188
6	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Orang	4.345	4.315	4.397	5.592	5.592
7	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	4.345	4.315	4.397	5.592	5.592
8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	Orang	402	422	427	427	427
9	Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	Orang	354	382	377	435	435
10	Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah DIV atau S1 bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	173	195 31	198 32	435	198 237
11	Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta)	Orang	110	97	99	99	99

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	swasta) yang memiliki ijazah DIV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			29 5	29 5		
12	Jumlah SD dan SMP negeri terakreditasi	Unit	171	171	175	177	184
13	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Orang	2.336	13.492	13.583	12.988	12.988
14	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Orang	2.364	6.745	6.429	6.373	6.373
15	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	11.030	13.492	13.583	12.988	12.988
16	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	4.336	6.745	6.429	6.363	6.373
17	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Orang	388	1.250	556	231	231
18	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Orang	320	578	336	108	108
19	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Orang	948	947	978	1.054	1.054
20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Orang	516	518	553	609	609
21	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Orang	270	385	270	231	231
22	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Orang	138	207	138	46	46
23	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Orang	150	162	41	227	227
24	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Orang	78	79	29	76	76
25	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah DIV atau S1 dan sertifikat pendidik	Orang	820	832 409	891 435	1.005	S1: 1.005 DIV: 49
26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah DIV atau S1 dan sertifikat pendidik	Orang	465	501 169	530 195	609	S1: 609
27	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah DIV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	129	120 120 117	131 131 123	137	S1 : 137 DIV: 1
28	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah DIV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	46	46 39	45 45 42	46	S1 : 46
29	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	16	20	28	55	55
30	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	22	18	29	21	21

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
31	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (negeri dan swasta)	Unit	8	8	9	9	9
32	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Orang	1.870	1.874	1.920	710	710
33	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	1.870	1.874	1.920	710	710
34	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta)	Orang	100	63	63	63	63
35	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta)	Orang	103	84	112	112	112
36	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah DIV dan S1	Orang	103	79	109	109	109
37	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah DIV atau S1	Orang	8	9	9	9	9

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.2 Urusan Kesehatan

Tabel 2.185
IKK Urusan Kesehatan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,09	0,80	0,14	1,09	1,22
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	59,30	56,26	91,62	95,79	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87,64	91,37	92,65	94,22	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	69,60	87,31	91,68	93,61	92,20
6	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	%	43,30	72,60	83,71	87,13	94,70
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0,00	63,74	100,00	93,22	75,56
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	65,60	75,98	81,15	89,44	54,47
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	39,30	61,45	69,48	89,20	66,38
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	38,00	94,60	92,96	100,00	97,30
11	Persentase penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	55,10	96,81	96,10	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	103,51	100,00	100,00	99,96	100,00
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	116,00	79,62	98,43	98,05	100,00
15	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang	Unit	1	1	1	2	2

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar						
16	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	1	1	1	2	2
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	5	5	5	5
18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan							
19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	3	3	3	3
20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	6	6	6	6
22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar							
23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	9	9	9	9
24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	2	5	5	5	5
26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar							
27	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	1	3	3	4	4
28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar							
29	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3
30	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
31	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	1	3	3	3	3
32	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
33	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	1	3	3	3	3
34	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar							
35	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	4	4	4	4
36	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	15	16	16	16	16
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar							
37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	7	7	7	7
38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16
Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar							
39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	1	4	4	4	4
40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	16	16	16	16

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**Tabel 2.186****IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Gorontalo Utara**

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	10,34	10,34	100,00	0	1,11
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	%	29,17	58,23	100,00	0	0
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	15,41	14,17	26,78	9,37	4,40
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	57,87	86,89	87,59	86,08	85,54
5	Persentase rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	82,04	81,07	79,26	87,19	87,54
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	%	100,00	5,50	5,74	6,26	100,00
7	Rasio kemandirian jalan	%	43,74	62,00	52,99	54,49	43,52
8	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40,74
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%		100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir							
10	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten	Ha	3.058	29.561	0	26,7	6.231,13
11	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten	M	0	0	0	69.600	69.600
12	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten	Ha	0	0	0	15,4	15,4
13	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten	M	0	0	0	46.800	46.800
14	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
16	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	Unit	0	0	0	2	2
Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS							
17	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten	Ha	0	0	0	0	0
18	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten	M	0	0	0	0	0
19	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten	Ha	0	0	0	0	0
20	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS	M	0	0	0	0	0

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kewenangan kabupaten						
21	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
22	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
23	Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	Jumlah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi							
24	Persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	60,00	70,00	60,00	73,00	73,00
25	Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	35,00	66,00	35,00	76,00	69,00
26	Persentase jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	46,00	80,00	46,00	76,00	66,00
Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten							
27	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28	Tersusun dan ditetapkan kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
29	Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten penyelenggara SPAM	Entitas	1	1	1	1	1
30	Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	0	0	0	0	0
31	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Kerja sama	0	0	0	0	0
Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik							
32	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	Rumah	26.161	30.907	31.453	25.055	25730
33	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Rumah	0	0	0	386	386
34	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Rumah	0	0	0	25.441	26.116
35	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah	0	0	0	35	50
36	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Rumah	0	0	0	35	50
37	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Rumah	0	0	0	386	386
38	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	%	56,44	56,44	56,44	26,51	26,51
39	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	%	0	0	0	17,50	17,50
40	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	%	0	0	0	50	50
41	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	0	0	0	98,46	98,46
42	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	0	0	0	100	100
43	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	0	0	0	100	100
44	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%	0	0	0	50	50

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
45	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	0	0	0	35	35
Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota							
46	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	71,00	76,03	76,03	33,88	35,77
47	Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam tahun eksisting	Izin	121	70	53	117	64
48	Penetapan peraturan daerah tentang bangunan/gedung	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak
49	Penetapan keputusan bupati/walikota tentang tim ahli bangunan/gedung	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
50	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Bangunan	0	0	0	4	0
51	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	Bangunan	0	0	0	47	0
52	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten	Bangunan	0	0	0	13	13
53	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat	Bangunan	0	0	0	1	1
Rasio Kemantapan Jalan							
54	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	Km	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12
55	Panjang jalan yang dibangun	Km	1,6	0	0,9	1,4	1,5
56	Panjang jembatan yg dibangun	M	0	0	40	2	2
57	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	8,2	8,02	23,7	19,65	9,96
58	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	M	0	0	0	70	0
59	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Km	8,2	8,02	23,7	19,65	9,96
60	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	0	0	0	70	0
61	Panjang jalan yang dipelihara	Km	1	1	0,1	0,027	0
62	Panjang jembatan yang dipelihara	M	0	0	76	70	0
Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli							
63	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kabupaten	Orang	21	0	0	1	1
64	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten	Orang	21	0	0	23	23
65	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten	Orang	21	21	21	0	0
66	Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
67	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBD kabupaten	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
68	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
69	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
70	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
71	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
72	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah lainnya						
73	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
74	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
75	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
76	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
77	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
78	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
79	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
80	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten/kota	Badan Usaha	0	0	0	59	59
81	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	Badan Usaha	0	0	0	1	0
82	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten	Badan Usaha	0	0	0	1	1
83	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Badan Usaha	0	0	0	1	0
84	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Izin	0	0	0	59	59
85	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Pengawasan	0	0	0	79	23
86	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kecelakaan konstruksi	0	0	0	79	0
87	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Pengawasan	0	0	0	79	23

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.187

IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	71,15	78,05	93,88	0,00	0,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	3,6	0,03	0,21	0,21	0,00
4	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	29,47	17,26	11,62	10,94	11,69
5	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	%	5,38	5,39	0,78	0,18	0,00
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten							
6	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	6.485	6.485	0	23.250	23.250
7	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	5	3	3	2	52
8	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Orang	20	110.165	136	218	18.941
9	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0	0	0	6
10	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	4	3	3	2	0
11	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	4	3	3	0	3
12	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	0	0	0	0	0
13	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Orang	16	9	9	8	0
14	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	0	0	0	0	0
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten							
15	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0	0	0	0	0
16	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0	0	0	0	0
17	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0	0	0	0	0
18	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0	0	0	2	3
19	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0	0	0	0	0
20	Jumlah total luasan pengadaan tanah	Ha	0	0	0	0	0
Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani							
21	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	30,9	35,39	28,65	28,65	28,65
22	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	1.018	1	29	13	

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
23	Jumlah luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	66,68	1	1	0,06	0
Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)							
24	Jumlah rumah di kabupaten	Unit	24.578	24.595	29.391	29.391	29.391
25	Jumlah unit PK RTLH	Unit	1.018	408	400	13	221
26	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	6.773	3.900	3.414	3.218	3.218
27	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Unit	0	56	56	56	56
28	Rasio rumah dan KK	%	78,17	143,51	127,93	127,93	127,93
29	Jumlah rumah pembangunan baru	Unit	64	50	49	25	6
Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)							
30	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit	2	3	1	3	0
31	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Unit	1.693	2.327	1.055	40	0
32	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Unit	50	665	140	15	20
33	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on-site/off-site)	Unit		112	59	59	0
34	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Perumahan			0	0	0
35	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit			0	0	0
36	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang		1	0	0	0
37	Jumlah pengembang yang ter-register	Pengembang		5	0	0	0
38	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengembang			0	0	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.188

IKK Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	14,71	50,00	15,38	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	74.000	74.000	100,00%	100,00%	77,18%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	74.000	8.338	100,00	100,00	120.569
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8.338	8.338	100,00%	100,00%	7.554
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	22,22	100,00	100,00	100,00
7	Waktu tanggap (response-time) penanganan kebakaran	Menit/ 7 Km	15	15	12,8%	43,89%	4,23
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan							
8	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	Pelanggaran	4	4	2	6	14
9	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	0	0	0	0	0
10	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda dan Perkada	5	5	2	2	4
11	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	3	3	2	1	1

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	SOP	6	6	6	10	10
13	Tersedianya sarana prasarana minimal	Sarana prasarana	4	4	6	0	0
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana							
14	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	67,17	67,17	100,00	100,00	100,00
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
16	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	67,17	67,17	100,00	100,00	100,00
18	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	3,03	3,03	100,00	100,00	100,00
21	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	100,00	3,03	100,00	0,33	0,33
22	Persentase warga negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
24	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	6,00	6,00	6,00	1,8	1,8
25	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	6,00	6,00	6,00	1,8	1,8
26	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran							
28	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran	Layanan	0	0	6	2	14
29	Tersedianya pos sektor Damkar yang dilengkapi sarana prasarana Damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Pos	1	1	1	0	1
30	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (<i>shift</i>) di kantor kecamatan	Orang	14	24	21	11	14
31	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana Damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Pos	0	0	1	0	0
32	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sarpras	2 Mobil damkar	9 mobil Damkar	7	0	0
33	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	0	0	0	1

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
34	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	0	0	0	0	0
35	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kegiatan	0	0	1	0	1

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.6 Urusan Sosial

Tabel 2.189
IKK Urusan Sosial di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60,25	66,10	67,53	68,09	69,05
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan							
3	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Layanan		928	3	1	12
4	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jiwa		1.404	1.198	487	451
5	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tim		1	1	2	2
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang dijangkau	Jiwa		1.404	809	734	265
7	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Unit		3	3	4	4
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jiwa		928	100	100	51
9	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit		1	1	1	1
10	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang menerima paket sandang	Jiwa		-	100	137	60
11	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jiwa		281	28	30	6
12	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Unit		1	1	1	1
13	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Paket		2	3	1	1
14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jiwa		17	0	0	35
15	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Orang		0	0	0	0
16	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Orang		6	5	5	5
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,	Jiwa		17	0	0	38

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial						
18	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Keg		0	0	0	38
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jiwa		0	0	0	50
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jiwa		0	1.198	92	13
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jiwa		0	0	0	1
22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jiwa		2	0	0	1
23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang dirujuk	Jiwa		2	0	0	0
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah							
24	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Orang		1.209	733	320	367
25	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang		16	11	12	8
26	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tempat		3	3	5	5
27	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket		75	500	37	58
28	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang		0	0	1	8
29	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang		147	148	147	125

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.7 Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.190
IKK Urusan Tenaga Kerja di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	100,00	0,09	0,11	0,10	16,98
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	4,10	433,37	2,95	4,21	19,50
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	56,63	65,06	68,75	76,92	9,20
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	100,00	100,00	25,87	13,69	9,79
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja							

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	40,34	40,34	40,34	40,34	50
8	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Perusahaan	4	4	5	7	8
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi							
9	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Rasio instruktur terhadap peserta pelatihan	%	1,66	6,25	1,66	5,88	6,66
12	Persentase LPK yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang	200	35	85	23	15
15	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Persentase penyerapan lulusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang terdaftar	Orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00
19	Jumlah pelatihan CPMI/CTKI	kegiatan		2 Orang	1	2	3
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja							
20	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Data tingkat produktivitas total		3.429,29	3.592,16		1,66	4,17
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta							
22	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	36,73	37,50	36,73	16,27	19,56
23	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	%	33,33	33,33	33,33	100,00	50
24	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat, dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/PB	2	3	2	0	0
25	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%	8,16	22,22	8,16	100,00	4,22
26	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	59,03	65,06	59,03	64,63	66,66
27	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	9,64	15,7	9,64	3,79	8,04
28	Jumlah mogok kerja		0	0	0	0	0
29	Jumlah penutupan perusahaan		0	0	0	0	0
30	Jumlah perselisihan kepentingan		0	0	0	0	0
31	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	0	0	0	0
32	Jumlah perselisihan PHK	Kasus	9	13	3	0	7
33	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	81	163	10	0	7
34	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Kasus	0		0	0	5
35	Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		0		0	2	2
36	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	11,11	15,38	11,11	0,00	0,00
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
37	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	Lowongan	1	1	1	1	32
38	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di	Orang	64	114	259	540	337

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kabupaten						
39	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	BKK	0	0	0	0	0
40	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	Orang	0	0	0	0	0
41	Jumlah pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang		2	2	2	2
42	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten	Lembaga	11	11	10	0	0
43	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten	Perjanjian	1	2	0	313	428
44	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online (SISNAKER)	Orang	0	64	0	76	33
45	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	Orang	2	2	1	2	3
46	Jumlah CPMI/CTKI yang terdata	Orang	2	2	1	2	7
47	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi	Orang	100,00%	1	0	0	0
48	Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Orang	100,00%	1	0	2	3
49	Data pemberdayaan PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	100,00	1	0,00	0,00	0
50	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Lembaga	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.191

IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,39	0,36	0,22	1,23	0,46
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,07	0,06	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,02	12,95	6,45	17,19	4,63
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD							
4	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	Lembaga	2	2	2	38	0
5	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	Program/Kegiatan	1	1	1	18	15
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten							
6	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Massa	2	1	2	2	0
7	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	2	2	2	2	2
8	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	0	2	0	0	5
10	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas	Lembaga	0	2	0	0	1

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	oleh pemerintah daerah kabupaten (APBD kabupaten)						
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan per 100.000 Anak							
11	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	Organisasi	1	1	1	0	0
12	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	Orang	5	30	5	0	21
13	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	0	2	0	0	0
14	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Lembaga	0	2	0	0	0
15	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan/Program	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
16	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Lembaga	0	2	0	0	0
17	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.9 Urusan Pangan

Tabel 2.192
IKK Urusan Pangan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cadangan pangan	%	1.243	1.582,67	27,66	32,60	22,46
Persentase Cadangan Pangan							
2	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Unit	45	48	53	54	54
3	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
4	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan loka	Regulasi	0	0	0	1	0
5	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/Tidak Ada Kegiatan	Ada 1	Ada 1	Ada 1	Ada 1	Ada
6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tertanganinya kerawanan pangan	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.10 Urusan Pertanahan

Tabel 2.193
IKK Urusan Pertanahan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi	%	100,00	100,00	108,13	100,00	100,00

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang diterbitkan						
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	95,88	98,98	100,18	100,00	0,00
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100,00	100,00	108,13	100,00	100,00
4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	%	438,48	9,49	110,85	0,00	0,00
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan							
7	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati	SK	0	100,00%	1	4	0
8	SK Bupati tentang penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ <i>Absentee</i> dan daftar subyek	SK	0	100,00%	2	0	0
9	SK Bupati tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ <i>Absentee</i>	SK	0	100,00%	215,05%	0	0
10	Dokumen izin membuka tanah	Dokumen	0	0	215,05%	0	0
11	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten	Dokumen	0	0	0	4	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.11 Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.194
IKK Urusan Lingkungan Hidup di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Poin	70,12	74,46	75,92	75,97	77,09
2	Terlaksananya pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah kabupaten	%	11,88	56,39	14,26	4,18	7,34
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	37,98	44,44	75,00	70,59	84,47
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten							
4	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	17,89	16,25	16,50	56,67	60,48
5	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	27,54	27,97	28,65	93,40	92,60
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	24,68	30,24	30,24	76,88	76,91
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten							
7	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah							
10	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Izin	14	7	9	3	8
11	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten terhadap usaha izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Rasio	0:125	0:132	4:141	4:144	3:152
12	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah dalam	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 kabupaten								
13	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan Diklat	Lembaga	0	0	0	0	0	0
15	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.195

IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP elektronik	%	98,90	98,54	95,21	100	99,60
2	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	73,14	78,84	46,03	50,64	54,49
3	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte kelahiran	%	99,51	99,86	99,76	100,00	99,81
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	0	43	42	5	5
Perekaman KTP Elektronik							
5	Penerbitan akta perkawinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Penerbitan akta perceraian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Penerbitan akta kematian	%	96,77	96,77	100,00	100,00	100,00
8	Penyajian data kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.196

IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	22,22	78,57	22,22	57,14
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,00	8,70	53,27	8,70	38,09
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal							
3	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Desa	15	15	44	15	0
4	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	0	0	29	0	0
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	0	0	0	0	123
6	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.197
IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Poin	2,49	59,19%	2,01	5,28%	27,20%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	74,02	76,92	73,83	70,52	68,69
3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCPR)	%	13,60	12,47	21,03	10,42	14,46
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			13,4	14,5	7,4	6,4
Total Fertility Rate							
5	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun		21,53	23,84	20,53	19,6
7	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran/ 1.000 Wanita			2,01	43,17	43,8
8	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)		100%	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Orang	6 pihak	729	729	783	785
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)							
10	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100
11	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	74,02	76,92	73,83	70,53	109,14
12	Pemerintah daerah kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	UPPKS		278	142	117	271
13	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	%	19,00	12,62	11,85	34,27	69
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)							
14	Persentase kepesertaan KB di kabupaten dan kabupaten dengan kepesertaan rendah	%	0,00	3,72	8,73	10,43	14,46
15	Persentase kepesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	75,78	82,34	74,24	76,13	44

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.15 Urusan Perhubungan

Tabel 2.198
IKK Urusan Perhubungan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten	Persen			76,00	76,00	57,00
2	Kinerja lalu lintas kabupaten	%	0,18 0,19	0,13	0,02	0,02	0,04
Rasio Konektivitas Kabupaten							
3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	90,84	96,35	90,84	83,00	
5	Penetapan tarif angkutan orang antar kabupaten dalam kabupaten	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

6	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
V/C Ratio di Jalan Kabupaten							
7	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	%	100,00	100,00	100,00	74,00	0,04

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.199
IKK Urusan Komunikasi dan Informatika di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	%	63,46	100,00	100,00	74,40	100,00
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	59,61	100,00	100,00	10,13	33,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah, dan pemerintah daerah kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	70,10	100,00
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan Dinas Kominfo							
4	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%				74,00	100,00
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%				74,41	100,00
6	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada/Tidak Ada				Ada	Ada
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi							
7	Persentase kegiatan perangkat daerah dan pelayanan publik yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%				100,00	100,00
8	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%				100,00	100,00
9	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%				100,00	59,00
10	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%				4,70	100,00
11	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%				2,00	55,00
12	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%				79,00	100,00
13	Persentase layanan publik dan layanan	%				2,70	N/A

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah						
14	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%				13,95	73,80
15	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%				13,95	73,80
16	Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data	%				46,51	47,60
17	Persentase data yang dapat berbagi pakai					34,88	100,00
18	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	%				11,62	16,60
19	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%				100,00	100,00
20	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	Ada/Tidak Ada				Ada	Ada
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten							
21	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	%				16,66	
22	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%				100,00	
23	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%				50,00	

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.17 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.200

IKK Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%		13,49	11,54	23,63	25,00
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%		5,54	3,74	12,14	1,61
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas							
3	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	%	6,14	4,13	6,14	0,00	0,00
4	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%		20,00	0,00	0,00	0,00
5	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	66,12	66,12	66,12	100,00	5,357
6	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	28,57	5,50	28,57	7,27	21,42

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	18,18	20,63	18,18	29,09	89,28
8	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	0,83	0,70	0,83	0,48	89,28
9	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%		3,97		50,00	1,79
11	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	8,26	7,94	8,26	1,82	1,82
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten	%	1,65	3,97	1,65	0,00	1,79
13	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten	%	0,83	1,59	0,83	1,82	1,78
14	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten	%	66,12	68,25	66,12	41,82	53,57
15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten	%	0,83	0,79	0,83	3,62	1,78
Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha							
16	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	8,82	9,63	8,82	12,15	0,797
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>Online Data System</i> (ODS)	%				0,00	0,00
18	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%				0,05	0,015
19	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,58	0,51	0,58	0,4	0,239
20	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%				0,05	0,031
21	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	1,78	1,43	1,78	0,62	0,414
22	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	1,78	1,43	1,78	12,08	0,7978

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.18 Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.201

IKK Urusan Penanaman Modal di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	86,87	1,68	-64,96	116,66	67,44
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten							
2	Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kewenangan daerah kabupaten						
3	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Laporan	0	1	1	0	0
5	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	Kegiatan	1	4	8	9	9
6	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	2	1	1	1	0
7	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	0	2	1	1	2
8	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan	0	2		1	1
9	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin	1.184	1.196	1.201	3.298	1.344
10	Laporan realisasi penanaman modal	Rp	959.219.486.867	443.543.285.481	235.233.102.234	509.658.157.615	853.380.889.543
11	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	Orang	3	43	18	17	23
12	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kegiatan	9 PMA 47 PMDN	1 PMA 44 PMDN	17 PMA & PMDN	32	32
13	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	4	Ada (4)

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.202

IKK Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,58	1,82	1,83	1,80	1,77
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,28	0,38	0,42	0,41	0,64
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	7	0	0	2	6
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri							
4	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	25	25	25	25	0
5	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	25	25	25	25	0
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan							
6	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	55	55	55	55	27
7	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	3	3	3	3	10
Peningkatan Prestasi Olahraga							
8	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	29	29	32	34	29
9	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Kegiatan	1	0	0	3	2

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.20 Urusan Statistik

Tabel 2.203
IKK Urusan Statistik di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50,00	100,00	100,00	46,51	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	50,00	100,00	100,00	46,51	100,00
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah							
3	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak Ada			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Survey				6	14
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi				7	5
6	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Survey				2	2
7	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi				1	1
8	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%				100,00	100,00
9	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	%				92,00	62,16%

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.21 Urusan Persandian

Tabel 2.204
IKK Urusan Persandian di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	0,77	0,00
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah							
2	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	%				100,00	100,00
3	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen	%				100,00	7,43
4	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%				N/A	N/A
5	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS)	%				N/A	N/A

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.22 Urusan Kebudayaan

Tabel 2.205
IKK Urusan Kebudayaan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	13,33	50	50	50	0
Terlestarikannya Cagar Budaya							
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	1	4	4	4	4
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	2	4	4	4	4
4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	1	4	4	4	4
5	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	20	0	0	1	0
6	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	2	8	4	4	4
7	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	2	4	4	4	4
8	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Cagar Budaya	0	8	0	0	0
9	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Cagar Budaya	2	4	4	0	0
10	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	2	4	4	0	0
11	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi	0	0	0	0	0
12	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Orang	0	0	0	0	0
13	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Unit	0	0	0	0	0
14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	0	8	0	0	0
15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Tim	0	5	5	0	0
16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tim	0	3	3	0	0
17	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Orang	0	0	0	0	0
18	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0
19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Unit	0	0	0	0	0
20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.23 Urusan Perpustakaan

Tabel 2.206
IKK Urusan Perpustakaan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	81,19	52,33	53,7	54,4	65,64
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	0	2,64	71,72	70,69	72,62
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat							
3	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	0,45	0,45	0,20	199,04	1,95
4	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	5,94	5,94	0,47	44,33	0,317
5	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,20	0,20	36,84	0,19	0,0019
6	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	0,00	0,00	0,20	0,47	0,031
7	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Orang	7.509	7.509	36.840	54.400	42.113
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat							
8	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Naskah	0	0	0	0	0
9	Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasa	Naskah	0	0	0	0	0
10	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Koleksi	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.24 Urusan Kearsipan

Tabel 2.195
IKK Urusan Kearsipan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	79,75	80,64	82,63	85,96	83,13
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	27,166	61,67	69,30	0,00	0,00
Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional							
3	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	69,00	93,85	91,35	83,07	85,85
4	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	37,00	70,00	71,50	77,82	85,90
5	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	50,00	68,70	69,44	84,70	82,25
6	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	166,00	90,00	98,26	73,74	78,51
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat							
7	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	1	100	100	0	0
8	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	%	0	50	50	0	0
9	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten yang sesuai NSPK di kabupaten	%	9	10	13,8	0	0

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	%	0	120	127	0	0
11	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	%	0	40	50	0	0
12	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	%	1	50	75	0	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.25 Urusan Kelautan Perikanan

Tabel 2.208
IKK Urusan Kelautan Perikanan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap)	Ton	20.075	22.020	26.250	23.004	25.118
2	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	Ton	14.179	14.592	17.430	19.115	21.871
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)							
3	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	845	894	932	983	860
4	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional	%	22,10	71,80	207,89	84,64	54,38
5	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten yang diterbitkan	Izin	0	0	0	52	0
6	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses Iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Pembudi- daya	60	0	60	25	40
7	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Benih	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.26 Urusan Pariwisata

Tabel 2.209
IKK Urusan Pariwisata di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-84,78	-100%	0	42,35	57,6
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	240,49	80,013	-10,39	-16,25	-49,32
3	Tingkat hunian akomodasi	%	100	3.263	4,613	2,32	11,87
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,71	8,64	1,819	1,807	1,773
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,258	0,127	0,107	0,060	0,056
Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan							
5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Orang	8	8	8	8	5
6	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Unit	104	106	106	5	0
7	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	TDUP	79	79	79	3	4

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang	14	0	85	121	197
9	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	4	4	3	1	0
10	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Kegiatan	0	0	0	0	0
11	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industri	3	2	2	0	0
12	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	0,42	37,5	0,00	0,00	0,00
13	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	0,85	92,00	100,00	100,00	0,00
14	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	11	11	0	0	1

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.27 Urusan Pertanian

Tabel 2.210
IKK Urusan Pertanian di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	4,58	4,97	4,87	4,92	5,08
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,05	33,12	0,02	52.114,3	30,84
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-53,30	26,76	0,81	-99,19	348,10
Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun							
4	Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	121	163	179	212	13
5	Prasarana pertanian yang digunakan	Unit	121	28	42	3	0
6	Penerbitan izin usaha pertanian	Izin	4	2	70	19	18
7	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	%			100,00	100,00	100,00
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk							
9	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di kabupaten	%	0,06	0,001	0,06	26,73	

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.28 Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Tabel 2.111
IKK Urusan Energi Sumber Daya Mineral di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Izin di Kabupaten							
2	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	Izin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.29 Urusan Perdagangan

Tabel 2.212
IKK Urusan Perdagangan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	28,96	31,93	38,73	88,54	100,00
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10,78	25,37	7,41	12,04	9,00
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)							
3	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:	%					
	- Pusat perbelanjaan						1
	- Toko swalayan						1
4	Persentase penerbitan TDG	%	40,00	100,00	40,00	100,00	100,00
5	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	4,76	7,50	4,76	11,90	11,90
6	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk:	%					
	- Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri						
	- Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri						
	- Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri						
7	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah kabupaten	%					
8	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%					
9	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100,00	100,00	100,00		
10	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%				13,00	5,00
Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku							
11	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	8,26	25,37	8,26	4,6	4,6
12	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%					

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.30 Urusan Perindustrian

Tabel 2.213
IKK Urusan Perindustrian di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	38,57	90,10	20,88	29,69	0,00
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam	%	9,76	40,00	50,00		0.00

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)						
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK	%	31,38	45,00	2,86	2,66	2,36
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	0,00	2,86	0,00	0,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	35,00	0,00	0,00	90,00	100,00
Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten							
7	Persentase jumlah penetapan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan							
8	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait							
9	Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil yang diterbitkan	%	100,00	45,00	100,00	100,00	0,00
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Bagi Industri Kecil yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait							
10	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI bagi industri kecil yang diterbitkan	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini							
11	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.31 Urusan Transmigrasi

Tabel 2.214
IKK Urusan Transmigrasi di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Kawasan	1	1	1	1	1
2	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	1	1	1	1	1
3	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1	1	1	1	1
4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	SP	1	1	1	1	1

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.1.5.4.32 Penunjang Urusan

Tabel 2.215
IKK Penunjang Urusan di Gorontalo Utara

No.	IKK Outcome dan Output	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10,67	9,16	9,90	11,97	13,83
2	Persentase PAD	%	0,96	0,93	4,36	4,77	7,58
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	2	3	3
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3
5	Persentase belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	95,82	99,93	80,99	22,67	28,91
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Persentase total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	1,12	2,14	2,52	0,98	46,02
9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	87,77	55,53	59,64	47,83	3,21
10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%			25,39	9,17	7,00
11	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	69,59	1.172,97	90,43	89,62	94,08
12	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	3,77	20,35	21,73	32,58	41,08
13	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,37	19,70	19,13	15,51	16,70
14	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	91,96	0,93	12,81	6,57	3,36
16	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	84,59	0,85	17,85	9,25	14,21
16	<i>Assets management</i>						
	- Apakah ada daftar aset tetap?	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	- Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	- Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	- Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
	- Jumlah daftar aset tetap	Rp	9.842.593.950	1.987.494.841.802,41	2.257.978.043.158		2.533.433.988.635,9
17	Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	162,30	3,74	10,06	9,22	1,62
18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	108,73	0,04	1,22	97,28	99,16
19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dokumen LPPD (Bagian Tata Pemerintahan), diolah

2.2 INOVASI DAERAH

Inovasi daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk menciptakan dan menerapkan ide, metode, kebijakan, serta layanan baru yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan daya saing wilayah. Dalam era disrupsi teknologi dan kompleksitas tantangan sosial ekonomi saat ini, inovasi menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah, daerah-daerah yang aktif berinovasi cenderung memiliki kualitas layanan publik yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta iklim investasi yang lebih menarik. Oleh karena itu, inovasi tidak sekadar menjadi kebijakan tambahan, tetapi merupakan strategi utama dalam menghadirkan pemerintahan yang *agile*, berdampak langsung kepada rakyat, dan

menjadi solusi atas masalah dan tantangan di masyarakat.



Sebagai daerah pesisir, Gorontalo Utara memiliki keunikan dan tantangan sosial ekonomi tersendiri, seperti rendahnya optimalisasi sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan. Untuk menjawab hal tersebut, Kabupaten Gorontalo Utara mendorong sebuah inovasi yang tidak hanya menjawab permasalahan ekonomi, juga sosial dan layanan publik secara bersamaan

yang bersifat pemberdayaan masyarakat pesisir dan desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan melibatkan digitalisasi layanan publik, yaitu G2-10.

G2-10 merupakan akronim dari Gerakan 2 Ekor Kambing dan 10 Ekor Ayam, sebagai bagian dari konsep besar *agromopomulo* dalam program strategis Bupati-Wakil Bupati, yang berupa upaya bersama (kolaborasi)/*huyula* (dalam Bahasa Gorontalo) seluruh *stakeholder* pembangunan untuk penyediaan pangan jenis ternak kambing dan ayam untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan sebagai salah satu motor ekonomi masyarakat.

Urgensi dari dilaksanakannya G2-10 yaitu:

- Penyediaan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditawar dan ditunda;
- Ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis nasional dan Provinsi Gorontalo yang harus didukung oleh pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat;
- Ketersediaan pangan di Gorontalo Utara sangat krusial dan strategis bagi daerah-daerah sekitar yang berada dalam jalur lintas Trans Sulawesi, termasuk juga menjadi *provider* pangan bagi IKN;
- Membangun ketahanan pangan sangat penting disinergikan dengan penguatan kelembagaan dan cakupan layanan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih;
- Wadah kolaborasi bersama seluruh *stakeholder* pembangunan, mulai dari Forkopimda, aparat pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat umum;
- Butuh terobosan konkret untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Kenapa kambing dan ayam kampung/ras? Berikut beberapa alasan jenis ternak kambing dan ayam kampung dipilih dibandingkan ternak sapi.

- Masa panen ternak kambing dan ayam kampung relatif lebih pendek dibandingkan ternak sapi untuk mencapai bobot optimal, sehingga lebih cepat memberikan nilai tambah ekonomi dan perputaran uangnya lebih cepat;
- Modal awal memelihara kambing dan ayam relatif lebih murah dan mudah dari aspek pengelolaan, hingga penyediaan lahan dan pakan;
- Kebutuhan daging kambing bukan hanya untuk konsumsi sehari-hari, juga untuk memenuhi kewajiban beribadah (*aqiqah*, sahur puasa, dan *qurban*) bagi masyarakat muslim;
- Risiko kerugian jika ada kematian ternak lebih kecil dibandingkan kehilangan satu ekor sapi;
- Permintaan pasar relatif stabil, khususnya daging dan telur ayam, dan relatif dapat menyesuaikan kebutuhan pasar antara kebutuhan skala rumahan/industri kecil dengan industri besar;
- Produk sampingan/turunan banyak, selain daging dan telur juga termasuk kotoran ayam bisa dijadikan pupuk organik;

- Mudah ditransportasikan sekaligus dalam jumlah banyak menggunakan kendaraan ringan dan tidak memerlukan prosedur khusus;
- Relatif lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Dengan berbagai kelebihan dari ternak tersebut, ekspek yang diharapkan dari program inovasi daerah G2-10 yaitu:

- Menjadi motor gerakan ekonomi masyarakat yang bernilai ekonomis sekaligus ekologis, diantaranya sebagai pendorong bagi berkembangnya iklim berusaha yang kondusif untuk UMKM, berfungsi sebagai *enabler* bagi penciptaan lapangan kerja sekaligus penciptaan *velocity of money* yang berwawasan lingkungan;
- Mendukung program strategis nasional seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan baku daging hewan ternak;
- Pengembangbiakan ternak di *ranch* menjadi potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi di masa depan;
- Kambing yang dternakkan di *ranch* berpotensi menjadi wisata peternakan yang bernilai edukasi, kesehatan, lingkungan, dan hiburan;
- Keterlibatan pihak swasta/*privat sector* secara langsung dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat;
- Mendorong investasi di bidang industri ternak sekaligus turunannya;
- Menjadi pintu bagi kerjasama dan kolaborasi kawasan, misalnya dengan Kabupaten Pohuwato sebagai daerah yang didorong oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Proyek Strategis Nasional dalam hal ketahanan pangan;
- Meningkatkan volume pengapalan dan ekspor hasil industri ternak dan turunannya melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Gorontalo Utara;
- Untuk menjangkau pasar lebih luas, pemasaran hasil industri ternak dan turunannya didorong melalui *e-commerce*;
- Setiap kecamatan didorong memiliki lahan sendiri untuk G2-10, dan beberapa kecamatan yang memiliki kualitas lahan baik didorong menjadi sentra pakan ternak;

- Mendorong Koperasi Merah Putih untuk menjadikan G2-10 sebagai salah satu lini usahanya, sebagai investor sekaligus operator;
- Dan lain sebagainya.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, antara lain adanya alih fungsi lahan, menurunnya kualitas lingkungan, serta tingginya kebutuhan pangan masyarakat yang harus terus terpenuhi. Kondisi ini menuntut adanya upaya inovatif dan berkelanjutan agar pembangunan daerah dapat berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gerakan *Mopomulo* (Menanam) hadir sebagai salah satu jawaban atas tantangan tersebut. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan produktif, tetapi juga berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup melalui penghijauan dan konservasi. Selain itu, program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk kembali memaknai kegiatan menanam sebagai tradisi budaya, gaya hidup sehat, sekaligus investasi jangka panjang bagi masa depan generasi mendatang.

Gerakan *Mopomulo* (Menanam) adalah salah satu Inovasi Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan manifestasi nyata implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2025-2029, dimana program ini tidak hanya mencerminkan komitmen lokal terhadap pembangunan pertanian, tetapi juga berkontribusi strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui dukungan langsung terhadap Asta Cita kedua Presiden Prabowo-Gibran yang "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan" serta tujuan nasional untuk "mencapai kemandirian energi, pangan, dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia". Konsep "Transformasi Mopomulo" dalam program ini mengadopsi pendekatan "modernisasi pertanian, berkelanjutan (termasuk organik)" yang menjadi arah kebijakan nasional, tidak

hanya fokus pada peningkatan produksi tetapi juga transformasi pola pikir dan metode bertani menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan, sejalan dengan fokus RPJMN untuk "mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif" yang memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan dan mendukung agenda nasional mengenai "penguatan logistik komoditas pangan dan pertanian, pengendalian inflasi pangan bergejolak, dan kemandirian pangan". Melalui Gerakan Menanam ini, Kabupaten Gorontalo Utara turut berkontribusi dalam pencapaian target nasional "penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan", menjadikan program ini sebagai model replikasi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan komitmen nasional di tingkat lokal dan membuktikan bahwa pembangunan nasional dapat dimulai dari inisiatif lokal yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari ekosistem `mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia menuju kemandirian pangan dan kemakmuran rakyat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Gorontalo Utara, keberadaan UMKM menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi kerakyatan, namun pada kenyataannya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan akses permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, minimnya inovasi produk, serta terbatasnya akses pasar menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah menggagas program Inovatif "UMKM Bercahaya" sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendorong pengembangan kewirausahaan di berbagai sektor. Program "UMKM Bercahaya" Gorontalo Utara merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya mendukung implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita ketiga yang bertujuan "meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,



mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur" tetapi juga memperkuat program unggulan Provinsi Gorontalo "Usaha Mikro Kecil Menengah" dalam mencapai sinergi pembangunan ekonomi multi-level yang sejalan dengan prioritas nasional untuk "mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif" dalam mewujudkan target RPJMN berupa "penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 4,5-5% pada 2029, serta pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan". Program ini mengadopsi pendekatan holistik pemberdayaan ekonomi kreatif sesuai arahan nasional yang menempatkan "pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi digital" sebagai sektor produktif sumber pertumbuhan inovatif, tidak hanya fokus pada permodalan tetapi juga "pengembangan kewirausahaan yang ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)" serta mendorong "pertumbuhan industri kreatif" untuk "mendukung empat target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk sektor ekraf: kontribusi ke PDB, ekspor, investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas", sehingga melalui konsep "Bercahaya" yang mencerminkan transformasi UMKM menuju keunggulan dan daya saing, program ini menjadi manifestasi nyata sinergi pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing, dibutuhkan kontribusi nyata dari berbagai elemen, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki banyak potensi, baik dari sisi sumber daya manusia, prestasi individu maupun kelompok, serta karya inovatif yang mampu mengangkat nama daerah di berbagai bidang. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dan penghargaan yang memadai. Permasalahan yang muncul antara lain:

1. Minimnya Apresiasi Formal

Selama ini prestasi dan kontribusi aparat maupun masyarakat dalam mengharumkan nama daerah seringkali belum terakomodasi melalui sebuah

sistem penghargaan yang jelas dan terstruktur. Akibatnya, semangat berprestasi dan berinovasi belum tumbuh secara optimal.

2. Kurangnya Motivasi untuk Berinovasi

Aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat sering kali tidak memiliki motivasi yang cukup kuat untuk melahirkan ide, karya, maupun inovasi baru karena belum adanya bentuk penghargaan yang mampu meningkatkan kebanggaan dan pengakuan atas usaha mereka.

3. Belum Adanya Mekanisme Penghargaan yang Terinstitusionalisasi

Penghargaan terhadap prestasi individu maupun kelompok masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya konsistensi dalam mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan bagi kemajuan daerah.

4. Kurangnya Budaya Kompetitif dan Kolaboratif

Ketiadaan wadah penghargaan yang terstruktur menyebabkan budaya kompetitif yang sehat dan kolaboratif di antara aparatur serta masyarakat belum terbangun secara kuat. Padahal, budaya tersebut penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

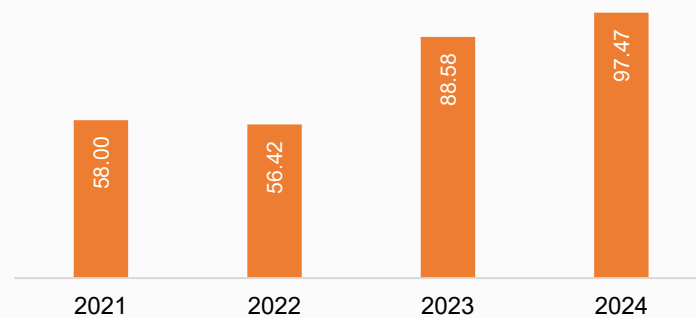
Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memandang penting untuk menghadirkan suatu program inovatif sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang telah berprestasi dan berkontribusi nyata dalam berbagai bidang yaitu program “*Tolopani Award*”. Kehadiran *Tolopani Award* diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi, kreativitas, serta inovasi yang berkelanjutan, sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap daerah hal tersebut sejalan dengan Program Nasional Reformasi Birokrasi 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima guna meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas dengan pendekatan *human-based* yang berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, bertujuan agar pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah serta memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis-jenis SPM yang harus disediakan pemerintah daerah meliputi beberapa sektor: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara patut diapresiasi atas lonjakan signifikan dalam pemenuhan SPM dari 56,42 persen (2022) menjadi 97,47 persen (2024). Pencapaian hampir sempurna di tahun 2024 ini mencerminkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan dasar untuk masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, Trantibumlinmas, dan sosial meski ruang fiskal semakin sempit. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi anggaran, sinergi antarsektor, serta inovasi program yang tepat sasaran, juga menunjukkan kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan sebelumnya, seperti pandemi dan keterbatasan sumber daya, dengan langkah strategis berbasis evaluasi data. Hasil ini tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang merata dan berkualitas.

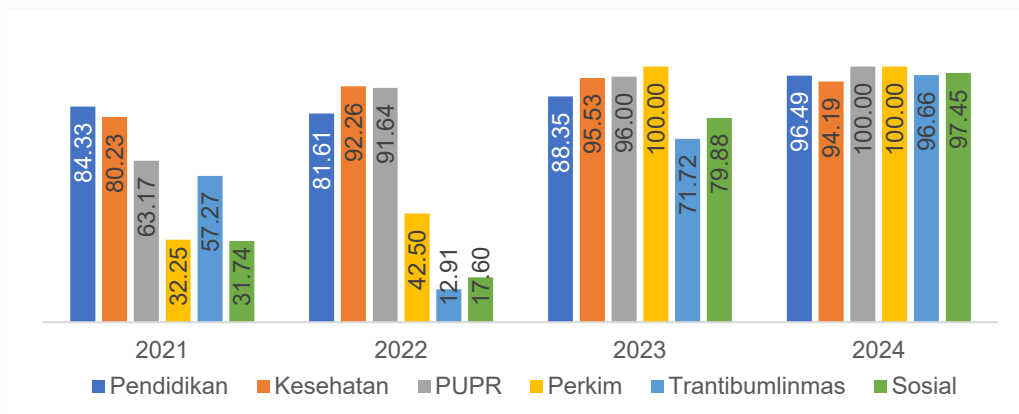
Grafik 2.81
Capaian SPM Gorontalo Utara



Sumber: Bina Bangsa Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>), 2025

Capaian SPM meningkat signifikan di hampir semua bidang dari 2021 hingga 2024. Bidang Pendidikan dan Kesehatan konsisten meningkat, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan dasar. Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman mencatat lonjakan sempurna, mencapai 100% pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan program infrastruktur dan penyediaan rumah layak huni. Sektor Trantibumlinmas serta Sosial mengalami fluktuasi, tetapi akhirnya naik mengindikasikan pemulihan dari tantangan sebelumnya melalui kebijakan responsif. Secara keseluruhan, capaian di atas 90 persen pada 2024 di mayoritas bidang menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

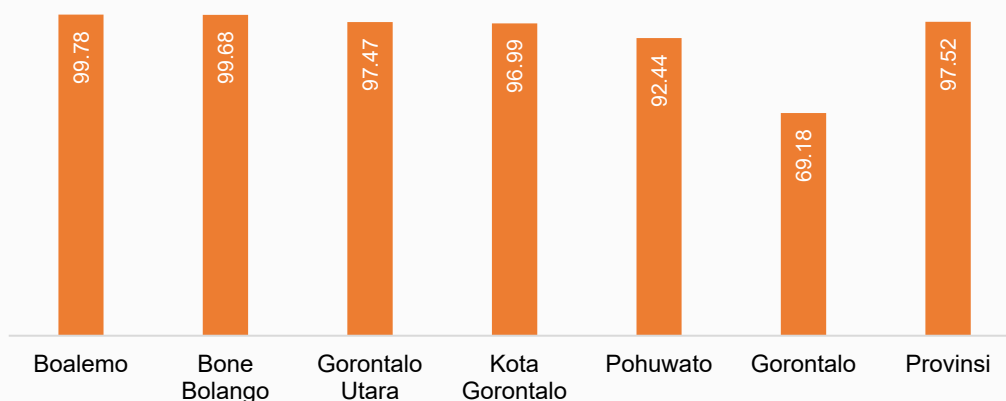
Grafik 2.82
Capaian SPM Per Bidang



Sumber: Bina Bangsa Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>), 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Gorontalo Utara berada di peringkat ketiga tertinggi setelah Boalemo dan Bone Bolango, dan sedikit di bawah rata-rata provinsi, namun tetap mencerminkan kinerja sangat baik dalam memenuhi standar pelayanan dasar. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta kolaborasi antarsektor. Meski demikian, masih ada celah untuk meningkatkan kualitas layanan agar setara dengan daerah lain. Secara umum, Gorontalo Utara telah membuktikan komitmennya sebagai daerah berkinerja tinggi, dengan potensi untuk menjadi contoh dalam penerapan kebijakan berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Grafik 2.83
Capaian SPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber: Bina Bangsa Kemendagri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>), 2025

Secara detail, kinerja penyelenggaraan SPM berdasarkan laporan dari masing-masing urusan pengampu SPM pada setiap bidang pelayanan dasar sebagaimana tabel-tabel berikut.

Tabel 2.216
SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Kinerja SPM Tahun-					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	-	91,97	94,98	98,73	95,67	Berdasarkan data olahan Dinas Pendidikan
2		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	0,00	29,35	30,81	38,36	47,71	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	Persen	89,01	84,41	84,69	92,9	92,97	Berdasarkan data olahan Dinas Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Kinerja SPM Tahun-					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
		dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
4		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	-	-	20,91	20,63	58,78	Data berdasarkan Rapor Pendidikan tidak ada untuk indikator kemampuan literasi dan numerasi jenjang pendidikan kesetaraan
5	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	99,36	99,54	99,59	99,93	100,00	Berdasarkan data olahan Dinas Pendidikan

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, diolah

Tabel 2.217
SPM Bidang Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Kinerja SPM Tahun-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	59,27	56,26	91,61	95,86	94,31
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	87,64	91,37	92,65	94,23	93,52
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	69,62	87,31	91,68	93,62	92,18
4	Pelayanan kesehatan Balita	%	43,25	72,60	83,71	87,17	94,66
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	0,00	63,74	100,00	93,18	90,67
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	65,57	75,98	81,15	89,45	98,79
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	%	39,34	61,45	69,48	89,15	95,34
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	38,02	94,60	92,96	100,00	97,32
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>Diabetes Melitus</i>	%	55,08	96,81	96,10	100,00	100,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	103,51	100,00	100,00	99,96	100,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	115,98	79,62	98,42	97,11	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, diolah

Tabel 2.218
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator	Satuan	Kinerja SPM Tahun-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	30,70	64,47	95,00	100,00	100,00
2	Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	14,74	85,35	88,29	96,00	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, diolah

Tabel 2.219
SPM Bidang Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kinerja SPM Tahun-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Relokasi terhadap korban bencana	Unit	0	0	3	2	3
2	Relokasi terdampak program kegiatan	Unit	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, diolah

Tabel 2.220
SPM Bidang Trantibumlinmas

No.	Indikator	Satuan	Kinerja SPM Tahun-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
2	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00
3	Persentase korban yang ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	96,66
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	%	-	-	-	-	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, diolah

Tabel 2.221
SPM Bidang Sosial

No.	Indikator	Satuan	Kinerja SPM Tahun-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	-	-	62,71	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	-	-	83,33	97,54
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	-	-	69,03	98,46
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	-	-	88,33	91,25
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	-	-	-	96,00	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, diolah

2.4 KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Gorontalo Utara dalam beberapa tahun terakhir, melaksanakan kerjasama pembangunan daerah dengan beberapa entitas instansi yang secara umum mengacu pada prinsip otonomi daerah dan kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah dengan tujuan dan prospek pengembangan pada:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dilaksanakan sebagai sinergi antar daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik di Gorontalo Utara.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi antar daerah, baik intra atau antar provinsi, Gorontalo Utara dapat mengembangkan kawasan industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi perbatasan.

3. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah. Mendorong pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi lintas wilayah.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terpadu. Mengelola bersama wilayah pesisir, hutan lindung, daerah aliran sungai, dan kawasan perbatasan agar lebih berkelanjutan.
5. Penguatan ketahanan pangan dan energi. Mendukung distribusi hasil pertanian dan pangan serta pengembangan energi terbarukan.
6. Menumbuhkan jejaring sosial dan budaya antar daerah. Meningkatkan solidaritas dan kerukunan masyarakat melalui kerja sama dalam *event* budaya, pendidikan, dan pemuda.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemerintahan daerah. Tukar menukar informasi, pelatihan, inovasi, dan sistem pemerintahan digital.
8. Penanganan masalah bersama secara terintegrasi. Misalnya dalam pengendalian bencana, kebakaran hutan, penyakit menular, inflasi pangan, dan lainnya.

Dengan berbagai tujuan dan prospek strategis pengembangan di masa mendatang, berbagai kerjasama yang relevan di Gorontalo Utara diantaranya kerjasama kawasan pesisir dan perbatasan dengan daerah sekitar, pengembangan pariwisata pesisir dan ekonomi biru, serta pengelolaan kawasan transmigrasi dan ketahanan pangan.

Entitas yang telah dan sedang melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara selang tahun 2023 s.d. Juli 2025 dijabarkan pada Tabel 2.210 berikut.

Tabel 2.222
Kerjasama Daerah *On-going* dan Baru

No.	Tahun	Mitra Kerjasama	Judul Kerjasama	Urusan Pemerintahan	Jangka Waktu	Manfaat
1	2023	Universitas Aisyiyah Yogyakarta	Dukungan pendirian fakultas kedokteran untuk peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah	Pendidikan	5 tahun	Penyediaan tenaga dokter tenaga dokter
2			Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi dosen dan mahasiswa Universitas Aisyiyah	Pendidikan	5 tahun	Merumuskan dan mengimplementasikan capaian pembelajaran serta kurikulum MBKM
3		PT PLN Unit Induk Distribusi SULUTTENGGO	Optimalisasi pemungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik di wilayah	Pembiayaan	5 tahun	Pemungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik

No.	Tahun	Mitra Kerjasama	Judul Kerjasama	Urusan Pemerintahan	Jangka Waktu	Manfaat
4		UP3 Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara Sharing pembiayaan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) pemerintah daerah Program Jaminan Kesehatan Daerah Integritas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2023-2024	Pembiayaan	1 tahun	Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) pemerintah daerah
5		Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Utara	Bantuan studi mahasiswa Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023	Pendidikan	1 kali	Meningkatkan kualitas pendidikan pelajar dan mahasiswa Gorontalo Utara
6		Bank Sulutgo Cabang Kwandang	Penyelesaian hutang piutang bagi pegawai yang akan mutasi keluar dari Kabupaten Gorontalo Utara	Pembiayaan	5 tahun	ASN yang belum melunasi pinjaman Bank SULUTGO, tidak disetujui permohonan pindah tanpa ada data tertulis dari pihak Bank
7	2024	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Percepatan penurunan masalah gizi bagi ibu hamil dan Balita	Kesehatan		
8		PT Gorontalo Listrik Persada	Pengelolaan air limbah domestik	Pekerjaan Umum	5 tahun	Gorontalo Utara mendapatkan PAD dari retribusi pengolahan limbah
9		PT PLN Unit Induk Distribusi SULUTTENGGO UP3 Gorontalo	Pemungutan dan penyeteroran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik serta pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	Pembiayaan	5 tahun	
10		Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital di Provinsi Gorontalo	Pariwisata	5 tahun	
11		Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah	Pengendalian inflasi daerah	Pertanian	5 tahun	Kerjasama penanganan inflasi melalui distribusi komoditas hortikultura
12		Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik	Pertanian	5 tahun	
13		Pemerintah Provinsi Gorontalo	Optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen	Keuangan		Gorontalo Utara mendapatkan bagian opsen pajak dalam APBD
14		Pemerintah Provinsi Gorontalo	Sharing pembiayaan JKN PBPU dan BP	Kesehatan		
15		PT Gema Nusantara Jaya	Pengelolaan air limbah domestik, limbah produksi, dan limbah tinja	Pekerjaan Umum	5 tahun	Gorontalo Utara mendapatkan PAD dari retribusi pengolahan limbah
16		PT Gorontalo Citra Lestari	Pengelolaan air limbah domestik, limbah produksi, dan limbah tinja	Pekerjaan Umum	5 tahun	Gorontalo Utara mendapatkan PAD dari retribusi pengolahan limbah
17		Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia	Tenaga Kerja	5 tahun	Gorontalo Utara mendapatkan alokasi penempatan sekaligus perlindungan dalam hal tenaga kerja di luar negeri

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, diolah

2.5 BADAN USAHA MILIK DAERAH

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Perumda Tirta Gerbang Emas yang merupakan BUMD strategis di bidang layanan penyediaan air bersih. Tujuan utama didirikan BUMD itu sendiri diharapkan menjadi penopang perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,

menyediakan layanan publik yang belum dijangkau swasta, menciptakan lapangan kerja lokal, serta mengelola potensi daerah secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong optimasi layanan penyediaan air bersih, tantangan teknis strategis dan tata kelola yang dihadapi saat ini yaitu:

1. Kebocoran air tinggi – NRW (*Non-Revenue Water*) menyentuh 56 persen pada 2021, meningkat hingga 67,91 persen pada 2022, meski berhasil diperbaiki menjadi 48,97 dan 38,45 persen masing-masing pada tahun 2023 dan 2024;
2. Kondisi pipa di bantaran sungai rawan kerusakan, diperlukan peremajaan jaringan;
3. Sumber air baku berkurang kuantitas dan kualitasnya;
4. Efektivitas penagihan baru mencapai sekitar 75 persen;
5. Cakupan layanan teknis pelanggan rendah: baru sekitar 33 persen penduduk yang terlayani.

Meskipun kinerja Perumda Tirta Gerbang Emas masih dalam kondisi “Kurang Sehat”, terdapat kemajuan signifikan:

1. Pengakuan nasional melalui Top BUMD Awards 3 tahun berturut-turut (2022, 2023, 2024). Meraih tiga penghargaan sekaligus: Top BUMD Terbaik Bintang 3, Top CEO BUMD, dan Top Pembina BUMD (atas nama Bupati Indra Yasin dan Thariq Modanggu);
2. Inisiatif struktural untuk menurunkan *Non-Revenue Water* (NRW) dan memperpanjang jam operasional hingga 16 jam;
3. Efektifitas penagihan naik: 59 persen → 77 persen, dengan strategi *reward–punishment* dan call center pengaduan cepat;
4. Digitalisasi layanan: pembayaran *online* (Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, *mobile*), pemasangan sambungan dan pengaduan via aplikasi *WhatsApp* dan *call center*;
5. Transformasi tata kelola SDM berbasis kinerja, peningkatan kompetensi SDM (rasio pelatihan naik menjadi 94,55 persen di 2024 dari 11,5 persen di 2021);
6. Rencana tarif baru sebagai penyeimbang inflasi dan upaya meningkatkan layanan.

Ke depan berbagai upaya perbaikan perlu dioptimalkan oleh manajemen Perumda Tirta Gerbang Emas, diantaranya percepatan renovasi jaringan pipa, optimalisasi 100 persen cakupan teknis dan administratif (seperti ekspansi ke PLTU, pelabuhan laut, dan korporasi lainnya), targetkan tercapainya kategori “sehat” pada 2029, dan pengembangan layanan niaga sebagai penopang keuangan mandiri.

Selain BUMD dalam layanan penyediaan air bersih, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di masa depan dapat mendorong pengembangan BUMD baru di sektor strategis lainnya berangkat dari potensi daerah yang dimiliki, misalnya pada sektor:

- BUMD bidang energi dan pertambangan (PLTMH atau energi terbarukan);
- BUMD bidang pangan dan perdagangan (logistik, distribusi bahan pokok, dan hasil pertanian);
- BUMD Pariwisata atau Jasa (mendukung pengembangan destinasi pesisir atau agrowisata).

2.6 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN

Pengembangan kawasan merupakan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ditetapkan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Gorontalo Utara sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

A. Kawasan Strategis Nasional

1. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: Kawasan Strategis Gorontalo – Paguyaman – Kwandang;
2. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup: KSN Terintegrasi Ekoregion Laut Sulu – Sulawesi;
3. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan: KSN Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo,

Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

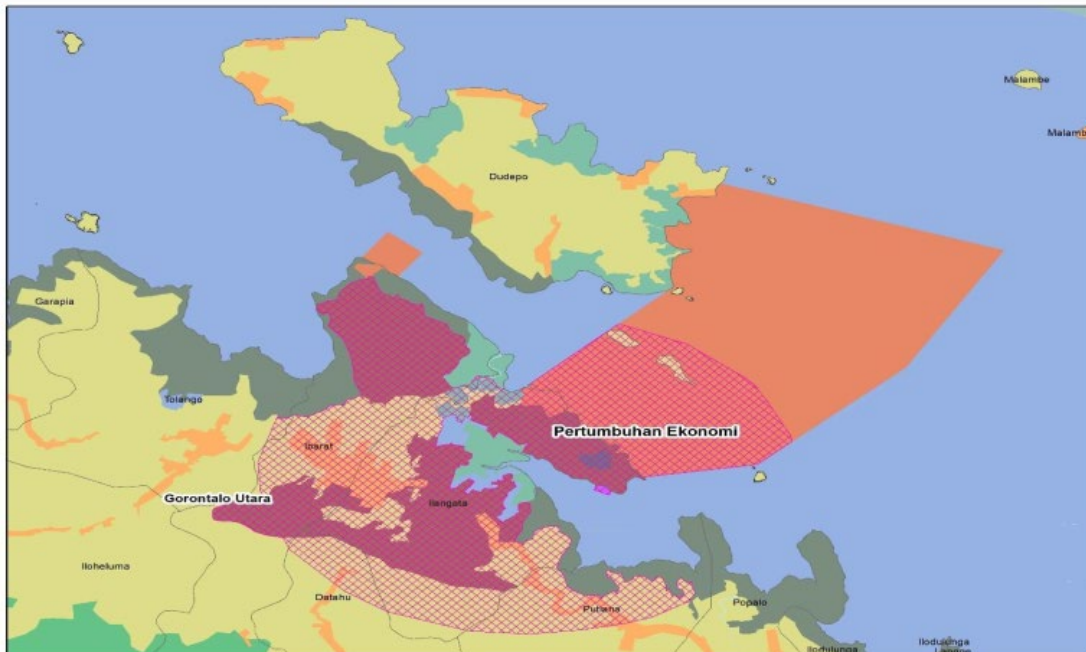
B. Kawasan Strategis Provinsi

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: KSP Pariwisata Minanga;
2. KSP Terintegrasi ekonomi Pelabuhan Anggrek;

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Terintegrasi Anggrek menjadi sangat strategis sebagai pendorong utama percepatan pembangunan Gorontalo. KSP Provinsi berada di kawasan Pelabuhan Anggrek sebagai jalur transportasi laut, dengan akses mudah ke jalur perdagangan internasional utama, yang ditunjang dengan potensi agribisnis yang kuat dengan produk unggulan pertaniannya, yang pengembangannya diupayakan melalui:

- Peningkatan sarana dan prasarana melalui skema pendanaan alternatif (KPBU);
- Pengembangan kawasan pergudangan dan industri skala kecil yang akan menunjang proses pengolahan dan distribusi dari sentra produksi, baik dari Kawasan Strategis Marisa-Randangan, Kawasan Strategis Paguyaman-Wonosari, maupun dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Gorontalo;
- Penguatan peran dan kontribusi investasi swasta dalam pengelolaan dan pengembangan KSP Terintegrasi Anggrek;
- Penyiapan langkah alternatif pengelolaan limbah industri dan pergudangan sebagai bagian dari dampak pengolahan bahan produksi mentah untuk menambah nilai;
- Pemetaan pengembangan KSP Terintegrasi Anggrek sebagai salah satu pintu masuk pelabuhan skala nasional dan internasional berdasarkan letak strategis berhadapan dengan Laut Sulawesi.

Gambar 2.30
KSP Terintegrasi Anggrek

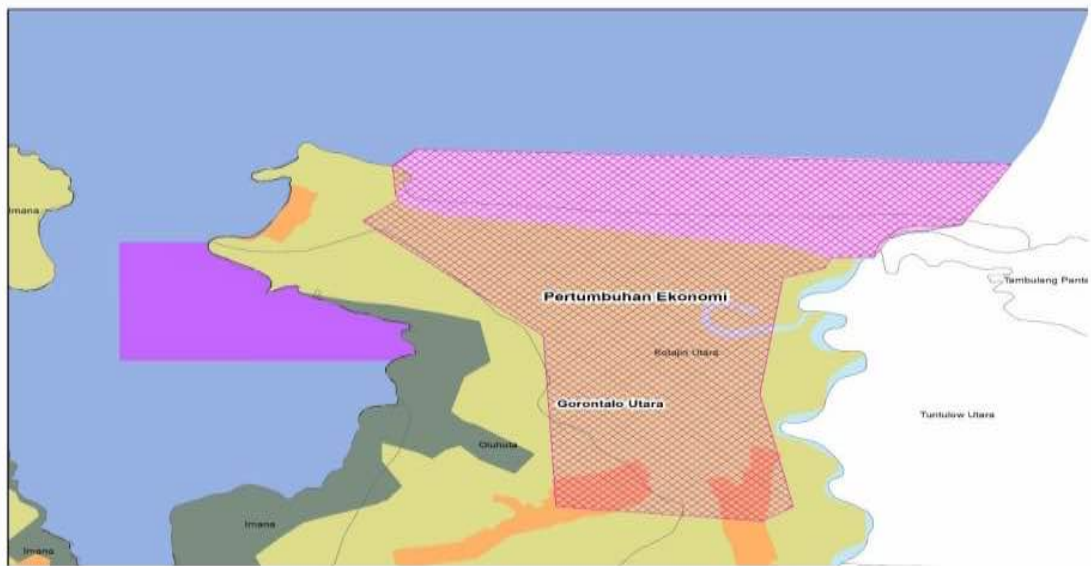


Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2044

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Minanga memiliki kawasan yang sangat potensial karena memiliki garis pantai yang cukup panjang, serta berada di jalur Trans Sulawesi. Pengembangan KSP Minanga diupayakan melalui:

- Membangun dan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang memperhatikan aspek keberlanjutan;
- Mendorong peningkatan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi);
- Mendorong sarana prasarana infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan wisata seperti jalan, drainase dan sebagainya;
- Mendorong investasi sektor pariwisata dalam penyediaan sarana pokok, penunjang dan pelengkap pariwisata (*tourism superstructures*);
- Mendorong peningkatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menunjang pariwisata.

Gambar 2.31
KSP Pariwisata Minanga



Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2044

Untuk mendukung KSP Minanga lebih memiliki nilai tambah di masa depan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengupayakan:

- Penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas. Yaitu pembangunan jalan akses utama dan sekunder menuju kawasan Pantai Minanga, penyediaan jaringan listrik dan air bersih untuk mendukung aktivitas wisata dan UMKM, penyediaan transportasi umum dan parkir terintegrasi (*area drop-off, shuttle* lokal), peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan internet untuk menunjang promosi digital dan kenyamanan pengunjung, dan lain sebagainya.
- Penyusunan Rencana Induk Kawasan (*masterplan*). Diantaranya melalui penetapan *zoning* kawasan: zona konservasi, zona wisata pantai, zona UMKM, dan zona hunian pendukung, penetapan tata ruang dan tata bangunan ramah lingkungan (*eco-design, green space*, dan drainase alami), dan integrasi Pantai Minanga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Pengembangan konsep ekowisata dan wisata edukasi. Diantaranya melalui penanaman, rehabilitasi, dan konservasi mangrove untuk edukasi ekologi dan destinasi wisata, kemudian setelah pohon mangrove tumbuh dapat dikembangkan pembuatan jalur *tracking* dan edukasi konservasi (*mangrove walk, bird watching*, konservasi penyu), serta pembangunan pusat informasi wisata berkelanjutan, museum kecil tentang budaya pesisir atau nelayan lokal.

- Pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM. Misalnya berupa fasilitasi dan pelatihan untuk Pokdarwis dan BUMDes sebagai pengelola, inkubasi UMKM lokal: pelatihan kuliner khas, kerajinan tangan, jasa *homestay*, dan pemandu wisata, serta kemitraan dengan perguruan tinggi, koperasi, dan swasta dalam peningkatan kapasitas dan pembiayaan.
- Promosi digital dan *branding* wisata. Misalnya berupa pembuatan *branding* destinasi: logo, *tagline*, dan narasi khas Pantai Minanga (misalnya “Minanga Surga Pesisir”), penguatan promosi digital: media sosial, peta interaktif, website destinasi, dan *platform booking online*, atau berupa kemitraan dengan *influencer* wisata, *travel blogger*, dan media lokal.
- Kemitraan strategis dan investasi. Intervensi dapat berupa membangun kerjasama dengan Bank Indonesia, BUMN, atau investor swasta, skema pembiayaan *Public-Private Partnership* (PPP) dalam pembangunan fasilitas *resort*, kafe, dan taman hiburan, atau dapat pula berupa penyusunan kajian kelayakan investasi (*feasibility study*) dan proposal proyek strategis daerah.
- Penguatan tata kelola dan kelembagaan. Upayanya tidak terbatas pada pembentukan Badan Pengelola Kawasan Strategis Pantai Minanga, penerbitan Perda atau Perbup tentang pengelolaan kawasan strategis dan pemanfaatannya, atau berupa sertifikasi dan standar pelayanan destinasi (CHSE, ekowisata, SDM berkompeten).
- Penguatan sosial dan budaya. Yang termasuk pada upaya ini seperti pelibatan masyarakat adat atau tokoh lokal dalam pengelolaan budaya dan konservasi, festival budaya pesisir, lomba perahu hias, musik tradisional, dan kuliner khas nelayan, atau misalnya melaksanakan edukasi berkelanjutan kepada warga terkait kebersihan, tanggap bencana, dan wisata ramah lingkungan.
- Monitoring dan evaluasi berkala. Berupa menyusun *dashboard* indikator kinerja kawasan: jumlah kunjungan, omzet UMKM, indeks kepuasan pengunjung, dan daya dukung lingkungan, atau berupa pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis lintas OPD dan stakeholder.

Dalam RPJMN 2025-2029, secara tersurat disebutkan bahwa Pemerintah Pusat mendukung pengembangan wilayah di Gorontalo Utara yang diarahkan pada:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Gorontalo di Gorontalo Utara;
- Pengembangan kawasan perkebunan dan hilirisasi kelapa;
- Pembangunan kawasan/kecamatan perbatasan; dan
- Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Sumalata.

Dengan berbagai potensi yang dikolaborasikan dengan isu-isu keruangan dan sosial ekonomi untuk mendukung peran dan fungsi Kabupaten Gorontalo Utara sebagai sentra pertanian, perikanan, pariwisata dan perdagangan internasional dalam mendorong ekonomi maritim, indikasi intervensi pembangunan selama 2025-2029 baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi Gorontalo, maupun Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.223
Indikasi Intervensi Pembangunan dan Sumber Pendanaan

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Pengembangan KSP Pariwisata Minanga, KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
2	Fasilitasi pengembangan PKSN Kwandang dan Anggrek, PKW Kwandang, PKL Atinggola, dan Tolinggula	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
3	Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi, seperti Labanu-Tolongio dan Tolinggula Ulu-Cempaka Putih	APBN/ APBD Provinsi
4	Pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengumpan, pelabuhan terminal khusus, pelabuhan perikanan	APBN dan swasta
5	Fasilitasi pengembangan jaringan tol, jalur kereta api dan stasiun kereta api	APBN
6	Fasilitasi pengembangan sistem jaringan energi sumber energi baru terbarukan	APBN/APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan swasta
7	Fasilitasi dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air seperti Daerah Irigasi Tolinggula serta daerah potensi irigasi lainnya	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
8	Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan persampahan dan limbah B3	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
9	Fasilitasi penyediaan air baku	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
10	Fasilitasi perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
11	Pengembangan kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
12	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan termasuk penuntasan stunting	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
13	Penguatan perlindungan sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
14	Optimalisasi pengelolaan persampahan dan sanitasi	APBN/APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan swasta
15	Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi/digital dalam penyelenggaraan pemerintahan	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
16	Program pertanian dan perkebunan yang menysasar kepada masyarakat rentan sektor pertanian	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
17	Identifikasi dan pengelolaan potensi pertambangan serta hilirisasi	APBN/APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan swasta
18	Pengembangan destinasi wisata dan jejaring kerjasama pemasaran destinasi lintas wilayah	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
19	Program peternakan dan pemanfaatan produk untuk menunjang peternakan	APBN/APBD Provinsi, dan

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
		APBD Kabupaten
20	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
21	Program pengembangan dan kajian peningkatan kapasitas dan status kewenangan ruas jalan	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
22	Program penanganan sarana dan prasarana tapal batas wilayah provinsi	APBN dan APBD Provinsi
23	Penanganan lanjutan dan arahan optimal terhadap kawasan transmigrasi	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
24	Intervensi dan penanganan potensi strategis sektor perikanan dan kelautan	APBN/APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan swasta
25	Rehabilitas dan penanganan Pasar Pontolo Kwandang	APBN/APBD Kabupaten
26	Pembangunan <i>ranch</i> ternak setiap kecamatan guna mendukung G2-10	APBD Kabupaten/Dana Desa, dan swasta
26	Peningkatan kualitas jalan kabupaten (seperti <i>bypass</i> , Biau-Potanga, Tolinggula-Polahua (Paleleh), dan lain sebagainya) melalui program Inpres Jalan Daerah	APBN
27	Revitalisasi Kawasan Pontolo	APBN/APBD Kabupaten, dan swasta
28	Peningkatan cakupan fasilitas layanan Rumah Sakit ZUS dan Tolinggula Melayani	APBN/APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan swasta
29	Revitalisasi cakupan layanan air bersih melalui perpipaan (Kwandang, Hiyalooyile, Sumalata, dan sebagainya) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Posso	APBN/APBD Kabupaten, dan swasta
30	Pembangunan <i>rest area</i> di Kwandang	APBN/APBD Kabupaten
31	Pembangunan masjid blok plan lanjutan	APBN/APBD Kabupaten
32	Penataan blok plan	APBN/APBD Kabupaten
33	Revitalisasi gedung DPRD	APBD Kabupaten
34	Penataan taman blok plan lanjutan	APBD Kabupaten
35	Pembangunan jamban komunal	APBN/APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten
36	Pembangunan <i>sports center</i>	APBN/APBD Kabupaten
37	Peningkatan kualitas kawasan kumuh	APBN/APBD Provinsi

2.7 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam penyusunan RPJMD Gorontalo Utara Tahun 2025-2029. Tidak hanya terfokus pada sisi efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas terhadap kebutuhan pembangunan, juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal yang berkelanjutan. Kondisi fiskal merujuk pada keadaan penerimaan, pengeluaran, serta struktur utang dan aset daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan Gorontalo Utara, fiskal yang sehat menjadi landasan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun 2025 hingga 2030.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, prinsip pengelolaan keuangan daerah Gorontalo Utara harus mengedepankan keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mengelola hutang dengan bijaksana demi memastikan kelangsungan keuangan daerah dalam jangka panjang.

Analisis fiskal Kabupaten Gorontalo Utara akan mencakup evaluasi terhadap kinerja keuangan di masa lalu, termasuk di dalamnya kinerja penerimaan, pengeluaran, dan struktur pembiayaan dan hutang. Kinerja tersebut menjadi dasar untuk merencanakan penyesuaian strategis dalam pengelolaan keuangan tahun 2025 hingga 2030. Dengan pengelolaan yang baik, Kabupaten Gorontalo Utara akan mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai visi misi pembangunan daerah.

Penyajian data pada sub bab ini merupakan evaluasi atas kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020-2024, yang menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai target indikator kinerja utama. Pengelolaan keuangan daerah selama periode ini menggunakan pendekatan berbasis kinerja, dengan fokus pada belanja yang terukur. Analisis kinerja ini mencakup evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan daerah, memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.7.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

2.7.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi kinerja keuangan masa lalu dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan APBD dan kondisi neraca untuk memahami perkembangan fiskal. Ke depan, perencanaan akan mengoptimasi pendapatan melalui pendapatan pajak dan retribusi, perluasan sektor ekonomi, serta pengelolaan pengeluaran belanja pembangunan yang tepat sasaran. Manajemen hutang yang bijaksana serta transparansi dan akuntabilitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan akan diperkuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan masyarakat dapat memantau penggunaan

anggaran secara efektif. Kebijakan fiskal yang responsif juga akan diterapkan untuk menyesuaikan dinamika ekonomi di level nasional.

Secara umum komponen APBD Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer; serta (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Secara umum, kinerja APBD sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan realisasi pendapatan yang fluktuatif. Realisasi pendapatan selama tahun evaluasi selalu melebihi 95 persen. Sedangkan realisasi komponen belanja daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak mencapai target tahunannya namun dengan penyerapan konsisten di atas 90 persen. Pada tahun 2022, capaian belanja tidak mencapai 90 persen karena beberapa pekerjaan yang bersumber dari dana PEN tidak terealisasi atau bahkan bergulir ke tahun berikutnya. Untuk realisasi komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, semenjak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu terpenuhi. Lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 2.224 berikut.

Tabel 2.224
Realisasi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah			
2020	802.090.294.443	769.822.455.627	95,98
2021	735.251.238.494	719.775.686.544	97,90
2022	759.609.559.155	733.506.914.980	96,26
2023	732.622.909.098	712.909.395.687	97,31
2024	770.764.052.539	741.401.440.107	96,19
Belanja Daerah			
2020	833.929.446.671	767.061.972.826	91,98
2021	775.369.731.236	731.224.884.500	94,31
2022	976.341.688.422	817.221.526.191	83,70
2023	789.700.652.258	753.149.149.006	95,37
2024	769.429.625.970	731.176.523.842	95,03
Penerimaan Pembiayaan Daerah			
2020	32.339.152.228	32.339.152.228	100,00
2021	42.918.492.742	42.918.492.741	100,00
2022	229.370.170.354	161.522.112.534	70,41
2023	75.407.743.160	75.358.326.431	99,93

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2024	18.521.773.431	18.521.499.980	100,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
2020	500.000.000	500.000.000	100,00
2021	2.800.000.000	2.776.374.949	99,16
2022	12.638.041.087	2.399.758.163	18,98
2023	18.330.000.000	16.596.799.680	90,54
2024	19.856.200.000	18.856.159.616	94,96

Sumber: Badan Keuangan, 2025

2.7.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Daerah;
2. Pendapatan Retribusi Daerah;
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun pendapatan dari Pendapatan Transfer, terdiri dari:

1. Dana Perimbangan;
2. Dana Insentif Fiskal (DIF);
3. Dana Desa.

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

1. Pendapatan Hibah;
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis pendapatan daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah di masa yang akan datang. Realisasi pendapatan daerah selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 2.225 berikut.

Tabel 2.225
Ringkasan Realisasi APBD Pendapatan Daerah

No. Rek.	Jenis Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	769.822.455.627	719.775.686.544	733.506.914.980	712.909.395.687	741.401.440.107
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29.100.890.651	27.520.085.411	21.389.928.083	32.162.553.595	35.914.760.476
4.1.1	Pajak Daerah	5.944.751.338	6.607.518.272	7.258.683.054	7.879.902.957	9.029.451.630
4.1.2	Retribusi Daerah	8.172.724.181	7.750.661.668	6.739.532.061	12.639.846.943	1.631.237.254
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.408.464.800	2.772.789.266	2.576.643.398	3.997.618.290	3.610.543.002
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	12.574.950.332	10.389.116.205	4.815.069.570	7.645.185.404	21.643.528.590
4.2	Pendapatan Transfer	717.434.637.816	679.471.841.133	706.036.156.478	672.306.822.447	695.764.734.685
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	698.793.377.972	654.040.954.684	684.499.206.467	650.218.503.537	673.582.691.905
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.641.259.844	25.430.886.449	21.536.950.011	22.088.318.910	22.182.042.780
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.366.086.000	12.783.760.000	6.080.830.419	8.440.019.645	9.721.944.946
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	583.500	227.164.983
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	33.366.086.000	12.783.760.000	6.080.830.419	8.439.436.145	9.494.779.963

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusi realisasinya selama periode tahun 2020-2024 berasal dari pendapatan transfer yang berasal dari pusat, dengan proporsi setiap tahun di atas 90 persen. Rincian komposisi Pendapatan Daerah ditampilkan pada Tabel 2.214 berikut.

Tabel 2.226
Persentase Sumber Pendapatan Daerah

No. Rek.	Jenis Pendapatan	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,78	3,82	2,91	4,51	4,84
4.1.1	Pajak Daerah	0,77	0,92	0,99	1,11	1,22
4.1.2	Retribusi Daerah	1,06	1,08	0,92	1,77	0,22
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,31	0,39	0,35	0,56	0,49
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1,63	1,44	0,66	1,07	2,92
4.2	Pendapatan Transfer	93,19	94,40	96,25	94,30	93,84
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	90,77	90,87	93,32	91,21	90,85
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2,42	3,53	2,94	3,10	2,99
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,33	1,78	0,83	1,18	1,31
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	4,33	1,78	0,83	1,18	1,28

undangan

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD terhadap total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan. Rasio PAD terhadap total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren yang fluktuatif, namun masih berada di kisaran 4 persen. Perolehan Pendapatan Asli Daerah yang rendah masih menjadi tantangan yang berat bagi Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Upaya transformatif dan melibatkan *game changer* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menggerakkan mesin penyumbang PAD agar kemandirian fiskal daerah meningkat. Jika ditelaah lebih dalam, rendahnya rasio tersebut disebabkan beberapa faktor umum yang menjadi tantangan, antara lain:

- Basis pajak yang terbatas. Gorontalo Utara dengan konteks daerah yang baru berkembang, memiliki potensi pendapatan basis industri dan jasa yang terbatas, sehingga pendapatan dari pajak dan retribusi juga terbatas;
- Tingkat kepatuhan yang perlu ditingkatkan. Masyarakat dan pelaku usaha perlu ditingkatkan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam membangun daerah berupa membayar pajak dan retribusi;

- Sistem administrasi yang belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan dan pemungutan pajak yang belum dikelola secara modern dalam upaya optimalisasi dan efisiensi;
- Inovasi dalam identifikasi sumber-sumber pendapatan baru masih terbatas. Gorontalo Utara masih relatif terlalu menggantungkan PAD dari sumber-sumber konvensional dan belum menggali sumber-sumber kreatif lainnya.

2.7.1.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing rincian dari komponen Belanja Daerah tersebut yaitu:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya;
3. Belanja Tak Terduga; dan
4. Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tertentu, digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 2.227 berikut.

Tabel 2.227
Ringkasan Realisasi APBD Belanja Daerah

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	767.061.972.826	731.224.884.500	817.221.526.191	753.149.149.006	731.176.523.842
5.1	BELANJA OPERASI	473.332.771.102	449.090.367.513	475.250.483.541	439.008.964.728	494.846.651.742
5.1.1	Belanja Pegawai	231.158.922.773	253.675.274.007	260.985.102.834	273.545.576.736	316.861.901.156

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229.882.664.829	184.988.849.281	198.862.343.433	146.126.077.685	146.894.164.207
5.1.3	Belanja Bunga	-	357.050.000	7.464.030.099	4.556.645.332	6.801.021.354
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	8.984.400.000	7.374.994.225	6.292.407.175	14.022.664.975	24.289.565.025
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.306.783.500	2.694.200.000	1.646.600.000	758.000.000	-
5.2	BELANJA MODAL	145.060.195.347	130.890.071.662	207.609.020.890	180.512.226.433	95.491.565.498
5.2.1	Belanja Modal Tanah	9.735.939.200	389.570.300	2.197.256.439	1.631.235.268	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.177.489.704	21.503.031.621	46.857.099.703	22.336.695.753	26.410.327.871
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.816.474.074	51.255.363.823	66.811.381.644	32.204.059.562	19.900.137.355
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.388.944.969	56.995.284.468	90.461.186.187	121.654.054.095	46.409.322.042
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	941.347.400	746.821.450	1.282.096.917	2.630.681.755	2.533.916.100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	343.649.360	1.649.045.545	106.927.750	133.595.000	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	343.649.360	1.649.045.545	106.927.750	133.595.000	-
5.4	BELANJA TRANSFER	148.325.357.017	149.595.399.780	134.255.094.010	133.494.362.845	140.838.306.602
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	693.571.518	572.581.616	598.478.460	329.170.660	786.555.055
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	147.631.785.499	149.022.818.164	133.656.615.550	133.165.192.185	140.051.751.547

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Sumber belanja daerah yang paling dominan realisasinya selama periode lima tahun terakhir berasal dari Belanja Operasi, dengan rata-rata proporsi setiap tahunnya di atas 60 persen. Namun pada tahun 2022 sebagian proporsinya masuk Belanja Modal karena tingginya belanja infrastruktur berasal dari pinjaman daerah PEN. Pada tahun 2024, Belanja Hibah meningkat karena keperluan pengalokasian anggaran untuk Pilkada dan Pileg serentak. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa Belanja Pegawai terus naik, sesuai Pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30 persen. Rincian komposisi belanja daerah ditampilkan pada Tabel 2.228 berikut.

Tabel 2.228
Komposisi Realisasi Alokasi Belanja Daerah

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	61,71	61,42	58,15	58,29	67,68
5.1.1	Belanja Pegawai	30,14	34,69	31,94	36,32	43,34
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,97	25,30	24,33	19,40	20,09
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,05	0,91	0,61	0,93
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	1,17	1,01	0,77	1,86	3,32
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,43	0,37	0,20	0,10	0,00
5.2	BELANJA MODAL	18,91	17,90	25,40	23,97	13,06
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1,27	0,05	0,27	0,22	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,98	2,94	5,73	2,97	3,61
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,84	7,01	8,18	4,28	2,72

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6,70	7,7	11,07	16,15	6,35
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,12	0,10	0,16	0,35	0,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,04	0,23	0,01	0,02	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,04	0,23	0,01	0,02	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	19,34	20,46	16,43	17,72	19,26
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,09	0,08	0,07	0,04	0,11
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	19,25	20,38	16,36	17,68	19,15

Sumber: Badan Keuangan, 2025

2.7.1.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, maka Pembiayaan Daerah harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Sebaliknya, jika Pendapatan Daerah lebih kecil daripada Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah.

Struktur pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
 - Penerimaan Pinjaman Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Penerimaan Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran hutang. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan

untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, wajib mempedomani penetapan batas maksimal akumulasi potongan DAU per tahun tidak bisa melebihi 10 persen porsi Dana Transfer (DAU+DBH) sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai gambaran Pembiayaan Daerah, Tabel 2.229 di bawah menampilkan realisasi pembiayaan daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.229
Realisasi Pembiayaan Daerah

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	SURPLUS/DEFISIT	11.079.340.513	-11.449.197.955	-83.714.611.210	-40.239.753.319	-334.659.635
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.339.152.228	42.918.492.741	161.522.112.534	75.358.326.431	18.521.499.980
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.339.152.228	42.918.492.741	33.028.974.701	75.358.326.431	18.521.499.980
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	128.493.137.833	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000	2.776.374.949	2.399.758.163	16.596.799.680	18.856.159.616
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.300.000.000	500.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	-	776.374.949	899.758.163	15.296.799.680	18.356.159.616
	PEMBIAYAAN NETTO	31.839.152.228	40.142.117.792	159.122.354.371	58.761.526.751	-334.659.635
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	42.918.492.741	28.692.919.836	75.407.743.160	18.521.773.431	9.890.256.629

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara fluktuatif, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, terlihat adanya pembayaran pokok hutang pinjaman daerah PEN yang akan berakhir pada tahun 2030. Pengeluaran Pembiayaan Daerah disebabkan oleh Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan

daerah (BUMD) dan Bank Sulutgo dan pembayaran hutang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

2.7.1.1.4 Neraca Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen Laporan Keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus Laporan Neraca Daerah, akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Gorontalo Utara yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah maupun masyarakat di masa depan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar; (2) investasi jangka panjang; (3) aset tetap; (4) dana cadangan; dan (5) aset lainnya.

Adapun neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada akhir periode tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.230 berikut.

Tabel 2.230
Neraca Keuangan Tahun 2020-2024

Ref.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
D.1	ASET	1.115.989.091.337,04	1.115.255.760.276,08	1.278.316.788.536,17	1.285.024.810.384,69	1.239.339.521.557,87
D.1.1	Aset Lancar	69.644.295.430,01	42.466.810.064,48	93.324.888.996,99	32.479.689.719,35	27.676.185.001,53
D.1.1.1	Kas di Kas Daerah	8.984.070.788,51	25.643.700.704,66	74.983.212.632,04	15.624.953.223,55	3.618.794.557,34
D.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.105.000,00	148.655.000,00	4.267.100,00	596.999.559,00	899.190,00
D.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	24.216.090,00	1.070.400,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.4	Setara Kas	28.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	877.250.029,00	277.247.855,00	135.868.647,00	1.922.910.005,00	173.069.645,00
D.1.1.6	Kas di Bendahara BOS	6.750.622.009,82	1.173.696.325,62	294.391.014,06	235.450.290,66	515.537.622,26
D.1.1.7	Kas Lainnya	34.466.925,00	8.686.842,00	26.265.363,00	164.006.920,00	227.308.560,00
D.1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.9	Piutang Pendapatan	6.913.995.934,00	9.975.700.281,95	10.661.880.358,52	10.029.863.767,55	14.104.502.118,07
D.1.1.10	Piutang Lainnya	7.274.826.943,76	7.609.973.097,64	0,00	0,00	742.568.500,00
D.1.1.11	Penyisihan Piutang	(3.830.549.278,41)	(4.881.640.225,30)	(6.742.909.921,63)	(7.055.503.969,92)	(7.109.486.625,14)
D.1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	129.667.238,33	89.548.739,00	319.196.583,00	69.578.483,00	2.948.785.589,00
D.1.1.13	Persediaan	13.984.623.750,00	9.750.435.133,86	13.642.717.221,00	8.832.187.393,51	7.075.200.752,00
D.1.2	Investasi Jangka Panjang	35.233.592.993,73	36.515.106.896,38	37.190.325.477,38	37.613.591.198,65	37.035.951.056,65
D.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.4	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	35.233.592.993,73	36.515.106.896,38	37.190.325.477,38	37.613.591.198,65	37.035.951.056,65
D.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.233.592.993,73	36.515.106.896,38	37.190.325.477,38	37.613.591.198,65	37.035.951.056,65
D.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3	Aset Tetap	974.850.930.995,65	997.063.338.579,97	1.106.190.420.938,55	1.174.860.780.020,44	1.137.329.909.495,44
D.1.3.1	Tanah	107.040.299.143,00	103.379.140.518,00	101.078.098.064,00	98.236.565.332,00	98.745.212.848,00
D.1.3.2	Peralatan dan Mesin	243.700.871.465,29	271.993.084.004,29	312.492.032.646,29	332.940.158.762,29	360.465.758.630,29
D.1.3.3	Gedung dan Bangunan	471.606.382.664,00	512.024.345.415,04	566.456.737.183,62	655.375.853.850,27	697.350.918.526,27
D.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.002.748.963.690,15	1.073.036.225.809,43	1.122.767.930.421,43	1.283.880.760.201,67	1.360.580.912.540,67



Ref.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
D.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	21.354.584.321,65	19.479.825.211,65	20.294.563.911,65	22.068.256.011,65	24.604.231.411,65
D.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.754.127.420,00	41.720.376.034,00	134.679.822.827,00	59.467.258.081,00	11.294.997.123,00
D.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(915.354.297.708,44)	(1.024.569.658.412,44)	(1.151.578.764.115,44)	(1.277.108.072.218,44)	(1.415.712.121.584,44)
D.1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5	Aset Lainnya	36.260.271.917,65	39.210.289.938,25	41.611.153.123,25	40.070.749.446,25	37.297.476.004,25
D.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	485.611.886,40	428.800.220,00	45.302.500,00	45.802.500,00	0,00
D.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	10.378.400.270,00	11.724.430.845,00	13.138.781.412,00	15.082.833.067,00	16.300.036.197,00
D.1.5.4	Aset Lain-lain	30.714.463.188,25	33.907.269.727,25	35.665.398.623,25	108.182.362.213,35	103.834.951.615,35
D.1.5.5	Akumulasi Amortisasi	(5.317.988.630,00)	(6.849.996.057,00)	(8.452.638.887,00)	(10.198.368.851,00)	(12.094.071.091,00)
D.1.5.6	Penyisihan Piutang Ganti Kerugian Daerah	(214.797,00)	(214.797,00)	-	-	-
D.2	KEWAJIBAN	3.211.283.887,90	4.022.212.122,30	141.828.238.915,99	136.541.294.676,86	103.771.213.357,50
D.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	3.211.283.887,90	4.022.212.122,30	30.161.580.730,99	41.701.116.139,86	27.287.194.436,50
D.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	96.520.890,90	44.563.567,00	36.261.596,00	22.546.567,00	24.358.038,00
D.2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	7.859.243.327,99	6.594.438.036,00	5.423.473.116,00
D.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	16.826.479.648,00	18.356.159.616,00	18.356.159.616,00
D.2.1.4	Pendapatan Diterima di muka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.5	Utang Beban	264.106.684,00	2.106.607.191,30	1.498.981.998,00	14.841.320.202,86	2.294.448.725,50
D.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.850.656.313,00	1.871.041.364,00	3.940.614.161,00	1.886.651.718,00	1.188.754.941,00
D.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	111.666.658.185,00	94.840.178.537,00	76.484.018.921,00
D.2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	111.666.658.185,00	94.840.178.537,00	76.484.018.921,00
D.3	EKUITAS	1.112.777.807.449,14	1.111.233.548.153,78	1.136.488.549.620,18	1.148.483.515.70,83	1.135.568.308.200,37
D.3.1	Ekuitas	1.112.777.807.449,14	1.111.233.548.153,78	1.136.488.549.620,18	1.148.483.515.70,83	1.135.568.308.200,37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.115.989.091.337,04	1.115.255.760.276,08	1.278.316.788.536,17	1.285.024.810.384,69	1.135.568.309.644,87

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio pada Tabel 2.231. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (*Leverage*). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah:

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar-CR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya, yang diperoleh dari membandingkan aset lancar dibagi hutang lancar. CR Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebelum dan setelah tahun 2023 berada di atas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi, meski pada tahun 2023 sempat posisinya <1.
2. *Quick Ratio* (Rasio Cair-QR) yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Rasio Cair Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara > 1 pada periode diatas tahun 2022, artinya memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya yang menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek. Sedangkan pada tahun pemantauan terakhir turun hingga <1, menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek semakin menyempit.

Tabel 2.231
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar	11,5130X	21,6873X	10,5581X	3,0941X	0,7788X	1,0143X
2	Rasio Cair	10,9945X	18,4849X	9,3248X	2,6418X	0,5670X	0,7549
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,34%	0,29%	0,36%	11,09%	10,63%	8,37%
4	Rasio hutang terhadap modal	0,34%	0,29%	0,36%	12,48%	11,89%	9,14%

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset (*debt to equity ratio*), adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar risiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tergolong kecil (<1 persen) pada periode di atas tahun 2022 karena belum memanfaatkan pembiayaan pihak eksternal, yang menunjukkan kewajiban-kewajiban jangka panjang sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya, artinya pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan pada tahun pemantauan 2022-2024, rasionya signifikan naik karena sudah memanfaatkan fasilitas likuiditas dari pihak eksternal, meski sudah perlahan turun kembali.
2. Rasio hutang terhadap modal (*debt to capital ratio*) digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara periode sebelum tahun 2022 tergolong baik dengan nilai rasio dibawah 1 persen. Sedangkan pada periode tiga tahun terakhir mulai naik seiring kebijakan untuk memanfaatkan fasilitas likuiditas eksternal, meski juga trennya sudah mengecil di tahun 2024.

Hasil analisis terhadap *current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara secara umum menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang cukup baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap aset yang rendah, meskipun pada dua tahun pemantauan

terakhir kemampuannya sudah semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara relatif cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan belanja pelayanan publik.

2.7.1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, diuraikan dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan dalam Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

2.7.1.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang paling krusial dan menjadi isu di Gorontalo Utara adalah Belanja Pegawai, dimana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 146 ayat 1, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru (Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan (Tamsil)) maksimal sebesar 30 persen dari Belanja Daerah. Kondisi jenis belanja tersebut persentasenya cenderung fluktuatif, dengan diupayakan tidak melebihi 30 persen.

Tabel 2.232
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai	277.903.935.766	286.499.001.679	259.602.606.277	267.857.407.219	277.674.134.207	316.861.901.156
2	Belanja Tunjangan Guru (TPG + TKG + Tamsil)	30.653.451.000	32.809.841.000	34.508.349.000	36.483.694.000	38.038.917.924	43.416.223.600
3	Belanja Pegawai dikurangi tunjangan guru	247.250.484.766	253.689.160.679	225.094.257.277	231.373.713.219	239.635.216.283	273.445.677.556
2	Total Belanja Daerah	663.443.518.217	685.010.865.496	775.369.731.236	976.341.688.422	789.700.652.258	731.176.523.842

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Belanja Aparatur (%)	37,27	37,03	29,03	23,70	30,35	37,40

Sumber: Badan Keuangan, 2025

2.7.1.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk dilakukan analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan lebih dahulu mencari besarnya surplus/defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup jika terjadi defisit riil anggaran. Surplus/defisit riil anggaran yang disajikan pada Tabel 2.233, menunjukkan bahwa Gorontalo Utara memiliki kondisi yang variatif.

Tabel 2.233
Surplus/Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	774.574.586. 784	778.141.313. 339	725.810.960. 127	733.506.914. 980	712.909.395. 687	741.401.440. 107
Dikurangi realisasi:							
2	Belanja Daerah	617.307.352. 631	618.736.615. 809	735.308.338. 153	817.221.526. 191	753.149.149. 006	731.176.523. 842
3	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	500.000.000	2.776.374.949	2.399.758.163	16.596.799.68 0	18.856.159.61 6
Surplus/Defisit Riil		149.267.234. 153	158.904.697. 530	(12.273.752. 975)	(86.114.369. 374)	(56.836.552. 999)	(8.631.243. 351)

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Kemampuan Kabupaten Gorontalo Utara untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada Tabel 2.222.

Tabel 2.234
Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	778.141.313. 339	725.810.960. 127	733.506.914. 980	712.909.395. 687	741.401.440. 107
Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	618.736.615. 809	735.308.338. 153	817.221.526. 191	753.149.149. 006	731.176.523. 842
A	Surplus/Defisit Riil	158.904.697.53 0	(12.273.752.97 5)	(86.114.369.37 4)	(56.836.552.99 9)	(8.631.243.351)
Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:						
3	Penerimaan	32.339.152.	42.918.492.	128.493.137.	75.358.326.	18.521.499.

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pembiayaan Daerah	228	741	833	431	980
4	Pengeluaran	500.000.000	2.776.374.949	2.399.758.163	16.596.799.	18.856.159.
	Pembiayaan Daerah				680	616
B	Pembiayaan Netto	31.839.152.	40.142.117.	159.122.354.	58.761.526.	-334.659.635
		228	792	371	751	
A-B	SILPA	42.918.492.	30.644.739.	75.407.743.	18.521.773.	9.890.256.629
		741	767	160	431	

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Dari Tabel 2.222, terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

2.7.1.3 Kerangka Pendanaan

2.7.1.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Tabel 2.235
Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gaji dan Tunjangan (ASN, Anggota DPRD, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah)	275.487.761.137	259.602.606.277	267.857.407.219	277.674.134.207	271.078.916.925
2	Belanja Air	117.672.050	116.052.603	205.500.000	192.739.196	149.648.100
3	Belanja Listrik	4.046.403.941	3.681.289.080	4.189.376.000	4.483.175.560	4.104.176.410
4	Belanja Internet	793.469.742	1.488.702.439	2.478.677.320	3.247.843.436	2.458.494.048
5	Belanja Pemeliharaan	1.336.757.203	9.956.146.128	3.999.378.573	5.219.371.502	1.437.751.381

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Belanja Bantuan Keuangan	147.631.785.499	149.022.818.164	133.657.779.427	133.434.159.000	140.051.751.547
7	Belanja Tak Terduga	343.649.360	1.649.045.545	4.200.000.000	300.000.000	0
8	Premi Asuransi	4.884.307.060	5.819.726.862	4.925.634.980	8.878.344.702	14.191.668.804
9	Pokok/Bunga Pinjaman	-	357.050.000	20.317.948.288	24.760.000.000	25.157.180.970
TOTAL		434.641.805.992	427.002.904.828	441.831.701.807	458.189.767.603	458.629.588.185

Sumber: Badan Keuangan, 2025

2.7.1.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Selama periode tahun 2025 hingga 2030, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan mendorong Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya kreatif seiring dengan semakin tingginya kebutuhan belanja pembangunan dan pemenuhan kriteria fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

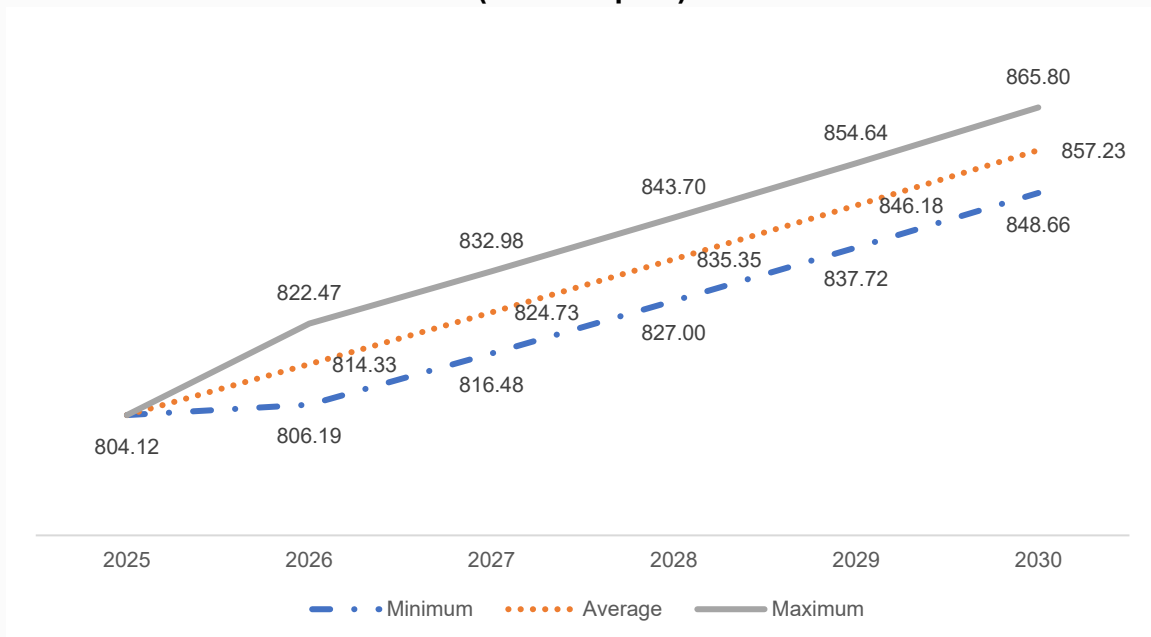
Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara diperkirakan tumbuh membaik. Ekonomi Gorontalo Utara pada tahun 2023 berada di angka 4,31 persen (yoy), tren yang sama pada tahun 2024 berada di 4,17 persen (yoy). Sementara pada periode 2025-2030 dengan asumsi tidak terjadi *shock* (guncangan ekonomi) signifikan, pertumbuhan akan berada pada kisaran 4,51 persen hingga 5,30 persen. Selanjutnya indeks harga yang digambarkan pada tingkat inflasi pada 2024 justru terjadi deflasi 1,1 persen (yoy). Begitu pula selama periode tahun 2025 hingga 2030, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang seimbang dengan pendapatan riil masyarakat, tingkat inflasi dijaga pada level moderat 2,5 persen $\pm$ 1 persen.

Selanjutnya, dalam melakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 hingga 2030, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi pertumbuhan ekonomi 2025-2030 sebesar 4,51-5,30 persen dan tingkat inflasi berkisar $2,5 \pm 1$ persen;
2. Asumsi proyeksi fiskal mempertimbangkan pada ekonomi nasional dan daerah mulai *rebound* tahun 2026;
3. Pembayaran hutang kepada pihak ke-tiga;
4. Potensi penyesuaian pendapatan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Target total Pendapatan Daerah untuk batas minimum dan maksimum menggunakan asumsi ± 1 persen;
6. Proyeksi total Belanja Daerah untuk batas minimum dan maksimum menggunakan asumsi $\pm 1,2$ persen;
7. Khusus pada APBD tahun 2025, menggunakan struktur APBD tahun 2025 yang sudah ditetapkan bersama;
8. Menyediakan ruang untuk penyesuaian pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan mendukung program nasional pada setiap tahun berjalan.

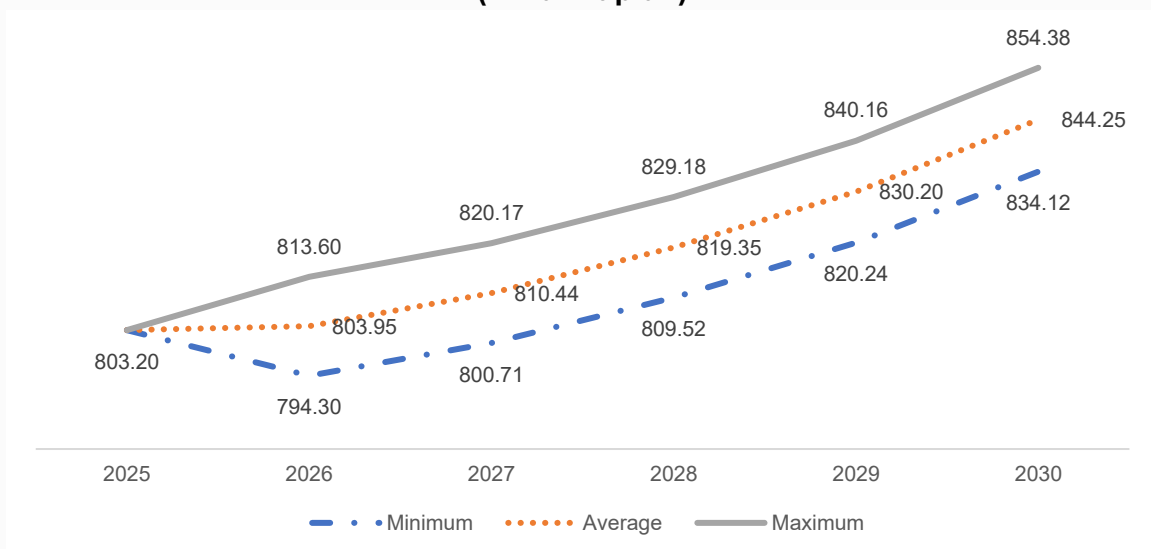
Asumsi-asumsi di atas menjadi dasar dalam proyeksi APBD 2025-2030 dengan menganalisis realisasi APBD tahun 2020 sampai dengan 2024 dan struktur APBD tahun 2025, dihasilkan 3 skenario proyeksi Pendapatan dan Belanja tahun 2025-2029 yaitu *minimum scenario*, *maximum scenario*, dan *average scenario* sebagaimana Grafik 2.84 dan 2.85 berikut.

Grafik 2.84
Skenario Target Pendapatan Daerah pada APBD 2025-2030
(Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Keuangan, 2025

Grafik 2.85
Skenario Proyeksi Belanja Daerah pada APBD 2025-2030
(Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Keuangan, 2025

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah hasil analisis tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan target APBD tahun 2025-2030 oleh

Badan Keuangan dengan mempertimbangkan kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

A. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2025-2030

Dengan melihat proyeksi dan asumsi-asumsi dari tahun 2024 hingga tahun 2030 di atas, serta melihat performa Pendapatan Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024, pada masa yang akan datang Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkat yang diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

- Pajak Daerah
 - Penyesuaian peraturan-peraturan terkait Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Berupaya menyelesaikan langkah-langkah inisiasi untuk melakukan penerimaan Pajak Daerah dengan menerapkan sistem *online* bekerjasama dengan Perbankan dan membenahi manajemen data penerimaan Pajak Daerah;
 - Peningkatan koordinasi dan sinergisitas antar OPD;
 - Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian dan mendorong ekonomi masyarakat. Berikutnya akan dilaksanakan mekanisme pungutan dengan melalui mekanisme penegakan (*law enforcement*) dan tahapan yang telah diatur;
 - Pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah, serta pengukuhan wajib pajak baru;
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan melalui pembangunan, perluasan, dan peningkatan sosialisasi penggunaan layanan digital;

- Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat di desa dan kecamatan, bekerjasama dengan aparat kewilayahan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan koordinasi kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- Retribusi Daerah
 - Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - Kerjasama dengan Perbankan untuk pembayaran Retribusi Daerah;
 - Transaksi non tunai;
 - Memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib retribusi;
 - Peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap peraturan di daerah yang diduga sudah *out of date*.
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - Meningkatkan status dan kualitas kesehatan dan tata kelola BUMD melalui pemilihan SDM yang profesional dan berkualitas dalam pengelolaan BUMD, optimalisasi produktivitas operasi dan aset BUMD, inovasi bisnis, serta memperkuat struktur permodalan BUMD;
 - Evaluasi pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
 - Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis dan strategis;
 - Mitigasi fiskal daerah melalui skema *debt management*;
 - Optimalisasi pendapatan BLUD.
- Pendapatan Transfer

Difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer dengan memenuhi aspek kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan serta berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan. Selain itu, perlu ada penguatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo Utara sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, proyeksi pertumbuhan dana ini didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol.

Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat, yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk optimalisasi alokasi DAK, pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dalam pembangunan disinergikan. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional.

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penentuan proyeksi pendapatan ini juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama kementerian/lembaga dan instansi vertikal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diformulasikan dalam target Pendapatan Daerah mempertimbangkan tiga skenario hasil analisa *time series* dan asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana Tabel 2.236 berikut.

Tabel 2.236
Proyeksi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1	Pendapatan Asli Daerah	48.327.913.431	50.294.152.408	52.349.355.168	54.497.619.878	56.743.236.484	59.090.695.804
1.1.1	Pajak Daerah	18.216.566.661	18.908.796.194	19.627.330.449	20.373.169.007	21.147.349.429	21.950.948.707
1.1.2	Retribusi Daerah	1.856.346.770	1.917.606.213	1.980.887.218	2.046.256.497	2.113.782.961	2.183.537.799
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.255.000.000	25.467.750.000	26.741.137.500	28.078.194.375	29.482.104.094	30.956.209.298
1.2	Pendapatan Transfer	746.016.702.384	754.058.756.543	762.210.325.601	770.473.959.424	778.852.306.113	787.348.116.624
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	731.469.524.000	738.784.219.240	746.172.061.432	753.633.782.047	761.170.119.867	768.781.821.066
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.547.178.384	15.274.537.303	16.038.264.168	16.840.177.377	17.682.186.246	18.566.295.558
TOTAL PENDAPATAN		804.125.273.756	814.329.180.051	824.735.477.291	835.350.891.754	846.182.441.298	857.237.449.103

Sumber: Badan Keuangan, 2025

B. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah 2025-2030

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2025 hingga 2030, yaitu sebagai berikut:

- Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran yang bersifat *mandatory spending*, termasuk pemenuhan hak-hak pegawai yang berupa gaji dan tunjangan;
- Alokasi pada program-program strategis Bupati-Wakil Bupati periode 2025-2029;
- Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan daerah, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar (*sufficient basic services*);
- Mengedepankan belanja yang mendorong transformasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran, upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta mendukung agenda pembangunan pusat maupun provinsi;
- Pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10 persen dari Dana Transfer Umum dalam APBD;
- Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Bantuan-bantuan gratis, khususnya pendidikan dan bantuan lainnya dalam rangka mendukung pelayanan publik;

- Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanaan pemilihan umum;
- Bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan pendekatan inklusifitas.
- Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan kebijakan Belanja Daerah sampai dengan tahun 2030, serta dengan memperhatikan tiga skenario proyeksi Belanja Daerah sampai tahun 2030, hasil analisa *time series*, dan penggunaan asumsi-asumsi, didapatkan proyeksi Belanja Daerah tahun 2025-2030.

Tabel 2.237
Proyeksi Belanja Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1	Belanja Operasi	535.617.002.808	535.512.823.211	539.179.353.949	544.459.110.544	552.443.300.710	563.450.387.016
2.1.1	Belanja Pegawai	350.242.511.533	350.592.754.045	352.345.717.815	354.459.792.122	356.586.550.874	358.726.070.180
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172.921.379.450	173.094.300.829	177.535.032.861	180.553.128.419	178.113.400.157	179.003.967.158
2.1.3	Belanja Bunga	6.796.600.000	6.664.600.000	3.123.451.432	1.943.777.532	720.349.678	720.349.678
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	4.656.511.825	4.661.168.337	4.675.151.842	5.002.412.471	14.023.000.000	22.000.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.2	Belanja Modal	128.350.171.066	128.730.953.540	129.656.893.013	132.250.030.873	133.938.341.510	135.649.022.409
2.3	Belanja Transfer	137.232.860.781	137.713.886.386	138.605.855.389	139.642.091.408	140.825.463.287	142.159.292.849
2.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
TOTAL BELANJA		803.200.034.655	803.957.663.137	810.442.102.351	819.351.232.825	830.207.105.507	844.258.702.274

Sumber: Badan Keuangan, 2025

C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2025-2030

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, tren ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

- Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;

- Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
 - Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan dalam Tabel 2.238 berikut.

Tabel 2.238
Proyeksi Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Penerimaan Pembiayaan	18.930.960.899	9.484.683.086	6.562.825.061	5.356.541.071	5.380.864.210	8.377.453.170
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.930.960.899	9.484.683.086	6.562.825.061	5.356.541.071	5.380.864.210	8.377.453.170
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.856.200.000	19.856.200.000	20.856.200.000	21.356.200.000	21.356.200.000	21.356.200.000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000	18.356.200.000	18.356.200.000	18.356.200.000	18.356.200.000	18.356.200.000
PEMBIAYAAN NETTO		(925.239.101)	(10.371.516.914)	(14.293.374.939)	(15.999.658.929)	(15.975.335.790)	(12.978.746.830)

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Selanjutnya, dilakukan analisis proyeksi Pembiayaan Daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan dengan proyeksi 5 tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran di masa yang akan datang, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain);
3. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
4. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan;
5. Asumsi penyerapan pendapatan rata-rata per tahun sebesar 100 persen;
6. Asumsi penyerapan belanja per tahun berkisar antara 90,00 s.d. 95,00 persen yang antara lain dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa (seperti sisa lelang, gagal lelang), harga satuan, efisiensi dan lain-lain;
7. Asumsi penyerapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan rata-rata per tahun sebesar 100 persen.

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

Dari berbagai pertimbangan kebijakan di atas, proyeksi APBD tahun 2025 hingga tahun 2030 dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang, yang dirangkum pada Tabel 2.239 berikut.

Tabel 2.239
Proyeksi APBD

No.	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	804.125.273.756	814.329.180.051	824.735.477.291	835.350.891.753	846.182.441.297	857.237.449.103
1.1	Pendapatan Asli Daerah	48.372.913.431	50.294.152.408	52.349.355.167	54.497.619.878	56.743.236.483	59.090.695.804
1.2	Pendapatan Transfer	746.016.702.384	754.058.756.543	762.210.325.600	770.473.959.423	778.852.306.112	787.348.116.623
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.780.657.941	9.976.271.100	10.175.796.521	10.379.312.452	10.586.898.701	10.798.636.675
2	BELANJA	803.200.034.655	803.957.663.137	810.442.102.351	819.351.232.824	830.207.105.507	844.258.702.273
2.1	Belanja Operasi	535.617.002.808	535.512.823.211	539.179.353.949	544.459.110.543	552.443.300.709	563.450.387.015
2.2	Belanja Modal	128.350.171.066	128.730.953.540	129.656.893.012	132.250.030.873	133.938.341.510	135.649.022.408
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	137.232.860.781	137.713.886.386	138.605.855.388	139.642.091.407	140.825.463.287	142.159.292.849
	SURPLUS/(DEFISIT)	925.239.101	10.371.516.914	14.293.374.939	15.999.658.929	15.975.335.790	12.978.746.829
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	18.930.960.899	5.000.000.000	6.562.825.061	5.356.541.071	5.380.864.210	8.377.453.170
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.856.200.000	19.856.200.000	20.856.200.000	21.356.200.000	21.356.200.000	21.356.200.000
	PEMBIAYAAN NETTO	(925.239.101)	(10.371.516.914)	(14.293.374.939)	(15.999.658.929)	(15.975.335.790)	(12.978.746.830)
	SILPA	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan, 2025

2.8 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah memberikan gambaran sebagai suatu kondisi atau keadaan yang memiliki perbedaan antara kondisi aktual dan yang diinginkan, yang dilihat berdasarkan hasil evaluasi dan kajian terhadap capaian kinerja pembangunan daerah yang bersumber dari dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029, pencapaian metadana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) di Kabupaten Gorontalo Utara atau Provinsi Gorontalo, dan lain sebagainya sehingga dihasilkan *gap* atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Sedangkan isu strategis pembangunan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting, dan telaah terhadap isu strategis regional, nasional, hingga global. Hal ini juga bersifat kompleks, melibatkan berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menetapkan kebijakan dan program upaya dalam penyelesaiannya. Selain itu, analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen ini karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

2.8.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada hasil analisis kondisi pembangunan daerah pada sub bab sebelumnya, yang meliputi empat aspek, yaitu: aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum.

2.8.1.1 Permasalahan Aspek Geografis dan Demografis

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dari aspek geografis dan demografis Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu:

1. Secara umum, seluruh wilayah memiliki risiko dan kerentanan multi bencana yang tinggi. Misalnya rawan bencana longsor di beberapa wilayah yang berada pada ketinggian dan tingkat kemiringan tinggi seperti di Desa Deme II (5,5 Ha), Koluwoka (8,53 Ha), Kasia (1,91 Ha), dan Garapia (2,06 Ha).
2. Alih fungsi lahan dari kawasan hutan masih terjadi dan berpotensi meningkatkan luasan lahan kritis, juga peralihan sebagian lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman yang dapat memberi tekanan terhadap ketersediaan pangan dan kualitas lingkungan;
3. Daya dukung pangan indikatif beberapa kecamatan sudah terlampaui, seperti di Kecamatan Anggrek, Gentuma Raya, Kwandang, Ponelo Kepulauan, dan Tomilito, termasuk prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang masih sangat tinggi, dan beberapa desa masih masuk rawan pangan;
4. Beberapa kawasan masih menjadi lokasi pertambangan tidak berizin yang cenderung tidak ramah lingkungan;
5. Pengembangan lokasi/kawasan wisata relatif kurang fasilitas/infrastruktur pendukung, promosi dan *branding* yang lemah, partisipasi masyarakat rendah, serta tata kelola dan regulasi yang lemah;
6. Dorongan pengembangan sektor industri masih jadi tantangan khususnya dalam hal infrastruktur dasar, integrasi kawasan, SDM, investasi, inovasi dan teknologi, kerentanan ekosistem pesisir, serta regulasi dan perizinan;

7. Pengembangan permukiman tidak terpola, tidak sesuai peruntukan, bahkan beberapa diantaranya berada di kawasan kumuh;
8. Penyediaan air bersih belum optimal, pada wilayah dataran rendah sering terjadi kekurangan air bersih (Kecamatan Kwandang), termasuk kualitas air permukaan juga pada beberapa sungai sudah masuk kategori cemar sedang;
9. Perbandingan produksi dan timbulan sampah masyarakat dengan sampah yang dikelola masih rendah, dan kapasitas TPA pun sudah melebihi batas;
10. Utilisasi pembangkit listrik non fossil dan sumber energi terbarukan lainnya masih memiliki tantangan;
11. Meningkatnya jumlah dan komposisi penduduk Lansia (*ageing population*) ditandai dengan komposisi penduduk usia di atas 60 tahun semakin mendekati 10 persen. Hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kondisi ini adalah masalah jaminan kesehatan dan kepedulian terhadap pelayanan kebutuhan Lansia.

2.8.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dari aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Tingkat ketergantungan pada sektor primer yang relatif lebih rendah *value added*-nya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masih terlalu dominan, menunjukkan diversifikasi dan modernisasi ekonomi masih lemah;
2. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, meskipun sudah *rebound*, belum kembali ke kondisi pra pandemi dengan rata-rata 2,7 persen (2020-2024) berbanding 7,13 persen (2016-2019);
3. Struktur ekonomi daerah masih rentan terhadap goncangan, sehingga pertumbuhan ekonomi belum berkelanjutan;
4. Akselerasi pertumbuhan pengeluaran perkapita, yang merupakan komponen dalam perhitungan IPM, masih rendah, tergambar pada rata-rata pertumbuhan tahun 2018-2024 yang hanya berkisar 2,7 persen;

5. Berdasarkan analisis *shift-share*, terdapat beberapa sektor ekonomi yang tidak bertumbuh cepat, tidak berdaya saing, dan tumbuh lambat relatif dibandingkan ekonomi sektoral regional;
6. Ketimpangan pendapatan penduduk yang tergambar pada *gini ratio* masih sangat tinggi dan belum signifikan berubah dalam lima tahun terakhir;
7. Stagnasi angka kemiskinan yang tetap berada di kisaran 16-17 persen dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga masih tinggi (sekitar 19.000 penduduk yang setara 3 dari 20 penduduk masuk kategori miskin);
8. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun pemantauan terakhir (2024) mengalami peningkatan (3,41 berbanding sebelumnya 2,69) yang menggambarkan peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain selisih rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh (rata-rata enam tahun terakhir (2019-2024) 2,73);
9. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) pada tahun pemantauan terakhir (2024) mengalami peningkatan (1,02 berbanding sebelumnya 0,59) yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara sesama penduduk miskin semakin besar (rata-rata enam tahun terakhir (2019-2024) 0,68);
10. Kualitas pembangunan manusia yang tergambar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah dan stagnan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1 persen. Komponen Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menjadi komponen yang paling lambat berprogres;
11. Penurunan angka pengangguran terbuka belum optimal (meskipun rata-rata perubahan 2019-2024 sebesar -3,36 persen, pada tahun 2024 meningkat 0,72 persen);
12. Angka pengangguran perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang pada tahun 2024 mencapai 2,97 persen berbanding 2,68 persen;
13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan belum optimal, tergambar dari senjangnya perbandingan TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2024 yang masing-masing sebesar 56,14 dan 83,16;

14. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/ sederajat hingga mencapai 6,72 persen, jauh dibandingkan tamatan SMP/ lebih rendah yang hanya 1,60 persen;
15. Penduduk yang bekerja di sektor informal jauh lebih dominan dan progresif naik menunjukkan kesempatan kerja formal masih terbatas;
16. Keahlian yang dimiliki pencari kerja masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
17. Inklusifitas pembangunan ekonomi masih relatif tertinggal dibanding daerah lainnya dalam regional Gorontalo;
18. Indeks keluarga sehat pada tahun 2024 sangat rendah di 0,17, terendah di Provinsi Gorontalo, yang terutama disumbang oleh komponen penderita hipertensi yang tidak melakukan pengobatan teratur dan penderita gangguan jiwa yang ditelantarkan/ tidak mendapatkan pengobatan;
19. Kinerja pemenuhan gizi Balita masih rendah, digambarkan oleh angka stunting yang masih sangat tinggi di kisaran 30 persen;
20. Perilaku hidup bersih sangat rendah sehingga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat;
21. Kerentanan kesehatan anak dan ibu pasca neonatal masih tinggi;
22. Kinerja literasi dan numerasi tingkat sekolah dasar dan menengah pertama masih sangat tertinggal dibanding daerah lain dalam regional Gorontalo;
23. Minat baca masyarakat masih sangat rendah, salah satunya tergambar dari kunjungan ke perpustakaan daerah yang rendah;
24. Tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja terendah di regional Gorontalo di angka 48 persen;
25. Cakupan rumah tangga yang dilindungi oleh perlindungan sosial belum optimal;
26. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja dominan berada di sektor informal;
27. Pada tahun 2024, *gender gap* masih cukup besar. Indeks pembangunan gender terendah di Provinsi Gorontalo hanya 82,80, jauh dibandingkan Provinsi Gorontalo yang telah mencapai 88,64;

28. Perlindungan perempuan dan anak belum berjalan optimal, ditandai dengan masih tingginya kerentanan terhadap kekerasan dan diskriminasi, terbatasnya upaya pencegahan dan penanganan kasus, serta belum optimalnya kapasitas dan jangkauan layanan perlindungan, termasuk peran dan dukungan terhadap UPT-PPPA dalam memberikan layanan yang terpadu dan berkelanjutan;
29. Pemenuhan prinsip GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam pembangunan daerah belum optimal, tercermin dari masih terbatasnya akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta belum terintegrasinya perspektif GEDSI secara sistematis dalam perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan dasar;
30. Beberapa indikator sosial lainnya dengan pantauan data tahun 2024 perlu perhatian lebih, seperti sekitar 15,24 persen penduduk miskin adalah penyandang disabilitas yang menunjukkan pentingnya kebijakan afirmatif terhadap PMKS. Kecenderungan sebagai perokok pada penduduk miskin juga cukup tinggi dengan angka mencapai 20,74 persen. Usia kawin pertama penduduk miskin rata-rata pada usia 21 tahun, dan empat dari 10 penduduk miskin berstatus cerai, baik cerai hidup maupun mati.

2.8.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dari aspek daya saing Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu:

1. Angka ketergantungan semakin mendekati 50 persen;
2. Kontribusi beberapa sektor non primer dalam PDRB masih sangat rendah dan stagnan, diantaranya industri pengolahan, akomodasi makan dan minum; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
3. Peran sektor ekonomi kreatif belum optimal meski terus meningkat;
4. Iklim kewirausahaan relatif lemah, dan porsi IKM Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo masih sangat rendah;

5. Kemandirian fiskal masih sangat lemah, porsi PAD dibanding Pendapatan Daerah masih di bawah 5 persen;
6. Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap output Provinsi Gorontalo stagnan di kisaran 8 persen;
7. Proses bisnis dan kualitas data yang digunakan dalam sistem statistik masih lemah;
8. Kesenjangan penggunaan teknologi digital pada sektor pertanian bahkan pada kalangan petani muda;
9. Kalangan masyarakat perempuan dan berpendapatan rendah relatif tertinggal dibanding masing-masing kelompok lainnya;
10. Porsi energi baru terbarukan masih sangat kecil <10 persen;
11. Penguatan kapasitas manusia dan pemanfaatan teknologi dalam ekonomi dan layanan publik masih relatif tertinggal;
12. Kontribusi PDRB Kabupaten Gorontalo Utara terhadap PDRB Provinsi Gorontalo relatif masih sangat rendah dan stagnan di kisaran 8 persen;
13. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai salah satu indikator investasi yang masuk dalam suatu ekonomi masih stagnan, bahkan trennya cenderung kontraksi;
14. Masih ada sekitar 15 persen desa yang masuk kategori “Berkembang” dalam Indeks Desa;
15. Kualitas layanan infrastruktur wilayah masih belum optimal, misalnya pada kemantapan jalan yang masih di kisaran 43 persen dan angka konektivitas antar wilayah yang baru mencapai sekitar 57 persen;
16. Kepemilikan rumah yang masuk kriteria layak masih rendah dibawah 70 persen;
17. Aspek kelembagaan dan lingkungan pada kawasan transmigrasi masih rendah;
18. Kontribusi pajak daerah terhadap capaian PDRB sangat rendah di bawah 0,5 persen;
19. Kinerja dan produktivitas BUMD belum optimal. Cakupan layanan air bersih yang bersumber dari Perumda Tirta Gerbang Emas tahun 2024 baru

mencapai sekitar 38 persen, dan profit *Return on Asset* (RoA) masih negatif;

20. Kualitas kemananan dan ketertiban masyarakat belum optimal, digambarkan oleh *crime rate* dan *crime total* yang masing-masing masih di angka 159/100.000 penduduk dari 211 kejadian di tahun 2024;

21. Ketergantungan APBD terhadap transfer dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

2.8.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Beberapa permasalahan yang dihadapi dari aspek pelayanan umum Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik masih belum optimal, terutama pada domain manajemen dan tata kelola;
2. Kualitas layanan publik yang digambarkan oleh Indeks Pelayanan Publik masih di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo;
3. Kinerja reformasi hukum yang digambarkan oleh Indeks Reformasi Hukum masih sangat jauh dibawah rata-rata Provinsi Gorontalo;
4. Capaian kinerja integritas aparat pelaksana birokrasi belum optimal berdasarkan penilaian Indeks Integritas Nasional, begitu juga dengan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dianggap belum bebas dari risiko korupsi oleh KPK;
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum optimal senada dengan profesionalitas ASN, terutama pada komponen kualifikasi dan inovasi layanan;
6. Akuntabilitas kinerja belum optimal, bahkan kinerjanya relatif stagnan dalam 10 tahun terakhir jika dibandingkan dengan kemajuan daerah lainnya;
7. Pengendalian intern terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah, termasuk efisiensi, efektivitas, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan masih belum optimal;

8. Tata kelola pengadaan barang dan jasa dianggap belum optimal berdasarkan kriteria maturitas pengadaan barang dan jasa;
9. Gorontalo Utara dianggap masih kurang komitmennya terhadap pemenuhan HAM di tingkat lokal berdasarkan penilaian dari Kementerian Hak Asasi Manusia;
10. Kemampuan pemadaman terhadap bencana kebakaran belum optimal dan rasio pemenuhan Petugas Satpol PP sangat jauh dari ideal;
11. Daya saing daerah dianggap belum optimal karena masih di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo, terutama pada komponen ekosistem inovasi.
12. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor pelayanan dasar masih belum optimal, baik dari segi kualitas maupun cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.8.2 Isu Strategis

Penentuan isu strategis/tantangan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis regional, nasional, dan global serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang relevan untuk pembangunan Gorontalo Utara.

2.8.2.1 Isu Strategis Global

2.8.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda global bersama berikutnya dalam melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs, sehingga SDGs merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu

depletion sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Setelah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, segenap dokumen perencanaan disusun dengan mempertimbangkan 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dengan target berbagai yang harus tercapai pada tahun 2030.

Tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu:

1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*human development*), diantaranya: pendidikan dan kesehatan;
2. Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (*social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi; dan
3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*environmental development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan,



juga harus memperhatikan keterukurannya yang tidak lepas dari prinsip *environmental sustainability*, *economic sustainability*, dan *social sustainability*.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten

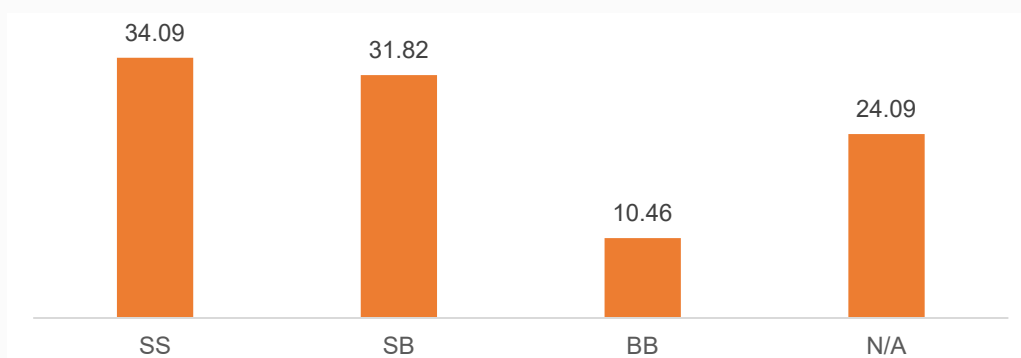
Gorontalo Utara, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam empat kategori:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS;
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB;
- Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target/BB;
- Indikator TPB yang tidak ada datanya N/A.

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB dalam KLHS RPJMD Gorontalo Utara Tahun 2025-2045, yang sesuai dengan kewenangan kabupaten ada sebanyak 16 TPB (kecuali TPB 14 “Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)”). Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat delapan indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Gorontalo Utara.

Jumlah TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target Nasional (SS) berjumlah 75 indikator. Indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional (SB) sejumlah 70 indikator. Indikator yang belum dilaksanakan (BB) sejumlah 22 indikator, dan indikator yang belum tersedia data (N/A) berjumlah 53 indikator.

Grafik 2.86
Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (%)



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, 2023

2.8.2.2 Isu Strategis Nasional pada RPJMN 2025-2029

Tema dan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 mengacu pada RPJPN 2025-2045, yaitu penguatan fondasi transformasi yang digambarkan sebagai berikut:



Dengan isu strategisnya yaitu:

A. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis *Asian Productivity Organization*

Rata-rata Pertumbuhan
TFP Index
Antar Negara



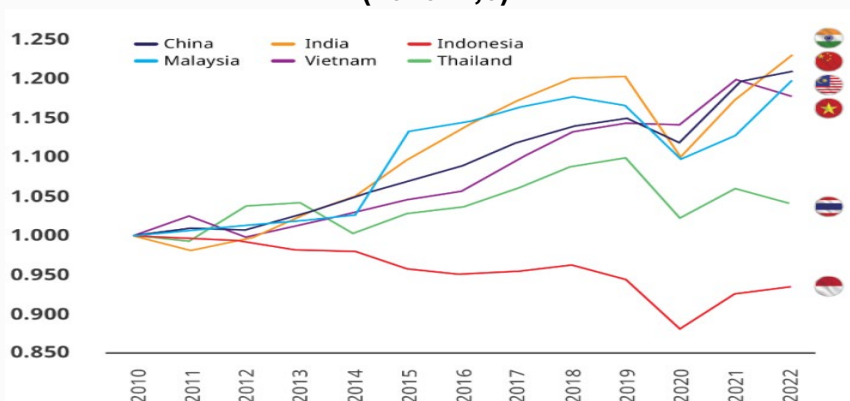
(2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 persen ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-

1995, dan Tiongkok sebesar 2,12 persen selama kurun waktu 2005-2022.

Kondisi produktivitas yang rendah diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Grafik 2.87
Total Factor Productivity Index 2010-2022
(2020=1,0)



Sumber: *Asian Productivity Organization*, diolah. Sebagaimana dimuat pada RPJMN Tahun 2025-2029

Selain itu, produktivitas yang rendah juga menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, sebesar US\$28.600/pekerja, masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100/pekerja, dan di bawah rata-rata kawasan ASEAN US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja diantaranya disumbang oleh rendahnya kualitas SDM yang dicerminkan rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022, turun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382, serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara OECD sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada serapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta

orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angkanya mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (BPS, 2024). Meskipun jumlah masyarakat kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024), dan diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat, terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (usia >15<64 tahun) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan

sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

E. Krisis Lingkungan

Dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (BNPB, 2024). Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (WHO, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (BPS, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 Kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (proyeksi *Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen/tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023), turut berkontribusi

dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian ESDM tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *triple planetary crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun panjang, dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

F. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang Rusia-Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan, yang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta krisis energi dan pangan. Perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka, yang berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadi

kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo Pasifik semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak, berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (IMF, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (IMF, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve*. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia, sehingga akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan Dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan

iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya, tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata sebesar 1.393,56 dibandingkan 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

G. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

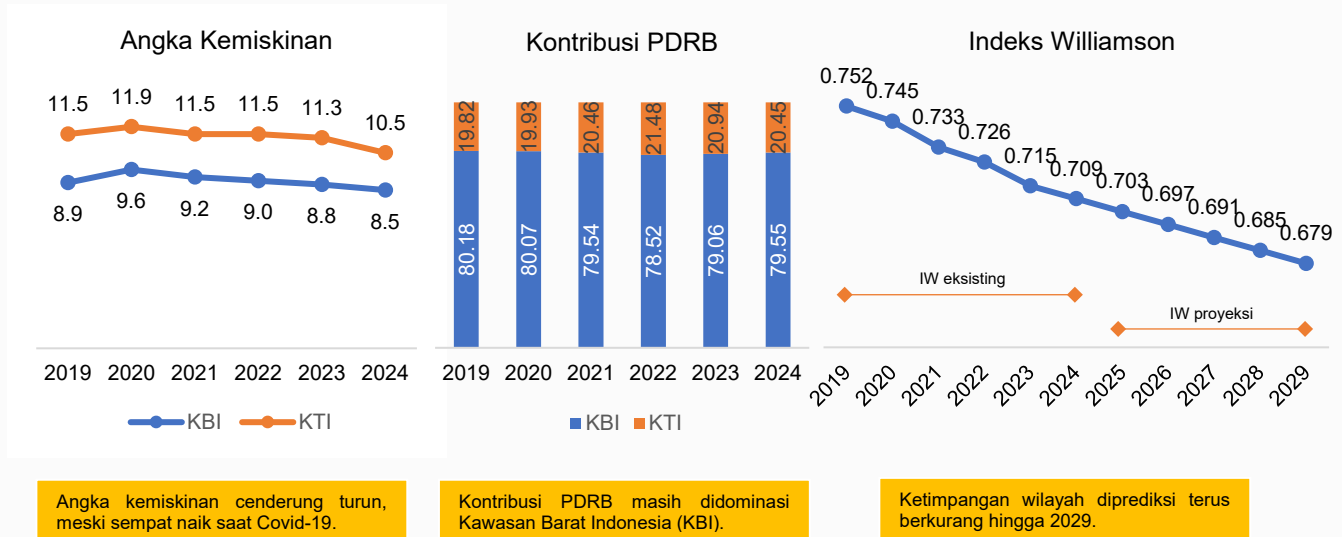
Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022, dan kemudian stagnan di angka yang sama tahun 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya, yang mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.8.2.3 Isu Strategis Regional

2.8.2.3.1 Isu Strategis dan Potensi Wilayah Sulawesi

Hampir 80 tahun Indonesia merdeka ternyata masih membawa fakta bahwa terjadi ketimpangan hasil pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang diantaranya terlihat pada kontribusi (*share*) PDRB, Indeks Williamson, hingga tingkat kemiskinan yang masih memiliki *gap* lumayan jauh, sehingga dalam RPJMN 2025-2029, terdapat isu strategis kewilayahan agar pendekatan penelaahan hal-hal strategis dapat lebih spesifik berdasarkan kondisi wilayah.

Grafik 2.88
Perbedaan Kondisi KBI dan KTI Tahun 2019-2024



Sumber: Teknokratik RPJMN 2025-2029, 2024

Sebagai bagian dari KTI yang memiliki *growth* tertinggi (tahun 2024:11,2 persen), isu kewilayahan Sulawesi dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

ISU WILAYAH KAWASAN SULAWESI	
	Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menghadapi daya saing rendah serta sektor pertambangan dan industri pengolahan yang tumbuh pesat namun belum dapat memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.
	- Pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitan (WM), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Destinasi Pariwisata (KDP) belum memberikan dampak optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan daratan; - Masih kurang memadainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kawasan perkotaan dan belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah, sementara kawasan perdesaan dan afirmasi belum

ISU WILAYAH KAWASAN SULAWESI	
	dapat dioptimalkan sebagai penyangga ekonomi.
	- Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi sektor pertanian; - Masih rendahnya akses fasilitas dan mutu pendidikan menyebabkan belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan tenaga kerja. Terdapat TPT yang masih rendah dari rata-rata Nasional (Sulawesi Barat); - Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang menjadi salah satu penyebab tingkat kesehatan masyarakat masih di bawah rata-rata Nasional yang ditandai dengan rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH). Selain itu kasus <i>schistosomiasis</i> masih ditemukan di Sulawesi Tengah, sedangkan prevalensi <i>stunting</i> tinggi (Sulawesi Barat) juga masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional.
	- Tingginya laju deforestasi yang berdampak pada meningkatnya ancaman kepunahan dan kehilangan jasa ekosistem esensial terutama di wilayah pesisir dan kepulauan; - Masih adanya risiko bencana yang cukup tinggi terutama terkait bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuifaksi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan).

Sedangkan potensi kewilayahan yang ada di Sulawesi yakni:

POTENSI WILAYAH KAWASAN SULAWESI	
	- Adanya komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, dan pala), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, dan teri), industri logam dasar (nikel, tembaga, emas, dan perak), mineral aspal, serta pariwisata; - Potensi nikel dan tembaga di wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi EBT dan potensi ekspor. Hal ini didukung dengan adanya kawasan industri dan tambang yang ada di Konawe, Morowali, dan Luwu Timur, serta IUP lain yang akan ekspansi dan berkembang di wilayah Sulawesi ke depan, serta sumberdaya nikel yang masih belum diesplorasi; - Potensi energi terbarukan mencapai 259,68 GW, meliputi energi surya (223,1 GW), hidro (3,1 GW), panas bumi (2,99 GW), bioenergi (3,5 GW), bayu (14,85 GW), dan arus laut (12,1 GW); - Memiliki cadangan minyak bumi 63,83 MMSTB dan cadangan gas bumi 5,250 TSCF.
	- Pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan membuka peluang besar bagi wilayah Sulawesi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah penyangga. Dengan posisinya yang strategis, Sulawesi dapat berperan penting menyuplai kebutuhan logistik, bahan pangan, dan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan IKN; - Posisi geografis Sulawesi yang strategis, terletak di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III, memberikan potensi besar untuk mendukung perannya sebagai <i>hub</i> dan pintu gerbang internasional KTI. Dengan akses yang menghubungkan rute perdagangan global, wilayah ini memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas maritim, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan industri logistik serta pariwisata. Selain itu, terdapat pula Sulawesi Utara yang berperan sebagai gerbang perdagangan Asia Timur dan Pasifik.
	Pengembangan sekolah unggul di Sulawesi (Sulawesi Utara) yang didorong dalam rangka meningkatkan pemerataan keunggulan siswa dan katalisator untuk mendorong peningkatan prestasi siswa yang memberikan keberpihakan pada wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

POTENSI WILAYAH KAWASAN SULAWESI	
	Wilayah Sulawesi terdiri dari kawasan pesisir dan kepulauan yang merupakan tempat tinggal bagi banyak masyarakat adat dan nelayan tradisional yang melakukan aktivitas ekonomi berbasis alam, seperti ekowisata dan produk perikanan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara langsung.

2.8.2.3.2 Isu Strategis Provinsi Gorontalo

Dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disebutkan beberapa isu strategis yang dikelompokkan menurut aspek-aspek pembangunan yang telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, yaitu:

A. Aspek Ekonomi

- Daya saing dan produktivitas ekonomi daerah rendah;
- Koperasi dan UMKM belum memberikan kontribusi signifikan bagi penciptaan nilai tambah;
- Produktivitas dan daya saing tenaga kerja rendah;
- Tingkat produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan belum optimal;
- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat;
- Kontribusi pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian daerah;
- Kondisi infrastruktur dan konektivitas belum optimal;
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
- Energi terbarukan dan efisiensi energi belum optimal;
- Perkembangan teknologi digitasi, infrastruktur, dan literasi digital masih terbatas;
- Penataan perkotaan penanganan kawasan perumahan dan permukiman belum optimal.

B. Aspek Sosial

- Aspek dan kualitas layanan pendidikan belum merata;
- Pelayanan kesehatan belum optimal;
- Tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;
- Kesenjaraan gender belum optimal;

- Kualitas keluarga, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, anak, pemuda, serta kelompok rentan belum optimal;
- Penerapan nilai agama dan budaya belum optimal

C. Aspek Lingkungan Hidup

- Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Kualitas lingkungan hidup belum optimal;
- Pengurangan luasan dan pendangkalan Danau Limboto;
- Terdapat hutan dan lahan kritis;
- Cakupan sanitasi dan air minum layak dan aman masih rendah;
- Pengelolaan sampah dan air limbah belum optimal;
- Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi.

D. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

- Kapasitas fiskal rendah;
- Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal;
- Kapasitas lembaga demokrasi belum optimal.

2.8.2.4 Isu Strategis Kabupaten Gorontalo Utara

2.8.2.4.1 Telaah Isu Lingkungan KLHS RPJMD 2025-2045

Isu lingkungan yang didasari oleh analisis 6 muatan KLHS, terdiri dari:

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- Adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Analisis 6 muatan KLHS berdasarkan *ecoregion*, perubahan penggunaan lahan, vegetasi, dan bentang alam yang terdapat di Gorontalo Utara, diperoleh isu lingkungan hidup sebagai berikut:

- Ketersediaan air bersih;
- Penurunan kualitas lingkungan hidup;

- Kerusakan hutan dan degradasi lahan;
- Penurunan debit sungai;
- Pencemaran air sungai dan laut serta ekosistem pesisir;
- Kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang;
- Banjir, longsor, dan kekeringan.

2.8.2.4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJPD 2025-2045

Isu-isu pembangunan daerah dalam jangka panjang tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Resiliensi dan transformasi ekonomi yang inklusif, bertumbuh, dan berkelanjutan.
2. Pembangunan sosial dan kesenjangan sosial ekonomi.
3. Pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik.
4. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
5. Sosial budaya serta keamanan daerah tangguh.
6. Infrastruktur dasar dan strategis berkualitas, serta pengembangan wilayah yang merata.

2.8.2.4.3 Telaahan Isu Pembangunan dalam RTRW Gorontalo Utara

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, isu penataan ruang Gorontalo Utara yaitu:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi, jasa, dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.8.2.4.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD 2025-2029

Gorontalo Utara dalam konteks modalitas menyimpan keunggulan baik dari sisi strategis maupun karakteristik wilayahnya. Modalitas dasar tersebut dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu alat utama dalam mendukung pembangunan.

A. Alam. Wilayah Gorontalo Utara terletak paling utara Pulau Sulawesi, seluruh kecamatannya berada di wilayah pesisir dan memiliki sekitar 50 pulau, dengan beberapa *spot* pantai berpasir putih, sehingga pengembangan

pariwisata pesisir dan bahari dapat menjadi unggulan di masa depan. Relief dataran rendahnya yang sempit karena diapit laut dan gunung/bukit sehingga wisata alam dataran tinggi dan pesisir dapat dinikmati sekaligus. Ternak hewan besar didominasi oleh sapi karena banyak tersedia lahan yang menyediakan pakan rumput. Wilayah WPP Perikanan 716 di perairan Gorontalo Utara merupakan wilayah dengan potensi perikanan tangkap yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berlimpah, seperti Tuna, karena berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Begitu pula dengan hasil pertanian terutama komoditas jagung dan durian yang merupakan unggulan daerah.

- B. Pengembangan wilayah ekonomi dan industri. Meskipun bukan daerah berpenduduk banyak dan berkepadatan tinggi di Provinsi Gorontalo, karena posisi geografisnya yang diapit langsung oleh dua provinsi menjadikan daerah ini jalur perlintasan utama distribusi barang dan orang dari utara ke selatan maupun sebaliknya. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memajukan kawasan Pelabuhan Peti Kemas Anggrek hingga berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan industri bahkan aglomerasi di masa depan.
- C. Adat istiadat. Adat istiadat di Gorontalo Utara menjadi salah satu kekuatan tersendiri karena masyarakatnya memegang teguh budaya dalam interaksi sehari-hari, ditambah muatan agama yang kuat sehingga adat istiadat dan agama menjadi tiang penopang kekuatan masyarakat dan pemerintah untuk menapak pembangunan.

Berdasarkan telaah permasalahan dalam konteks lokalitas daerah yang dipengaruhi berbagai isu baik internal maupun eksternal yang ditopang oleh modalitas dasar daerah dalam melaksanakan pembangunan di masa depan, isu-isu pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025-2029 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Resiliensi dan transformasi ekonomi yang inklusif, bertumbuh, dan berkelanjutan.

Potensi maritim Gorontalo Utara yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kontribusi sektor ekstraktif yang terlalu dominan juga berisiko terhadap tingkat resiliensi ekonomi daerah, terutama jika terjadi guncangan terhadap sektor primer saat sektor lain tidak mampu mengkompensasi. Untuk itu dibutuhkan transformasi ekonomi terhadap sektor lain agar mampu menjadi penyokong ekonomi daerah selain sektor primer yang akan menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang. Selain mampu menciptakan nilai tambah dan produktivitas, transformasi juga didorong untuk mampu menciptakan peluang lapangan pekerjaan baru, menciptakan peluang usaha dan investasi baru, mendorong perluasan inovasi dan penggunaan teknologi terutama teknologi digital untuk mendorong tumbuhnya ekonomi. Selain itu, transformasi tersebut harus berwawasan lingkungan dan memperhatikan warisan terhadap generasi mendatang, dengan optimalisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru.

2. Pembangunan sosial dan kesenjangan sosial ekonomi.

SDM merupakan motor penggerak sekaligus objek pembangunan. Untuk itu, perbaikan kualitas SDM berfungsi sebagai *enabler* dan akselerator pembangunan, yang mendorong urgensi transformasi sosial melalui peningkatan partisipasi dan cakupan layanan pendidikan serta kapasitas dan status layanan kesehatan yang diharapkan akan mampu memutus rantai kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi karena akan meningkatkan daya beli dan meningkatkan perlindungan sosial. Selain itu SDM yang baik harus memiliki karakter yang baik, serta menjunjung tinggi norma agama dan budaya.

3. Pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik yang kolaboratif.

Birokrasi pemerintah dan institusi publik perlu terus didorong sehingga menjadi institusi yang inovatif, adaptif, serta efektif, tidak hanya dalam menghasilkan regulasi juga dalam hal pelayanan publik demi pelayanan yang prima. Pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan terus dioptimalkan.

Tata kelola keuangan juga didorong untuk berkualitas dan bermanfaat, baik dalam kapabilitas meningkatkan pendapatan maupun efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas dalam memanfaatkan anggaran belanja daerah. Rangkaian kondisi tersebut perlu dilakukan dengan cara transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional, serta berbasis penghargaan atas prestasi dan kontribusi nyata yang diberikan kepada aparat pemerintah daerah maupun masyarakat yang telah mengharumkan nama daerah melalui dedikasi, prestasi, dan inovasi.

4. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Tekanan ekologi akibat perubahan iklim dan manajemen kebencanaan akibat meningkatnya gas rumah kaca memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan karena dapat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekstrem dapat langsung berpengaruh pada ketersediaan pangan, kesehatan, bencana, serta aktivitas ekonomi lainnya. Untuk itu diperlukan rangkaian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan. Jika hal tersebut berhasil, daerah dapat mencapai kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana serta daerah yang berketahanan air, energi, dan pangan.

5. Sosial budaya lestari serta keamanan daerah tangguh.

Bukan hanya daerah secara wilayah administrasi yang harus memiliki ketahanan terhadap segala bentuk gangguan, juga termasuk aspek nonfisik daerah, seperti individu, keluarga, dan masyarakat. Ketangguhan dipupuk melalui pembangunan karakter dan budaya, serta dinaungi oleh nilai-nilai agama.

6. Infrastruktur dasar dan strategis berkualitas, serta pengembangan wilayah yang merata.

Infrastruktur pembangunan sebagai salah satu kebutuhan esensial untuk beraktivitas, kegiatan distribusi barang dan orang/ekonomi, dan pembangunan SDM. Kualitas infrastruktur yang tangguh akan sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya standar kehidupan masyarakat

dalam hal pemenuhan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau aspek lainnya, dan pembangunannya akan menjadi stimulus bagi lahirnya investasi fisik dan non-fisik, untuk itu pembangunan infrastruktur harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan masyarakat untuk maju dan berkembang sekaligus ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan infrastruktur didorong untuk dirasakan manfaatnya di seluruh kawasan sehingga masyarakat dapat menikmati secara adil dan taraf hidupnya secara bersama meningkat.



Bab

3

*Visi, Misi & Program
Prioritas Pembangunan
Daerah*

BAB III

VISI-MISI & PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI DAN MISI

3.1.1 Visi Misi Presiden-Wakil Presiden RI 2025-2029

Visi Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 sebagaimana yang dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra dan putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

 Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
ASTA CITA 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
ASTA CITA 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
ASTA CITA 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
ASTA CITA 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
ASTA CITA 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
ASTA CITA 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
ASTA CITA 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
ASTA CITA 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Pemerintahan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

3.1.2 Visi Misi Gubernur-Wakil Gubernur Gorontalo 2025-2029

Visi pembangunan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo periode tahun 2025-2029 sebagaimana yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, yaitu :

Visi :

“Gorontalo Maju dan Sejahtera”

Dengan 5 Misi pembangunan:



Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo terhadap Ibukota Nusantara untuk akselerasi pembangunan



Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia



Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat



Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas



Menjadikan “Adat bersendikan Syara’, Syara bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat

Berdasarkan Visi dan Misi dan tujuan sasaran Pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, maka program unggulan pembangunan Provinsi Gorontalo dititikberatkan pada :

1. **Peningkatan Sumber Daya Manusia** yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas layanan dan prasarana kesehatan yang inklusif, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penuntasan stunting, pembangunan keluarga, peningkatan peran pemuda, prestasi

- olahraga serta pemajuan adat dan budaya Gorontalo dengan prinsip falsafah "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah".
2. **Usaha Mikro Kecil Menengah**, yakni penguatan peran UMKM dalam memajukan basis ekonomi masyarakat dan daerah melalui peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM yang inklusif dengan pemanfaatan media digital.
 3. **Agro Maritim**, focus pada pertanian dan perikanan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil melalui penguatan hilirisasi. Pertanian akan dititikberatkan pada pengamanan ketahanan pangan secara nasional dengan potensi pertanian dan peternakan di provinsi Gorontalo. Sektor perikanan fokus pada peningkatan pendapatan nelayan khususnya pada perikanan tangkap dengan skema taksi nelayan.
 4. **Pariwisata**, menopang ekonomi daerah melalui revitalisasi dan pengembangan objek wisata potensial berstandar nasional dan internasional termasuk potensi Geopark Gorontalo.
 5. **Infrastruktur**, pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan konektivitas transportasi, penyediaan energi, air bersih, layanan teknologi informasi termasuk sarana prasarana di pedesaan dan kota dalam mendukung pengembangan wilayah secara adil, merata, serta berkelanjutan.

3.1.3 Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara 2025-2029

Sebagai tahapan lima tahunan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara periode 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 sangat penting karena menjadi pondasi bagi pencapaian Visi jangka panjang Gorontalo Utara: "Gorontalo Utara Maju, Sejahtera, Beradab, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa", yang bermisikan:

1. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien;

4. Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim;
5. Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas;
6. Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah.

serta berbagai sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Dengan memperhatikan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Visi-Misi Gubernur Provinsi Gorontalo 2025-2029, arahan RPJPD Gorontalo Utara 2025-2045, serta mempertimbangkan berbagai masalah strategis dan isu tantangan pembangunan, Visi Pembangunan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2025-2029 yaitu:



“Gorontalo Utara Bercahaya” merupakan pernyataan tekad dan arah strategis pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara periode 2025–2029. Kata “BERCAHAYA” tidak hanya menjadi simbol pencerahan pembangunan, juga mengandung makna transformasi struktural dan kultural menuju masyarakat yang tangguh, inklusif, dan bermartabat.

Tiga pilar utamanya Berdaya-Sinergis, CERIA, dan Berbudaya mewakili rangkaian nilai, tujuan, dan karakteristik masyarakat yang ingin diwujudkan: kuat dalam daya saing ditunjang oleh kolaborasi antar pihak, luhur dalam karakter, dan utuh dalam kesejahteraan. Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menopang secara fungsional dan filosofis: **berdaya-sinergis** sebagai pondasi produktivitas dan kemampuan menyelesaikan tantangan daerah, **CERIA** sebagai roh pembangunan manusia, dan **Berbudaya** sebagai jiwa, identitas, dan kerangka

acuan bagi seluruh proses pembangunan daerah, dengan penjelasan substansi filosofis sebagai berikut:

1. Berdaya-sinergis

Merupakan landasan utama dalam membangun masa depan Gorontalo Utara. Ia mencerminkan kemampuan daerah dan masyarakat bersaing secara sehat, inovatif, dan berkelanjutan dalam berbagai sektor, baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Makna filosofis dan strategis dari berdaya meliputi:

- Kemampuan memanfaatkan keunggulan lokal—seperti potensi kelautan, pertanian, pariwisata, dan energi terbarukan—sebagai kekuatan ekonomi daerah.
- Kesiapan terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi, perubahan iklim, dan globalisasi ekonomi.
- Kinerja pemerintahan yang adaptif, transparan, dan kolaboratif, serta didukung oleh tata kelola yang modern dan berbasis data.
- Produktivitas masyarakat dalam menciptakan nilai tambah serta kemandirian ekonomi keluarga dan komunitas.

Berdaya menjadi motor penggerak bagi transformasi daerah, dengan mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan inovasi yang menjadi prasyarat untuk mencapai kesejahteraan.

Sinergis

Mengandung makna bahwa pembangunan bukan hanya kerja satu pihak, melainkan kolaboratif dan terintegrasi. Filosofinya berakar dari semangat gotong royong, musyawarah mufakat, dan kebersamaan dalam harmoni. Untuk itu dibutuhkan keterpaduan antara Pemerintah Daerah-masyarakat, Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, antarorganisasi dan antar sektor.

2. CERIA

CERIA adalah abreviasi dari Cerdas, Empati, Ramah, Inovatif, dan Amanah. Konsep ini menjadi roh pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang

menopang daya saing dan mempercepat tercapainya kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Setiap unsur CERIA mewakili nilai-nilai dasar masyarakat Gorontalo Utara yang ingin ditumbuhkan dan dijaga:

- Cerdas: Menumbuhkan kecakapan berpikir kritis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan vokasional masyarakat.
- Empati: Menumbuhkan rasa peduli, solidaritas sosial, dan perhatian terhadap kelompok rentan, memastikan pembangunan inklusif dan berpihak.
- Ramah: Mencerminkan budaya lokal yang terbuka, santun, dan mendukung kohesi sosial—penting untuk pariwisata dan investasi.
- Inovatif: Mendorong kreativitas dan keberanian mencoba solusi baru dalam pelayanan publik, ekonomi kreatif, hingga teknologi tepat guna.
- Amanah: Menanamkan integritas dan tanggung jawab moral, terutama bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaku pembangunan.

CERIA bukan sekadar nilai etis, tetapi penguat budaya kerja dan etos sosial yang menjadi jembatan antara daya saing dan kesejahteraan. Tanpa karakter CERIA, daya saing menjadi kering dan kesejahteraan menjadi semu.

3. Berbudaya

Berbudaya berarti menjadikan nilai-nilai luhur kearifan lokal dan identitas daerah sebagai jiwa dan pedoman dalam seluruh proses pembangunan, sehingga kemajuan yang dicapai tidak hanya bersifat material tetapi juga bermartabat dan berkarakter.

kata "Berbudaya" memiliki arti yang lebih mendalam daripada sekadar "memiliki budaya". Maknanya mencakup:

- Berlandaskan Nilai Luhur: Setiap pembangunan dan kebijakan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, dan filosofi hidup masyarakat Gorontalo Utara yang luhur (seperti nilai "Huyula", "Adati", dan "Sara").
- Memiliki Identitas yang Kuat: Masyarakat yang dibangun bukan hanya sejahtera secara materiil, tetapi juga memiliki jati diri yang kuat, bangga

akan budayanya, dan menjadikan budaya sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak.

- Berperilaku dan Bermartabat: "Berbudaya" mengacu pada terwujudnya masyarakat yang beradab, santun, menghargai warisan leluhur, dan menerapkannya dalam kehidupan sosial sehari-hari untuk menciptakan tata kehidupan yang harmonis
- Budaya sebagai Penggerak Pembangunan: Kebudayaan tidak dilihat sebagai objek pasif, tetapi sebagai modal sosial dan spirit yang aktif memandu arah pembangunan agar berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan karakter daerah.

Sehingga "Gorontalo Utara Bercahaya" bukan sekadar slogan, juga komitmen etis, strategis, dan teknokratis yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. BERCAHAYA menjadi kompas hari ini dan simbol masa depan Gorontalo Utara untuk membangun masyarakat yang unggul dan berkarakter, dengan nilai-nilai CERIA sebagai jiwa pembangunan, kuat dalam ekonomi dan daya saing, dan adil dalam kemakmuran sebagai tujuan akhir pembangunan.

Guna mendukung Visi Indonesia Emas 2045, Visi Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 diselaraskan, diukur, dan menjadi bagian dari Sasaran Visi Indonesia 2045. Dalam konteks Gorontalo Utara, Sasaran Visinya diselaraskan dengan Sasaran Visi Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2045, sebagaimana Tabel 3.1, dan kemudian diterjemahkan dalam target lima tahunan periode 1 (Tabel 3.2).

Tabel 3.1
Sasaran Visi Gorontalo Utara Tahun 2045

No.	RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045				RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita mendukung pendapatan negara setara negara maju	PDRB per kapita (Rpjuta)	46,05-46,25	177,62-223,84	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB ADHB per kapita (Rpjuta)	34,45-35,90	64,45-80,91
		Indeks ekonomi biru Indonesia	39,03	69,53		-	-	-
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	4,42-5,92	6,00-7,14		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1,82-1,87	2,61-3,10
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	14,21-14,50	0,10-1,10	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Persentase penduduk miskin (%)	16,85-16,25	11,50-9,75
		Rasio gini (indeks)	0,394-0,400	0,349-0,400		Rasio gini (poin)	0,411-0,420	0,349-0,400
		Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional (%)	0,25	0,18		Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo (%)	8,10	8,17-8,20
		Pertumbuhan	5,23-5,46	5,54-7,18		Pertumbuhan	4,51-5,21	5,65-6,25

RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045					RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045				
No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	
		ekonomi (%)				ekonomi (%)			
3	Meningkatkan peran daerah dalam skala regional dan nasional	Indeks daya saing daerah (poin)	3,15	4,5-5,0	Peningkatan daya saing daerah	Indeks daya saing daerah (poin)	2,75-2,85	3,50-3,85	
						Indeks inovasi daerah (poin)	41,30-41,75	60,00-62,50	
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks modal manusia (poin)	0,50	0,66	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia (poin)	68,10-68,25	72,25-73,00	
5	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	59,58	98,77	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	59,58	75,00	
		Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	81,48	87,77		Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	75,90-76,00	75,00-80,00	

Sumber: RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045

Tabel 3.2
Target Sasaran Visi RPJPD 2025-2045 Periode I

No.	Sasaran Visi Jangka Panjang	Indikator Sasaran Visi	Satuan	Baseline 2025	Target Periode I (2029)
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB ADHB per kapita	Rpjuta	34,45-35,90	37,4
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,82-1,87	1,90
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Persentase penduduk miskin	Persen	16,85-16,25	15,98
		Rasio gini	Poin	0,411-0,420	0,4074
		Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo	Persen	8,10	8,10
		Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,51-5,21	5,30
3	Peningkatan daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Poin	2,75-2,85	2,8875
		Indeks inovasi daerah	Poin	41,30-41,75	42,69
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia	Poin	68,10-68,25	68,45
5	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	59,58	60,35
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	75,90-76,00	75,00-80,00

Sumber: RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan, ditetapkan Misi Pembangunan yang disebut sebagai 5 Cita Thariq-Nurjana:



Memajukan kualitas tatakelola reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan budaya produktif dan inovatif



Meningkatkan kualitas hidup yang bertumpu pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan, ditunjang SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai



Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara signifikan melalui pengembangan potensi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan mudah demi penguatan kapasitas fiskal daerah



Memperkuat konektivitas, infrastruktur yang berdaya saing, dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan penyangga Ibukota Nusantara (IKN) dan wilayah maritim utara Indonesia



Mengembangkan budaya, kualitas lingkungan hidup, memajukan kehidupan sosial yang layak dan aman, serta melestarikan budaya luhur yang hidup dalam masyarakat

Tabel 3.3
Persandingan Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi RPJMD 2025-2029

No.	*Misi Jangka Panjang	Misi Jangka Menengah
1	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara signifikan melalui pengembangan potensi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan mudah demi penguatan kapasitas fiskal daerah
2	Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatkan kualitas hidup yang bertumpu pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan, ditunjang SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Memajukan kualitas tatakelola reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan budaya produktif dan inovatif
4	Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim	Mengembangkan kualitas lingkungan hidup, memajukan kehidupan sosial yang layak dan aman, serta melestarikan budaya luhur yang hidup dalam masyarakat
5	Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas	Memperkuat konektivitas, infrastruktur yang berdaya saing, dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan penyangga Ibukota Nusantara (IKN) dan wilayah maritim utara Indonesia
6	Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah	Mengembangkan budaya, kualitas lingkungan hidup, memajukan kehidupan sosial yang layak dan aman, serta melestarikan budaya luhur yang hidup dalam masyarakat

*Sumber: RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi-misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Gorontalo Utara yang merepresentasikan keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan Bupati-Wakil Bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator



kinerja sasaran RPJMD.

Gambar 3.1 Linieritas Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Gorontalo Utara. Gambaran *cascading* diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator

keberhasilan yang melekat di dalamnya. Masing-masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program-program pembangunan daerah untuk mendorong pencapaian sasaran daerah.

Tabel 3.4
Rumusan Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Gorontalo Utara BERCAHAYA	Memajukan kualitas tatakelola reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan budaya produktif dan inovatif	Tata kelola pemerintahan yang disiplin, berintegritas tinggi, dan tanggap didukung dengan inovasi sistem pemerintahan	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas didukung dengan inovasi dan penerapan e-government meningkat
			Kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan masyarakat meningkat
			Pengembangan ekosistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah meningkat
Berdaya- Sinergis	Meningkatkan kualitas hidup yang bertumpu pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan, ditunjang SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai	SDM Gorontalo Utara sehat, cerdas, kompetitif, dan adaptif dengan perubahan teknologi dan globalisasi	Kualitas pendidikan dan literasi masyarakat meningkat secara merata
			Derajat dan sistem kesehatan masyarakat meningkat
			Tingkat pengangguran berkurang
CERIA	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara signifikan melalui pengembangan potensi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan mudah demi penguatan kapasitas fiskal daerah	Tercipta perlindungan atas kehidupan layak yang adil berkualitas dan kemiskinan terentaskan	Cakupan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang inklusif meningkat dan berkualitas
			Pengentasan kemiskinan semakin baik dan ketimpangan berkurang
			Produktivitas perekonomian daerah yang ditopang daya saing dan kontribusi industri, perdagangan, investasi, dan ekonomi kreatif meningkat
Berbudaya	Memperkuat konektivitas, infrastruktur yang berdaya saing, dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan penyangga Ibukota Nusantara (IKN) dan wilayah maritim utara Indonesia	Pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, kontributif terhadap ekonomi regional, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ditunjang oleh kemandirian pangan	Kesinambungan fiskal terwujud dan kemandirian daerah meningkat
			Pemerataan pembangunan daerah dimulai dari desa
			Ketersediaan pangan meningkat
Berbudaya	Mengembangkan budaya, kualitas lingkungan hidup, memajukan kehidupan sosial yang layak dan aman, serta melestarikan budaya luhur yang hidup dalam masyarakat	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatnya konektivitas antar daerah dan layanan infrastruktur dasar
			Meningkatnya infrastruktur dasar, kelembagaan dan ekonomi desa di Kawasan Transmigrasi Sumalata
			Kualitas kesehatan lingkungan meningkat
Berbudaya	Pengelolaan ruang wilayah dengan lingkungan sehat, adaptif, dan berkelanjutan	Hak anak, keluarga, dan masyarakat terpenuhi secara berkualitas	Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim
			Cakupan program responsif dan pemenuhan kesetaraan gender, kualitas dan ketahanan keluarga, serta pemenuhan hak-hak anak meningkat
			Apresiasi, pengembangan, dan pelestarian cagar dan budaya daerah meningkat
Berbudaya	Nilai kearifan lokal dan budaya sebagai identitas daerah berkembang dan lestari	Kondusivitas, keamanan, dan ketertiban daerah tercipta	Keamanan umum, kohesi sosial, kerukunan agama, ras, maupun kelompok masyarakat terwujud

Tabel 3.5
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Daerah 2025-2030

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Gorontalo Utara Bercahaya (Berdaya Sinergis, Ceria, dan Berbudaya) - Memajukan kualitas tatakelola reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan budaya produktif dan inovatif	Tata kelola pemerintahan yang disiplin, berintegritas tinggi, dan tanggap didukung dengan inovasi sistem pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	69,00	71,12	73,04	74,06	74,50	75,00	
		Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas didukung dengan inovasi dan penerapan e-government meningkat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,90	2,92	2,95	2,97	2,99	3,00	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
			Skor EPPD (Angka)	3,015	3,092	3,167	3,246	3,323	3,4	
			Indeks Integritas (Poin)	69,00	71,20	73,40	75,60	77,80	80,00	
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,105	3,184	3,263	3,342	3,421	3,500	
			Nilai MCSP (Monitoring, Controlling & Surveillance for Prevention) (%)	71,25	73,00	74,75	76,50	78,25	80,00	
		Kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan masyarakat meningkat	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,70	3,75	3,83	3,87	3,95	4,01	
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,50	79,30	80,10	80,90	81,80	82,70	
		Pengembangan ekosistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah meningkat	Indeks inovasi daerah (poin)	48,65	51,15	56,45	58,67	61,15	63,00	
Meningkatkan kualitas hidup yang bertumpu pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan, ditunjang SDM yang berkualitas	SDM Gorontalo Utara sehat, cerdas, kompetitif, dan adaptif dengan perubahan teknologi dan globalisasi		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,62	69,85	70,09	70,31	70,45	70,57	
		Kualitas pendidikan dan literasi masyarakat meningkat secara merata	Indeks pendidikan (Poin)	9,97	9,99	10,02	10,04	10,06	10,10	
			Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	72,25	72,90	73,10	73,15	73,25	73,50	
		Derajat dan sistem kesehatan masyarakat meningkat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	76,93	76,94	76,95	76,96	76,97	76,98	
			Prevalensi Stunting (%)	23,67	21,74	19,81	17,88	15,95	14,00	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
dan sarana prasarana yang memadai	Tercipta perlindungan atas kehidupan layak yang adil berkualitas dan kemiskinan terentaskan	Tingkat pengangguran berkurang	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05	3,03	3,01	2,98	2,95	2,93	
			Tingkat kemiskinan (%)	15,89	15,57	14,96	14,37	13,81	13,27	
		Cakupan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang inklusif meningkat dan berkualitas	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98,00	98,50	98,80	98,90	99,00	99,00	
			Persentase rumah tangga yang menerima Program Keluarga Harapan (%)	30,30	29,10	27,80	26,50	25,20	24,00	
			Persentase rumah tangga yang menerima program bantuan pangan (%)	39,20	37,40	35,60	33,80	32,00	30,20	
		Pengentasan kemiskinan semakin baik dan ketimpangan berkurang	Rasio Gini (Indeks)	0,4200	0,4115	0,4104	0,4090	0,4085	0,4074	
			Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah)	10.950	11.520	12.120	12.750	13.410	14.110	
			Indeks kedalaman kemiskinan (Poin)	3,25	3,10	2,95	2,80	2,65	2,50	
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara signifikan melalui pengembangan potensi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan mudah demi penguatan kapasitas fiskal daerah	Pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, kontributif terhadap ekonomi regional, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ditunjang oleh kemandirian pangan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,20	5,22	5,24	5,26	5,27	
			PDRB per kapita (Ribu Rupiah)	33.566,65	34.385,30	34.938,23	35.337,48	36.243,48	37.400,00	
		Produktivitas perekonomian daerah yang ditopang daya saing dan kontribusi industri, perdagangan, investasi, dan ekonomi kreatif meningkat	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	1,80	1,81	1,82	1,86	1,88	1,90	
			Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	10,97	11,05	11,10	11,25	11,30	11,38	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	17,75	18,10	18,45	18,75	19,10	19,50	
			Akselerasi pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	2,60	3,15	3,70	4,20	4,60	5,00	
			Return on Asset (ROA) BUMD (%)	-5,00	-2,50	0,00	1,00	2,00	2,50	
			Indeks masyarakat digital (Indeks)	40,02	41,35	42,64	43,75	45,56	47,95	
			Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	525,21	548,84	574,64	602,22	632,23	665,85	
		Kesinambungan fiskal terwujud dan kemandirian daerah meningkat	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0,22	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	
			Indeks kemandirian fiskal (%)	4,90	5,02	5,10	5,28	5,33	5,46	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan (%)	93,50	92,80	92,00	91,00	89,50	88,00	
		Pemerataan pembangunan daerah dimulai dari desa	Persentase Desa Mandiri (%)	41,95	44,88	48,78	52,68	58,54	63,41	
		Ketersediaan pangan meningkat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	79,26	79,66	80,05	80,45	80,86	81,26	
Memperkuat konektivitas, infrastruktur yang berdaya saing, dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan penyangga Ibukota Nusantara (IKN) dan wilayah maritim utara Indonesia	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	65,00	67,00	69,00	70,00	72,00	74,00	
			Indeks transformasi kawasan transmigrasi (Poin)	0,645	0,657	0,675	0,685	0,695	0,705	
		Meningkatnya konektivitas antar daerah dan layanan infrastruktur dasar	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan (%)	73,54	73,98	74,34	74,93	75,45	75,88	
		Meningkatnya infrastruktur dasar, kelembagaan dan ekonomi desa di Kawasan Transmigrasi Sumalata	Persentase desa di kawasan transmigrasi berstatus mandiri (%)	34,96	37,40	40,65	43,90	48,78	52,85	
Mengembangkan budaya, kualitas lingkungan hidup, memajukan kehidupan sosial yang layak dan aman, serta melestarikan budaya luhur yang hidup dalam masyarakat	Pengelolaan ruang wilayah dengan lingkungan sehat, adaptif, dan berkelanjutan		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	123,05	122,06	121,08	120,11	119,14	118,18	
		Kualitas kesehatan lingkungan meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	79,10	79,27	79,44	79,62	79,79	79,92	
		Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,37	0,40	0,42	0,45	0,47	0,50	
	Hak anak, keluarga, dan masyarakat terpenuhi secara berkualitas		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	60,32	62,35	64,34	66,56	68,23	70,01	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	83,67	85,27	87,57	89,34	91,54	92,50	
		Cakupan program responsif dan pemenuhan kesetaraan gender, kualitas dan ketahanan keluarga, serta	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,173	0,168	0,163	0,158	0,153	0,148	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	58,15	58,22	58,34	58,71	59,03	59,14	
			Indeks kualitas keluarga (%)	79,75	81,25	81,75	82,50	83,75	84,25	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		pemenuhan hak-hak anak meningkat								
	Nilai kearifan lokal dan budaya sebagai identitas daerah berkembang dan lestari		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	54,45	55,76	56,98	57,78	58,67	60,05	
		Apresiasi, pengembangan, dan pelestarian cagar dan budaya daerah meningkat	Persentase cagar budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi Gorontalo (%)	50,00	50,00	62,5	62,5	75,00	75,00	
			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)	0,90	0,99	0,99	1,08	1,17	1,27	
	Kondusivitas, keamanan, dan ketertiban daerah tercipta		Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk (poin)	157	155	153	151	149	147	
		Keamanan umum, kohesi sosial, kerukunan agama, ras, maupun kelompok masyarakat terwujud	Angka Kejadian Konflik Ideologi , Politik , Ekonomi , Sosial Budaya , Pertahanan Dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) (Angka)	1	1	1	1	1	1	

3.3 PROGRAM UNGGULAN DAERAH

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dirancang secara komprehensif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang mencakup berbagai sektor strategis. Program-program ini merupakan inisiatif pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, penyediaan layanan dasar berkualitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, UMKM dan koperasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi pelayanan publik. Keseluruhan program ini sejalan dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, sekaligus bersinergis dengan program unggulan Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten demi terwujudnya Visi Gorontalo Utara BERCAHAYA (Berdaya-Sinergis, CERIA, Berbudaya).

1. G2-10 PLUS (Gerakan 2 Kambing 10 Ayam dan Sapi)

Gerakan 2 Kambing 10 Ayam dan Sapi (G2-10 Plus) merupakan inovasi unggulan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang dirancang untuk menyediakan pangan hewani yang aman dan cukup, menciptakan pendapatan serta kesempatan kerja, dan mendukung sistem pengembangan peternakan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak. Strategi utama program ini mencakup peningkatan kualitas bibit ternak, produktivitas, status kesehatan hewan, dan akses pasar, serta pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil ternak.

Program G2-10 Plus hadir sebagai solusi konkret dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah keterbatasan fiskal daerah dengan melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk investor skala kecil maupun besar di sektor peternakan. Kolaborasi usaha sapi turut memperkuat inisiatif ini dengan mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Peran BUMDes/BUMDesma sangat strategis dalam menggerakkan ekonomi

masyarakat berbasis peternakan, menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Ke depan, pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Gorontalo Utara didesain berbasis produk-produk hasil peternakan halal, yang menjadi potensi unggulan daerah. Di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, telah dikembangkan fasilitas *holding hround* (HG) seluas 1,5 hektare sebagai terminal sementara pelayanan karantina ternak sebelum diperdagangkan antar pulau, sekaligus mendukung peluang ekspor produk olahan peternakan ke pasar luar negeri. Selain itu, rencana pembangunan *ranch* seluas 700 hektare di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, disinergikan dengan program unggulan Provinsi Gorontalo untuk pengembangan ternak sapi potong. Sementara *mini ranch* di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, difokuskan untuk pengembangan ternak kambing dan ayam.

Infrastruktur pendukung peternakan juga semakin lengkap, meliputi Puskesmas di Kecamatan Tolinggula, Sumalata Timur, Kwandang, dan Atinggola, masing-masing dengan dokter hewan aktif. Selain itu, tersedia pos inseminasi buatan (IB) di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, dengan layanan mobile ke seluruh kecamatan. Fasilitas pemotongan hewan terdiri dari 12 unit Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang tersebar di beberapa kecamatan, RPH unggas dan RPH ruminansia di Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, serta Unit Pengelola Pakan Organik (UPO) sebanyak tiga unit di Atinggola, Tomilito, dan Kwandang.

Melalui pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan kelompok peternak, G2-10 Plus tidak hanya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani dan pencegahan stunting sesuai fokus RPJMN 2025–2029, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat. Inovasi daerah ini menjadi model pemberdayaan masyarakat yang adaptif dan mudah direplikasi, memperkuat ketahanan pangan sesuai dengan prioritas nasional yaitu meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *nexus* pangan yakni keterkaitan antara ketahanan pangan dengan sumber daya lain terutama energi

dan air yang menjadi pencapaian target indikator indeks ketahanan pangan nasional, demi terwujudnya swasembada protein hewani nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

2. GAM (Gerakan Agro Mopomulo)

Program unggulan "Gerakan Agro Mopomulo" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan manifestasi nyata implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2025-2029, dimana program ini tidak hanya mencerminkan komitmen lokal terhadap pembangunan pertanian, tetapi juga berkontribusi strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui dukungan langsung terhadap Asta Cita kedua Presiden Prabowo-Gibran yang "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan" serta tujuan nasional untuk "mencapai kemandirian energi, pangan, dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia". Konsep "Agro Mopomulo" dalam program ini mengadopsi pendekatan "modernisasi pertanian, berkelanjutan" yang menjadi arah kebijakan nasional, tidak hanya fokus pada peningkatan produksi tetapi juga transformasi pola pikir dan metode bertani menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan, sejalan dengan fokus RPJMN untuk "mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif" yang memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan dan mendukung agenda nasional mengenai "penguatan logistik komoditas pangan dan pertanian, pengendalian inflasi pangan bergejolak, dan kemandirian pangan". Melalui Gerakan Menanam ini, Kabupaten Gorontalo Utara turut berkontribusi dalam pencapaian target nasional "penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan", Penanganan Lahan kritis untuk mengurangi resiko dan dampak buruk dari suatu bencana serta Pengendalian Inflasi, menjadikan program ini sebagai model replikasi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan komitmen nasional di tingkat lokal dan membuktikan bahwa pembangunan nasional dapat dimulai dari inisiatif lokal yang terstruktur

dan berkelanjutan sebagai bagian dari ekosistem mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia menuju kemandirian pangan dan kemakmuran rakyat.

3. **Motabi Kambungu/Rindu Kampung (Model Pelayanan Terpadu ke Pelosok-Pelosok Kampung)**

Program unggulan "Motabi Kambungu" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan inovasi pelayanan publik yang menggabungkan kearifan lokal dengan standar global dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif, dimana Motabi Kambungu yang bermakna Rindu Kampung Halaman, merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan kemasyarakatan dengan cara mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat sebagai solusi untuk menjawab setiap persoalan di tengah-tengah masyarakat yang sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita ketujuh tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Program ini mengadopsi pendekatan holistik dengan melibatkan semua *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Gorontalo Utara melalui sisi pelayanan yang memang dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merefleksikan program yang sangat nampak jelas, hendak mewujudkan dan mentransformasikan tatanan nilai yang berwawasan global, diantaranya *good governance*, pelayanan publik, *civil society* dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal yang memiliki ruang yang bersifat adaptatif yang mampu menyerap budaya dari daerah atau bangsa lain yang selanjutnya akan melahirkan tatanan nilai yang bersifat kolaboratif yang akan terus bertransformasi menjadi sumber kekuatan yang prospektif, sehingga program "Motabi Kambungu" menjadi manifestasi nyata dari transformasi pelayanan publik yang mengedepankan aksesibilitas, responsivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan governance di tingkat lokal yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur daerah.

4. UMKM Bercahaya

Program unggulan "UMKM Bercahaya" Gorontalo Utara merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya mendukung implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita ketiga yang bertujuan "meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur" tetapi juga memperkuat program unggulan Provinsi Gorontalo "Usaha Mikro Kecil Menengah" dalam mencapai sinergi pembangunan ekonomi multi-level yang sejalan dengan prioritas nasional untuk "mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif" dalam mewujudkan target RPJMN berupa "penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 4,5-5% pada 2029, serta pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan". Program ini mengadopsi pendekatan holistik pemberdayaan ekonomi kreatif sesuai arahan nasional yang menempatkan "pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi digital" sebagai sektor produktif sumber pertumbuhan inovatif, tidak hanya fokus pada permodalan tetapi juga "pengembangan kewirausahaan yang ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)" serta mendorong "pertumbuhan industri kreatif" untuk "mendukung empat target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk sektor ekraf: kontribusi ke PDB, ekspor, investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas", sehingga melalui konsep "Bercahaya" yang mencerminkan transformasi UMKM menuju keunggulan dan daya saing, program ini menjadi manifestasi nyata sinergi pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

5. Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

Program unggulan "Perikanan (Tangkap dan Budidaya)" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan pilar utama pembangunan ekonomi kelautan daerah yang mengintegrasikan potensi sumber daya perikanan dengan arah kebijakan nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini mendukung visi nasional

mewujudkan swasembada pangan melalui konsep “Pangan Biru” dan “Pangan Akuatik”, yakni pengembangan sumber pangan yang berasal dari perairan laut, danau, dan sungai yang mencakup ikan, rumput laut, kerang, dan alga dari kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya. Konsep ini menekankan pentingnya sektor kelautan sebagai salah satu tumpuan utama ketahanan pangan nasional, sekaligus upaya konkret dalam mengoptimalkan potensi ekonomi maritim berkelanjutan di daerah.

Selain mendukung kebijakan nasional tersebut, program ini juga memperkuat sinergi dengan program unggulan Provinsi Gorontalo “Agro Maritim”, yang berfokus pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Implementasi program ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru, yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya laut serta mendorong pengembangan industri hilir hasil perikanan.

Dalam konteks pengembangan wilayah, Kecamatan Anggrek memiliki peran yang sangat strategis. Kawasan ini tidak hanya ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pangan (KSP) yang mengintegrasikan kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas, dan pergudangan, tetapi juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK Anggrek berfokus pada pengembangan industri berbasis logistik, energi, dan maritim, yang diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat konektivitas ekonomi kelautan, memperluas investasi, serta mendorong hilirisasi hasil perikanan dan industri turunan berbasis sumber daya laut. Keberadaan KEK ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan demikian, program Perikanan (Tangkap dan Budidaya) tidak hanya berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas, dan efisiensi sektor kelautan, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari sinergi pembangunan nasional–provinsi–kabupaten. Melalui integrasi konsep Pangan Biru, Pangan Akuatik, dan Ekonomi Biru, serta penguatan kawasan strategis

seperti KEK Anggrek, program ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

6. Pariwisata (alam, budaya, religi, buatan)

Program unggulan "Pariwisata (Alam, Budaya, Religi, Buatan)" Gorontalo Utara menjadi motor penggerak transformasi ekonomi kreatif yang sejalan dengan arah pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 dan terintegrasi dengan program unggulan Provinsi Gorontalo "Pariwisata" dalam menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mendukung ekonomi kreatif berperan strategis dalam mewujudkan berbagai program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan serta mengimplementasikan prioritas nasional "pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif" sebagai sektor produktif sumber pertumbuhan inovatif yang menetapkan arah kebijakan pembangunan wilayah Indonesia dengan fokus pada ekonomi kreatif pariwisata dan hilirisasi industri. Program ini mengusung konsep pariwisata holistik yang mengintegrasikan potensi alam, kekayaan budaya lokal, nilai-nilai religi, dan inovasi wisata buatan dalam "program pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual" yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga "menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan program pembangunan yang berfokus pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan" sesuai arahan Asta Cita ketiga untuk "meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif", sehingga program "Pariwisata (Alam, Budaya, Religi, Buatan)" mewujudkan sinergi pembangunan pariwisata berkelanjutan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten yang berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan destinasi wisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat global.

7. Jaminan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian

Program unggulan "Jaminan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wujud komitmen daerah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan, selaras dengan implementasi RPJMN 2025-2029 yang menekankan pentingnya pemerataan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit dan penguatan ketahanan perbekalan kesehatan serta terintegrasi dengan program unggulan Provinsi Gorontalo "Peningkatan Sumber Daya Manusia" untuk menciptakan sinergi pembangunan SDM yang menyeluruh melalui jaminan perlindungan sosial yang memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan sebagai bagian dari tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Program ini mengadopsi pendekatan holistik dalam mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk menjadi prioritas yang sejalan dengan Asta Cita keempat tentang memperkuat manajemen dan peningkatan kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial dan kolaborasi integrasi Kemnaker-Kemensos sesuai Asta Cita 3 dan 4 Presiden Prabowo Subianto, dapat dilakukan dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan; dan peningkatan kualitas SDM, sehingga program "Jaminan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian" menjadi fondasi perlindungan sosial yang mengintegrasikan pembangunan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi menuju visi Indonesia Emas 2045.

8. Rumah Sehat dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Program unggulan "Rumah Sehat dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" Kabupaten Gorontalo Utara hadir sebagai instrumen transformatif pengentasan kemiskinan yang mengintegrasikan pendekatan holistik pembangunan perumahan dengan target nasional RPJMN 2025-2029 untuk penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem menjadi 0

persen pada 2026 sekaligus mendukung misi Provinsi Gorontalo "Melakukan Akselerasi Agar Gorontalo Keluar Dari Lima Provinsi Termiskin di Indonesia" dengan pemahaman bahwa kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial serta konsep bahwa "rumah adalah titik awal perubahan ekonomi masyarakat miskin" karena "salah satu cara menghilangkan kemiskinan adalah memberikan orang itu jaminan aset". Program ini mengadopsi strategi terintegrasi yang mensinergikan pembangunan rumah layak huni dengan program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan melengkapi upaya kerangka besar RPJMN 2025-2029 ialah menghapuskan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan yang memastikan "keluarga miskin ekstrem akan dibangun rumah layak huni" dengan prinsip "jangan sampai anak sudah dibekali masa depan, tapi pulang ke rumah tak layak huni", sehingga program "Rumah Sehat dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" menjadi katalis percepatan pembangunan yang menyelaraskan upaya daerah dengan komitmen nasional dan provinsi dalam memutus mata rantai kemiskinan menuju visi Indonesia Emas 2045.

9. Pendidikan “Gratis-Berkualitas” & Bantuan Studi/Beasiswa

Program unggulan "Pendidikan 'Gratis-Berkualitas' & Bantuan Studi/Beasiswa" Kabupaten Gorontalo Utara menjadi fondasi strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengintegrasikan visi pendidikan nasional dengan komitmen RPJMN 2025-2029 untuk penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sekaligus bersinergis dengan program unggulan Provinsi Gorontalo "Peningkatan Sumber Daya Manusia" dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang sejalan dengan komitmen Asta Cita keempat tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul

di Indonesia dengan menghadirkan pendidikan berkualitas serta implementasi kebijakan nasional yang mewajibkan sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri untuk memberikan beasiswa kepada atlet, minimal 5 persen dari total daya tampung dan mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas. Program ini mengusung konsep pendidikan inklusif yang menghilangkan hambatan finansial melalui kebijakan "gratis-berkualitas" yang tidak hanya memastikan akses pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya tetapi juga memberikan bantuan studi dan beasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berjanji memperkuat pembangunan SDM dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan fundamental negara, sehingga program "Pendidikan 'Gratis-Berkualitas' & Bantuan Studi/Beasiswa" mewujudkan sinergi pembangunan pendidikan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten yang berkontribusi dalam mencetak generasi unggul dan kompetitif menuju visi Indonesia Emas 2045.

10. Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga, Seni, Budaya Lokal & Keagamaan

Program unggulan "Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga, Seni, Budaya Lokal & Keagamaan" Kabupaten Gorontalo Utara mewujudkan visi pembangunan karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan agama, sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita sebagai Prioritas Nasional yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden terutama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas serta bersinergis dengan program unggulan Provinsi Gorontalo "Menjadikan Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah Sebagai Spirit Pembangunan Dan Kehidupan Masyarakat" yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Program ini mengadopsi pendekatan holistik yang menjadikan pemuda Indonesia sebagai pilar utama bangsa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global melalui pemberdayaan kepemudaan yang tidak hanya fokus pada aspek fisik dan kreativitas tetapi juga

penguatan karakter berbasis nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan, sejalan dengan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya yang menjadi bagian dari Asta Cita kedelapan, sehingga program "Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga, Seni, Budaya Lokal & Keagamaan" menjadi manifestasi nyata integrasi pembangunan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten yang memadukan modernisasi dengan pelestarian jati diri bangsa dalam mewujudkan generasi muda yang unggul, berakarakter, dan berakhlak mulia menuju visi Indonesia Emas 2045.

11. Tolopani Awards (Penghargaan tertinggi bagi aparat dan masyarakat Gorontalo Utara yang mengharumkan nama daerah)

Program Nasional Reformasi Birokrasi 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima guna meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas dengan pendekatan *human-based* yang berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung pencapaian program nasional tersebut, Kabupaten Gorontalo Utara menginisiasi program unggulan "Tolopani Awards" sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasi dan kontribusi nyata dalam berbagai bidang. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan apresiasi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis prestasi, meningkatkan motivasi kerja, serta menumbuhkan budaya inovatif dan berintegritas di seluruh lapisan masyarakat. Program ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengutamakan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Tolopani Awards. Pertama, sistem penghargaan yang ada belum sepenuhnya optimal dan terintegrasi secara standar, sehingga penilaian prestasi dan inovasi belum dilakukan secara menyeluruh dan terukur. Berikut, partisipasi perangkat daerah masih belum merata, karena tidak semua instansi aktif dalam

mendorong inovasi dan mengusulkan kandidat penerima penghargaan. selanjutnya, dokumentasi dan publikasi prestasi daerah masih terbatas, sehingga belum memberikan dampak motivasi dan promosi yang luas. Terakhir, budaya apresiasi dan kinerja berbasis inovasi masih perlu diperkuat baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat, agar tercipta ekosistem kerja yang kompetitif, kreatif, dan berorientasi hasil. Isu-isu ini menjadi dasar penting dalam penyempurnaan pelaksanaan program Tolopani Awards ke depan agar lebih objektif, transparan, dan berkelanjutan.

12. Koperasi, Ekonomi Kreatif, Skill Milenial/Gen Z (Start-Up, AI, dll)

Program unggulan "Koperasi, Ekonomi Kreatif, Skill Milenial/Gen Z (Start-Up, AI, dll)" Kabupaten Gorontalo Utara hadir sebagai katalis transformasi digital yang mensinergikan potensi generasi muda dengan kekuatan ekonomi kerakyatan, sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita ketiga yang bertujuan "melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi" sekaligus bersinergis dengan program unggulan Provinsi Gorontalo "UMKM" dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi digital yang memahami bahwa "Milenial dan Gen Z adalah generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang penuh kreativitas dan memiliki semangat wirausaha yang tinggi" dan "ekonomi kreatif sebagai pintu masuk kaum milenial penggerak inovasi". Program ini mengadopsi pendekatan inovatif yang mengintegrasikan model koperasi digital dengan kebutuhan generasi milenial dan Gen Z yang memerlukan "koperasi perlu berinovasi untuk berintegrasi dengan budaya dan lingkungan milenial. Kebiasaan generasi-generasi masa kini perlu dipelajari dan disesuaikan agar koperasi tidak dilihat sebagai perusahaan yang hanya ada di masa lampau" serta mendorong "dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas, generasi milenial dan Gen Z dapat memulai berbagai usaha dengan modal kecil" melalui pengembangan skill digital seperti start-up dan AI yang didukung "optimasi penegakan hukum

kekayaan intelektual berorientasi restorative justice, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif" sebagai bagian dari tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga program "Koperasi, Ekonomi Kreatif, Skill Milenial/Gen Z (Start-Up, AI, dll)" menjadi jembatan transformasi ekonomi digital yang menghubungkan kearifan lokal koperasi dengan inovasi teknologi generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045.

13. Penataan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (Pontolo, Taman Rakyat, Kawasan Perkantoran Blok Plan)

Program unggulan "Penataan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (Pontolo, Taman Rakyat, Kawasan Perkantoran Blok Plan)" Kabupaten Gorontalo Utara menghadirkan konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan lingkungan dalam mendukung implementasi RPJMN 2025-2029 sebagai wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden terutama dalam mewujudkan infrastruktur yang mendukung tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sekaligus bersinergis dengan program unggulan Provinsi Gorontalo "Infrastruktur" dalam memperkuat konektivitas dan aksesibilitas pembangunan wilayah yang menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan RPJMD provinsi/kabupaten/kota se-Sulawesi, dengan pendekatan penataan ruang sebagai instrumen utama integrasi pembangunan pusat dan daerah. Program ini mengusung konsep penataan infrastruktur perkotaan yang holistik melalui pengembangan kawasan Pontolo sebagai pusat kegiatan ekonomi, pembangunan Taman Rakyat sebagai ruang publik hijau yang memahami bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan saat ini semakin dibutuhkan. Hal ini terkait dengan pentingnya keberadaan RTH dalam memberikan manfaat baik secara ekologis, estetis, sosial maupun ekonomis dan kawasan pemukiman dengan kepadatan tinggi

tidak terlalu menimbulkan masalah kependudukan jika infrastruktur dan peralatan perumahan tersedia dan dapat mendukung penghidupan mereka, serta perencanaan Kawasan Perkantoran Blok Plan yang terstruktur untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan aksesibel bagi masyarakat, sehingga program "Penataan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (Pontolo, Taman Rakyat, Kawasan Perkantoran Blok Plan)" menjadi model pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mensinergikan upaya nasional, provinsi hingga kabupaten dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni, produktif, dan ramah lingkungan menuju visi Indonesia Emas 2045.

14. FKJ (Festival Kota Jin) dan Pekan Raya Utara Sulawesi

Pemajuan kebudayaan sebagai agenda nasional mencakup area kebangsaan yang komprehensif dan berkelanjutan, di mana isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, ekonomi kreatif, Kopdes Merah Putih, BUMDES-BUMDESma, dan UMKM perlu direspons secara proaktif dan kreatif oleh daerah sebagai basis berkembangnya berbagai dimensi kebudayaan dan kemasyarakatan. Kabupaten Gorontalo Utara dianugerahi potensi geografis yang sangat strategis karena berada di lintas batas Sulawesi (Utara, Tengah, dan Provinsi Gorontalo) dengan garis pantai terpanjang di wilayah sekitarnya, dianugerahi pulau-pulau yang indah, serta ditunjang oleh Pelabuhan Kwandang sebagai pelabuhan antarpulau dan Pelabuhan Anggrek yang tengah dikembangkan menjadi pelabuhan internasional. *Positioning* kuat di lintas *trans* Sulawesi terutama sebagai batas negara laut yang berhadapan dengan Laut Pasifik menjadikan potensi ini sangat strategis dan mendesak untuk dimanfaatkan sebagai basis pengembangan Kopdes, UMKM, serta BUMDES-BUMDESma terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Merespons potensi strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menghadirkan Program FKJ (Festival Kota Jin) dan Pekan Raya Utara Sulawesi sebagai *event* berskala regional yang mengintegrasikan berbagai kegiatan strategis meliputi Pameran Ekonomi Kreatif (UMKM, BUMDES, Kopdes), Business Meeting untuk membangun jejaring dan kerja sama bisnis, Apel Akbar Masyarakat Cinta Laut (MCL) sebagai komitmen pelestarian ekosistem laut,

Jelajah Pulau untuk mempromosikan keindahan pulau-pulau di Gorontalo Utara, Ritual Mandi Safar sebagai pelestarian tradisi budaya lokal, serta Atraksi "Jin Dance" yang menjadi daya tarik khas Festival Kota Jin. Program ini dirancang untuk menyajikan beragam budaya lokal dalam satu panggung dan mempromosikannya secara masif, cepat, dan integratif, sekaligus mensinergikan dan mengoneksikan beragam usaha dan produk ekonomi kreatif serta berbagai usaha Koperasi Desa Merah Putih, UMKM, dan BUMDES-BUMDESma sehingga membentuk ekosistem berusaha yang produktif, menguntungkan, dan berkelanjutan. Program ini sejalan dengan Asta Cita ke-5 Presiden Prabowo Subianto-Gibran tentang "Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri", Asta Cita ke-6 tentang "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan", dan Asta Cita ke-8 tentang "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur", serta Program Unggulan Provinsi Gorontalo yaitu "Agromaritim" dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui FKJ dan Pekan Raya Utara Sulawesi, diharapkan menghasilkan inspirasi dan pengembangan kerja sama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan-produk, penciptaan pasar baru, pembukaan peluang investasi, peningkatan kunjungan wisatawan, pelestarian budaya dan lingkungan laut, serta penguatan branding Kabupaten Gorontalo Utara sebagai destinasi wisata budaya dan bahari serta pusat ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi di kawasan utara Sulawesi.

15. Optimalisasi Pelayanan Aparat Desa *Up* ADD to 100 juta/desa

Program unggulan "Optimalisasi Pelayanan Aparat Desa *Up* ADD to 100 juta/desa" Kabupaten Gorontalo Utara merepresentasikan komitmen transformatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita ketujuh yang memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peningkatan Alokasi Dana

Desa (ADD) hingga 100 juta per desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mendukung prioritas nasional peningkatan ketahanan pangan, pengembangan desa wisata, penguatan kapasitas BUMDes, hingga upaya penanggulangan kemiskinan berbasis potensi lokal dan alokasi maksimal sebesar 15% dari total Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dalam mendukung pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Program ini mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan peningkatan kapasitas aparat desa dengan penguatan sistem pelayanan yang berlandaskan tata kelola pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi sebagai pilar utama dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitas pelayanan dan penguatan kelembagaan dan tata laksana sebagai pondasi dasar dalam membangun sistem pelayanan yang kokoh serta mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa yang didukung oleh teknologi dalam bentuk aplikasi pelayanan untuk hubungan antar pemerintah (G2G), pemerintah dengan dunia usaha (G2B), serta pemerintah dengan masyarakat (G2C), sehingga program "Optimalisasi Pelayanan Aparat Desa *Up* ADD to 100 juta/desa" menjadi katalis pembangunan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan *governance* di tingkat *grassroot*.

16. Kebijakan Strategi Kecepatan dan Ketepatan (KSKK) dalam desain program-kegiatan oleh perangkat daerah

Program unggulan "Kebijakan Strategi Kecepatan dan Ketepatan (KSKK) dalam desain program-kegiatan oleh perangkat daerah" Kabupaten Gorontalo Utara menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi sebagai landasan reformasi birokrasi yang sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita sebagai

Prioritas Nasional yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden terutama dalam mewujudkan lima sasaran utama RB yang ditekankan pada birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel; pelayanan publik yang prima; efektivitas kelembagaan; serta birokrasi yang adaptif dan inovatif yang mendukung fokus reformasi birokrasi tematik 2025–2029 pada empat prioritas: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, optimalisasi pengelolaan sumber daya, dan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden. Program KSKK ini mengadopsi prinsip pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, mengutamakan kualitas, kecepatan, dan ketepatan dengan memahami bahwa masyarakat kini berharap kecepatan dan ketepatan dalam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi yang diintegrasikan dengan transformasi digital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menerapkan konsep responsivitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui kecepatan melayani, ketepatan melayani, kecermatan melayani, ketepatan waktu pelayanan, sehingga program "Kebijakan Strategi Kecepatan dan Ketepatan (KSKK) dalam desain program-kegiatan oleh perangkat daerah" menjadi instrumen transformasi birokrasi yang menghasilkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kapasitas aparatur dan sistem pemerintahan yang responsif.

17. BERPADU (Berbasis Pendapatan Daerah untuk Gorontalo Utara Maju)

Program unggulan "BERPADU (Berbasis Pendapatan Daerah untuk Gorontalo Utara Maju)" merupakan strategi transformatif dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 dan arahan Kementerian Dalam Negeri untuk "Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kemandirian Fiskal" dalam mendukung pencapaian tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkelanjutan dengan pemahaman bahwa "dengan fiskal yang mandiri, daerah mampu membiayai pengeluarannya dengan sumber pendapatan sendiri, yaitu dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat" dan "PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang". Program BERPADU mengadopsi pendekatan holistik dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui diversifikasi sumber pendapatan yang tidak hanya fokus pada "pajak daerah dan retribusi daerah" sebagai komponen utama PAD tetapi juga inovasi dalam pengelolaan aset daerah dan kemitraan strategis dengan sektor swasta yang sejalan dengan konteks "Asta Cita, literasi fiskal menjadi salah satu kunci untuk membangun bangsa yang mandiri dan sadar akan arah pembangunannya" dengan mengatasi tantangan "kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*)", sehingga program "BERPADU (Berbasis Pendapatan Daerah untuk Gorontalo Utara Maju)" menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kapasitas keuangan daerah yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan lokal.

18. GK-SKS (Gerakan Keluarga Surga Kasih Sayang)

Keluarga merupakan unit terkecil namun paling fundamental dalam membentuk karakter bangsa dan masyarakat yang harmonis. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran khususnya Asta Cita ke-1 tentang "Mengkokohkan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)" yang menekankan pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta Asta Cita ke-8 tentang "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur". Di tingkat provinsi, Misi ke-

5 Provinsi Gorontalo yaitu "Menjadikan Adat bersendikan Syara', Syara bersendikan Kitabullah sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat" menjadi landasan strategis dalam membangun ketahanan keluarga yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kasih sayang sebagai pondasi utama pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Merespons arah kebijakan nasional dan provinsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengusung Program GK-SKS (Gerakan Keluarga Surga Kasih Sayang) sebagai upaya komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan nilai-nilai keagamaan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Program ini dirancang untuk memberdayakan keluarga sebagai pusat pendidikan karakter, moral, dan spiritual yang akan menghasilkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. GK-SKS mengintegrasikan berbagai pendekatan mulai dari pendampingan keluarga pra-nikah, pembinaan keluarga muda, penguatan peran orang tua dalam pendidikan anak, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga agar setiap rumah tangga tidak hanya harmonis secara emosional dan spiritual tetapi juga sejahtera secara ekonomi serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Melalui program ini, diharapkan terciptanya keluarga-keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, melindungi hak-hak perempuan dan anak, produktif, dan mampu menjadi benteng pertahanan pertama dalam membangun masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang beradab, toleran, adil, dan makmur, sebagaimana makna "surga" yang ingin diwujudkan dalam setiap keluarga di Gorontalo Utara.

19. Sekolah SKS (Sekolah Surga Kasih Sayang)

Program Sekolah SKS (Sekolah Surga Kasih Sayang) merupakan model pendidikan holistik yang diusung Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengintegrasikan keunggulan akademik dengan pembinaan karakter dan nilai-

nilai keagamaan dalam lingkungan belajar yang penuh kasih sayang. Program ini bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencapaian prestasi akademik tetapi juga membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia, empati, toleransi, dan jiwa kepemimpinan melalui penguatan peran guru sebagai teladan, pengembangan kurikulum berbasis karakter, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan nyaman, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Sekolah SKS dirancang sebagai "surga" tempat anak-anak tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang, rasa aman, dan inspirasi untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya, sehingga menghasilkan generasi yang cerdas, berakarakter, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Program Sekolah SKS ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran khususnya Asta Cita ke-4 tentang "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, produktif, dan berbudaya" yang menekankan pentingnya membangun SDM berkualitas melalui pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual tetapi juga karakter dan nilai-nilai budaya bangsa. Di tingkat provinsi, Program Unggulan Provinsi Gorontalo dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM menjadi landasan strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Melalui implementasi Sekolah SKS, Kabupaten Gorontalo Utara berkontribusi nyata dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan berkeadilan, serta mencetak generasi muda yang unggul, produktif, berakarakter, dan siap menjadi agen perubahan dalam pembangunan daerah dan bangsa.

20. Puskesmas SKS (Puskesmas Surga Kasih Sayang)

Program Puskesmas SKS (Puskesmas Surga Kasih Sayang) merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mentransformasi pelayanan kesehatan primer yang tidak hanya berkualitas secara medis tetapi juga humanis, penuh empati, dan memberikan rasa nyaman bagi setiap pasien. Program ini dirancang untuk mewujudkan puskesmas sebagai fasilitas

kesehatan tingkat pertama yang ramah, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menghadirkan tenaga kesehatan yang profesional dan penuh dedikasi, fasilitas medis yang memadai dan higienis, sistem pelayanan yang cepat dan efisien, serta pendekatan holistik yang memperhatikan aspek fisik, mental, dan spiritual pasien. Puskesmas SKS menjadikan setiap unit pelayanan kesehatan sebagai "surga" bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, di mana setiap orang diperlakukan dengan penuh kasih sayang, martabat dijunjung tinggi, dan kesembuhan menjadi prioritas utama melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.

Program Puskesmas SKS ini mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-khususnya Asta Cita ke-4 tentang "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, produktif, dan berbudaya" yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan SDM berkualitas. Di tingkat provinsi, Program Unggulan Provinsi Gorontalo dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat menjadi acuan strategis dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat. Melalui implementasi Puskesmas SKS, Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera dengan memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan, sehingga dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

21. Pemutakhiran, Koordinasi dan Penyiapan DTSEN

Program unggulan "Pemutakhiran, Koordinasi dan Penyiapan DTSEN" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan implementasi strategis dari prioritas pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 yang mengintegrasikan sistem data sosial ekonomi nasional sebagai instrumen vital dalam pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem dan pembangunan berkelanjutan, dimana DTSEN berperan strategis mendukung target RPJMN 2025–2029 dengan memastikan konsistensi data lintas K/L. Keberadaan data tunggal ini menjadi

dasar untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan sebagai basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga yang menggantikan sistem data sebelumnya dengan menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemutakhiran Target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Program ini menjadi landasan pelaksanaan kebijakan sosial yang tepat sasaran dengan memanfaatkan kumpulan data yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) seluruh penduduk Indonesia. DTSEN terbagi dalam beberapa kategori, seperti miskin ekstrem, hampir miskin, menengah, dan lainnya yang dapat diupdate perbulan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah serta berkontribusi dalam implementasi pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam hal penanganan isu strategi berupa kemiskinan ekstrem, stunting, pernikahan dini dan angka perceraian yang menunjukkan komitmen Kabupaten Gorontalo Utara dalam mendorong Pembangunan Desa yang berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan melalui koordinasi yang sinergis dengan berbagai stakeholder dalam memastikan ketersediaan data yang akurat, terkini, dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang efektif menuju visi Indonesia Emas 2045.

22. Apel KDO, Apel Alsintan dan Penataan Aset Daerah.

Program unggulan "Apel KDO, Apel Alsintan dan Penataan Aset Daerah" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan inisiatif strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dan mendukung komitmen Asta Cita yang mengedepankan kolaborasi dan inovasi, advokasi dan inisiatif mendorong kemandirian fiskal daerah, seperti pembiayaan inovatif, pengelolaan PAD, efisiensi anggaran, kota-kota mengglobal, kunjungan delegasi internasional, tata keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel, pengendalian inflasi, tata kelola barang dan jasa serta pemahaman bahwa Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan sebagai fondasi kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Program ini mengintegrasikan tiga komponen utama yaitu Apel KDO (Kekayaan Daerah yang Dipisahkan) sebagai mekanisme pengawasan dan pengelolaan aset keuangan, Apel Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) yang mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian RI untuk memperkuat sektor pertanian dan mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dengan memastikan Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang, serta Penataan Aset Daerah yang mengadopsi Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri terbaru untuk mewujudkan tata kelola aset yang efisien, akuntabel, dan produktif dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui optimalisasi nilai ekonomis dan fungsi sosial setiap aset daerah yang dimiliki Kabupaten Gorontalo Utara.

23. Mini Retret Pejabat Eselon II.b dan III.a

Program unggulan "Mini Retret Pejabat Eselon IIb dan IIIa" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan inisiatif strategis dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara yang sejalan dengan implementasi RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu dari tiga sasaran utama pembangunan nasional, dimana program ini mendukung agenda reformasi birokrasi yang mengedepankan kompetensi dan integritas pejabat struktural sebagai motor penggerak pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Program Mini Retret ini mengadopsi pendekatan holistik dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan pejabat eselon menengah melalui kegiatan pembinaan intensif yang tidak hanya fokus pada aspek teknis manajerial tetapi juga penguatan nilai-nilai integritas, inovasi, dan orientasi pelayanan publik yang meminta para menterinya untuk bekerja lebih berani sebagaimana arahan Presiden Prabowo

yang tidak segan mengganti pejabat yang tidak memuaskan dalam melayani rakyat dan mendukung upaya menciptakan pengelolaan terhadap seluruh sumber-sumber berpotensi baik SDM maupun sumber daya alam agar terfokus pada pembangunan negeri dengan pembinaan terkait budaya hukum ini, tidak hanya melingkupi masyarakat umum, namun juga pada aparatur negara dan aparat sebagai bagian integral dari transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga program "Mini Retret Pejabat Eselon IIb dan IIIa" menjadi instrumen pengembangan SDM aparatur yang berkontribusi dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

24. Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Kopdes, UMKM, BUMDES/BUMDESma.

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta lembaga ekonomi desa merupakan strategi fundamental dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Program Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Kopdes, UMKM, BUMDES/BUMDESma yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif kepada pelaku ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan manajemen usaha, akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pemasaran produk, penguatan branding dan kemasan, serta integrasi dengan ekosistem digital untuk memperluas jangkauan pasar. Program ini juga memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES/BUMDESma) sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara profesional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang mandiri dan berdaya saing.

Program ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto-Gibran tentang "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan" yang menekankan pemberdayaan ekonomi

berbasis desa dan penguatan usaha mikro sebagai strategi pemerataan kesejahteraan. Di tingkat provinsi, Program Unggulan Provinsi Gorontalo dalam Pengembangan UMKM dan Koperasi menjadi landasan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang optimal terhadap Kopdes, UMKM, serta BUMDES/BUMDESma, Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang tangguh, produktif, dan mampu bersaing di pasar lokal maupun regional, sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi yang merata hingga ke tingkat desa dan masyarakat bawah.

25. PKS-MG (Penataan Kelembagaan serta Semarak Masjid dan Gereja)

Program unggulan "Penataan Kelembagaan serta Semarak Masji dan Gereja" Kabupaten Gorontalo Utara merupakan inisiatif transformatif dalam memperkuat harmoni keberagaman yang sejalan dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 yang menargetkan peningkatan IKUB (Indeks kerukunan umat beragama) dari 76,02 poin pada 2023 menjadi 78 poin pada 2029. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia yang memiliki keberagaman agama serta mendukung implementasi Asta Cita yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), toleransi antarumat beragama menjadi prioritas pemerintahan baru dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya "kerukunan antar umat beragama yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri yang sangat unik dan membanggakan yaitu bangsa yang penuh perbedaan" dengan prinsip "Berbeda agama, suku, kelompok etnis, ras, bahasa daerah, adat istiadat tetapi bisa bersatu dan rukun karena memiliki cita-cita yang sama". Program ini mengintegrasikan penguatan kelembagaan tempat ibadah dengan peningkatan peran aktif masjid dan gereja sebagai pusat pembinaan umat, pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan dialog antarumat beragama yang mendukung prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" atau "berbeda-beda tetapi tetap satu" dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting

untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga program "Penataan Kelembagaan dan Semarak Masjid-Gereja" menjadi manifestasi nyata dari komitmen daerah dalam mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun, dan harmonis sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

26. GMCL (Gerakan Masyarakat Cinta Laut)

Kabupaten Gorontalo Utara yang terletak di Wilayah Pesisir Pantai Utara Provinsi Gorontalo memiliki potensi kelautan yang sangat besar dengan luas perairan Laut Sulawesi kurang lebih 43.100 km² dan panjang garis pantai 317,39 km yang berhadapan dengan Samudera Pasifik. Potensi kelautan yang demikian besar ini menghadapi berbagai tantangan seperti penangkapan ikan destruktif, pencemaran laut, lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem, serta terbatasnya pemanfaatan potensi ekonomi biru (*blue economy*). Merespons kondisi tersebut, Program GMCL (Gerakan Masyarakat Cinta Laut) hadir sebagai gerakan bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta masyarakat pesisir dalam menjaga dan mengelola laut secara berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem pesisir, mendorong implementasi ekonomi biru yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan ekologi, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan laut dan pemberantasan praktik pengrusakan laut serta pencemaran, mengintegrasikan sektor kelautan, perikanan, lingkungan, dan pariwisata dalam pembangunan daerah, serta menjadikan Gorontalo Utara sebagai daerah pesisir yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Program GMCL ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka khususnya Asta Cita ke-2 tentang "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru" yang menekankan pengembangan ekonomi biru sebagai salah satu pilar kemandirian bangsa, serta Asta Cita ke-8 tentang

"Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan ekosistem laut. Di tingkat provinsi, program ini mendukung Program Unggulan Provinsi Gorontalo yaitu "Agromaritim" yang mengintegrasikan pengembangan sektor pertanian dan kelautan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui implementasi GMCL yang meliputi deklarasi Gerakan Masyarakat Cinta Laut dengan pembentukan relawan MCL di setiap desa pesisir, pelaksanaan Aksi Bersih Pantai secara rutin dan berkelanjutan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut, pengelolaan sampah yang tepat, praktik perikanan yang bertanggung jawab, serta pengawasan bersama untuk mencegah *destructive fishing* dan *illegal fishing*, Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan ekosistem laut, membangun sinergi antarinstansi dan masyarakat dalam pengelolaan laut, serta mengembangkan ekonomi biru yang memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat nelayan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan laut sebagai warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

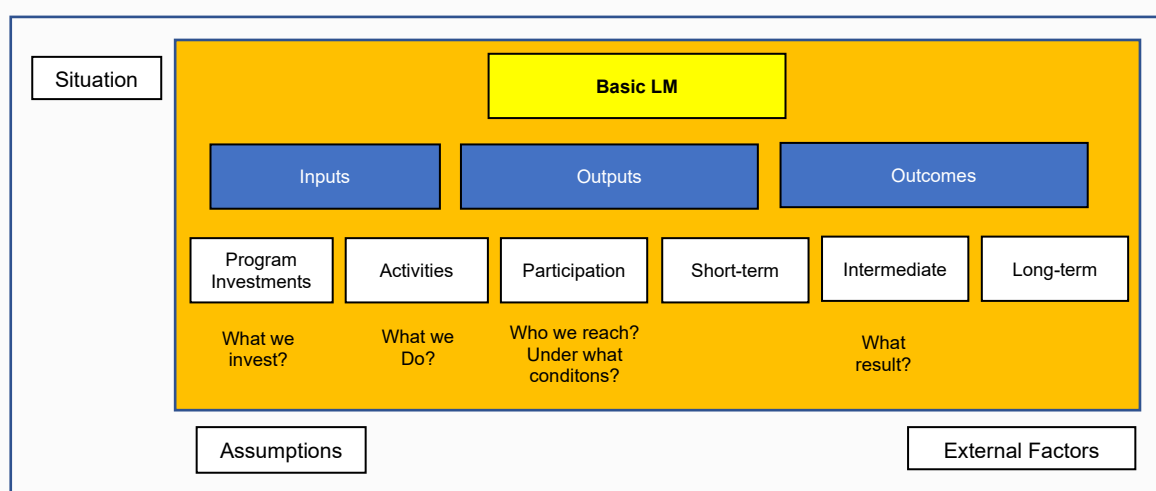
Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan kurun lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada bahasan sebelumnya, diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi

diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian tujuan.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025-2029 yaitu analisis *Logic Model* (LM) atau Model Logika, adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual yang menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Secara ringkas, LM menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Lebih jauh, LM membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Model ini juga dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi LM dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2
Logic Model



Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan

memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan.

Tabel 3.6
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
Memajukan kualitas tatakelola reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan budaya produktif dan inovatif	Tata kelola pemerintahan yang disiplin, berintegritas tinggi, dan tanggap didukung dengan inovasi sistem pemerintahan	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas didukung dengan inovasi dan penerapan e-government meningkat	- Akselerasi transformasi digital pemerintahan melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di seluruh OPD - Implementasi Kebijakan Strategi Kecepatan dan Ketepatan (KSKK) dalam desain program-kegiatan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas perencanaan pembangunan - Pelaksanaan Mini Retret Pejabat Eselon II.b dan III.a secara periodik untuk sinkronisasi kebijakan, evaluasi kinerja, dan penguatan koordinasi antar OPD - Pengembangan Motabi Kambungu (Model Pelayanan Terpadu ke Pelosok-Pelosok Kampung) sebagai inovasi pelayanan publik yang menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali - Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah menuju opini WTP BPK yang berkelanjutan - Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis standar pelayanan minimal dan survei kepuasan masyarakat
		Kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan masyarakat meningkat	- Pengembangan kompetensi ASN secara terstruktur dan berjenjang melalui diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan berbasis talent management - Implementasi sistem manajemen kinerja ASN berbasis merit system dengan reward and punishment yang jelas - Internalisasi nilai-nilai berintegritas melalui pembangunan zona integritas di seluruh OPD dan penerapan gratifikasi control system - Peningkatan literasi digital dan adaptabilitas ASN terhadap perkembangan teknologi, artificial intelligence, dan tuntutan pelayanan publik modern - Pembangunan budaya kerja yang berorientasi hasil (<i>output-outcome</i>) dengan fokus pada kepuasan dan keberpihakan kepada masyarakat - Penguatan disiplin dan etos kerja ASN melalui sistem presensi elektronik dan evaluasi kinerja berkala
		Pengembangan ekosistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah meningkat	- Pembangunan sistem manajemen inovasi daerah yang meliputi inkubasi, kurasi, implementasi, dan replikasi inovasi - Penyelenggaraan <i>Tolopani Awards</i> sebagai sistem apresiasi dan insentif tertinggi bagi aparat dan masyarakat Gorontalo Utara yang menciptakan inovasi berdampak dan mengharumkan nama daerah - Pengembangan platform kolaborasi dan knowledge management system untuk berbagi praktik baik antar OPD - Fasilitasi scaling-up inovasi unggulan ke tingkat provinsi dan nasional - Penguatan jejaring inovasi dengan pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, dan sektor swasta
Meningkatkan kualitas hidup yang bertumpu pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta	SDM Gorontalo Utara sehat, cerdas, kompetitif, dan adaptif dengan perubahan teknologi dan globalisasi	Kualitas pendidikan dan literasi masyarakat meningkat secara merata	- Penyelenggaraan Pendidikan "Gratis-Berkualitas" melalui penghapusan biaya pendidikan di semua jenjang disertai peningkatan mutu pembelajaran berbasis kompetensi - Perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar melalui pemberian Bantuan Studi/Beasiswa kepada siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu dari SD hingga perguruan tinggi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
perlindungan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan, ditunjang SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai			▪ Pengembangan Sekolah SKS (Sekolah Surga Kasih Sayang) sebagai model sekolah ramah anak yang inklusif, aman, nyaman, dan menyenangkan dengan pendekatan holistik ▪ Gerakan literasi masif melalui revitalisasi perpustakaan desa, pojok baca, dan digitalisasi bahan bacaan ▪ Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan penyediaan tunjangan khusus ▪ Pengembangan kurikulum lokal yang berbasis kearifan lokal dan kebutuhan pasar kerja ▪ Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan yang merata hingga ke daerah terpencil
		Derajat dan sistem kesehatan masyarakat meningkat	▪ Transformasi pelayanan kesehatan primer melalui pengembangan Puskesmas SKS (Puskesmas Surga Kasih Sayang) sebagai model puskesmas berkualitas dengan standar pelayanan prima, ramah, dan berfokus pada kepuasan pasien ▪ Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan kapasitas SDM kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pembangunan/rehabilitasi fasilitas kesehatan ▪ Percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat ▪ Perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) dengan fokus pada kelompok rentan ▪ Penguatan upaya promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan pemberdayaan kader kesehatan ▪ Peningkatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap wabah penyakit menular ▪ Pengembangan sistem rujukan berjenjang yang efektif dan telemedicine untuk daerah terpencil
		Tingkat pengangguran berkurang	▪ Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar kerja (<i>job market driven training</i>) ▪ Fasilitasi sertifikasi profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja ▪ Pelaksanaan <i>job matching</i> dan bursa kerja untuk menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja (industri, UMKM, BUMD) ▪ Pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan <i>business development</i>, akses permodalan, dan inkubasi bisnis bagi calon wirausaha ▪ Perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor produktif (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif) ▪ Penyediaan informasi pasar kerja yang akurat dan aksesibel melalui sistem informasi ketenagakerjaan online ▪ Penguatan koordinasi dengan dunia usaha dan industri dalam program <i>link and match</i> pendidikan-pelatihan-dunia kerja
	Tercipta perlindungan atas kehidupan layak yang adil berkualitas dan kemiskinan terentaskan	Cakupan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang inklusif meningkat dan berkualitas	▪ Perluasan cakupan Jaminan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian bagi seluruh masyarakat miskin dan rentan untuk menjamin perlindungan kesehatan <i>universal</i> ▪ Optimalisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan dengan mekanisme penyaluran yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah ▪ Implementasi Pemutakhiran, Koordinasi dan Penyiapan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) untuk memastikan akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial ▪ Pelaksanaan Rumah Sehat dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
		Pengentasan kemiskinan semakin baik dan ketimpangan berkurang	- intervensi ekonomi produktif terintegrasi - Pengembangan sistem perlindungan sosial adaptif yang responsif terhadap guncangan ekonomi dan bencana - Implementasi G2-10 PLUS (Gerakan 2 Kambing 10 Ayam dan Sapi) sebagai program pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin melalui pemberian bantuan ternak bergulir dengan pendampingan teknis budidaya dan manajemen usaha ternak - Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat (pengeluaran per kapita) melalui penciptaan lapangan kerja produktif, fasilitasi kewirausahaan, dan akses terhadap sumber ekonomi produktif - Pengurangan kedalaman kemiskinan melalui intervensi terpadu yang menggabungkan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi) - Pengurangan ketimpangan (rasio gini) melalui kebijakan redistribusi aset produktif (lahan, ternak, modal usaha), pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, dan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin - Pemberdayaan keluarga miskin ekstrem melalui pendampingan intensif (family development session) dan fasilitasi akses ke program pemerintah secara terintegrasi - Penguatan sistem data kemiskinan yang akurat, real-time, dan terintegrasi (by name by address) untuk dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi efektivitas program
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara signifikan melalui pengembangan potensi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan mudah demi penguatan kapasitas fiskal daerah	Pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, kontributif terhadap ekonomi regional, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ditunjang oleh kemandirian pangan	Produktivitas perekonomian daerah yang ditopang daya saing dan kontribusi industri, perdagangan, investasi, dan ekonomi kreatif meningkat	- Pengembangan ekonomi maritim melalui modernisasi sektor Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dengan penguatan kapasitas armada tangkap, introduksi teknologi budidaya modern, pembangunan cold storage dan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah - Implementasi GMCL (Gerakan Masyarakat Cinta Laut) sebagai gerakan pelestarian sumber daya kelautan berkelanjutan, pencegahan illegal fishing, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut - Pemberdayaan UMKM Bercahaya melalui kemudahan akses permodalan (KUR, pinjaman modal kerja), pelatihan manajemen usaha dan keuangan, pendampingan produksi dan Quality Control, serta fasilitasi pemasaran produk (online marketplace, expo/pameran) - Pengembangan ekosistem Koperasi, Ekonomi Kreatif, Skill Milenial/Gen Z (Start-Up, AI, dll) melalui pembangunan inkubator bisnis digital, technology hub/co-working space, pelatihan digital skill, dan skema pendanaan startup serta akselerator bisnis - Penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri dan menciptakan nilai tambah produk primer (pengolahan ikan, hasil pertanian, perkebunan) - Peningkatan pembentukan modal tetap bruto melalui percepatan investasi infrastruktur ekonomi (jalan, pelabuhan, pasar, kawasan industri) dan fasilitasi investasi swasta - Profesionalisasi manajemen dan restrukturisasi BUMD untuk meningkatkan Return on Asset (ROA) melalui tata kelola korporasi yang baik, diversifikasi usaha, dan efisiensi operasional - Peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat melalui penyediaan akses internet, pelatihan digital skill, dan pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis digital - Perluasan akses ketenagalistrikan melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan peningkatan daya listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif - Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berbasis OSS, kepastian hukum,

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
		Kesinambungan fiskal terwujud dan kemandirian daerah meningkat	ketersediaan lahan terencana, dan promosi investasi yang agresif - Implementasi program BERPADU (Berbasis Pendapatan Daerah untuk Gorontalo Utara Maju) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi potensi pendapatan asli daerah - Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak, perluasan basis pajak, perbaikan basis data wajib pajak, dan penguatan pengawasan dan penagihan pajak daerah - Penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah - Pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap dengan target penurunan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah - Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui inventarisasi lengkap, sertifikasi aset, pemanfaatan idle asset untuk menghasilkan pendapatan, dan kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga - Pelaksanaan Apel KDO, Apel Alsintan dan Penataan Aset Daerah untuk melakukan inventarisasi lengkap, sertifikasi, valorisasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah (tanah, bangunan, kendaraan dinas, alat berat/alsintan) guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah - Peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pembayaran, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi - Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis kinerja - Pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang potensial dan sesuai dengan kewenangan daerah melalui kajian potensi PAD
		Pemerataan pembangunan daerah dimulai dari desa	- Optimalisasi Pelayanan Aparat Desa melalui peningkatan alokasi dana desa (ADD) hingga 100 juta/desa untuk memperkuat kapasitas fiskal desa dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara mandiri - Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Kopdes, UMKM, BUMDES/BUMDESma melalui pelatihan manajemen organisasi dan keuangan, bantuan permodalan awal dan penguatan modal, pendampingan pengembangan usaha ekonomi desa produktif, dan fasilitasi jaringan pemasaran produk desa - Percepatan peningkatan status desa dari desa berkembang menuju desa mandiri melalui pembangunan infrastruktur ekonomi (jalan usaha tani, pasar desa, gudang), infrastruktur sosial (balai desa, posyandu, PAUD), dan pengembangan potensi ekonomi lokal - Pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa partisipatif (RPJMDes, RKPDes, APBDes) yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat - Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik (<i>good village governance</i>) melalui peningkatan kapasitas aparat desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan akuntabilitas publik - Pengembangan Desa Wisata, desa produktif, dan desa inovatif berbasis potensi unggulan lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, budaya) untuk meningkatkan pendapatan asli desa

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
		Ketersediaan pangan meningkat	- Penguatan sistem informasi pembangunan desa dan monitoring evaluasi pembangunan desa berbasis aplikasi untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan - Fasilitasi kerjasama antar desa (KAD) dan kerjasama desa dengan pihak ketiga untuk pengembangan ekonomi skala kawasan dan peningkatan daya saing produk desa - Implementasi GAM (Gerakan Agro Mapomulo) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian pangan dan hortikultura melalui program intensifikasi (panca usaha tani) dan ekstensifikasi lahan pertanian produktif - Peningkatan ketersediaan pangan pokok melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan, optimalisasi lahan pertanian <i>existing</i>, dan pembukaan lahan pertanian baru yang potensial - Diversifikasi pangan lokal dan pengembangan pangan alternatif berbasis sumber daya lokal (sagu, ubi, pisang, sukun) untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan memperkuat ketahanan pangan daerah - Penguatan kelembagaan petani (Gapoktan, Poktan, P3A) dan fasilitasi akses terhadap input produksi (benih unggul bersertifikat, pupuk berimbang, pestisida) serta permodalan usaha tani - Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian modern (mekanisasi pertanian, irigasi hemat air, <i>smart farming</i>, teknologi pasca panen) dan untuk meningkatkan produktivitas - Pembangunan sistem logistik dan distribusi pangan yang efisien melalui pengembangan lumbung pangan desa, gudang pangan, dan pasar tani untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan - Penguatan cadangan pangan daerah dan sistem stabilisasi harga pangan pokok melalui mekanisme pembelian gabah/padi oleh Bulog dan penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran - Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung) untuk mendukung peningkatan produksi pangan
Memperkuat konektivitas, infrastruktur yang berdaya saing, dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan penyangga Ibukota Nusantara (IKN) dan wilayah maritim utara Indonesia	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatnya konektivitas antar daerah dan layanan infrastruktur dasar	- Pelaksanaan Penataan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (Pontolo, Taman Rakyat, Kawasan Perkantoran Blok Plan) untuk menciptakan kawasan perkotaan yang tertata, estetik, fungsional, dan nyaman sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik - Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan strategis penghubung antar kecamatan, antar desa, dan akses menuju pusat-pusat produksi serta kawasan wisata untuk meningkatkan konektivitas wilayah - Peningkatan pemenuhan layanan infrastruktur dasar air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perpipaan dan non-perpipaan hingga mencapai target 100% akses <i>universal</i> - Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sanitasi (jamban sehat, <i>septik tank</i> komunal, IPAL domestik) untuk mencapai target sanitasi layak 100% - Perluasan jaringan dan peningkatan daya listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif dan kebutuhan rumah tangga dengan target elektrifikasi 100% - Pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi, terjangkau, aman, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat - Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi (pasar modern, terminal tipe C, pelabuhan rakyat, tempat pelelangan ikan) yang memenuhi standar dan berkualitas - Peningkatan kualitas layanan infrastruktur melalui pemeliharaan rutin, penanganan cepat keluhan masyarakat, dan survei kepuasan pengguna infrastruktur secara berkala - Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan internet

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
		Meningkatnya infrastruktur dasar, kelembagaan dan ekonomi desa di Kawasan Transmigrasi Sumalata	untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan pelayanan publik - Percepatan transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan jalan produksi, jalan usaha tani, jembatan penghubung antar desa, dan aksesibilitas menuju pusat ekonomi - Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter untuk mendukung usaha pertanian dan perkebunan masyarakat transmigrasi - Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi di kawasan transmigrasi (pasar desa, gudang hasil pertanian, unit pengolahan hasil) untuk meningkatkan nilai tambah produk - Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigrasi (koperasi, kelompok tani, BUMDES) melalui pelatihan manajemen organisasi, bantuan permodalan, dan pendampingan pengembangan usaha - Pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis komoditas unggulan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat - Pembangunan fasilitas sosial dasar (sekolah, puskesmas/pustu, balai desa, rumah ibadah) yang memadai di kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup - Fasilitasi akses permodalan usaha dan pemasaran hasil produksi masyarakat transmigrasi ke pasar regional - Percepatan peningkatan status desa di kawasan transmigrasi dari desa berkembang menuju desa mandiri melalui intervensi pembangunan yang terintegrasi - Peningkatan kapasitas aparat desa dan kelembagaan desa di kawasan transmigrasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan partisipatif
Mengembangkan kualitas lingkungan hidup, memajukan kehidupan sosial yang layak dan aman, serta melestarikan budaya luhur yang hidup dalam masyarakat	Pengelolaan ruang wilayah dengan lingkungan sehat, adaptif, dan berkelanjutan	Kualitas kesehatan lingkungan meningkat Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	- Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas usaha dan industri, penegakan hukum lingkungan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan - Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dari hulu ke hilir dengan pembangunan TPS 3R, bank sampah, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat - Perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% di kawasan perkotaan dan pengembangan kawasan konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem - Pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan (drainase lingkungan, IPAL komunal, MCK komunal) yang memadai untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman - Gerakan edukasi dan pemberdayaan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kampanye cinta lingkungan - Rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan kritis melalui penghijauan, reboisasi, dan pembuatan bangunan konservasi untuk mencegah erosi dan banjir - Peningkatan kualitas air sungai dan badan air melalui pengendalian pencemaran dari sumber pencemar domestik dan industri - Monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup secara berkala untuk deteksi dini penurunan kualitas lingkungan - Penguatan sistem peringatan dini bencana (<i>early warning system</i>) berbasis teknologi untuk bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, dan bencana lainnya - Pembangunan infrastruktur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (tanggul pengaman pantai, normalisasi sungai, drainase makro, sumur resapan, embung) untuk mengurangi risiko bencana - Peningkatan kapasitas masyarakat, relawan, dan Forum PRB dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana melalui pelatihan, simulasi, dan gladi lapangan secara

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
			berkala ▪ Pengurangan risiko bencana melalui penataan ruang berbasis mitigasi bencana, penegakan peraturan zonasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana ▪ Penyusunan dan sosialisasi dokumen rencana <i>kontinjensi</i> bencana serta rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim kepada seluruh <i>stakeholder</i> ▪ Pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi, <i>shelter</i>/tempat pengungsian, dan kelengkapan logistik kebencanaan yang memadai ▪ Pengembangan pusat komando dan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi untuk koordinasi tanggap darurat yang cepat dan efektif ▪ Penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana melalui BPBD, TNI, Polri, SAR, PMI, dan organisasi kemanusiaan lainnya ▪ Penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Adaptasi Perubahan Iklim dengan melibatkan seluruh OPD terkait
	Hak anak, keluarga, dan masyarakat terpenuhi secara berkualitas	Cakupan program responsif dan pemenuhan kesetaraan gender, kualitas dan ketahanan keluarga, serta pemenuhan hak-hak anak meningkat	▪ Pelaksanaan GK-SKS (Gerakan Keluarga Surga Kasih Sayang) untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang harmonis, sejahtera, dan tangguh melalui program <i>parenting education</i>, <i>family gathering</i>, konseling keluarga, dan penguatan fungsi-fungsi keluarga ▪ Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan gender ▪ Peningkatan partisipasi dan representasi perempuan dalam pembangunan, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik melalui <i>affirmative action</i> dan <i>capacity building</i> ▪ Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, dan pengembangan usaha produktif berbasis kelompok ▪ Penguatan Sistem Perlindungan Anak (SPA) terpadu melalui layanan terpadu berbasis masyarakat (PATBM), forum anak di tingkat desa/kelurahan, dan Puskesmas ▪ Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses, rujukan yang cepat, dan penanganan kasus yang responsif ▪ Peningkatan layanan perlindungan khusus anak (anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak terlantar, anak dengan disabilitas) melalui lembaga layanan khusus dan pendampingan intensif ▪ Penguatan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan program Keluarga Berencana ▪ Edukasi dan kampanye publik tentang hak-hak anak, kesetaraan gender, pencegahan perkawinan anak, dan pengasuhan positif ▪ Penguatan data dan sistem informasi gender dan anak untuk pengambilan kebijakan berbasis data dan monitoring pemenuhan hak
	Nilai kearifan lokal dan budaya sebagai identitas daerah berkembang dan lestari	Apresiasi, pengembangan, dan pelestarian cagar dan budaya daerah meningkat	▪ Penetapan, pendokumentasian, dan perlindungan cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, kawasan) melalui kajian komprehensif, registrasi nasional, dan pengusulan sebagai Cagar Budaya Provinsi Gorontalo ▪ Implementasi Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga, Seni, Budaya Lokal & Keagamaan untuk regenerasi pelestari budaya, pengembangan talenta pemuda di bidang seni-budaya-olahraga, dan penguatan identitas lokal ▪ Pengembangan Pariwisata (alam, budaya, religi, buatan) berbasis kearifan lokal dengan prinsip pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
			peningkatan ekonomi kreatif ▪ Penyelenggaraan FKJ (Festival Kota Jin) dan Pekan Raya Utara Sulawesi sebagai event tahunan untuk promosi budaya, pariwisata, produk ekonomi kreatif daerah, dan penguatan citra daerah ▪ Pelaksanaan PKS-MG (Penataan Kelembagaan serta Semarak Masjid dan Gereja) untuk memperkuat harmoni sosial, toleransi, kerukunan umat beragama, dan merawat tempat-tempat ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan ▪ Revitalisasi objek pemajuan kebudayaan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa) melalui dokumentasi audio visual, pengembangan, pemanfaatan, dan transmisi lintas generasi ▪ Pengembangan sanggar seni, rumah budaya sebagai pusat pembelajaran dan kreativitas seni budaya ▪ Pemberian apresiasi kepada pelaku seni, budayawan, dan komunitas adat yang aktif melestarikan budaya lokal ▪ Pengembangan destinasi wisata budaya dan desa wisata berbasis kearifan lokal dengan standar pelayanan yang berkualitas ▪ Promosi dan <i>branding</i> pariwisata daerah melalui media <i>digital</i>, kerja sama dengan <i>travel agent</i>, dan partisipasi dalam <i>event</i> pariwisata regional/nasional
Kondusifitas, keamanan, dan ketertiban daerah tercipta	Keamanan umum, kohesi sosial, kerukunan agama, ras, maupun kelompok masyarakat terwujud		▪ Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum dialog lintas agama, lintas etnis, lintas generasi sebagai media komunikasi, konsultasi, dan resolusi konflik ▪ Pencegahan konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) melalui sistem deteksi dini berbasis masyarakat, mediasi dini oleh tokoh agama/adat/masyarakat, dan negosiasi partisipatif ▪ Peningkatan toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan multikultural di sekolah, pesantren, dan kampanye publik ▪ Pemberdayaan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat sebagai agen perdamaian, perekat sosial, dan mediator konflik ▪ Penguatan kohesi sosial melalui kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (gotong royong, perayaan hari besar keagamaan bersama, dialog kebangsaan, pertukaran budaya) ▪ Monitoring dan evaluasi dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat secara berkala untuk antisipasi dini potensi konflik horizontal dan vertikal ▪ Penanganan cepat dan tepat terhadap isu SARA, hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum ▪ Penguatan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI melalui pendidikan karakter, bela negara, dan kampanye nasionalisme ▪ Pengembangan ruang-ruang dialog dan interaksi antar kelompok masyarakat (lintas agama, etnis, profesi, generasi) untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan ▪ Penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial serta gangguan keamanan ▪ Pengurangan risiko penduduk terkena kejahatan melalui peningkatan patroli keamanan, penerangan jalan umum, dan pemberdayaan sistem keamanan lingkungan (Siskamling)

Di samping strategi, hal penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategik. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor, diantaranya arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara yang berfokus pada penguatan modal dasar sepanjang rentang tahun 2025-2029.



Pengejawantahan dari “Penguatan Modal Dasar” pada periode I yakni berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru, hilirisasi berbasis sumber daya alam, serta penguatan riset dan inovasi; peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; Pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk peningkatan kualitas ASN dan digitalisasi pelayanan publik; penguatan interaksi sosial budaya serta produktivitas tenaga kerja; dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum.

Selain arahan strategis dalam RPJPD, fokus dan tema pembangunan tahunan juga melihat pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan selama 5 tahun, yang tertuang dalam Tabel 3.7 hingga 3.11 berikut.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Misi I

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Baseline (2024)	Satuan
Tata kelola pemerintahan yang disiplin, berintegritas tinggi, dan tanggap didukung dengan inovasi sistem pemerintahan	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas didukung dengan inovasi dan penerapan e-government meningkat	Indeks reformasi birokrasi	67,91	Poin
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,89	Indeks
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Nilai
		Skor EPPD	2,	Angka
		Indeks integritas	66,80	Poin
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,939	Poin
		Nilai MCSP	69,58	Persen
	Kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan masyarakat meningkat	Indeks pelayanan publik	3,65	Indeks
		Indeks profesionalitas ASN	77,7	Indeks
	Pengembangan ekosistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah meningkat	Indeks inovasi daerah	46,67	Poin

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi I dapat digambarkan bahwa pencapaian misinya dikategorikan baik meski pada beberapa indikator relatif belum optimal, seperti tergambar dari capaian indeks reformasi birokrasi, indeks SPBE, opini BPK yang telah mendapatkan predikat WTP, Indeks Pelayanan Publik (IPP), skor SPIP, Kepatuhan pelayanan publik, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks Kualitas Perencanaan.

Melihat capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 1 terkait tata kelola pemerintahan, perlu mendapat dukungan khususnya terkait pencapaian tata kelola pengadaan, nilai SAKIP, Indeks Integritas, nilai MCSP, Indeks Inovasi Daerah, serta Indeks Pembangunan Statistik sehingga menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 2-3 tahun ke depan. Untuk tahun ke 4 dan 5 terkait tata kelola pemerintahan tetap terus melakukan peningkatan dan perbaikan akan tetapi tidak menjadi prioritas mengingat capaiannya sudah baik.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Misi II

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Baseline (2024)	Satuan
SDM Gorontalo Utara sehat, cerdas, kompetitif, dan adaptif dengan perubahan teknologi dan globalisasi	Kualitas pendidikan dan literasi masyarakat meningkat secara merata	Indeks pembangunan manusia	68,83	Indeks
		Indeks pendidikan	9,95	Poin
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	72,62	Indeks
		Usia Harapan Hidup (UHH)	76,92	Tahun
		Prevalensi stunting	25,6	Persen
		Tingkat pengangguran berkurang	2,79	Persen
Tercipta perlindungan atas kehidupan layak yang adil berkualitas dan kemiskinan terentaskan	Cakupan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang inklusif meningkat dan berkualitas	Tingkat Kemiskinan	16,83	Persen
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	97,50	Persen
		Persentase rumah tangga yang menerima Program Keluarga Harapan	31,35	Persen
		Persentase rumah tangga yang menerima program bantuan pangan	40,91	Persen
	Pengentasan kemiskinan semakin baik dan ketimpangan berkurang	Rasio gini	0,435	Indeks
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	10.476	Ribu Rupiah
		Indeks kedalaman kemiskinan	3,41	Poin

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 2 dapat digambarkan bahwa pencapaian misinya dikategorikan belum optimal terlihat dari capaian Indeks Pendidikan, Indeks Literasi dan Numerasi, prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Pemuda, cakupan rumah tangga menerima program PKH, bantuan pangan, dan Jamsostek, rasio gini, Indeks Kedalaman Kemiskinan, pekerja yang bekerja di sektor formal, serta pengeluaran per kapita.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 2 maka terkait pendidikan, kesehatan, cakupan perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Misi III

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Baseline (2024)	Satuan
Pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ditunjang oleh kemandirian pangan	Produktivitas perekonomian daerah yang ditopang daya saing dan kontribusi industri, perdagangan, investasi, dan ekonomi kreatif meningkat	Laju pertumbuhan ekonomi	4,17	Persen
		PDRB per kapita	33.443,64	Ribu Rupiah
		Kontribusi PDRB Industri	1,79	Persen
		Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,93	Persen
		Proporsi PDRB ekonomi kreatif	17,48	Persen
		Akselerasi pertumbuhan	2,08	Persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Baseline (2024)	Satuan
	Kesejahteraan masyarakat	Pembentukan Modal Tetap Bruto		
		Return on Asset BUMD	-7,93	Persen
		Indeks masyarakat digital	39,09	Indeks
		Konsumsi listrik per kapita	504,04	kWH/Kpt
	Keseimbangan fiskal terwujud dan kemandirian daerah meningkat	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	0,20	Persen
		Indeks kemandirian fiskal	4,84	Persen
		Rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan	93,85	Persen
	Pemerataan pembangunan daerah dimulai dari desa	Persentase Desa Mandiri	39,02	Persen
		Ketersediaan pangan meningkat	78,88	Indeks

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 3 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 3 dikategorikan belum optimal terlihat terutama dari capaian kontribusi PDRB terhadap output Provinsi Gorontalo, kontribusi industri pengolahan, akselerasi pertumbuhan PMTB, RoA BUMD, Indeks masyarakat digital, rasio pajak terhadap PDRB, tingkat kemandirian fiskal, akses keuangan masyarakat, serta rasio pendapatan transfer yang masih terlalu tinggi.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 3 terkait peningkatan produktivitas ekonomi, kemandirian fiskal, pembangunan desa, dan kemandirian pangan, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Misi IV

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Baseline (2024)	Satuan
Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan kelayakan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	73,00 (2023)	Indeks
		Indeks transformasi kawasan transmigrasi	N/A	Poin
	Meningkatnya konektivitas antar daerah dan layanan infrastruktur dasar	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kelayakan	73,00	Persen
	Meningkatnya infrastruktur dasar, kelembagaan dan ekonomi desa di Kawasan Transmigrasi Sumalata	Persentase desa di kawasan transmigrasi berstatus "Mandiri"	32,81	Persen

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 4 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 4 dikategorikan belum optimal terlihat dari capaian jalan mantap yang rendah, sanitasi aman yang relatif tertinggal, hunian layak yang belum optimal, aksesibilitas air minum layak dan aman yang juga tertinggal, kinerja

pengairan sistem irigasi yang buruk, serta konektivitas antar wilayah yang masih berkisar 50 persen.

Berdasarkan capaian tersebut, disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, dan tingkat urgensi layanan dasar yang ada di misi 4, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai targetnya terkait permasalahan kemantapan jalan, aksesibilitas air minum dan sanitasi, penyediaan perumahan, hingga perlunya mendorong ekonomi perdesaan terutama di kawasan transmigrasi, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Misi V

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Baseline (2024)	Satuan
Pengelolaan ruang wilayah dengan lingkungan sehat, adaptif, dan berkelanjutan		Indeks risiko bencana	126,82	Poin
	Kualitas kesehatan lingkungan meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	77,09	Poin
	Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Indeks ketahanan daerah	0,35	Angka
Hak anak, keluarga, dan masyarakat terpenuhi secara berkualitas		Indeks perlindungan anak	57,14	Indeks
		Indeks pembangunan gender	82,80	Indeks
	Cakupan program responsif dan pemenuhan kesetaraan gender, kualitas dan ketahanan keluarga, serta pemenuhan hak-hak anak meningkat	Indeks perlindungan khusus anak	58,10	Indeks
		Indeks ketimpangan gender	0,178	Indeks
		Indeks kualitas keluarga	78,24 (2023)	Persen
Nilai kearifan lokal dan budaya sebagai identitas daerah berkembang dan lestari		Indeks pembangunan kebudayaan	52,48 (2023)	poin
	Apresiasi, pengembangan, dan pelestarian cagar dan budaya daerah meningkat	Persentase cagar budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi Gorontalo	50,00	Persen
		Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	0,90 (2022)	Persen
Kondusifitas, keamanan, dan ketertiban daerah tercipta		Risiko penduduk terkena kejahatan/100.000 penduduk	159	Poin
	Keamanan umum, kohesi sosial, kerukunan agama, ras, maupun kelompok masyarakat terwujud	Angka Kejadian Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)	1	Poin

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 5 dapat dikategorikan perlu dorongan kinerja pada hampir semua indikatornya, terlihat terutama dari segi peningkatan ketahanan daerah dan penurunan risiko bencana, pemenuhan aksi Hak Asasi Manusia, penanganan sampah, pemenuhan hak asasi anak-anak, pembangunan kebudayaan, serta pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai targetnya perlu

mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.

Tabel 3.12
Program Prioritas

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - Gorontalo Utara Bercahaya (Berdaya Sinergis, Ceria, dan Berbudaya) - Memajukan kualitas tatakelola reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan budaya produktif dan inovatif	Tata kelola pemerintahan yang disiplin, berintegritas tinggi, dan tanggap didukung dengan inovasi sistem pemerintahan	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas didukung dengan inovasi dan penerapan e-government meningkat		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Nilai MCSP (Monitoring, Controlling & Surveillance for Prevention) (%)		
				Indeks Integritas (Poin)		
				Skor EPPD (Angka)		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi Publik Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kepatuhan terhadap penyampaian LPPD Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Nilai)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola anggaran perbendaharaan akuntansi dan pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			
			Terlaksananya Harmonisasi Rancangan Perda	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Terlaksananya Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Terlaksananya Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Perikatan Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Terlaksananya Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Yang Ditindaklanjuti (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Terlaksananya koordinasi dan antisipasi hambatan dalam kegiatan pimpinan	Tingkat efektivitas koordinasi dan antisipasi hambatan dalam kegiatan pimpinan (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terlaksananya program pembangunan daerah sesuai target	Tingkat capaian program pembangunan daerah (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Tersusunnya Laporan AKIP Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian AKIP PD secara tepat waktu (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan masyarakat meningkat		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya Kualitas layanan strategis pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan strategis pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Administrasi Pendaftaran Penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP minimal bernilai baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemebdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Penyebaran Profil Kependudukan Ke Lembaga Pengguna	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Pengembangan ekosistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah meningkat		Indeks inovasi daerah (poin)		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelihtangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningkatkan kualitas hidup yang bertumpu pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan, ditunjang SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai	SDM Gorontalo Utara sehat, cerdas, kompetitif, dan adaptif dengan perubahan teknologi dan globalisasi	Kualitas pendidikan dan literasi masyarakat meningkat secara merata	Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik Nasional	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Indeks pendidikan (Poin)		
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas kurikulum pendidikan	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Derajat dan sistem kesehatan masyarakat meningkat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Prevalensi Stunting (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (Dinas Kesehatan)	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				DM dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€ˆTingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€ˆPersentase cakupan JKN yang dibiayai oleh daerah (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€¢Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Hipertensi dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Anggrek)	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€¢Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Atinggola)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Biau)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€¢Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Bulolila)	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Dambalo)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Dulukapa)	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Gentuma)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Ilangata)	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Kwandang)	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Limbato)	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Molingkapoto)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Monano)	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Ponelo)		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Sumalata)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Tolinggula)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€¢Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes yang mencapai akreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (RSUD Tolinggula Melayani)	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (RSUD Zainal Umar Sidiki)			

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes yang mencapai akreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Anggrek)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Atinggola)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Biau)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Bulola)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Dambalo)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			bidang kesehatan (PKM Dulukapa)		MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Gentuma)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Ilangata)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Kwandang)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Limbato)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Molingkapoto)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Monano)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Ponelo)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Sumalata)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Tolinggula)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase faskes yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (RSUD Tolinggula Melayani)	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (RSUD Zainal Umar Sidiki)	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase faskes yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Tingkat pengangguran berkurang		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan pemuda yang memiliki keterampilan yang berdaya saing (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase tenaga kerja rentan yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang dibina (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Tercipta perlindungan atas kehidupan layak yang adil berkualitas dan kemiskinan terentaskan	Cakupan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang inklusif meningkat dan berkualitas	Terlaksananya kegiatan tenaga kerja yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tingkat kemiskinan(%)		
				Persentase rumah tangga yang menerima program bantuan pangan (%)		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Persentase rumah tangga yang menerima Program Keluarga Harapan (%)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (Dinas Kesehatan)	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				DM dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€â€Persentase cakupan JKN yang dibiayai oleh daerah (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				â€¢Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Hipertensi dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / Tenaga Kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luarÂ pantiÂ sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayananÂ sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Pengentasan kemiskinan semakin baik dan ketimpangan berkurang		Rasio Gini (Indeks)		
				Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah)		
				Indeks kedalaman kemiskinan (Poin)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial / Tenaga Kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luarÂ pantiÂ sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayananÂ sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara signifikan melalui pengembangan potensi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan mudah demi penguatan kapasitas fiskal daerah	Pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, kontributif terhadap ekonomi regional, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ditunjang oleh kemandirian pangan	Produktivitas perekonomian daerah yang ditopang daya saing dan kontribusi industri, perdagangan, investasi, dan ekonomi kreatif meningkat	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				PDRB per kapita (Ribu Rupiah)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Indeks masyarakat digital (Indeks)		
				Return on Asset (ROA) BUMD (%)		
				Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)		
				Akselerasi pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)		
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
				Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang telah memiliki izin (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kemudahan investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk wilayah keanggotaan dalam daerah (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang aktif (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase tera/tera ulang dan pengawasan pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Kesinambungan fiskal terwujud dan kemandirian daerah meningkat		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))		
				Rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan (%)		
				Indeks kemandirian fiskal (%)		
		Pemerataan pembangunan daerah dimulai dari desa	Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Kerja Sama Antar Desa	Persentase Desa Yang Melakukan Kerja Sama Berdasarkan Peraturan Bersama Desa (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
		Ketersediaan pangan meningkat		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas dan kemandirian peternak dalam mengelola usaha peternakan yang produktif dan efisien	Persentase kelompok peternak yang mengalami peningkatan produktifitas (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Persentase Penyuluh Pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana pertanian (Bidang Perkebunan)	Rasio ketersediaan bibit tanaman perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana pertanian (Bidang PSP)	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana pertanian (Bidang TPH)	Rasio ketersediaan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh izin usaha (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya pelaku usaha peternakan yang memiliki izin/ terverifikasi	Persentase pelaku usaha peternakan yang memiliki izin/ terverifikasi (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana di bidang peternakan dan kesehatan hewan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana di bidang peternakan dan kesehatan hewan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana pertanian	Persentase Area Pertanian yang terlindungi terhadap luas tanam (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Memperkuat konektivitas, infrastruktur yang berdaya saing, dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan penyangga Ibukota Nusantara (IKN) dan wilayah maritim utara Indonesia	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru				KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak	Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase pertumbuhan populasi ternak sapi (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase pertumbuhan populasi ternak kambing (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya prasarana peternakan yang memadai, berfungsi dan berkelanjutan	Rasio prasarana peternakan yang dimanfaatkan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
	Meningkatnya konektivitas antar daerah dan layanan infrastruktur dasar			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Indeks)		
				Indeks transformasi kawasan transmigrasi(Poin)		
				Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan (%)		
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Efektivitas Sistem Drainase dalam Mengurangi Genangan dan Resiko Banjir di Kawasan Pemukiman	Rasio luas kawasan pemukiman rawan genangan yang telah tertangani (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan PBG kabupaten/kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Ketertiban dan keselamatan LLAJ (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Indeks kualitas tata ruang wilayah (Indeks)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas prasarana dan perlengkapan transportasi darat	Persentase peningkatan prasarana dan Perlengkapan jalan yang layak fungsi/kondisi baik (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Prasarana Transportasi Laut	Persentase Ketertiban dan Keselamatan Penyeberangan dan pelayaran (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya Perlindungan kawasan Pemukiman dari Resiko Abrasi, Banjir dan Kekeringan Melalui Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur SDA	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Mengembangkan budaya, kualitas lingkungan hidup, memajukan kehidupan sosial yang layak dan aman, serta melestarikan budaya luhur yang hidup dalam masyarakat	Pengelolaan ruang wilayah dengan lingkungan sehat, adaptif, dan berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur dasar, kelembagaan dan ekonomi desa di Kawasan Transmigrasi Sumalata	Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah			
			Terselenggaranya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Persentase desa di kawasan transmigrasi berstatus Mandiri (%)		
			Meningkatnya indeks transformasi kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang telah mencapai klasifikasi Mandiri menurut Izin Tinggal Kunjungan Terbatas (ITKT) (%)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Terpenuhinya sarana prasarana kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki fasilitas pelayanan dasar yang berfungsi optimal (jalan, air listrik, sanitasi) (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		Kualitas kesehatan lingkungan meningkat		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya frekuensi dan cakupan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di wilayah kabupaten gorontalo utara	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat terkait kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan Lokasi yang Dilakukan Pengujian Kualitas Lingkungan (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya layanan pencegahan dan penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			meningkatkan tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkat Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	Hak anak, keluarga, dan masyarakat terpenuhi secara berkualitas			Indeks Perlindungan Anak (IPA)(Indeks)		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)(Indeks)		
				Indeks kualitas keluarga (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Cakupan program responsif dan pemenuhan kesetaraan gender, kualitas dan ketahanan keluarga, serta pemenuhan hak-hak anak meningkat		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Jumlah Desa Yang Layak Anak	Persentase Desa Layak Anak (%)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terkendalinya jumlah anak dalam keluarga	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga (Angka)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Nilai kearifan lokal dan budaya sebagai identitas daerah berkembang dan lestari	Apresiasi, pengembangan, dan pelestarian cagar dan budaya daerah meningkat		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)((%))		
				Persentase cagar budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi Gorontalo (%)		
				Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	Kondusivitas, keamanan, dan ketertiban daerah tercipta	Keamanan umum, kohesi sosial, kerukunan agama, ras, maupun kelompok masyarakat terwujud		Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk(poin)		
				Angka Kejadian Konflik Ideologi , Politik , Ekonomi , Sosial Budaya , Pertahanan Dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) (Angka)		
			Meningkatnya Etika Dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

Berdasarkan analisis atas capaian kinerja sasaran misi, maka terlihat sasaran yang masih memerlukan penanganan khusus, waktu yang dibutuhkan, serta tahapan yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Tahun-								
	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sasaran 1.1	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, inovasi, dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien								
Sasaran 1.2									
Sasaran 1.3									
Sasaran 2.1	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, daya saing pemuda dan olahraga, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial, serta mengentaskan kemiskinan								
Sasaran 2.2									
Sasaran 2.3									
Sasaran 2.4									
Sasaran 2.5									
Sasaran 3.1	Meningkatkan produktivitas ekonomi dan inklusivitas hasil pembangunan, serta meningkatkan kemandirian pangan								
Sasaran 3.2									
Sasaran 3.3									
Sasaran 3.4									
Sasaran 4.1	Meningkatkan pemenuhan dan kualitas layanan infrastruktur serta mendorong kawasan transmigrasi memiliki daya saing								
Sasaran 4.2									
Sasaran 5.1	Meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi risiko bencana, meningkatkan kemampuan penanganan persampahan, pemenuhan hak-hak gender, keluarga, dan anak, melestarikan peninggalan budaya, serta meningkatkan keamanan dan kohesi sosial								
Sasaran 5.2									
Sasaran 5.3									
Sasaran 5.4									
Sasaran 5.5									

Berdasarkan arah dan fokus pembangunan tahunan tersebut, tema pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu 5 tahun sebagai berikut.

Tabel 3.14
Tema Pembangunan

No.	Tahun	Tema Pembangunan
1	2025	Mewujudkan Gorontalo Utara yang ber-Cahaya, dengan masyarakat yang berdaya dan bersinergi, hidup CERIA, dan berbudaya, melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2	2026	Meningkatkan Gorontalo Utara yang ber-Cahaya, dengan masyarakat yang berdaya dan bersinergi, hidup CERIA, dan berbudaya, melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
3	2027	Memantapkan Gorontalo Utara yang ber-Cahaya, dengan masyarakat yang berdaya dan bersinergi, hidup CERIA, dan berbudaya, melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

No.	Tahun	Tema Pembangunan
4	2028	Memantapkan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, menuju Gorontalo Utara yang berdaya-sinergis, CERIA, dan berbudaya.
5	2029	Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian menuju Gorontalo Utara yang berdaya-sinergis, CERIA, dan berbudaya.

3.5 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan kawasan merupakan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah menetapkan kawasan-kawasan prioritas yang memiliki nilai strategis. Penetapan ini dilakukan dalam dua tingkatan: Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Gorontalo terdiri atas :

- 1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Gorontalo – Paguyaman – Kwandang
- (2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. KSN Danau Limboto, dan
 - b. KSN Teintegrasi Ekoregion Laut Sulu - Sulawesi
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu :
 - a. KSN Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara

B. Kawasan Strategis Provinsi (KSP),

Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - a. KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan LautKawasan Strategis Provinsi (KSP) Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan sangat potensial karena memiliki garis pantai yang

cukup panjang diwilayah Laut Sulawesi, serta berada dijalur trans sulawesi. Pengembangan KSP Minanga diupayakan melalui :

1. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dikawasan Pariwisata yang memperhatikan aspek keberlanjutan.
 2. Mendorong peningkatan 3 A (Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi) dikawasan pariwisata.
 3. Mendorong sarana prasarana infrastruktur dasar dikawasan pariwisata yang dapat menunjang kegiatan wisata seperti jalan, drainase dan sebagainya.
 4. Mendorong investasi sektor pariwisata dalam penyediaan sarana pokok, penunjang dan pelengkap pariwisata (tourisme superstructures).
 5. Mendorong peningkatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menunjang pariwisata.
- b. KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut

Kawasan strategis Provinsi (KSP) Terintegrasi Anggrek berada di Kabupaten Gorontalo Utara dan Wilayah Laut pesisir utara Pulau Sulawesi. KSP Terintegrasi Anggrek menjadi sangat strategis sebagai pendorong utama percepatan pembangunan Gorontalo. KSP Provinsi berada dikawasan Pelabuhan Anggrek sebagai jalur transportasi laut, dengan akses mudah ke jalur perdagangan internasional utama, yang ditunjang dengan potensi agribisnis yang kuat dengan produk unggulan pertaniannya. Pengembangan kawasan strategis Anggrek diupayakan melalui:

1. Peningkatan sarana dan prasarana melalui skema pendanaan alternatif (KPBU);
2. Pengembangan kawasan pergudangan dan industri skala kecil yang akan menunjang proses pengolahan dan distribusi dari sentra produksi, baik dari Kawasan Strategis Marisa-Randangan, Kawasan Stretegis Paguyaman-Wonosari maupun dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Gorontalo;

3. Penguatan peran dan kontribusi investasi swasta dalam pengelolaan dan pengembangan KSP Terintegrasi Anggrek;
4. Penyiapan langkah alternatif pengelolaan limbah industri dan pergudangan sebagai bagian dari dampak pengolahan bahan produksi mentah untuk menambah nilai;
5. Pemetaan pengembangan KSP Terintegrasi Anggrek sebagai salah satu pintu masuk Pelabuhan skala nasional dan internasional berdasarkan letak strategis berhadapan dengan Laut Sulawesi.

C. Arah Pengembangan Wilayah dalam RPJMN 2025-2029

Dukungan arah pengembangan wilayah dalam RPJMN di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :

1. Pengembangan kawasan komoditas unggulan:
 - Pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.
 - Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa
2. Pengembangan Kawasan afirmasi:
 - Pembangunan Kawasan Perbatasan/kec.perbatasan di Kec perbatasan Gorontalo Utara
 - Pengembangan Kawasan Transmigrasi (KT) Sumalata.

D. Arah Pengembangan Wilayah dalam RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo

Kebijakan pembangunan wilayah dalam RPJMD provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut :

Tabel 3.15
Indikasi Intervensi Pembangunan dan Pendanaan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Minanga, KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
2	Fasilitasi Pengembangan PKSN Kwandang dan Anggrek, PKW Kwandang, PKL Atinggola, dan Tolinggula	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi, seperti Labano – Tolongio, Tolinggula Ulu – Cempaka Putih	APBN/ APBD Provinsi
4	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul dan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan	APBN
5	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api	APBN

No	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
6	Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
7	Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air seperti Daerah Irigasi Tolinggula serta daerah potensi irigasi lainnya	APBD Provinsi
8	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
9	Fasilitasi Penyediaan Air Baku	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
10	Fasilitasi perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
11	Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
12	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
13	Penguatan Perlindungan Sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
14	Optimalisasi pengelolaan Persampahan dan Sanitasi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
15	Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
16	Program pertanian dan Perkebunan yang menyasar kepada masyarakat rentan sektor pertanian	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
17	Identifikasi dan pengelolaan potensi pertambangan serta hilirisasi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
18	Pengembangan destinasi wisata dan jejaring kerjasama pemasaran destinasi lintas wilayah	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
19	Program peternakan dan pemanfaatan produk untuk menunjang peternakan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
20	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
21	Program pengembangan dan Kajian peningkatan kapasitas dan status kewenangan ruas jalan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
22	Program penanganan sarana dan prasarana tapal batas wilayah provinsi	APBN dan APBD Provinsi
23	Penanganan lanjutan dan arahan optimal terhadap kawasan transmigrasi dan enklave	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut
24	Intervensi dan Penanganan Potensi strategis Sektor Perikanan dan Kelautan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorut

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029

E. Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031, arah pengembangan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan melalui pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten yang terintegrasi untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

1. Pengembangan Struktur Ruang Wilayah

a. Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Pengembangan hierarki pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gorontalo Utara diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari:

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kawasan perkotaan Kwandang sebagai PKW yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten, mengingat posisinya sebagai ibukota kabupaten dengan kelengkapan fasilitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kawasan perkotaan Ilangata di Kecamatan Anggrek, yang merupakan kota pelabuhan dengan nilai ekonomis tinggi dan berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

3) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

- Kawasan perkotaan Monano di Kecamatan Monano, yang berbatasan dengan PKL Anggrek dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi PKL.
- Kawasan perkotaan Kotajin di Kecamatan Atinggola, yang berada di lokasi strategis sebagai pintu gerbang dari arah Provinsi Sulawesi Utara.

4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kawasan perkotaan Bulontio di Kecamatan Sumalata yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat permukiman di tingkat desa yang tersebar di seluruh kecamatan, meliputi Desa Kotajin (Kecamatan Atinggola), Desa Gentuma (Kecamatan Gentuma Raya), Desa Dambalo (Kecamatan Tomilito), Desa Ponelo (Kecamatan Ponelo Kepulauan), Desa Buladu (Kecamatan Sumalata Timur), Desa Biau (Kecamatan Biau), dan Desa Tolinggula Tengah (Kecamatan Tolinggula).

b. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

1) Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pengembangan jaringan transportasi darat diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, meliputi:

- Jaringan Jalan Arteri Primer: Jalan lintas barat Sulawesi (Atinggola/batas Provinsi Sulawesi Utara – Kwandang – Molingkapoto – Anggrek – Bulontio – Tolinggula – Buol/batas Provinsi Sulawesi Tengah), jalan pengumpan antar jalan lintas Sulawesi (Kwandang – Isimu), dan ruas jalan Anggrek – Paguyaman.
- Jaringan Jalan Kolektor Primer: Meliputi ruas jalan Atinggola – Tapa, Tolinggula – Marisa, Anggrek – Tibawa, Posso – Daenaa, dan Pontolo – Daenaa.
- Jaringan Jalan Bebas Hambatan: Rencana pengembangan jalan bebas hambatan Sulawesi Utara – Atinggola – Isimu sebagai bagian dari sistem transportasi regional.
- Terminal: Pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Kwandang, terminal Tipe C di Moluo, Atinggola, Gentuma Raya, Anggrek, Monano, Sumalata, dan Papualangi, serta terminal barang di Kecamatan Anggrek.

2) Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan pelabuhan dan alur pelayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi maritim:

- Pelabuhan Pengumpul: Pelabuhan Kwandang dan Pelabuhan Anggrek yang melayani perdagangan regional dan nasional.
- Pelabuhan Pengumpan: Pelabuhan di Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Gentuma Raya, dan Atinggola.
- Alur Pelayaran: Pengembangan jalur pelayaran nasional, provinsi, dan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Gorontalo Utara dengan wilayah lain di Indonesia.
- Pelabuhan Penyeberangan: Pelabuhan Penyeberangan Kwandang dengan jalur ke Buol, Toli-Toli, Balikpapan, Amurang, dan Tarakan.

c. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1) Sistem Jaringan Energi

- Pembangkit Listrik: Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Mini Hidro di Kecamatan Atinggola, Monano, Sumalata, Biau, dan Tolinggula, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Kwandang.
- Jaringan Transmisi: Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik 275 KV dan 150 KV pada jalur Isimu – Molingkapoto – Kwandang – Atinggola.

2) Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Pengembangan Stasiun Telepon Otomatis (STO) di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.
- Pengembangan jaringan telepon seluler sepanjang ruas jalan utama di seluruh kecamatan.
- Pengendalian pembangunan menara/tower telekomunikasi di seluruh kecamatan.

3) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Daerah Irigasi (DI): Pengembangan dan pemeliharaan DI Tolinggula (1.180 Ha) sebagai kewenangan Provinsi, serta 36 DI kewenangan

Kabupaten dengan total luasan mencapai ribuan hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

- Prasarana Air Baku: Pembangunan embung di Pontolo, Tolango, Ilangata, Monano, dan Tolinggula.
- Jaringan Air Bersih: Pengembangan jaringan perpipaan di seluruh kecamatan.
- Pengendalian Banjir: Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pengendalian banjir berbasis DAS.

4) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

- Persampahan: Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Tomilito dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.
- Air Minum: Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di seluruh kecamatan.
- Drainase: Pembangunan drainase sekunder dan tersier di seluruh kecamatan, terutama di daerah rawan genangan.
- Mitigasi Bencana: Pengembangan jalur mitigasi di daerah pesisir dan jalur evakuasi menuju dataran tinggi.

2. Pengembangan Pola Ruang Wilayah

a. Kawasan Lindung

Pengembangan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan daya dukung wilayah, meliputi:

1) Kawasan Hutan Lindung

- Seluas ±8.015,86 Ha yang tersebar di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Tomilito, Kwandang, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Monano, Sumalata, Biau, dan Tolinggula.
- Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Pulau Mohinggito, Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan.

2) Kawasan Perlindungan Setempat

- Sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi.
- Sempadan sungai sesuai dengan kategori dan lokasi sungai.

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah perkotaan.

3) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

- Kawasan Suaka Margasatwa Nantu (± 16.035 Ha) di Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata, dan Biau.
- Kawasan Cagar Alam Mas-Popaya-Raja (± 147 Ha) di Kecamatan Sumalata Timur.
- Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (± 3.267 Ha) di Kecamatan Atinggola.
- Kawasan pantai berhutan bakau (± 2.779 Ha) di kawasan pesisir.
- Kawasan cagar budaya Benteng Orange di Kecamatan Kwandang.

4) Kawasan Rawan Bencana

Identifikasi dan pemetaan kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gempa bumi, dan tsunami untuk penerapan mitigasi bencana.

b. Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas ($\pm 65.590,58$ Ha), Hutan Produksi Tetap ($\pm 15.445,97$ Ha), dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi ($\pm 5.760,6$ Ha) yang tersebar di seluruh kecamatan.

2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Seluas ± 3.018 Ha yang dikembangkan pada lahan milik rakyat di luar kawasan hutan negara.

3) Kawasan Peruntukan Pertanian

- Tanaman Pangan: Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya, dan Atinggola, dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas ± 5.600 Ha.
- Hortikultura: Pengembangan sentra hortikultura di seluruh kecamatan.

- Perkebunan: Pengembangan komoditas kakao, kelapa dalam, singkong gajah, cengkih, dan kelapa sawit di berbagai kecamatan sesuai kesesuaian lahan.
- Peternakan: Pengembangan sentra ternak sapi dan kambing di seluruh kecamatan, serta ternak unggas di Kecamatan Monano, Anggrek, Kwandang, dan Tomilito.

4) Kawasan Peruntukan Perikanan

- Perikanan Tangkap: Dikembangkan di pesisir dan laut Kecamatan Kwandang, Anggrek, Gentuma Raya, Atinggola, Sumalata, dan Tolinggula.
- Budidaya Perikanan: Pengembangan budidaya perikanan laut, air payau, dan air tawar di berbagai kecamatan.
- Minapolitan: Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya, dan Sumalata yang didukung infrastruktur penunjang.
- Pemasaran: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kwandang, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Gentuma Raya, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sumalata dan Tolinggula.

5) Kawasan Peruntukan Pertambangan

- Mineral Logam: Pengembangan kawasan potensi pertambangan emas, perak, tembaga, pasir besi, dan galena di berbagai kecamatan.
- Batuan: Pengembangan kawasan potensi pertambangan andesit dan granit.

6) Kawasan Peruntukan Industri

- Agro Industri Terpadu: Pengembangan industri berbasis pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan di Kecamatan Tomilito, Kwandang, Anggrek, dan Monano.
- Industri Manufaktur: Pengembangan di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, dan Biau.
- Kawasan Penyangga: Di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, dan Tolinggula.

- Komoditas Unggulan: Pengembangan industri ikan olahan, gula merah, furniture bambu, kerang laut, dan aneka produk kerajinan khas daerah.

7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

- Pariwisata Budaya: Pelestarian dan pengembangan Situs budaya Tanjung Kramat di Hutokalo, Benteng Oranye di Jembatan Merah, dan Situs Kotajin.
- Pariwisata Alam:
 - Wisata pantai di Monano, Minanga (Atinggola), Tolitehuyu, Dunu, Mokonow, dan Pasir Putih Tolinggula.
 - Wisata air terjun di Didingga (Biau), Masuru (Kwandang), dan Butato (Sumalata).
 - Wisata bawah laut di Buladu, Pulau Raja dan Popaya, serta Pulau Lampu.
 - Wisata pulau di Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito.
 - Wisata terbatas di Cagar Alam Mas-Popaya-Raja dan Suaka Margasatwa Nantu.

8) Kawasan Peruntukan Permukiman

- Permukiman Perkotaan: Pengembangan di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.
- Permukiman Perdesaan: Pengembangan mengikuti pola kawasan agropolitan dan minapolitan, serta pengembangan permukiman transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Pengembangan fasilitas kesehatan (RSUD), olahraga (stadion), dan pertahanan keamanan (TNI AD, AL, AU, dan Denpom) di berbagai kecamatan.

3. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. KSP SUMATOA (Sumalata, Tolinggula, Anggrek), berupa pengembangan Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis;
- b. KSP ANGGREK, berupa pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan;
- c. KSP GOPANDANG · (Gorontalo, Paguyaman, Kwandang), kawasan potensl
- d. pengembangan ekonomi dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri;
- e. pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten G_orontalo Utara serta Kawasan pengelolaan Teluk Tomini.

Kawasan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan untuk percepatan pembangunan dan daya saing wilayah, terdiri dari:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

1) Kawasan Potensi Ekonomi Cepat Tumbuh

Di Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Anggrek yang memiliki kelengkapan infrastruktur dan aksesibilitas tinggi.

2) Kawasan Minapolitan

Dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, dan Sumalata untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan.

3) Kawasan Agropolitan

Dikembangkan di Kecamatan Sumalata, Biau, dan Tolinggula untuk pengembangan pertanian terpadu.

4) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Dikembangkan di Kecamatan Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, dan Tolinggula melalui transformasi kawasan transmigrasi.

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya di Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Kwandang.

c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

- Kawasan pengembangan ilmu pengetahuan sumber daya alam di Kecamatan Kwandang dan Sumalata.
 - Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek.
- d. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Kawasan Suaka Margasatwa Nantu, Cagar Alam Pulau Mas-Popaya-Raja, dan DAS prioritas (Boliyohuto-Bulontio, Moyongo, Kwandang, Andagile, dan Bubode).
- e. Kawasan Strategis Pendukung KSN Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan pertahanan dan keamanan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, meliputi Brigade Infantri 22 Otamanasa, Batalyon 715, Kompi A Batalyon 713 Satyatama, Kodim, TNI AL, Satradar TNI AU, dan Denpom.

4. Strategi Pengembangan Wilayah

Untuk mewujudkan arah pengembangan wilayah sebagaimana ditetapkan dalam RTRW, Kabupaten Gorontalo Utara menerapkan strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan dan Pemulihan Fungsi Kawasan Lindung
- Memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kepastian investasi.
 - Melaksanakan program rehabilitasi lingkungan berbasis masyarakat, terutama di HTN dan hutan lindung.
 - Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan serta pencemaran.
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
 - Menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam pemulihan fungsi kawasan lindung.
- b. Pengembangan Kawasan Budidaya Berbasis Konservasi
- Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis.

- Mengembangkan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya.
 - Mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan nasional.
 - Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya alam laut yang bernilai ekonomi.
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam terbarukan.
- c. Peningkatan Sumber Daya Air dengan Prinsip Pengelolaan Wilayah Sungai
- Memelihara kelestarian sumber daya air dengan mempertahankan kawasan konservasi.
 - Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air berdasarkan keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan.
 - Mengintegrasikan sistem prasarana sumber daya air dengan pengembangan pusat permukiman dan kawasan budidaya.
 - Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui pengembangan SDM dan kelembagaan.
- d. Pembangunan Prasarana dan Sarana Berbasis Mitigasi Bencana dan Agroindustri
- Meningkatkan aksesibilitas PKW dengan PPL melalui pengembangan ekonomi perdesaan terpadu berbasis pertanian.
 - Mengembangkan jalur transportasi industri pengolahan hasil agro sesuai komoditas unggulan.
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi secara merata.
 - Memperkecil kesenjangan pertumbuhan antar PKW dengan PPK melalui peningkatan fasilitas ekonomi dan sosial budaya.
 - Membangun prasarana yang berfungsi sebagai jalur evakuasi dan fasilitas tanggap bencana.
- e. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan dengan Sistem Mitigasi Bencana
- Mengembangkan pusat-pusat permukiman secara selaras dan serasi.

- Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.
- Menyusun program pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada permukiman transmigrasi.
- Membangun perangkat keras dan lunak untuk mitigasi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran hutan.

5. Arahan Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan melalui:

- Program Pemanfaatan Ruang: Disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang mencakup rencana program, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana.
- Pendanaan: Bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Melalui ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi bagi pelanggar.

6. Integrasi dengan Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional dan Provinsi

Pengembangan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan RTRW terintegrasi dengan:

- KSN Gorontalo-Paguyaman-Kwandang: Melalui pengembangan PKW Kwandang dan PKL Anggrek yang menjadi simpul ekonomi regional.
- KSP SUMATOA dan KSP Anggrek: Melalui pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan pelabuhan terintegrasi.
- Kawasan Perbatasan: Pengembangan kawasan di Kecamatan Atinggola sebagai pintu gerbang Provinsi Gorontalo dari arah Sulawesi Utara.
- Kawasan Transmigrasi: Transformasi menjadi Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Sumalata dan kecamatan lainnya.



Bab

4

*Program Perangkat
Daerah & Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah*



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pentingnya keselarasan dan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. RPJMD bukan hanya sekadar dokumen perencanaan lima tahunan, melainkan pedoman strategis yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah dan terukur. Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan daerah harus disinergikan sejak awal perencanaan, agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif serta hasilnya dapat diawasi dan dievaluasi secara berkesinambungan. Keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi fondasi bagi terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses perencanaan yang matang akan menghasilkan arah kebijakan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan sasaran yang tepat. Pelaksanaan program yang mengacu pada perencanaan tersebut harus dilakukan secara disiplin dengan memperhatikan efisiensi sumber daya dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, sedangkan aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, disusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran guna menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya *mandatory* pada belanja sektor pendidikan, Alokasi Dana Desa, Belanja Pegawai, serta pada bidang pengawasan.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya, sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen strategis dalam menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam arah kebijakan, strategi, serta target pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam proses penyusunannya, diperlukan pendekatan yang tidak hanya partisipatif dan berbasis data, tetapi juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sinkronisasi dalam perencanaan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal. Tanpa perencanaan yang sinkron, risiko terjadinya tumpang tindih program dan inefisiensi alokasi sumber daya akan semakin besar.

Selanjutnya, sinkronisasi pada tahap pelaksanaan menjadi krusial agar program-program yang telah direncanakan dapat dijalankan secara efektif dan berkesinambungan oleh seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan yang tidak selaras dengan perencanaan akan berpotensi menurunkan kualitas capaian pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pada saat yang sama, fungsi pengawasan harus berjalan selaras untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan berlangsung sesuai dengan ketentuan, tepat

sasaran, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang terintegrasi akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus menjadi instrumen koreksi terhadap pelaksanaan program yang belum optimal.

Dengan demikian, keberhasilan penyusunan dan implementasi RPJMD sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat disinkronkan secara menyeluruh. Hal ini akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Pola pengeluaran per perangkat daerah, disesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan. Selain itu, akan diuraikan juga program pembangunan daerah dan indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan perangkat daerah penanggung jawab. Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan dilengkapi dengan struktur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan akan diuraikan pada Tabel 4.1.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*) yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					241.275.133.293,000		241.925.966.577,000		242.781.095.509,000		243.653.327.019,000		243.740.449.435,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					199.169.519.982,000		199.169.519.982,000		199.169.519.982,000		199.169.519.982,000		199.169.519.982,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	55,25	55,5	56	199.169.519.982,000	56,5	199.169.519.982,000	57	199.169.519.982,000	57,5	199.169.519.982,000	58	199.169.519.982,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					41.935.613.311,000		42.584.446.595,000		43.437.535.527,000		44.307.686.237,000		44.392.686.237,000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	96,23	96,75	97,28	41.935.613.311,000	97,81	42.584.446.595,000	98,33	43.437.535.527,000	98,86	44.307.686.237,000	99,39	44.392.686.237,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	91,98	94,52	97,07		99,62		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	96,23	96,75	97,28		97,81		98,33		98,86		99,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	20,33	22,56	24,89		27,22		29,56		31,89		34,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					62.500.000,000		63.750.000,000		65.025.000,000		66.325.500,000		67.652.010,000	
Meningkatnya Kualitas kurikulum pendidikan	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan (%)	60,1	70	75	62.500.000,000	80	63.750.000,000	85	65.025.000,000	90	66.325.500,000	95	67.652.010,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					37.500.000,000		38.250.000,000		39.015.000,000		39.795.300,000		40.591.206,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	62,04	65	67	37.500.000,000	70	38.250.000,000	75	39.015.000,000	80	39.795.300,000	90	40.591.206,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)			100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					157.162.101.555,000		157.755.343.586,000		160.910.450.459,000		164.128.659.465,000		167.411.232.658,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					90.092.894.823,000		90.466.752.719,000		92.276.087.774,000		94.121.609.528,000		96.004.041.720,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (Dinas Kesehatan)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	60.650.000.000,000	92	60.435.000.000,000	93	61.643.700.000,000	94	62.876.574.000,000	95	64.134.105.480,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Anggrek)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	961.509.938,000	92	980.740.137,000	93	1.000.354.939,000	94	1.020.362.038,000	95	1.040.769.279,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Atinggola)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	1.102.234.484,000	92	1.124.279.174,000	93	1.146.764.757,000	94	1.169.700.052,000	95	1.193.094.053,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Biau)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	383.370.088,000	92	391.037.490,000	93	398.858.240,000	94	406.835.404,000	95	414.972.112,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Buluila)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	392.190.365,000	92	400.034.172,000	93	408.034.856,000	94	416.195.553,000	95	424.519.464,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Dambalo)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	702.004.191,000	92	716.044.274,000	93	730.365.160,000	94	744.972.464,000	95	759.871.912,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Dulukapa)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	525.996.048,000	92	536.515.969,000	93	547.246.288,000	94	558.191.214,000	95	569.355.038,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	717.052.153,000	92	731.393.196,000	93	746.021.060,000	94	760.941.481,000	95	776.160.311,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sesuai Target (PKM Gentuma)														
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Ilangata)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	516.585.888,000	92	526.917.606,000	93	537.455.958,000	94	548.205.077,000	95	559.169.179,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Kwandang)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	1.459.887.882,000	92	1.489.085.640,000	93	1.518.867.352,000	94	1.549.244.699,000	95	1.580.229.593,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Limbato)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	220.079.718,000	92	224.481.312,000	93	228.970.939,000	94	233.550.357,000	95	238.221.365,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Molingkapoto)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	851.493.380,000	92	868.523.248,000	93	885.893.713,000	94	903.611.587,000	95	921.683.819,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Monano)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	569.049.272,000	92	580.430.257,000	93	592.038.863,000	94	603.879.640,000	95	615.957.233,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Ponelo)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	351.773.467,000	92	358.808.936,000	93	365.985.115,000	94	373.304.817,000	95	380.770.914,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Sumalata)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	1.076.861.640,000	92	1.098.398.873,000	93	1.120.366.850,000	94	1.142.774.187,000	95	1.165.629.671,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (PKM Tolinggula)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	862.806.309,000	92	880.062.435,000	93	897.663.684,000	94	915.616.958,000	95	933.929.297,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (RSUD Tolinggula Melayani)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)			91	750.000.000,000	92	765.000.000,000	93	780.300.000,000	94	795.906.000,000	95	811.824.120,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target (RSUD Zainal Umar Sidiki)	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	88	90	91	18.000.000.000,000	92	18.360.000.000,000	93	18.727.200.000,000	94	19.101.744.000,000	95	19.483.778.880,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					52.743.367.732,000		52.676.235.087,000		53.729.759.789,000		54.804.354.985,000		55.900.442.084,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (Dinas Kesehatan)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89	90	90	34.554.878.737,000	90	34.123.976.312,000	90	34.806.455.838,000	90	35.502.584.955,000	90	36.212.636.654,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	22	21,9	21,8		21,6		21,5		21,4		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	74,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	DM dalam pengendalian (%)	5,6	10	17,5		20		22,5		30		32,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Hipertensi dalam pengendalian (%)	16,5	10	20		35		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	296,7	272,9	251,1		231,2		212,5		195,5		179,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase cakupan JKN yang dibiayai oleh daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	50	50	50		50		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	90	92	94		96		98		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12,0		11,5		11		10		10,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	46	53	60		66		73		80		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	80	80	80		80		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	50	50	50		50		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan									
Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi svarat (%)		20	50	60	70	80	80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4				
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4				
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		6,5		6,5		6		
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan (%)	90	90	92		93		95		95		95		
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Anggrek)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90		90		793.739.999,000		90		809.614.799,000		90
Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		76,46	80	85	90	93	95		95					
Cakupan penemuan kasus TB (%)		49	90	90	90	90	90		90					
Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)		5,69	6,5	8,1	9,7	12,19	16,20		24,40					
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanelayanan kesehatan sesuai standar (%)		90,67	100	100	100	100	100		100					
Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		94,66	100	100	100	100	100		100					
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)		92,18	100	100	100	100	100		100					
Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)		6	6,5	8,13	9,75	12,2	16,2		20,3					
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)		93,52	100	100	100	100	100		100					
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)		94,31	100	100	100	100	100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		6,5		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Atinggola)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	960.157.999,000	90	979.361.159,000	90	998.948.382,000	90	1.018.927.350,000	90	1.039.305.897,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanakaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanakaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		6,5		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Biau)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	685.522.000,000	90	699.232.440,000	90	713.217.089,000	90	727.481.431,000	90	742.031.059,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	74,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		90	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		24,40	24,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		20,3	20,3	20,3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		10	10	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan					
Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Buloila)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	546.760.999,000	90	557.696.219,000	90	568.850.143,000	90	580.227.146,000	90	591.831.689,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	7.646	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkn pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Dambalo)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89	90	90	787.979.999,000	90	803.739.599,000	90	819.814.391,000	90	836.210.679,000	90	852.934.892,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)															
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50				60				70			80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		20	50				60				70			80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77				79				81			83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						
Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Dulukapa)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89	90	90	727.081.000,000	90	741.622.620,000	90	756.455.072,000	90	771.584.174,000	90	787.015.857,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		80	80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		83	83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4	1,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		10	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4	23,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		6	6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		97	97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Gentuma)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	100	100	100	823.302.000,000	100	839.768.040,000	100	856.563.401,000	100	873.694.669,000	100	891.168.562,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	89	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Ilangata)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	709.342.000,000	90	723.528.840,000	90	737.999.417,000	90	752.759.405,000	90	767.814.593,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100				
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100				
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100				
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80				
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Kwandang)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	1.009.624.000,000	90	1.029.816.480,000	90	1.050.412.810,000	90	1.071.421.066,000	90	1.092.849.487,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	7.646	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5	7	7	6,5	6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						
â€¢Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92	93	94	95	97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Limbato)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89	90	90	501.698.000,000	90	511.731.960,000	90	521.966.599,000	90	532.405.931,000	90	543.054.050,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,3		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase pelaksanaan program kesehatan masvarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Molingkapoto)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	1.019.062.000,000	90	1.039.443.240,000	90	1.060.232.105,000	90	1.081.436.747,000	90	1.103.065.482,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100				
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	5	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,66	100	100		100		100		100				
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		
Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100				
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83				
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4						
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4						
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5				
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Monano)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89	90	90	719.668.000,000	90	734.061.360,000	90	748.742.587,000	90	763.717.439,000	90	778.991.788,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		80	80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		83	83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4	1,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4	23,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5	7	7	6,5	6	6	6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Ponelo)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	530.019.000,000	90	540.619.380,000	90	551.431.768,000	90	562.460.403,000	90	573.709.611,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Sumalata)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	655.337.999,000	90	668.444.759,000	90	681.813.654,000	90	695.449.927,000	90	709.358.926,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100				
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	95,32	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	98,79	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (PKM Tolinggula)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	89	90	90	719.194.000,000	90	733.577.880,000	90	748.249.438,000	90	763.214.426,000	90	778.478.715,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	76,46	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	94,66	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Desa dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	5,69	6,5	8,1		9,7		12,19		16,20		24,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	92,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	6	6,5	8,13		9,75		12,2		16,2		20,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	94,31	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun (%)	14,7	12,4	12		11,5		11		10,5		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program kesehatan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelaksanaan program Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pengukuran kebugaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		20	50		60		70		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	95,34	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting balita (%)	7,3	8	7,5		7		6,5		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer (%)	90	90	92		93		94		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (RSUD Tolinggula Melayani)	Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	50	50	50	1.000.000.000,000	50	1.020.000.000,000	100	1.040.400.000,000	100	1.061.208.000,000	100	1.082.432.160,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	90	92	94		96		98		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang mencapai akreditasi paripurna (%)	76,47	76,47	76,47		76,47		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan (%)	90	90	92		93		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (RSUD Zainal Umar Sidiki)	Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	50	50	50	6.000.000.000,000	50	6.120.000.000,000	100	6.242.400.000,000	100	6.367.248.000,000	100	6.494.592.960,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	90	92	94		96		98		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang mencapai akreditasi paripurna (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	â€Tingkat kepuasan pasien di fasilitias kesehatan lanjutan (%)	90	90	92		93		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					13.254.302.000,000		13.519.388.040,000		13.789.775.801,000		14.065.571.317,000		14.346.882.743,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase faskes yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar (%)	29,41	35,29	41,18	3.631.702.000,000	52,94	3.704.336.040,000	76,47	3.778.422.761,000	82,35	3.853.991.216,000	88,24	3.931.071.040,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (%)	80	85	90		93		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	50	50	50				50		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (RSUD Tolinggula Melayani)	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (%)	80	85	90	750.000.000,000	93	765.000.000,000	95	780.300.000,000	95	795.906.000,000	95	811.824.120,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (RSUD Zainal Umar Sidiki)	Persentase faskes yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar (%)	85	90	92	8.872.600.000,000	93	9.050.052.000,000	95	9.231.053.040,000	95	9.415.674.101,000	95	9.603.987.583,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya (%)	80	85	90				93		95		95		95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					255.577.000,000		260.688.540,000		265.902.311,000		271.220.357,000		276.644.764,000			
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100	100	255.577.000,000	100	260.688.540,000	100	265.902.311,000	100	271.220.357,000	100	276.644.764,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					815.960.000,000		832.279.200,000		848.924.784,000		865.903.278,000		883.221.347,000			
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	325.000.000,000	38	331.500.000,000	40	338.130.000,000	45	344.892.600,000	50	351.790.452,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Anggrek)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	27.765.000,000	38	28.320.300,000	40	28.886.706,000	45	29.464.440,000	50	30.053.729,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Atinggola)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	21.850.000,000	38	22.287.000,000	40	22.732.740,000	45	23.187.395,000	50	23.651.143,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Biau)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	12.300.000,000	38	12.546.000,000	40	12.796.920,000	45	13.052.858,000	50	13.313.916,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Buloila)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	20.860.000,000	38	21.277.200,000	40	21.702.744,000	45	22.136.799,000	50	22.579.535,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Dambalo)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	17.515.000,000	38	17.865.300,000	40	18.222.606,000	45	18.587.058,000	50	18.958.799,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Dulukapa)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	39.975.000,000	38	40.774.500,000	40	41.589.990,000	45	42.421.790,000	50	43.270.226,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Gentuma)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	59.755.000,000	38	60.950.100,000	40	62.169.102,000	45	63.412.484,000	50	64.680.734,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Ilangata)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	29.160.000,000	38	29.743.200,000	40	30.338.064,000	45	30.944.825,000	50	31.563.722,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Kwandang)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	15.000.000,000	38	15.300.000,000	40	15.606.000,000	45	15.918.120,000	50	16.236.482,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Limbato)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	17.495.000,000	38	17.844.900,000	40	18.201.798,000	45	18.565.833,000	50	18.937.151,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Molingkapoto)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	59.755.000,000	38	60.950.100,000	40	62.169.102,000	45	63.412.484,000	50	64.680.734,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Monano)	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	47.185.000,000	38	48.128.700,000	40	49.091.274,000	45	50.073.099,000	50	51.074.561,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	70.290.000,000	38	71.695.800,000	40	73.129.716,000	45	74.592.310,000	50	76.084.157,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kesehatan (PKM Poneo)														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Sumalata)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	39.975.000,000	38	40.774.500,000	40	41.589.990,000	45	42.421.790,000	50	43.270.226,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (PKM Tolinggula)	Persentase Desa menerapkan kebijakan wawasan kesehatan (%)	33	35	35	12.080.000,000	38	12.321.600,000	40	12.568.032,000	45	12.819.393,000	50	13.075.780,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					50.209.979.199,000		50.250.871.798,000		48.135.710.090,000		49.151.457.805,000		54.955.856.082,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.512.532.699,000		3.512.532.699,000		3.512.532.699,000		3.512.532.699,000		3.512.532.699,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	3.512.532.699,000	100	3.512.532.699,000	100	3.512.532.699,000	100	3.512.532.699,000	100	3.512.532.699,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.000.000.000,000		7.000.000.000,000		7.000.000.000,000		7.000.000.000,000		7.000.000.000,000	
Meningkatnya Perlindungan kawasan Pemukiman dari Resiko Abrasi, Banjir dan Kekeringan Melalui Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur SDA	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	4,40	4,45	4,45	7.000.000.000,000	4,45	7.000.000.000,000	4,45	7.000.000.000,000	4,45	7.000.000.000,000	4,45	7.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	1,11	1,8	2,11		3,11		4,11		5,11		6,11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10.000.000.000,000		10.000.000.000,000		10.500.000.000,000		11.000.000.000,000		11.500.000.000,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	90,71	91,15	91,90	10.000.000.000,000	92,27	10.000.000.000,000	93,10	10.500.000.000,000	93,89	11.000.000.000,000	94,50	11.500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)													
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.250.000.000,000		3.250.000.000,000		3.500.000.000,000		3.750.000.000,000		4.000.000.000,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	84,07	85,87	86,65	3.250.000.000,000	87,39	3.250.000.000,000	87,98	3.500.000.000,000	88,54	3.750.000.000,000	89,50	4.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas Sistem Drainase dalam Mengurangi Genangan dan Resiko Banjir di Kawasan Pemukiman	Rasio luas kawasan pemukiman rawan genangan yang telah tertangani (%)	0	2	2	3.500.000.000,000	2	3.500.000.000,000	2	3.500.000.000,000	2	3.500.000.000,000	2	3.500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					7.922.446.500,000		7.922.446.500,000		7.922.446.500,000		7.922.446.500,000		7.922.446.500,000	
Meningkatnya Keterlibatan dan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan PBG kabupaten/kota (%)	100	100	100	7.922.446.500,000	100	7.922.446.500,000	100	7.922.446.500,000	100	7.922.446.500,000	100	7.922.446.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					14.400.000.000,000		14.440.892.599,000		11.575.730.891,000		11.841.478.606,000		16.895.876.883,000	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	43,52	43,65	44,03	14.400.000.000,000	44,41	14.440.892.599,000	44,79	11.575.730.891,000	45,17	11.841.478.606,000	45,55	16.895.876.883,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					625.000.000,000		625.000.000,000		625.000.000,000		625.000.000,000		625.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Indeks kualitas tata ruang wilayah (Indeks)	60	63,00	65	625.000.000,000	68	625.000.000,000	70	625.000.000,000	73	625.000.000,000	74	625.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.446.463.269,000		4.493.431.791,000		4.559.376.043,000		4.590.260.820,000		4.640.123.293,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.097.137.184,000		2.097.137.184,000		2.097.137.184,000		2.097.137.184,000		2.097.137.184,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	2.097.137.184,000	100	2.097.137.184,000	100	2.097.137.184,000	100	2.097.137.184,000	100	2.097.137.184,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					130.050.000,000		132.651.000,000		153.304.020,000		138.010.100,000		140.770.302,000	
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	100	100	100	130.050.000,000	100	132.651.000,000	100	153.304.020,000	100	138.010.100,000	100	140.770.302,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					950.000.000,000		969.000.000,000		988.380.000,000		1.008.147.600,000		1.028.310.552,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten (%)	0	2	2	950.000.000,000	2	969.000.000,000	2	988.380.000,000	2	1.008.147.600,000	2	1.028.310.552,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					561.250.000,000		572.475.000,000		583.924.500,000		595.602.990,000		607.515.050,000	
Terselenggaranya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	4,00	4,00	561.250.000,000	4,00	572.475.000,000	4,00	583.924.500,000	4,00	595.602.990,000	4,00	607.515.050,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					708.026.085,000		722.168.607,000		736.630.339,000		751.362.946,000		766.390.205,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	0	20	20	708.026.085,000	20	722.168.607,000	20	736.630.339,000	20	751.362.946,000	20	766.390.205,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.082.381.428,000		9.674.201.428,000		9.792.357.828,000		9.937.680.326,000		10.049.529.845,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.876.204.398,000		5.876.204.398,000		5.876.204.398,000		5.876.204.398,000		5.876.204.398,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	93,16	100	100	3.815.612.641,000	100	3.815.612.641,000	100	3.815.612.641,000	100	3.815.612.641,000	100	3.815.612.641,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	85,10	100	100	2.060.591.757,000	100	2.060.591.757,000	100	2.060.591.757,000	100	2.060.591.757,000	100	2.060.591.757,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	30	65	65	200.000.000,000	65	210.000.000,000	75	220.200.000,000	75	230.604.000,000	78	241.216.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.365.177.030,000		2.940.177.030,000		3.041.177.030,000		3.169.000.000,000		3.263.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	90,94	100	100	1.080.000.000,000	100	1.410.000.000,000	100	1.420.000.000,000	100	1.450.000.000,000	100	1.500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	82,85	100	100	485.177.030,000	100	645.177.030,000	100	735.177.030,000	100	832.000.000,000	100	875.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	100	100	800.000.000,000	100	885.000.000,000	100	886.000.000,000	100	887.000.000,000	100	888.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					341.000.000,000		347.820.000,000		354.776.400,000		361.871.928,000		369.109.367,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pencegahan dan penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	15	150.000.000,000	15	151.000.000,000	13	153.000.000,000	13	155.000.000,000	13	159.109.367,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	46,15	47	50	191.000.000,000	50	196.820.000,000	55	201.776.400,000	60	206.871.928,000	65	210.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.664.772.092,000		3.689.260.057,000		3.714.237.783,000		3.739.715.062,000		3.765.701.888,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.440.373.779,000		2.440.373.779,000		2.440.373.779,000		2.440.373.779,000		2.440.373.779,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	2.440.373.779,000	100	2.440.373.779,000	100	2.440.373.779,000	100	2.440.373.779,000	100	2.440.373.779,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					236.787.123,000		241.522.865,000		246.353.322,000		251.280.389,000		256.305.996,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayananA sosial (%)	0	80	80	236.787.123,000	80	241.522.865,000	85	246.353.322,000	85	251.280.389,000	90	256.305.996,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase pekerja sosial / Tenaga Kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luarA pantiA sosial (%)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					268.584.765,000		273.956.460,000		279.435.590,000		285.024.301,000		290.724.787,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	70,00	75,00	268.584.765,000	80,00	273.956.460,000	80,00	279.435.590,000	85,00	285.024.301,000	85,00	290.724.787,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	69,05	70,00	75,00		80,00		80,00		85,00		85,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					576.776.425,000		588.311.954,000		600.078.193,000		612.079.756,000		624.321.352,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan	0	90	90	576.776.425,000	90	588.311.954,000	90	600.078.193,000	90	612.079.756,000	90	624.321.352,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan pendataan data fakir miskin (%)													
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0	30	30		33		36		38		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					142.250.000,000		145.094.999,000		147.996.899,000		150.956.837,000		153.975.974,000	
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	142.250.000,000	100	145.094.999,000	100	147.996.899,000	100	150.956.837,000	100	153.975.974,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	87,63	90	90		90		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.575.749.309,000		4.736.288.649,000		5.047.157.737,000		5.416.334.267,000		5.855.434.443,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.766.149.309,000		2.775.768.649,000		2.787.153.737,000		2.798.601.867,000		2.810.113.411,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	94,39	100	100	2.766.149.309,000	100	2.775.768.649,000	100	2.787.153.737,000	100	2.798.601.867,000	100	2.810.113.411,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					150.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Terlaksananya kegiatan tenaga kerja yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)		100	100	150.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					300.000.000,000		306.000.000,000		312.120.000,000		318.362.400,000		324.729.648,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	0,19	0,22	0,24	300.000.000,000	0,26	306.000.000,000	0,28	312.120.000,000	0,50	318.362.400,000	1	324.729.648,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					150.000.000,000		153.000.000,000		156.060.000,000		159.181.200,000		162.364.824,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	9,79	10	11	150.000.000,000	12	153.000.000,000	13	156.060.000,000	14	159.181.200,000	15	162.364.824,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.209.600.000,000		1.451.520.000,000		1.741.824.000,000		2.090.188.800,000		2.508.226.560,000	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	8,19	9,20	9,21	1.209.600.000,000	9,22	1.451.520.000,000	9,23	1.741.824.000,000	9,24	2.090.188.800,000	9,25	2.508.226.560,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase tenaga kerja rentan yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan (%)	16,83	16,97	20,37		24,44		29,33		35,19		42,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.417.195.857,000		3.449.631.605,000		3.482.716.069,000		3.516.462.221,000		3.550.883.296,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.795.408.434,000		1.795.408.434,000		1.795.408.434,000		1.795.408.434,000		1.795.408.434,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	82,24	100	100	1.795.408.434,000	100	1.795.408.434,000	100	1.795.408.434,000	100	1.795.408.434,000	100	1.795.408.434,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					323.883.875,000		330.361.553,000		336.968.784,000		343.708.159,000		350.582.322,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	28,27	28,57	29,27	323.883.875,000	29,77	330.361.553,000	30,27	336.968.784,000	30,77	343.708.159,000	31,27	350.582.322,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	56,14	57,14	59,74		61,14		63,74		65,14		67,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					185.164.413,000		188.867.701,000		192.645.055,000		196.497.956,000		200.427.915,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	185.164.413,000	100	188.867.701,000	100	192.645.055,000	100	196.497.956,000	100	200.427.915,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					376.881.635,000		384.419.267,000		392.107.653,000		399.949.806,000		407.948.802,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	75	77	79	376.881.635,000	81	384.419.267,000	83	392.107.653,000	85	399.949.806,000	87	407.948.802,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50.225.000,000		51.429.500,000		52.658.090,000		53.911.252,000		55.189.477,000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	5	15	50.225.000,000	20	51.429.500,000	25	52.658.090,000	30	53.911.252,000	35	55.189.477,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					150.525.000,000		153.335.500,000		156.202.210,000		159.126.254,000		162.108.779,000	
Meningkatnya Jumlah Desa Yang Layak Anak	Persentase Desa Layak Anak (%)	3	10	15	150.525.000,000	20	153.335.500,000	25	156.202.210,000	30	159.126.254,000	35	162.108.779,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					535.107.500,000		545.809.650,000		556.725.843,000		567.860.360,000		579.217.567,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	535.107.500,000	100	545.809.650,000	100	556.725.843,000	100	567.860.360,000	100	579.217.567,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.117.925.350,000		3.140.925.350,000		3.164.385.350,000		3.188.314.550,000		3.212.722.334,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.967.925.350,000		1.967.925.350,000		1.967.925.350,000		1.967.925.350,000		1.967.925.350,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.967.925.350,000	100	1.967.925.350,000	100	1.967.925.350,000	100	1.967.925.350,000	100	1.967.925.350,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAILIHATAN dan					250.000.000,000		255.000.000,000		260.100.000,000		265.302.000,000		270.608.040,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	22,1	21,8	21,69	250.000.000,000	22,11	255.000.000,000	22,54	260.100.000,000	22,96	265.302.000,000	23,39	270.608.040,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	0	78,0	78,5	500.000.000,000	79,0	510.000.000,000	79,5	520.200.000,000	80,0	530.604.000,000	80,5	541.216.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					300.000.000,000		306.000.000,000		312.120.000,000		318.362.400,000		324.729.648,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	100	100	100	300.000.000,000	100	306.000.000,000	100	312.120.000,000	100	318.362.400,000	100	324.729.648,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0	0	50	100.000.000,000	55	102.000.000,000	60	104.040.000,000	65	106.120.800,000	70	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.876.891.000,000		1.901.891.000,000		1.901.891.000,000		1.901.891.000,000		1.901.891.000,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					126.891.000,000		126.891.000,000		126.891.000,000		126.891.000,000		126.891.000,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	0	20	20	126.891.000,000	20	126.891.000,000	20	126.891.000,000	20	126.891.000,000	20	126.891.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.750.000.000,000		1.775.000.000,000		1.775.000.000,000		1.775.000.000,000		1.775.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	15,79	15,79	1.750.000.000,000	15,79	1.775.000.000,000	15,79	1.775.000.000,000	15,79	1.775.000.000,000	15,79	1.775.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					3.398.456.482,000		3.641.006.482,000		4.151.006.482,000		4.261.006.482,000		4.361.006.482,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.192.456.482,000		2.192.456.482,000		2.192.456.482,000		2.192.456.482,000		2.192.456.482,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	2.192.456.482,000	100	2.192.456.482,000	100	2.192.456.482,000	100	2.192.456.482,000	100	2.192.456.482,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	100	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	0	150.000.000,000	100	150.000.000,000	0	150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,000		132.550.000,000		132.550.000,000		132.550.000,000		132.550.000,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan Lokasi yang Dilakukan Pengujian Kualitas Lingkungan (%)	100	58,33	66,67	100.000.000,000	75,00	132.550.000,000	83,33	132.550.000,000	91,67	132.550.000,000	100	132.550.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					50.000.000,000		60.000.000,000		70.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkatnya kualitas keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	3	10	50.000.000,000	15	60.000.000,000	20	70.000.000,000	24	80.000.000,000	28	80.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	83,72	86,05	88,37	25.000.000,000	90,70	25.000.000,000	93,02	25.000.000,000	95,35	25.000.000,000	97,67	25.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN					31.000.000,000		31.000.000,000		31.000.000,000		31.000.000,000		31.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya frekuensi dan cakupan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan diwilayah kabupaten gorontalo utara	Presentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi (%)	15,79	13,16	13,16	31.000.000,000	16,13	31.000.000,000	18,18	31.000.000,000	20,59	31.000.000,000	22,86	31.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat terkait kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan	Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	100	55	75	25.000.000,000	80	25.000.000,000	85	25.000.000,000	90	25.000.000,000	95	25.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					800.000.000,000		1.000.000.000,000		1.500.000.000,000		1.600.000.000,000		1.700.000.000,000	
meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	37,28	40,28	43,28	800.000.000,000	46,28	1.000.000.000,000	49,28	1.500.000.000,000	52,28	1.600.000.000,000	55,28	1.700.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.760.442.113,000		2.774.465.454,000		2.788.769.262,000		2.803.359.146,000		2.818.240.828,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.059.275.044,000		2.059.275.044,000		2.059.275.044,000		2.059.275.044,000		2.059.275.044,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	62,85	62,90	70,05	2.059.275.044,000	70,10	2.059.275.044,000	70,15	2.059.275.044,000	70,20	2.059.275.044,000	70,30	2.059.275.044,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					451.167.069,000		460.190.410,000		469.394.218,000		478.782.102,000		488.357.744,000	
Meningkatnya kualitas layanan strategis pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Adminstrasi Pendaftaran Penduduk (%)	51,46	52,05	52,10	451.167.069,000	52,15	460.190.410,000	52,20	469.394.218,000	52,25	478.782.102,000	52,30	488.357.744,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					150.000.000,000		153.000.000,000		156.060.000,000		159.181.200,000		162.364.824,000	
Meningkatnya Kualitas layanan strategis pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan (%)	99,95	100	100	150.000.000,000	100	153.000.000,000	100	156.060.000,000	100	159.181.200,000	100	162.364.824,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					50.000.000,000		51.000.000,000		52.020.000,000		53.060.400,000		54.121.608,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,000	100	51.000.000,000	100	52.020.000,000	100	53.060.400,000	100	54.121.608,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					50.000.000,000		51.000.000,000		52.020.000,000		53.060.400,000		54.121.608,000	
Meningkatnya Penyebaran Profil Kependudukan Ke Lembaga Pengguna	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	0	100	100	50.000.000,000	100	51.000.000,000	100	52.020.000,000	100	53.060.400,000	100	54.121.608,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.637.492.396,000		4.691.628.641,000		4.754.667.767,000		4.822.100.556,000		4.890.725.948,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.930.680.155,000		1.930.680.155,000		1.938.500.311,000		1.949.609.751,000		1.960.785.327,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	93	95	93	1.930.680.155,000	93,5	1.930.680.155,000	94	1.938.500.311,000	95,5	1.949.609.751,000	96	1.960.785.327,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					125.000.000,000		127.500.000,000		130.050.000,000		132.651.000,000		135.304.020,000	
Meningkatnya Kerja Sama Antar Desa	Persentase Desa Yang Melakukan Kerja Sama Berdasarkan Peraturan Bersama Desa (%)	15,2	18,2	15,4	125.000.000,000	16,4	127.500.000,000	17,4	130.050.000,000	18,4	132.651.000,000	19,4	135.304.020,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					600.000.000,000		606.000.000,000		612.120.000,000		618.362.400,000		624.729.648,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	3,25	8,25	4,25	600.000.000,000	5,25	606.000.000,000	6,25	612.120.000,000	7,25	618.362.400,000	8,25	624.729.648,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.981.812.241,000		2.027.448.486,000		2.073.997.456,000		2.121.477.405,000		2.169.906.953,000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	21,33	21,33	22,33	1.981.812.241,000	23,33	2.027.448.486,000	24,33	2.073.997.456,000	25,33	2.121.477.405,000	26,33	2.169.906.953,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.392.392.267,000		7.513.114.859,000		7.637.936.079,000		7.765.013.829,000		7.894.494.427,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.758.600.219,000		1.766.746.970,000		1.776.538.832,000		1.786.388.637,000		1.796.296.731,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	90	95	1.758.600.219,000	95	1.766.746.970,000	96	1.776.538.832,000	96	1.786.388.637,000	97	1.796.296.731,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					169.250.000,000		172.635.000,000		176.087.700,000		179.609.454,000		183.201.643,000	
Terkendalinya jumlah anak dalam keluarga	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga (Angka)	1,08	2,1	2,1	169.250.000,000	2,1	172.635.000,000	2,1	176.087.700,000	2,1	179.609.454,000	2,1	183.201.643,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.395.297.048,000		4.483.202.989,000		4.572.867.049,000		4.664.324.390,000		4.757.610.878,000	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	43,8	43.2-43.8	42.7-43.2	1.000.000.000,000	42.2-42.7	1.080.000.000,000	41.7-42.2	1.163.000.000,000	41.2-41.7	1.250.000.000,000	40.7-41.2	1.300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
program keluarga berencana	(Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)													Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	28,45	29,5	30	3.395.297.048,000	30,25	3.403.202.989,000	33,91	3.409.867.049,000	35	3.414.324.390,000	35	3.457.610.878,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.069.245.000,000		1.090.529.900,000		1.112.442.498,000		1.134.691.348,000		1.157.385.175,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,4	56,9	57,5	1.069.245.000,000	58	1.090.529.900,000	58,5	1.112.442.498,000	59,1	1.134.691.348,000	59,6	1.157.385.175,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	100	100	100				100				100		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					4.727.255.662,000		4.727.255.662,000		4.727.255.662,000		4.727.255.662,000		4.727.255.662,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.329.081.079,000		3.329.081.079,000		3.329.081.079,000		3.329.081.079,000		3.329.081.079,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	94,23	95	95	3.329.081.079,000	95	3.329.081.079,000	95	3.329.081.079,000	95	3.329.081.079,000	95	3.329.081.079,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.055.357.683,000		1.055.357.683,000		1.055.357.683,000		1.055.357.683,000		1.055.357.683,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Ketertiban dan keselamatan LLAJ (%)	0	54	65	166.000.000,000	7	166.000.000,000	75	166.000.000,000	8	166.000.000,000	85	166.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kualitas prasarana dan perlengkapan transportasi darat	Persentase peningkatan prasarana dan Perlengkapan jalan yang layak fungsi/kondisiA baik (%)	0	55	60	889.357.683,000	65	889.357.683,000	70	889.357.683,000	75	889.357.683,000	80	889.357.683,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					342.816.900,000		342.816.900,000		342.816.900,000		342.816.900,000		342.816.900,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Prasarana Transportasi Laut	Persentase Ketertiban dan Keselamatan PenyeberanganÂ danÂ pelayaran (%)	0	40	45	342.816.900,000	50	342.816.900,000	55	342.816.900,000	60	342.816.900,000	65	342.816.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.682.359.852,000		5.690.872.259,000		5.700.759.004,000		5.710.695.810,000		5.720.682.969,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.182.359.852,000		3.190.872.259,000		3.200.759.004,000		3.210.695.810,000		3.220.682.969,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	3.182.359.852,000	100	3.190.872.259,000	100	3.200.759.004,000	100	3.210.695.810,000	100	3.220.682.969,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komukasi Publik Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	110	200	200	500.000.000,000	200	500.000.000,000	200	500.000.000,000	200	500.000.000,000	200	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	
Menigkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	110	200	200	2.000.000.000,000	200	2.000.000.000,000	200	2.000.000.000,000	200	2.000.000.000,000	200	2.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.323.113.996,000		3.339.313.996,000		3.355.837.996,000		3.372.692.476,000		3.389.884.046,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.513.113.996,000		2.513.113.996,000		2.513.113.996,000		2.513.113.996,000		2.513.113.996,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	2.513.113.996,000	100	2.513.113.996,000	100	2.513.113.996,000	100	2.513.113.996,000	100	2.513.113.996,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.000.000,000		51.000.000,000		52.020.000,000		53.060.400,000		54.121.608,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang aktif (%)	0	10	10,5	50.000.000,000	10,7	51.000.000,000	10,9	52.020.000,000	11,01	53.060.400,000	11,3	54.121.608,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Presentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk wilayah keanggotanÂ dalamÂ daerah (%)	0	12,5	13,00	100.000.000,000	13,7	102.000.000,000	14,1	104.040.000,000	14,5	106.120.800,000	14,7	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Presentase koperasi yang melaksanakanÂ RAT (%)	0	12,5	13,00	100.000.000,000	13,07	102.000.000,000	14,1	104.040.000,000	14,5	106.120.800,000	14,7	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,77	1,7	2,1	500.000.000,000	2,4	510.000.000,000	2,6	520.200.000,000	2,8	530.604.000,000	2,8	541.216.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					60.000.000,000		61.200.000,000		62.424.000,000		63.672.480,000		64.945.930,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang telah memiliki izin (%)	21,63	21,65	21,66	60.000.000,000	21,67	61.200.000,000	21,68	62.424.000,000	21,69	63.672.480,000	21,69	64.945.930,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.729.502.287,000		3.445.632.287,000		3.462.084.887,000		3.478.866.539,000		3.495.983.824,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.623.002.287,000		2.623.002.287,000		2.623.002.287,000		2.623.002.287,000		2.623.002.287,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	93	95	97	2.623.002.287,000	97,00	2.623.002.287,000	98,00	2.623.002.287,000	98,00	2.623.002.287,000	98,00	2.623.002.287,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya kemudahan investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	341,35	100	100	100.000.000,000	100	102.000.000,000	100	104.040.000,000	100	106.120.800,000	100	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					206.500.000,000		210.630.000,000		214.842.600,000		219.139.452,000		223.522.241,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	0	1,55	206.500.000,000	1,53	210.630.000,000	1,51	214.842.600,000	1,58	219.139.452,000	1,66	223.522.241,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,000		306.000.000,000		312.120.000,000		318.362.400,000		324.729.648,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	76,53	35,96	39,14	300.000.000,000	42,19	306.000.000,000	45,13	312.120.000,000	47,96	318.362.400,000	50,96	324.729.648,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					400.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	400.000.000,000	100	102.000.000,000	100	104.040.000,000	100	106.120.800,000	100	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100.000.000,000	100	102.000.000,000	100	104.040.000,000	100	106.120.800,000	100	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.725.173.166,000		2.742.566.922,000		2.760.308.553,000		2.778.405.017,000		2.796.863.410,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.855.485.360,000		1.855.485.360,000		1.855.485.360,000		1.855.485.360,000		1.855.485.360,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	89,68	100	100	1.855.485.360,000	100	1.855.485.360,000	100	1.855.485.360,000	100	1.855.485.360,000	100	1.855.485.360,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan pemuda yang memiliki keterampilan yang berdaya saing (%)	1,77	1,78	1,79	100.000.000,000	1,80	102.000.000,000	1,81	104.040.000,000	1,82	106.120.800,000	1,83	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang dibina (%)	0	0	100	500.000.000,000	100	510.000.000,000	100	520.200.000,000	100	530.604.000,000	100	541.216.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					269.687.806,000		275.081.562,000		280.583.193,000		286.194.857,000		291.918.754,000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0	0	0	269.687.806,000	0	275.081.562,000	0	280.583.193,000	0	286.194.857,000	0	291.918.754,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik Nasional	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	1,92	2,00	2,00	50.000.000,000	2,00	50.000.000,000	2,00	50.000.000,000	2,00	50.000.000,000	2,00	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	5	5	25.000.000,000	5	25.000.000,000	5	25.000.000,000	5	25.000.000,000	5	25.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					250.000.000,000		255.000.000,000		260.100.000,000		265.302.000,000		270.608.040,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)	0,90	0,90	0,99	100.000.000,000	0,99	102.000.000,000	1,08	104.040.000,000	1,17	106.120.800,000	1,27	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					150.000.000,000		153.000.000,000		156.060.000,000		159.181.200,000		162.364.824,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persepntase)	50,00	50,00	50,00	150.000.000,000	62,5	153.000.000,000	62,5	156.060.000,000	75,00	159.181.200,000	75,00	162.364.824,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.936.436.477,000		2.716.436.477,000		2.716.436.477,000		2.716.436.477,000		2.716.436.477,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.086.436.477,000		2.086.436.477,000		2.086.436.477,000		2.086.436.477,000		2.086.436.477,000	
Capaian indikator kinerja program Perangkat Daerah sesuai target	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)	100	100	100	2.086.436.477,000	100	2.086.436.477,000	100	2.086.436.477,000	100	2.086.436.477,000	100	2.086.436.477,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					823.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	72,62	72,82	72,90	823.000.000,000	73,10	600.000.000,000	73,15	600.000.000,000	73,25	600.000.000,000	73,50	600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					27.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0,1	0,1	27.000.000,000	0,1	30.000.000,000	0,1	30.000.000,000	0,1	30.000.000,000	0,1	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					130.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					70.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000	
Meningkatnya tata-kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	46,51	54,50	62,79	70.000.000,000	67,44	140.000.000,000	72,09	140.000.000,000	76,74	140.000.000,000	83,72	140.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					60.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	3,25	5,25	6,50	60.000.000,000	8,13	120.000.000,000	9,75	120.000.000,000	11,38	120.000.000,000	13,01	120.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7.838.180.050,000		7.928.180.050,000		8.019.980.050,000		8.113.616.050,000		8.209.124.770,000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.338.180.050,000		3.338.180.050,000		3.338.180.050,000		3.338.180.050,000		3.338.180.050,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	69,81	100	100	3.338.180.050,000	100	3.338.180.050,000	100	3.338.180.050,000	100	3.338.180.050,000	100	3.338.180.050,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					2.000.000.000,000		2.020.000.000,000		2.040.400.000,000		2.061.208.000,000		2.082.432.160,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	25,118	28,25 0	25,10 0	2.000.000.000,000	25,15 0	2.020.000.000,000	25,20 0	2.040.400.000,000	25,250	2.061.208.000,000	25,30 0	2.082.432.160,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.000.000.000,000		2.060.000.000,000		2.121.200.000,000		2.183.624.000,000		2.247.296.480,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	21,871	18,49 0	19,04 5	2.000.000.000,000	20,00 0	2.060.000.000,000	20,60 0	2.121.200.000,000	21,218	2.183.624.000,000	21,85 5	2.247.296.480,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	63,70	34,17	34,58	500.000.000,000	34,99	510.000.000,000	35,41	520.200.000,000	35,83	530.604.000,000	36,37	541.216.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.313.694.974,000		3.332.013.475,000		3.350.698.346,000		3.369.756.914,000		3.389.196.654,000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.397.769.915,000		2.397.769.915,000		2.397.769.915,000		2.397.769.915,000		2.397.769.915,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	2.397.769.915,000	100	2.397.769.915,000	100	2.397.769.915,000	100	2.397.769.915,000	100	2.397.769.915,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					575.925.059,000		586.243.560,000		596.828.431,000		607.684.999,000		618.818.699,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0,5	0,5	0,5	575.925.059,000	0,5	586.243.560,000	0,5	596.828.431,000	0,5	607.684.999,000	2,5	618.818.699,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					250.000.000,000		255.000.000,000		260.100.000,000		265.302.000,000		270.608.040,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	100	100	250.000.000,000	100	255.000.000,000	100	260.100.000,000	100	265.302.000,000	100	270.608.040,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI					90.000.000,000		93.000.000,000		96.000.000,000		99.000.000,000		102.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	100	90.000.000,000	100	93.000.000,000	100	96.000.000,000	100	99.000.000,000	100	102.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12.800.543.322,000		13.005.137.844,000		13.203.364.258,000		13.405.275.201,000		13.610.924.361,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.220.817.140,000		6.293.817.140,000		6.357.817.140,000		6.422.817.140,000		6.488.817.140,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	3.500.000.000,000	100	3.573.000.000,000	100	3.637.000.000,000	100	3.702.000.000,000	100	3.768.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	2.720.817.140,000	100	2.720.817.140,000	100	2.720.817.140,000	100	2.720.817.140,000	100	2.720.817.140,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.954.505.338,000		3.013.595.444,000		3.073.867.352,000		3.135.344.700,000		3.198.051.593,000	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana pertanian (Bidang TPH)	Rasio ketersediaan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura (%)	15	15,5	16	1.028.200.000,000	16,5	1.048.764.000,000	17	1.069.739.280,000	17,5	1.091.134.066,000	18	1.112.956.746,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pertumbuhan populasi ternak	Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam (%)	-72,43	0,1	0,1	332.901.700,000	0,1	339.559.734,000	0,1	346.350.928,000	0,1	353.277.947,000	0,1	360.343.505,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase pertumbuhan populasi ternak kambing (%)	-71,17	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
	Persentase pertumbuhan populasi ternak sapi (%)	-35,28	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana pertanian (Bidang PSP)	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (%)	10,2	10,4	10,8	1.043.403.638,000	11	1.070.271.710,000	11,4	1.097.677.144,000	11,7	1.125.630.687,000	12	1.154.143.302,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana pertanian (Bidang Perkebunan)	Rasio ketersediaan bibit tanaman perkebunan (%)	0	2	5	550.000.000,000	5	555.000.000,000	5	560.100.000,000	5	565.302.000,000	5	570.608.040,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.641.386.250,000		2.694.213.975,000		2.748.098.255,000		2.803.060.220,000		2.859.121.424,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	4.213,76	4.213,76	850.000.000,000	4.213,76	867.000.000,000	4.213,76	884.340.000,000	4.213,76	902.026.800,000	4.213,76	920.067.336,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	44,3	44,3	45		46		48		49		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya prasarana peternakan yang memadai, berfungsi dan berkelanjutan	Rasio prasarana peternakan yang dimanfaatkan (%)	76,47	77,23	78,01	1.791.386.250,000	78,79	1.827.213.975,000	79,57	1.863.758.255,000	80,37	1.901.033.420,000	81,17	1.939.054.088,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					200.000.000,000		204.000.000,000		208.080.000,000		212.241.600,000		216.486.432,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	.348,10	5	5	200.000.000,000	5	204.000.000,000	5	208.080.000,000	5	212.241.600,000	5	216.486.432,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					120.000.000,000		122.400.000,000		124.848.000,000		127.344.960,000		129.891.859,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)	60	62	64	100.000.000,000	66	102.000.000,000	68	104.040.000,000	70	106.120.800,000	72	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentasi Area Pertanian yang terlindungi terhadap luas tanam (%)	0	7	7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana di bidang peternakan dan kesehatan hewan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana di bidang peternakan dan kesehatan hewan (%)	0	100	100	20.000.000,000	100	20.400.000,000	100	20.808.000,000	100	21.224.160,000	100	21.648.643,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					40.000.000,000		40.800.000,000		41.616.000,000		42.448.320,000		43.297.286,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh izin usaha (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	20.400.000,000	100	20.808.000,000	100	21.224.160,000	100	21.648.643,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pelaku usaha peternakan yang memiliki izin/ terverifikasi	Persentase pelaku usaha peternakan yang memiliki izin/ terverifikasi (%)	9,56	10,52	11,57	20.000.000,000	12,72	20.400.000,000	14	20.808.000,000	15,40	21.224.160,000	16,94	21.648.643,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					623.834.594,000		636.311.285,000		649.037.511,000		662.018.261,000		675.258.627,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	3	4	4	573.834.594,000	4	585.311.285,000	4	597.017.511,000	4	608.957.861,000	4	621.137.019,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentasi Penyuluh Pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	10	7	7		7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian peternak dalam mengelola usaha peternakan yang produktif dan efisien	Persentase kelompok ternak yang mengalami peningkatan produktifitas (%)	79,76	80,56	81,36	50.000.000,000	82,18	51.000.000,000	83	52.020.000,000	83,83	53.060.400,000	84,67	54.121.608,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.800.000.000,000		1.306.000.000,000		1.312.120.000,000		1.318.362.400,000		1.324.729.648,000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.500.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	100	100	1.500.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					250.000.000,000		255.000.000,000		260.100.000,000		265.302.000,000		270.608.040,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	250.000.000,000	100	255.000.000,000	100	260.100.000,000	100	265.302.000,000	100	270.608.040,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					50.000.000,000		51.000.000,000		52.020.000,000		53.060.400,000		54.121.608,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Presentase tera/tera ulang dan pengawasan pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) (%)	87,21	87,23	87,25	50.000.000,000	87,27	51.000.000,000	87,29	52.020.000,000	88,00	53.060.400,000	88,00	54.121.608,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					430.000.000,000		438.600.000,000		447.645.000,000		456.319.440,000		465.445.829,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					150.000.000,000		153.000.000,000		156.060.000,000		159.181.200,000		162.364.824,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah diA Kabupaten/Kota (%)	13,3	13,4	13,5	150.000.000,000	13,7	153.000.000,000	13,9	156.060.000,000	14,0	159.181.200,000	14,0	162.364.824,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					150.000.000,000		153.000.000,000		156.060.000,000		159.181.200,000		162.364.824,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	0	100	150.000.000,000	100	153.000.000,000	100	156.060.000,000	100	159.181.200,000	100	162.364.824,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					130.000.000,000		132.600.000,000		135.525.000,000		137.957.040,000		140.716.181,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	0	100	100	130.000.000,000	100	132.600.000,000	100	135.525.000,000	100	137.957.040,000	100	140.716.181,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					326.625.000,000		333.157.500,000		339.820.650,000		346.617.063,000		353.549.404,000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,000		102.000.000,000		104.040.000,000		106.120.800,000		108.243.216,000	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	33,33	33,33	66,66	100.000.000,000	66,66	102.000.000,000	66,66	104.040.000,000	66,66	106.120.800,000	66,66	108.243.216,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					26.000.000,000		29.000.000,000		31.000.000,000		35.000.000,000		37.000.000,000	
Terpenuhinya sarana prasarana kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang memiliki fasilitas pelayanan dasar yang berfungsi optimal (jalan, air listrik, sanitasi) (%)			100	26.000.000,000	100	29.000.000,000	100	31.000.000,000	100	35.000.000,000	100	37.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					200.625.000,000		202.157.500,000		204.780.650,000		205.496.263,000		208.306.188,000	
Meningkatnya indeks transformasi kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang telah mencapai klasifikasi “Mandiri” menurut Izin Tinggal Kunjungan Terbatas (ITKT) (%)		100	100	200.625.000,000	100	202.157.500,000	100	204.780.650,000	100	205.496.263,000	100	208.306.188,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					18.148.154.636,020		18.159.891.479,720		18.174.007.149,400		18.188.206.561,080		18.202.490.217,320	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.831.396.406,000		15.833.670.529,110		15.836.405.571,750		15.839.156.840,280		15.841.924.431,980	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	90,39	100	100	15.274.622.793,350	100	15.274.622.793,350	100	15.274.622.793,350	100	15.274.622.793,350	100	15.274.622.793,350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan AKIP Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian AKIP PD secara tepat waktu (%)	100	100	100	164.640.925,440	100	165.313.395,770	100	166.122.162,460	100	166.935.727,230	100	167.754.118,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya koordinasi dan antisipasi hambatan dalam kegiatan pimpinan	Tingkat efektivitas koordinasi dan antisipasi hambatan dalam kegiatan pimpinan (%)	100	100	100	392.132.687,210	100	393.734.339,990	100	395.660.615,940	100	397.598.319,700	100	399.547.519,780	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.713.107.809,610		1.720.104.940,360		1.728.520.251,510		1.736.985.486,760		1.745.500.945,930	
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyampaian LPPD Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu (%)	100	100	100	92.215.777,620	100	92.592.429,350	100	93.045.422,030	100	93.501.101,610	100	93.959.484,730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti (%)	55,56	60	60	1.334.729.511,960	65	1.340.181.169,780	70	1.346.737.770,250	75	1.353.333.268,350	80	1.359.967.897,290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Perikatan Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti (%)	40	70	75	36.975.291,030	80	37.126.315,360	85	37.307.949,320	90	37.490.660,850	95	37.674.456,390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Harmonisasi Rancangan Perda	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi (%)	100	100	100	249.187.229,000	100	250.205.025,870	100	251.429.109,910	100	252.660.455,950	100	253.899.107,520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					603.650.420,410		606.116.010,250		609.081.326,140		612.064.234,040		615.064.839,410	
Terlaksananya Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	121.018.726,220	100	121.513.023,140	100	122.107.504,210	100	122.705.512,100	100	123.307.067,950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya program pembangunan daerah sesuai target	Tingkat capaian program pembangunan daerah (%)	98,66	98,80	98,85	297.466.366,750	98,90	298.681.358,120	98,95	300.142.604,090	99,00	301.612.519,040	99,05	303.091.154,930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Nilai)	67,66	70	75	185.165.327,440	78	185.921.628,990	80	186.831.217,840	85	187.746.202,900	87	188.666.616,530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					28.409.660.088,000		28.865.686.938,000		30.865.686.938,000		31.865.686.938,000		31.865.686.938,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.865.686.938,000		18.865.686.938,000		18.865.686.938,000		18.865.686.938,000		18.865.686.938,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	18.865.686.938,000	100	18.865.686.938,000	100	18.865.686.938,000	100	18.865.686.938,000	100	18.865.686.938,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PFI AKSANAAN					9.543.973.150,000		10.000.000.000,000		12.000.000.000,000		13.000.000.000,000		13.000.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	9.543.973.150,000	100	10.000.000.000,000	100	12.000.000.000,000	100	13.000.000.000,000	100	13.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	7,32	7,40	7,45		7,50		7,55		7,60		7,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					5.480.766.633,000		5.899.805.292,000		6.017.801.398,000		6.138.157.423,000		6.260.920.569,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.573.904.242,000		4.974.805.656,000		5.074.301.769,000		5.175.787.804,000		5.279.303.560,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	4.573.904.242,000	100	4.974.805.656,000	100	5.074.301.769,000	100	5.175.787.804,000	100	5.279.303.560,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					517.509.500,000		527.859.690,000		538.416.883,000		549.185.220,000		560.168.924,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	0	517.509.500,000	0	527.859.690,000	0	538.416.883,000	100	549.185.220,000	0	560.168.924,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					389.352.891,000		397.139.946,000		405.082.746,000		413.184.399,000		421.448.085,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	129.784.297,000	100	132.379.982,000	100	135.027.582,000	100	137.728.133,000	100	140.482.695,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	129.784.297,000	100	132.379.982,000	100	135.027.582,000	100	137.728.133,000	100	140.482.695,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	129.784.297,000	100	132.379.982,000	100	135.027.582,000	100	137.728.133,000	100	140.482.695,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					158.238.340.687,000		161.296.306.149,000		164.421.469.746,000		167.608.578.345,000		170.858.867.542,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.990.241.527,000		7.023.245.006,000		7.062.947.381,000		7.102.885.533,000		7.143.060.874,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	6.990.241.527,000	100	7.023.245.006,000	100	7.062.947.381,000	100	7.102.885.533,000	100	7.143.060.874,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					150.000.000.000,000		153.000.000.000,000		156.060.000.000,000		159.181.200.000,000		162.364.824.000,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran perbendaharaan akuntansi dan pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Penge cualian	Wajar Tanpa Penge cualian	Wajar Tanpa Penge cualian	150.000.000.000,000	Wajar Tanp a Peng ecualian	153.000.000.000,000	Wajar Tanpa Penge cualian	156.060.000.000,000	Wajar Tanpa Pengec ualian	159.181.200.000,000	Wajar Tanpa Penge cualian	162.364.824.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					748.099.160,000		763.061.143,000		778.322.365,000		793.888.812,000		809.766.588,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100	100	100	748.099.160,000	100	763.061.143,000	100	778.322.365,000	100	793.888.812,000	100	809.766.588,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	
Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100	100	100	500.000.000,000	100	510.000.000,000	100	520.200.000,000	100	530.604.000,000	100	541.216.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					3.174.991.709,000		3.188.915.459,000		3.203.117.684,000		3.217.603.954,000		3.232.379.948,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.478.804.209,000		2.478.804.209,000		2.478.804.209,000		2.478.804.209,000		2.478.804.209,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	55,25	56	57	2.478.804.209,000	58	2.478.804.209,000	59	2.478.804.209,000	60	2.478.804.209,000	61	2.478.804.209,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					696.187.500,000		710.111.250,000		724.313.475,000		738.799.745,000		753.575.739,000	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP minimal bernilai baik (%)	99,86	99,87	99,88	696.187.500,000	99,89	710.111.250,000	99,90	724.313.475,000	99,91	738.799.745,000	99,92	753.575.739,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					500.000.000,000		510.000.000,000		520.200.000,000		530.604.000,000		541.216.080,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	2,47	2,5	3	500.000.000,000	3,5	510.000.000,000	4	520.200.000,000	4,5	530.604.000,000	5	541.216.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					723.706.489,000		738.180.618,000		752.944.230,000		768.003.114,000		783.363.176,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					423.706.489,000		432.180.618,000		440.824.230,000		449.640.714,000		458.633.528,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil keiltbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,000	100	302.000.000,000	100	306.000.000,000	100	308.000.000,000	100	310.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	100	100	100	123.706.489,000	100	130.180.618,000	100	134.824.230,000	100	141.640.714,000	100	148.633.528,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					300.000.000,000		306.000.000,000		312.120.000,000		318.362.400,000		324.729.648,000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	100	150.000.000,000	100	152.000.000,000	100	154.000.000,000	100	156.000.000,000	100	160.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	0	100	150.000.000,000	100	154.000.000,000	100	158.120.000,000	100	162.362.400,000	100	164.729.648,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					7.735.694.671,000		7.735.694.671,000		7.735.694.671,000		7.735.694.671,000		7.735.694.671,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.740.834.671,000		5.740.834.671,000		5.740.834.671,000		5.740.834.671,000		5.740.834.671,000	
Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sesuai target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	5.740.834.671,000	100	5.740.834.671,000	100	5.740.834.671,000	100	5.740.834.671,000	100	5.740.834.671,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.480.950.000,000		1.480.950.000,000		1.480.950.000,000		1.480.950.000,000		1.480.950.000,000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	76,65	77,50	79,00	1.480.950.000,000	80,50	1.480.950.000,000	82,00	1.480.950.000,000	83,50	1.480.950.000,000	85,00	1.480.950.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					513.910.000,000		513.910.000,000		513.910.000,000		513.910.000,000		513.910.000,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,06	3,14	3,22	513.910.000,000	3,30	513.910.000,000	3,38	513.910.000,000	3,46	513.910.000,000	3,54	513.910.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					30.206.337.778,000		30.537.437.778,000		30.537.437.778,000		30.536.437.778,000		30.537.387.778,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.174.879.278,000		16.174.879.278,000		16.174.879.278,000		16.174.879.278,000		16.174.879.278,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.244.605.924,000	100	1.244.605.924,000	100	1.244.605.924,000	100	1.244.605.924,000	100	1.244.605.924,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.335.606.556,000	100	1.335.606.556,000	100	1.335.606.556,000	100	1.335.606.556,000	100	1.335.606.556,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.350.875.042,000	100	1.350.875.042,000	100	1.350.875.042,000	100	1.350.875.042,000	100	1.350.875.042,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.387.809.713,000	100	1.387.809.713,000	100	1.387.809.713,000	100	1.387.809.713,000	100	1.387.809.713,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.795.076.052,000	100	1.795.076.052,000	100	1.795.076.052,000	100	1.795.076.052,000	100	1.795.076.052,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.602.319.473,000	100	1.602.319.473,000	100	1.602.319.473,000	100	1.602.319.473,000	100	1.602.319.473,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.549.082.006,000	100	1.549.082.006,000	100	1.549.082.006,000	100	1.549.082.006,000	100	1.549.082.006,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.650.014.817,000	100	1.650.014.817,000	100	1.650.014.817,000	100	1.650.014.817,000	100	1.650.014.817,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.527.766.972,000	100	1.527.766.972,000	100	1.527.766.972,000	100	1.527.766.972,000	100	1.527.766.972,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.544.469.470,000	100	1.544.469.470,000	100	1.544.469.470,000	100	1.544.469.470,000	100	1.544.469.470,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Capaian Indikator Kinerja Program	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	1.187.253.253,000	100	1.187.253.253,000	100	1.187.253.253,000	100	1.187.253.253,000	100	1.187.253.253,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah Sesuai Target														
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.808.900.000,000		2.918.900.000,000		2.918.900.000,000		2.917.900.000,000		2.918.900.000,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	263.000.000,000	87,60	263.000.000,000	88,00	263.000.000,000	88,31	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	86,79	86,80	87,00	278.900.000,000	87,30	288.900.000,000	87,60	288.900.000,000	88,00	288.900.000,000	88,31	288.900.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	262.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	263.000.000,000	87,60	263.000.000,000	88,00	263.000.000,000	88,31	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.786.278.500,000		2.846.278.500,000		2.846.278.500,000		2.846.278.500,000		2.846.228.500,000	
Meningkatnya Pemebdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	100	263.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	258.000.000,000	87,60	258.000.000,000	88,00	258.000.000,000	88,31	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	255.050.000,000	100	260.050.000,000	100	260.050.000,000	100	260.050.000,000	100	260.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	254.228.500,000	100	259.228.500,000	100	259.228.500,000	100	259.228.500,000	100	259.228.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	258.000.000,000	87,60	258.000.000,000	88,00	258.000.000,000	88,31	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	258.000.000,000	87,60	258.000.000,000	88,00	258.000.000,000	88,31	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	258.000.000,000	87,60	258.000.000,000	88,00	258.000.000,000	88,31	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	258.000.000,000	87,60	258.000.000,000	88,00	258.000.000,000	88,31	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.805.000.000,000		2.860.000.000,000		2.860.000.000,000		2.860.000.000,000		2.860.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	275.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase terselenggrnanya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.805.000.000,000		2.860.000.000,000		2.860.000.000,000		2.860.000.000,000		2.860.000.000,000	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	258.000.000,000	87,60	258.000.000,000	88,00	258.000.000,000	88,31	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	86,79	86,80	87,00	253.000.000,000	87,30	258.000.000,000	87,60	258.000.000,000	88,00	258.000.000,000	88,31	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	86,79	86,80	87,00	275.000.000,000	87,30	280.000.000,000	87,60	280.000.000,000	88,00	280.000.000,000	88,31	280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2.826.280.000,000		2.877.380.000,000		2.877.380.000,000		2.877.380.000,000		2.877.380.000,000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	255.437.500,000	100	260.437.500,000	100	260.437.500,000	100	260.437.500,000	100	260.437.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	278.900.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	100	280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	255.535.000,000	100	260.535.000,000	100	260.535.000,000	100	260.535.000,000	100	260.535.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	255.250.000,000	100	260.250.000,000	100	260.250.000,000	100	260.250.000,000	100	260.250.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	255.925.000,000	100	260.925.000,000	100	260.925.000,000	100	260.925.000,000	100	260.925.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	255.437.500,000	100	260.437.500,000	100	260.437.500,000	100	260.437.500,000	100	260.437.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	255.250.000,000	100	260.250.000,000	100	260.250.000,000	100	260.250.000,000	100	260.250.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	255.145.000,000	100	260.145.000,000	100	260.145.000,000	100	260.145.000,000	100	260.145.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	253.400.000,000	100	258.400.000,000	100	258.400.000,000	100	258.400.000,000	100	258.400.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	253.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	100	258.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.234.750.050,000		4.276.990.218,000		4.309.704.890,000		4.347.949.126,000		4.386.718.302,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.373.491.626,000		2.373.491.626,000		2.373.491.626,000		2.373.491.626,000		2.373.491.626,000	
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100	100	100	2.373.491.626,000	100	2.373.491.626,000	100	2.373.491.626,000	100	2.373.491.626,000	100	2.373.491.626,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					558.860.424,000		570.037.632,000		581.438.385,000		593.067.153,000		604.928.496,000	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	558.860.424,000	100	570.037.632,000	100	581.438.385,000	100	593.067.153,000	100	604.928.496,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					600.000.000,000		612.000.000,000		624.000.000,000		636.000.000,000		648.000.000,000	
Meningkatnya Etika Dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	600.000.000,000	100	612.000.000,000	100	624.000.000,000	100	636.000.000,000	100	648.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMERDAYAAN					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		49.772.900,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
Meningkatnya Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	49.772.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					230.000.000,000		235.600.000,000		241.312.000,000		247.138.210,000		253.308.100,000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi , Sosial Dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	230.000.000,000	100	235.600.000,000	100	241.312.000,000	100	247.138.210,000	100	253.308.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					422.398.000,000		435.860.960,000		439.462.879,000		448.252.137,000		457.217.180,000	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	422.398.000,000	100	435.860.960,000	100	439.462.879,000	100	448.252.137,000	100	457.217.180,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					803.957.663.137,020		810.442.102.351,720		819.351.232.825,400		830.207.105.507,080		844.258.702.274,320	

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Tingkat kemiskinan	%	15,89	15,57	14,96	14,37	13,81	13,27	
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,62	69,85	70,09	70,31	70,45	70,57	
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,18	5,20	5,22	5,24	5,26	5,27	
4.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	65,00	67,00	69,00	70,00	72,00	74,00	
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00	71,12	73,04	74,06	74,50	75,00	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,05	122,06	121,08	120,11	119,14	118,18	
7.	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	33.566,65	34.385,30	34.938,23	35.337,48	36.243,48	37.400,00	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	3,03	3,01	2,98	2,95	2,93	
9.	Rasio Gini	Indeks	0,4200	0,4115	0,4104	0,4090	0,4085	0,4074	
10.	Prevalensi Stunting	%	23,67	21,74	19,81	17,88	15,95	14,00	
11.	Skor EPPD	Angka	3,015	3,092	3,167	3,246	3,323	3,4	
12.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	126,82	123,05	122,06	121,08	120,11	119,14	118,18	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,35	0,37	0,40	0,42	0,45	0,47	0,50	
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,88	79,26	79,66	80,05	80,45	80,86	81,26	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	77,09	79,10	79,27	79,44	79,62	79,79	79,92	
5	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	504,04	525,21	548,84	574,64	602,22	632,23	665,85	
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	60,48	72,20	72,40	72,60	72,80	73,00	73,20	
7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,60	83,42	83,62	83,82	84,02	84,22	84,42	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	57,14	60,32	62,35	64,34	66,56	68,23	70,01	
2	Tingkat kemiskinan	%	16,83	15,89	15,57	14,96	14,37	13,81	13,27	
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,83	69,62	69,85	70,09	70,31	70,45	70,57	
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	52,48	54,45	55,76	56,98	57,78	58,67	60,05	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,17	5,18	5,20	5,22	5,24	5,26	5,27	
6	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	33.443,64	33.566,65	34.385,30	34.938,23	35.337,48	36.243,48	37.400,00	
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82,80	83,67	85,27	87,57	89,34	91,54	92,50	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	97,50	98,00	98,50	98,80	98,90	99,00	99,00	
9	Persentase cagar budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi Gorontalo	%	50,00	50,00	50,00	62,5	62,5	75,00	75,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
10	Rasio Gini	Indeks	0,435	0,4200	0,4115	0,4104	0,4090	0,4085	0,4074	
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	76,92	76,93	76,94	76,95	76,96	76,97	76,98	
12	Indeks pendidikan	Poin	9,95	9,97	9,99	10,02	10,04	10,06	10,10	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,79	3,05	3,03	3,01	2,98	2,95	2,93	
14	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	10.476	10.950	11.520	12.120	12.750	13.410	14.110	
15	Prevalensi Stunting	%	25,60	23,67	21,74	19,81	17,88	15,95	14,00	
16	Persentase rumah tangga yang menerima Program Keluarga Harapan	%	31,35	30,30	29,10	27,80	26,50	25,20	24,00	
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,178	0,173	0,168	0,163	0,158	0,153	0,148	
18	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	58,10	58,15	58,22	58,34	58,71	59,03	59,14	
19	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	0,90	0,90	0,99	0,99	1,08	1,17	1,27	
20	Indeks kedalaman kemiskinan	Poin	3,41	3,25	3,10	2,95	2,80	2,65	2,50	
21	Persentase rumah tangga yang menerima program bantuan pangan	%	40,91	39,20	37,40	35,60	33,80	32,00	30,20	
22	Indeks kualitas keluarga	%	78,24	79,75	81,25	81,75	82,50	83,75	84,25	
23	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	72,62	72,25	72,90	73,10	73,15	73,25	73,50	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	0	65,00	67,00	69,00	70,00	72,00	74,00	
2	Indeks transformasi kawasan transmigrasi	Poin	0	0,645	0,657	0,675	0,685	0,695	0,705	
3	Indeks inovasi daerah	poin	46,47	48,65	51,15	56,45	58,67	61,15	63,00	
4	Persentase Desa Mandiri	%	39,02	41,95	44,88	48,78	52,68	58,54	63,41	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	1,79	1,80	1,81	1,82	1,86	1,88	1,90	
6	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	%	73,00	73,54	73,98	74,34	74,93	75,45	75,88	
7	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,20	0,22	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	
8	Persentase desa di kawasan transmigrasi berstatus mandiri	%	32,81	34,96	37,40	40,65	43,90	48,78	52,85	
9	Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	10,93	10,97	11,05	11,10	11,25	11,30	11,38	
10	Indeks kemandirian fiskal	%	4,84	4,90	5,02	5,10	5,28	5,33	5,46	
11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	17,48	17,75	18,10	18,45	18,75	19,10	19,50	
12	Rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan	%	93,85	93,50	92,80	92,00	91,00	89,50	88,00	
13	Akselerasi pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	2,08	2,60	3,15	3,70	4,20	4,60	5,00	
14	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-7,93	-5,00	-2,50	0,00	1,00	2,00	2,50	
15	Indeks masyarakat digital	Indeks	39,09	40,02	41,35	42,64	43,75	45,56	47,95	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,91	69,00	71,12	73,04	74,06	74,50	75,00	
2	Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	poin	159	157	155	153	151	149	147	
3	Angka Kejadian Konflik Ideologi , Politik , Ekonomi , Sosial Budaya , Pertahanan Dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)	Angka	1	1	1	1	1	1	1	
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,65	3,70	3,75	3,83	3,87	3,95	4,01	
5	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,7	78,50	79,30	80,10	80,90	81,80	82,70	
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,89	2,90	2,92	2,95	2,97	2,99	3,00	
7	Skor EPPD	Angka	2,939	3,015	3,092	3,167	3,246	3,323	3,4	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
9	Indeks Integritas	Poin	66,80	69,00	71,20	73,40	75,60	77,80	80,00	
10	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,026	3,105	3,184	3,263	3,342	3,421	3,500	
11	Nilai MCSP (Monitoring, Controlling & Surveillance for Prevention)	%	69,58	71,25	73,00	74,75	76,50	78,25	80,00	
12	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,98	94,52	97,07	99,62	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	96,23	96,75	97,28	97,81	98,33	98,86	99,39	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	20,33	22,56	24,89	27,22	29,56	31,89	34,22	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,23	96,75	97,28	97,81	98,33	98,86	99,39	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94,66	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92,18	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,32	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	95,34	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,67	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,79	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,31	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	93,52	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90,71	91,15	91,90	92,27	93,10	93,89	94,50	
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	1,11	1,8	2,11	3,11	4,11	5,11	6,11	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	43,52	43,65	44,03	44,41	44,79	45,17	45,55	
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4,40	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	
5	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	84,07	85,87	86,65	87,39	87,98	88,54	89,50	
6	Rasio kepatuhan PBG kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
2	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	0	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten	%	0	2	2	2	2	2	2	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	90,94	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	82,85	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	90	90	90	90	90	90	
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	90	90	90	90	90	90	
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	4,23	5	6	7	8	9	10	
7	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	90	90	90	90	90	90	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	69,05	70,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	
3	Persentase pekerja sosial / Tenaga Kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sosial	%	0	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0	70,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	
5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	0	90	90	90	90	90	90	
7	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	87,63	90	90	90	95	95	95	
8	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	0	80	80	80	85	85	90	
9	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0	30	30	33	36	38	40	
AG 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	1,00	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	32,94	33,10	33,25	33,35	33,45	33,55	3.365	
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	9,79	9,85	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,19	9,19	9,20	9,21	9,22	9,23	9,24	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	28,27	28,57	29,27	29,77	30,27	30,77	31,27	
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	21,28	21,69	22,11	22,54	22,96	23,39	23,81	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	20	20	20	20	20	20	
2	Persentase Penyelesaian Ganti Rugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	0	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	37,28	40,28	43,28	46,28	49,28	52,28	55,28	
2	Cakupan Lokasi yang Dilakukan Pengujian Kualitas Lingkungan	%	100	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100	
3	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	%	15,79	13,16	13,16	16,13	18,18	20,59	22,86	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase RTH	Persentase	100	3	10	15	20	24	28	
5	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	%	100	55	75	80	85	90	95	
6	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	83,72	86,05	88,37	90,70	93,02	95,35	97,67	
8	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	0	100	100	100	0	100	0	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	5	3	3	3	3	3	3	
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	54,49	54,50	54,51	54,52	54,53	54,54	54,55	
4	Perekaman KTP elektronik	%	99,60	99,61	99,62	99,63	99,64	99,65	99,66	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	38,09	39	40	42	44	46	48	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,41	2,41	2,41	2,40	2,40	2,40	2,40	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	14,46	14,96	15,46	15,96	16,46	16,49	17,46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,25	13,25	12,25	11,25	10,25	9,25	8,25	
AO 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1	Persentase Ketertiban dan keselamatan LLAJ	%	0	54	65	7	75	8	85	
2	Persentase peningkatan prasarana dan Perlengkapan jalan yang layak fungsi/kondisiÂ baik	%	0	55	60	65	70	75	80	
3	Persentase Ketertiban dan Keselamatan PenyeberanganÂ danÂ pelayaran	%	0	40	45	50	55	60	65	
AP 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	110	200	200	200	200	200	200	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	110	200	200	200	200	200	200	
AQ 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	80	80,02	80,05	80,07	80,09	80,10	80,10	
2	Persentase UMKM terfasilitasi	%	16,66	16,70	16,80	17,00	17,05	17,10	17,15	
3	Presentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk wilayah keanggotanÂ dalamÂ daerah	%	0	12,5	13,00	13,7	14,1	14,5	14,7	
4	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0,77	1,7	2,1	2,4	2,6	2,8	2,8	
5	Persentase peningkatan koperasi yang aktif	%	0	10	10,5	10,7	10,9	11,01	11,3	
6	Presentase koperasi yang melaksanakanÂ RAT	%	0	12,5	13,00	13,07	14,1	14,5	14,7	
AR 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	91,13	91,14	91,16	91,18	91,20	91,22	91,24	
2	Nilai realisasi investasi	Rp	853.380.889.543	275.000.000.000	302.000.000.000	335.000.000.000	375.000.000.000	425.975.000.000	489.100.000.000	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	6	6	6	7	7	8	8	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	1,77	1,80	1,82	1,85	1,91	1,93	1,96	
3	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan	%	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	0	5	5	5	5	5	5	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	0	0	0	25	25	25	25	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	55,00	56,50	56,60	56,65	56,70	56,75	56,80	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-	%	83,13	83,42	84,01	84,24	85,51	85,94	86,46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan									
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Total fasilitas pengolahan dan pemasar hasil perikanan	Unit	25	3	21	21	21	21	21	
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	46.989	46.740	44.145	45.150	45.800	46.468	47.155	
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	63,70	34,17	34,58	34,99	35,41	35,83	36,37	
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25,118	28,250	25,100	25,150	25,200	25,250	25,300	
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21,871	18,490	19,045	20,000	20,600	21,218	21,855	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,056	0,056	0,057	0,058	0,059	0,060	0,061	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,773	1,773	1,774	1,775	1,776	1,777	1,778	
3	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	-49,32	0,25	0,50	0,75	1	1,25	1,50	
4	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	57,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
5	Tingkat Hunian Wisatawan di Objek Wisata Unggulan	%	11,87	11,87	11,90	11,93	11,96	11,99	12,02	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	Kuintal/Ha	50,71	50,74	50,84	50,94	51,04	51,14	51,24	
2	Jumlah Produksi Daging	Ton	599,15	599,75	600,35	600,95	601,55	602,15	602,75	
3	Jumlah Produksi Telur	Ton	381,48	381,86	382,24	382,62	383,01	383,39	383,77	
4	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabai dan Durian)	Kuintal/Ha	57,81	57,84	58,01	58,19	58,36	58,54	58,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Kelapa dan Cengkeh)	Kuintal/Ha	13,58	13,59	13,60	13,61	13,62	13,63	13,65	
6	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	60	62	64	66	68	70	72	
7	Persentase pelaku usaha peternakan yang memiliki izin/ terverifikasi	%	9,56	10,52	11,57	12,72	14	15,40	16,94	
8	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	4.213,76	4.213,76	4.213,76	4.213,76	4.213,76	4.213,76	
9	Persentasi Area Pertanian yang terlindungi terhadap luas tanam	%	0	7	7	7	7	7	7	
10	Rasio ketersediaan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura	%	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	
11	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-348,10	5	5	5	5	5	5	
12	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	44,3	44,3	45	46	48	49	50	
13	Persentase kelompok peternak yang mengalami peningkatan produktifitas	%	79,76	80,56	81,36	82,18	83	83,83	84,67	
14	Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	3	4	4	4	4	4	4	
15	Persentase pertumbuhan populasi ternak kambing	%	-71,17	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
16	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian	%	10,2	10,4	10,8	11	11,4	11,7	12	
17	Persentase pertumbuhan populasi ternak sapi	%	-35,28	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
18	Rasio ketersediaan bibit tanaman perkebunan	%	0	2	5	5	5	5	5	
19	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh izin usaha	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam	%	-72,43	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
21	Rasio prasarana peternakan yang dimanfaatkan	%	76,47	77,23	78,01	78,79	79,57	80,37	81,17	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
22	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana di bidang peternakan dan kesehatan hewan	%	0	100	100	100	100	100	100	
23	Persentasi Penyuluh Pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	10	7	7	7	7	7	7	
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	87,21	88,02	88,05	88,07	88,10	90,00	90,00	
2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	%	13,30	13,35	13,50	13,70	13,90	14,00	14,00	
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	13,3	13,4	13,5	13,7	13,9	14,0	14,0	
4	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
BD	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	3,21	3,35	3,5	3,65	3,8	3,95	4,10	
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	46,02	42	37,98	33,96	29,94	25,92	21,9	
BE	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	-	90	90	90	90	90	90	
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	90	90	90	90	90	90	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	7,32	7,40	7,45	7,50	7,55	7,60	7,65	
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BF	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	94,08	94,50	95	95,50	96	96,50	97	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,08	42	43	44	45	46	47	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,37	19	20	21	22	23	24	
BG	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	76,65	77,50	79,00	80,50	82,00	83,50	85,00	
2	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,06	3,14	3,22	3,30	3,38	3,46	3,54	



Bab

5

Penutup

BAB 5

PENUTUP

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai selama 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dengan menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah;
- 2) RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

- 3) RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan pembangunan, karena ketidaksesuaian sampai batas tertentu, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran;
- 4) Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran APBD, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 5) Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini, dan harus menyusun Renstra baru;
- 6) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD, perlu dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi gradual sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 7) RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional;
- 8) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- 9) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2029 harus memperhatikan aspek manajemen risiko pembangunan untuk mengantisipasi

berbagai kemungkinan hambatan, ancaman, dan tantangan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Manajemen risiko ini dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mulai dari identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, mitigasi risiko, hingga pemantauan dan pelaporan risiko, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

5.2 PEDOMAN TRANSISI

Masa jabatan Bupati/Wakil Bupati periode 2025-2029 akan berakhir pada tahun 2029, namun untuk menjaga kesinambungan, arah dan kebijakan pembangunan dalam dokumen ini tetap menjadi pedoman pembangunan hingga tahun 2030 (penyusunan RKPD Tahun 2030) untuk mengisi kekosongan hingga kepala daerah baru definitif melanjutkan estafet pembangunan dengan menjalankan RPJMD periode berikutnya.

Bupati Gorontalo Utara,

TTD

Thariq Modanggu